



**MEMPERKUAT  
BISNIS DAN PORTOFOLIO,  
MENINGKATKAN  
KENYAMANAN PENUMPANG**

# Memperkuat Bisnis dan Portofolio, Meningkatkan Kenyamanan Penumpang

PT Angkasa Pura I (Persero) terus berupaya memantapkan jalan untuk menjadi salah satu operator bandara terbaik di Asia dengan memperkuat bisnis dan portofolio. Hal ini dilakukan melalui pembangunan kinerja finansial yang baik, pengembangan bandara baru, peningkatan pelayanan, serta menerapkan standar internasional. Selain itu, Inovasi pelayanan serta fasilitas di bandara baru maupun bandara eksisting menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas pengalaman penumpang.

## Sangkalan

Ini merupakan Laporan Tahunan PT Angkasa Pura I (Persero), untuk selanjutnya disebut "Laporan Tahunan", yang menyajikan data dan informasi mengenai kinerja manajemen dan pelaksanaan tata kelola perusahaan untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 2019. Penggunaan istilah "Angkasa Pura I", "AP I", atau "Perusahaan" di dalam Laporan Tahunan mengacu pada PT Angkasa Pura I (Persero).

Isi Laporan Tahunan disusun berdasarkan sumber data dan informasi internal maupun eksternal yang dianggap perlu diketahui oleh para pemangku kepentingan. Selain memuat data dan informasi yang bersifat historis, para pembaca Laporan Tahunan akan menemukan beberapa kalimat atau pernyataan yang bersifat "pandangan ke depan" atau *forward-looking statement*.

PT Angkasa Pura I (Persero) sangat berhati-hati dalam menyajikan *forward-looking statement* karena berisi gagasan, harapan, cita-cita, tujuan, atau target ke depan.

Meski telah dipertimbangkan dengan matang, PT Angkasa Pura I (Persero) tidak dapat menjamin bahwa pandangan ke depan pasti dapat tercapai karena adanya berbagai faktor risiko yang dapat menghambat atau menghalangi upaya Perusahaan untuk mewujudkan pernyataan-pernyataan tersebut.

Para pembaca Laporan Tahunan ini dapat menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, atau meminta informasi lebih lanjut mengenai PT Angkasa Pura I (Persero) melalui:

**Awaluddin**

Corporate Communication Department

Graha Angkasa Pura I, Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B12 Kav. 2, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610

Telepon : (+62) 21 6541 961

Fax : (+62) 21 6541 514

E-mail : [humas@ap1.co.id](mailto:humas@ap1.co.id)

Untuk Informasi dan keluhan, hubungi 172 atau e-mail [cc172@ap1.co.id](mailto:cc172@ap1.co.id)



## Kesinambungan Tema



# 2018

### SEMakin MANTAP MEMASUKI STANDAR KELAS DUNIA

Bandara-bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) menjadi salah satu bandara terbaik di Asia bahkan dunia. Misalnya Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali yang menjadi bandara terbaik di Asia-Pasifik dan terbaik di dunia kategori bandara berpenumpang 15-25 juta orang per tahun, serta Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan sebagai bandara terbaik kedua di dunia dan Bandara Juanda Surabaya bandara terbaik ketiga di dunia pada kategori bandara berpenumpang 5-15 juta orang per tahun dalam ASQ Awards 2017 - Airports Council International (ACI).

# 2017

### BANGGA MELAYANI BANGSA

PT Angkasa Pura I (Persero) terus meningkatkan kualitas pelayanan di bandara-bandara yang dikelolanya dan mendukung program pemerintah dalam membangun konektivitas udara serta mendorong kunjungan wisata. Sejumlah langkah yang dilakukan antara lain inovasi pelayanan di terminal, penerapan *smart airport*, digitalisasi proses bisnis perusahaan, dan percepatan pembangunan dan pengembangan tiga bandaranya yang masuk ke dalam proyek strategis nasional.



## 2016

### MEMBANGUN KEBANGGAAN BANGSA MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AIRPORT

Sesuai visi “Menjadi Satu dari Sepuluh Perusahaan Pengelola Bandara Terbaik di Asia”, Perseroan mengubah paradigma bisnis menjadi *service company* yang berorientasi pada peningkatan kualitas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa bandara melalui pendekatan *smart airport*. PT Angkasa Pura I (Persero) juga berperan untuk mengakselerasi penciptaan daya saing dan strategi ekonomi domestik (*center of regional development*) yang mendukung pengembangan ‘*catchment area*’ sesuai dengan konsep integrasi tol, laut, dan konektivitas udara.



## 2015

### PENGEMBANGAN PERUSAHAAN PENGELOLA BANDAR UDARA BERKINERJA TINGGI

Sesuai dengan *roadmap* Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2014-2018, Perseroan meningkatkan kinerja tahun 2015 melalui berbagai *strategic action*, antara lain menyempurnakan penerapan *service* dan *operation excellence*, meningkatkan efektifitas dan efisiensi biaya, mengoptimalkan seluruh potensi sinergi secara internal dan eksternal, serta mempercepat dan memperbesar penciptaan nilai melalui kemitraan strategis.



# Kilas Kinerja

## Keunggulan Kami



# 01

## Perusahaan Pelopor Pengelolaan Bandar Udara secara Komersial di Indonesia

Sejalan dengan visinya menjadi pengelola bandara kelas dunia, PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan berbagai inovasi dan berhasil meraih pencapaian serta penghargaan bagi bandara yang dikelola, antara lain:

1. Bandara terbaik di Asia-Pasifik kategori jumlah penumpang 5-15 juta orang per tahun
2. Best Companies to Work for in Asia 2019 - Indonesia Chapter
3. Penghargaan Tata Kelola BUMN Terbaik I

# 02

## Pengelola Bandar Udara Utama yang Berada di Pusat Bisnis dan Pariwisata Indonesia

PT Angkasa Pura I (Persero) mengelola bandara-bandara yang berlokasi strategis di pusat bisnis, antara lain Surabaya dan Makassar, serta kawasan pariwisata seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Manado.



## 03 Komitmen yang Tinggi dalam Menerapkan *Information and Communication Technology* Kelas Dunia

PT Angkasa Pura I (Persero) memiliki komitmen yang tinggi dalam menerapkan *Information and Communication Technology* (ICT) kelas dunia. Komitmen tersebut diwujudkan oleh Angkasa Pura I dengan merumuskan strategi teknologi informasi, meliputi strategi *operation excellence*, *revenue safeguarding*, penguatan fondasi *enterprise resource planning* (ERP), dan penguatan fondasi ICT.

Strategi *operation excellence* merupakan strategi penguatan teknologi komunikasi untuk mendukung jalannya proses bisnis perusahaan yang andal. Strategi ini diwujudkan melalui penerapan *Airport Operation Control System* (AOCS) di seluruh bandara. Selain itu, untuk mendukung implementasi dari strategi ini, Angkasa Pura I juga telah melakukan berbagai inovasi di tahun 2017, yakni program “SATU Aplikasi untuk Prestasi”. Inovasi “SATU Aplikasi untuk Prestasi” memungkinkan penerapan layanan otomasi perkantoran *Office Collaboration Platform* (OCP) berbasis digital, Tata Naskah Dokumen Elektronik (TNDE), dan Angkasa Pura I *e-Learning* (APel) untuk peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan kompetensi seluruh personel Angkasa Pura I.

Strategi *revenue safeguarding* merupakan upaya pemanfaatan pencapaian teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung *revenue safeguarding*. Angkasa Pura I mewujudkan



strategi ini melalui pemanfaatan ICT yang berhubungan dengan jasa layanan, antara lain meliputi *Passenger Service Charge on Ticket System* (POTS) dan *parking system*. Sejalan dengan penerapan inovasi dan pemanfaatan dalam jasa layanan tersebut, Angkasa Pura I telah menambahkan fasilitas layanan wi-fi gratis dengan *bandwidth up to 100 MB per access point* dan peluncuran *mobile apps* yang dapat diunduh di Apple Store dan Google Playstore melalui personalisasi layanan (*personalized service*). Penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut merupakan langkah awal dari implementasi konsep *smart airport* yang dapat dinikmati oleh pengguna jasa di 14 (empat belas) bandara yang dapat meningkatkan indeks kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction Index/CSI*) bandara.

PT Angkasa Pura I (Persero) mewujudkan strategi penguatan fondasi ERP melalui integrasi sistem keuangan antara Entitas Anak dengan Induk untuk menghasilkan Laporan Keuangan



Konsolidasi yang akurat dan tepat waktu pengembangan SAP (BPC dan *Enterprise Asset Management*), serta *integrasi legacy application* dengan ERP platform menggunakan *service-bus*.

Strategi penguatan fondasi ICT diwujudkan oleh

Angkasa Pura I melalui penerapan standardisasi infrastruktur ICT (LAN, WAN, *communication*, wi-fi, dan *server*), ICT *governance*, dan pemenuhan kebutuhan SDM terkait sertifikasi, *training*, dan jumlah personel yang dibutuhkan.



## 04 Komitmen yang Tinggi terhadap Implementasi *Safety, Security, and Service through Compliance (3S1C)*

PT Angkasa Pura I (Persero) menjamin penerapan *Safety, Security, and Service through Compliance (3S1C)* yang penting bagi industri pengelolaan bandara. Program 3S1C dilaksanakan dengan tujuan terselenggaranya kepatuhan pelayanan yang andal dengan mengutamakan faktor keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran, serta sesuai dengan hak dan kewajibannya. Angkasa Pura I telah menerapkan program tersebut mulai dari pintu gerbang, tempat parkir, dan tempat umum yang ada di bandara.

Penerapan 3S1C oleh Angkasa Pura I telah mencapai *beyond regulation*, sebab telah melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan keselamatan bandara yang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan standar internasional. Implementasi 3S1C terlihat dari pencapaian skor *Airport Service Quality (ASQ)* yang dinilai oleh lembaga

Airports Council International (ACI) dengan rata-rata nilai di atas 4,5 pada empat bandara. Selain itu, skor *Customer Satisfaction Index* (CSI) yang dinilai oleh lembaga Indonesia National Air Carriers Association (INACA) pada 13 bandara mencapai rata-rata di atas 4. Angkasa Pura I juga telah memperoleh beberapa sertifikasi dalam menyediakan *operational excellence* dan *service excellence*, antara lain ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, *Airport Excellence in Safety*, OHSAS 18001:2007, dan ISO 31000.

Implementasi *3SIC beyond regulation* melibatkan beberapa bagian dalam manajemen Angkasa Pura I. Tugas dan tanggung jawab tiap-tiap bagian dalam implementasi *3SIC* dijelaskan sebagai berikut:

### AIRPORT COMPLIANCE AND RISK MANAGEMENT

Memastikan proses bisnis Angkasa Pura I berlangsung dengan tingkat risiko yang dapat diterima melalui proses *compliance* dan *risk management* guna mendukung tercapainya sasaran kerja sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta melaksanakan kepatuhan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan peraturan internal Perusahaan.

### AIRPORT PLANNING

Memastikan tersedianya data terkait *airport statistics*, *airport master plan*, dan *environment* melalui analisis dan kajian bisnis guna mendukung tercapainya strategi Angkasa Pura I sesuai kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh regulator.

### AIRPORT SECURITY

Memastikan efektivitas pelayanan bidang *airport security* melalui program peningkatan kualitas dan keandalan sumber daya manusia guna

mendukung tercapainya *Customer Satisfaction Index* (CSI) seluruh bandara sesuai dengan standar aturan nasional dan internasional.

### AIRPORT SAFETY

Memastikan terjaganya pencapaian *safety level* dan kualitas pelayanan melalui pengelolaan kegiatan *safety management system*, *occupational safety health*, serta *quality management* yang efektif guna mendukung pencapaian *Customer Satisfaction Index* (CSI).

### AIRPORT FACILITIES AND MAINTENANCE

Memastikan seluruh fasilitas bandara yang meliputi sisi udara (*air side*), sisi darat (*land side*), *landscape*, dan *terminal building* yang dikelola Angkasa Pura I siap untuk digunakan guna mendukung tercapainya *Customer Satisfaction Index* (CSI).

### AIRPORT EQUIPMENT

Memastikan tersedianya kesiapan operasional seluruh peralatan (*equipment*) bandara yang dikelola Angkasa Pura I dan tersedianya dukungan implementasi guna mendukung tercapainya *Customer Satisfaction Index* (CSI).

### AIRPORT SERVICES AND HOSPITALITY

Memastikan pelayanan bidang *airport services* dan *hospitality* yang efektif melalui peningkatan kualitas dan kehandalan sumber daya manusia guna mendukung peningkatan bidang pelayanan dan jaminan kualitas, serta tercapainya *Customer Satisfaction Index* (CSI) seluruh bandara sesuai dengan standar aturan nasional dan internasional.





## 05 Memberikan Kontribusi Positif bagi Masyarakat dan Lingkungan Hidup

PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan pemberdayaan masyarakat melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di dalam maupun luar wilayah bandara. Angkasa Pura I juga menetapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta pelaporan pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu *Key Performance Indicator* (KPI) pada masing-masing bandara. Konsistensi Perusahaan menerapkan konsep *green corporation* ditandai dengan sertifikasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2015, sertifikasi *green ship* dari Green Building Council Indonesia (GBCI), serta akreditasi Airport Carbon Accreditation (ACA) dari Airports Council International (ACI).

# Daftar Isi

	Tema
	Kesinambungan Tema
<b>13</b>	<b>KILAS KINERJA</b>
13	Ikhtisar Kinerja Usaha Tahun 2019
14	Ikhtisar Data Keuangan Penting
20	Informasi Saham
21	Informasi Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi
25	Laporan Dewan Komisaris
29	Laporan Direksi



<b>34</b>	<b>PROFIL PERUSAHAAN</b>
36	Profil Singkat
38	<i>Brand</i> Perusahaan
39	Riwayat Singkat Perusahaan
42	Jejak Langkah
45	Peristiwa Penting di Tahun 2019
49	Visi dan Misi serta Budaya Perusahaan
51	Kegiatan Usaha
61	Inovasi dan Kewirausahaan
66	Struktur Organisasi
68	Profil Dewan Komisaris
74	Profil Direksi
82	Profil Pejabat Eksekutif
95	Sumber Daya Manusia
101	Komposisi Pemegang Saham
102	Entitas Anak, Entitas Asosiasi, dan Yayasan
116	Kronologi Penerbitan Saham
124	Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya
126	Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

128	Struktur Grup Perusahaan
129	Penghargaan dan Sertifikasi
146	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen
165	Akses Informasi dan Informasi di Website Perusahaan
166	Nama dan Alamat Kantor Pusat, Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Yayasan, dan Kantor Cabang



<b>170</b>	<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN</b>
172	Tinjauan Makro dan Industri
177	Tinjauan Kinerja Operasional
182	Aspek Pemasaran
188	Kinerja Per Segmen Operasi
198	Tinjauan Keuangan
234	Struktur Modal
235	Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal
236	Realisasi Investasi Barang Modal
236	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, Atau Restrukturisasi Hutang Dan Modal
238	Pencapaian Target Dan Target Ke Depan
245	Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan
247	Kebijakan, Pengumuman Dan Pembayaran Dividen
248	Program Kepemilikan Saham
249	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
253	Informasi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan Dan/Atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi
254	Informasi Kelangsungan Usaha
254	Pengungkapan Pajak
256	Kinerja Entitas Anak





## 263 TATA KELOLA PERUSAHAAN

264	Kerangka dan Struktur Tata Kelola
266	Rapat Umum Pemegang Saham
293	Dewan Komisaris
309	Direksi
330	Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
332	Penilaian Penerapan Tata Kelola
336	Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
340	Pengungkapan Pemegang Saham
341	Hubungan Afiliasi
343	Sekretaris Dewan Komisaris
344	Komite Audit
353	Komite Risiko Usaha dan <i>Good Corporate Governance</i>
365	Komite Nominasi dan Remunerasi
367	Sekretaris Perusahaan
370	Komite Audit Internal
377	Komite Manajemen Risiko
379	Manajemen Risiko
383	Sistem Pengendalian Internal
387	Akuntan Publik
389	Perkara Penting
393	Sanksi Admnistratif
393	Kode Etik
396	Sistem Pelaporan Pelanggaran ( <i>Whistleblowing System</i> )
401	Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan OJK

## 406 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

408	Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial
414	Operasi yang Adil
417	Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM)
420	Lingkungan Hidup
425	Ketenagakerjaan
432	Konsumen
456	Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

## 472 REFERENSI SILANG SURAT EDARAN OJK NO.30/SEOJK.04/2016

## 485 KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD

## 498 LEMBAR TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN

## 500 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

# Ikhtisar Kinerja Usaha Tahun 2019

Pendapatan Aeronautika



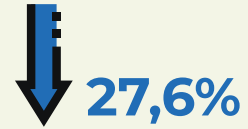
menjadi  
**Rp4,98 triliun**

Pendapatan Nonaeronautika



menjadi  
**Rp3,66 triliun**

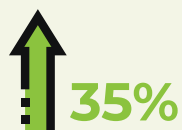
Laba Tahun Berjalan



menjadi  
**Rp1,45 triliun**



Total Aset



menjadi  
**Rp42,7 triliun**

Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)



menjadi  
**25 juta ton**

Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)



menjadi  
**35,8 juta pax**

# Ikhtisar Data Keuangan Penting

## Ikhtisar Keuangan

Ikhtisar Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	2017	2016	2015
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN</b>					
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas	5.510.904	3.149.114	4.146.086	4.896.215	1.746.273
Investasi jangka pendek	665.862	478.107	407.156	295.241	216.447
Piutang usaha	527.767	509.909	520.295	482.770	571.171
Piutang lain-lain	83.344	39.712	19.053	12.445	128.562
Persediaan	69.404	84.808	68.668	40.617	36.359
Uang muka dan beban dibayar di muka	139.960	159.381	72.003	63.696	23.978
Pendapatan yang masih harus diterima	291.022	298.444	225.606	201.227	208.419
Pajak dibayar dimuka	840.958	367.865	105.569	82.242	150.836
Aset lancar lainnya	64.277	28.267	13.396	10.249	8.076
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>8.190.498</b>	<b>5.115.606</b>	<b>5.557.832</b>	<b>6.084.701</b>	<b>3.090.122</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					
Estimasi Tagihan Pajak	112.711	-	-	-	-
Aset pajak tangguhan	48.495	41,58	83.863	302	1.413
Piutang jangka panjang	89	504	1,514	700	-
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka Jangka Panjang	12.665	34.322	52.741	78.217	-
Investasi jangka panjang	109.819	100.662	86.642	96.129	129.660
Obligasi	25.347	13.361	-	7.455	37.340
Penyertaan saham pada entitas asosiasi	84.472	87.301	86.300	88.333	91.978
Kerja sama operasi	-	-	86.642	342	342
Properti investasi	128.888	127.065	247.036	200.785	149.845
Aset tetap	34.127.911	26.139.593	18.627.786	17.155.509	13,304,090
Aset tidak berwujud	43.466	42.322	48.998	44.244	45.373
Aset tidak lancar lainnya	12.097	7.074	6.227	6.358	1.835
Aset lain-lain	-	-	-	-	1.490.586
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>34.596.053</b>	<b>16.493.309</b>	<b>19.154.808</b>	<b>17.582.245</b>	<b>13.632.216</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>42.786.551</b>	<b>31.608.916</b>	<b>24.732.641</b>	<b>23.666.946</b>	<b>16.722.337</b>



## Ikhtisar Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	2017	2016	2015
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>					
Biaya yang masih harus dibayar	1.322.288	1.412.039	1.379.558	879.355	599.103
Utang usaha	314.867	689.341	250.777	1.591.610	692.672
Utang non usaha	403.363	10.580	1.553	16.626	53.771
Pendapatan diterima dimuka	128.332	147.263	97.658	87.481	88.640
Utang pajak	425.502	393.236	267.746	138.441	169.635
Bagian jangka pendek pinjaman jangka panjang	158.011	941.998	644.220	749.480	590.1569
Bagian lancar utang sewa guna usaha	-	-	-	3.671	2.611
Utang Lain-lain	2.889.176	1.787.220	1.230.630	505.126	518.323
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>6.180.789</b>	<b>7.614.989</b>	<b>3.948.861</b>	<b>3.871.792</b>	<b>2.704.914</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					
Utang bank jangka panjang	16.724.208	5.385.997	3.665.694	4.304.115	2.474.585
Utang jaminan	287.018	-	-	49.448	37.081
Utang obligasi dan sukuk ijarah	2.994.896	2.993.701	2.992.475	2.991.310	-
Utang sewa pembiayaan	-	-	-	4,617	8.651
Utang jangka panjang lainnya	101.953	170.529	174.905	167.636	121.216
Liabilitas imbalan pasca kerja	437.293	302.395	549.244	329.980	346.841
Liabilitas pajak tangguhan	79.886	89,080	-	-	-
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>20.625.255</b>	<b>8.941.701</b>	<b>7.382.318</b>	<b>7.797.657</b>	<b>2.988.373</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>26.806.043</b>	<b>16.556.690</b>	<b>11.650.349</b>	<b>11.669.449</b>	<b>5.693.287</b>
<b>EKUITAS</b>					
Modal saham	6.414.412	6.414.412	6.414.412	6.414.412	6.414.412
Setoran modal lainnya:					
Penyertaan modal negara	22.963	22.963	255.097	255.097	-
Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya (bpybds)	-	-	-	-	255.097
Pengalihan aset tetap kenavigasian:					
Nilai buku aset tetap kenavigasian	(37.005)	(37.005)	(269,38)	(269.138)	(269.138)

## Ikhtisar Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	2017	2016	2015
Akumulasi penyusutan aset tetap kenavigasian dari bpybds	408.393	408.393	408.393	408.393	408.393
Penghasilan komprehensif lain:					
Laba yang belum direalisasi atas efek	68.044	55.751	58.521	40.144	24.016
Laba (rugi) aktuarial imbalan kerja	(130.080)	(48.987)	110.823	(93.019)	(54.229)
Saldo laba:					
Dicadangkan	7.774.022	6.228.618	5.093.757	4.080.412	3.407.178
Laba tahun berjalan	1.451.360	2.007.018	1.418.577	1.158.800	841.543
Kepentingan non pengendali	5.498	4.863	6.298	2.395	1.778
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>15.980.508</b>	<b>15.052.225</b>	<b>13.401.461</b>	<b>11.997.497</b>	<b>11.029.049</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>42.786.551</b>	<b>31.608.917</b>	<b>25.051.810</b>	<b>23.666.946</b>	<b>16.722.337</b>
<b>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN</b>					
PENDAPATAN / PENJUALAN					
Pendapatan aeronautika	4.975.936	5.113.648	4.525.855	3.612.288	3.155.237
Pendapatan non aeronautika	3.655.610	3.407.439	2.668.492	2.525.984	2.094.393
TOTAL PENDAPATAN USAHA	8.631.546	8.521.087	7.194.347	6.138.272	5.249.630
BEBAN OPERASIONAL	5.937.866	5.762.646	5.206.917	4.488.862	3.955.670
LABA USAHA / LABA BRUTO	2.693.680	2.916.795	1.974.492	1.649.409	1.293.960
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	670.896	(93.733)	(81.489)	(14.557)	(211.217)
LABA SEBELUM TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	2.022.784	2.694.934	1.789.497	1.508.853	1.082.742
PAJAK PENGHASILAN	570.557	689.016	369.144	349.276	240.769
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	1.452.227	2.005.918	1.420.353	1.159.577	841.973
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN					
Laba (rugi) belum terealisasi investasi efek	12.293	(2.770)	18.377	16.128	(20.816)
Laba (rugi) aktuarial dari program imbalan paska kerja	(80.524)	(66.783)	110.824	(38.790)	(98.962)
Laba (rugi) Komprehensif Entitas Asosiasi	(2.466)	(1.551)			
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.381.530	1.934.254	1.547.292	1.136.916	722.195

## Ikhtisar Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	2017	2016	2015
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>					
Pemilik entitas induk	1.451.360	2.007.018	1.418.577	1.158.800	841.543
Kepentingan non pengendali	867	(1.100)	1.776	777	430
<b>LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>					
Pemilik entitas induk	1.380.673	1.935.914	1.545.517	1.136.139	721.765
Kepentingan non pengendali	857	(1.100)	1.776	777	430
Laba (Rugi) per saham dasar (angka penuh)	226.265	312.892	221.155	181.000	131.000
<b>ARUS KAS KONSOLIDASIAN</b>					
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	1.549.272	3.028.461	1.479.078	2.061.396	802.663
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(9.795.788)	(5.852.267)	(1.712.941)	(3.710.543)	(1.260.227)
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	10.581.807	1.773.067	(481.794)	4.811.652	705.990
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	2.361.790	(996.972)	(750.129)	3.162.504	248.425
Pengaruh selisih kurs	26.499	53.767	(34.472)	(12.562)	145.587
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	3.149.114	4.146.086	4.896.215	1.746.272	1.352.260
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	5.510.904	3.149.114	4.146.086	4.896.215	1.746.273
<b>RASIO KEUANGAN</b>					
<b>RENTABILITAS*</b>					
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Jumlah Aset	31,21%	34,23%	27,45%	26,87%	24,65%
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Ekuitas	6,30%	6,35%	4,49%	4,90%	5,04%
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Pendapatan	69,08%	68,77%	71,94%	73,13%	75,35%
Rasio Laba (Rugi) Operasi Terhadap Pendapatan	57,77%	13,33%	10,60%	9,67%	7,63%
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Pendapatan	16,21%	23,54%	19,74%	18,89%	16,04%
<b>LIKUIDITAS</b>					
Rasio Lancar	132,52%	67,18%	141,25%	157,15%	114,24%
Rasio Kas	99,93%	41,35%	104,99%	126,46%	64,56%



## Ikhtisar Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	2017	2016	2015
<b>SOLVABILITAS**</b>					
Rasio Liabilitas Terhadap Aset	62,65%	52,38%	45,81%	49,31%	34,05%
Rasio Liabilitas Terhadap Modal	167,74%	109,99%	84,55%	97,27%	51,62%
Rasio Liabilitas Terhadap Aset Tetap	77,48%	63,34%	60,83%	67,23%	42,32%

## Catatan:

- \* Laba (rugi) yang dimaksud pada perhitungan rasio-rasio rentabilitas yaitu laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
- \*\* Liabilitas yang dimaksud pada perhitungan rasio-rasio solvabilitas yang termasuk liabilitas pajak tangguhan dan imbalan pasca kerja

## Ikhtisar Operasional

## Kinerja Operasional Segmen Kemandaraan (Aeronautika)

(dalam jutaan Rupiah)

Produk	Satuan Unit	2019	2018	2017	2016	2015
Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4AU)	Ton	25.016.634	28.681.347	28.098.099	27.956.662	25.572.859
Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)	Pax	35.755.591	42.349.974	40.078.358	38.021.607	33.016.975
Pemakaian <i>Aviobridge</i>	Ton	28.302.004	30.253.959	28.166.989	28.055.433	26.445.957
Pemakaian <i>Counter</i>	Pax	35.640.003	42.242.630	39.906.428	38.069.196	37.555.129
Baggage <i>Handling System</i>	Pax	528*	979.580	5.699.259	7.409.001	7.088.941

## Catatan:

- \* komponen tarif BHS/HBS sudah dimasukkan ke dalam komponen tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)

## Kinerja Operasional Segmen Non Bandara (Non Aeronautika)

(dalam jutaan Rupiah)

Produk	Satuan Unit	2019	2018	2017	2016	2015
Sewa	M <sup>2</sup> x Bulan	9.488.436	7.490.291	8.542.321	12.191.641	6.225.618
Konsensi	Rp/000	26.023.806.416	27.88.233.723	9.570.569.203	7.959.339.881	5.821.685.310
Parkir Mobil	Lembar	28.264.917	33.371.374	29.096.030	25.970.943	22.669.408
Parkir Motor	Lembar	10.455.258	11.232.860	9.762.063	9.540.777	7.322.029

Kinerja Operasional Segmen Non Bandara (*Non Aeronautika*)

(dalam jutaan Rupiah)

Produk	Satuan Unit	2019	2018	2017	2016	2015
Peron dan <i>Waving Gallery</i>	Lembar	50.597	-	-	-	402.301
Pemakaian Listrik	Kwh	43.807.615	52.675.053	45.850.618	41.971.642	29.151.481
Pemakaian Air	M <sup>3</sup>	626.363	525.845	495.704	387.203	264.063
Pemakaian Telepon	Pwt x Bulan	18.423	20.702	21.391	20.432	16.511
<i>Internet Services</i>	Kilobyte	1.228	994	854	829	445.466
Sewa Tempat Reklame	M <sup>2</sup> x Bulan	76.674	31.860	20.768	36.240	58.24
<i>Event Promotion</i>	EA	9.971	3.679	7.650	2.111	1.265
<i>Lounge</i>	Pax	197.788	295.891	575.135	772.953	716.962
Konsesi <i>General Aviation Terminal (GAT)</i>	Rp/000	-	-	15.111.387	22.927.769	23.932.072
<i>Maintenance and Service Fee</i>	EA	5.474	13.711	21.426	44.670	4.146
<i>Warehousing</i>	Kg	91.179.716	86.754.808	238.361.160	96.201.465	64.600.511



# Informasi Saham dan Obligasi

## Informasi Saham

### 1. Saham

Sampai dengan akhir tahun pelaporan tanggal 31 Desember 2019, PT Angkasa Pura I (Persero) tidak memiliki status perusahaan terbuka dan tidak melakukan pencatatan saham di bursa efek, sehingga Laporan Tahunan ini tidak memuat data dan informasi 2 (dua) tahun buku terakhir mengenai jumlah harga saham, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah, harga saham penutupan, serta volume perdagangan pada bursa efek.

### 2. Aksi Korporasi

Sepanjang tahun 2019, tidak ada aksi korporasi yang dilakukan PT Angkasa Pura I (Persero), seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham. Dengan demikian, Laporan Tahunan ini tidak menyajikan data dan informasi mengenai tanggal pelaksanaan aksi korporasi, rasio pemecahan saham (*stock split*), rasio penggabungan saham (*reverse stock*), rasio dividen saham, rasio saham bonus, dan perubahan nilai saham, serta harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.

### 3. Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Hingga akhir periode Laporan Tahunan, PT Angkasa Pura I (Persero) belum pernah memperdagangkan sahamnya di bursa efek. Dengan demikian, dalam Laporan Tahunan ini tidak ada data dan informasi mengenai penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) beserta penjelasan alasannya, dan tindakan yang dilakukan Perusahaan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) tersebut.







## Informasi Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi

### 1. Informasi Obligasi

Per akhir tahun 2019, PT Angkasa Pura I (Persero) memiliki obligasi yang masih beredar di masyarakat yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 November 2016 untuk jangka waktu lima, tujuh dan sepuluh tahun. Angkasa Pura I menunjuk PT Bank Mega Tbk. sebagai wali amanat untuk seluruh obligasi tersebut. Tabel berikut menyajikan data dan informasi mengenai obligasi Angkasa Pura I yang masih beredar per 31 Desember 2019.

#### Obligasi PT Angkasa Pura I (Persero) yang Masih Beredar per 31 Desember 2019

##### Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri A

**Tanggal Distribusi Elektronik di Bursa Efek**

22 November 2016

**Tingkat Suku Bunga**

8.10%

**Tanggal Pencatatan di Bursa Efek**

23 November 2016

**Status Pembayaran**

Belum Lunas

**Tenor**

5 Tahun

**Peringkat**

**2019**  
**idAAA**

**2018**  
**idAAA**

**Mata Uang**

Rp

**Jumlah Obligasi (miliar)**

622

**Wali Amanat**

PT Bank Mega,Tbk

**Tanggal Jatuh Tempo**

22 November 2021

### Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri B

**Tanggal Distribusi Elektronik di Bursa Efek**

22 November 2016

**Tanggal Pencatatan di Bursa Efek**

23 November 2016

**Tenor**

7 tahun

**Mata Uang**

Rp

**Jumlah Obligasi (miliar)**

389

**Tanggal Jatuh Tempo**

22 November 2023

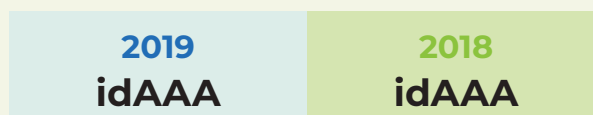
**Tingkat Suku Bunga**

8.40%

**Status Pembayaran**

Belum Lunas

**Peringkat**



**Wali Amanat**

PT Bank Mega,Tbk

### Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri C

**Tanggal Distribusi Elektronik di Bursa Efek**

22 November 2016

**Tanggal Pencatatan di Bursa Efek**

23 November 2016

**Tenor**

10 tahun

**Mata Uang**

Rp

**Jumlah Obligasi (miliar)**

1,489

**Tanggal Jatuh Tempo**

22 November 2023

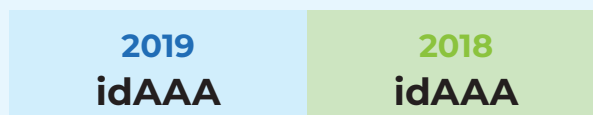
**Tingkat Suku Bunga**

8.55%

**Status Pembayaran**

Belum Lunas

**Peringkat**



**Wali Amanat**

PT Bank Mega,Tbk



2. Informasi Sukuk

Penerbitan Sukuk dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) pada 22 November 2016 dengan tenor lima, tujuh dan sepuluh tahun. Saat ini, seluruh Sukuk masih beredar di masyarakat dengan total jumlah Sukuk sebesar Rp500 miliar. Tabel mengenai status Sukuk Angkasa Pura I per 31 Desember 2019 dapat dilihat sebagai berikut.

**Sukuk Angkasa Pura I yang Masih Beredar per 31 Desember 2019**

**Sukuk Ijarah Seri A**

**Tanggal Distribusi Elektronik di Bursa Efek**

22 November 2016

**Cicilan Imbalan Ijarah Per Tahun (dalam juta)**

21,708

**Tanggal Pencatatan di Bursa Efek**

10 November 2016

**Status Pembayaran**

Belum Lunas

**Tenor**

5 Tahun

**Peringkat**

<b>2019</b> <b>idAAA(sy)</b>	<b>2018</b> <b>idAAA(sy)</b>
---------------------------------	---------------------------------

**Mata Uang**

Rp

**Jumlah Sukuk (miliar)**

268

**Wali Amanat**

PT Bank Mega Tbk.

**Tanggal Jatuh Tempo**

22 November 2021



### 3. Informasi Obligasi Konversi

Hingga 31 Desember 2019, PT Angkasa Pura I (Persero) belum menerbitkan obligasi konversi, sehingga Laporan Tahunan ini tidak memiliki data dan informasi mengenai obligasi konversi yang masih beredar di masyarakat.

#### Sukuk Ijarah Seri B

##### Tanggal Distribusi Elektronik di Bursa Efek

22 November 2016

##### Tanggal Pencatatan di Bursa Efek

10 November 2016

##### Tenor

7 Tahun

##### Mata Uang

Rp

##### Jumlah Obligasi (miliar)

55

##### Tanggal Jatuh Tempo

22 November 2023

##### Cicilan Imbalan Ijarah Per Tahun (dalam juta)

4,620

##### Status Pembayaran

Belum Lunas

##### Peringkat

**2019**  
**idAAA(sy)**

**2018**  
**idAAA(sy)**

##### Wali Amanat

PT Bank Mega,Tbk

#### Sukuk Ijarah Seri C

##### Tanggal Distribusi Elektronik di Bursa Efek

22 November 2016

##### Tanggal Pencatatan di Bursa Efek

10 November 2016

##### Tenor

10 Tahun

##### Mata Uang

Rp

##### Jumlah Obligasi (miliar)

55

##### Tanggal Jatuh Tempo

22 November 2026

##### Cicilan Imbalan Ijarah Per Tahun (dalam juta)

15,133

##### Status Pembayaran

Belum Lunas

##### Peringkat

**2019**  
**idAAA(sy)**

**2018**  
**idAAA(sy)**

##### Wali Amanat

PT Bank Mega,Tbk

# Laporan Dewan Komisaris

## *Para pemangku kepentingan*

PT Angkasa Pura I (Persero)  
yang terhormat,

Setiap tahun,  
Angkasa Pura I menerbitkan Laporan  
Tahunan sebagai salah satu bentuk  
komitmen untuk menerapkan  
tata kelola perusahaan yang baik  
atau *good corporate governance*  
(GCG). Ini merupakan pengantar  
dari Dewan Komisaris atas Laporan  
Tahunan perseroan untuk periode  
1 Januari hingga 31 Desember 2019,  
yang bertema “Memperkuat Bisnis  
dan Portofolio, Meningkatkan  
Kenyamanan Penumpang”.



**Djoko Sasono**  
Komisaris Utama

## Penilaian terhadap Pengelolaan Perusahaan dan Kinerja Direksi

Dewan Komisaris mengapresiasi berbagai kebijakan dan kepemimpinan Direksi untuk terus meningkatkan kinerja keuangan dan operasional PT Angkasa Pura I (Persero). Pada tahun 2019, meski menghadapi berbagai tantangan, berbagai kinerja yang memuaskan dapat menunjukkan bahwa Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan perseroan dengan baik.

Angkasa Pura I telah menyelesaikan proyek pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo dan Proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin. Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo telah dioperasikan pada tanggal 6 Mei 2019. Kemudian, terminal baru Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2019. Sejalan dengan itu, aset tetap Angkasa

Pura I meningkat dari Rp26,1 triliun di tahun 2018 menjadi Rp34,1 triliun di tahun 2019. Kedua proyek bandara tersebut didanai melalui mekanisme pendanaan dari obligasi, sukuk dan perbankan.

Dalam hal kinerja operasional dan keuangan, Angkasa Pura I mencatat pertumbuhan pendapatan usaha sebesar Rp8,5 triliun di tahun 2018 menjadi Rp8,6 triliun di tahun 2019. Meski pendapatan segmen aeronautika menurun, pendapatan segmen nonaeronautika dapat menutupi penurunan tersebut. Dewan Komisaris menilai strategi ini sangat tepat di tengah perubahan perilaku pengguna jasa penerbangan saat ini yang mengutamakan keamanan, kenyamanan dan *excellence customer experience*.

## Pengawasan terhadap Implementasi Strategi

Saat ini Angkasa Pura I telah memiliki visi perusahaan yang baru, yang lebih "*going global and network minded*", serta lebih mengangkat kultur ke-Indonesia-an sebagai kekuatan layanan operasional di bandara-bandara yang dikelola oleh Perseroan. Dewan Komisaris mengapresiasi visi '*Connecting the World Beyond Airports Operator with Indonesian Experience*' yang didedikasikan untuk mewujudkan bandara-bandara Angkasa Pura I menjadi bandara yang lebih melayani.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Angkasa Pura I menjalankan empat *winning strategies*, yaitu *service excellence and compliance*, *revenue enhancement*, *cost and risk management*, dan *socioeconomically responsible green corporation*. Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris terus melakukan pengawasan dan berkomunikasi dengan Direksi terkait penerapan strategi korporat. Dewan Komisaris secara umum menilai penerapan strategi Angkasa Pura I sudah tepat sasaran dan berjalan efektif meski masih perlu terus untuk ditingkatkan lagi.

Salah satu upaya Angkasa Pura I untuk mengelola kinerja *service excellence* yaitu dengan mengukur *Customer Satisfaction Index* (CSI). Pada tahun 2019, Angkasa Pura I memiliki realisasi CSI sebesar 4,48 dari nilai tertinggi 5,00. Kemudian, dalam hal *revenue enhancement*, Angkasa Pura I berhasil meningkatkan pendapatan nonaeronautika dari Rp3,4 triliun di tahun 2018 menjadi Rp3,6 triliun di tahun 2019. Peningkatan tersebut dapat mengompensasi pertumbuhan negatif pendapatan aeronautika dari Rp5,1 triliun di tahun 2018 menjadi Rp4,9 triliun di tahun 2019.

Seiring dengan pergeseran bisnis global yang semakin ramah lingkungan, Angkasa Pura I mengimplementasikan strategi *socioeconomically responsible green corporation* melalui inisiatif *eco-airport*, program pemberdayaan masyarakat, dan *green corporation*. Beberapa bandara Angkasa Pura I telah mendapatkan sertifikasi *green ship* dari Green Building Council Indonesia (GBCI), yaitu di Bandara Jenderal Ahamad Yani Semarang, Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

## Penilaian Prospek Usaha

Dalam jangka menengah dan panjang, Dewan Komisaris tetap optimis terhadap prospek usaha Angkasa Pura I, meski secara umum terjadi pertumbuhan negatif pergerakan pesawat, penumpang domestik, dan kargo pada tahun 2019. Adanya kenaikan pergerakan penumpang dan kargo internasional sebesar 7,55 persen pada tahun tersebut juga menunjukkan potensi industri jasa transportasi udara global yang masih cukup baik. Terlebih lagi, di masa depan, wilayah Asia Pacific diperkirakan akan berkontribusi terhadap 42,8 persen pertumbuhan global jasa industri transportasi angkutan udara.

Sejalan dengan dinamika industri kebandaraan dan perubahan pola perilaku konsumen, Dewan Komisaris menyadari bahwa segmen usaha nonaeronautika di bisnis kebandaraan sama pentingnya dengan segmen aeronautika. Orientasi penumpang sebagai pengguna jasa bandara saat ini mencari kenyamanan dan keamanan serta menginginkan berbagai fasilitas yang dapat menunjang aktivitas selama dalam perjalanan. Oleh sebab itu, Dewan Komisaris meyakini prospek usaha yang sangat besar pada berbagai kegiatan usaha nonaeronautika. Beberapa di antaranya yaitu layanan sewa ruang dan hangar, konsesi, layanan fasilitas parkir, pengadaan utilitas, layanan periklanan, *event*, dan *lounge*.

## Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Lebih jauh lagi, Dewan Komisaris memiliki pandangan positif atas penerapan tata kelola perusahaan Angkasa Pura I. Pada tahun 2019, Perseroan telah menunjuk PT Sierra Bisnis Konsulting untuk melakukan asesmen GCG untuk kinerja tahun buku 2018. Secara umum penilaian tersebut menunjukkan hasil yang menggembirakan. Skor asesmen GCG Angkasa Pura I pada tahun 2019

yaitu tercatat mencapai 91,58 dengan kategori "Sangat Baik". Skor tersebut lebih tinggi dari hasil penilaian tahun sebelumnya sebesar 91,34. Meski kinerja GCG sangat memuaskan, Dewan Komisaris tetap berharap Direksi terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja GCG ke depan agar lebih baik lagi.

## Pemberian Nasihat kepada Direksi

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya Perseroan. Sejalan dengan itu, Dewan Komisaris telah memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi mengenai jalannya Angkasa Pura I sepanjang tahun 2019. Mekanisme pemberian nasihat secara formal dapat dilakukan melalui penyelenggaraan rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi yang dilakukan minimal satu kali setiap bulannya untuk membahas tentang agenda yang telah ditentukan.

Pada tahun 2019, Dewan Komisaris telah mengadakan 12 kali rapat dengan Direksi. Setidaknya terdapat enam surat keputusan Dewan Komisaris dan rekomendasi penting bagi Direksi. Beberapa topik pembahasan antara lain terkait pemberhentian dan pengangkatan ketua dan anggota Komite Audit, serta penyesuaian pedoman tata kelola. Dewan Komisaris sangat menghargai tindak lanjut yang baik oleh Direksi atas keputusan dan rekomendasi yang telah diberikan.



## Pandangan atas Penerapan/Pengelolaan *Whistle Blowing System*

Pelaksanaan *Whistle Blowing System* (WBS) merupakan salah satu upaya Angkasa Pura I untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Dewan Komisaris mengapresiasi mekanisme WBS yang telah berjalan di Angkasa Pura I.

Hingga akhir tahun 2019, tidak ada pengaduan melalui WBS yang masuk dan layak untuk ditindaklanjuti dalam tiga tahun terakhir.

## Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Pada tahun 2019, Pemegang Saham Utama dan Pengendali tidak melakukan perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero). Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2019, yaitu sebagai berikut:

Djoko Sasono	Komisaris Utama
Harry Z Soeratin	Komisaris
Suprasetyo	Komisaris
Ali Mochtar Ngabalin	Komisaris
Tri Budi Satriyo	Komisaris

## Penutup

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada para anggota Direksi, jajaran manajemen, karyawan dan seluruh mitra kerja yang telah berkontribusi secara luar biasa bagi keberlangsungan dan pertumbuhan Angkasa Pura I. Ucapan terima kasih kami kepada Pemerintah RI, khususnya Kementerian BUMN sebagai Pemegang Saham Utama dan Pengendali atas arahan dan kepercayaan yang diberikan kepada Angkasa Pura I.

Tidak lupa apresiasi kami sampaikan juga kepada para penumpang dan pengguna jasa penerbangan dan bandara, serta masyarakat luas, media dan pemangku kepentingan lainnya, atas dukungan yang nyata kepada Angkasa Pura I. Dengan kerja sama yang baik dan dukungan para pihak, kami berharap upaya Angkasa Pura I untuk memperkuat bisnis dan portofolio dapat terus membuahkan hasil yang baik di masa mendatang.

Jakarta, 23 April 2020,

**Djoko Sasono**

Komisaris Utama

PT Angkasa Pura I (Persero)

# Laporan Direksi

## *Pembaca Laporan Tahunan yang kami hormati*

PT Angkasa Pura I (Persero) dan Anak Perusahaan secara umum telah berhasil melewati tahun 2019 dengan membukukan kinerja yang cukup baik. Di tengah berbagai tantangan dan menurunnya pertumbuhan industri transportasi udara, Angkasa Pura I terus berupaya memantapkan jalan untuk menjadi penghubung dunia yang lebih dari sekadar operator bandar udara dengan keunggulan layanan yang menampilkan keramahmatan khas Indonesia dengan memperkuat bisnis dan portofolio.



**Faik Fahmi**  
Direktur Utama

## Tinjauan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Industri

Pada tahun 2019, perekonomian global masih dipengaruhi oleh perang dagang Amerika dengan Tiongkok, meskipun tekanannya jauh menurun dari tahun sebelumnya. Dalam aspek ekonomi makro, nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika (US\$) relatif stabil sepanjang tahun 2019, dengan kurs transaksi Bank Indonesia yang ditutup sebesar Rp13.970 per US\$ per 31 Desember 2019.

Di dalam negeri, tahun 2019 menjadi tahun politik. Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) dan pergantian kabinet yang berlangsung aman dan terkendali. Perekonomian nasional tercatat masih dapat tumbuh hingga 5,02%, meski lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,17%. Dengan berbagai kondisi tersebut, Angkasa Pura I mengalami tahun dengan gejala politik dan ekonomi yang lebih kondusif dari yang diperkirakan sebelumnya.

Di sisi lain, pada sektor industri aviasi, tahun 2019 merupakan tahun yang cukup menantang,

terutama bagi subsektor industri bandara. *International Air Transport Association (IATA)* mencatat perlambatan pertumbuhan lalu lintas penumpang maskapai global dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain rampungnya proyek-proyek infrastruktur darat serta kebijakan maskapai nasional mengenai harga dan layanan yang turut menekan trafik penumpang dalam negeri.

Trafik penumpang di bandara-bandara yang dikelola Angkasa Pura I tercatat sebesar 81,5 juta pergerakan penumpang pada tahun 2019. Jumlah tersebut menurun 15,64% dibandingkan dengan pergerakan penumpang di tahun 2018 sebesar 96,6 juta. Meski demikian, di tengah situasi tersebut, Angkasa Pura I terus berupaya menjaga standar pelayanan jasa bandara melalui pengembangan bandara serta dengan menciptakan inovasi layanan.

## Analisis Kinerja Perusahaan

Kinerja keuangan konsolidasian Angkasa Pura I dan Anak Perusahaan pada tahun 2019 tercatat sangat baik, dengan total pendapatan yang dibukukan sebesar Rp9,04 triliun. Secara keseluruhan, pendapatan dari kegiatan usaha Angkasa Pura I mengalami kenaikan sebesar Rp110 miliar atau 1,3% dari Rp8,52 triliun di tahun 2018 menjadi Rp8,63 triliun di tahun 2019.

Angkasa Pura I berupaya meningkatkan profitabilitas, khususnya pada jasa nonaeronautika. Hal ini tercermin dari peningkatan pendapatan nonaeronautika sebesar 7,28%, dari Rp3,4 triliun tahun 2018 menjadi Rp3,7 triliun tahun 2019. Upaya ini dilakukan untuk mengompensasi pertumbuhan negatif pendapatan aeronautika sebesar 3,9%, yang tercatat menurun dari Rp5,1 triliun tahun 2018 menjadi Rp4,9 triliun tahun 2019.

## Program Kerja Strategis

Program strategis Angkasa Pura I dirancang untuk mengantisipasi kondisi perekonomian dan industri penerbangan, sekaligus mengidentifikasi permasalahan dan peluang yang ada. Program strategis tersebut terdiri dari:

### 1. *Building Strong Financial Performance*

Angkasa Pura I berupaya untuk mempertahankan kinerja finansial dengan

memaksimalkan peluang yang ada. Melalui kinerja finansial yang baik, kemampuan untuk mengembangkan bandara akan meningkat sehingga akan berdampak pula terhadap pelayanan. Pada tahun 2019, Angkasa Pura I mengatur risiko finansial akibat penurunan trafik penerbangan dengan memaksimalkan pendapatan nonaeronautika.

### 2. *Rapid International Airport Development*

Pembangunan serta pengembangan bandara dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan *lack of capacity* secara cepat. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi *traffic* penumpang di masa mendatang. Pembangunan bandara dilakukan dengan waktu yang lebih singkat dari perkiraan dengan tetap memperhatikan kualitas fasilitas dan aspek pelayanan lainnya.

### 3. *Improving Customer Service Excellence*

Bandara kini bukan hanya sebagai tempat naik dan turun penumpang pesawat, melainkan sebagai penyedia layanan jasa kebandarudaraan yang prima bagi penumpang. Angkasa Pura I memastikan peningkatan kualitas layanan melalui pengaplikasian teknologi (digitalisasi) di bandara-bandaranya. Fasilitas seperti *Airport Operation Control Center (AOCC)* dan *auto handling system* dioperasikan oleh Angkasa Pura I dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan serta kepuasan pelanggan. Perolehan berbagai penghargaan di bidang pelayanan merupakan perwujudan komitmen

Perusahaan untuk menyediakan fasilitas serta pelayanan terbaik dan berstandar internasional.

### 4. *Gaining National and International Recognition*

Sebagai salah satu BUMN terbaik, Angkasa Pura I terus mengembangkan bandara-bandara berkelas internasional. Angkasa Pura I juga berupaya untuk mempertahankan standar internasional dalam aspek operasional, keamanan, pelayanan, dan finansial. Hal ini tercermin dari berbagai penghargaan serta sertifikasi berstandar internasional yang diperoleh pada tahun 2019, antara lain empat penghargaan dari Airports Council International (ACI) untuk Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan pada ajang Airport Service Quality (ASQ) Awards 2018 serta penghargaan "*The Best Airport of The Year 2019*" untuk Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada ajang Bandara Awards 2019.

## Pencapaian Target dan Kendala yang Dihadapi

Secara keseluruhan, kinerja finansial Perusahaan cukup baik meskipun belum dapat memenuhi target tahun 2019. Walaupun laba tercatat mengalami penurunan, namun aspek pendapatan dan aset mengalami kenaikan. Hal ini terjadi salah satunya karena maskapai penerbangan menurunkan kapasitas penerbangan di beberapa destinasi domestik dan mengalihkan rute penerbangannya pada tahun 2019. Dampaknya dirasakan masyarakat karena jumlah penerbangan yang berkurang dan mendorong terjadinya kenaikan harga tiket.

Selanjutnya, selain dampak penurunan *traffic*, kendala lain yang dihadapi Angkasa Pura I yaitu *lack of capacity* di sepuluh bandara yang dikelola. Sejauh ini, pertumbuhan penumpang melebihi kapasitas bandara yang ada. Upaya yang telah dilakukan Perusahaan untuk mengatasi hal ini yaitu menambah kapasitas bandara dengan

pengembangan bandara dan pembangunan bandara baru. Proyek yang telah diselesaikan pada tahun 2019 pengembangan terminal baru Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin dan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo.

Rampungnya beberapa proyek bandara di tahun 2019 berlangsung cepat melebihi target waktu pengerjaan. Bandara Internasional Yogyakarta rampung dalam waktu 20 bulan, lebih cepat dari target waktu pengerjaan yaitu dua tahun. Pengembangan apron sisi barat Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali rampung dalam waktu enam bulan, jauh lebih cepat dari perkiraan waktu pengerjaan awal selama dua tahun. Hal ini mendapatkan apresiasi dari Pemerintah karena kinerja pengembangan bandara dalam waktu relatif singkat tanpa meninggalkan kualitas.



## Prospek Usaha

Sebagai negara kepulauan, moda transportasi udara semakin dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas. Aspek konektivitas serta sektor pariwisata Indonesia diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan terus didorong sebagai kontributor unggulan bagi pendapatan nasional. Pemerintah Indonesia mengembangkan sepuluh destinasi pariwisata prioritas yang tiga di antaranya berada di wilayah operasi Angkasa Pura I, yaitu Bali, Yogyakarta, Manado, dan Lombok. Hal ini tentunya menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan perusahaan.

Dalam jangka panjang, pertumbuhan penumpang udara di Indonesia diprediksi akan terus meningkat hingga dapat mencapai 11% per tahun. Angkasa Pura

I sebagai penyedia layanan kebandarudaraan berupaya mengakomodir peningkatan trafi penumpang dan pesawat dengan menyiapkan kapasitas bandara berkualitas internasional.

Pada tahun 2020, Angkasa Pura I akan mengarahkan inovasi untuk menumbuhkan portofolio bisnis yang ada. Inovasi dalam ekspansi dilakukan tidak hanya dalam pengembangan bandara *existing*, tetapi juga pembangunan bandara baru serta pengambilalihan bandara. Sinergi dengan Anak Perusahaan juga akan terus dilakukan untuk memaksimalkan kinerja finansial. Ke depannya, akan diterapkan strategi *hub and spoke* dari bandara-bandara yang dikelola.

## Penerapan *Good Corporate Governance*

PT Angkasa Pura I (Persero) secara konsisten menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG) sesuai dengan regulasi yang berlaku. Beberapa di antaranya yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor.PER-01/MBU/2011 mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor.PER-09/MBU/2012. Selain itu, sebagai perusahaan yang telah menerbitkan obligasi, Angkasa Pura I juga telah menerapkan GCG sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pada tahun 2019, komitmen Angkasa Pura I dalam penerapan GCG mendapatkan apresiasi antara lain "*The Most Committed GRC Leader 2019*" untuk Direktur Utama dan "*Top GRC 2019 #3 Stars*" pada ajang TOP GRC 2019. Acara tersebut diadakan oleh

Majalah Top Business, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA), Institute Compliance Professional Indonesia (ICoPI), dan Asia Business Research.

Untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, Angkasa Pura I melakukan penilaian penerapan tata kelola atau *GCG assessment*. Penilaian dilaksanakan berdasarkan kriteria atau indikator yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Penilaian terhadap penerapan GCG yang dilakukan pada 2019 menunjukkan Angkasa Pura I berhasil meningkatkan capaian pelaksanaan GCG secara memuaskan dengan skor 91,58 yang meningkat dari tahun sebelumnya.

## Perubahan Komposisi Direksi

Pada tahun 2019, Pemegang Saham Utama dan Pengendali tidak melakukan perubahan komposisi anggota Direksi PT Angkasa Pura I (Persero). Susunan Dewan Direksi per 31 Desember 2019, yaitu sebagai berikut:

Faik Fahmi	Direktur Utama
Novrihandri	Direktur Keuangan
Devy Suradji	Direktur Pemasaran dan Pelayanan
Wendo Asrul Rose	Direktur Operasi
Lukman F. Laisa	Direktur Teknik
Adi Nugroho	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Direktur Pengembangan Usaha

## Penutup

Pada kesempatan ini, Direksi menyampaikan apresiasi kepada karyawan dan mitra Angkasa Pura I atas kinerja dan kerja sama yang baik, sehingga dapat mencapai hasil yang cukup memuaskan sepanjang tahun 2019. Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris dan Pemerintah RI sebagai Pemangku Kepentingan Utama dan Pengendali, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian BUMN, atas dukungan dan arahnya terhadap Direksi Angkasa Pura I.

Kinerja dan kerja sama yang baik dengan para pemangku kepentingan tentunya menjadi landasan utama pertumbuhan perseroan di masa depan. Direksi memiliki keyakinan bahwa Angkasa Pura I dapat terus berkembang dan berkomitmen memberikan yang terbaik bagi pengguna jasa transportasi udara dan para pemangku kepentingan lainnya, guna mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Jakarta, 23 April 2020,

Faik Fahmi

Direktur utama

PT Angkasa Pura I (Persero)







# Profil Perusahaan

PT Angkasa Pura I (Persero) merupakan pengelola salah satu dari **10 (sepuluh) bandar udara** terbaik di **Asia**. Bahkan, beberapa bandar udara yang dikelolanya mendapatkan **penghargaan tingkat dunia**.



# Profil Singkat



**Nama Perusahaan**  
PT Angkasa Pura I (Persero)



**Modal Dasar**  
Rp12.000.000.000.000,-

**Modal Ditempatkan**  
Rp6.414.412.000.000,-

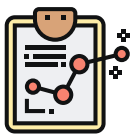


**Perubahan Nama**

- Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran, tahun 1962
- Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura, tahun 1965
- Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I, tahun 1986
- Perseroan Terbatas (PT) Angkasa Pura I (Persero), tahun 1992



**Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia**  
Tanggal 23 November 2016. Sesuai Pengumuman Pencatatan Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Tahun 2016 Angkasa Pura I No. Peng-P-00950/BEI.PP2/11-2016 tanggal 22 November 2016.



**Bidang Usaha**

- Pelayanan Jasa Kebandarudaraan
- Pelayanan Jasa Terkait Bandara



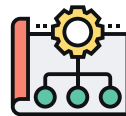
**Tanggal Pendirian**  
15 November 1962



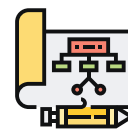
**Kode Obligasi**  
APAI



**Jumlah Pegawai**  
3.355 orang



**Data Jaringan Kantor**  
1 Kantor Pusat  
14 Kantor Cabang/  
Bandara  
4 Kantor Proyek  
5 Entitas Anak



**Entitas Anak**  
PT Angkasa Pura Hotel  
PT Angkasa Pura Logistik  
PT Angkasa Pura Properti  
PT Angkasa Pura Retail  
PT Angkasa Pura Suport



**Dasar Hukum Pendirian**  
PP Nomor 5 tahun 1992



**Status Perusahaan**  
Badan Usaha Milik Negara, 100% milik Negara Republik Indonesia



**Kepemilikan**  
100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia



**Layanan Informasi**

Corporate Secretary  
Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B 12 Kav. 2  
Jakarta, 10610

Telp : 62-21 6541961  
Faks : 62-21 6541513, 6541514  
E-mail : [humas@apl.co.id](mailto:humas@apl.co.id)  
Website : [www.apl.co.id](http://www.apl.co.id)  
Twitter : @ap\_airports  
Instagram : @ap\_airports  
Facebook : Angkasa Pura Airports  
Youtube : [www.youtube.com/angkaspuraaairports](http://www.youtube.com/angkaspuraaairports)



**Kantor Pusat**

Kota Baru Bandar  
Kemayoran, Blok B 12 Kav. 2  
Jakarta, 10610

Telepon : 62-21 6541961  
Faksimili : 62-21 6541513, 6541514  
E-mail : [humas@apl.co.id](mailto:humas@apl.co.id)



**Laman**

[www.apl.co.id](http://www.apl.co.id)



## Brand Perusahaan



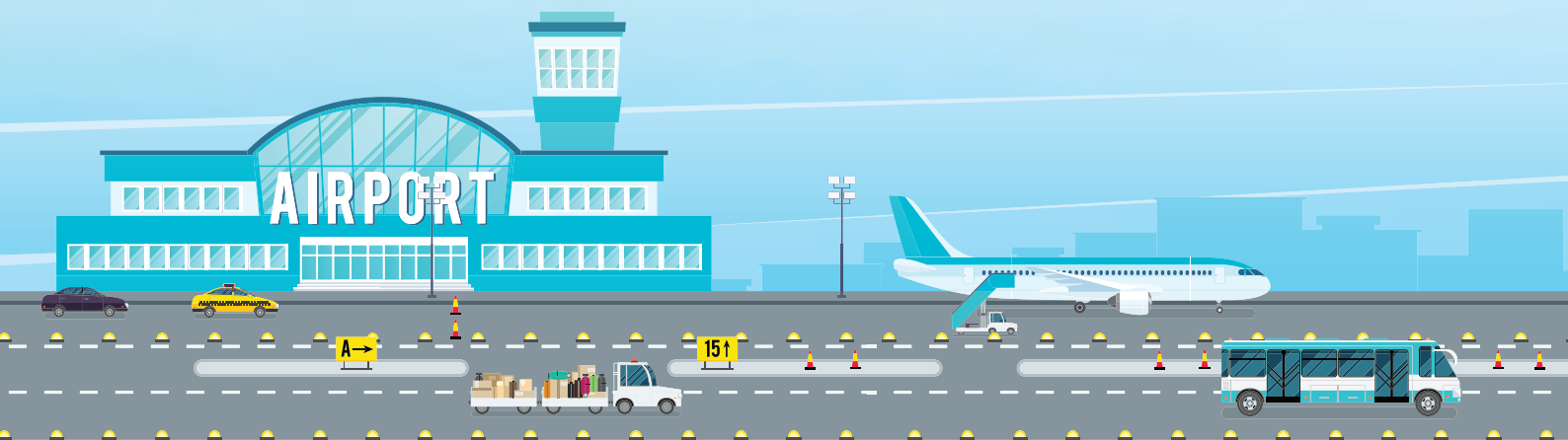
Tulisan “Angkasa Pura” tampil dengan segar berdampingan dengan kata “Airports” untuk memperjelas bisnis yang digeluti perusahaan. Warna hijau bermakna bisnis yang membumi, berakar, tumbuh dan lestari yang dipadu dengan warna biru yang melambangkan langit atau angkasa. Dua warna yang berbeda dipadu secara harmonis untuk memberi pesan tentang cita-cita yang setinggi langit dan harus dimulai dengan sinergi konsep dan kerja yang membumi, berakar, tumbuh dan lestari.

Simbol dua unsur yang “inter-locking” mencerminkan *safety and security concept* yang merupakan faktor terpenting dalam bisnis kebandarudaraan.

Mengandung unsur “*give and take*”, menyiratkan makna bahwa suatu perolehan merupakan konsekuensi logis dari kegiatan memberi, yang menjadi prinsip dasar “*together stronger*” atau kemuliaan pelayanan dan profesionalisme dalam kebersamaan.

Menyiratkan “senyuman” yang melambangkan keramahan pelayanan yang manusiawi yang merupakan kebanggaan Angkasa Pura I.

Sudut aerodinamis yang naik ke kanan mencerminkan tekad dan semangat transformasi yang progresif demi kemajuan perusahaan.



# Riwayat Singkat Perusahaan



## **Berdasarkan PP No. 21 tahun 1965 tanggal 17 Mei 1965, PN Angkasa Pura Kemayoran berubah nama menjadi Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura.**



PT Angkasa Pura I (Persero) merupakan pelopor pengusahaan kebandarudaraan secara komersial di Indonesia. Sejarah Perusahaan berawal dari pendirian Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran pada 20 Februari 1962, sesuai PP No. 33 Tahun 1962. Saat itu, PN Angkasa Pura Kemayoran bertanggung jawab untuk mengelola dan mengusahakan bandara internasional pertama di Indonesia, yaitu Bandara Kemayoran Jakarta. Kemudian, PN Angkasa Pura Kemayoran resmi mengambil alih secara penuh aset dan operasional Bandara Kemayoran Jakarta dari Kementerian Perhubungan Udara pada 20 Februari 1964, yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Perusahaan.

Pada tanggal 17 Mei 1965, berdasarkan PP No. 21 Tahun 1965, PN Angkasa Pura Kemayoran berubah nama menjadi PN Angkasa Pura. Seiring dengan perubahan nama tersebut, PN Angkasa Pura memperluas kegiatan operasionalnya mengelola bandara lain di kota-kota besar di Indonesia, seperti Denpasar, Medan, Surabaya, Balikpapan, dan Ujung Pandang. Selanjutnya, PP No. 37 Tahun 1974 menetapkan perubahan status badan hukum PN Angkasa Pura menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Kemudian, pada tahun 1985, Bandara Kemayoran dinyatakan berhenti beroperasi dan Bandara Soekarno-Hatta yang saat itu masih bernama Bandara Cengkareng menggantikan peran Bandara Kemayoran sebagai gerbang masuk internasional ke Indonesia.

Melalui PP No. 25 tahun 1986 Perum Angkasa Pura menjadi Perum Angkasa Pura I dan Perum Angkasa Pura II. Pada tahun 1992, melalui PP No. 5 Tahun 1992 dan dilanjutkan dengan Akta Notaris Muhani Salim, SH tanggal 3 Januari 1993, Perum Angkasa Pura I menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan kepemilikan saham sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia.

Perubahan nama menjadi PT Angkasa Pura I (Persero) mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman pada tanggal 24 April 1993 melalui Surat Keputusan No.C2-470.HT.01.01 Tahun 1993, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.52 tanggal 29 Juni 1993 dengan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.2914/1993. Nama PT Angkasa Pura I (Persero) berlanjut hingga saat ini.



Setelah menjadi perseroan terbatas, Angkasa Pura I mengalami beberapa kali perubahan akte dan anggaran dasar, antara lain:

1. Perubahan pada tahun 2012, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat dan Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil di luar rapat PT Angkasa Pura I (Persero), yang tertuang dalam Akta No.5 dengan Notaris Utiek R. Abdulrachman, SH., MLI., MKn, serta mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.AHU-46777.AH.01.02 Tahun 2012 pada tanggal 3 September 2012, di antaranya mengenai:
  - o Peningkatan modal dasar menjadi sebesar Rp12.000.000.000 yang terbagi atas 12.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham
  - o Modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp3.188.245.000 atau sebanyak 3.188.245 saham, dengan cara penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia sebesar Rp1.388.244.029 sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 2011 dan dari cadangan modal sebesar Rp971
2. Perubahan pada tahun 2013, berdasarkan akta notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn No.02 tanggal 16 Januari 2013 yang telah disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHUAH.01.10-02672 tanggal 31 Januari 2013, yaitu mengenai:



- o Peningkatan modal disetor yang diambil dari kapitalisasi sebagian cadangan Perusahaan sampai dengan tahun buku 2011 sejumlah 300.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) sehingga seluruhnya menjadi Rp300.000.000, yang diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia, sehingga modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp3.488.245.000
3. Perubahan pada tahun 2015, yaitu perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang dinyatakan dalam Akta No. 11 tanggal 22 September 2015 dengan Notaris Julius Purnawan, SH, MSI, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.AHU.AH. 01.03-0972301 pada tanggal 15 Oktober 2015, yaitu
- o Penambahan Modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp6.414.412.000 atau sebanyak 6.414.412 saham, dengan cara penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia sebesar Rp2.926.166.060 sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.8 Tahun 2014 dan dari cadangan modal sebesar Rp940.
- Sebagai pelopor perusahaan yang bergerak di bidang kebandarudaraan komersial di Indonesia, Angkasa Pura I saat ini dipercaya oleh Pemerintah Indonesia untuk mengelola bandara di berbagai kota di Indonesia. Per 31 Desember 2019, ada 14 bandara, 4 (empat) kantor proyek, dan 5 (lima) anak perusahaan saat ini dikelola dan di bawah pengawasan PT Angkasa Pura I (Persero).



# Jejak Langkah

## 1962

15 November 1962

Pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran, dengan tugas pokok mengelola Bandara Kemayoran Jakarta yang saat itu merupakan satu-satunya bandara internasional di tanah air.

## 1964

20 Februari 1964

Pada tanggal 20 Februari 1964, yang menjadi hari jadi Perusahaan, PN Angkasa Pura Kemayoran resmi mengambil alih secara penuh aset dan operasional Bandara Kemayoran dari Kementerian Perhubungan Udara Republik Indonesia.

## 1965

15 November 1962

PP No.21 tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambahan PP No.33 tahun 1962 mengatur perubahan nama PN Angkasa Pura Kemayoran menjadi PN Angkasa Pura dan membuka kemungkinan mengelola bandara lain di Indonesia.

## 2015

18 Mei 2015

*Groundbreaking* proyek pembangunan terminal baru Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.

17 Agustus 2015

Pengoperasian Terminal B Bandara Adisutjipto, Yogyakarta.

13 Desember 2015

Pengoperasian terminal khusus umrah Bandara Juanda Surabaya.

## 2014

14 Februari 2014

Pengoperasian Terminal 2 (T2) Bandara Juanda Surabaya.

22 Maret 2014

Pengoperasian terminal baru Bandara SAMS Sepinggang Balikpapan.

17 Juni 2014

*Groundbreaking* proyek pengembangan Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang.

15 September 2014

Peresmian Bandara SAMS Sepinggang Balikpapan dan Terminal 2 (T2) Bandara Juanda Surabaya oleh Presiden RI.

17 September 2014

Pengoperasian terminal domestik baru Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

19 Desember 2014

Peresmian Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali oleh Menteri Perhubungan RI.

## 2013

2 Januari 2013

Implementasi Tahap Pertama Proyek *Enterprise Resource Planning* (ERP).

4 Januari 2013

Pendirian SBU Commercial Ngurah Rai Bali sesuai dengan Keputusan Direksi No. KEP.02/OM.01.01/2013.

6 Januari 2013

Pengalihan tugas pengelolaan terkait navigasi ke Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) berdasarkan PP Nomor 77 Tahun 2012.

12 September 2013

Pengoperasian terminal internasional baru Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

**1974**

24 Oktober 1974

PP No. 37 tahun 1974 mengubah status badan hukum PN Angkasa Pura berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum).

**1986**

19 Mei 1986

Perum Angkasa Pura menjadi Perum Angkasa Pura I seiring dengan dibentuknya Perum Angkasa Pura II. Perum Angkasa Pura I mengelola bandara di wilayah timur Indonesia, sedangkan Perum Angkasa Pura II mengelola di wilayah barat.

**1992**

4 Februari 1992

Berdasarkan PP No.5 tahun 1992, bentuk Perum Angkasa Pura I diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Angkasa Pura I (Persero), dengan sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia

**2012**

6 Januari 2012

Pembentukan Angkasa Pura Hotels, Angkasa Pura Property, dan Angkasa Pura Logistics sebagai entitas anak Angkasa Pura I.

9 Februari 2012

Pembentukan entitas anak Angkasa Pura Supports.

20 Februari 2012

Peluncuran identitas perusahaan (*corporate identity*) berupa visi, misi, dan nilai-nilai serta *hymne*, mars dan seragam baru Angkasa Pura I.

**2011**

20 Oktober 2011

Peresmian Bandara Internasional Lombok di Lombok Tengah oleh Presiden RI.

1 Desember 2011

*Groundbreaking* proyek pembangunan Terminal 2 (T2) Bandara Juanda Surabaya.

30 Desember 2011

Logo baru Angkasa Pura I sebagai salah satu identitas perusahaan (*corporate identity*) resmi diluncurkan.

**2008**

22 September 2008

Peresmian Bandara Sultan Hasanuddin Makassar oleh Presiden RI.



**2016****23 November 2016**

Penerbitan Obligasi I Angkasa Pura I tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I tahun 2016.

**2017****27 Januari 2017**

*Groundbreaking* pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo oleh Presiden RI.

**08 April 2017**

*Groundbreaking* pembangunan Kereta Api Bandara Adi Soemarmo di Boyolali, Jawa Tengah oleh Presiden RI.

**2018****11 Februari 2018**

Seremonial *topping off* terminal baru Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang.

**07 Juni 2018**

Presiden RI meresmikan terminal baru Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang.

**2019****6 Mei 2019**

Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo mulai beroperasi.

**18 Desember 2019**

Peresmian terminal baru Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin oleh Presiden RI.



# Peristiwa Penting di Tahun 2019



**15 Maret 2019**

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Angkasa Pura I & BKIPM dan KKP.



**19 Maret 2019**

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Angkasa Pura I dengan PNM



**22 Maret 2019**

Penandatanganan kerja sama penggunaan aset Angkasa Pura I dan TNI AU di Bali.



**26 April 2019**

Sertifikat bandar udara untuk Bandara Internasional Yogyakarta diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI.



**10 April 2019**

Peresmian Masjid Baitussalam di Kompleks Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang.



**6 Mei 2019**

Penerbangan komersial perdana ke Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo



**3 Mei 2019**

Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan Jasa Raharja.



**15 Juli 2019**

Sosialisasi *fraud control plan* dan penandatanganan MoU.



**6 Agustus 2019**

10 bandara Angkasa Pura I meraih akreditasi Airport Customer Experience Accreditation Program dari ACI.





**14 Agustus 2019**

Penandatanganan MOU antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Incheon Internasional Airport Corporation (IIAC).

idAAA  
Stable Outlook  
idAAA(sy)  
Stable Outlook

**16 Agustus 2019**

PT Angkasa Pura I (Persero) mempertahankan rating triple A Pefindo periode 12 Agustus 2019 - 1 Agustus 2020.



**3 September 2019**

PT Angkasa Pura I (Persero) menjadi tuan rumah Airports Council International - Customer Experience Global Summit (ACI-CEGS) 2019 di Bali.



**04 September 2019**

Peresmian fasilitas *x-Ray Automated Tray Return System* (*x-Ray ATRS*), *boarding pass scanner* (*flap barrier*), dan *autogate* paspor di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.



**26 September 2019**

Penandatanganan MoU antara Angkasa Pura I dengan Bank Mandiri.



**8 Oktober 2019**

Penandatanganan MoU antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.





**13 Oktober 2019**

Penandatanganan KSP Bandara Sentani antara Angkasa Pura I dengan Kementerian Perhubungan.



**21 Oktober 2019**

Peresmian ruang multisensori di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Fasilitas ini disediakan untuk anak berkebutuhan khusus utamanya autisme.



**13 November 2019**

Penandatanganan MoU dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan RI untuk menjajaki peluang kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang kebandarudaraan.



**10 Desember 2019**

Pengoperasian terminal baru Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.



**18 Desember 2019**

Peresmian terminal baru Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin oleh Presiden RI.



**29 Desember 2019**

Soft launching Kereta Api Bandara Adi Soemarmo oleh Menteri Perhubungan RI.

# Visi dan Misi serta Budaya Perusahaan



PT Angkasa Pura I (Persero) memiliki visi dan misi yang memberi arah dan tujuan bagi manajemen dalam mengelola perusahaan. Visi dan misi juga membantu Perusahaan mengidentifikasi kompetensi inti (*core competence*) saat ini dan hal yang perlu dikembangkan ke depan.

Visi dan misi Angkasa Pura I tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) 2019-2023 yang telah dibahas atau di-review dan disetujui bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada 26 Oktober 2019 di Yogyakarta. Kemudian RJPP tersebut diserahkan ke Kementerian BUMN tanggal 31 Oktober 2019 untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri BUMN yang bertindak sebagai pemegang saham utama dan pengendali sesuai dengan ketentuan dari Surat Keputusan BUMN No. KEP-102/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang BUMN.

Selain visi dan misi, Angkasa Pura I juga telah menetapkan budaya perusahaan dari proses transformasi dan restrukturisasi Angkasa Pura I yang dijalankan oleh tim transformasi Angkasa Pura I berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SKEP.27/LB.01/2011 tentang Pembentukan Tim Transformasi Perusahaan PT Angkasa Pura I (Persero). Budaya perusahaan tersebut menjadi nilai-nilai atau *values* yang memandu semua insan Angkasa Pura I untuk melakukan yang terbaik dalam mewujudkan visi dan misi Perusahaan. Budaya atau nilai perusahaan Angkasa Pura I yaitu "SATU", yang berasal dari kata Sinergis, Adaptif, Terpercaya, dan Unggul.

Selanjutnya, agar seluruh individu di Perusahaan dapat memahami visi, misi dan budaya dengan mudah, maka Angkasa Pura I menetapkan motto atau *tagline* "Go Beyond". Pada tahun 2019, Angkasa Pura I telah melakukan sosialisasi visi dan misi serta budaya perusahaan melalui *website*, video, sambutan, rapat, *banner*, dan sebagainya.

## Visi



“Menjadi penghubung dunia yang lebih dari sekadar operator bandar udara dengan keunggulan layanan yang menampilkan keramahmatan khas Indonesia.”

1. Memberikan layanan berskala global dalam standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan terbaik
2. Meningkatkan nilai pemangku kepentingan
3. Menjadi mitra pemerintah dan penggerak pertumbuhan ekonomi
4. Meningkatkan daya saing perusahaan melalui kreativitas dan inovasi
5. Memberikan kinerja pelayanan bandar udara yang prima dalam memenuhi harapan stakeholder melalui pengelolaan sumber daya manusia yang unggul
6. Memberikan kontribusi positif pada kelestarian lingkungan



## Misi

## Budaya Perusahaan



### Sinergis

Menghargai keragaman dalam meningkatkan nilai tambah dan kontribusi kepada perusahaan.



### Adaptif

Kesiapan hati, pikiran, dan semangat dalam menghadapi perubahan untuk kemajuan perusahaan.



### Terpercaya

Memiliki integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas.



### Unggul

Antusias dalam belajar dan meningkatkan daya saing untuk kemajuan perusahaan.



# Kegiatan Usaha

## KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR

Berdasarkan Pasal 3 Perubahan Terakhir Anggaran Dasar Perusahaan yang tercantum dalam Akta Nomor 55 Tahun 2019, kegiatan usaha atau bidang usaha Angkasa Pura I yang utama yaitu menyelenggarakan usaha jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandara serta usaha-usaha lainnya yang berhubungan dengan usaha tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Kegiatan usaha yang dilakukan Angkasa Pura I bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.

Bidang usaha Angkasa Pura I dibatasi oleh PP No. 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI), yang mengatur bahwa jasa pelayanan penerbangan tidak dikelola

oleh Angkasa Pura I. Peraturan tersebut berlaku sejak tanggal 16 Januari 2013 berdasarkan Nota Kesepahaman No. HK.201/1/10/DRJU-2013; KEP.15/OM.02.03/2013; MOU.04.07.01/00/02/2013/001; 032/DU/II/2013 tanggal 12 Februari 2013.

Jika diperlukan, Angkasa Pura I dapat mendirikan perusahaan lain atau entitas anak, baik sendiri maupun bersama dengan badan lain, yang berhubungan dengan usaha di atas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Per 31 Desember 2019, seluruh kegiatan usaha atau bidang usaha sesuai dengan Anggaran Dasar telah dijalankan oleh Angkasa Pura I, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

### AERONAUTIKA ATAU KEBANDARUDARAAN

- 1 Penyediaan, pengusahaan, dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, parkir, dan penyimpanan pesawat udara
- 2 Penyediaan fasilitas *counter check-in*, garbarata (*aviobridge*), *Baggage Handling System* (BHS)/*Hold Baggage Screening* (HBS).
- 3 Penyediaan, pengusahaan, dan pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos.

### NONAERONAUTIKA (NONKEBANDARUDARAAN)

- 1 Penyediaan lahan untuk pembangunan, lapangan, dan kawasan industri serta gedung/bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.
- 2 Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas elektronik, listrik, air dan instalasi limbah buangan.
- 3 Penyediaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan.
- 4 Usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan PT Angkasa Pura I (Persero).

## SEGMENT USAHA

Angkasa Pura I memiliki 2 (dua) jenis segmen usaha atau segmen operasi, yaitu:

- Segmen produk dan jasa yang diberikan kepada perusahaan, terutama badan usaha angkutan udara dan mitra usaha lainnya.
- Segmen produk dan jasa yang diberikan langsung kepada konsumen, terutama penumpang pesawat udara dan pengantar serta penjemput.



Secara rinci, produk dan layanan yang diberikan PT Angkasa Pura I (Persero) yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)

Produk Pelayanan Jasa Pendaratan Pesawat Udara ini adalah kegiatan pelayanan jasa pendaratan yang diberikan terhadap pesawat udara yang mendarat di bandar udara. Produk Pelayanan Jasa Penempatan Pesawat Udara adalah pelayanan jasa yang diberikan untuk penempatan pesawat udara di tempat terbuka di bandar udara. Produk Pelayanan Jasa Penyimpanan Pesawat Udara yaitu pelayanan jasa yang diberikan terhadap pesawat udara di dalam hanggar.

#### 2. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)

Pelayanan jasa penumpang pesawat udara adalah pelayanan jasa yang diberikan kepada setiap penumpang di terminal keberangkatan atau kedatangan bandar udara yang diusahakan oleh Angkasa Pura I.

#### 3. Garbarata (*Aviobridge*)

Pelayanan jasa pemakaian garbarata (*aviobridge*) adalah pelayanan jasa pemakaian garbarata (*aviobridge*) yang diberikan kepada setiap badan usaha angkutan udara/perusahaan angkutan udara/operator pesawat udara pada saat keberangkatan atau kedatangan penumpang.

#### 4. *Check-In Counter*

Pelayanan jasa pemakaian *check-in counter* adalah pelayanan jasa yang diberikan kepada perusahaan angkutan udara atau operator pesawat udara sehubungan pemakaian fasilitas bandar udara.

#### 5. *Baggage Handling System (BHS)/Hold Baggage Screening (HBS)*

Pelayanan jasa yang diberikan kepada perusahaan angkutan udara atau operator pesawat udara sehubungan pemakaian fasilitas *baggage handling system* yaitu suatu sistem *conveyor* yang digunakan untuk mengangkut bagasi penumpang setelah proses pemeriksaan dan *check-in* bagi penumpang keberangkatan, selanjutnya bagasi tersebut dibawa ke area penumpukan siap angkut (*baggage make up area*) untuk diangkut ke pesawat udara, begitu juga sebaliknya bagi penumpang kedatangan dibawa ke area pengambilan bagasi (*baggage claim*). Sedangkan pelayanan jasa yang diberikan kepada perusahaan angkutan udara atau operator pesawat udara sehubungan pemakaian fasilitas *Hold Baggage Screening* yaitu suatu sistem pemeriksaan bagasi dengan mesin *x-ray* yang terintegrasi langsung dengan BHS dan secara otomatis dapat mengetahui status keamanan bagasi untuk disalurkan sesuai hasil pemeriksaan, pemilahan (*sortir*) dan tujuan bagasi untuk diangkut ke pesawat udara bagi penumpang keberangkatan.

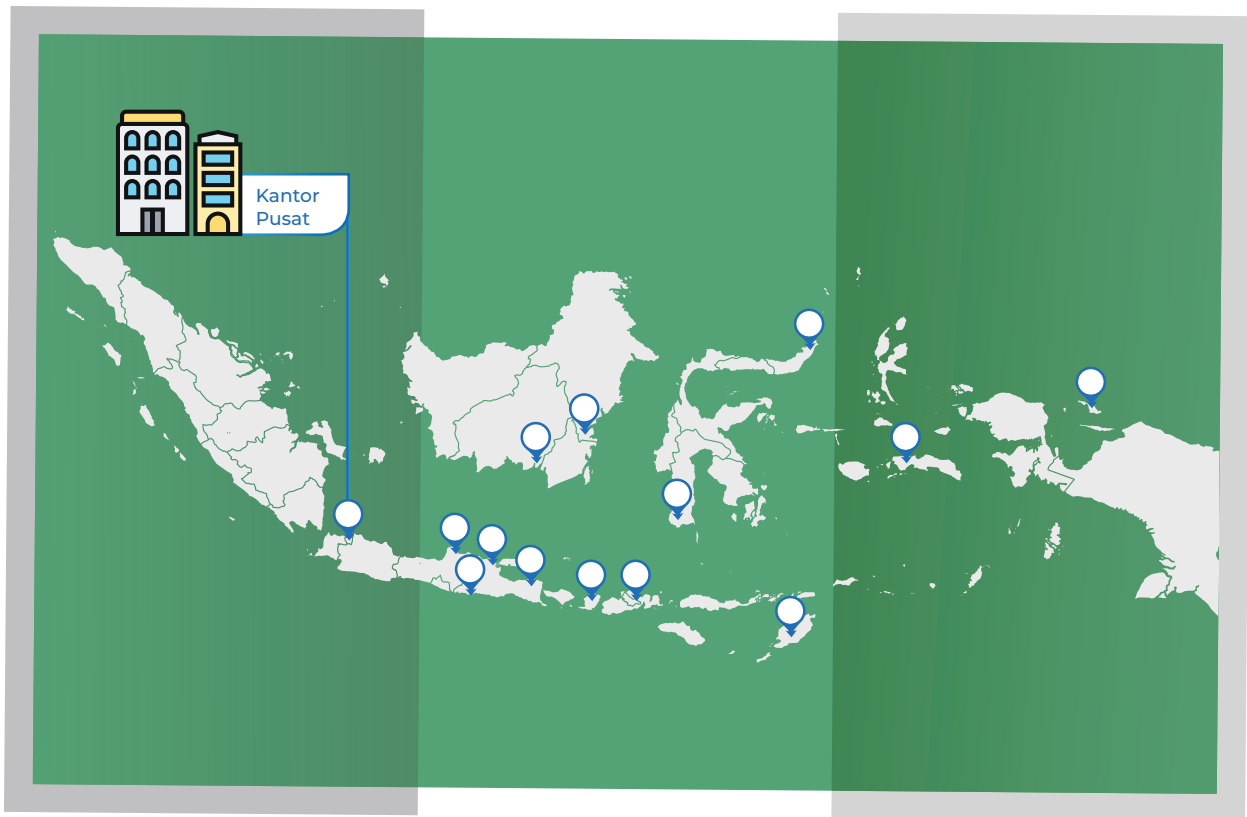
#### 6. Koneksi Atas Jasa Penggunaan Fasilitas Bandar Udara

Koneksi adalah jasa yang diberikan atas hak penggunaan fasilitas bandar udara kepada pihak ketiga terkait kegiatan usaha yang dilakukan di bandar udara. Koneksi ini dikenakan kepada perusahaan-perusahaan yang berusaha di bandar udara seperti usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU), *Regulated Agent (RA)*, *ground handling*, dan *in-flight catering*.



# Wilayah Operasional

Hingga akhir tahun pelaporan 2019, PT Angkasa Pura I (Persero) mengelola sebanyak 14 (empat belas) bandara dan 5 (lima) entitas anak, serta 4 (empat) proyek yang tersebar di kota-kota besar di sebagian wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, yaitu:



## Bandar udara:

- (1) Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai (Bali)
- (2) Bandar Udara Juanda (Surabaya)
- (3) Bandar Udara Sultan Hasanuddin (Makassar)
- (4) Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (Balikpapan)
- (5) Bandar Udara Frans Kaisiepo (Biak)
- (6) Bandar Udara Sam Ratulangi (Manado)
- (7) Bandar Udara Syamsudin Noor (Banjarmasin)
- (8) Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani (Semarang)
- (9) Bandar Udara Adisutjipto (Yogyakarta)
- (10) Bandar Udara Adi Soemarmo (Surakarta)
- (11) Bandar Udara Internasional Lombok (Lombok Tengah)
- (12) Bandar Udara Pattimura (Ambon)
- (13) Bandar Udara El Tari (Kupang)
- (14) Bandar Udara Internasional Yogyakarta (Kulon Progo)

## Proyek:

- (1) Proyek Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (Kulon Progo)
- (2) Proyek Pengembangan Bandara Jenderal Ahmad Yani (Semarang)
- (3) Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor (Banjarmasin)
- (4) Proyek Pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin (Makassar)

## Anak Perusahaan:

- (1) PT Angkasa Pura Logistik
- (2) PT Angkasa Pura Properti
- (3) PT Angkasa Pura Suport
- (4) PT Angkasa Pura Hotel
- (5) PT Angkasa Pura Retail

## Jaringan Kantor PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir

Jenis Kantor	2019	2018	2017
Kantor Pusat	1	1	1
Kantor Cabang/Bandar Udara	14	13	13
TOTAL	15	14	14

## Peta Jaringan Kantor, Bandara dan Proyek PT Angkasa Pura I (Persero) Per Wilayah Tahun 2019

Jenis Kantor	Jenis Kantor		
	Kantor Pusat	Kantor Cabang	Proyek
Kantor Pusat, Jakarta	1	-	-
Kantor Cabang I Gusti Ngurah Rai, Bali	-	1	-
Kantor Cabang Juanda, Surabaya	-	1	-
Kantor Cabang SAMS Sepinggan, Balikpapan	-	1	-
Kantor Cabang Sultan Hasanuddin, Makassar	-	1	-
Kantor Cabang Adisutjipto, Yogyakarta	-	1	-
Kantor Cabang Syamsudin Noor, Banjarmasin	-	1	-
Kantor Cabang Jenderal Ahmad Yani, Semarang	-	1	-
Kantor Cabang Sam Ratulangi, Manado	-	1	-
Kantor Cabang Adi Soemarmo, Surakarta	-	1	-
Kantor Cabang Lombok, Lombok Tengah	-	1	-
Kantor Cabang Pattimura, Ambon	-	1	-
Kantor Cabang El Tari, Kupang	-	1	-
Kantor Cabang Frans Kaisiepo, Biak	-	1	-
Kantor Cabang Yogyakarta, Kulon Progo	-	1	-
Proyek Pengembangan Bandara Jenderal Ahmad Yani, Semarang	-	-	1
Proyek Pengembangan Bandara Internasional Yogyakarta	-	-	1
Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin	-	-	1
Proyek Pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar	-	-	1
TOTAL	1	14	4

## Keamanan dan Perlindungan



Sejalan dengan visinya untuk menjadi pengelola bandara kelas dunia, kegiatan usaha Angkasa Pura I dijalankan dengan mengutamakan keselamatan dan perlindungan terhadap kegiatan layanan penerbangan dan pengguna layanan bandara. Terkait hal tersebut, Angkasa Pura I menerapkan *Safety, Security, and Service through Compliance (3S1C)* sesuai dengan penerapan Undang-undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Selain memiliki kebijakan terkait keamanan dan perlindungan tersebut di atas, Angkasa Pura I juga telah memperoleh beberapa sertifikasi dari berbagai bidang yang mendukung keselamatan, keamanan, dan kenyamanan para pengguna jasa. Beberapa di antaranya yaitu sertifikasi bidang lingkungan (ISO 14001:2015), *quality*

*management* (ISO 9001:2015), kesehatan dan keselamatan kerja (OHSAS 18001:2007), serta *risk management* (ISO 31000). Selain itu, Angkasa Pura I juga mengadakan program peningkatan kualitas sistem pengelolaan bandara dengan mengundang praktisi-praktisi terkemuka dunia melalui kegiatan Airport Excellence (Apex) in Safety dan Airport Excellence (Apex) in Security.

Implementasi 3S1C saat ini telah dilakukan melampaui ketentuan yang disyaratkan regulasi (*beyond regulation*). Secara komprehensif, Angkasa Pura I menjalankan 3S1C mulai dari pintu gerbang dan tempat parkir, hingga tempat umum yang ada di bandara, dengan melibatkan beberapa fungsi manajemen Angkasa Pura I, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:



### Risk Management and Corporate Planning

Bertugas untuk memastikan proses bisnis Angkasa Pura I berlangsung dengan tingkat risiko yang dapat diterima melalui proses *risk management* dan memastikan tersedianya rumusan *corporate strategic plan* melalui analisis dan kajian bisnis, pemantauan (*monitoring*), dan evaluasi kinerja Angkasa Pura I guna mendukung tercapainya sasaran kerja Angkasa Pura I sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).



#### Airport Engineering

Bertanggung jawab untuk memastikan tersedianya data terkait *airport statistics*, *airport master plan*, dan *environment* melalui analisis dan kajian bisnis guna mendukung tercapainya strategi Angkasa Pura I sesuai kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh regulator serta melaksanakan kepatuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal perusahaan.



#### Airport Security

Berfungsi untuk memastikan efektivitas pelayanan bidang *airport security* melalui program peningkatan kualitas dan keandalan sumber daya manusia guna mendukung tercapainya *Customer Satisfaction Index (CSI)* seluruh bandara sesuai dengan standar aturan nasional dan internasional.



#### Airport Safety

Bertanggung jawab untuk memastikan terjaganya pencapaian *safety level* dan kualitas pelayanan melalui pengelolaan kegiatan *safety management system*, *occupational safety health*, serta *quality management* yang efektif guna mendukung pencapaian *Customer Satisfaction Index (CSI)*.



#### Airport Services & Hospitality

Bertugas untuk memastikan pelayanan bidang *airport services and hospitality* yang efektif melalui peningkatan kualitas dan kehandalan sumber daya manusia guna mendukung peningkatan bidang pelayanan dan jaminan kualitas, serta tercapainya *Customer Satisfaction Index (CSI)* seluruh bandar udara sesuai dengan standar aturan nasional dan internasional.



#### Airport Facilities Readiness

Bertugas untuk memastikan seluruh fasilitas bandara yang meliputi sisi udara (*air side*), sisi darat (*land side*), *landscape*, dan *terminal building* yang dikelola Angkasa Pura I siap untuk digunakan guna mendukung tercapainya *Customer Satisfaction Index (CSI)*.



#### Airport Equipment Readiness

Berfungsi untuk memastikan tersedianya kesiapan operasional seluruh peralatan (*equipment*) bandara yang dikelola Angkasa Pura I dan pendukung lainnya guna tercapainya *Customer Satisfaction Index (CSI)*.



Kinerja penerapan 3SIC yang baik oleh Angkasa Pura I dapat dilihat dari pencapaian skor *Airport Service Quality* (ASQ) dengan rata-rata nilai di atas 4,5 pada 4 (empat) bandara (tahun 2018) yang

dinilai oleh lembaga ACI. Selain itu, skor *Customer Satisfaction Index* (CSI) yang dinilai oleh INACA pada 13 (tiga belas) bandara pada tahun 2019 mencapai rata-rata di atas 4.

Indikator Pencapaian	2019	2018	2017
<i>Airport Service Quality</i> (ASQ)	4.48	4.55	4.62
<i>Customer Satisfaction Index</i> (CSI)	4.53	4.40	4.25

Angkasa Pura I tidak mengalami insiden, kecelakaan kerja, pelanggaran kode etik, maupun pelanggaran lainnya sepanjang tahun 2019 yang signifikan. Prestasi *zero accident* yang membanggakan ini telah berhasil dipertahankan Angkasa Pura I sejak tahun 2017. Capaian tersebut

merupakan hasil dari kerja keras para insan Angkasa Pura I yang saling bersinergi dalam menerapkan kebijakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan para pengguna jasa dalam pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional perusahaan.

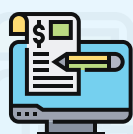


# Layanan yang Unggul

PT Angkasa Pura I (Persero) berkomitmen untuk menyediakan layanan kebandaraan yang unggul bertaraf internasional. Terkait hal tersebut, Angkasa Pura I kemudian menerapkan *Information and Communicaton Technology* (ICT) kelas dunia yang terangkum dalam strategi teknologi informasi,

yang mencakup strategi *operation excellence*, *revenue safeguarding*, penguatan fondasi ERP, dan penguatan fondasi ICT. Penjelasan berikut memaparkan lebih rinci mengenai strategi teknologi informasi Perusahaan.

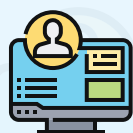
## Strategi Operation Excellence



Ini merupakan strategi penguatan teknologi komunikasi untuk mendukung proses bisnis yang andal melalui penerapan:

- Airport Operation Control Center* (AOCC) bertujuan memperoleh percepatan koordinasi di sisi operasional antar stakeholder di bandara, dimana hal ini telah diterapkan pada seluruh bandara Angkasa Pura I. Selain itu, untuk mendukung implementasi dari strategi tersebut, Angkasa Pura I telah melakukan perencanaan solusi teknologi *Airport Operation Control System* (AOCS) sehingga memperoleh standar teknologi dan strategi implementasi AOCS.
- Program “SATU Aplikasi untuk Prestasi” sejak tahun 2017, dimana program ini merupakan layanan otomasi perkantoran *Office Collaboration Platform* (OCP) berbasis digital, Tata Naskah Dokumen Elektronik (TNDE), API *e-Learning* (APeL), *Knowledge Management System* (KMS) berbasis *website*, maupun *mobile apps* yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengetahuan dan kompetensi seluruh personel Angkasa Pura I.
- Under Vehicle Surveillance System* (UVVS) di 4 bandara, yaitu Bandara Juanda Surabaya, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, dan Syamsudin Noor Banjarmasin bertujuan meningkatkan keamanan area bandara yang bekerja sama dengan fungsi *airport security* dengan kemampuan mendeteksi atau memindai mobil atau kendaraan yang melintas di area bandara yang dianggap perlu sterilisasi dari bahan berbahaya.

## Strategi Revenue Safeguarding



Strategi ini merupakan upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung *revenue safeguarding*. Penerapan strategi ini antara lain penggunaan ICT yang berhubungan dengan jasa layanan, seperti:

- Passenger Service Charge on Ticket System* (POTS) yang merupakan alat bantu bagi fungsi *aeronautical* dalam mendapatkan informasi penumpang yang telah membayarkan jasa *Passenger Service Charge* (PSC)/*paying pax*.
- Sistem Informasi Operasi dan Komersial (Siopskom) yang merupakan alat bantu bagi fungsi *airport operation* dan *aeronautical* dalam melakukan pencatatan dan penerbitan penagihan atas penggunaan *resource* (*garbarata*, *parking stand*, *unscheduled flight*) oleh *airlines* dan *ground handling*.
- Parking system* (sistem perparkiran kendaraan bermotor) yang merupakan alat bantu dalam melakukan monitoring dan pengelolaan data transaksi parkir kendaraan bermotor.
- Sistem Point of Sales System* (POSS) di seluruh bandara yang merupakan alat bantu yang berfungsi monitoring dan pengelolaan data transaksi penjualan *tenant* bandara (*retail*, *food & beverage*, dan lainnya).

### Strategi Pemenuhan Layanan *Enterprise Management*



Strategi ini dilakukan oleh Angkasa Pura I yang bertujuan untuk pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mendapatkan informasi berkualitas dengan melakukan penerapan:

- a. Kemudahan perencanaan, penyajian, dan *monitoring* anggaran perusahaan dengan implementasi pengembangan SAP BPC-Planning.
- b. Kemudahan konsolidasi laporan keuangan antar induk dan anak perusahaan dengan implementasi SAP BPC-Consolidation
- c. Kemudahan pengelolaan data *human capital* antar induk dan anak perusahaan melalui implementasi ERP Multi Company.
- d. Kemudahan pengelolaan risiko perusahaan melalui pengembangan sistem manajemen risiko (*i-Risk*) berbasis *website*.

### Strategi *Customer Experience*



Strategi ini merupakan upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan yang optimal guna meningkatkan kepuasan pengguna layanan, melalui penerapan:

- a. *Mobile apps* yang memberikan informasi bandara, info penerbangan, *parking*, info wisata, info hotel, transportasi, *shop & dine* (dapat diunduh di Apple Store dan Google Playstore).
- b. Layanan Contact Center Angkasa Pura 172 yang dapat diakses melalui telepon, SMS, *e-mail*, *website*, maupun *social media* sehingga dapat meningkatkan kemampuan menangkap informasi dan kebutuhan pelanggan secara personalisasi serta menyediakan fasilitas.
- c. Layanan wi-fi gratis dengan *bandwidth up to 100 MB per access point* yang merupakan bagian dari strategi Angkasa Pura I untuk menerapkan *smart airport* dan meningkatkan indeks kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction Index/CSI*) bandara.
- d. *X-Ray smartlane* dan perangkat BCM *counter* dan mesin *autogate* pemeriksaan keimigrasian di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali yang bertujuan untuk meningkatkan (*Customer Satisfaction Index/CSI*) sehingga dapat mengurangi waktu antrean, mempercepat pemeriksaan barang para penumpang maupun mempercepat proses pelayanan keimigrasian (dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan hukum negara).

## Strategi Penguatan Fondasi ICT



Strategi penguatan fondasi ICT merupakan upaya meningkatkan kecukupan kapasitas dan terjaminnya keamanan infrastruktur, mulai level fasilitas, perangkat keras, dan jaringan komunikasi melalui penerapan:

- Standardisasi infrastruktur ICT (LAN, WAN, Communication, wi-fi, dan server),
- Pembangunan *re-engineering* infrastruktur (tahap I) jaringan komunikasi data yang terintegrasi dan aman sebagai *backbone* layanan perusahaan.
- Teknologi PBX Voice-over-IP yang terintegrasi dengan seluruh kantor cabang Angkasa Pura I guna peningkatan efisiensi biaya komunikasi telepon antarcabang.

## Strategi Peningkatan Performa Tata Kelola ICT



Strategi peningkatan performa tata kelola ICT merupakan tolak ukur yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam menilai kualitas dan efektivitas teknologi informasi perusahaan melalui penerapan:

- Penyusunan kebijakan tata kelola TI (*IT policy*) (Keputusan Direksi No. KEP.205/OM.02.04/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi PT Angkasa Pura I (Persero) yang merupakan kebijakan teknologi informasi perusahaan disusun berdasarkan *best practice framework* Cobit.
- Revisi prosedur mutu dan kebijakan tata kelola TI.
- Pelaksanaan *review* tata kelola teknologi informasi (*maturity level*) secara periodik.
- Pelaksanaan *Information Technology Security Assesment* (termasuk *security testing*) untuk mendapatkan strategi berupa *action plan* yang tepat dan sesuai kebutuhan perusahaan dalam pengelolaan siber serta pemenuhan kepatuhan Peraturan Menhub PM.80 tahun 2017 dan Peraturan Menkominfo No. 04 tahun 2016.





# Inovasi dan Kewirausahaan

## INOVASI PROSES OPERASI DAN PELAYANAN BANDARA

Dalam rangka meningkatkan kualitas produk dan layanan kebandarudaraan, serta mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis, Angkasa Pura I telah melakukan berbagai inovasi, antara lain:

### 1. Ruang Multisensori (*Multy Sensory Room*)

Ruang multisensori merupakan fasilitas ruang tunggu yang disediakan bagi penumpang dengan spektrum autisme. Fasilitas ini disediakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang saat menunggu waktu *boarding*. Diresmikan pada 21 Oktober 2019 di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, fasilitas ini merupakan layanan *multisensory* pertama di bandara di Asia-Pasifik.

Fasilitas yang tersedia dirancang untuk merangsang berbagai indera melalui matras di lantai dan dinding, lantunan instrumen musik, bola *gymnastic*, dan lampu LED warna-warni. Ruangan ini didesain khusus untuk memberikan stimulan yang menenangkan, mengatasi ketegangan, dan mengurangi perilaku *temper* tantrum pada anak dengan spektrum autisme. Terdapat dua tipe ruangan dengan kegunaan berbeda, yaitu ruangan putih (*white room*) dan ruangan gelap (*black room*). *White room* berguna untuk menciptakan rasa aman, nyaman, dan santai sementara *black room* berguna untuk memfasilitasi pemahaman anak dengan spektrum autisme terhadap lingkungan sekitar dan pemahaman mengenai hubungan sebab-akibat.

### 2. Ruang Tunggu Penumpang Berkebutuhan Khusus (*Special Needs Services Holding Room*)

Ruang tunggu penumpang berkebutuhan khusus merupakan ruangan yang disediakan bagi penumpang berkebutuhan khusus yang ada di area *check-in* terminal penumpang. Ruang tunggu penumpang berkebutuhan

khusus (*special needs services holding room*) diresmikan pada 21 Oktober 2019 di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Ruang tunggu penumpang berkebutuhan khusus ini telah tersedia di 6 (enam) bandara, yakni:

- Bandara I Gustri Ngurah Rai Bali
- Bandara Internasional Yogyakarta Kulopn Progo
- Bandara Adi Soemarno Solo
- Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang
- Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan
- Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

Ruang tunggu penumpang berkebutuhan khusus sama halnya dengan ruang multisensori didesain khusus dengan harapan membuat rasa tenang dan nyaman saat menunggu proses *check-in* dan waktu *boarding*. Ruang ini dilengkapi fasilitas kursi, meja, *bean bag*, dan kasur.

Dengan tersedianya fasilitas ini diharapkan meningkatkan kenyamanan pengguna jasa bandara berkebutuhan khusus serta menambah nilai pelayanan bagi mitra kerja, mitra usaha, dan pengelola bandara.

### 3. Buku Panduan

Menindaklanjuti tersedianya ruang multisensori dan ruang tunggu penumpang berkebutuhan khusus, unit kerja Airport Services & Hospitality menerbitkan beberapa panduan berbasis *e-book*, yaitu:

- a. Panduan Pelayanan Penumpang Berkebutuhan Khusus dan Spektrum Autisme di Bandar Udara,
- b. Panduan Pelayanan Penumpang Berkebutuhan Khusus di Bandar Udara, dan
- c. Panduan Pengalaman Penumpang di Bandar Udara PT Angkasa Pura I (Persero).

Pengesahan buku panduan tersebut bersamaan dengan peresmian ruang multisensori dan ruang tunggu penumpang berkebutuhan khusus yang dilaksanakan di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang dengan peruntukan sebagai berikut:

- a. Buku Panduan Penumpang Berkebutuhan Khusus dan Spektrum Autisme ditujukan untuk petugas bandara
- b. Panduan Pengalaman Penumpang di Bandara PT Angkasa Pura I (Persero) ditujukan untuk pengguna jasa bandara yang dapat diakses melalui laman [www.ap1.co.id](http://www.ap1.co.id)

Sosialisasi dan bimbingan teknis atas buku panduan telah dilaksanakan secara *online* dan secara langsung di Kantor Pusat kepada personel bandara di wilayah kerja Angkasa Pura I. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan kompetensi dan kemampuan personil dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, khususnya para pengguna jasa berkebutuhan khusus.

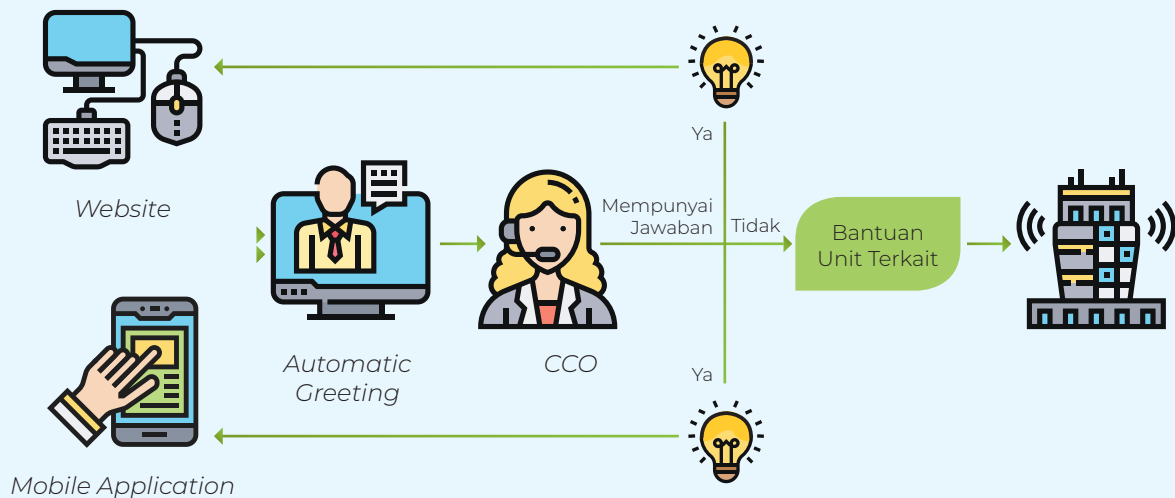
#### 4. Live Chat

*Live chat* merupakan layanan pesan secara *online* dan *live* menggunakan fitur otomatis yang terkoneksi dengan petugas. Kini pengguna jasa dapat berinteraksi dengan penyedia layanan secara mudah, Tujuan penyelenggaraan *live chat* adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan layanan suara pelanggan (*voice of customer*);
- b. Peningkatan kepuasan pengguna jasa; dan
- c. Kemudahan pengguna jasa berkomunikasi dengan penyedia jasa secara *real time*.

Fasilitas *live chat* dapat diakses melalui *website* [www.ap1.co.id](http://www.ap1.co.id) dan *website* bandara-bandara PT Angkasa Pura I (Persero).

#### Alur Pelayanan Live Chat



## 5. *Lost and Found System*

*Lost and found system* merupakan fasilitas layanan yang disediakan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kepuasan pengguna jasa bandara, dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemudahan bagi pengguna jasa menyampaikan suara pelanggan terkait ketinggalan dan/atau kehilangan barang di bandara;
- b. Meningkatkan kemudahan bagi pengguna jasa untuk mengetahui informasi barang-barang yang tertinggal dan/atau ditemukan di bandara;
- c. Meningkatkan kinerja dan integrasi pelaporan suara pelanggan khususnya pelaporan dan/atau temuan barang tertinggal dan/atau hilang di bandara.

Penyediaan fasilitas layanan ini diselenggarakan dengan berkolaborasi dengan unit kerja Airport Security dan Information Technology sebagai penyedia sistem/aplikasi.

## 6. *X-ray Automated Tray Return System (X-ray ATRS)*

Angkasa Pura I meresmikan fasilitas *X-ray Automated Tray Return System (X-ray ATRS)* pada 5 September 2019 di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. *X-ray ATRS* merupakan system pemeriksaan penumpang dan bagasi dengan teknologi pemindaian terkini yang berada pada area *screening check point (SCP)*

di terminal keberangkatan internasional yang akan meningkatkan jaminan keamanan, meningkatkan keakuratan, dan menurunkan *stress* akibat waktu antrean dan berbagai keuntungan lainnya, yaitu mempercepat proses pemeriksaan barang dan calon penumpang. Jika *x-ray* konvensional rata-rata hanya mampu memeriksa 155 *tray* per jam dengan maksimal barang yang mampu diperiksa saat *peak hour* mencapai 235 *tray*, *x-ray ATRS* mampu memeriksa rata-rata hingga 285 *tray* per jam dengan kemampuan maksimum saat *peak hour* dapat memeriksa mencapai 410 *tray* per jam.

Penggunaan *x-ray ATRS* ini merupakan yang pertama di Indonesia dan sebagai wujud komitmen perusahaan terhadap upaya peningkatan pelayanan bandara yang berkelanjutan

## 7. *Boarding Pass Scanner (Flap Barrier)*

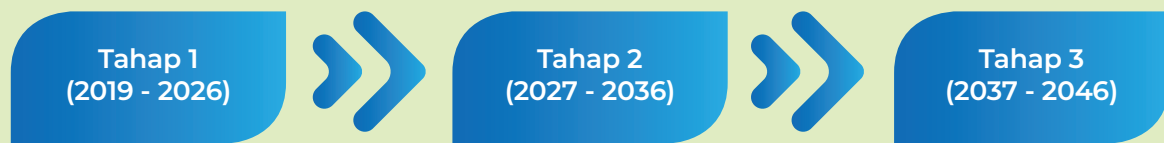
Saat ini terdapat 12 unit *boarding pass scanner (flap barrier)* yang terletak di terminal keberangkatan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Fasilitas ini ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi penumpang untuk dapat secara otomatis melakukan pemindaian *boarding pass* penumpang tanpa harus mengantre di tempat scanning manual. Fasilitas ini dapat dipergunakan oleh penumpang yang membawa *boarding pass* dalam bentuk tercetak, ataupun masih dalam bentuk *soft file* dalam *smartphone*.

## INOVASI PENGEMBANGAN BANDARA

Pertumbuhan frekuensi lalu lintas pesawat udara di Bandara Adisutjipto Yogyakarta yang sangat pesat mendorong Angkasa Pura I mengambil kebijakan untuk membangun Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Pembangunan bandara baru ini diharapkan dapat meningkatkan menambah kapasitas dan meningkatkan layanan fasilitas bandara. Bandara Internasional Yogyakarta yang dirancang untuk menjadi bandara berkelas internasional yang dibangun dalam tiga tahapan sejak 2019 hingga 2046.

Pada tahun 2019, Angkasa Pura I telah menyelesaikan pekerjaan persiapan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta. Bandara Internasional Yogyakarta telah mulai dioperasikan pada tanggal 6 Mei 2019 dengan konsep *minimum operation*. Selanjutnya, pengembangan Bandara Internasional Yogyakarta tetap berlanjut, khususnya untuk area *landside* dan terminal. Adapun target pengoperasian secara penuh Bandara Internasional Yogyakarta pada 29 Maret 2020.

### Rencana Jangka Waktu dan Tahapan Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta



Sejak awal perencanaan, pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta diselaraskan dengan kebutuhan dan kondisi kebencanaan di Indonesia. Potensi gempa, likuefaksi, dan tsunami menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan tersebut. Beberapa inisiatif yang dilakukan antara lain:

- **Menggunakan *Dynamic Compaction (DC)* yang inovatif, yang disebut *Rapid Impulse Compaction (RIC)***

Angkasa Pura I melakukan perbaikan tanah untuk memitigasi potensi likuefaksi pada proyek pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta dengan menerapkan metode *dynamic compaction*. Metode ini memampatkan tanah asli dengan menjatuhkan beban berat dari ketinggian tertentu.

- **Simulasi dan Mitigasi Bencana Tsunami**

Angkasa Pura I telah mengidentifikasi kemungkinan bencana tsunami yang berdampak pada Bandara Internasional Yogyakarta dan mengusulkan beberapa inovasi, yakni:

1. Menetapkan bangunan terminal dan fasilitas bandara lainnya sejauh mungkin dari pantai dengan menetapkan *slope* maksimal yang diperbolehkan.
2. Melakukan reboisasi hutan pantai di antara area bandara dan pantai dengan tanaman cemara udang maupun tanaman lain dengan jenis akar dalam untuk meningkatkan friksi.
3. Melakukan elevasi ulang *runway* (landas pacu) secara berkala, misalnya, 100 atau 200 tahun, agar cukup tinggi dan aman dari bahaya tsunami.
4. Menerapkan *early warning system* dengan menentukan spesifikasi bangunan *Airport Operation Center (AOC)* yang dapat



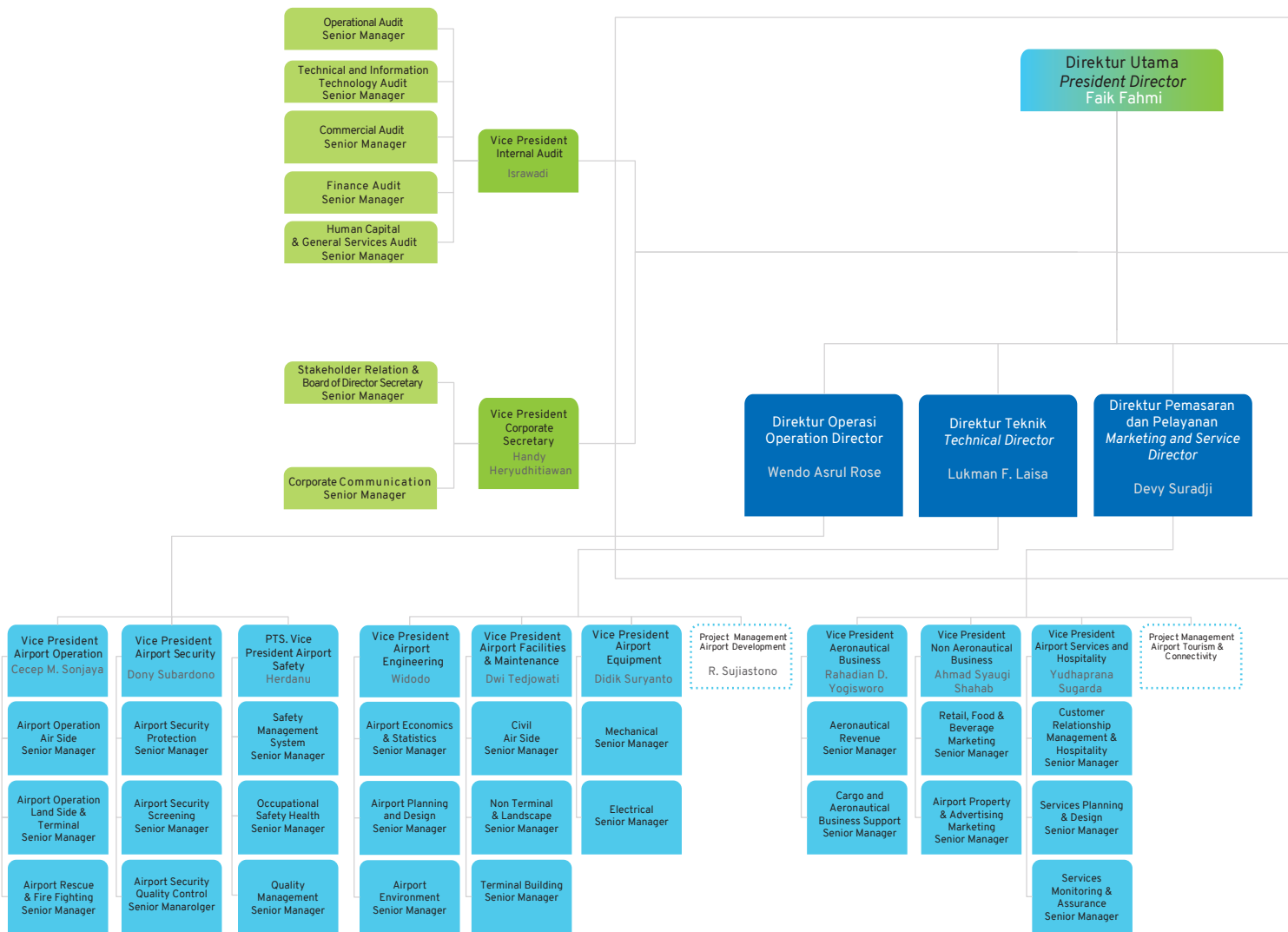


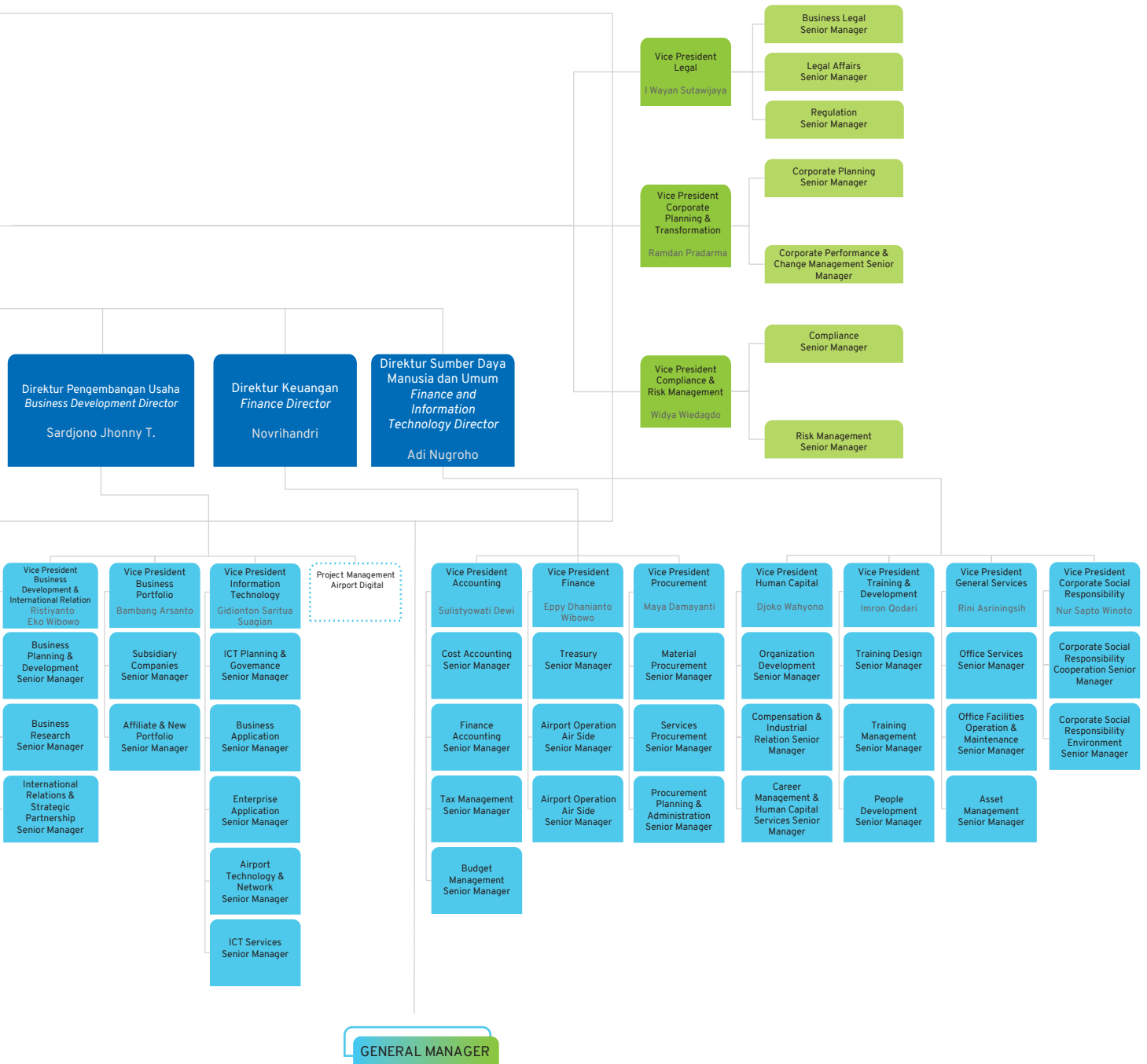
mengakomodir berbagai kelengkapan, seperti instrumen terintegrasi sistem peringatan dini BMKG, sirine untuk peringatan dini tsunami, dan *instrument receiver* peringatan dini tsunami dari BMKG.

5. Membangun bangunan pelindung di kawasan bandara, khususnya di sisi laut, untuk menahan tsunami pada ketinggian tertentu.
  6. Membuat ketinggian lantai *ground floor* bandara lebih tinggi, yakni elevasi +9,0 m, dibandingkan *magnitude* Bandara Internasional Yogyakarta, yakni 8,5 m.
  7. Meletakkan kegiatan orang lebih banyak di lantai atas dan menempatkan utilitas di lantai bawah.
- **Menyiapkan Bandara Internasional Yogyakarta sebagai Shelter Evakuasi Bencana**  
Angkasa Pura I memperhatikan berbagai risiko pada keselamatan manusia, termasuk juga risiko dari bencana tsunami yang berdampak pada lingkungan dan manusia di sekitar Bandara Internasional Yogyakarta. Untuk itu Angkasa Pura I berinisiatif untuk:
    1. Menyediakan *escape building* pada lantai paling atas bangunan terminal yang tahan gempa dan gelombang tsunami, yang bertujuan untuk menampung orang yang sedang berada di bandara, termasuk penumpang, karyawan, pengunjung, dan pelaku kegiatan lain.
    2. Mendesain bangunan terminal dengan lantai 2 (dua) yang lebih luas dan lantai dasar yang memiliki banyak bukaan dan akses untuk ke luar agar dapat mengurangi dampak tsunami sedangkan lantai di atasnya dapat dijadikan tempat evakuasi untuk meminimalkan korban jiwa.
    3. Menyiapkan lantai dasar gedung terminal beserta fasilitasnya dapat terkena tsunami sedangkan lantai di atasnya dapat dijadikan tempat evakuasi untuk meminimalkan korban jiwa.
    4. Merencanakan Bandara Internasional Yogyakarta dapat digunakan sebagai Tempat Evakuasi Sementara (TES) jika terjadi bencana.

# Struktur Organisasi

PER 31 DESEMBER 2019





# Profil Dewan Komisaris

PER 31 DESEMBER 2019



Harry Z. Soeratin

Ali Mochtar Ngabalin

Djoko Sasono

Suprasetyo

Tri Budi Satriyo



### Djoko Sasono

Komisaris Utama

Kediri, 25 September 1963  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	56 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana (S1), Teknik Planologi, Institut Teknologi Bandung, 1987</li> <li>• Master (S2), Transportation Planning and Engineering, The University of Leeds, United Kingdom, 1994</li> <li>• Doktor (S3), Transportation Planning and Policy (Urban Engineering), The University of Tokyo, Jepang, 2002</li> </ul>
Pelatihan/Sertifikasi	Informasi dapat dilihat di halaman 158 pada tabel pelatihan di laporan tahunan ini.
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencana Muda (2002-2003)</li> <li>• Kabid Program dan Evaluasi, Puslitban Manajemen Transportasi Multimoda-Badan Litbang (2003-2005)</li> <li>• Direktur Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan, Kedeputusan Bidang Perencanaan dan Pemrograman Badan Pelaksanaan BRR NAD-NIAS (2005-2006)</li> <li>• Wakil Deputy Bidang Pembangunan Infrastruktur II (2006)</li> <li>• Wakil Deputy Bidang Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan</li> <li>• Wakil Deputy Bidang Perumahan dan Pemukiman Bapel BRR NAD-NIAS (2007-2008)</li> <li>• Perumus Kebijakan Trans. Multimoda (2008-2009)</li> <li>• Kepala Pusat Data dan Informasi (2009-2012)</li> <li>• Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan (2012-2015)</li> <li>• Direktur Jendral Perhubungan Darat (2015-2016)</li> <li>• Penyusun Dokumen Perencanaan dan Program (2016)</li> <li>• Staf ahli Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan (2016)</li> <li>• Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan (2017-2018)</li> <li>• Sekretaris Jendral Kementerian Perhubungan (2018-Sekarang).</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Komisararis Utama Perseroan sejak 19 Juli 2018 berdasarkan akta keputusan SK Menteri Negara BUMN No. SK-210/MBU/07/2018 Tanggal 19 Juli 2018, hingga tanggal 19 Juli 2023
Jabatan Rangkap	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2018 - sekarang)
Hubungan Afilias	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisararis lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.
Kepemilikan Saham Angkasa Pura	Tidak ada kepemilikan saham pada PT Angkasa Pura I (Persero)
Periode Jabatan	19 Juli 2018-19 Juli 2023 (periode pertama)





### Harry Z. Soeratin

Komisaris

Jakarta, 14 Desember 1970.  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	49 tahun per Desember 2018
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ekonomi (S1), Akuntansi, Universitas Padjajaran, Bandung, 1987</li> <li>• Magister Manajemen (S2), Akuntansi, Universitas Indonesia, 1991</li> <li>• Program Ph.D (S3), Business and Commerce Faculty, Universitas Keio, Tokyo, 1999</li> <li>• Program Doktorat (DMB), Universitas Padjadjaran, Bandung, 2016</li> </ul>
Pelatihan/Sertifikasi	Informasi dapat dilihat di halaman 158 pada tabel pelatihan di laporan tahunan ini.
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (1987-1992)</li> <li>• Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN, Kemenerian BUMN (1992-2008)</li> <li>• Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (2008-2016)</li> <li>• Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (2016-2018)</li> <li>• Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial (2018-saat ini)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) sejak 16 Januari 2018, dengan dasar hukum pengangkatan pertama kali adalah SK Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. SK-17/MBU/01/2018 tanggal 16 Januari 2018, hingga ada keputusan RUPS lebih lanjut
Jabatan Rangkap	Kepala Badan di Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial (2018-sekarang)
Hubungan Afilias	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Kepemilikan Saham Angkasa Pura	Tidak ada kepemilikan saham pada PT Angkasa Pura I (Persero)
Periode Jabatan	16 Januari 2018-sekarang (periode pertama)



### Suprasetyo

Komisaris

Magelang, 23 Mei 1958  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	61 tahun per Desember 2019
Domisili	Depok
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Teknik (S1), Teknik Kimia, Universitas Gadjah Mada, 1985
Pelatihan/Sertifikasi	Informasi dapat dilihat di halaman 158 pada tabel pelatihan di laporan tahunan ini.
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasi Operasi Terminal, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Agustus 1992 – Juli 1994)</li> <li>• Kasi PKPPK, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Juli 1994 – Maret 1999)</li> <li>• Kasubdit Standarisasi Kespem, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Maret 1999 – Januari 2012)</li> <li>• Kasubdit Pengamanan Pelayanan Darurat, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Januari 2012 - Mei 2007)</li> <li>• Atase Perhubungan KBRI di Washington DC (Mei 2007 – Juni 2011)</li> <li>• Kasubdit Kendali Mutu Keamanan Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Juni 2011 - Desember 2012)</li> <li>• Kasubdit Pelayanan Darurat Direktorat Keamanan Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Desember 2012 – April 2013)</li> <li>• Kepala Bandara Kelas Utama Hang Nadim Batam, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (April 2013 – Desember 2014)</li> <li>• Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah I Kelas Utama Soekarno-Hatta, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Desember 2014 – Januari 2015)</li> <li>• Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI (Januari 2015 – Februari 2017)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) sejak 4 April 2017 dengan dasar hukum pengangkatan pertama kali melalui SK Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. SK.65/MBU/4/2017 Tanggal 4 April 2017, hingga ada keputusan RUPS lebih lanjut
Jabatan Rangkap	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.
Hubungan Afilias	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Kepemilikan Saham Angkasa Pura	Tidak ada kepemilikan saham pada PT Angkasa Pura I (Persero)
Periode Jabatan	04 April 2017– sekarang (periode pertama)



### Ali Mochtar Ngabalin

Komisaris

Fakfak, Papua Barat, 25 Desember 1968.  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	51 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana (S1), IAIN Alauddin Makassar, 1994</li> <li>• Master (S2), Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 2001</li> <li>• Doktor (S3), Universitas Negeri Jakarta, 2013</li> </ul>
Pelatihan/Sertifikasi	Informasi dapat dilihat di halaman 158 pada tabel pelatihan di laporan tahunan ini.
Pengalaman Kerja	Anggota Komisi I DPR RI periode 2004-2009
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak 19 Juli 2018, berdasarkan akta keputusan SK Menteri Negara BUMN No. SK-210/MBU/07/2018 Tanggal 16 Januari 2018 hingga tanggal 19 Juli 2023
Jabatan Rangkap	Juru Bicara Kantor Staf Presiden (2018-sekarang)
Hubungan Afilias	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Kepemilikan Saham Angkasa Pura	Tidak ada kepemilikan saham pada PT Angkasa Pura I (Persero)
Periode Jabatan	19 Juli 2018-sekarang (periode pertama)



### Tri Budi Satriyo

Komisaris

Blora, 12 Desember tahun 1961  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	58 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana (S1), Administrasi Negara, Universitas Terbuka Madiun, 1997</li> <li>• Master (S2), Manajemen, Universitas IMMI, 2010</li> </ul>
Pelatihan/Sertifikasi	Informasi dapat dilihat di halaman 158 pada tabel pelatihan di laporan tahunan ini.
Pengalaman Kerja	TNI AU dari Tahun 1984 sampai dengan sekarang
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak 19 Juli 2018, berdasarkan akta keputusan SK Menteri Negara BUMN No. SK-210/MBU/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 hingga tanggal 19 Juli 2023
Jabatan Rangkap	Marsekal Muda TNI AU (1984-sekarang)
Hubungan Afilias	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.
Kepemilikan Saham Angkasa Pura	Tidak ada kepemilikan saham pada PT Angkasa Pura I (Persero)
Periode Jabatan	19 Juli 2018-sekarang (periode pertama)

# Profil Direksi

PER 31 DESEMBER 2019



Adi Nugroho

Wendo Asrul Rose

Devy Suradji

Faik Fahmi

Lukman F. Laisa

Novrihandri

Sardjono Jhony  
Tjitrokusomo





### Faik Fahmi

Direktur Utama

Purbalingga, pada 12 Desember 1967.  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	53 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	Sarjana (S1), Ekonomi bidang Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993
Pelatihan/Sertifikasi	Informasi dapat dilihat di halaman 159 pada tabel pelatihan di laporan tahunan ini.
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Layanan (Executive Vice President/EVP) of Service PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (April 2012-Desember 2014)</li> <li>• Director of Commercial and Business Development PT Angkasa Pura II (Persero) (Januari 2015-11 September 2016)</li> <li>• Direktur Pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (12 September 2016-21 Desember 2016)</li> <li>• Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (21 Desember 2016-22 Desember 2017)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 22 Desember 2017, berdasarkan akta keputusan SK Menteri Negara BUMN No. SK-289/MBU/12/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero), tanggal 22 Desember 2017, hingga keputusan RUPS lebih lanjut.
Jabatan Rangkap	Komisaris Utama di PT Angkasa Pura Suport (2017-sekarang)
Hubungan Afilias	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.
Kepemilikan Saham Angkasa Pura	Tidak ada kepemilikan saham pada PT Angkasa Pura I (Persero)
Periode Jabatan	22 Desember 2017–sekarang (periode pertama)



### Novrihandri

Direktur Keuangan

Padang, pada 20 November 1971  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	48 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ekonomi (S1), Akuntansi, Fakultas Ekonomi dari Universitas Andalas, Padang, 1995</li> <li>• Magister Manajemen (S2), Universitas Gajah Mada, 2010</li> </ul>
Pelatihan/Sertifikasi	Informasi dapat dilihat di halaman 159 pada tabel pelatihan di laporan tahunan ini.
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asisten Deputi Direktur Bidang Kerjasama Non Aero Wilayah I (2007-2011)</li> <li>• Direktur Keuangan PT Angkasa Pura Support (2012)</li> <li>• Business Development Group Head (2013)</li> <li>• Human Capital Support Expert (2014)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Direktur Keuangan berdasarkan SK Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. SK-222/MBU/II/2015 tanggal 09 November 2015 hingga ada keputusan RUPS lebih lanjut
Jabatan Rangkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama PT Angkasa Pura Logistik (2016-sekarang)</li> <li>• Dewan Pengawas Dapenra (2018-sekarang)</li> </ul>
Hubungan Afilias	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.
Kepemilikan Saham Angkasa Pura	Tidak ada kepemilikan saham pada PT Angkasa Pura I (Persero)
Periode Jabatan	9 November 2015–sekarang (periode pertama).



### Devy W.A. Suradji

Direktur Pemasaran dan Pelayanan

Jakarta, 9 April 1970.  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	49 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Perikanan (S1), Institut Pertanian Bogor (IPB), 1993</li> <li>• Master (S2), Environmental Health Management New Haven University, Connecticut, Amerika Serikat, 1996</li> </ul>
Pelatihan/Sertifikasi	Informasi dapat dilihat di halaman 159 pada tabel pelatihan di laporan tahunan ini.
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• General Manager Competency Management PT Surveyor Indonesia sejak (1996–2004)</li> <li>• Managing Director Indonesia Friday Concepts Sdn. Bhd. (2005–2007)</li> <li>• Chief Consultant di Tricon Group Indonesia (2007–2009)</li> <li>• Marketing and Communication Director WWF Indonesia (2009–2016)</li> <li>• Staf Khusus Menteri BUMN (2017)</li> <li>• Komisararis PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (2017)</li> <li>• Vice Deputy II INASGOC (2018)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Direktur Pemasaran dan Pelayanan PT Angkasa Pura I (Persero) berdasarkan SK Menteri Negara BUMN No. SK-289/MBU/12/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I Tanggal 22 Desember 2017, hingga ada keputusan RUPS lebih lanjut
Jabatan Rangkap	Komisaris Utama PT Angkasa Pura Retail (2018 - sekarang)
Hubungan Afilias	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.
Kepemilikan Saham Angkasa Pura	Tidak ada kepemilikan saham pada PT Angkasa Pura I (Persero)
Periode Jabatan	22 Desember 2017–sekarang (periode pertama)



### Wendo Asrul Rose

Direktur Operasi

Padang, pada 20 November 1971  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	49 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik (S1), Teknik Mesin, Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta, 1995
Pelatihan/Sertifikasi	Informasi dapat dilihat di halaman 159 pada tabel pelatihan di laporan tahunan ini.
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Dinas Mekanikal dan Teknik Air PT Angkasa Pura I (Persero) (2003-2004)</li> <li>• Asisten Deputi Direktur PT Angkasa Pura I (Persero) (2004-2009)</li> <li>• Deputi Direktur Teknik Pengawasan PT Angkasa Pura I (Persero) (2009-2011)</li> <li>• Pimpinan Proyek Pengembangan Bandara Internasional Sepinggan PT Angkasa Pura I (Persero) (2011-2013).</li> <li>• General Manager Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan PT Angkasa Pura I (Persero) (2013-2015).</li> <li>• Pelaksana tugas Direktur Utama periode 20 November 2017 – 21 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.5/DK.AP.I/2017</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Direktur Operasi Perseroan berdasarkan SK Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. SK-222/MBU/II/2015 tanggal 9 November 2015, hingga ada keputusan RUPS lebih lanjut
Jabatan Rangkap	Komisaris PT Gapura Angkasa (2017-sekarang)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Kepemilikan Saham Angkasa Pura	Tidak ada kepemilikan saham pada PT Angkasa Pura I (Persero)
Periode Jabatan	9 November 2015–sekarang (periode pertama)



### Lukman F. Laisa

Direktur Teknik

Corontalo, 6 Maret 1968.  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	51 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik (S1), Teknik Sipil, Institut Teknologi Nasional Malang, 1992
Pelatihan/Sertifikasi	Informasi dapat dilihat di halaman 159 pada tabel pelatihan di laporan tahunan ini.
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Subdit Landasan Direktorat Teknik Bandar Udara, Kementerian Perhubungan (1993-2002)</li> <li>• Kepala Seksi Pekerjaan Sipil Proyek Konstruksi Bandara Padang Baru, Kementerian Perhubungan (2002-2005)</li> <li>• Staf Fasilitas Sisi Udara Direktorat Bandar Udara, Kementerian Perhubungan (2006)</li> <li>• Kepala Seksi Program dan Standarisasi Prasarana Bandar Udara Direktorat Bandar Udara, Kementerian Perhubungan (2010-2013)</li> <li>• Kepala Bidang P2B Kantor Otoritas Bandara Wilayah III Surabaya, Kementerian Perhubungan (2014-2015)</li> <li>• Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (2014-2015)</li> <li>• Kepala Bandar Udara Wamena Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (2015)</li> <li>• Direktur Teknik Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (2015- 2017)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Direktur Teknik berdasarkan SK Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. SK-53/MBU/03/2018 tanggal 05 Maret 2018, hingga ada keputusan RUPS lebih lanjut
Jabatan Rangkap	Komisaris Utama PT Angkasa Pura Properti (2018-sekarang)
Hubungan Afilias	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.
Kepemilikan Saham Angkasa Pura	Tidak ada kepemilikan saham pada PT Angkasa Pura I (Persero)
Periode Jabatan	05 Maret 2018–sekarang (periode pertama).





### Adi Nugroho

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

2 Mei 1969  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	50 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ekonomi (S1), Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Pancasila, Jakarta, 1993</li> <li>• Magister (S2), Marketing, Massey University, New Zealand, 2000</li> <li>• Doktor (S3), <i>Service Management</i>, Northern Malaysia University, 2007</li> </ul>
Pelatihan/Sertifikasi	Informasi dapat dilihat di halaman 159 pada tabel pelatihan di laporan tahunan ini.
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manager Komersial dan Pengembangan Usaha (2008-2012)</li> <li>• Deputi Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Wilayah II (2012-2013)</li> <li>• Business Development Group Head (2013)</li> <li>• Project Portfolio Analyst (2013-2015)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum berdasarkan SK Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. SK-222/MBU/II/2015 tanggal 09 November 2015, hingga adakeputusan RUPS lebih lanjut
Jabatan Rangkap	Komisaris Utama PT Angkasa Pura Hotel (2015-sekarang)
Hubungan Afilias	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.
Kepemilikan Saham Angkasa Pura	Tidak ada kepemilikan saham pada PT Angkasa Pura I (Persero)
Periode Jabatan	9 November 2015–sekarang (periode pertama).



**Sardjono Jhony Tjitrokusumo**  
Direktur Pengembangan Usaha

Jakarta, 5 Agustus 1971.  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	48 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	Lulusan Australian Aviation College, CPL/IR/ME tahun 1991.
Pelatihan/Sertifikasi	Informasi dapat dilihat di halaman 159 pada tabel pelatihan di laporan tahunan ini.
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pilot Merpati Airlines (1991-2004)</li> <li>• Silk Air Singapore Airlines (2004-2006)</li> <li>• Qatar Airways (2006-2008)</li> <li>• Etihad Airways (2008-2010)</li> <li>• Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (2010-2012)</li> <li>• Founder/Owner Leste Aviation (2013)</li> <li>• Founder PT MBN (2007-2017)</li> <li>• Direktur Operasional West Java International Airport (2015)</li> <li>• Chairman West Java Enterprises Partnership (WEP) (2016-2017)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Direktur Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura I (Persero) berdasarkan SK Menteri Negara BUMN No. SK-155/MBU/08/2017 Tanggal 11 Agustus 2017, hingga ada keputusan RUPS lebih lanjut
Jabatan Rangkap	Komisaris PT Jasa Marga Bali Tol (2017-sekarang)
Hubungan Afilias	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.
Kepemilikan Saham Angkasa Pura	Tidak ada kepemilikan saham pada PT Angkasa Pura I (Persero)
Periode Jabatan	11 Agustus 2017–sekarang (Periode Pertama).

## Profil Pejabat Eksekutif



### I Wayan Sutawijaya

Vice President Legal

Jembrana, Bali, 4 Maret 1967  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	52 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Hukum (S1), Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 1995</li> <li>• Magister Manajemen (S2), STIE Mitra Indonesia, Yogyakarta, 2002</li> </ul>
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Head of Legal &amp; Compliance (2015-2018)</li> <li>• Head of Procurement (2013-2015)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Vice President Legal sejak 16 Juli 2018 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1130/KP.07.03/2018



### Handy Heryudhitiawan

Vice President Corporate Secretary

Jakarta, 25 Agustus 1976  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	43 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ekonomi (S1), Manajemen Ekonomi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara, 2003</li> <li>• Magister Manajemen (S2), Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2005</li> </ul>
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• General Manager Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan (2017-2018)</li> <li>• General Manager Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin (2015-2017)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Vice President Corporate Secretary sejak 28 Agustus 2018 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1649/KP.07.03/2018



### Israwadi

Vice President Internal Audit

Medan, 23 Agustus 1971  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	48 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sajana Teknik (S1), Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung, 1995</li> <li>Magister Manajemen (S2), Universitas Trisakti, Jakarta, 2005</li> </ul>
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vice President Corporate Secretary (2016-2018)</li> <li>Direktur Keuangan PT Angkasa Pura Hotel (2012-2016)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Vice President Internal Audit sejak 28 Agustus 2018 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1648/KP.07.03/2018 dan menjabat sebagai Direktur Kepatuhan, Aset, dan Pengadaan sejak 19 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-74/MBU/03/2020.



### Ramdan Pradarma

Vice President Corporate Planning & Transformation

Jakarta, 12 Januari 1965  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	54 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana (S1), Manajemen Informatika, Universitas Gunadarma, Jakarta, 1992</li> <li>Magister Komputer (S2), Universitas Indonesia, 2013</li> </ul>
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Airport Services Group Head (2016-2018)</li> <li>Co. General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali (Commercial SBU) (2013-2016)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Vice President Corporate Planning & Transformation sejak 16 Juli 2018 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1130/KP.07.03/2018



### Widya Wiedagdo

Vice President Compliance & Risk Management

Ujung Pandang, 3 Juli 1971  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	48 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi (S1), Manajemen, Universitas Pancasila, 1994
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plt. Direktur Utama PT Angkasa Pura Retail (2016-2018)</li> <li>Proyek Enterprise Resource Planning Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero) (2014-2016)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Vice President Compliance & Risk Management sejak 16 Juli 2018 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1130/KP.07.03/2018.



### Cecep Marga Sonjaya

Vice President Airport Operation

Bandung, 3 Februari 1965  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	54 tahun per desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Ekonomi (S1), Universitas Mahasaraswati, 2000</li> <li>Magister Manajemen Transportasi Udara (S2), Universitas Sahid, 2009</li> </ul>
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>General Manager Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (2016-2018)</li> <li>Corporate Expert (2018-2019)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Vice President Airport Operation sejak 1 Maret 2019 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.211/KP.07.03/2019





### Dony Subardono

Vice President Airport Security

Jakarta, 12 Juli 1976  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	43 tahun per desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	Sarjana Manajemen (S1), STIE Mahardika, Surabaya, 2017
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Airport Security Group Head (2015-2018)</li> <li>Screening Check Point Department Head (2013-2015)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Vice President Airport Security sejak 16 Juli 2018 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1130/KP.07.03/2018.



### Herdanu Sri Novanto

Pts. Vice President Airport Safety

Semarang, 6 November 1981  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	38 tahun per desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Teknik (S1), Teknik Sipil, Universitas Trisakti, 2002</li> <li>Magister (S2), Manajemen Strategis, Universitas Diponegoro, 2009</li> </ul>
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transformation Management Office (2019)</li> <li>Occupational Safety Health Senior Manager (2018–2019)</li> <li>Occupational Safety Health Department Head (2017–2018)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat Sebagai Pts. Vice President Airport Safety sejak 4 November 2019 berdasarkan Surat Perintah Direksi Nomor. PRIN.DP.564/OM.07.03/2019



### Widodo

Vice President Airport Engineering

Medan, 29 Juni 1967  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	52 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik (S1), Teknik Sipil, Universitas Atmajaya, Jakarta, 1994
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Project Management Office Group Head (2016-2018)</li> <li>Airport Facilities Readiness Group Head (2013-2016)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Vice President Airport Engineering sejak 16 Juli 2018 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1130/KP.07.03/2018



### Dwi Tedjowati

Vice President Airport Facilities & Maintenance

Yogyakarta, 5 Maret 1965.  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	54 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik (S1), Teknik Sipil, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Airport Facilities Readiness Group Head (2016-2018).</li> <li>Project Management Office Group Head (2013-2016).</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Vice President Airport Facilities & Maintenance sejak 16 Juli 2018 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1130/KP.07.03/2018.



**Didik Suryanto**

Vice President Airport Equipment

Lamongan, 30 Mei 1965  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	54 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik, Universitas Sriwijaya, 2005
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Airport Equipment Readiness Group Head (2018)</li> <li>• Airport Equipment Readiness Department Head I Gusti Ngurah Rai Bali (2016-2018).</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Vice President Airport Equipment sejak 16 Juli 2018 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1130/KP.07.03/2018



**R. Sujiastono**

Project Management Airport Development

Lahat, 15 April 1966  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	53 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Teknik (S1), Teknik Sipil, Universitas Sriwijaya, 1990</li> <li>• Magister (S2), Ilmu Administrasi, Universitas Sam Ratulangi, 2006</li> </ul>
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Project Manager Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (2015-2018)</li> <li>• Civil Landside Department Head (2013-2015)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Project Management Airport Development sejak 16 Juli 2018 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1130/KP.07.03/2018



### Rahadian D. Yogisworo

Vice President Aeronautical Business

Jombang, 18 Juli 1972  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	47 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi (S1), Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 1996
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Co. General Manager Commercial SBU (2016-2019)</li> <li>• Route Development Departement Head (2014-2015)</li> <li>• Airlines Marketing Departement Head (2013-2014)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Vice President Aeronautical Business sejak 1 Maret 2018 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.213/KP.07.03/2019.



### Ahmad Syaugi Shahab

Vice President Non Aeronautical Business

Palembang, 4 September 1976.  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	43 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ekonomi (S1), Akutansi, UNIBA Balikpapan, 2006.</li> <li>• Magister Manajemen (S2), Universitas Mercu Buana, Jakarta.</li> </ul>
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aviation Marketing Group Head (2015-2018)</li> <li>• Corporate Expert Level II Human Capital Group (2015)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Vice President Non Aeronautical Business sejak 16 Juli 2018 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1130/KP.07.03/2018



### Yudhaprana Sugarda

Vice President Airport Services & Hospitality

Jakarta, 23 Januari 1967  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	52 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Teknik (S1), Teknik Sipil, Universitas Katholik Parahyangan, 1991</li> <li>• <i>Mastere Spesialise en Management Aeroportuaire</i> (MSMA), Ecole Nationale de L'Aviation Civile (ENAC), Toulouse, Perancis, 1996</li> </ul>
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Airport Planning Group Head (2016-2018)</li> <li>• Head of Corporate Planning &amp; Performance (2013-2016)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Vice President Airport Services & Hospitality sejak 16 Juli 2018 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1130/KP.07.03/2018



### Ristiyanto Eko Wibowo

Vice President Business Development & International Relations

Kudus, 23 Januari 1977  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	42 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi (S1), Manajemen, Universitas Mahasaraswati, Denpasar, 2006
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Business Development Group Head (2015-2018)</li> <li>• Business Planning Development Department Head (2013-2015)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Vice President Business Development & International Relations sejak 16 Juli 2018 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1130/KP.07.03/2018





### Bambang Arsanto

Pts. Vice President Business Portfolio

Jakarta, 12 Januari 1977  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	42 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ekonomi (S1), Universitas Trisakti, 2000</li> <li>• Magister Pasar Uang Pasar Modal (S2), Universitas Indonesia, 2006</li> </ul>
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senior Manager Subsidiaries Company Senior Manager (2019)</li> <li>• Affilia e &amp; New Portfolio Senior Manager (2018-2019)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai PTS Vice President Bussines Portfolio sejak 7 Oktober 2019 berdasarkan SK Direksi No SKEP PRIN.DP.492/OM.07.03/2019.



### Gidionton Saritua Siagian

Vice President Information Technology

Depok, 25 Januari 1984  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	35 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana (S1), Teknik Industri, Universitas Indonesia</li> <li>• Magister Teknik (S2), Teknik Industri, Universitas Mercubuana</li> </ul>
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Profesional Services, TIBCO Indonesia (2017–2019)</li> <li>• Senior Manager, Accenture (2005–2017)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Vice President Information Technology sejak Juni 2019 berdasarkan SK Direksi No SKEP.971/KP.07.03/2019



### Sulistyowati Dewi

Vice President Accounting

Magelang, 17 Januari 1969  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	50 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ekonomi (S1), Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, 1993</li> <li>• Magister Manajemen (S2), Universitas Airlangga, 2013</li> </ul>
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accounting Group Head (2015-2018).</li> <li>• Finance Information Technology Department Head (2013-2015).</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Vice President Accounting sejak 16 Juli 2018 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1130/KP.07.03/2018



### Eppy Dhanianto Wibowo

Vice President Finance

Jakarta, 22 Oktober 1978  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	41 tahun per 31 Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi (S1), Manajemen, Universitas Indonesia, 2002
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Head of Risk Management &amp; Corporate Planning (2017-2018)</li> <li>• Nonaviation Marketing Group Head (2015-2017)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai <i>Vice President Finance</i> sejak 16 Juli 2018 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1130/KP.07.03/2018



### Maya Damayanti

Vice President Procurement

Palembang, 25 Mei 1971  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	48 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Teknik Sipil (S1), Universitas Indonesia, 1995</li> <li>• Magister Manajemen Bidang Keuangan (S2), Prasetya Mulya Business School, 2010</li> </ul>
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Airport Facilities Readiness Department Head Bandar Udara Juanda, Surabaya (2018-2019).</li> <li>• Civil Airside Department Head, Kantor Pusat (2013-2018)</li> <li>• Corporate Performance Monitoring &amp; Evaluation Department Head, Kantor Pusat (2013)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Vice President Procurement pada tanggal 1 April 2019, berdasarkan SKEP. Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. SKEP.635/KP.07.01/2019.



### Djoko Wahyono

Vice President Human Capital

Semarang, 30 Agustus 1970.  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	49 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ekonomi (S1), Akuntansi, STIE Dharma Putra, 2006</li> <li>• Master of Science, STIE Dharma Putra, Semarang, 2010</li> </ul>
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Human Capital Support Expert (2017-2018)</li> <li>• Budget Management Department Head (2014-2017)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Vice President Human Capital sejak 27 September 2018 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1955/KP.07.03/2018



### Imron Qodari

Vice President Training & Development

Jakarta, 22 November 1970  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	49 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana (S1), Manajemen Pemasaran, IKOPIN, Jakarta, 1994</li> <li>• Magister Manajemen (S2), Manajemen Pemasaran, Universitas Mercu Buana, 2005</li> </ul>
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Human Capital Group Head (2014-2018)</li> <li>• Organization Development &amp; Change Management Department Head (2013-2014)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Vice President Training & Development sejak 27 September 2018 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1956/KP.07.03/2018



### Rini Asriningsih

Vice President General Services

Maros, 31 Desember 1966  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	53 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana (S1), Jurusan Hukum Perdata, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1992</li> <li>• Magister Jurusan Hukum Bisnis, Universitas Padjadjaran Bandung, 2006</li> </ul>
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua Tim Pengalihan Bandara Baru (2018-2019)</li> <li>• Head of Procurement (2016-2018)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Vice President General Services sejak 2 April 2019 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.631/KP.07.03/2019



### Nur Spto Winoto

Vice President Corporate Social Responsibility

Klaten, 25 April 1968  
Warga Negara Indonesia

Usia/Umur	51 tahun per Desember 2019
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana (S1), Elektronika dan Instrumentasi, Universitas Gadjah Mada, 1992</li> <li>• Magister (S2), Administrasi Bisnis, Institut Teknologi Bandung, 1995</li> </ul>
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Training &amp; Development Group Head (2016-2018)</li> <li>• Branch Manager PT Angkasa Pura Logistik Balikpapan (2013-2016)</li> </ul>
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Vice President Corporate Social Responsibility sejak 27 September 2018 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1957/KP.07.03/2018



# Sumber Daya Manusia









Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset penting bagi PT Angkasa Pura I (Persero), terutama dalam aspek keberlanjutan dan peningkatan kualitas bisnis. Terkait hal tersebut, Angkasa Pura I berupaya merekrut SDM terbaik dengan mengedepankan asas-asas keterbukaan, kewajaran, dan kesetaraan berdasarkan kompetensi kandidat. Strategi rekrutmen tentunya juga diselaraskan dengan kebutuhan perusahaan serta memperhatikan ketersediaan tenaga kerja lokal atau nasional.

## KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI

Per akhir tahun 2019, Angkasa Pura I memiliki total 3.355 Karyawan, turun 0,44% atau 15 orang dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari Kelas Jabatan, proporsi terbesar yaitu pada Kelas 11, 12, dan 13, yaitu 831, 573, dan 532 orang yang termasuk kedalam karyawan bidang operasional dan teknik bandara. Karyawan bidang ini merupakan komponen terbesar dari komposisi karyawan di Angkasa Pura I.

Selanjutnya, sebagian besar karyawan Angkasa Pura I, yaitu 2.516 orang atau 75% pada akhir tahun 2019 merupakan laki-laki, sedangkan sebagian lain merupakan karyawan perempuan. Tidak ada kebijakan diskriminasi di Angkasa Pura I yang menyebabkan perbedaan jumlah yang signifikan tersebut. Angkasa Pura I menilai bahwa perbedaan yang cukup signifikan terjadi karena minat laki-laki lebih besar dari pada perempuan untuk bekerja di perusahaan pengelola bandara.

Komposisi Karyawan PT Angkasa Pura I (Persero) berdasarkan Level Organisasi Tahun 2017-2019







Kelas Jabatan	2019			2018			2017		
	 Pria	 Wanita	Total	 Pria	 Wanita	Total	 Pria	 Wanita	Total
1	1	0	1	2	0	2	14	2	3
2	6	1	7	8	1	9	7	1	8
3	33	5	38	37	4	41	40	4	44
4	8	0	8	7	0	7	8	0	8
5	66	9	75	55	9	64	55	7	62
6	119	22	141	124	19	143	120	17	137
7	21	8	29	13	6	19	11	7	18
8	317	59	376	307	65	372	293	60	353
9	42	16	58	53	14	67	71	16	87
10	66	70	136	47	58	105	37	52	89
11	562	269	831	560	268	828	573	258	831
12	438	135	573	487	151	638	480	144	624
13	406	126	532	373	116	489	354	87	441
14	161	50	211	141	42	183	146	42	188
15	254	71	325	314	79	393	353	91	444
Honorer (Direksi dan Komisaris)	12	2	14	12	2	14	11	2	13
Jumlah	2.512	843	3.355	2.540	834	3.374	2.573	790	3.350

## KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Berdasarkan tingkat pendidikan, proporsi terbesar karyawan Angkasa Pura I per akhir tahun 2019 yaitu berijazah sekolah dasar hingga sekolah menengah, sebanyak 1.184 orang, atau 42,54% dari total seluruh karyawan Angkasa Pura I.

Kemudian, komposisi terbesar kedua yaitu karyawan yang berlatar belakang sarjana sejumlah 31,38% orang. Secara umum, tidak ada perubahan yang signifikan pada komposisi karyawan berdasarkan tingkat pendidikan dari tahun sebelumnya.

Komposisi Karyawan PT Angkasa Pura I (Persero) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017-2019







Pendidikan	2019			2018			2017		
			Total			Total			Total
	Pria	Wanita		Pria	Wanita		Pria	Wanita	
S3	2	0	2	2	0	2	0	0	0
S2	64	33	94	70	33	103	68	31	99
Sarjana	693	359	1.052	708	362	1,07	638	312	950
D1 - D4	572	206	778	530	188	718	501	154	655
SD – SMA	1.184	245	1.429	1,232	251	1483	1.355	291	1,646
Jumlah	2.515	843	3.355	2.540	834	3,374	2.562	788	3.350

### KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Sebagian besar individu, yaitu sejumlah 3.066 orang, yang bekerja di Angkasa Pura I pada tahun 2019 berstatus pegawai, sedangkan sebagian kecil lainnya berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang diperbantukan, personel Tentara Nasional

Indonesia (TNI) yang ditugaskan, tenaga honorer, dan calon pegawai. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tidak ada perubahan yang signifikan atas komposisi karyawan berdasarkan status kepegawaian.

Komposisi Karyawan PT Angkasa Pura I (Persero) Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2017-2019







Status Kepegawaian	2019			2018			2017		
			Total			Total			Total
	Pria	Wanita		Pria	Wanita		Pria	Wanita	
Pegawai Perusahaan	2.311	752	3.063	2,27	740	3,01	2.155	663	2,818
PNS Diperbantukan	42	1	43	44	1	45	51	2	53
TNI Ditugaskan	6	0	6	6	0	6	8	0	8
Honorer	12	2	14	12	2	14	11	2	13
Calon Pegawai	141	88	229	208	91	299	337	.121	458
Jumlah	2.512	843	3.355	2,54	834	3,374	2.562	788	3,35

## KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN RENTANG USIA

Jika ditinjau dari rentang usia, pada akhir tahun 2019, Angkasa Pura I memiliki komposisi karyawan yang cukup merata, dengan jumlah terbanyak berusia muda, antara 26-35 tahun. Terdapat 808 orang karyawan yang berusia 26-35 tahun,

sedangkan kelompok karyawan yang jumlahnya paling sedikit yaitu berusia di atas 56 tahun. Hal ini mengindikasikan keberlangsungan sumber daya manusia yang terjamin dalam jangka panjang.

Komposisi Karyawan PT Angkasa Pura I (Persero) Berdasarkan Rentang Usia Tahun 2017-2019

Rentang Usia	2019			2018			2017		
	 Pria	 Wanita	Total	 Pria	 Wanita	Total	 Pria	 Wanita	Total
>56	2	1	3	1	1	2	5	1	6
51-56	302	50	352	332	52	384	366	61	427
46-50	248	68	316	244	62	306	243	52	295
41-45	289	88	377	296	88	384	274	90	364
36-40	297	107	404	280	100	380	294	94	388
31-35	519	124	643	470	114	584	423	104	527
26-30	524	284	808	552	267	819	558	236	794
21-25	331	121	452	354	142	496	381	140	521
<20	0	0	0	11	8	19	18.00	10	28
Jumlah	2512	843	3355	2.540	834	3.374	2.562	788	3.350

## KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN MASA KERJA DAN GENDER

Karyawan yang bekerja di Angkasa Pura I pada umumnya memiliki masa kerja lebih dari lima tahun. Per 31 Desember 2019, tercatat 1.230 orang atau 36,62% karyawan yang masa kerjanya kurang dari lima tahun. Tingginya masa kerja karyawan dapat menunjukkan adanya loyalitas karyawan yang cukup baik, yang salah satunya dapat dipicu oleh kepuasan pelanggan.

Dalam hal kesetaraan gender, Angkasa Pura I memiliki karyawan laki-laki dan perempuan yang

diperlakukan setara sesuai dengan kompetensi dan kinerja yang dinilai secara profesional. Pada tahun 2019, jumlah karyawan laki-laki tercatat sebanyak 2.516 orang, atau 74,9% dari total keseluruhan karyawan. Meski memiliki karyawan laki-laki lebih banyak dari jumlah karyawan perempuan, hal tersebut tidak disebabkan oleh upaya diskriminasi perusahaan terhadap karyawan. Angkasa Pura I menilai ada beragam faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut, antara lain minat karyawan, motivasi bekerja dan hal lainnya.

Komposisi Karyawan PT Angkasa Pura I (Persero) Berdasarkan Masa Kerja Tahun 2017-2019

(dalam satuan orang)

Status Kependudukan	2019			2018			2017		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Pegawai Perusahaan	2.311	752	3.063	2,27	740	3,01	2.155	663	2,818
PNS Diperbantukan	42	1	43	44	1	45	51	2	53
TNI Ditugaskan	6	0	6	6	0	6	8	0	8
Honorer	12	2	14	12	2	14	11	2	13
Calon Pegawai	141	88	229	208	91	299	337	121	458
<b>Jumlah</b>	<b>2.512</b>	<b>843</b>	<b>3.355</b>	<b>2,54</b>	<b>834</b>	<b>3,374</b>	<b>2.562</b>	<b>788</b>	<b>3,35</b>

### KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN WILAYAH KERJA

Karyawan yang bekerja di Angkasa Pura I paling banyak berada di wilayah kerja Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan Kantor Pusat Jakarta. Pada tahun 2019 sebanyak 582 karyawan atau sebesar

17,33% dari total karyawan di Angkasa Pura I merupakan karyawan di wilayah kerja Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

Perbandingan Jumlah Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2017 – 2019

Uraian	Tahun		
	2019	2018	2017
Kantor Pusat Jakarta	512	479	494
Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali	611	641	639
Bandara Juanda Surabaya	375	388	394
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar	249	258	256
Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan	243	288	283
Bandara Frans Kaisiepo Biak	65	91	85
Bandara Sam Ratulangi Manado	153	169	159
Bandara Adisutjipto Yogyakarta	251	170	174
Bandara Adi Soemarmo Solo	113	112	112
Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin	149	156	150
Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang	177	148	152
Bandara Internasional Lombok	188	192	185



## Perbandingan Jumlah Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2017 – 2019

Uraian	Tahun		
	2019	2018	2017
Bandara Pattimura Ambon	93	118	111
Bandara El Tari Kupang	108	114	105
Proyek Pengembangan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang	13	18	19
Proyek Pengembangan Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo	23	16	17
Proyek Pengembangan Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin	21	16	15
Proyek Pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar	11	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3.355</b>	<b>3.374</b>	<b>3.350</b>



# Komposisi Pemegang Saham

Komposisi Pemegang Saham PT Angkasa Pura I (Persero)

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penduh	Kepemilikan Saham	Total
Pemerintah Republik Indonesia	6.414.412.000	100%	Rp6.414.412.000

## KOMPOSISI 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

Sampai dengan 31 Desember 2019, Angkasa Pura I merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai komposisi 20 pemegang saham terbesar.

## KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM 5% ATAU LEBIH

Sampai dengan 31 Desember 2019, Angkasa Pura I merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Informasi mengenai komposisi pemegang saham 5% atau lebih Perseroan telah dijelaskan pada uraian komposisi pemegang saham.

## KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM MASYARAKAT KURANG DARI 5%

Sampai dengan 31 Desember 2019, Angkasa Pura I belum menjadi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai komposisi pemegang saham masyarakat kurang dari 5% atau lebih.

## KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sampai dengan 31 Desember 2019, Angkasa Pura I merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian tidak terdapat kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada Angkasa Pura I baik secara langsung maupun tidak langsung.

## INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Pemegang Saham utama Perseroan adalah Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki 100% saham perusahaan.

Dengan demikian, Angkasa Pura I tidak memiliki pemegang saham utama pengendali individu.



## Entitas Anak, Entitas Asosiasi, dan Yayasan

Dalam rangka meningkatkan pendapatan bisnis non-aeronautika serta meningkatkan *Customer Satisfaction Index* (CSI), Angkasa Pura I memiliki sejumlah anak perusahaan yang bergerak di

berbagai bidang terkait, seperti transportasi, hotel dan properti. Hingga 31 Desember 2019, terdapat 5 (lima) anak perusahaan milik Angkasa Pura I, seperti yang ditampilkan pada tabel berikut.

Anak Perusahaan PT Angkasa Pura I (Persero) per 31 Desember 2019

Nama	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham	Tahun Pendirian	Status Operasi	Jumlah Aset (Rp)
PT Angkasa Pura Logistik	Pengelolaan Jasa Terkait (Kargo & Pos), <i>Warehousing, Regulated Agent, Bisnis Logistik</i>	98,00%	2012	Beroperasi	302.908.237.90
PT Angkasa Pura Hotel	Perhotelan, <i>Lounge, F&amp;B, Inflight catering, Travel Management</i>	99,99%	2012	Beroperasi	537.395.635.427
PT Angkasa Pura Properti	Properti, Kontraktor	99,96%	2012	Beroperasi	738.816.757.815
PT Angkasa Pura Support	ICT, <i>Equipment, Services, Parkir</i>	99,81%	2012	Beroperasi	1.393.988.229.422
PT Angkasa Pura Retail	<i>Travel retail, F&amp;B, Marketing Services</i>	97,50%	2014	Beroperasi	90.226.171.612

## Entitas Anak

### PT ANGKASA PURA LOGISTIK

#### Visi

Menjadi perusahaan jasa logistik nasional terpadu dan terpercaya di Indonesia.

#### Misi

- Menyediakan jasa logistik terpadu yang solutif, profesional, dan inovatif untuk kepuasan konsumen.
- Meningkatkan kapabilitas, membangun kapasitas dan kesejahteraan karyawan.
- Mengembangkan sinergi dengan mitra usaha.
- Memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
- Memberi kontribusi yang positif kepada masyarakat dan lingkungan.



Persetujuan pendirian PT Angkasa Pura Logistik oleh Dewan Komisaris Angkasa Pura I tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 194/DK.AP/2011. Kemudian, PT Angkasa Pura Logistik didirikan dengan Akta Pendirian Perusahaan No. 01 oleh Notaris Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn. tanggal 6 Januari 2012 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-03158.AH.01.01. tertanggal 18 Januari 2012 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 19 April 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10269 ("Akta Pendirian PT Angkasa Pura I (Persero)").

PT Angkasa Pura Logistik bergerak di bidang pengelola jasa terkait (kargo dan pos), *warehousing*, *regulated agent*, dan logistik. Modal dasar yang ditempatkan untuk pembentukan PT Angkasa Pura Logistik yakni sebesar Rp80.000.000.000 yang terbagi ke dalam 80.000 lembar saham. Pada awalnya, PT Angkasa Pura

Logistik memiliki modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp21.000.000.000. Kemudian berdasarkan RUPS tanggal 5 Oktober 2016, terdapat penambahan modal disetor menjadi Rp25.000.000.000. Kepemilikan saham PT Angkasa Pura I (Persero) pada perusahaan anak ini yaitu sebanyak 24.500 lembar saham, dengan nilai total nominal Rp24.500.000.000 atau sebesar 98% dari keseluruhan saham. Selebihnya, sebesar Rp500.000.000 saham dimiliki oleh Pusat Koperasi Karyawan Angkasa Pura I.

PT Angkasa Pura Logistik mengalami perubahan anggaran dasar terakhir yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 05 tanggal 28 Oktober 2019, dengan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-0088543.AH.01.02 tanggal 30 Oktober 2019.

Komposisi Kepemilikan Saham PT Angkasa Pura Logistik Per 31 Desember 2019

Pemegang Saham	Penyertaan Modal (Rp)	Lembar Saham	Persentase
PT Angkasa Pura I (Persero)	24.500.000.000	24.500	98,00%
Pusat Koperasi Karyawan PT Angkasa Pura I (Persero)	500.000.000	500	2,00%

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Angkasa Pura Logistik per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Novrihandri
Komisaris	: Parlindungan Situmorang
Komisaris	: Marsda (Purn) Bambang Agus Margono
Komisaris	: M. Basuki Mardianto
Direktur Utama	: Danny P. Thaharsyah
Direktur Operasi	: Ahmad Munir
Plt. Direktur Pengembangan Usaha	: Danny P. Thaharsyah
Direktur Keuangan dan Administrasi	: Ridwan Moeis



## PT ANGKASA PURA HOTEL

### Visi

Menjadi penyedia jasa akomodasi dan jasa boga terintegrasi berbasis bandara yang terbaik di Indonesia.

### Misi

- Memberikan layanan akomodasi dan jasa boga terintegrasi untuk kepuasan konsumen.
- Meningkatkan profesionalisme dan membentuk karakter *hospitality* karyawan.
- Memaksimalkan nilai pemegang saham dan mendukung peningkatan layanan bandara.
- Mengoptimalkan sinergi dengan mitra usaha, perusahaan afiliasi dan pemerintah.
- Memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan turut berperan dalam pengembangan *green airport*.



Pendirian PT Angkasa Pura Hotel dilakukan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris Angkasa Pura I melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 192/DK.API/2011 tanggal 15 Desember 2011. Dasar pendirian PT Angkasa Pura Hotel yaitu Akta Pendirian Perusahaan No. 03 oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. tanggal 6 Januari 2012 yang telah disahkan melalui Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-03688.AH.01.01. tanggal 20 Januari 2012.

PT Angkasa Pura Hotel bergerak di bidang usaha perhotelan, *lounge*, *inflight catering*, dan *travel management*. Anak perusahaan ini didirikan dengan modal dasar sebesar Rp120.000.000.000 modal disetor sebesar Rp35.500.000.000. Angkasa Pura I memegang 99,99% saham dengan kepemilikan 35.460 saham bernilai total Rp 35.460.000.000.

Berdasarkan Surat Persetujuan Kementerian BUMN No. S-726/MBU/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Persetujuan Penambahan Setoran Modal PT Angkasa Pura I (Persero) kepada PT Angkasa Pura Hotel (Entitas Anak), terdapat penambahan setoran modal sebesar Rp84.404.000.000 oleh PT Angkasa Pura I (Persero), sehingga total setoran modal perusahaan menjadi Rp119.865.000.000 Peningkatan setoran modal tersebut disahkan melalui Akta No. 01 tanggal 18 Februari 2013 oleh Notaris Nanda Fauz

Iwan, S.H., M.Kn. dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-12360.ah.01.02 Tanggal 11 Maret 2013. Dengan perubahan akta tersebut, modal dasar perusahaan meningkat ditetapkan sebesar Rp400.000.000.000 dan total setoran modal menjadi sebesar Rp119.904.000.000.

Selanjutnya, perubahan modal dasar dan setoran modal dilakukan kembali pada tahun 2017 berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.16 tanggal 17 Februari 2017 oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0005993. AH.01.02 tanggal 10 Maret 2017. Modal dasar PT Angkasa Pura Hotel meningkat menjadi sebesar Rp2.000.000.000.000 dan total setoran modal menjadi sebesar Rp649.904.000.000. Dengan adanya perubahan tersebut, modal disetor Angkasa Pura I dalam anak perusahaan ini menjadi Rp649.864.000.000.

PT Angkasa Pura Hotel mengalami perubahan anggaran dasar terakhir yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 09 tanggal 31 Oktober 2019, dengan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-0090397. AH.01.02 tanggal 05 November 2019.

Komposisi Kepemilikan Saham PT Angkasa Pura Hotel per 31 Desember 2019

Pemegang Saham	Penyertaan Modal (Rp)	Lembar Saham	Persentase
PT Angkasa Pura I (Persero)	649.864.000.000	649.864	99,99%
Pusat Koperasi Karyawan PT Angkasa Pura I (Persero)	40.000.000	40	0,01%

Per 31 Desember 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Angkasa Pura Hotel, yaitu berikut ini:

Komisaris Utama	: Adi Nugroho
Komisaris	: Dadun Kohar
Komisaris	: Najih Prastiyo
Komisaris	: Leonardy Putra Negara Siregar
Direktur Utama	: Bendady Hindom Pramono
Plt. Direktur Desain, Operasi, dan Marketing	: Bendady Hindom Pramono
Direktur Keuangan Personalia dan Administrasi	: Kukuh



## PT ANGKASA PURA PROPERTI

### Visi

Menjadi pengembang properti terpercaya untuk kawasan bandara dan sekitar di Indonesia. Secara khusus Angkasa Pura Properti merupakan *airport city developer*.

### Misi

- Mengembangkan lahan-lahan yang dimiliki Perusahaan Induk sesuai potensi dan tren pasar dengan memperhatikan aspek lingkungan dan pelayanan kepada konsumen.
- Memberikan nilai tambah kepada pemegang saham.
- Melakukan sinergi yang profesional dengan rekan bisnis.
- Membangun SDM yang berkompeten serta memiliki integritas, kreatifitas, dan nilai-nilai positif.
- Mewujudkan hubungan yang harmonis dengan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).
- Mengembangkan jasa properti dan industri pendukung lainnya.

Dasar pendirian PT Angkasa Pura Properti yaitu Akta Pendirian Perusahaan No.02 tanggal 6 Januari 2012 dengan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. atas persetujuan Dewan Komisaris Angkasa Pura I No. 193/DK.API/2011 tanggal 15 Desember 2011. Pendirian perusahaan ini telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-03704.AH.01.01 tanggal 20 Januari 2012.

PT Angkasa Pura Properti bergerak di bidang usaha properti dan kontraktor. Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 29 Januari 2014, terdapat penambahan modal PT Angkasa Pura Properti dari Rp 42.000.000.000 menjadi Rp 168.000.000.000

yang terbagi ke dalam 168.000 lembar saham dengan nilai Rp 1.000.000 per saham dan telah disetor penuh. PT Angkasa Pura I (Persero) memiliki 99,96% saham atau sebanyak 167.940 lembar saham PT Angkasa Pura Properti.

PT Angkasa Pura Properti mengalami perubahan anggaran dasar terakhir yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 08 tanggal 31 Oktober 2019, dengan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-0090336.AH.01.02 tanggal 05 November 2019.

Komposisi Kepemilikan Saham PT Angkasa Pura Properti per 31 Desember 2019

Pemegang Saham	Penyertaan Modal (Rp)	Lembar Saham	Persentase
PT Angkasa Pura I (Persero)	167.940.000.000	167.940	99,96%
Pusat Koperasi Karyawan PT Angkasa Pura I (Persero)	60.000.000	60	0,04%

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Angkasa Pura Properti per 31 Desember 2019, dapat dilihat berikut ini:

Komisaris Utama	: Lukman F. Laisa
Komisaris	: Iskandar
Komisaris	: Yusfandri Gona
Direktur Utama	: Hendra Lesmana
Plt. Direktur Keuangan & Administrasi	: Dolly A. Prameswari
Direktur Teknik	: Andiko Surya Widjaya
Direktur Pengembangan Usaha	: Dolly A. Prameswari

## PT ANGKASA PURA SUPORT

### Visi

Menjadi perusahaan pendukung berstandar internasional yang bergerak dalam industri kebandarudaraan dan infrastruktur lainnya.

### Misi

- Menyediakan produk/jasa yang unggul dan berstandar internasional untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM untuk mendorong pertumbuhan bisnis secara berkesinambungan.
- Memaksimalkan nilai perusahaan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Membina hubungan sinergis dengan mitra usaha.
- Memberikan nilai tambah dan manfaat bagi komunitas disekitar lingkungan usaha.



PT Angkasa Pura Suport didirikan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris Angkasa Pura I No. 17/DK.API/2012 tanggal 31 Januari 2012. Pendirian anak perusahaan tersebut tertuang dalam Akta Pendirian Perusahaan No. 03 tanggal 9 Februari 2012 oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H. M.Kn. yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-08735.AH.01.01 tanggal 20 Februari 2012.

Bidang usaha PT Angkasa Pura Suport yaitu ICT, dan parkir. Modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000.000 yang terdiri dari 1.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp 250.480.000.000 dengan kepemilikan saham Angkasa Pura I sebesar 99,81%.

PT Angkasa Pura Suport mengalami perubahan anggaran dasar terakhir yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 31 Oktober 2019, dengan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. yang telah

memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0090368.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 5 November 2019.

Komposisi Kepemilikan Saham PT Angkasa Pura Suport Per 31 Desember 2019

Pemegang Saham	Penyertaan Modal (Rp)	Lembar Saham	Persentase
PT Angkasa Pura I (Persero)	250.000.000.000	250,000	99.81%
Pusat Koperasi Karyawan PT Angkasa Pura I (Persero)	480.000.000	480	0.19%

Susunan komposisi pemegang saham PT Angkasa Pura Suport per 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Faik Fahmi
Komisaris	: Pepen Supendi Yusuf
Komisaris	: Moh. Winarno
Komisaris	: Nelson Barus
Direktur Utama	: Iwan Hartawan
Direktur Komersial dan Teknik	: Trikora Harjo
Direktur SDM, Keuangan & Umum	: Sugiartha Panca K.

## PT ANGKASA PURA RETAIL

### Visi

Menjadi *travel retailer* Indonesia terbesar yang memberikan kualitas tertinggi untuk *partner* kerja dan pelanggan.

### Misi

- Menjadikan tingkat kepuasan pelanggan sebagai *benchmark* untuk terus melakukan pelayanan yang terbaik.
- Mengelola 15% area komersial dalam bandara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan berbagai macam diversifikasi usaha.
- Memiliki *brand* mandiri dalam waktu 2 (dua) tahun.
- Memberikan *value added* setinggi-tingginya kepada *stakeholders*, baik dari segi pendapatan dan kualitas pelayanan.
- Menjadi perusahaan *travel retail* bertaraf internasional dan mendapatkan pengakuan secara regional.





PT Angkasa Pura Retail didirikan berdasarkan Akta No. 11 oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. tanggal 23 September 2014 dan mendapat pengesahan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-26401.40.10.2014 tertanggal 24 September 2014.

Anak perusahaan ini bergerak di bidang usaha penjualan dan pemasaran di bandara. Modal dasar PT Angkasa Pura Retail tercatat sebesar Rp 200.000.000.000 yang terbagi ke dalam 200.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000

per lembar saham. Modal yang telah ditempatkan dan disetor yaitu sebesar Rp 50.000.000.000 atau 50.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 500.000 per lembar.

PT Angkasa Pura Retail mengalami perubahan anggaran dasar terakhir yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 06 tanggal 12 November 2019, dengan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-0094574.AH.01.02 tanggal 15 November 2019.

Komposisi Kepemilikan Saham PT Angkasa Pura Retail Per 31 Desember 2019

Pemegang Saham	Penyertaan Modal (Rp)	Lembar Saham	Persentase
PT Angkasa Pura I (Persero)	48.750.000.000	48.750	97,50%
Pusat Koperasi Karyawan PT Angkasa Pura I (Persero)	1.250.000.000	1.250	2,50%

Per 31 Desember 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Angkasa Pura Retail dapat dilihat sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Devy Suradji
Komisaris	: Bendandy Hindom Pramono
Komisaris	: Atje Muhammad Darjan
Direktur Utama	: Edyana Paramitasari
Direktur Pengembangan Usaha & Pemasaran	: Troficiendy Suroso
Direktur Keuangan, SDM & Administrasi	: Umar Supriyadi

## Entitas Asosiasi

Angkasa Pura I saat ini memiliki 2 (dua) entitas asosiasi yang bergerak di bidang usaha yang

berkaitan dengan kegiatan bisnis bandara, yaitu sebagai berikut:

Komposisi Kepemilikan Saham Entitas Asosiasi PT Angkasa Pura I (Persero) Support Per 31 Desember 2019

Entitas Asosiasi	Bidang Usaha	Kepemilikan Saham	Tahun Pendirian	Status Operasi	Jumlah Aset (Rp miliar)	Domisili
PT Gapura Angkasa	Ground Handling	7,76%	1998	Beroperasi	1.363	Cengkareng*
PT Jasa Marga Bali Tol	Pengusaha Jalan Tol	8%	2011	Beroperasi	1.891	Bali

\*) merupakan domisili kantor cabang pergudangan di Bandara Soekarno Hatta, sedangkan untuk jumlah kantor tempat PT Gapura Angkasa beroperasi ada di 59 bandara (30 kantor cabang dan 29 kantor perwakilan) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.



## 1. PT GAPURA ANGKASA

PT Gapura Angkasa merupakan perusahaan patungan dari 3 (tiga) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Angkasa Pura I (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Angkasa Pura II (Persero). Per November 2019, terjadi perubahan kepemilikan saham utama atau pengendali, ngkasa Pura II menambah porsi kepemilikan saham di Gapura Angkasa dari sebelumnya 31,25% menjadi 46,62% melalui mekanisme *rights issue*. Menyusul penambahan porsi saham ini, maka Angkasa Pura II resmi menjadi pemegang saham utama dan pengendali di Gapura.

Gapura Angkasa merupakan perusahaan *ground handling* di Indonesia, yang didirikan berawal dari kebutuhan maskapai penerbangan Garuda Indonesia akan layanan *ground handling*. Setelah resmi berdiri, layanan *ground handling* yang pada mulanya ditangani sendiri oleh Garuda Indonesia diambil alih oleh PT Gapura Angkasa.

Seiring dengan perkembangan perusahaan, Gapura Angkasa senantiasa berpedoman pada standar pelayanan global dalam kegiatan usahanya. Saat ini, Gapura Angkasa dipercaya untuk melayani maskapai nasional maupun internasional di 60 bandar udara di seluruh Indonesia. Kegiatan usaha Gapura Angkasa pun saat ini semakin berkembang, dari *ground handling* telah merambah pada jasa layanan *warehousing*, pengelolaan *executive lounge*, jasa *hospitality* atau *passenger service assistant*, serta *learning center*.

Saat ini, Gapura Angkasa dipercaya untuk melayani maskapai nasional maupun internasional di 60 bandara di seluruh Indonesia, dengan sebaran pasar mencakup Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku.

Kegiatan usaha perusahaan mencakup:

1. *Representation and accommodation*;
2. *Load control, communication and Departure Control System (DCS)*;
3. *Unit Load Device (ULD) Control*;
4. *Passenger and baggage*;
5. *Cargo and post office mail*;
6. *Ramp service*;
7. *Aircraft servicing*;
8. *Fuel and sil*;
9. *Aircraft maintenance*;
10. *Flight operation and crew administration*;
11. *Surface transport*;
12. *Catering service*;
13. *Supervision and administration*;
14. *Airport security*;
15. *Warehousing and logistic*;
16. *Ground handling consultant*; dan
17. Pendidikan dan pelatihan serta penyediaan tenaga ahli *ground handling*.



## 2. PT JASA MARGA BALI TOL (JMBT)

Angkasa Pura I berpartisipasi pada konsorsium investasi pembangunan jalan tol Nusa Dua-Bandara I Gusti Ngurah Rai-Benoa di Bali berdasarkan persetujuan Menteri BUMN dalam Surat Keputusan No. S-549/MBU/2011 tanggal 25 Oktober 2011. Investasi tersebut dilakukan dalam bentuk penyertaan saham pada PT Jasa Marga Bali Tol dengan Akta Penyertaan Keputusan Rapat Jasa Marga Bali Tol No.01 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri. Penyertaan Angkasa Pura I yaitu sebesar 8%,

dengan 59.635 lembar saham atau Rp59.635.000, dan tambahan modal disetor lainnya sebesar Rp14.908.400.

Konsesi pengelolaan jalan tol ini diberikan selama 45 (empat puluh lima) tahun, dengan masa konstruksi selama 420 hari. Total dana pembangunan yang dibutuhkan sebesar Rp2,4 triliun. Penyelesaian jalan tol bersamaan dengan penyelesaian pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai yang keduanya dipersiapkan untuk acara pertemuan APEC 2013.



## Yayasan

PT Angkasa Pura I (Persero) memiliki 2 (dua) yayasan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan pegawai, yakni:

Komposisi Kepemilikan Saham Saham Yayasan PT Angkasa Pura I (Persero) Per 31 Desember 2019

Nama	Bidang Usaha	Kepemilikan Saham	Tahun Pendirian	Status Operasi	Jumlah Aset (Rp miliar)	Domisili
Dana Pensiun Angkasa Pura I (Dapendra)	Dana Pensiun	100%	1998	Beroperasi	1.037,88	Jakarta
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I (Yakkap I)	Yayasan Kesejahteraan Karyawan	100%	2003	Beroperasi	864,92	Jakarta

### 1. DANA PENSIUN ANGKASA PURA I (DAPENRA)

Dana Pensiun Angkasa Pura I (Dapendra) merupakan program pensiun pegawai Angkasa Pura I. Inisiatif dana pensiun dilakukan sebagai bentuk imbalan pasca kerja sekaligus tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka menjamin kesejahteraan pegawai ketika masa bakti terhadap perusahaan berakhir.

Dapendra didirikan pada tanggal 6 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Direksi Angkasa Pura I Nomor: KEP.1156/KU.60/1998 dan disahkan operasionalnya oleh Menteri Keuangan dengan Keputusan Nomor: KEP.393/KM.17/1999 tanggal 15 November 1999.





Susunan Dewan Pengawas Dapenra  
per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Novrihandri (Wakil dari Pemberi Kerja)
Anggota	: Adi Nugroho (Wakil dari Pemberi Kerja)
Anggota	: Milda (Wakil dari Peserta Aktif)

Susunan Pengurus Dapenra adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Safrizal
Direktur Kepesertaan dan Keuangan	: Purwanto

## 2. YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN ANGKASA PURA I (YAKKAP I)

Yayasan Kesejahteraan Pegawai Angkasa Pura I (Yakkap I) bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta program tunjangan hari tua, program bantuan pemeliharaan kesehatan, dan program bantuan lainnya. Yayasan ini didirikan oleh Angkasa Pura I pada tahun 2006 dengan modal dasar Rp101.117.437.230. Pendirian Yayasan dituangkan dalam Akta Pendirian

Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I, dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar terakhir yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2006, Tambahan Berita Negara RI Nomor 550 Tahun 2006. Akta tersebut telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C.883.HT.01.05.TH 2006 tanggal 05 Mei 2006.

Susunan pembina, pengawas, dan pengurus Yakkap I  
per akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Pembina	: Adi Nugroho (Direktur SDM dan Umum)
Pengawas	: Djoko Wahyono (Per Agustus 2018)
	: Widya Wiedagdo (Anggota)
	: Eppy Dhanianto Wibowo (Anggota)
	: M. Mardiath (Anggota)
Pengurus	
Ketua	: Irwan Garniwa
Sekretaris	: Tris Gunarso
Bendahara	: Wisnu Darmojo

## Kronologi Penerbitan Saham

Saham PT Angkasa Pura I (Persero) 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp6.414.412.000.000,00 atau sebanyak 6.414.412 saham. Sampai dengan 31 Desember 2019, Angkasa Pura I belum melakukan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, sehingga dalam Laporan Tahunan ini tidak terdapat informasi

pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek tempat saham Angkasa Pura I dicatitkan.

Kronologis pendirian perusahaan dan penerbitan saham Angkasa Pura I adalah sebagai berikut:

No	Dasar Hukum (Peraturan Pemerintah (PP) atau Akta)	Pengesahan	Tentang	Keterangan
1	PP Nomor 5 Tahun 1992 Tanggal 4 Pebruari 1992	-	Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	-
2	PP Nomor 48 Tahun 1992 Tanggal 29 Agustus 1992	-	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura I	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura I pada Bandara Adi Soemarmo di Surakarta, Adisutjipto di Yogyakarta, dan Syamsudin Noor di Banjarmasin  Nilai penambahan penyertaan modal Negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan
3	Akta Pendirian Perseroan Terbatas Angkasa Pura I (Persero) No. 1 tanggal 2 Januari 1993 sebagaimana Diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 95 tanggal 19 Maret 1993 (Akta Pendirian), dengan Notaris Muhani Salim S.H	Disetujui oleh Menteri Kehakiman Keputusan No. C2-2470.HT.01.01.Th.93 tanggal 24 April 1993	-	Telah diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29 Juni 1993, Nomor 52, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2914

No	Dasar Hukum (Peraturan Pemerintah (PP) atau Akta)	Pengesahan	Tentang	Keterangan
4	Akta Pemindahan Hak atas Saham Nomor 2 tanggal 2 Januari 1993 dengan Notaris Muhani Salim S.H.	Disetujui oleh Menteri Kehakiman Keputusan No. C2-2470.HT.01.01. Th.93 tanggal 24 April 1993	-	Pemindahan dan penyerahan hak atas saham dari Tuan Drs. Anwar Djanah (Kepala Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara) kepada Tuan Soedjono Kramadibrata (Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan yang bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia) yakni segala hak yang ada dan dapat dijalankan atau dipergunakan oleh Tuan Drs. Anwar Djanah atas 1 (satu) saham prioritas dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 dalam PT Angkasa Pura I (Persero)
5	PP Nomor 26 Tahun 1994 Tanggal 30 Agustus 1994	-	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II	Pengalihan Pengusahaan Bandar Udara Polonia - Medan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I sebesar Rp24.804.355.003,85 dan ditetapkan sebagai Tambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura II
6	PP Nomor 38 Tahun 1995 Tanggal 6 Nopember 1995	-	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura I pada Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani di Semarang, Pattimura di Ambon dan Selaparang di Lombok sebesar Rp76.535.997.213,89
7	PP Nomor 2 Tahun 1997 Tanggal 21 Januari 1997	-	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I pada Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai di Bali, Sepinggan di Balikpapan, Sam Ratulangi di Manado, Frans Kaisiepo di Biak, Adisutjipto di Yogyakarta, Adi Soemarmo di Surakarta dan Syamsudin Noor di Banjarmasin sebesar Rp142.553.972.767,68

No	Dasar Hukum (Peraturan Pemerintah (PP) atau Akta)	Pengesahan	Tentang	Keterangan
8	Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I No. 15 tanggal 16 April 1998 sebagaimana telah diperbaiki dengan Akta Perbaikan No. 30 tanggal 18 September 1998 (Akta No.15/1998), dengan Notaris Imas Fatimah S.H.	<p>a. Diterima dan dicatat laporan perubahan Anggaran Dasar Nomor C2-25829 HT.01.04. TH.98 tanggal 19 Nopember 1998</p> <p>b. Disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan berdasarkan Keputusan No. C2-25830 HT.01.04. TH.98 tanggal 19 November 1998</p>	-	<p>Perubahan yang dilaporkan adalah Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4)</p> <p>Disetujui oleh RUPS yang mengubah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perubahan jangka waktu berdirinya Perseroan;</li> <li>perubahan maksud dan tujuan Perseroan;</li> <li>pengurangan modal dasar Perseroan semula Rp5.250.000.000.000,00 menjadi Rp3.700.000.000.000,00;</li> <li>Pengurangan modal disetor semula Rp1.050.000.000.000,00 menjadi Rp925.000.000.000,00;</li> <li>meniadakan Saham Prioritas dalam Anggaran Dasar; dan</li> <li>perubahan dan penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas</li> </ol> <p>Telah diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 22 Juni 1999, Nomor 50, Tambahan Nomor 3740.</p>
9	PP Nomor 40 Tahun 1999 Tanggal 26 Mei 1999	-	Penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I berupa fasilitas bandar udara pada Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Sultan Hasanuddin, SAMS Sepinggan, Adisutjipto, Adi Soemarmo, Selaparang, Jenderal Ahmad Yani, Pattimura, Frans Kaisiepo dan Syamsudin Noor yang pembangunannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 dengan nilai sebesar Rp198.786.985.007,86
10	PP Nomor 35 Tahun 2000 Tanggal 7 Juni 2000	-	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I berupa seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada Bandar Udara El Tari Kupang di Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai sebesar Rp28.157.871.692,81

No	Dasar Hukum (Peraturan Pemerintah (PP) atau Akta)	Pengesahan	Tentang	Keterangan
11	PP Nomor 19 Tahun 2002 Tanggal 23 April 2002	-	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I berupa tanah, bangunan dan fasilitas penunjang pada Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Sultan Hasanuddin Ujung Pandang, Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggang alikpapan, Bandara Sam Ratulangi Manado, Bandara Frans Kaisiepo Biak, Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Bandara Adi Soemarmo Surakarta, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Bandara Selaparang Mataram, dan Bandara Pattimura Ambon, yang pembangunan dan pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 1992/1993 sampai dengan Tahun Anggaran 1998/1999 sebesar Rp37.164.682.024,51.
12	PP Nomor 18 Tahun 2004 Tanggal 22 Juni 2004	-	Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I	Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I berupa sebagian kekayaan negara yang tertanam dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I, yaitu bangunan gedung bekas Kantor Pusat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I (eks terminal A, VIP Room dan Tower AMC) seluas 9.795 m <sup>2</sup> dan Gedung Dharma Wanita seluas 192 m <sup>2</sup>
13	Akta Pernyataan Keputusan Menteri Negara Badan usaha Milik Negara Republik Indonesia Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 2 tanggal 9 Agustus 2007 (Akta No. 2/2007), dengan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H, M.Kn.	Disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No W7-08937HT.01.04-TH.2007 tanggal 14 Agustus 2007	-	RUPS ini menyetujui: a. penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perseroan sebesar Rp875.000.000.000,00 sehingga modal ditempatkan/ disetor yang semula sebesar Rp925.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.800.000.000.000,00 b. peningkatan modal dasar Perseroan semula Rp3.700.000.000.000,00 menjadi Rp7.000.000.000.000,00  Telah diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 7 September 2007, Nomor 72, Tambahan Nomor 9120.



No	Dasar Hukum (Peraturan Pemerintah (PP) atau Akta)	Pengesahan	Tentang	Keterangan
14	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 35 tanggal 15 Agustus 2008 (Akta No. 35/2008), dengan Notaris Petrus Suandi Halim, S.H.	Disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-64347.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 16 September 2008	-	RUPS ini menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara  Telah diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 4 November 2008, Nomor 89, Tambahan Nomor 22475
15	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 34 tanggal 27 Agustus 2009 (Akta No. 34/2009), dengan Notaris Petrus Suandi Halim, S.H.	Telah diterima dan dicatat dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-17649 tanggal 13 Oktober 2009	-	RUPS ini menyetujui perubahan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dengan mencabut ketentuan ayat 12 Anggaran Dasar tentang tugas, wewenang, dan kewajiban direksi. Telah diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10 Agustus 2010, Nomor 64, Tambahan Nomor 943
16	PP Nomor 76 Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011	-	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Angkasa Pura I yang berasal dari Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 dan 1999/2000 sebesar Rp1.388.244.029.123,52
17	Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 15 Agustus 2012 (Akta No. 5/2012), dengan Notaris Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn.	Disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-46777.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 3 September 2012	-	RUPS ini menyetujui: i. peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp7.000.000.000.000,00 menjadi Rp12.000.000.000.000,00.

No	Dasar Hukum (Peraturan Pemerintah (PP) atau Akta)	Pengesahan	Tentang	Keterangan
17	Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 15 Agustus 2012 (Akta No. 5/2012), dengan Notaris Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn.	Disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-46777.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 3 September 2012	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>ii. pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 1.388.245 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima) saham, masing-masing saham dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 sehingga seluruhnya seharga Rp1.388.245.000.000,00.</li> <li>iii. penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perseroan sebesar Rp1.388.245.000.000,00</li> <li>iv. peningkatan Modal ditempatkan dan modal disetor semula Rp1.800.000.000.000,00 menjadi Rp3.188.245.000.000,00</li> </ul> <p>Telah diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19 Oktober 2012, Nomor 84, Tambahan Nomor 62059</p>
18	Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 2 tanggal 16 Januari 2013 (Akta No. 2/2013), dengan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.	Telah diterima dan dicatat dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-02672 tanggal 31 Januari 2013	-	<p>RUPS ini menyetujui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pengeluaran atau penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 300,000 (tiga ratus ribu) saham, masing-masing saham dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 sehingga seluruhnya seharga Rp300.000.000.000,00</li> <li>ii. penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perseroan sebesar Rp300.000.000.000,00</li> <li>iii. peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor semula Rp3.188.245.000.000,00 menjadi Rp3.488.245.000.000,00.</li> </ul> <p>Telah diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25 Maret 2014, Nomor 24, Tambahan Nomor 255/L</p>

No	Dasar Hukum (Peraturan Pemerintah (PP) atau Akta)	Pengesahan	Tentang	Keterangan
19	PP Nomor 8 Tahun 2014 Tanggal 12 Februari 2014	-	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Angkasa Pura I berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992, 1992/1993, 1994/1995, 1997/1998, 1998/1999, 2000, 2002 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 sebesar Rp2.926.166.059.117,86
20	Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. S-504/MBU/08/2015 tentang Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 11 tanggal 22 September 2015 (Akta No. 11/2015), dengan Notaris Julius Purnawan, S.H., M.Si.	Telah diterima dan dicatat dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0972301 tanggal 15 Oktober 2015	-	RUPS ini menyetujui: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. pengeluaran atau penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 2.926.167 masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00, sehingga seluruhnya seharga Rp2.926.167.000.000,00.</li> <li>ii. penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perseroan sebesar Rp2.926.167.000.000,00.</li> <li>iii. peningkatan modal ditempatkan/modal disetor semula Rp3.488.245.000.000,00 menjadi Rp6.414.412.000.000,00</li> </ul> <p>Telah diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 27 November 2015, Nomor 95, Tambahan Nomor 584/L</p>
21	PP Nomor 25 Tahun 2016 Tanggal 27 Juni 2016	-	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Angkasa Pura I	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Angkasa Pura I yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan yang Pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012, dengan nilai sebesar Rp255.096.706.122,60

No	Dasar Hukum (Peraturan Pemerintah (PP) atau Akta)	Pengesahan	Tentang	Keterangan
22	Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor 55 Tanggal 27 Maret 2019, dengan Notaris Nanda Fauz Iwan S.H. M.kn.	Telah diterima dan dicatat dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH-01.03-0175898 tanggal 28 Maret 2019	-	<p>Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT Angkasa Pura I (Persero), sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menetapkan perubahan jenis saham pada PT Angkasa Pura I (Persero) yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B;</li> <li>menetapkan hak-hak Saham Seri A Dwiwarna yang tidak dimiliki oleh saham Seri B;</li> <li>modal dasar dan modal disetor Perseroan menjadi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Modal Dasar Perseroan sebesar Rp12.000.000.000.000,00, terbagi atas 12.000.000 saham, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00;</li> <li>11.999.999 saham seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp11.999.999.000.000,00</li> </ol> </li> <li>Modal Disetor sebesar Rp6.414.412.000.000,00 terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp1.000.000,00;</li> <li>6.414.411 saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp6.414.411.000.000,00</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), menambah satu ayat pada Pasal 4 yaitu ayat (11), mengubah Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menambah dua ayat pada Pasal 5 yaitu ayat (5) dan ayat (6), mengubah Pasal 10 ayat (7), ayat (10) dan ayat (25), menambah satu butir pada Pasal 11 ayat (2) butir b yaitu angka 19), mengubah Pasal 11 ayat (10) butir b dan butir i, dan menambah dua butir pada Pasal 11 ayat (10) yaitu butir p dan q, mengubah Pasal 14 ayat (10), ayat (11) dan ayat (23), menambah satu ayat pada Pasal 20 yaitu ayat (5), mengubah Pasal 23 ayat (5), mengubah Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), mengubah Pasal 28 ayat (3) dan ayat (5), menambah satu ayat pada Pasal 28 yaitu ayat (12), menambah satu ayat pada Pasal 29 yaitu ayat (7), mengubah Pasal 30 ayat (13) dan menambah satu ayat pada Pasal 30 yaitu ayat (14) Anggaran Dasar PT Angkasa Pura I (Persero)</li> </ol> <p>Telah diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 30 April 2019, Nomor 35, Tambahan Nomor 14248</p>

# Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya

Penawaran perdana obligasi Angkasa Pura I dilakukan pada tahun 2016 berdasarkan Surat Eksekutif Pernyataan Pendaftaran No. S.677/D.04/2016 tanggal 10 November 2016 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penawaran perdana terdiri dari Obligasi I sebesar Rp2.500.000.000 dan Sukuk Ijarah I sebesar Rp500.000.000. Obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek

Indonesia (BEI) tanggal 23 November 2016, sesuai dengan Pengumuman Pencatatan Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Tahun 2016 Angkasa Pura I No. Peng-P-00950/BEI. PP2/11-2016 tanggal 22 November 2016. PT Angkasa Pura I (Persero) tidak mencatatkan obligasi di bursa efek lainnya.

## KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN OBLIGASI

Tabel Kronologis Penerbitan Obligasi Angkasa Pura I

No	Uraian	Tanggal Distribusi elektronik di Bursa Efek	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek	Tenor	Mata Uang	Jumlah Obligasi (miliar)
1	Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri A	22 November 2016	23 November 2016	5 tahun	Rp	622
2	Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri B	22 November 2016	23 November 2016	7 tahun	Rp	389
3	Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri C	22 November 2016	23 November 2016	10 tahun	Rp	1,489

## KRONOLOGIS PENCATATAN SUKUK

Tabel Kronologis Penerbitan Sukuk Ijarah I PT ngkasa Pura I

No	Uraian	Tanggal Distribusi elektronik di Bursa Efek	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek	Tenor	Mata Uang	Jumlah Sukuk (miliar)
1	Sukuk Ijarah Seri A	22 November 2016	10 November 2016	5 tahun	Rp	268
2	Sukuk Ijarah Seri B	22 November 2016	10 November 2016	7 tahun	Rp	55
3	Sukuk Ijarah Seri C	22 November 2016	10 November 2016	10 tahun	Rp	177





Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran	Peringkat		Wali Amanat
			2019	2018	
22 November 2021	8.10%	Pembayaran bunga ke 1 sampai dengan ke 8 telah dilaksanakan	idAAA	idAAA	PT Bank Mega, Tbk
22 November 2023	8.40%	Pembayaran bunga ke 1 sampai dengan ke 8 telah dilaksanakan	idAAA	idAAA	PT Bank Mega, Tbk
22 November 2026	8.55%	Pembayaran bunga ke 1 sampai dengan ke 8 telah dilaksanakan	idAAA	idAAA	PT Bank Mega, Tbk

Tanggal Jatuh Tempo	Cicilan Imbalan Ijarah Per Tahun (dalam juta)	Status Pembayaran	Peringkat		Wali Amanat
			2019	2018	
22 November 2021	21,708	Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah ke-1	idAAA(sy)	idAAA(sy)	PT Bank Mega, Tbk
22 November 2023	4,620	Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah ke-1	idAAA(sy)	idAAA(sy)	PT Bank Mega, Tbk
22 November 2026	15,133	Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah ke-1	idAAA(sy)	idAAA(sy)	PT Bank Mega, Tbk

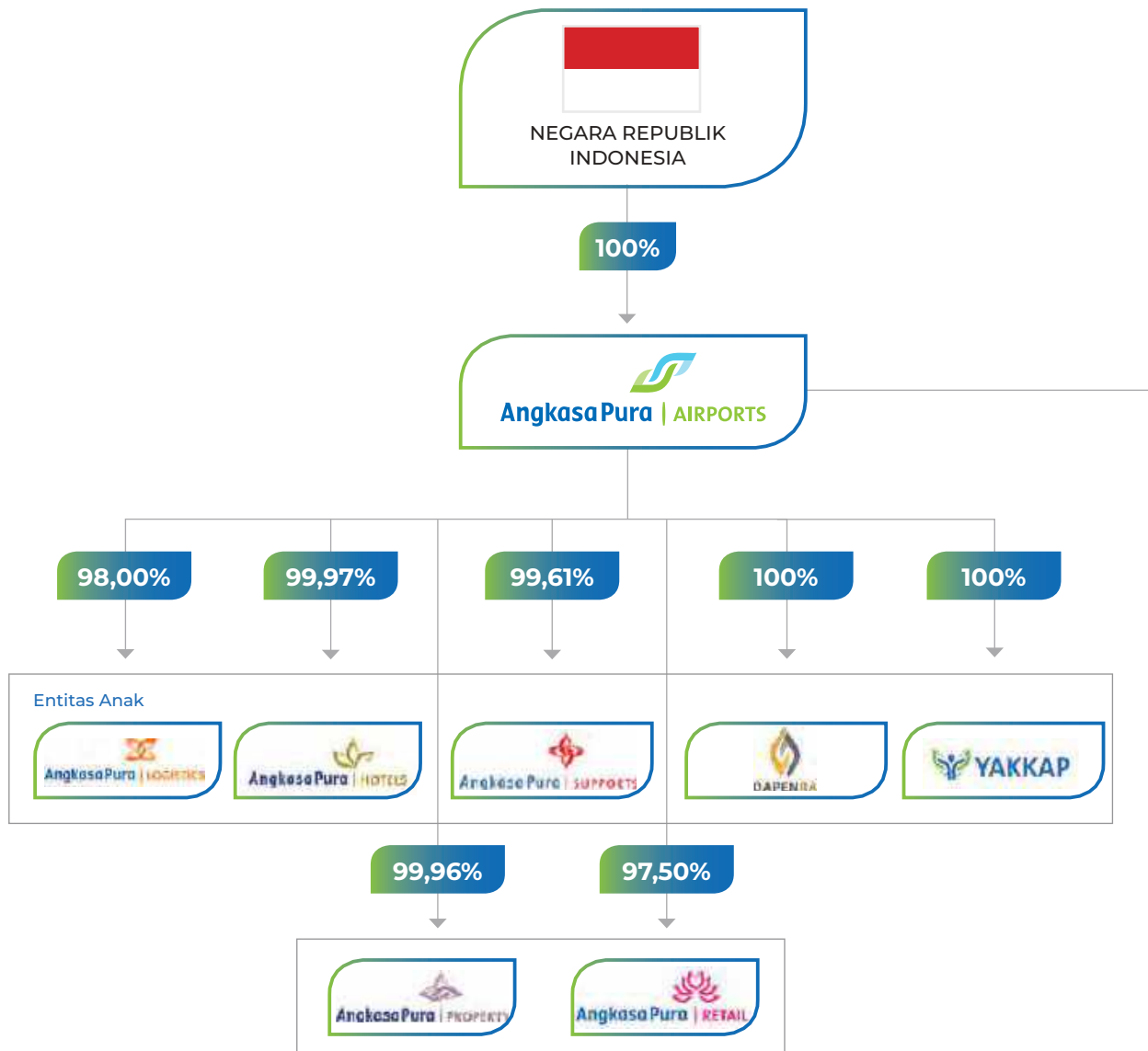
## Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

Peran	Nama Lembaga	Jasa yang Diberikan
INFORMASI PERDAGANGAN DAN PENCATATAN SAHAM/ OBLIGASI	<b>PT Bursa Efek Indonesia</b> Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Tel : (62-21) 5150515 Fax : (62-21 5)154153 Website : www.idx.co.id E-mail: listing@idx.co.id	Jasa lintas perdagangan efek
PENJAMIN PELAKSANA EMISI	<b>PT Mandiri Sekuritas</b> Plaza Mandiri Lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 Tel : (62-21) 526 3445 Fax : (62-21) 526 3507 Website : www.mandirisekuritas.co.id E-mail: corsec@mandirisek.co.id	Jasa pemasaran dan penjualan efek
	<b>PT Danareksa Sekuritas</b> Gedung Danareksa, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110, Indonesia Tel : (62-21) 29 555 777 Fax : (62-21) 350 1724 / 1725 Website : www.danareksa.com E-mail: ib-group1@danareksa.com	Jasa pemasaran dan penjualan efek
	<b>PT BCA Sekuritas</b> Menara BCA Lantai 41 Grand Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 1, Jakarta 10310 Tel : (62-21) 2358 7222 Fax : (62-21) 2358 7290 / 7300/ 7250 Website : www.bcasekuritas.co.id E-mail: cf@bcasekuritas.co.id	Jasa pemasaran dan penjualan efek
	<b>PT Bahana Securities</b> Graha CIMB Niaga, Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav.58, Jakarta 12190 Tel : (62-21) 2505081 Fax : (62-21) 5225869 Website : www.bahana.co.id E-mail: bs_ibcm@bahana.co.id	Jasa pemasaran dan penjualan efek
KANTOR AKUNTAN PUBLIK	<b>Purwantono, Sungkoro, &amp; Surja</b> Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel : (021) 5289 5000 Fax : (021) 5289 4100 Website : www.ey.com/id	Jasa audit atas laporan keuangan PT Angkasa Pura I (Persero) tahun 2018 dan 2019 dengan fee yang dibayarkan: 2018: Rp2,962,294,500 2019: Rp2,597,430,000
LEMBAGA PEMERINGKAT EFEK	<b>PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)</b> Panin Tower - Senayan City, 17th Floor Jl. Asia Afrika Lot.19 Jakarta 10270, Indonesia Tel : (62-21) 7278 2380 Fax : (62-21) 7278 2370 Website:www.pefindo.com E-mail: emanuel.tan@pefindo.co.id	Memberikan rating penilaian terhadap perusahaan
KUSTODIAN	<b>PT Kustodian Sentral Efek Indonesia</b> Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 5 Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Tel : (62-21) 5299-1099 Fax : (62-21) 5299-1199 Website : www.ksei.co.id E-mail: helpdesk@ksei.co.id	Kustodian untuk transaksi efek di pasar modal

Peran	Nama Lembaga	Jasa yang Diberikan
NOTARIS	<b>Fathiah Helmi, S.H.,</b> Graha Irama, Lantai 6, Suite C Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2 Kuningan Jakarta 12950 – Indonesia Tel : (021) 5290 7304/6 Fax : (021) 526 1136 Website : www.notaris-fathiahhelmi.com E-mail: fhcozie@gmail.com	Membuat akta-akta, antara lain perjanjian perwalianan, pengakuan utang dan perjanjian penjaminan emisi efek, serta akta-akta pengubahannya
WALI AMANAT	<b>PT Bank Mega Tbk</b> Menara Bank Mega, Lantai 16 Jl. Kapten P. Tendean No. 12 - 14A, Jakarta 12790 Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720 Website : www.bankmega.com E-mail: waliamanat@bankmega.com	Mewakili kepentingan pemegang obligasi / pemegang sukuk ijarah, baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pemegang obligasi / pemegang sukuk ijarah sesuai dengan syarat-syarat emisi
KONSULTAN HUKUM	<b>Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo ("MMIK")</b> Office 8, 15th Floor Suite H Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia Tel : (021) 2933-2858, 2933-2859 Fax : (021) 2933-2857 Website : www.mmiklaw.co.id E-mail: helen.marsinih@mmiklaw.co.id	Jasa konsultasi hukum penerbitan emisi efek



# Struktur Grup Perusahaan



Sampai dengan tahun 2019, PT Angkasa Pura I (Persero) hanya dimiliki langsung oleh Pemerintah Indonesia sebagai Pemegang Saham utama dan Pengendali. Terdapat lima anak perusahaan dan dua lembaga dana pensiun yang dimiliki oleh Angkasa Pura I, serta terdapat dua perusahaan yang diinvestasikan oleh Angkasa Pura I dengan kepemilikan saham maksimal sepuluh persen. Angkasa Pura I tidak memiliki entitas induk, perusahaan *joint venture*, dan *Special Purpose Vehicle* (SPV).



# Penghargaan dan Sertifikasi

## PENGHARGAAN

### PENGHARGAAN TINGKAT INTERNASIONAL



**7 Maret 2019**  
**Airport Service Quality (ASQ) Award 2019**

Bandara Terbaik di Asia-Pasifik dengan Jumlah Penumpang 5-15 Juta Orang per Tahun

[Penyelenggara:](#)

Airports Council International (ACI)



**7 Maret 2019**  
**Airport Service Quality (ASQ) Award 2019**

Bandara Terbaik di Bidang Lingkungan dan Suasana dengan Jumlah Penumpang 5-15 Juta Orang per Tahun

[Penyelenggara:](#)

Airports Council International (ACI)



**7 Maret 2019**  
**Airport Service Quality (ASQ) Award 2019**

Bandara Terbaik di Bidang Pelayanan Pelanggan dengan Jumlah Penumpang 5-15 Juta Orang per Tahun

[Penyelenggara:](#)

Airports Council International (ACI)



**7 Maret 2019**  
**Airport Service Quality (ASQ) Award 2019**

Bandara Terbaik di Bidang Infrastruktur dan Fasilitas dengan Jumlah Penumpang 5-15 Juta Orang per Tahun

[Penyelenggara:](#)

Airports Council International (ACI)



**14 Juni 2019**  
**HR Asia Award 2019**

"Best Companies to Work for in Asia 2019 - Indonesia Chapter"

[Penyelenggara:](#)

Majalah HR Asia & Business Media International



**23 November 2019**  
**Asia Sustainability Reporting Rating 2019**

Bandara Terbaik di Asia-Pasifik dengan Jumlah Penumpang 5-15 Juta Orang per Tahun

[Nama Award:](#)

"Gold" rating

[Penyelenggara:](#)

National Center for Sustainability Reporting



## PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL



**22 Februari 2019**  
**Indonesia Digital Award 2019**

“Perusahaan Inovatif dalam Membangun Pusat Pengendalian Operasi Bandara” Kategori Transportasi dan Pergudangan

**Penyelenggara:**

Majalah Warta Ekonomi



**16 Maret 2019**  
**Indonesia Spokesperson of The Year Award 2019**

Juru Bicara Terbaik dalam Membangun Citra Postitif Modernisasi Pengelolaan Bandara

**Penyelenggara:**

Majalah Warta Ekonomi



**29 Maret 2019**  
**Peringatan Bulan K3 Nasional Tahun 2019**

Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award) Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali

**Penyelenggara:**

Kementerian Ketenagakerjaan RI



**29 Maret 2019**  
**Peringatan Bulan K3 Nasional Tahun 2019**

Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award) Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan

**Penyelenggara:**

Kementerian Ketenagakerjaan RI



**29 Maret 2019**  
**Peringatan Bulan K3 Nasional Tahun 2019**

Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award) Bandara Sultan Hasanudin Makassar

**Penyelenggara:**

Kementerian Ketenagakerjaan RI



**29 Maret 2019**  
**Peringatan Bulan K3 Nasional Tahun 2019**

Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award) Bandara Sam Ratulangi Manado

**Penyelenggara:**

Kementerian Ketenagakerjaan RI



29 Maret 2019  
Anugerah BUMN 2019

Penghargaan Tata Kelola BUMN Terbaik I  
[Penyelenggara:](#)  
Majalah BUMN Track



29 Maret 2019  
Anugerah BUMN 2019

Penghargaan Strategi Pertumbuhan BUMN Terbaik II  
[Penyelenggara:](#)  
Majalah BUMN Track



29 Maret 2019  
Anugerah BUMN 2019

The Best CEO Kategori Driving Execution  
[Penyelenggara:](#)  
Majalah BUMN Track



8 April 2019  
Anugerah Indonesia Maju 2018-2019

The Most Visionary CEO" Kategori BUMN Merah Putih  
(Faik Fahmi)  
[Penyelenggara:](#)  
Harian Rakyat Merdeka & Warta Ekonomi



**12 April 2019**  
**HR Excellence Award 2019**

Rating A Kategori HR Transformation

Penyelenggara:

Majalah SWA



**12 April 2019**  
**HR Excellence Award 2019**

Rating A Kategori Learning and Development Strategy

Penyelenggara:

Majalah SWA



**12 April 2019**  
**HR Excellence Award 2019**

Rating A Kategori Compensation and Benefit

Penyelenggara:

Majalah SWA

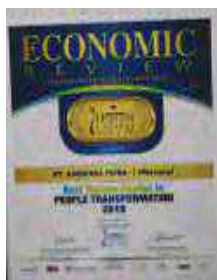


**22 April 2019**  
**Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja**

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali  
Peringkat Silver

Penyelenggara:

Kementerian Ketenagakerjaan RI



**16 Mei 2019**  
**Indonesia Human Capital Award (IHCA) V 2019**

- "Best in People Transformation"
- "The Most Outstanding Human Capital Director 2019" (Adi Nugroho)

Penyelenggara:

Majalah Economic Review



**19 Juli 2019**  
**Anugerah Manajemen Arus Mudik 2019**

"Anugerah Manajemen Arus Mudik 2019"

Penyelenggara:

Kantor Staf Presiden, DIKP Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Komisi Informasi Pusat (KIP)



**22 Agustus 2019**  
**Top GRC 2019**

“The Most Committed GRC Leader 2019” (Faik Fahmi)

**Penyelenggara:**

Majalah Top Business, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA), Institute Compliance Professional Indonesia (ICoPI), dan Asia Business Research Center



**22 Agustus 2019**  
**Top GRC 2019**

“Top GRC 2019 #3 Stars”

**Penyelenggara:**

Majalah Top Business, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA), Institute Compliance Professional Indonesia (ICoPI), dan Asia Business Research Center



**19 September 2019**  
**Revolusi Mental Awards 2019**

“Perusahaan BUMN Tertib Terbaik”

“BUMN Best Leader Revolusi Mental Program Revolusi Mental” (Faik Fahmi)

**Penyelenggara:**

Majalah BUMN Track



**26 September 2019**  
**RRI BUMN Award 2019**

“Gold - Penghargaan Social Economy Contribution”

**Penyelenggara:**

Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI



**9 Oktober 2019**  
**Penghargaan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan**

Penghargaan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan

Penyelenggara:  
 Menteri Kelautan dan Perikanan



**10 Oktober 2019**  
**The 6<sup>th</sup> Indonesia Law Awards 2019**

Kategori Tim Hukum Perusahaan (*In-House*) – Transportation and Logistics In-house

Penyelenggara:  
 Asian Legal Business



**25 Oktober 2019**  
**Infobank Award**

- "The Best CEO - Kategori Accesibility Development for Tourism 2019"
- "The Best SOE 2019"

Penyelenggara:  
 Majalah Infobank



**25 Oktober 2019**  
**Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja**

"BUMN/BUMN terbaik Kategori Siaran Pers/Pemberitaan"  
 "BUMN/BUMD Terbaik Kategori Media Sosial"

Penyelenggara:  
 Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika RI



**28 Oktober 2019**  
**BUMN Award 2019**

"Top 10 SOE Business Expansion"

Penyelenggara:  
 Majalah Warta Ekonomi



**5 November 2019**  
**BUMN Branding and Marketing Award 2019**

"The Best Marketing Innovation"

Penyelenggara:  
 Majalah BUMN Track





**5 November 2019**  
**BUMN Branding and Marketing Award 2019**

“The Best BUMN Chief Marketing Officer” (Devy Suradji)  
 Penyelenggara:  
 Majalah BUMN Track



**5 November 2019**  
**BUMN Branding and Marketing Award 2019**

“The Best Branding BUMN”  
 Penyelenggara:  
 Majalah BUMN Track



**4 Desember 2019**  
**Industry Marketing Champion and Marketeer of The Year (MOTY) Award 2019**

“The Best Industry Marketing Champion 2019 for Infrastructure and Utilities Sector” (Faik Fahmi)  
 Penyelenggara:  
 Majalah MarkPlus & Indonesia Marketing Association (IMA)



**6 Desember 2019**  
**Bandara Awards 2019**

Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali - “The Best Airport of The Year”  
 Penyelenggara:  
 Majalah Bandara



**12 Desember 2019**  
**Investor Awards 2019**

“BUMN Non-Kuangan Terbaik 2019” - Kategori Perhubungan dan Infrastruktur  
 Penyelenggara:  
 Majalah Investor



**16 Desember 2019**  
**Indonesia Most Admired CEO 2019**

“Most Admired CEO 2019” - Kategori Excellent Leadership for Airports Rebranding into World Class Image (Faik Fahmi)  
 Penyelenggara:  
 Majalah Warta Ekonomi

## PENGHARGAAN TINGKAT REGIONAL



**24 September 2019**  
**Balkondes Award**

“Pemberdayaan Masyarakat Terbaik’  
Penyelenggara:  
Manajemen CBT Nusantara



**3 Oktober 2019**  
**ICSB Indonesia Presidential Award**

“Business Practitioner”  
Penyelenggara:  
International Council for Small Business



**22 November 2019**  
**Bali CSR Award**

“Program Corporate Social Responsibility (DCSR)”  
Penyelenggara:  
Walikota Denpasar

## SERTIFIKASI



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifi at Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional Lombok

**Lembaga Pemberi:**  
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Sertifi at Bandar Udara

**Tanggal Berlaku:**  
10 Agustus 2016 – 30 September 2021



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifi at Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional El Tari - Kupang

**Lembaga Pemberi:**  
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Sertifi at Bandar Udara

**Tanggal Berlaku:**  
27 November 2015 – 30 Juli 2020



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifi at Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali

**Lembaga Pemberi:**  
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Sertifi at Bandar Udara

**Tanggal Berlaku:**  
1 Oktober 2015 - 30 Juli 2020



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifi at Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional Adisutjipto - Yogyakarta

**Lembaga Pemberi:**  
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Sertifi at Bandar Udara

**Tanggal Berlaku:**  
6 November 2015 – 30 Juli 2020



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifi asi Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin - Makassar

**Lembaga Pemberi:**  
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Sertifi at Bandar Udara

**Tanggal Berlaku:**  
4 Desember 2015 – 7 Juli 2020



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifi asi Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional Juanda - Surabaya

**Lembaga Pemberi:**  
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Sertifi at Bandar Udara

**Tanggal Berlaku:**  
30 Desember 2015 – 30 Juli 2020



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifikasi Badan Usaha  
Bandar Udara (BUBU)

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
Sam Ratulangi Manado

**Lembaga Pemberi:**  
Direktorat Jenderal  
Perhubungan Udara  
Kementerian Perhubungan  
Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Sertifikasi Bandar Udara

**Tanggal Berlaku:**  
18 Desember 2015 – 30 Juli 2020



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifikasi Badan Usaha  
Bandar Udara (BUBU)

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
Sultan Aji Muhammad  
Sulaiman Sepinggang  
Balikpapan

**Lembaga Pemberi:**  
Direktorat Jenderal  
Perhubungan Udara  
Kementerian Perhubungan  
Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Sertifikasi Bandar Udara

**Tanggal Berlaku:**  
30 Desember 2015 –  
30 Juli 2020



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifikasi Badan Usaha  
Bandar Udara (BUBU)

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
Pattimura - Ambon

**Lembaga Pemberi:**  
Direktorat Jenderal  
Perhubungan Udara  
Kementerian Perhubungan  
Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Sertifikasi Bandar Udara

**Tanggal Berlaku:**  
22 Oktober 2015 – 30 Juli 2020



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifikasi Badan Usaha  
Bandar Udara (BUBU)

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
Syamsudin Noor - Banjarmasin

**Lembaga Pemberi:**  
Direktorat Jenderal  
Perhubungan Udara  
Kementerian Perhubungan  
Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Sertifikasi Bandar Udara

**Tanggal Berlaku:**  
31 Agustus 2015 – 30 Juli 2020



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifikasi Badan Usaha  
Bandar Udara (BUBU)

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
Adi Soemarmo - Solo

**Lembaga Pemberi:**  
Direktorat Jenderal  
Perhubungan Udara  
Kementerian Perhubungan  
Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Sertifikasi Bandar Udara

**Tanggal Berlaku:**  
5 Oktober 2015 – 30 Juli 2020



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifikasi Badan Usaha  
Bandar Udara (BUBU)

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
Jenderal Ahmad Yani -  
Semarang

**Lembaga Pemberi:**  
Direktorat Jenderal  
Perhubungan Udara  
Kementerian Perhubungan  
Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Sertifikasi Bandar Udara

**Tanggal Berlaku:**  
23 November 2015 –  
2 September 2020



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifikasi Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional Frans Kaesiepo - Biak

**Lembaga Pemberi:**  
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Sertifikasi Bandar Udara

**Tanggal Berlaku:**  
4 Maret 2016 – 30 Juli 2020



**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali

**Lembaga Pemberi:**  
TUV Rheinland

**Ruang Lingkup:**  
Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)

**Tanggal Berlaku:**  
30 Januari 2019 - 29 Januari 2022



**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali

**Lembaga Pemberi:**  
TUV Rheinland

**Ruang Lingkup:**  
Pelayanan Jasa Pendaratan Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)

**Tanggal Berlaku:**  
30 Januari 2019 - 29 Januari 2022



**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali

**Lembaga Pemberi:**  
TUV Rheinland

**Ruang Lingkup:**  
Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U)

**Tanggal Berlaku:**  
30 Januari 2019 - 29 Januari 2022



**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional Juanda - Surabaya

**Lembaga Pemberi:**  
Lloyd's Register

**Ruang Lingkup:**  
Airport Passenger Services (PJP2U)

**Tanggal Berlaku:**  
1 November 2018 - 31 Oktober 2021



**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional Juanda - Surabaya

**Lembaga Pemberi:**  
TUV Rheinland

**Ruang Lingkup:**  
Pelayanan Jasa Pendaratan Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)

**Tanggal Berlaku:**  
8 Desember 2017 - 7 Desember 2020





**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
Juanda - Surabaya

**Lembaga Pemberi:**  
TUV Rheinland

**Ruang Lingkup:**  
Pelayanan Jasa Kargo dan Pos  
Pesawat Usaha (PJKP2U)

**Tanggal Berlaku:**  
19 Desember 2018 -  
18 Desember 2021



**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
Sultan Hasanuddin - Makassar

**Lembaga Pemberi:**  
United Registrar of Systems  
(URS)

**Ruang Lingkup:**  
Airport Passenger Services  
(Pelayanan  
Jasa Penumpang Pesawat  
Udara/PJP2U)

**Tanggal Berlaku:**  
25 Juni 2016 - 24 Juni 2019



**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
Sultan Hasanuddin - Makassar

**Lembaga Pemberi:**  
TUV Rheinland

**Ruang Lingkup:**  
Pelayanan Jasa Pendaratan,  
Penempatan  
dan Penyimpanan Pesawat  
Udara (PJP4U)

**Tanggal Berlaku:**  
14 Desember 2017 -  
13 Desember 2020



**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
Sultan Hasanuddin - Makassar

**Lembaga Pemberi:**  
TUV Rheinland

**Ruang Lingkup:**  
Pelayanan Jasa Kargo dan Pos  
Pesawat Udara (PJKP2U)

**Tanggal Berlaku:**  
2 Januari 2019 - 1 Januari 2022



**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
Sultan Aji Muhammad Sulaiman  
Sepinggan - Balikpapan

**Lembaga Pemberi:**  
TUV Rheinland

**Ruang Lingkup:**  
Pelayanan Jasa Penumpang  
Pesawat Udara (PJP2U);  
Pelayanan Jasa Pendaratan,  
Penempatan dan Penyimpanan  
Pesawat Udara (PJP4U);  
Pelayanan Jasa Kargo dan Pos  
Pesawat Udara (PJKP2U)

**Tanggal Berlaku:**  
10 November 2017 -  
9 November 2020



**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
Adisutjipto - Yogyakarta

**Lembaga Pemberi:**  
TUV Rheinland

**Ruang Lingkup:**  
Pelayanan Jasa Penumpang  
Pesawat Udara (PJP2U)

**Tanggal Berlaku:**  
17 Januari 2018 - 16 Januari 2021



**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional Adisutjipto - Yogyakarta

**Lembaga Pemberi:**  
TUV Rheinland

**Ruang Lingkup:**  
Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)

**Tanggal Berlaku:**  
22 Oktober 2017 - 21 Oktober 2020



**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional Adisutjipto - Yogyakarta

**Lembaga Pemberi:**  
TUV Rheinland

**Ruang Lingkup:**  
Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U)

**Tanggal Berlaku:**  
8 Januari 2019 - 7 Januari 2022



**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo - Solo

**Lembaga Pemberi:**  
TUV Rheinland

**Ruang Lingkup:**  
Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) & Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)

**Tanggal Berlaku:**  
30 November 2017 - 29 November 2020



**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo - Solo

**Lembaga Pemberi:**  
TUV Rheinland

**Ruang Lingkup:**  
Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U)

**Tanggal Berlaku:**  
9 Januari 2019 - 8 Januari 2022



**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani - Semarang

**Lembaga Pemberi:**  
TUV Rheinland

**Ruang Lingkup:**  
Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) & Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)

**Tanggal Berlaku:**  
12 Desember 2017 - 11 Desember 2020



**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani - Semarang

**Lembaga Pemberi:**  
TUV Rheinland

**Ruang Lingkup:**  
Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U)

**Tanggal Berlaku:**  
12 Juni 2019 - 11 Juni 2022



**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
Syamsudin Noor - Banjarmasin

**Lembaga Pemberi:**  
TUV Rheinland

**Ruang Lingkup:**  
Pelayanan Jasa Penumpang  
Pesawat Udara (PJP2U);  
Pelayanan Jasa Pendaratan,  
Penempatan, dan Penyimpanan  
Pesawat Udara (PJP4U);  
Pelayanan Jasa Kargo dan Pos  
Pesawat Udara (PJKP2U)

**Tanggal Berlaku:**  
15 Oktober 2019 -  
14 Oktober 2022



**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
Lombok

**Lembaga Pemberi:**  
Lloyd's Register

**Ruang Lingkup:**  
Airport Passenger Services  
(PJP2U)

**Tanggal Berlaku:**  
7 Desember 2016 -  
6 Desember 2019



**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
Lombok

**Lembaga Pemberi:**  
TUV Rheinland

**Ruang Lingkup:**  
Pelayanan Jasa Pendaratan,  
Penempatan  
dan Penyimpanan Pesawat  
Udara (PJP4U)

**Tanggal Berlaku:**  
22 November 2017 -  
21 November 2020



**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
Lombok

**Lembaga Pemberi:**  
TUV Rheinland

**Ruang Lingkup:**  
Pelayanan Jasa Kargo dan Pos  
Pesawat Udara (PJKP2U)

**Tanggal Berlaku:**  
8 Februari 2019 -  
7 Februari 2022



**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
Sam Ratulangi - Manado

**Lembaga Pemberi:**  
TUV Rheinland

**Ruang Lingkup:**  
Pelayanan Jasa Penumpang  
Pesawat Udara (PJP2U);  
Pelayanan Jasa Kargo dan Pos  
Pesawat Udara (PJKP2U) dan  
Pelayanan Jasa Pendaratan,  
Penempatan dan Penyimpanan  
Pesawat Udara (PJP4U)

**Tanggal Berlaku:**  
28 Oktober 2019 -  
27 Oktober 2022



**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
Pattimura - Ambon

**Lembaga Pemberi:**  
TUV Rheinland

**Ruang Lingkup:**  
Pelayanan Jasa Pendaratan,  
Penempatan dan  
Penyimpanan Pesawat Udara  
(PJP4U); Pelayanan Jasa  
Kargo dan Pos Pesawat Udara  
(PJKP2U); Pelayanan Jasa  
Penumpang Pesawat Udara  
(PJP2U)

**Tanggal Berlaku:**  
20 Desember 2017 -  
19 Desember 2020



**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
El Tari - Kupang

**Lembaga Pemberi:**  
TUV Rheinland

**Ruang Lingkup:**  
Pelayanan Jasa Penumpang  
Pesawat Udara (PJP2U)

**Tanggal Berlaku:**  
6 Desember 2018 -  
5 Desember 2021



**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
El Tari - Kupang

**Lembaga Pemberi:**  
TUV Rheinland

**Ruang Lingkup:**  
Provision of Aircraft Landing,  
Parking, and Hanggar Services  
(PJP4U)

**Tanggal Berlaku:**  
27 Desember 2017 -  
26 Desember 2020



**Nama Sertifikasi:**  
ISO 9001:2015

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
Frans Kaisiepo - Biak

**Lembaga Pemberi:**  
TUV Rheinland

**Ruang Lingkup:**  
Provision of Aircraft Landing,  
Parking, Passenger and Air-  
Postal & Cargo Services

**Tanggal Berlaku:**  
7 Januari 2019 - 5 Januari 2021



**Nama Sertifikasi:**  
OHSAS 18001:2007

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
I Gusti Ngurah Rai - Bali

**Lembaga Pemberi:**  
Sucofi do International  
Certification Services Ruang

**Ruang Lingkup:**  
Jasa Kebandarudaraan

**Tanggal Berlaku:**  
02 Januari 2018 -  
01 Januari 2021



**Nama Sertifikasi:**  
OHSAS 18001:2007

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
Sultan Aji Muhammad Sulaiman  
(SAMS) - Sepinggan Balikpapan

**Lembaga Pemberi:**  
Sucofi do International  
Certification Services Ruang

**Ruang Lingkup:**  
Jasa Kebandarudaraan

**Tanggal Berlaku:**  
02 Januari 2018 -  
01 Januari 2021



**Nama Sertifikasi:**  
OHSAS 18001:2007

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
Adi Soemarmo - Solo

**Lembaga Pemberi:**  
Sucofi do International  
Certification Services Ruang

**Ruang Lingkup:**  
Jasa Kebandarudaraan

**Tanggal Berlaku:**  
02 Januari 2018 -  
01 Januari 2021



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Bendera Emas Unit

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani - Semarang

**Lembaga Pemberi:**  
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Pengelola Bandara

**Tanggal Berlaku:**  
14 Juli 2017 - 14 Juli 2020



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Bendera Emas Unit

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali

**Lembaga Pemberi:**  
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Jasa Kebandarudaraan

**Tanggal Berlaku:**  
30 Juli 2018 - 30 Juli 2021



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Bendera Emas Unit

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian - Balikpapan

**Lembaga Pemberi:**  
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Pengelola Bandar Udara

**Tanggal Berlaku:**  
30 Juli 2018 - 30 Juli 2021



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Bendera Emas Unit

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo - Solo

**Lembaga Pemberi:**  
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Jasa Kebandarudaraan

**Tanggal Berlaku:**  
30 Juli 2018 - 30 Juli 2021



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Bendera Emas Unit

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional Pattimura - Ambon

**Lembaga Pemberi:**  
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Jasa Kebandarudaraan

**Tanggal Berlaku:**  
29 Maret 2019 - 29 Maret 2022



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

**Penerima:**  
Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin

**Lembaga Pemberi:**  
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Jasa Kebandarudaraan

**Tanggal Berlaku:**  
29 Maret 2019 - 29 Maret 2022





**Nama Sertifikasi:**  
Sertifi at Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional El Tari - Kupang

**Lembaga Pemberi:**  
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Jasa Kebandarudaraan

**Tanggal Berlaku:**  
29 Maret 2019 - 29 Maret 2022



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifi at Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo - Biak

**Lembaga Pemberi:**  
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Jasa Kebandarudaraan

**Tanggal Berlaku:**  
29 Maret 2019 - 29 Maret 2022



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifi at Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional Adisutjipto - Yogyakarta

**Lembaga Pemberi:**  
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Jasa Kebandarudaraan

**Tanggal Berlaku:**  
29 Maret 2019 - 29 Maret 2022



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifi at Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional El Tari - Kupang

**Lembaga Pemberi:**  
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Jasa Kebandarudaraan

**Tanggal Berlaku:**  
29 Maret 2019 - 29 Maret 2022



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifi at Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional Lombok

**Lembaga Pemberi:**  
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Jasa Kebandarudaraan

**Tanggal Berlaku:**  
29 Maret 2019 - 29 Maret 2022



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifi at Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi - Manado

**Lembaga Pemberi:**  
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Jasa Kebandarudaraan

**Tanggal Berlaku:**  
29 Maret 2019 - 29 Maret 2022



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifikasi Sistem Manajemen  
Keselamatan dan Kesehatan  
Kerja (SMK3)

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
Juanda - Surabaya

**Lembaga Pemberi:**  
Kementerian Ketenagakerjaan  
Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Jasa Kebandarudaraan

**Tanggal Berlaku:**  
29 Maret 2019 - 29 Maret 2022



**Nama Sertifikasi:**  
Sertifikasi Sistem Manajemen  
Keselamatan dan Kesehatan  
Kerja (SMK3)

**Penerima:**  
Bandar Udara Internasional  
Sultan Hasanuddin - Makassar

**Lembaga Pemberi:**  
Kementerian Ketenagakerjaan  
Republik Indonesia

**Ruang Lingkup:**  
Jasa Kebandarudaraan

**Tanggal Berlaku:**  
29 Maret 2019 - 29 Maret 2022

## Pendidikan dan Pelatihan Manajemen

### KEBIJAKAN

PT Angkasa Pura I (Persero) memahami pentingnya program pendidikan dan pengembangan kompetensi manajemen dan karyawan yang bertujuan untuk menunjang pengembangan bisnis perusahaan. Oleh sebab itu Perusahaan memastikan setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keahliannya sesuai kebutuhan dan minat masing-masing. Hal tersebut terangkum dalam Keputusan Direksi Angkasa Pura I Nomor : KEP.167/KP.04/2019 yang mengatur tentang Pola Pelatihan dan Pengembangan Pegawai PT Angkasa Pura I (Persero).

Sepanjang tahun 2019, Angkasa Pura I memfasilitasi pengembangan kompetensi manajemen dan karyawan melalui kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan secara

internal maupun eksternal. Terdapat 254 kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh 3.490 peserta pada tahun 2019, baik dari pihak manajemen maupun karyawan. Jumlah peserta tersebut turun dari 6.143 peserta pada tahun 2018 yang dipicu oleh adanya pelatihan *online* pada tahun 2018 yaitu pelatihan "Berpikir Kreatif" yang wajib diikuti oleh seluruh pegawai, sedangkan pada tahun 2019 pelatihan berbasis *online* tersebut tidak lagi diadakan.

Selain itu dalam upaya implementasi program pemerintah pembentukan SDM unggul, sebagian anggaran pelatihan dipergunakan untuk pembenahan infrastruktur sebagai persiapan pelaksanaan program D3 beasiswa CSR yang bekerja sama dengan Universitas Mataram, NTB untuk pengembangan jurusan khusus kebandarudaraan.



## PENGEMBANGAN KOMPETENSI BERDASARKAN LEVEL JABATAN

Jenis pelatihan terbanyak yang diselenggarakan pada tahun 2019 yaitu pelatihan *mandatory regulation* pada tingkat *officer*. Sedangkan pelatihan paling sedikit yaitu pelatihan *leadership* pada tingkat *top management*. Di sisi lain, jumlah peserta tertinggi sebesar 1.195 orang, mengikuti pelatihan jenis *mandatory* regulasi. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kebutuhan

personel berlisensi di bandar udara harus dan wajib dilaksanakan untuk menjaga masa berlaku lisensi tetap hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jumlah peserta pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun 2019 berdasarkan jenis dan program pada berbagai level di PT Angkasa Pura I (Persero) dipaparkan dalam bentuk tabel berikut ini.

Pengembangan Kompetensi PT Angkasa Pura I (Persero) Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2019\*

No	Level	Jenis Pelatihan	Program Pelatihan
1	Direksi	Inhouse Training	Pelatihan Performance Management Batch I, Batch II dan Batch III
		Public Course	IAI-AFA-IAESB International Conference 2019
		Public Course	Civil Aviation Training International Forum 2019
		Public Course	Indonesia Career Evening 2019 Bersama YPIA & Pelatihan Certified Sustainability Practitioner Program

## Pengembangan Kompetensi PT Angkasa Pura I (Persero) Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2019\*

No	Level	Jenis Pelatihan	Program Pelatihan
1	Vice President	Inhouse Training	Pelatihan Pra Purnabakti Batch XXXIII s.d. XXXVII
		Swakelola	Executive Aviation Succession Program
		Inhouse Training	Pelatihan Performance Management Batch I, Batch II dan Batch III
		Inhouse Training	Pelatihan Training of Trainers Batch II
		Inhouse Training	Workshop Coaching & Mentoring For Executive Leader Batch III
		Inhouse Training	Resertifikasi Certified Risk Professional Tahun 2019
		Inhouse Training	Pelatihan Manajemen Risiko dan Sertifikasi Certified Risk Professional (CRP)
		Public Course	Conference Digital HR & Analytics
		Public Course	HR Festival Asia 2019
		Public Course	7th Maximising Non Aeronautical Revenue Summit 2019
		Public Course	Distance Learning The Mechanics of Project Finance
		Public Course	Civil Aviation Training International Forum 2019
3	General Manager	Inhouse Training	Pelatihan Pra Purnabakti Batch XXXIII s.d. XXXVII
		Project Manager	Executive Aviation Succession Program
	Co. General Manager	Inhouse Training	Pelatihan Performance Management Batch I, Batch II dan Batch III
		Inhouse Training	Pelatihan Creative Thinking & Inovasi Batch I, Batch II, Batch III dan Batch IV
		Inhouse Training	Workshop Coaching & Mentoring For Executive Leader Batch III
		Inhouse Training	Resertifikasi Certified Risk Professional Tahun 2019
		Inhouse Training	Pelatihan Manajemen Risiko dan Sertifikasi Certified Risk Professional (CRP)
		Inhouse Training	Pelatihan Airport Operations and Management bekerja sama dengan Incheon Airport
Public Course	TFWA - The Duty Free & Travel Retail Global Summit 2019		
4	Senior Manager	Inhouse Training	Pelatihan Pra Purnabakti Batch XXXIII s.d. XXXVII
	Project Secretary	Inhouse Training	Online Learning Diklat Senior Airport Management Batch I dan Batch II
	Specialist	Inhouse Training	Inclass Learning Diklat Senior Airport Management Batch I dan Batch II
		Swakelola	Executive Aviation Succession Program
		Inhouse Training	Pelatihan Performance Management Batch I, Batch II dan Batch III

## Pengembangan Kompetensi PT Angkasa Pura I (Persero) Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2019\*

No	Level	Jenis Pelatihan	Program Pelatihan
4	Specialist	Inhouse Training	Pelatihan Training of Trainers Batch II
		Inhouse Training	Pelatihan Creative Thinking & Inovasi Batch I, Batch II, Batch III dan Batch IV
		Inhouse Training	Airport Executive Succession Program
		Inhouse Training	Workshop Keterbukaan Informasi Publik
		Inhouse Training	Workshop Coaching & Mentoring For Executive Leader Batch III
		Inhouse Training	Pelatihan dan Sertifikasi IRCA Certified Lead Auditor ISO 9001:2015 Tahun 2019
		Swakelola	Workshop People Transformation Batch I dan Batch II
		Inhouse Training	Resertifikasi Certified Risk Professional Tahun 2019
		Inhouse Training	Pelatihan Manajemen Risiko dan Sertifikasi Certified Risk Professional (CRP)
		Inhouse Training	Pelatihan Transformasi Bisnis di Era Industri 4.0
		Inhouse Training	Pelatihan Pemeriksaan dan Penelitian Pelanggaran Disiplin Pegawai
		Public Course	Conference Digital HR & Analytics
		Inhouse Training	Pelatihan Airport Operations and Management bekerja sama dengan Incheon Airport
		Public Course	TFWA - The Duty Free & Travel Retail Global Summit 2019
		Public Course	Trinity Forum - The 2019 Global Airport Commercial Revenue Conference
		Inhouse Training	Pelatihan Airport and Terminal Operation Batch I, Batch II dan Batch III
		Inhouse Training	Pelatihan Airport and Terminal Facilities Batch I, Batch II dan Batch III
Inhouse Training	Airport Commercial		
Inhouse Training	Airport Customer Satisfaction		
5	Manager	Inhouse Training	Pelatihan Pra Purnabakti Batch XXXIII s.d. XXXVII
	Assistant Manager	Inhouse Training	Ujian Presentasi Laporan Project Assignment Diklat Junior Airport Management Batch III
		Inhouse Training	In Class Diklat Junior Airport Management Non Regular Batch I dan Batch II
		Inhouse Training	Pelatihan Training of Trainers Batch II
		Inhouse Training	Pelatihan Creative Thinking & Inovasi Batch I, Batch II, Batch III dan Batch IV
		Inhouse Training	Pelatihan Customer Service and Hospitality Champion Class Batch I, Batch II dan Batch III
		Inhouse Training	Workshop Customer Service and Hospitality Concept for Manager



## Pengembangan Kompetensi PT Angkasa Pura I (Persero) Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2019\*

No	Level	Jenis Pelatihan	Program Pelatihan
5	Assistant Manager	Inhouse Training	Pelatihan Customer Service and Hospitality Initial Class Batch I, Batch II dan Batch III
		Inhouse Training	Pelatihan Interpretasi KPKU Batch I dan Batch II
		Inhouse Training	Pelatihan Airport Operation Control Center (AOCC) Batch I dan Batch II
		Inhouse Training	Workshop Keterbukaan Informasi Publik
		Inhouse Training	Pelatihan dan Sertifikasi IRCA Certified Lead Auditor ISO 9001:2015 Tahun 2019
		Swakelola	Pelatihan Airline Management and Route Development Batch XII
		Swakelola	Pelatihan Basic Safety Management System for Trainer
		Inhouse Training	Pelatihan Sertifikasi Ahli Muda Manajemen Proyek
		Inhouse Training	Pelatihan Pemeriksaan dan Penelitian Pelanggaran Disiplin Pegawai
		Inhouse Training	In-House Training ACI - Airport Carbon Management
		Inhouse Training	Pelatihan Airport Operations and Management bekerja sama dengan Incheon Airport
		Public Course	Trinity Forum - The 2019 Global Airport Commercial Revenue Conference
		Inhouse Training	Pelatihan Airport and Terminal Operation Batch I, Batch II dan Batch III
		Inhouse Training	Pelatihan Airport and Terminal Facilities Batch I, Batch II dan Batch III
		Inhouse Training	Airport Commercial
		Inhouse Training	Airport Customer Satisfaction
		Swakelola	Ujian Perpanjangan Rating Personil Senior PKP-PK dan Salvage
		Swakelola	Ujian Perpanjangan Rating Personel Salvage
		Swakelola	Ujian Penerbitan Habis Masa Berlaku Lisensi Faskampen
		Swakelola	Ujian Penerbitan Habis Masa Berlaku Lisensi Electrical
Swakelola	Ujian Penerbitan Habis Masa Berlaku Lisensi Aviobridge		
Contract Specialist	-	-	
Airport Duty Manager	Inhouse Training	Pelatihan Pra Purnabakti Batch XXXIII s.d. XXXVII	
	Inhouse Training	Ujian Presentasi Laporan Project Assignment Diklat Junior Airport Management Batch III	
	Inhouse Training	In Class Diklat Junior Airport Management Non Regular Batch I dan Batch II	
	Inhouse Training	Online Learning Diklat Senior Airport Management Batch I dan Batch II	
	Inhouse Training	Inclass Learning Diklat Senior Airport Management Batch I dan Batch II	

## Pengembangan Kompetensi PT Angkasa Pura I (Persero) Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2019\*

No	Level	Jenis Pelatihan	Program Pelatihan
5	Airport Duty Manager	Inhouse Training	Workshop Customer Service and Hospitality Concept for Manager
		Inhouse Training	Pelatihan Airport Operation Control Center (AOCC) Batch I dan Batch II
		Inhouse Training	Pelatihan Airport and Terminal Operation Batch I, Batch II dan Batch III
		Inhouse Training	Airport Customer Satisfaction
	Auditor	Inhouse Training	Pelatihan Pra Purnabakti Batch XXXIII s.d. XXXVII
		Inhouse Training	Pelatihan Airport Operations and Management bekerja sama dengan Incheon Airport
		Inhouse Training	Pelatihan Airport and Terminal Operation Batch I, Batch II dan Batch III
		Inhouse Training	Pelatihan Airport and Terminal Facilities Batch I, Batch II dan Batch III
6	Corporate Expert Level I	-	-
	Corporate Expert Level II	Inhouse Training	Pelatihan Pra Purnabakti Batch XXXIII s.d. XXXVII
		Swakelola	Executive Aviation Succession Program
		Inhouse Training	Pelatihan Creative Thinking & Inovasi Batch I, Batch II, Batch III dan Batch IV
		Inhouse Training	Workshop Coaching & Mentoring For Executive Leader Batch III
		Inhouse Training	Resertifikasi Certified Risk Professional Tahun 2019
	Corporate Expert Level III	Inhouse Training	Pelatihan Pra Purnabakti Batch XXXIII s.d. XXXVII
		Inhouse Training	Online Learning Diklat Senior Airport Management Batch I dan Batch II
		Inhouse Training	Inclass Learning Diklat Senior Airport Management Batch I dan Batch II
		Inhouse Training	Pelatihan Training of Trainers Batch II
		Inhouse Training	Pelatihan Transformasi Bisnis di Era Industri 4.0
		Inhouse Training	Pelatihan Airport and Terminal Facilities Batch I, Batch II dan Batch III
	Corporate Expert Level IV	Inhouse Training	Pelatihan Pra Purnabakti Batch XXXIII s.d. XXXVII
		Inhouse Training	Ujian Presentasi Laporan Project Assignment Diklat Junior Airport Management Batch III
		Inhouse Training	In Class Diklat Junior Airport Management Non Regular Batch I dan Batch II
		Inhouse Training	Pelatihan Training of Trainers Batch II
		Inhouse Training	Workshop Keterbukaan Informasi Publik
		Inhouse Training	Workshop Coaching & Mentoring For Executive Leader Batch III
		Inhouse Training	Pelatihan Sertifikasi Ahli Muda Manajemen Proyek
		Inhouse Training	Pelatihan Pemeriksaan dan Penelitian Pelanggaran Disiplin Pegawai
Inhouse Training		Pelatihan Diploma IATA Sesi II - Airport Master Planning	

## Pengembangan Kompetensi PT Angkasa Pura I (Persero) Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2019\*

No	Level	Jenis Pelatihan	Program Pelatihan
6	Corporate Expert Level IV	Inhouse Training	Pelatihan Airport and Terminal Operation Batch I, Batch II dan Batch III
		Inhouse Training	Pelatihan Diploma IATA Sesi III - Airport Development and Infrastructure Design
		Inhouse Training	Airport Commercial
	Human Capital Corporate Support	Inhouse Training	Pelatihan Pra Purnabakti Batch XXXIII s.d. XXXVII
	Human Capital Support Expert	Inhouse Training	Pelatihan Pra Purnabakti Batch XXXIII s.d. XXXVII
		Inhouse Training	Ujian Presentasi Laporan Project Assignment Diklat Junior Airport Management Batch III
		Swakelola	Executive Aviation Succession Program
		Inhouse Training	Pelatihan Performance Management Batch I, Batch II dan Batch III
		Inhouse Training	Pelatihan Training of Trainers Batch II
		Inhouse Training	Pelatihan Creative Thinking & Inovasi Batch I, Batch II, Batch III dan Batch IV
		Inhouse Training	IATA Airport Slots and Coordination
		Inhouse Training	Pelatihan Pemeriksaan dan Penelitian Pelanggaran Disiplin Pegawai
		Inhouse Training	Pelatihan Airport Operations and Management bekerja sama dengan Incheon Airport
		Inhouse Training	Pelatihan Diploma IATA Sesi II - Airport Master Planning
		Inhouse Training	Pelatihan Diploma IATA Sesi III - Airport Development and Infrastructure Design
		Corporate Doctor	-
	P4DP Specialist	Inhouse Training	In Class Diklat Junior Airport Management Non Regular Batch I dan Batch II
		Inhouse Training	Pelatihan Pemeriksaan dan Penelitian Pelanggaran Disiplin Pegawai
	Analyst	Inhouse Training	Pelatihan Pra Purnabakti Batch XXXIII s.d. XXXVII
		Inhouse Training	Pelatihan dan Sertifikasi IRCA Certified Lead Auditor ISO 9001:2015 Tahun 2019
Swakelola		Pelatihan Airline Management and Route Development Batch XII	
Inhouse Training		Pelatihan Airport and Terminal Facilities Batch I, Batch II dan Batch III	
Swakelola		Ujian Penerbitan Habis Masa Berlaku Lisensi Electrical	
Swakelola		Ujian Penerbitan Habis Masa Berlaku Lisensi Mechanical	

## Pengembangan Kompetensi PT Angkasa Pura I (Persero) Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2019\*

No	Level	Jenis Pelatihan	Program Pelatihan
7	Team Leader	Inhouse Training	Pelatihan Pra Purnabakti Batch XXXIII s.d. XXXVII
		Inhouse Training	Ujian Presentasi Laporan Project Assignment Diklat Junior Airport Management Batch III
		Inhouse Training	Pelatihan Customer Service and Hospitality Champion Class Batch I, Batch II dan Batch III
		Inhouse Training	Workshop Customer Service and Hospitality Concept for Manager
		Inhouse Training	Pelatihan Customer Service and Hospitality Initial Class Batch I, Batch II dan Batch III
		Inhouse Training	Pelatihan Interpretasi KPKU Batch I dan Batch II
		Inhouse Training	Pelatihan Airport Operation Control Center (AOCC) Batch I dan Batch II
		Swakelola	Pelatihan Airline Management and Route Development Batch XII
		Inhouse Training	Pelatihan Sertifikasi Ahli K3 Listrik Tahun 2019
		Public Course	5th Emergency Management for Airport Summit 2019
		Inhouse Training	Pelatihan Airport and Terminal Operation Batch I, Batch II dan Batch III
		Inhouse Training	Pelatihan Airport and Terminal Facilities Batch I, Batch II dan Batch III
		Penunjukan Langsung	Diklat Technical Competency and Certification (TCC) Air Conditioning System (ACS)
		Penunjukan Langsung	Diklat Technical Competency and Certification (TCC) Airfield Lighting System (ALS)
		Inhouse Training	Diklat Uji Mutu Foam Tahun 2019
		Inhouse Training	Diklat Foam Tender Operation and Defensive Driving Tahun 2019
		Swakelola	Ujian Perpanjangan Lisensi Personil Senior Aviation Security Tahun 2019
		Swakelola	Ujian Perpanjangan Rating Personil Senior PKP-PK dan Salvage
		Swakelola	Ujian Perpanjangan Rating Personel Salvage
		Swakelola	Ujian Penerbitan Habis Masa Berlaku Lisensi Faskampen
Swakelola	Ujian Penerbitan Habis Masa Berlaku Lisensi Electrical		
Swakelola	Ujian Penerbitan Habis Masa Berlaku Lisensi Aviobridge		
Swakelola	Ujian Penerbitan Habis Masa Berlaku Lisensi Mechanical		
Swakelola	Ujian Penerbitan Habis Masa Berlaku Lisensi Personel AMC dan Marshaller		
8	Squad Leader	Inhouse Training	Pelatihan Pra Purnabakti Batch XXXIII s.d. XXXVII
		Inhouse Training	Pelatihan Customer Service and Hospitality Champion Class Batch I, Batch II dan Batch III
		Inhouse Training	Workshop Customer Service and Hospitality Concept for Manager

## Pengembangan Kompetensi PT Angkasa Pura I (Persero) Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2019\*

No	Level	Jenis Pelatihan	Program Pelatihan
8	Squad Leader	Inhouse Training	Pelatihan Airport Operation Control Center (AOCC) Batch I dan Batch II
		Public Course	5th Emergency Management for Airport Summit 2019
		Swakelola	Diklat Initial Senior PKP-PK Tahun 2019
		Penunjukan Langsung	Diklat Initial Senior Aviation Security Angkatan I dan Angkatan II Tahun 2019
		Inhouse Training	Diklat Uji Mutu Foam Tahun 2019
		Inhouse Training	Diklat Foam Tender Operation and Defensive Driving Tahun 2019
		Swakelola	Ujian Perpanjangan Lisesnsi Personil Junior Aviation Security Tahun 2019
		Swakelola	Ujian Perpanjangan Lisesnsi Personil Senior Aviation Security Tahun 2019
		Swakelola	Ujian Perpanjangan Rating Personil Senior PKP-PK dan Salvage
9	Engineer	Inhouse Training	Pelatihan Pra Purnabakti Batch XXXIII s.d. XXXVII
		Inhouse Training	Ujian Presentasi Laporan Project Assignment Diklat Junior Airport Management Batch III
		Inhouse Training	Pelatihan Sertifikasi Ahli K3 Listrik Tahun 2019
		Inhouse Training	Pelatihan Airport and Terminal Facilities Batch I, Batch II dan Batch III
		Penunjukan Langsung	Diklat Technical Competency and Certification (TCC) Airfield Lighting System (ALS)
		Swakelola	Ujian Penerbitan Habis Masa Berlaku Lisensi Faskampen
		Swakelola	Ujian Penerbitan Habis Masa Berlaku Lisensi Electrical
10	Technician	Inhouse Training	Pelatihan Pra Purnabakti Batch XXXIII s.d. XXXVII
		Inhouse Training	Pelatihan Interpretasi KPKU Batch I dan Batch II
		Inhouse Training	Diklat Building Information Modelling Batch I
		Inhouse Training	Pelatihan Dasar-Dasar Amdal Tahun 2019
		Inhouse Training	Pelatihan Sertifikasi Ahli Muda Manajemen Proyek
		Inhouse Training	Pelatihan Sertifikasi Ahli K3 Listrik Tahun 2019
		Inhouse Training	In-House Training ACI - Airport Carbon Management
		Inhouse Training	Pelatihan Airport and Terminal Facilities Batch I, Batch II dan Batch III
		Swakelola	Diklat Initial Senior PKP-PK Tahun 2019
		Penunjukan Langsung	Diklat Technical Competency and Certification (TCC) Air Conditioning System (ACS)
		Penunjukan Langsung	Diklat Technical Competency and Certification (TCC) Airfield Lighting System (ALS)



## Pengembangan Kompetensi PT Angkasa Pura I (Persero) Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2019\*

No	Level	Jenis Pelatihan	Program Pelatihan
10	Technician	Penunjukan Langsung	Diklat Technical Competency and Certification (TCC) Peralatan Pemantau dan Penunda Upaya Kesehatan (P3UK)
		Penunjukan Langsung	Diklat Technical Competency and Certification (TCC) Peralatan Pendeteksi Pemeriksaan Barang (P3B)
		Penunjukan Langsung	Diklat Technical Competency (TCC) Fasilitas Sisi Udara dan Fasilitas Sisi Darat Personel Airport Facilities and Maintenance
		Inhouse Training	Diklat Uji Mutu Foam Tahun 2019
		Swakelola	Ujian Perpanjangan Rating Personel Basic PKP-PK dan Salvage
		Swakelola	Ujian Perpanjangan Rating Personel Senior PKP-PK dan Salvage
		Swakelola	Ujian Penerbitan Habis Masa Berlaku Lisensi Faskampen
		Swakelola	Ujian Penerbitan Habis Masa Berlaku Lisensi Electrical
		Swakelola	Ujian Penerbitan Habis Masa Berlaku Lisensi Mechanical
11	Officer	Swakelola	Pelatihan Orientasi Tipe B dan C Tahun 2019
	Sales Executive	Swakelola	Pelatihan Airport Officer Management Batch IV, V dan VI
		Inhouse Training	Pelatihan Pra Purnabakti Batch XXXIII s.d. XXXVII
		Inhouse Training	Ujian Presentasi Laporan Project Assignment Diklat Junior Airport Management Batch III
		Inhouse Training	Pelatihan Creative Thinking & Inovasi Batch I, Batch II, Batch III dan Batch IV
		Inhouse Training	Pelatihan Customer Service and Hospitality Champion Class Batch I, Batch II dan Batch III
		Inhouse Training	Workshop Customer Service and Hospitality Concept for Manager
		Inhouse Training	Pelatihan Customer Service and Hospitality Initial Class Batch I, Batch II dan Batch III
		Inhouse Training	Pelatihan Interpretasi KPKU Batch I dan Batch II
		Inhouse Training	Pelatihan Airport Operation Control Center (AOCC) Batch I dan Batch II
		Inhouse Training	Diklat Building Information Modelling Batch I
		Inhouse Training	Workshop Keterbukaan Informasi Publik
		Inhouse Training	Pelatihan dan Sertifikasi IRCA Certified Lead Auditor ISO 9001:2015 Tahun 2019
		Inhouse Training	Pelatihan Dasar-Dasar Amdal Tahun 2019
		Swakelola	Pelatihan Airline Management and Route Development Batch XII
Inhouse Training	IATA Airport Slots and Coordination		
Swakelola	Pelatihan Basic Safety Management System for Trainer		

## Pengembangan Kompetensi PT Angkasa Pura I (Persero) Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2019\*

No	Level	Jenis Pelatihan	Program Pelatihan
11	Sales Executive	Inhouse Training	Pelatihan Sertifikasi Ahli Muda Manajemen Proyek
		Inhouse Training	Pelatihan Pemeriksaan dan Penelitian Pelanggaran Disiplin Pegawai
		Inhouse Training	Pelatihan Sertifikasi Ahli K3 Listrik Tahun 2019
		Inhouse Training	In-House Training ACI - Airport Carbon Management
		Public Course	ACI Online Learning - Certificate in Business Leadership
		Public Course	ACI Online Learning - Certificate in Airport Business Operations
		Public Course	ACI Online Learning - Certificate in Commercial Management
		Inhouse Training	Pelatihan Diploma IATA Sesi II - Airport Master Planning
		Public Course	ACI Online Learning - Disability Sensitivity Training
		Public Course	7th Maximising Non Aeronautical Revenue Summit 2019
		Inhouse Training	Pelatihan Airport and Terminal Operation Batch I, Batch II dan Batch III
		Public Course	Trinity Forum - The 2019 Global Airport Commercial Revenue Conference
		Inhouse Training	Pelatihan Airport and Terminal Facilities Batch I, Batch II dan Batch III
		Inhouse Training	Pelatihan Diploma IATA Sesi III - Airport Development and Infrastructure Design
		Inhouse Training	Airport Commercial
		Penunjukan Langsung	Diklat Initial Senior PKP-PK Tahun 2019
		Penunjukan Langsung	Diklat Initial Junior PKP-PK Tahun 2019
		Penunjukan Langsung	Diklat Basic Aviation Security Batch I Tahun 2019
		Penunjukan Langsung	Diklat Basic Aviation Security Batch II Tahun 2019
		Penunjukan Langsung	Diklat Basic PKP-PK Tahun 2019
		Penunjukan Langsung	Diklat Technical Competency and Certification (TCC) Airfield Lighting System (ALS)
Penunjukan Langsung	Diklat Technical Competency and Certification (TCC) Peralatan Pendeteksi Pemeriksaan Barang (P3B)		
Penunjukan Langsung	Diklat Technical Competency and Certification (TCC) Peralatan Pemantau dan Penunda Upaya Kesehatan (P3UK)		
Penunjukan Langsung	Diklat Initial Senior Aviation Security Angkatan I dan Angkatan II Tahun 2019		
Penunjukan Langsung	Diklat Initial Junior Aviation Security Angkatan I dan Angkatan II Tahun 2019		

## Pengembangan Kompetensi PT Angkasa Pura I (Persero) Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2019\*

No	Level	Jenis Pelatihan	Program Pelatihan
11	Sales Executive	Inhouse Training	Diklat Uji Mutu Foam Tahun 2019
		Inhouse Training	Diklat Foam Tender Operation and Defensive Driving Tahun 2019
		Swakelola	Ujian Perpanjangan Lisesnsi Personil Basic Aviation Security Tahun 2019
		Swakelola	Ujian Perpanjangan Lisesnsi Personil Junior Aviation Security Tahun 2019
		Swakelola	Ujian Perpanjangan Lisesnsi Personil Senior Aviation Security Tahun 2019
		Swakelola	Ujian Perpanjangan Rating Personel Basic PKP-PK dan Salvage
		Swakelola	Ujian Perpanjangan Rating Personel Senior PKP-PK dan Salvage
		Swakelola	Ujian Perpanjangan Rating Personel Salvage
		Swakelola	Ujian Penerbitan Habis Masa Berlaku Lisensi Electrical
		Swakelola	Ujian Penerbitan Habis Masa Berlaku Lisensi Aviobridge
		Swakelola	Ujian Penerbitan Habis Masa Berlaku Lisensi Mechanical
		Swakelola	Ujian Penerbitan Habis Masa Berlaku Lisensi FSU-FSD
		Swakelola	Ujian Penerbitan Habis Masa Berlaku Lisensi Personel AMC dan Marshaller
		Public Training	TCC FSU FSD
		Public Training	TCC ALS
		Public Training	TCC ACS
		Public Training	TCC P3UK
Public Training	TCC P3B		
Public Training	SERTIFIKASI IAMPI		

\*Termasuk pendidikan jangka panjang, lebih dari satu tahun yang dibiaya PT Angkasa Pura I (Persero)

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Dalam satu tahun terakhir, sebanyak 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) meningkatkan kompetensinya dalam berbagai aspek. Diantaranya yaitu terkait dengan PSAK, Sistem Manajemen Risiko dan Audit.

Tabel berikut menyajikan data Anggota Dewan Komisaris Angkasa Pura I yang telah mengikuti pelatihan/pengembangan kompetensi sepanjang tahun 2019.

Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Harry Z Suratin	Komisaris	PSAK 71, PSAK 72, PSAK 73	25 s.d 26 Juli 2019	Institute of Audit Committee



## PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Selain Dewan Komisaris, para Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) juga telah melakukan peningkatan kompetensi dengan mengikuti berbagai kegiatan atau acara. Tidak kurang dari lima kegiatan telah diikuti anggota Direksi, antara lain yang terkait dengan *performance management*, *civil aviation training*, dan *benchmarking* implementasi tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U).

Data dan informasi lebih rinci mengenai pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti anggota Direksi Angkasa Pura I disajikan pada tabel berikut:

Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Faik Fahmi	Direktur Utama	Pelatihan performance management batch II	Jakarta, 29 - 30 Januari 2019	PT. Talenta Sumber Daya Prima
Wendo Asrul Rose	Direktur Operasi	Pelatihan performance management batch III	Jakarta, 5 - 6 Maret 2019	PT. Talenta Sumber Daya Prima
Novrihandri	Direktur Keuangan	IAI-AFA-IAESB Intenational Conference 2019	Bali, 11 - 12 April 2019	IAI
		Pelatihan performance management batch III	Jakarta, 5 - 6 Maret 2019	PT. Talenta Sumber Daya Prima
Adi Nugroho	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	Civil aviation training international forum 2019	China, 24 - 25 September 2019	Galleon Consulting
		Pelatihan performance management batch II	Jakarta, 29 - 30 Januari 2019	PT. Talenta Sumber Daya Prima
Lukman F. Laisa	Direktur Teknik	Pelatihan performance management batch III	Jakarta, 5 - 6 Maret 2019	PT. Talenta Sumber Daya Prima
Devy Suradji	Direktur Pemasaran dan Pelayanan	Pelatihan performance management batch III	Jakarta, 5 - 6 Maret 2019	PT. Talenta Sumber Daya Prima
		Benchmarking implementasi tarif PJP4U, counter dan garabarata di Brisbane Airport	Brisbane, 16 - 19 Januari 2019	PT Angkasa Pura I
Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Direktur Pengembangan Usaha	Pelatihan performance management batch II	Jakarta, 29 - 30 Januari 2019	PT. Talenta Sumber Daya Prima

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Selanjutnya, dalam rangka memelihara dan meningkatkan kemampuan pengawasan, komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris telah berpartisipasi pada berbagai kegiatan pengembangan kompetensi sepanjang tahun 2019. Sebanyak 7 (tujuh) kegiatan telah diikuti pada tahun pelaporan, dengan tema yang

dikembangkan antara lain terkait dengan PSAK, sistem manajemen risiko, dan audit.

Data dan informasi mengenai pendidikan dan/atau pelatihan komite-komite di bawah Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Audit PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
Harry Z. Soeratin	Wakil Ketua Komite Audit	PSAK 71, PSAK 72, PSAK 73	25 - 26 Juli 2019	Institute of Audit Committee
		Workshop CACP Certification in Audit Committee Practices	6 - 8 Agustus 2019	Ikatan Komite Audit Indonesia
		Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VII tahun 2019	28 - 29 November 2019	LSP Manajemen Risiko
		Sertifikasi CRGP (Certified Risk Governance Profesional)	19 - 21 November 2019	RAP / Risk Advisory Performance
Syaiful	Anggota Komite Audit	PSAK 71, PSAK 72, PSAK 73	25 - 26 Juli 2019	Institute of Audit Committee
		Workshop CACP Certification in Audit Committee Practices	6 - 8 Agustus 2019	Ikatan Komite Audit Indonesia
Suka Edi Prasetyo	Komite Audit	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VII tahun 2019	28 s.d 29 November 2019 - Gumaya Tower Semarang	LSP Manajemen Risiko

Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Risiko Usaha dan GCG PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
Riko Hendrawan	Anggota Komite Risiko Usaha dan GCG	PSAK 71, PSAK 72, PSAK 73	25 - 26 Juli 2019	Institute of Audit Committee
		Workshop CACP Certification in Audit Committee Practices	6 - 8 Agustus 2019	Ikatan Komite Audit Indonesia
		Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VII tahun 2019	28 - 29 November 2019	LSP Manajemen Risiko



## Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Risiko Usaha dan GCG PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
Riko Hendrawan	Anggota Komite Risiko Usaha dan GCG	Certified Risk Management Profesional	21 – 26 Oktober 2019	RAP / Risk Advisory Performance
		Sertifikasi CRGP (Certified Risk Governance Profesional)	19 - 21 November 2019	RAP / Risk Advisory Performance
Ganesha Dian Farisi	Anggota Komite Risiko Usaha dan GCG	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VII tahun 2019	28 - 29 November 2019	LSP Manajemen Risiko

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN, INTERNAL AUDIT, DAN MANAJEMEN RISIKO

Guna mewujudkan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG), serta sejalan dengan perkembangan risiko tata kelola saat ini, maka Angkasa Pura I mendorong fungsi sekretaris perusahaan, internal audit, dan manajemen risiko untuk terus memperbarui pengetahuan, kemampuan dan keahliannya. Untuk itu, pada tahun 2019, Angkasa Pura I mendorong Sekretaris Perusahaan, Internal Audit, dan Manajemen Risiko untuk mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.

Sebanyak dua kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan telah diikuti sepanjang tahun pelaporan. Tema kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti antara lain mengenai laporan tahunan dan Keterbukaan informasi publik.

Secara lebih rinci, program pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti Sekretaris Perusahaan, Internal Audit, dan Manajemen Risiko ditampilkan berikut ini.

## Pendidikan dan/atau Pelatihan Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Nama	Pelatihan	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
• Dwitra Sukma Wardhana	<i>Workshop</i> Annual Report Berbasis Kriteria Annual Report Award 2018	Cara menyusun Annual Report berdasarkan kriteria Annual Report Award	Jakarta, 22-23 Mei 2019	Komite Nasional Kebijakan Governance
• Nurul Fatkhiyah				
• Awaluddin Gede Eka Sandi Asmadi	<i>Workshop</i> Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan pemahaman mengenai Keterbukaan Informasi Publik	Bogor, 2-3 Mei 2019	PT Angkasa Pura I (Persero)

## Pendidikan dan/atau Pelatihan Internal Audit PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Nama	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yaka Sulistya W</li> <li>• Karel Rianto R</li> <li>• Tri Suliati</li> <li>• I Made Adi S</li> </ul>	Certified Practitioner Of Internal Audit I	11 – 22 Maret 2019	YPIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restu Suryaningsih</li> <li>• Titik Budi U</li> <li>• Israwadi</li> <li>• Junius F Walenta</li> <li>• Jarot Handoko</li> <li>• Insan Kamil</li> <li>• Didi Suliyantono</li> </ul>	Certified Practitioner Of Internal Audit II	13 – 24 Mei 2019	YPIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Israwadi</li> <li>• Jarot Handoko</li> <li>• Junius F Walenta</li> </ul>	National Conference IIA Solo	24 – 25 Juni 2019	The Insitute of Internal Auditors
Israwadi	Workshop Audit Internal - Standar Audit Dan Kode Etik Profesi	4 – 5 Juli 2019	YPIA
Israwadi	National Anti Fraud Conference Bali	9 – 11 Juli 2019	Association Of Certified Fraud Examiners (ACFE)
Esti Dewi F	Workshop Integrating Grc Governance Risk And Compliance	5 – 6 Agustus 2019	Asia Anti Fraud
Esti Dewi F	Diklat Audit Intern TK Lanjutan	16 – 28 September 2019	YPIA
Titis Erawati	Diklat Audit TK Dasar	18 – 2 Maret 2019	YPIA
Esti Dewi F		17 – 29 Juni 2019	
Agni Indradi		28 Oktober – 9 November 2019	
Israwadi	Workshop Kerugian Negara dalam BUMN dan BUMN : Risiko Investasi Atau Korupsi	7 – 8 November 2019	Asia Anti Fraud
Israwadi	International Workshop Best Practices In Implementing Effective Governance	24 – 28 November 2019	(Perhimpunan Auditor Internal Indonesia)
Junius F Walenta	Diklat Audit Forensik PPAK TK Menengah	25 - 26 Juli 2019	Institute of Audit Committee
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herriyanto</li> <li>• Osim</li> <li>• Insan Kamil</li> <li>• Milda</li> <li>• I Made Adi S</li> </ul>	Seminar Nasional Internal Audit	24 – 25 April 2019	YPIA

## Pendidikan dan/atau Pelatihan Unit Compliance and Risk Management PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Nama	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
I Wayan Sutawijaya, dkk	Sertifikasi Certified Risk Professional	Bogor, 20 - 21 Agustus 2019	Indonesia Risk and Business Advisory
Widya Wiedagdo, dkk	Pelatihan Manajemen Risiko dan Sertifikasi Certified Risk Professional (CRP) Tahun 2019	Bogor, 26 - 29 Agustus 2019	Indonesia Risk and Business Advisory

## REALISASI BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Dari sisi keuangan, realisasi biaya pelatihan pengembangan kompetensi manajemen dan karyawan tahun 2019 meningkat sebesar 3,98% dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp 40,68 miliar menjadi Rp42,3 miliar. Kenaikan tersebut mencerminkan komitmen Angkasa Pura I untuk senantiasa meningkatkan nilai tambah bagi para manajemen dan karyawan.

Besaran biaya pendidikan dan/atau pelatihan secara total sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut.

## Biaya Pengembangan Kompetensi PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Uraian	Peningkatan		2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp
	Rp	%			
Biaya Pendidikan dan/atau Pelatihan	1.689.612.364	3,98	42.371.568.292	40.681.955.928	39.008.149.267

## EVALUASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Angkasa Pura I memiliki mekanisme untuk mengukur efektivitas sistem pelatihan pengembangan kompetensi. Hal tersebut dilakukan dengan mengevaluasi peserta pelatihan, instruktur, modul pelatihan, metode pelatihan, fasilitas, dan penyelenggara pelatihan.

Evaluasi penyelenggaraan pelatihan dilakukan melalui pengisian kuesioner yang diberikan kepada peserta dengan menggunakan pendekatan skala *likert*. Adapun komponen dan unsur yang menjadi penilaian adalah sebagai berikut:

**A INSTRUKTUR**

1. Kesesuaian kompetensi Instruktur dengan materi yang disampaikan
2. Kemampuan menjelaskan dalam penyampaian materi
3. Kemampuan dalam menciptakan suasana aktif dan komunikatif
4. Kemampuan dalam menjawab pertanyaan peserta
5. Kejelasan suara dan intonasi dalam penyampaian materi

**B MODUL**

1. Materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan
2. Materi pelatihan mudah dipahami dan menarik bagi peserta
3. Materi pelatihan disusun secara sistematis
4. Materi pelatihan dapat diterapkan dan mendukung pencapaian kinerja
5. Materi pelatihan yang diberikan telah disesuaikan dengan kondisi terkini

**C INSTRUKTUR**

1. Metode pelatihan sesuai dengan materi
2. Terdapat simulasi pemecahan masalah
3. Evaluasi kemampuan dan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah *training*

**D FASILITAS**

1. Kenyamanan dan kebersihan ruang pelatihan
2. Fasilitas pendukung kelancaran kegiatan pelatihan seperti alat tulis, *block note*, materi *hard copy* dan lainnya
3. Fasilitas alat bantu kegiatan pelatihan seperti laptop, proyektor, *sound system*, dan lainnya
4. Ruang penunjang seperti ruang ibadah dan toilet
5. Penataan ruangan dan peralatan
6. Kenyamanan dan kebersihan *dormitory*
7. Makan dan makanan ringan yang disajikan
8. Pelayanan *laundry*
9. Pelayanan petugas *front office*, pramusaji, PIC

**E PENYELENGGARA**

1. Program pelatihan sesuai dengan visi dan misi perusahaan
2. Waktu pelatihan yang disediakan memadai
3. Peserta merasakan manfaat pelatihan
4. Reputasi penyelenggara/perusahaan (untuk *Public Training*)

Pada tahun 2019, indeks kepuasan peserta dari hasil rekap kuesioner evaluasi pelaksanaan pelatihan karyawan Angkasa Pura I sepanjang tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

Unsur Penilaian	Indeks Kepuasan	Skala Likert	Kategori
Instruktur	88,56 %	4,43	Sangat Puas
Modul	88,29 %	4,41	Sangat Puas
Metode Pelatihan	88,44 %	4,42	Sangat Puas
Fasilitas	88,09 %	4,40	Sangat Puas
Penyelenggara	89,34 %	4,43	Sangat Puas

Secara umum, indeks kepuasan tertinggi dicapai dalam hal penyelenggara, sedangkan yang terendah yaitu pada aspek fasilitas.

Untuk itu, Angkasa Pura I akan melakukan *review* terhadap hasil evaluasi setiap pelatihan yang diselenggarakan dan segera melakukan perbaikan atas masukan yang telah disampaikan oleh para peserta pelatihan.

## Akses Informasi dan Informasi di *Website* Perusahaan

Para pemangku kepentingan dapat mengakses informasi mengenai Angkasa Pura I melalui *website* atau laman perusahaan, yakni [www.ap1.co.id](http://www.ap1.co.id), yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saat memasuki halaman muka, pengunjung dapat menemukan beragam berita terkini mengenai peristiwa dan operasional bandara, termasuk juga informasi mengenai pertemuan-pertemuan dengan *stakeholder*. Para pihak juga dapat menemukan berbagai berita menarik mengenai Angkasa Pura I yang disajikan dalam majalah “Angkasa Pura Magazine”, dengan mengunduh dari bagian “Majalah” pada laman tersebut.

Lebih jauh lagi, *website* Angkasa Pura I menyajikan informasi mengenai pemegang saham, isi Kode Etik, informasi mengenai RUPS, struktur grup perusahaan, analisis kinerja keuangan, laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir, profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta Piagam/*Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal. Baik pada *website* berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris, terdapat akses informasi Laporan Tahunan yang ditujukan bagi mereka yang ingin mengetahui secara lengkap kinerja tahunan Angkasa Pura I.

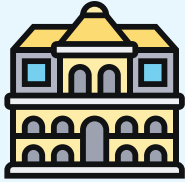
*Website* tersebut juga memuat fasilitas kontak perusahaan sehingga memudahkan para pihak yang ingin berhubungan langsung dengan Angkasa Pura I.

Selain *website* korporat, setiap bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura I telah memiliki laman sendiri. Informasi yang tersaji di dalam *website* masing-masing bandara mencakup informasi jadwal kedatangan dan keberangkatan untuk seluruh maskapai baik domestik maupun internasional, informasi mengenai denah lokasi tempat layanan bagi pengguna jasa bandara seperti *money changer*, ATM dan Bank, tempat untuk isi ulang daya baterai gawai, toko bebas bea (*duty free shop*), tempat layanan informasi, serta berita atau pengumuman terbaru mengenai bandara.

Secara berkala, informasi-informasi yang disajikan dalam *website* senantiasa diperbarui, sehingga masyarakat dapat mengetahui perubahan yang terjadi jika sewaktu-waktu mengadakan perjalanan melalui bandara yang dikelola Angkasa Pura I.

# Nama dan Alamat Kantor Pusat, Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Yayasan, dan Kantor Cabang

## KANTOR PUSAT



Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B 12 Kav. 2  
Jakarta, 10610  
Telepon : 62-21 6541961  
Faksimili : 62-21 6541513, 6541514  
*E-mail* : [humas@ap1.co.id](mailto:humas@ap1.co.id)



## ENTITAS ANAK

### PT Angkasa Pura Hotel

Gedung Sainath Tower Lt. 10  
Jl. Selangit Blok B – 9 No. 7  
Gunung Sahari Selatan, Kemayoran  
Jakarta Pusat, 10610  
Indonesia  
Tel: (+62) (21) 26051829  
Fax: (+62) (21) 26051830  
*E-mail*: [info@aph.co.id](mailto:info@aph.co.id)  
<https://aph.co.id/>

### PT Angkasa Pura Properti

Gedung Sainath Tower Lt. 10  
Jl. Selangit Blok B – 9 No. 7  
Gunung Sahari Selatan, Kemayoran  
Jakarta Pusat, 10610  
Indonesia  
Tel: (+62) (21) 26051919  
Fax: (+62) (21) 26051920  
*E-mail*: [humas@aproperti.co.id](mailto:humas@aproperti.co.id)  
<https://www.angkasapuraproperti.co.id/>

### PT Angkasa Pura Suport

Gedung Sainath Tower Lt. 11  
Jl. Selangit Blok B – 9 No. 7  
Gunung Sahari Selatan,  
Kemayoran  
Jakarta Pusat, 10610  
Indonesia  
Tel: (+62) (21) 26051930  
Fax: (+62) (21) 26051931  
<https://apsupports.com/>

### PT Angkasa Pura Logistik

Gedung Datascrip Lt. 5 & 6  
Jl. Selaparang Blok B.15 Kav.9  
Gunung Sahari Selatan,  
Kemayoran  
Jakarta Pusat, 10610  
Indonesia  
Tel: (+62) (21) 65866491  
*E-mail*: [admin@angkasapuralogistik.com](mailto:admin@angkasapuralogistik.com)  
<http://www.aplog.co/>

### PT Angkasa Pura Retail

Grha Angkasa Pura I Lt.5  
Kota Baru Bandar Kemayoran Blok  
B-12 Kav.2  
Gunung Sahari Selatan, kemayoran  
Jakarta Pusat, 10610  
Indonesia  
Tel: (+62) (21) 654 1961 Ext.2256  
Fax: (+62) (21) 654 1513  
<http://angkasapuraretail.com/>





## ENTITAS ASOSIASI

### PT Gapura Angkasa

Gd. Dapenra Lt. 1,2 & 3  
Jl. Angkasa, Blok B – 12, Kav. 8  
Gunung Sahari Selatan, kemayoran  
Jakarta Pusat 10610  
Indonesia  
Tel: (+62) (21) 6545410  
Fax: -  
*E-mail:* marketing@gapura.co.id

### PT Jasa Marga Bali Tol

Kantor Operasional:  
Jalan Raya Pelabuhan Benoa No. 15  
Pasanggaran, Denpasar, Bali  
Tel: (+62) (361) 725326  
Fax: (+62) (361) 725326  
*E-mail:* jasmargabali@perusahaan.com  
www.jasamarga@perusahaan.com



## YAYASAN

### Yayasan Dana Pensiun Angkasa Pura I (Dapenra)

Gedung Dapenra Lt. VI Blok B 12 Kavling No. 8  
Gunung Sahari Selatan, Kemayoran  
Jakarta Pusat, 10610  
Tel: (+62) (21) 65867867  
Fax: (+62) (21) 65867868  
*E-mail:* info@dapenra.co.id  
<https://www.dapenra.co.id/>

### Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura (Yakkap)

Gedung Dapenra Lt. III Blok B 12 Kavling No. 8  
Gunung Sahari Selatan, Kemayoran  
Jakarta Pusat, 10610  
Tel: (+62) (21) 6546642  
[www.yakkap.co.id](http://www.yakkap.co.id) [www.yakkap.or.id](http://www.yakkap.or.id)



## KANTOR CABANG

### Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali

Gedung Wisti Sabha Lt. III  
Jl. Raya Gusti Ngurah Rai  
Tuban, Kuta, Badung, Bali 80362  
Indonesia  
Tel: (+62) (361) 9351011  
Fax: (+62) (361) 9351032  
*E-mail:* humas@ngurahrai-airport.co.id  
<https://bali-airport.com/id>

### Bandar Udara Internasional Juanda - Surabaya

Jl. Ir. Haji Juanda  
Sedati, Sidoarjo  
Surabaya 61253  
Indonesia  
Tel:  
T1 (+62) (31) 2986200  
T2 (+62) (31) 2986700  
Fax: (031) 8667506  
*E-mail:* sub@angkasapura1.co.id  
<https://juanda-airport.com/id>



## KANTOR CABANG

### Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin - Makassar

Jl. Raya Airport No.1  
Makassar, Maros  
Sulawesi Selatan 90552  
Indonesia  
Tel: (+62) (411) 553183  
Fax: (+62) (411) 553183  
*E-mail:* [humas.upg@angkasapura1.co.id](mailto:humas.upg@angkasapura1.co.id)  
<https://hasanuddin-airport.co.id/id>

### Bandar Udara Internasional El Tari - Kupang

Jl. Adi Sucipto Terminal B, Kupang  
Nusa Tenggara Timur, 85361  
Indonesia  
Tel: (+62) (380) 881668  
Fax: (+62) (380) 881263  
*E-mail:* [humas@kupang-airport.com](mailto:humas@kupang-airport.com)  
<https://kupang-airport.com/id>

### Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo - Surakarta

(Jl. Bandara Adi Sumarmo )  
Jl. Cendrawasih, Ngemplak  
Boyolali, Surakarta  
Jawa Tengah, 57375  
Indonesia  
Tel: (0271) 780400  
Fax: (0271) 780715  
*E-mail:* [humas@adisumarmo-airport.com](mailto:humas@adisumarmo-airport.com)  
<https://adisumarmo-airport.com/id>

### Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani - Semarang

Jl. Puad Ahmad Yani  
Tambakharjo, Semarang  
Jawa Tengah, 50145  
Indonesia  
Tel: (+62) (24) 7607596  
Fax: (+62) (24) 7603506  
*E-mail:* [srg@angkasapura1.co.id](mailto:srg@angkasapura1.co.id)  
<https://ahmadyani-airport.com/id>

### Bandar Udara Internasional Pattimura - Ambon

Jl. Dr. Leimena – Laha, Ambon  
Maluku, 97236  
Indonesia  
Tel: (+62) (911) 323770, 323771, 323772  
Fax: (+62) (911) 323773  
*E-mail:* [amq@angkasapura1.co.id](mailto:amq@angkasapura1.co.id)  
<https://pattimura-airport.co.id/id>

### Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo - Biak

Jl. M Yamin, Biak Kota  
Biak Numfor, Biak  
Papua, 98111  
Indonesia  
Tel: (0981) 22555  
Fax: (0981) 22106  
*E-mail:* [bik@angkasapura1.co.id](mailto:bik@angkasapura1.co.id)  
<https://franskaisiepo-airport.co.id/id>



## KANTOR CABANG

### Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggán - Balikpapan

Jl. Marsma R. Iswahyudi  
Sepinggán, Balikpapan  
Kalimantan Timur, 76115  
Indonesia  
Tel: (+62) (542) 766886  
Fax: (+62) (542) 766832  
*E-mail:* [humas.bpn@angkasapura1.co.id](mailto:humas.bpn@angkasapura1.co.id)  
<https://sepinggan-airport.com/id>

### Bandar Udara Internasional Lombok - Lombok Tengah

Jl. By Pass Bil Praya  
Tanak Awu, Pujut, Lombok tengah  
Nusa Tenggara Barat, 83573  
Indonesia  
Tel: (+62) (370) 6157000  
Fax: (+62) (370) 6157010  
*E-mail:* [humas.lombok@angkasapura1.co.id](mailto:humas.lombok@angkasapura1.co.id)  
<https://lombok-airport.co.id/id>

### Bandar Udara Internasional Adisutjipto - Yogyakarta

Jl. Raya Solo KM. 9, Maguwoharjo  
Depok, Sleman  
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55282  
Indonesia  
Tel: (+62) (274) 484261  
Fax: (+62) (274) 488155  
*E-mail:* [humas@adisutjipto-airport.co.id](mailto:humas@adisutjipto-airport.co.id)  
<https://adisutjipto-airport.co.id/id>

### Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi - Manado

Jl. A.A. Maramis,  
Mapanget, Manado  
Sulawesi Utara, 95374  
Indonesia  
Tel: (+62) (431) 814320  
Fax: (+62) (431) 811595  
*E-mail:* [humas.MDC@angkasapura1.co.id](mailto:humas.MDC@angkasapura1.co.id)  
<https://samratulangi-airport.com/id>

### Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor - Banjarmasin

Jl. Angkasa Landasan Ulin Utara  
Landasan Ulin, Banjar Baru  
Kalimantan Selatan, 70713  
Indonesia  
Tel: (+62) 811504640  
Fax: (+62) (511) 4705251  
*E-mail:* [humasbdj@yahoo.co.id](mailto:humasbdj@yahoo.co.id)  
<https://syamsudinnoor-airport.co.id/id>

### Bandar Udara Internasional Yogyakarta - Kulon Progo

Jalan Raya Wates Km. 42 Kulon Progo, DIY  
Tel: (0274) 4606000  
Fax: (0274) 4606060  
*E-mail:* [humas.jog@ap1.co.id](mailto:humas.jog@ap1.co.id)





Ruang Ibadah  
Prayer Room

Area Bermain  
Kid Zone

Area Bermain  
Kid Zone





# Analisis dan Pembahasan Manajemen

PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai **pelopor perusahaan bidang kebandarudaraan komersial** di Indonesia saat ini mengelola tak kurang dari **15 bandara, 4 (empat) kantor proyek, dan 5 (lima) anak perusahaan.**

# Tinjauan Makro dan Industri



## ANALISIS POLITIK DAN EKONOMI

Tahun 2019 ditandai dengan meredanya perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok. Kondisi tersebut memberikan harapan akan perekonomian global yang lebih baik ke depannya. Di Eropa, berbagai permasalahan tentang Brexit secara bertahap berjalan dengan semestinya. Di dalam negeri, tahun 2019 diwarnai oleh pemilihan umum dan pergantian kabinet yang berlangsung dengan aman dan terkendali.

Dari sisi ekonomi, nilai tukar mata uang Rupiah terhadap USD relatif stabil pada tahun 2019, dengan kurs transaksi Bank Indonesia berkisar antara Rp14.537 hingga Rp13.970 per USD

(sumber: bi.go.id). Tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia juga relatif stabil dengan kisaran antara 5-6% pada tahun 2019. Situasi politik dan ekonomi secara umum memberikan sinyal yang positif bagi industri penerbangan di Indonesia.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 cenderung melambat. Indonesia tercatat memiliki pertumbuhan sebesar 5,02%, lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 5,17%. Hal ini tentunya menjadi catatan bagi Angkasa Pura I dalam mengambil kebijakan strategis ke depan.

## ANALISIS INDUSTRI

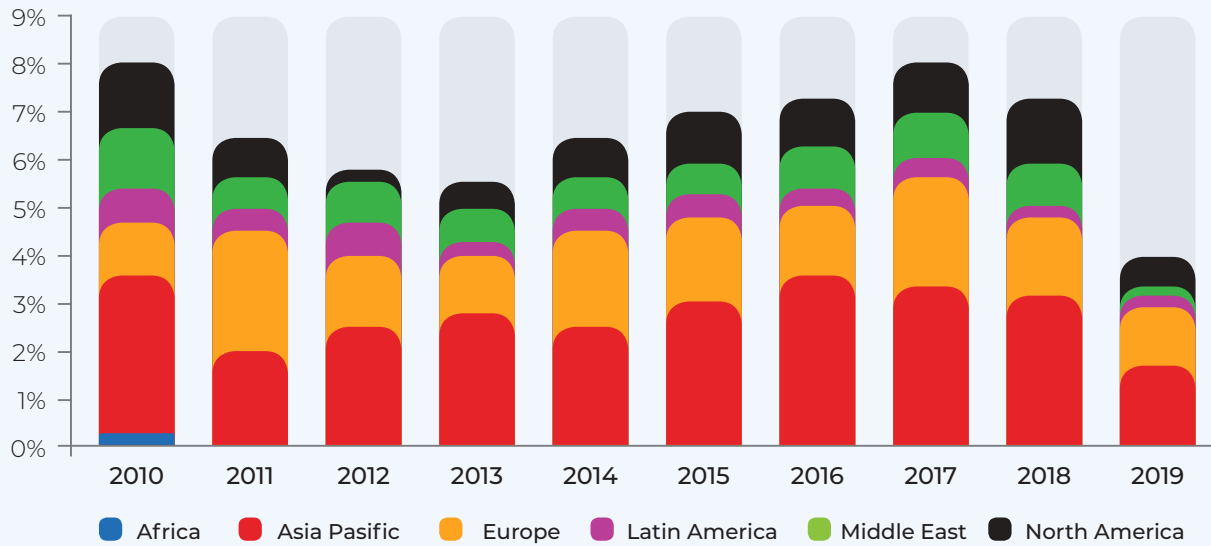
### Kondisi Industri Penerbangan Global

Di tahun 2019, International Air Transport Association (IATA) mencatat perlambatan pertumbuhan dari lalu lintas penumpang maskapai global. Hasil analisis untuk keseluruhan tahun 2019 menunjukkan adanya perlambatan signifikan dibandingkan dengan angka pertumbuhan 2018 sebesar +7,3% yang diukur dalam *revenue passenger kilometres* (RPK).

Seluruh wilayah berkontribusi terhadap perlambatan pertumbuhan industri, sebagai hasilnya angka RPK regional tidak berubah secara luas dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Maskapai berbasis Asia Pasifik dan Eropa sebagai wilayah dengan pangsa RPK terbesar merupakan pendorong utama dari angka industri keseluruhan dengan kontribusi terhadap pertumbuhan yang menurun sebesar 15 ppts dan 0,9 ppts di tahun 2019.



## Kontribusi terhadap pertumbuhan RPK tahunan (wilayah perusahaan penerbangan terdaftar)



Di Asia-Pasifik, lalu lintas tahunan meningkat sebesar 4,5% dimana terjadi perlambatan signifikan dibandingkan dengan data pertumbuhan tahun 2018 sebesar 8,5%. IATA mencatat bahwa hal ini mencerminkan dampak perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok serta melemahnya aktivitas ekonomi. Sementara, maskapai Eropa mengalami kenaikan lalu lintas sebesar 4,4% yang merupakan penurunan dari pertumbuhan tahun 2018 sebesar 7,5%. Hal ini dilatarbelakangi juga oleh aktivitas ekonomi yang melambat, menurunnya *business confidence*, perselisihan industri serta ketidakpastian dari Brexit.

Secara umum, industri penerbangan mempertahankan pertumbuhan stabil pada tahun 2019 meskipun dihadapkan dengan sejumlah tantangan seperti pertumbuhan ekonomi global yang lemah, aktivitas perdagangan global yang lemah, serta ketegangan politik dan geopolitik. Berdasarkan data lanjutan IATA, lalu lintas penumpang internasional naik +4,1%, turun dari pertumbuhan tahunan sebesar +7,1% pada tahun sebelumnya. Kapasitas bertambah sebesar +3% serta *load factor* meningkat sebesar +0,8% menjadi 82%.

### Kondisi Industri Penerbangan Indonesia

Industri penerbangan Indonesia telah mencatat pertumbuhan yang kuat yang ditandai dengan peningkatan jumlah penumpang, penambahan armada, dan peningkatan penerbangan. Sektor penerbangan menawarkan peluang investasi besar mengingat kondisi geografis negara yang unik ditambah dengan peningkatan kelas menengah dan industri pariwisata domestik dan internasional yang menguat.

Dalam periode 2015–2019, Indonesia hendak meningkatkan jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional menjadi 162 juta penumpang per tahun dengan membangun 15 bandara baru, serta pengembangan dan rehabilitasi bandara eksisting di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Selain itu, telah dilakukan juga proyeksi pengembangan 9 bandara yang difokuskan untuk pelayanan kargo.

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan bandara dilakukan melalui pembangunan dan pengembangan bandara difokuskan terutama pada ibukota provinsi sebagai pusat kegiatan

nasional juga pada pusat kegiatan wilayah dan wilayah yang mempunyai potensi ekonomi dan pariwisata.

Berdasarkan Laporan *Annual World Airport Traffic Forecast* Tahun 2018-2040 yang diterbitkan oleh

Airports Council International (ACI), regional Asia-Pasifik diprediksi akan berkontribusi sebesar 42,8% terhadap pertumbuhan pesawat di dunia. Indonesia diprediksi akan menduduki peringkat ke 7 (tujuh) sebagai negara dengan pertumbuhan penerbangan tercepat di dunia.

## PERKEMBANGAN INDUSTRI KEBANDARUDARAAN DI WILAYAH PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

Secara keseluruhan, di tahun 2019, pergerakan lalu lintas angkutan udara untuk jumlah pesawat, penumpang, dan kargo jika dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami pertumbuhan negatif. Terdapat penurunan lalu lintas angkutan udara antara 6% hingga 15% pada tahun 2019.

Pergerakan lalu lintas pesawat dan penumpang tercatat berada pada kondisi yang terendah dalam tiga tahun terakhir.

Berikut ini terlampir pergerakan lalu lintas angkutan udara dalam tiga tahun terakhir.

Pergerakan Lalu Lintas Angkutan Udara Tiga Tahun Terakhir

Uraian	Unit	Pertumbuhan 2019 (%)	2019	2018	2017
Pesawat	MV	(14,66%)	707.202	828.672	792.387
Penumpang	Pax	(15,64%)	81.532.700	96.652.313	89.751.328
Kargo	Kg	(6,69%)	427.135.421	457.749.380	403.775.511

### PERGERAKAN PESAWAT

Pada tahun 2019, jumlah pergerakan pesawat domestik tercatat mengalami penurunan sebesar 16,76% dari tahun 2018, dari 684.960 pesawat menjadi 570.734 pesawat. Di sisi lain, jumlah pergerakan pesawat internasional terealisasi sebesar 101.577 pesawat, sedikit naik sebesar 0,83% dari tahun 2018 yang tercatat sebesar 100.703 pesawat.

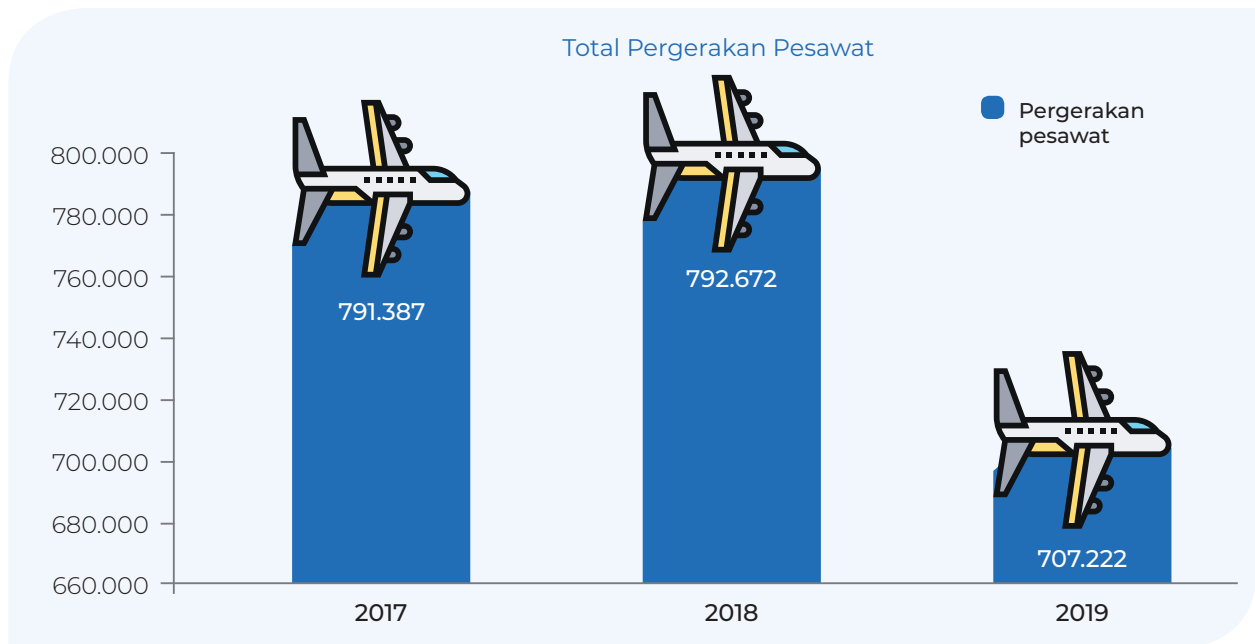
Selanjutnya, pesawat lokal/militer mengalami pertumbuhan negatif dengan realisasi

sebesar 707.222 pergerakan pesawat, yang jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 43.009 pergerakan pesawat mengalami penurunan sebesar 18,83%.

Secara agregat, total pergerakan pesawat menurun sebesar 10,8%. Kondisi ini dapat menggambarkan dinamika industri yang mempengaruhi kinerja Angkasa Pura I. Berikut ini tabel yang menyajikan data pergerakan pesawat dalam tiga tahun terakhir:

Pergerakan Pesawat Domestik, Internasional dan Lokal/Militer di Indonesia Tahun 2019

Keterangan	Pertumbuhan 2019 (%)	2019	2018	2017
Pergerakan pesawat domestik	(16,67%)	570.734	684.960	647.293
Pergerakan pesawat internasional	0,83%	101.577	100.703	89.120
Pergerakan pesawat lokal/militer	(18,83%)	34.911	43.009	54.974
Total	(10,8%)	707.222	792.672	791.387



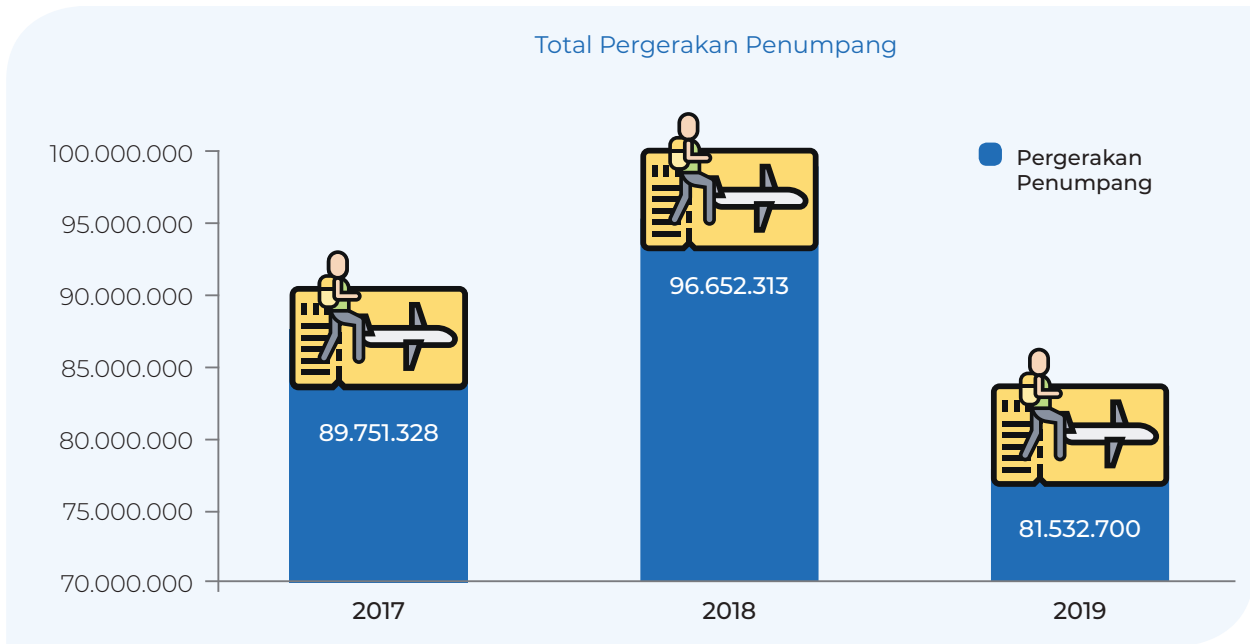
**PERGERAKAN PENUMPANG**

Per 31 Desember 2019, jumlah penumpang domestik tercatat mencapai 59.089.896 pax, yang jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 74.505.616 pax, pencapaian tersebut mengalami penurunan sebesar 24,67%. Di sisi lain, jumlah penumpang internasional mencapai 17.925.091

pax, tumbuh positif sebesar 7,55% dari tahun 2018 yang tercatat sebesar 16.375.076 pax. Jumlah penumpang transit mengalami penurunan sebesar 21,73% menjadi 4.517.713 pax dari 5.771.621 pax tahun sebelumnya. Dengan demikian, secara keseluruhan mencapai 81.532.700 pax/hari.

Pergerakan Penumpang Domestik, Internasional dan Transit di Indonesia dalam Tiga Tahun Terakhir

Keterangan	Pertumbuhan 2019 (%)	2019	2018	2017
Pergerakan penumpang domestik	(24,67%)	59.089.896	74.505.616	69.847.884
Pergerakan penumpang internasional	7,55%	17.925.091	16.375.076	14.497.952
Pergerakan penumpang transit	(21,73%)	4.517.713	5.771.621	5.405.492
<b>Total</b>	<b>(15,64%)</b>	<b>81.532.700</b>	<b>96.652.313</b>	<b>89.751.328</b>



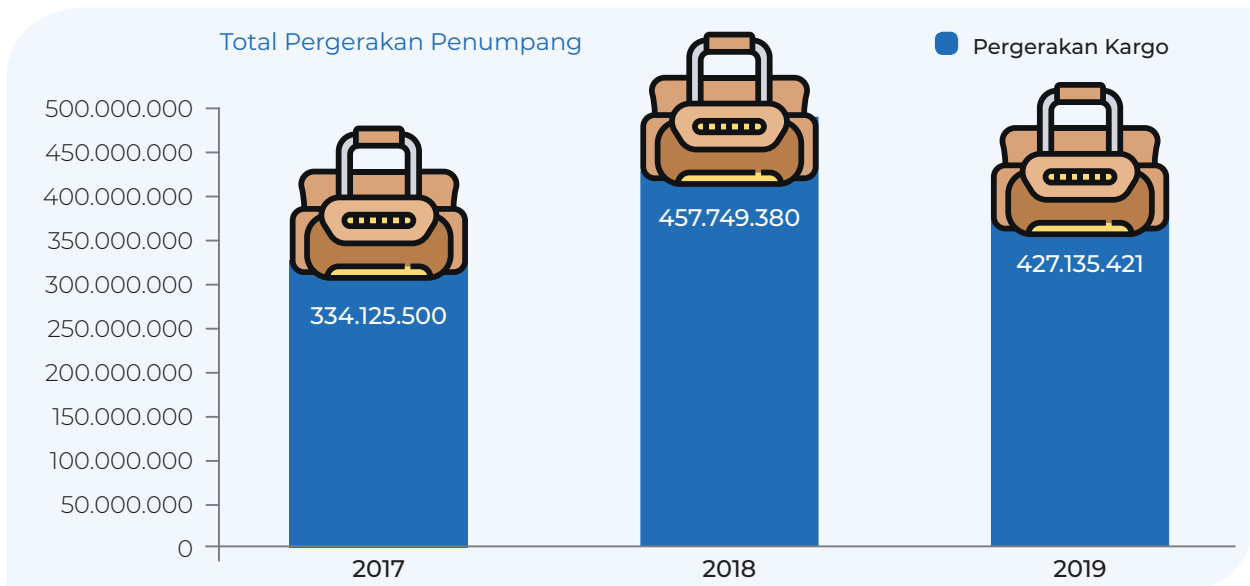
**PERGERAKAN KARGO**

Terdapat penurunan sebesar 21,20% atas pergerakan kargo domestik di tahun 2019 dari 387.272.253 kg tahun sebelumnya menjadi 305.186.561 kg. Di sisi lain, pergerakan kargo internasional terealisasi sebesar 121.948.860 kg, Kinerja total pergerakan kargo

terrealisasi menurun sebesar 6,69% dari 457.749.380 kg tahun 2018 menjadi 427.135.421 kg pada tahun 2019. Berikut ini tabel yang menampilkan data pergerakan kargo domestik dan internasional pada tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pergerakan Kargo Domestik dan Internasional dalam Tiga Tahun Terakhir

Keterangan	Pertumbuhan 2019 (%)	2019	2018	2017
Pergerakan kargo domestik	(21,20%)	305.186.561	387.272.253	264.475.489
Pergerakan kargo internasional	73,03%	121.948.860	70.477.127	69.650,011
Total	(6,69%)	427.135.421	457.749.380	334.125.500



# Tinjauan Kinerja Operasional



Berkantor pusat di Jakarta, PT Angkasa Pura I (Persero) merupakan badan usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa kebandarudaraan. Pada praktiknya jasa yang disediakan berupa jasa aeronautika (kebandarudaraan), nonaeronautika (nonkebandarudaraan), dan pelayanan jasa terkait bandara. Per 31 Desember 2019, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 907 tahun 2014 tentang PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai Badan Usaha Bandar Udara, Angkasa Pura I mengelola 15 (lima belas) bandar udara ditambah satu unit bisnis komersial yang berlokasi di Bali, sebagai berikut:

1. Bandara I Gusti Ngurah Rai (DPS) - Bali
2. Bandara Juanda Surabaya (SUB) - Surabaya
3. Bandara Sultan Hasanuddin (UPG) - Makassar
4. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian (BPN) - Balikpapan
5. Bandara Frans Kaisiepo (BIK) - Biak
6. Bandara Sam Ratulangi (MDC) - Manado
7. Bandara Adisutjipto (JOG) - Yogyakarta
8. Bandara Adi Soemarmo (SOC) - Surakarta
9. Bandara Syamsudin Noor (BDJ) - Banjarmasin

10. Bandara Pattimura (AMQ) - Ambon
11. Bandara Jenderal Ahmad Yani (SRG) - Semarang
12. Bandara Internasional Lombok (LOP) - Lombok Tengah
13. Bandara El Tari (KOE) - Kupang
14. Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) - Kulon Progo
15. Bandara Sentani (DJJ) - Jayapura
16. *Strategic Business Unit* Komersial - Bali

Selain bandara, Angkasa Pura I memiliki 5 (lima) anak perusahaan yang menjalankan usaha pendukung kebandarudaraan, yaitu PT Angkasa Pura Logistik, PT Angkasa Pura Properti, PT Angkasa Pura Suport, PT Angkasa Pura Hotel, dan PT Angkasa Pura Retail. Sejak tahun 2013, Perseroan hanya menyediakan jasa aeronautika di bidang non-Air Traffic Services (non-ATS) dan penerapan konsep *airport city*, yang berorientasi pada proses bisnis dengan titik berat sektor nonaeronautika dan kepuasan pelanggan di bidang jasa nonaeronautika.



## SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI PERSEROAN

### SASARAN STRATEGIS

PT Angkasa Pura I (Persero) sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2019-2023 menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Jumlah trafik penumpang angkutan udara lebih dari 130 juta penumpang;
2. Pendapatan perusahaan mencapai Rp 24 triliun;
3. EBITDA margin melebihi 50%;
4. Skor ASQ bandar udara di atas rata-rata global sesuai dengan kategori jumlah penumpang di masing-masing bandar udara;
5. Akuisisi 7 bandar udara UPT & pengembangan 2 bandar udara *greenfield*.

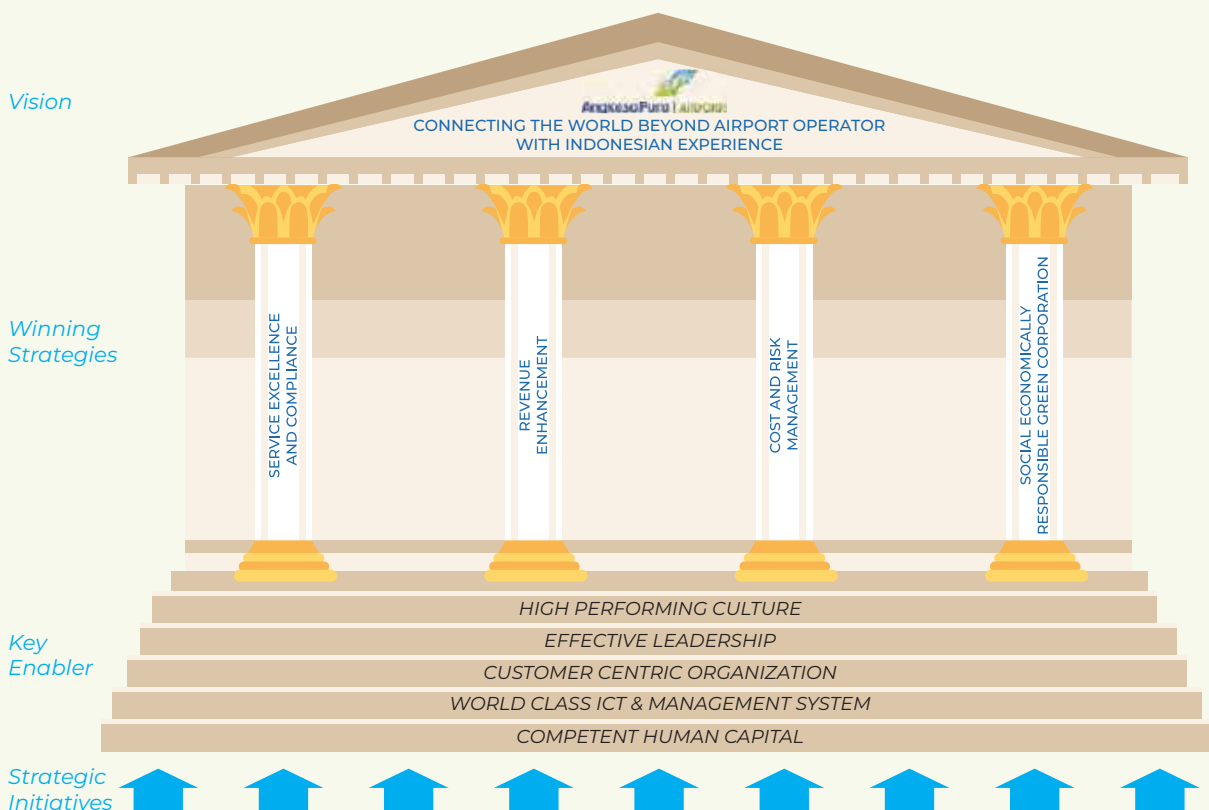
Angkasa Pura I berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas 13 bandara yang dikelola menjadi 140 juta penumpang hingga tahun 2023. Hal tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Angkasa Pura I, melihat kapasitas seluruh bandara yang dikelola saat ini rata-rata mencapai 89 juta

penumpang per tahun. Komitmen tersebut juga tertuang dan mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2019-2023. Di tahun 2019, Angkasa Pura I melayani 81.532.713 juta pergerakan penumpang, lebih rendah dari target 101 juta pergerakan penumpang. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang melayani 96,5 juta pergerakan penumpang pada 13 bandara kelolaan, terjadi penurunan sebesar 15,64% atau sekitar 15 juta pergerakan penumpang.

### STRATEGI PERSEROAN

#### WINNING STRATEGIES

Berikut terlampir 4 (empat) *Winning Strategies* dan 5 (lima) *Key Enablers* yang ditetapkan Perseroan dalam merealisasikan visi “menjadi penghubung dunia yang lebih dari sekadar operator bandar udara dengan keunggulan layanan yang menampilkan keramahan khas Indonesia”.



### **SERVICE EXCELLENCE AND COMPLIANCE**

Saat ini dan ke depannya, Perseroan fokus pada menjadikan Angkasa Pura I sebagai Perseroan yang memberikan layanan secara *excellent* kepada pelanggan, yang diantaranya adalah kepada perusahaan penerbangan, penumpang, dan konsesional. Oleh sebab itu, strategi Perseroan adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan atas regulasi yang berlaku dengan menggunakan strategi *service excellence and compliance*. Inisiatif yang digunakan Perseroan dalam mendukung strategi *service excellence and compliance*, yaitu *service level improvement*, *effective internal Service Level Agreement (SLA)*, dan *airport regulation compliance*.

*Customer Satisfaction Index (CSI)* merupakan tolok ukur yang digunakan Angkasa Pura I untuk mengukur pencapaian sasaran. CSI digunakan dengan melihat/mengacu pada tolok ukur kinerja layanan yang digunakan oleh seluruh pelaku usaha pada *airport industry*, serta memperhatikan aspirasi dari *shareholder* Perseroan.

### **REVENUE ENHANCEMENT**

PT Angkasa Pura I (Persero) mempunyai *revenue enhancement* untuk meningkatkan pendapatan (*revenue*). Strategi tersebut tidak hanya fokus pada besaran kuantitatif pendapatan, namun juga pada komposisi pendapatan. Peningkatan komposisi pendapatan dilakukan melalui pendapatan nonaeronautika, yaitu pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dapat diandalkan dan dapat menjamin keberlangsungan penguatan Perseroan dalam jangka panjang. Inisiatif strategis yang dilakukan Perseroan dalam mendukung strategi *revenue enhancement* terdiri dari *non-aero revenue and profitability maximization*, *subsidiaries profitability maximization*, dan *new profitable business development*.

### **COST AND RISK MANAGEMENT**

Strategi *cost and risk management* merupakan strategi Angkasa Pura I dalam melakukan investasi secara selektif dan *prudent* dengan berfokus pada efisiensi biaya, manajemen risiko,

serta pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan kelas dunia dan tata kelola perusahaan dengan baik dan benar. Inisiatif strategis yang dilakukan Perseroan untuk mendukung strategi *cost and risk management*, antara lain *cost effectiveness and efficiency improvement*, *robust funding strategy*, dan *effective enterprise risk management*.

### **SOCIOECONOMICALLY RESPONSIBLE GREEN CORPORATION**

Angkasa Pura I berinisiatif dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan (*eco-green*) dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekitar. Untuk menerapkan komitmen tersebut, Perseroan menggunakan strategi *socioeconomically responsible green corporation*, dengan inisiatif strategis yang dilakukan berupa penerapan "*eco-airport*", *effective Corporate Social Responsibilities (CSR) program*, dan "*green corporation*".

### **KEY ENABLERS**

Untuk memperkuat *winning strategies*, terdapat 5 (lima) *key enablers* yang dikembangkan oleh Angkasa Pura I, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **HIGH PERFORMING CULTURE**

Dalam membentuk budaya organisasi yang memiliki keunggulan, Angkasa Pura I menerapkan inisiatif strategis yang dilakukan berupa: *high performing culture*, *effective performance management system*, dan *effective performance-based incentive system*.

#### **EFFECTIVE LEADERSHIP**

Perkembangan bisnis yang semakin dinamis, menuntut pengelolaan sumber daya manusia yang dinamis juga. Oleh sebab itu, Angkasa Pura I menggunakan *effective leadership*, dengan inisiatif strategis berupa *leadership effectiveness enhancement* dalam mendorong efektivitas kepemimpinan.

### **CUSTOMER CENTRIC ORGANIZATION**

Angkasa Pura I menerapkan *Customer Centric Organization* dalam mendorong organisasi menjadi berfokus pada pelanggan, dengan inisiatif strategis berupa *business process reengineering, lean and customer centric organization* dan *effective parenting model establishment*.

### **WORLD CLASS ICT AND MANAGEMENT SYSTEM**

Angkasa Pura I menerapkan *world class ICT and management system* guna mewujudkan ICT kelas dunia. Inisiatif yang dilakukan Perseroan yaitu menerapkan *world class management system* (misalnya di *HC Management*), *effective management system, parenting policy development*, dan *holding company system development* seperti misalnya kegiatan pelaporan dan perpajakan.

### **COMPETENT HUMAN CAPITAL**

Dalam mengelola *human capital*, Angkasa Pura I menggunakan strategi *competent human capital*, dengan inisiatif berupa *effective people development program* dan *world class talent management system*.

Berikut adalah strategi Perseroan tahun 2019 yang mengacu pada *Winning Strategies*:

1. Keuangan dan Pasar
  - a. Percepatan proses pinjaman eksternal untuk pembiayaan investasi
  - b. Mengintensifkan penagihan piutang
  - c. Optimalisasi penggunaan dana
  - d. Pertumbuhan pendapatan usaha dan optimalisasi profitabilitas
2. Fokus pada Pelanggan
  - a. Fokus pada peningkatan pelayanan operasional dengan memenuhi standar *level of service*
  - b. Perbaikan fasilitas bandara dan beautifikasi terminal
  - c. Peningkatan pelayanan kepada pelanggan dengan mengimplementasikan AOCC dan *Contact Centre "Bandara172"*
3. Efektifitas Produk dan Proses
  - a. Pengembangan bandara dan *service level improvement*
  - b. Peningkatan *procurement system* dengan pelaksanaan kontrak payung
  - c. Meningkatkan *monitoring* terhadap program investasi
4. Fokus Tenaga Kerja
  - a. Menciptakan *lean and customer centric organization* dengan *job scoring analysis*
  - b. *Effective career management system* dengan pelaksanaan asesmen kompetensi
  - c. Individu seluruh pegawai
  - d. Peningkatan kualitas *Human Capital Information System (HCIS)*
5. Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Masyarakat
  - a. Memastikan terimplementasinya transparansi dalam tata kelola perusahaan
  - b. Pemenuhan pelaksanaan undang-undang/peraturan yang berlaku
  - c. Pemenuhan standar KPKU menjadi acuan pengelolaan operasional perusahaan
  - d. Memastikan tersalurkannya dana kemitraan, meningkatkan kolektabilitas pengembalian pinjaman dana kemitraan dan meningkatkan daya serap penyaluran bantuan program Bina Lingkungan
6. *Agent of Development*
  - a. *Strategic partnership* untuk bandara yang potensial
  - b. Pengelolaan bandara UPT yang potensial untuk dikembangkan secara bisnis.

## FASILITAS ALAT PRODUKSI

Angkasa Pura I memiliki fasilitas alat produksi yang meliputi landasan pacu, *apron*, *aviobridge*, terminal penumpang, gudang kargo, dan tempat parkir kendaraan di seluruh bandara yang dikelola

Perseroan dalam melakukan produksi pelayanan jasa. Berikut dijabarkan beberapa fasilitas produksi:

Data Alat Produksi Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Per 31 Desember Tahun 2019

Uraian	Terminal						
	Runway	Apron	Avio- bridge	Internasional	Domestik	VIP	Kargo
	mxm	Parking stand (m <sup>2</sup> )	(unit)	Luas (m <sup>2</sup> ) dan Kapasitas (Pax/tahun)			
DPS	3,000mx45m	North Apron Area: 82.899 m <sup>2</sup> Cap: 47 PS South Apron Area: 83.020 m <sup>2</sup> Cap: 16 PS	30	126.162 m <sup>2</sup> 16.000.000 mppa	67.884 m <sup>2</sup> 9.000.000 mppa	7,074 m <sup>2</sup>	189,669 m <sup>2</sup> 73,327 ton/thn
SUB	3,000mx45m	Area: 325.318 m <sup>2</sup> Cap: 51 PS Cargo Apron: Area: 47.700 m <sup>2</sup>	25	45.093 m <sup>2</sup> 5.000.000 mppa	62.700 m <sup>2</sup> 6.000.000 mppa	-	11,702 m <sup>2</sup> 116,324 ton/thn
UPG	RW 03L-21 3,100mx45m RW 13-31 2500mx45m	Area: 220.827 m <sup>2</sup> Cap: 43 PS	6	3.815 m <sup>2</sup> 400.000 mppa	47.190 m <sup>2</sup> 7.000.000 mppa	808,42 m <sup>2</sup> 60-100 pax	6,780 m <sup>2</sup> 76,131 ton/thn
BPN	2,500mx45m	Area: 111.800 m <sup>2</sup> Cap: 18 PS	11	7.624 m <sup>2</sup> 600.000 mppa	102.934 m <sup>2</sup> 14.000.000 mppa	2,394 m <sup>2</sup> 100 pax	12,000 m <sup>2</sup> 61,900 ton/thn
JOG	2,200mx45m	Area: 30.060 m <sup>2</sup> Cap: 11 PS	0	5.936 m <sup>2</sup> 600.000 mppa	17.196 m <sup>2</sup> 2.400.000 mppa	NONE	3,545 m <sup>2</sup> 23,752 ton/thn
BDJ	2,500mx45m	Area: 80.412 m <sup>2</sup> Cap: 8 PS	3	9.043 m <sup>2</sup> 1.600.000 mppa		1,049,95 m <sup>2</sup> 150 pax	972 m <sup>2</sup> 22,297 ton/thn
SRG	2,560mx45m	Area: 72.522 m <sup>2</sup> Cap: 12 PS	3	59.406 m <sup>2</sup> 6,900,000 mppa		300 m <sup>2</sup>	2,560 m <sup>2</sup> 16,097 ton/thn
LOP	2,750mx45m	Area: 48.386 m <sup>2</sup> Cap: 10 PS	4	28.750 m <sup>2</sup> 3.400.000 mppa		5.800 m <sup>2</sup> 35 pax	7,517 m <sup>2</sup> 17,216 ton/thn
MDC	2,650mx45m	Area: 98.994 m <sup>2</sup> Cap: 20 PS	4	5.996 m <sup>2</sup> 500.000 mppa	20.560 m <sup>2</sup> 3.000.000 mppa	1,220 m <sup>2</sup>	8,882 m <sup>2</sup> 15,258 ton/thn
SOC	2,600mx45m	Area: 99.423 m <sup>2</sup> Cap: 12 PS	4	8.732 m <sup>2</sup> 230.000 mppa	24.618 m <sup>2</sup> 3.900.000 mppa	-	2,732 m <sup>2</sup> 8,500 ton/thn
AMQ	2,500mx45m	Area: 40.747 m <sup>2</sup> Cap: 10 PS	2	10.270 m <sup>2</sup> 1.200.000 mppa		1,440 m <sup>2</sup> 180 pax	2,836 m <sup>2</sup> 7,971 ton/thn
KOE	2,500mx45m	Area: 40.747 m <sup>2</sup> Cap: 12 PS	0	7,642 m <sup>2</sup> 1.000.000 mppa		NONE	2,300 m <sup>2</sup> 6,954 ton/thn
BIK	3,570mx45m	Area: 35.876 m <sup>2</sup> Cap: 5 PS	0	3,165 m <sup>2</sup> 500,000 mppa		615,05 m <sup>2</sup> 110 pax	855 m <sup>2</sup> 1,319 ton/thn
YIA	2.250mx45m	Area: 80.412 m <sup>2</sup> Cap: 8 PS	10	15.137 m <sup>2</sup> 1.200.000 mppa		-	894 m <sup>2</sup> 21.593 ton/thn

# Aspek Pemasaran

Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 1987 tanggal 19 Mei 1987, Angkasa Pura I diberi wewenang untuk mengelola bandara di Indonesia bagian tengah dan timur sedangkan Angkasa Pura II mengelola bandara di Indonesia bagian barat. Kemudian, bandara lainnya yang tidak dikelola oleh Angkasa Pura I dan II berada di bawah pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan.

Selain itu, aspek harga khususnya pada segmen aeronautika sebagai salah satu komponen penting pemasaran juga diatur oleh regulasi

Pemerintah Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2014, penetapan tarif atas layanan jasa kebandarudaraan yang meliputi PJP4U, PJP2U, *aviobridge*, *counter*, serta PJKP2U perlu mendapatkan rekomendasi dahulu dari Menteri Perhubungan.

Dengan peraturan tersebut, maka konsep pemasaran Angkasa Pura I tidak dapat disamakan dengan strategi pemasaran perusahaan lain pada umumnya. Bagian ini akan membahas aspek pemasaran Angkasa Pura I, yang meliputi strategi pemasaran serta pangsa pasar atas produk dan jasa.

## STRATEGI PEMASARAN

Angkasa Pura I memiliki Direktorat Pemasaran dan Pelayanan yang bertanggung jawab atas kegiatan promosi dan pemasaran, yang menekankan pada kualitas layanan dan *customer experience*, baik untuk layanan aeronautika maupun nonaeronautika.

Sepanjang tahun 2019, strategi pemasaran Angkasa Pura I fokus pada terlaksananya pelayanan berkualitas dan terciptanya *value* bagi pengguna bandar udara, mulai dari akses masuk hingga *boarding*. Angkasa Pura I juga menginformasikan berbagai keunggulan layanan bandar udara, seperti layanan bagi orang berkebutuhan khusus, konsep komersial yang efektif, *fast track* untuk *security* dan imigrasi. Selain itu, Angkasa Pura I juga mengutamakan *client relationship management* dan strategi penguatan *brand value*.

### KEGIATAN PROMOSI

Lebih jauh lagi, Angkasa Pura I melakukan kolaborasi dengan Pemerintah dan pelaku usaha di industri pariwisata untuk memasarkan *attraction*, *ammunities* dan *accessibilities* tujuan

wisata. Meningkatnya wisatawan dalam negeri maupun mancanegara akan berdampak positif bagi Angkasa Pura I pada umumnya. Melalui Direktorat Pemasaran dan Pelayanan, pada tahun 2019 Angkasa Pura I telah melakukan beberapa *event* untuk dapat mendorong pertumbuhan *demand* dan *traffic* di bandar udara yang dikelola oleh Angkasa Pura I, yang meliputi *Collaborative Destination Development (CDD)*, *gathering* bersama regulator dan mitra kerja, dan melakukan *joint marketing* dengan pihak *airlines*, pemerintah provinsi dan daerah, serta *stakeholder* pelaku bisnis pariwisata.

Sepanjang tahun 2019, beberapa kegiatan promosi yang diselenggarakan oleh Angkasa Pura I atau yang melibatkan Angkasa Pura I di dalamnya dapat dilihat pada tabel berikut:



## Kegiatan Promosi PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

No	Kegiatan	Penyelenggara	Lokasi
Nasional			
1	18 September 2019	Yogyakarta	Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas
Internasional			
1	10 – 12 Maret 2019	Cebu, Filipina	<i>Routes Asia 2019</i>
2	21 – 24 September 2019	Adelaide, Australia	<i>World Routes 2019</i>
3	13 – 15 April 2019	Shanghai, China	<i>Cargo Fact 2019</i>

PENAMBAHAN RUTE DAN INSENTIF *LANDING FEE*

Angkasa Pura I dapat memberikan kebijakan insentif *landing fee* yang diberikan kepada *airline* yang membuka rute baru. Kebijakan insentif *landing fee* diharapkan dapat membantu pengembangan rute baru sehingga berdampak positif bagi peningkatan *traffic* penumpang pengguna jasa bandar udara.

Pada tahun 2019, insentif *landing fee* yang diberikan kepada *airline* berupa potongan harga (*discount*) dari total biaya Pelayanan Jasa Pendaratan untuk penerbangan dalam negeri dan luar negeri selama 12 (dua belas) bulan sebesar 100% di 11 (sebelas) bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura I, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pemberian Insentif *Landing Fee* Tahun 2019 oleh PT Angkasa Pura I (Persero)

No	Kegiatan	Penerbangan Dalam Negeri	Penerbangan Luar Negeri
1	SAMS Sepinggan – Balikpapan	100%	100%
2	Juanda – Surabaya	Tidak ada	100%
3	Sultan Hasanuddin – Makassar	100%	100%
4	Sam Ratulangi – Manado	100%	100%
5	Syamsuddin Noor – Banjarmasin	100%	100%
6	Jenderal Ahmad Yani – Semarang	100%	100%
7	Adi Soemarmo – Solo	100%	100%
8	Internasional Lombok - Lombok Tengah	100%	100%
9	Pattimura – Ambon	100%	100%
10	Frans Kaisiepo – Biak	100%	100%
11	El Tari – Kupang	100%	100%

Di samping pemberian insentif untuk rute baru, Angkasa Pura I juga memberikan insentif untuk penambahan frekuensi. Pada tahun 2019, Angkasa Pura I telah membuka rute baru sebanyak 103

(seratus tiga) rute di 8 (delapan) bandara. Adapun detail jumlah per rute sebagai berikut:

Pemberian Insetif kepada Airlines Tahun 2019 oleh PT Angkasa Pura I (Persero)

No	Bandar Udara	Jumlah Rute
1	I Gusti Ngurah Rai – Denpasar	7 Rute Baru
2	Juanda – Surabaya	8 Rute Baru
3	Internasional Lombok - Praya	2 Rute Baru
4	Jenderal Ahmad Yani – Semarang	12 Rute Baru
5	Adi Soemarmo – Solo	2 Rute Baru
6	Sam Ratulangi – Manado	4 Rute Baru
7	Adisutjipto – Yogyakarta	44 Rute Baru
8	SAMS – Balikpapan	24 Rute Baru
Total		103 Rute Baru

Salah satu pembukaan rute yang signifikan adalah pembukaan rute yang dilaksanakan oleh Nam Air. Pada tahun 2019, Transnusa melakukan pembukaan rute dari Bandara SAMS Balikpapan, dan Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang.

Penentuan harga merupakan salah satu aspek yang penting di dalam pemasaran, mengingat bahwa harga merupakan refleksi hasil (*return*) yang diterima Perseroan atas layanan yang telah diberikan kepada pelanggannya. Dalam implementasinya, sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2014, bahwa penetapan tarif atas layanan

jasa kebandarudaraan yang meliputi PJP4U, PJP2U, *aviobridge*, *counter*, serta PJKP2U perlu mendapatkan rekomendasi dahulu dari Menteri Perhubungan Indonesia. Pada tahun 2018, terdapat penyesuaian tarif PJP2U (Pelayanan Jasa Penumpang dan Pesawat Udara), PJP4U (Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara), *counter check-in* dan *aviobridge* untuk penerbangan domestik dan internasional di 13 (tiga belas) bandara Angkasa Pura I.

Berikut adalah penyesuaian tarif yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Angkasa Pura I:

Tarif Pelayanan Jasa Penumpang dan Pesawat Udara (PJP2U) PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

No	Bandar Udara	Terhitung Mulai Tanggal (TMT)	Tarif Baru (Rp)	
			Domestik	Internasional
1	Jenderal Ahmad Yani - Semarang	25 Desember 2019	-	210.000
2	SAMS Sepinggan - Balikpapan		100.000	-

**AIRPORT SERVICE QUALITY**

Dalam rangka mengukur kinerja produk dan layanan bandara, Angkasa Pura I menggunakan metode penilaian *Customer Satisfaction Index* (CSI). Pada tahun 2019, pengukuran CSI telah dilakukan di 13 bandar udara. Hasil survei CSI tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan dibanding tahun 2018.

Selain menggunakan pendekatan CSI, Angkasa Pura I juga ikut serta dalam penilaian *Airport Service Quality* (ASQ) oleh *Airports Council International*

(ACI). Pada tahun 2019 terdapat 10 bandar udara Angkasa Pura I yang dinilai oleh ACI. Hasil penilaian yang meningkat menunjukkan kinerja yang lebih baik dan menandakan peningkatan kualitas pelayanan bandara dibanding tahun sebelumnya.

Rincian dari penilaian CSI dan ASQ dapat dilihat pada Bab *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan* pada Laporan Tahunan ini.

**PANGSA PASAR**

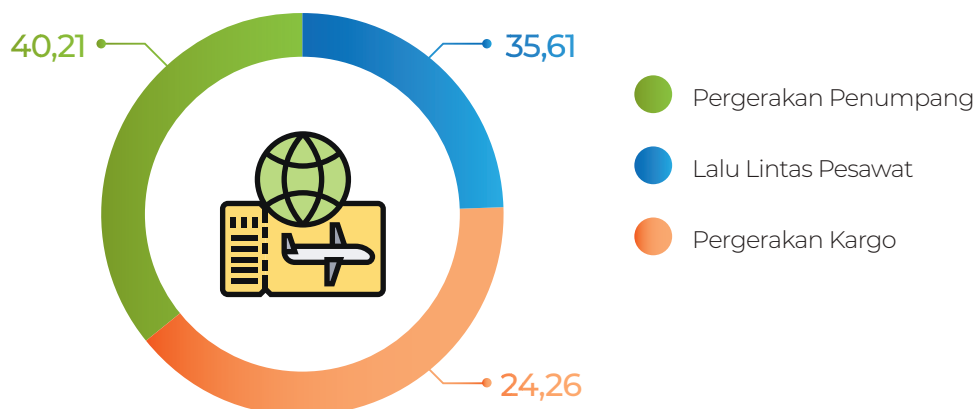
Kondisi pasar industri bandar udara di Indonesia dapat dibagi atas tiga faktor, yaitu pergerakan penumpang, lalu lintas pesawat dan pergerakan kargo. Sepanjang tahun 2019, persentase pasar terbesar yaitu pergerakan penumpang, yang tercatat 40,21%. Kemudian pasar terbesar kedua yaitu lalu

lintas pesawat sebesar 35,61% dan yang terakhir yaitu pergerakan kargo sebesar 26,24%. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pasar pasar pergerakan penumpang, pesawat, dan kargo secara berturut-turut mengalami penurunan sebesar 2,97%, 5,01%, dan 5,86%.

Pasar Industri Bandar Udara di Indonesia dalam Tiga Tahun Terakhir

Uraian	Pertumbuhan 2019 (%)	2019	2018	2017
Berdasarkan Pergerakan Penumpang	(2,97)	40,21	41,44	43,40
Berdasarkan Lalu Lintas Pesawat	(5,01)	35,61	37,49	42,89
Berdasarkan Pergerakan Kargo	(5,86)	24,26	25,77	26,70

Diagram Pangsa Pasar Penerbangan Nasional Tahun 2019 dalam Persentase



Selanjutnya, pangsa pasar Angkasa Pura I jika dibandingkan dengan Angkasa Pura II secara umum menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Pangsa pasar terbesar untuk pergerakan penumpang, lalu lintas pesawat dan pergerakan kargo masih tetap dipegang oleh Angkasa Pura II. Angkasa Pura I memiliki pangsa pasar sebesar 42,36% untuk pergerakan penumpang, 41,27% untuk lalu lintas pesawat, dan 36,00% untuk pergerakan kargo.

Angkasa Pura I untuk pergerakan penumpang tahun 2019 naik 2,17% dari 41,44% menjadi 42,36%. Kemudian, pangsa pasar untuk lalu lintas pesawat naik 9,16% dari 37,49% tahun 2018 menjadi 41,27% pada tahun 2019. Pergerakan kargo tahun 2019 sebesar 36%, naik 28,43% dari 25,77% tahun 2018.

Dibandingkan dengan tahun 2018, pangsa pasar

Pangsa Pasar PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) Tahun 2019 (dalam %)

Uraian	PT Angkasa Pura I (Persero)	PT Angkasa Pura II (Persero)
Tahun 2019		
Berdasarkan Pergerakan Penumpang	42,36	44,09
Berdasarkan Lalu Lintas Pesawat	41,27	43,95
Berdasarkan Pergerakan Kargo	36,00	64,00
Tahun 2018		
Berdasarkan Pergerakan Penumpang	41,44	47,79
Berdasarkan Lalu Lintas Pesawat	37,49	38,90
Berdasarkan Pergerakan Kargo	25,77	52,46
Tahun 2017		
Berdasarkan Pergerakan Penumpang	43,40	50,77
Berdasarkan Lalu Lintas Pesawat	42,89	44,51
Berdasarkan Pergerakan Kargo	26,70	54,02

Diagram Pangsa Pasar PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019 berdasarkan Pergerakan Penumpang dalam Persentase

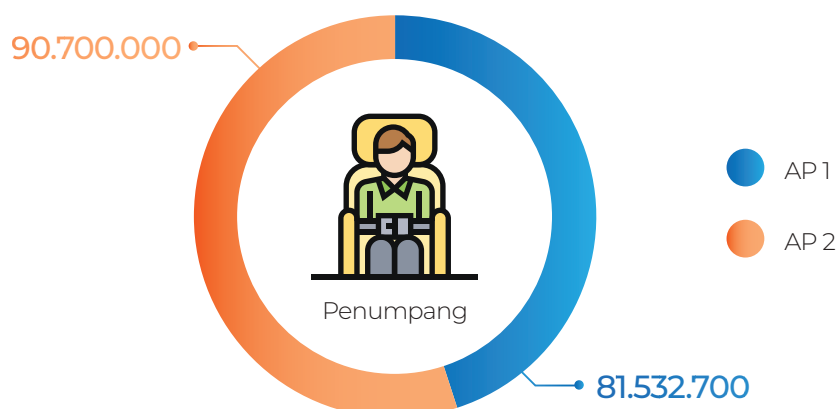


Diagram Pangsa Pasar PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019 berdasarkan Lalu Lintas Pesawat

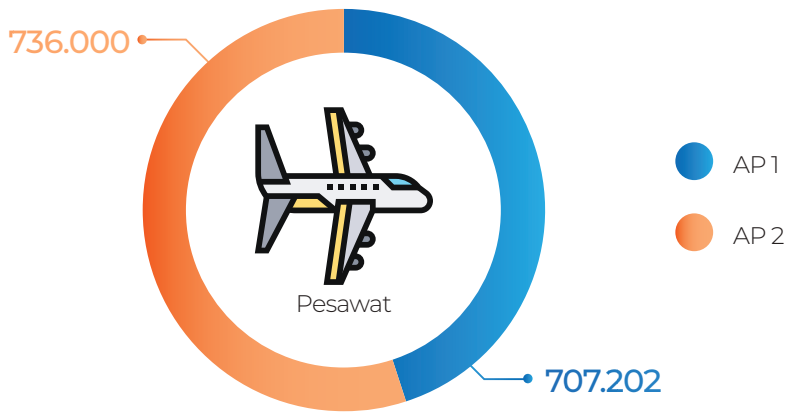
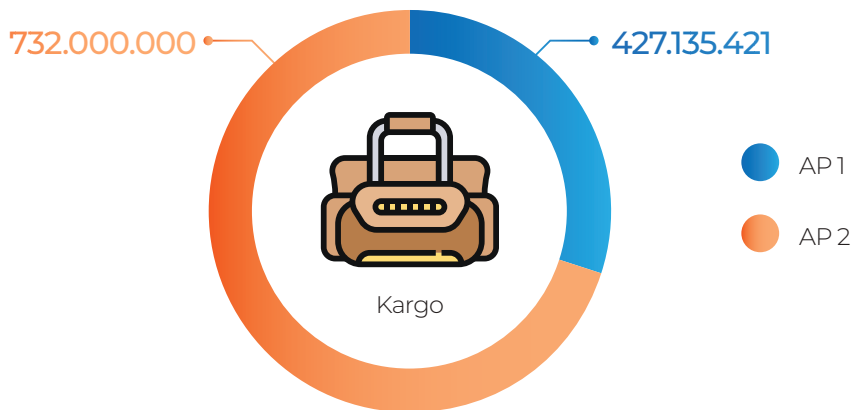


Diagram Pangsa Pasar PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019 berdasarkan Pergerakan Kargo



Angkasa Pura I sedang menjajaki kerja sama pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Kediri. Selain itu Angkasa Pura I juga berencana untuk melakukan studi dan akuisisi pada 7 (tujuh) bandar udara UPT Kementerian Perhubungan, antara lain:

1. Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk
2. Bandar Udara Sentani - Jayapura
3. Bandar Udara Mutiara SIS Al Jufrie - Palu

4. Bandar Udara APT Pranoto - Samarinda
5. Bandar Udara Komodo - Labuan Bajo
6. Bandar Udara Juwata - Tarakan
7. Bandar Udara Domine Eduard Osok - Sorong

Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar Angkasa Pura I, khususnya dalam lima tahun yang akan datang.



## KINERJA PER SEGMENT OPERASI

### JENIS SEGMENT USAHA

Segment usaha Angkasa Pura I terdiri dari jasa aeronautika (kebandarudaraan) dan nonaeronautika (nonkebandarudaraan).

### SEGMENT USAHA JASA AERONAUTIKA

#### PRODUKSI/JASA AERONAUTIKA (KEBANDARUDARAAN)

Segment usaha kebandarudaraan menyediakan pelayanan jasa, yang terdiri dari:

- Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U).

- Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U).
- Extend and advance*.
- Pelayanan jasa garbarata (*aviobridge*).
- Pemakaian *check-in counter*.
- Baggage handling system*.

Dalam tiga tahun terakhir, kinerja pelayanan jasa aeronautika Angkasa Pura I dapat dilihat pada tabel berikut:

Kinerja Pelayanan Jasa Aeronautika PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2017-2019

Uraian	Unit	Pertumbuhan	2019	2018	2017
<b>Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)</b>	Ton	-13%	25.016.634	28.681.347	28.098.099
Domestik	Ton	-17%	18.204.152	21.971.121	21.883.742
Internasional	Ton	2%	6.812.482	6.710.226	6.214.357
<b>Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)</b>	Pax	-16%	35.755.591	42.349.974	40.078.358
Domestik	Pax	-13%	25.016.634	28.681.347	28.098.099
Internasional	Pax	-17%	18.204.152	21.971.121	21.883.742
<b><i>Extend and Advance</i></b>	Hr	2%	6.812.482	6.710.226	6.214.357
Domestik	Hr	-59%	6.68	16.359	15.945
Internasional	Hr	-58%	6.247	14.701	14.458
<b>Pemakaian Aviobridge</b>	Ton	-74%	433	1.659	1.487
Domestik	Ton	-6%	28.302.004	30.253.959	28.116.989
Internasional	Ton	-11%	17.488.015	19.655.806	18.818.445
<b>Pemakaian Counter</b>	Pax	2%	10.813.989	10.598.153	9.298.544
Domestik	Pax	-16%	35.640.003	42.242.630	39.906.428
Internasional	Pax	-21%	26.933.352	34.026.851	32.452.235
<b><i>Baggage Handling System*</i></b>	Pax	6%	8.706.651	8.215.779	7.454.193

\*komponen tarif BHS/HBS sudah dimasukkan ke dalam komponen tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)

Secara umum, kinerja operasional Angkasa Pura I, khususnya untuk layanan domestik mengalami pertumbuhan negatif sepanjang tahun 2019. Faktor utama yang menyebabkan kondisi tersebut yaitu naiknya harga-harga tiket penerbangan, sehingga para pengguna jasa penerbangan domestik banyak yang mengurangi kegiatan perjalanan mereka dengan pesawat udara, atau beralih menggunakan moda transportasi lain.

Untuk penerbangan internasional, Angkasa Pura I mencatat adanya pertumbuhan atas jasa aeronautika dengan kisaran 2-6%. Meski demikian, layanan *extend and advance* pada tahun 2019 mengalami persentase penurunan yang signifikan baik untuk layanan internasional (74%) maupun domestik (58%).

#### PELAYANAN JASA PENDARATAN, PENEMPATAN DAN PENYIMPANAN PESAWAT UDARA (PJP4U)

Per 31 Desember 2019, produksi PJP4U mengalami penurunan sebesar 13% atau 3,67 juta ton dari tahun 2018 yang sebesar 28.681.347, sehingga menjadi 25.016.634 ton. Produksi PJP4U domestik dibukukan dengan nilai 18.204.152 ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 21.971.121 ton, PJP4U domestik mengalami penurunan 17% atau 3,77 juta ton. Di sisi lain, produksi PJP4U internasional dibukukan dengan nilai 6.812.482 ton, naik 2% atau 102.256 ton dari 6.710.226 ton tahun 2018.

#### PELAYANAN JASA PENUMPANG PESAWAT UDARA (PJP2U)

Produksi PJP2U per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 16% atau 6,6 juta pax dari 42.349.974 pax pada tahun 2018 menjadi 35.755.591 pax tahun 2019. Kemudian, produksi PJP2U domestik tercatat sebesar 26.938.294 pax dengan tingkat penurunan 21% atau 7,1 juta pax dari tahun 2018 yang mencapai 34.032.778 pax. Untuk produksi PJP2U internasional, Angkasa Pura I membukukan peningkatan 6% atau 500.101 pax dari 8.317.196 pax tahun 2018 menjadi 8.817.297 pax pada tahun 2019.

#### EXTEND AND ADVANCE

Angkasa Pura I memiliki kebijakan untuk memberikan sanksi berupa biaya tambahan atas jasa penggunaan bandar udara di luar jam operasi kepada perusahaan angkutan udara atau operator pesawat udara. Terkait hal tersebut, setiap perusahaan angkutan udara atau operator pesawat udara wajib mengajukan permohonan perpanjangan waktu jam operasi (*extend/advance*) setidaknya 2 (dua) jam sebelum berakhirnya jam operasi bandara yang bersangkutan. Pengajuan tersebut dilakukan secara tertulis kepada General Manager dengan tembusan Airport Duty Manager Bandar Udara.

Secara keseluruhan, terjadi penurunan sebesar 59% atau 9.679 jam atas perpanjangan waktu jam operasi (*extend and advance*) di tahun 2019, dari 16.359 jam tahun 2018 menjadi 6.680 jam saja pada tahun 2019. Perpanjangan waktu jam operasi domestik tercatat hanya 6.247 jam, yang turun 58% atau 8.454 jam dibandingkan dengan 14.701 jam pada tahun 2018. Sama halnya dengan perpanjangan waktu jam operasi internasional tahun 2019, tercatat hanya sebesar 433 jam, menurun tajam sebesar 74% atau 1.226 jam dari 1.659 jam tahun 2018.

#### PEMAKAIAN CHECK-IN COUNTER

Terkait penggunaan *check-in counter*, pada tahun 2019, Angkasa Pura I mencatat sebesar 35.640.003 pax, atau mengalami penurunan 16% atau 6,6 juta pax dari 42.242.630 pax pada tahun 2018. Pemakaian *counter* domestik tercatat sebesar 26.933.352 pax, turun 21% atau 7.093.499 pax dari tahun 2018 yang dibukukan sebesar 34.026.851 pax. Di sisi lain, pemakaian *counter* internasional tercatat naik 6% atau 490.872 pax jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang membukukan penggunaan *check-in counter* sebesar 8.215.779 pax.

#### PEMAKAIAN AVIOBRIDGE

Dalam hal penggunaan *aviobridge*, Angkasa Pura I membukukan jumlah pemakaian total tahun 2019 sebesar 28.302.004 Ton, turun 6% atau 1.951.955 Ton

dari 30.253.959 ton tahun 2018. Pemakaian *aviobridge* domestik mencapai 17.488.015 ton, turun 11% atau 2.17 juta ton dari tahun sebelumnya sebesar 19.655.806 ton. Kemudian, pemakaian *aviobridge* internasional tercatat sebesar 10.813.989 ton, mengalami sedikit pertumbuhan positif sebesar 2% atau 215.836 ton dari 10.598.153 ton di tahun 2018.

### BAGGAGE HANDLING SYSTEM

Angkasa Pura I menggunakan fasilitas *Baggage Handling System* (BHS) sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang. BHS memanfaatkan sistem *conveyor* untuk mengangkut bagasi penumpang kedatangan dan keberangkatan, terutama setelah proses pemeriksaan dan *check-in*. BHS juga terintegrasi dengan *Hold Baggage Screening*, yaitu sistem pemeriksaan bagasi dengan mesin *x-ray*. Dengan adanya HBS, status keamanan bagasi, penyaluran sesuai hasil pemeriksaan, pemilahan atau sortir, serta tujuan bagasi dapat diketahui secara otomatis.

### KAPASITAS PRODUKSI/JASA AERONAUTIKA (KEBANDARUDARAAN)

Pada tahun 2019, Angkasa Pura I telah melakukan peningkatan kapasitas layanan aeronautika (kebandarudaraan) meski terjadi penurunan pergerakan penumpang sepanjang tahun tersebut. Angkasa Pura I tetap optimis bahwa di masa depan perjalanan udara akan tetap diminati masyarakat, sehingga investasi perlu tetap dilakukan guna mempersiapkan diri menghadapi tantangan ke depan.

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan jasa aeronautika di tahun 2019 antara lain melalui *Collaborative Destination Development* serta *international conference* dan *route development*.

Berikut ini tabel yang menunjukkan peningkatan kapasitas jasa aeronautika pada tahun 2019.

Peningkatan Kapasitas Pelayanan Jasa Aeronautika PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Uraian	Satuan	Peningkatan	Kapasitas 2019	Kapasitas 2018
<b>Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)</b>	Ton	-13%	28.681.347	25.016.634
Domestik	Ton	-17%	21.971.121	18.204.152
Internasional	Ton	2%	6.710.226	6.812.482
<b>Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)</b>	Pax	-16%	42.349.974	35.755.591
Domestik	Pax	21%	34.032.778	26.938.294
Internasional	Pax	6%	8.317.196	8.817.297
<b>Extend and Advance</b>	Hr	-59%	16.359	6.680
Domestik	Hr	-58%	14.701	6.247
Internasional	Hr	-74%	1.659	433

## Peningkatan Kapasitas Pelayanan Jasa Aeronautika PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Uraian	Satuan	Peningkatan	Kapasitas 2019	Kapasitas 2018
<b>Pemakaian Aviobridge</b>	Hr	-6%	30.253.959	28.302.004
Domestik	Ton	-11%	19.655.806	17.488.015
Internasional	Ton	2%	10.598.153	10.813.989
<b>Pemakaian Counter</b>	Ton	-16%	42.242.630	35.640.003
Domestik	Pax	-21%	34.026.851	26.933.352
Internasional	Pax	6%	8.215.779	8.706.651
<b>Baggage Handling System</b>	Pax	100%	979.580	528

#### PENJUALAN/PENDAPATAN USAHA AERONAUTIKA (KEBANDARUDARAAN)

Pertumbuhan negatif jumlah pengguna bandara sepanjang tahun 2019 berdampak pada penurunan kinerja operasional yang cukup signifikan. Hal tersebut juga berdampak pada penurunan pendapatan usaha. Meski demikian, Angkasa Pura I mencatat penurunan pendapatan usaha sebesar 2,69% saja, tidak terlalu tajam jika dibandingkan dengan menurunnya trafik penerbangan dan jumlah pengguna bandara di Indonesia secara keseluruhan.

Di tengah menurunnya pergerakan penumpang akibat tingginya harga-harga tiket penerbangan, Angkasa Pura I membukukan pertumbuhan pendapatan dari PJP4U dan pemakaian *aviobridge* sebesar 23,99% dan 30,59%. Penurunan tajam terjadi pada pendapatan dari pemakaian BHS sebesar 99,95%. Secara agregat, pendapatan aeronautika mengalami penurunan sebesar Rp 137,71 miliar atau 2,69%, dari Rp5,11 triliun di 2018 menjadi Rp 4,97 triliun di 2019.

Tabel berikut ini menyajikan data pendapatan usaha dari jasa aeronautika Angkasa Pura I dalam tiga tahun terakhir:

## Penjualan/Pendapatan Usaha dari Jasa Aeronautika PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2017 - 2019

Keterangan	Pertumbuhan 2019 (%)	2019 (ribu Rp)	2018 (ribu Rp)	2017 (ribu Rp)
PJP4U (Pelayanan Jasa dan Pendaratan dan Penyimpanan Pesawat Udara/PJP4U)	23,99	892.877.554	720.128.251	574.447.311
PJP2U (Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara)/PJP2U	-8,18	3.534.959.602	3.849.746.920	3.401.969.489
Pemakaian <i>Aviobridge</i>	30,59	233.100.869	178.501.862	137.776.838
Pemakaian <i>Counter</i> dan <i>Conveyor</i>	11,01	149.868.725	135.002.277	113.527.631
Pemakaian <i>Baggage Handling System</i> (BHS)	-99,95	5.280	9.796.840	58.063.920
PJKP2U (Pelayanan jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara)	-25,10	165.124.057	220.472.195	240.070.511
<b>Jumlah Penjualan / Pendapatan</b>	<b>-2,69</b>	<b>4.975.936.088</b>	<b>5.113.648.346</b>	<b>4.525.855.700</b>

### SEGMENT USAHA JASA NONAERONAUTIKA PRODUKSI/JASA NONAERONAUTIKA (NONKEBANDARUDARAAN)

Angkasa Pura I mengelompokkan pelayanan jasa penunjang penerbangan dalam segmen usaha nonaerounatika, yang terdiri dari:

- Sewa-sewa, yaitu: sewa ruang, sewa tanah, sewa tempat, sewa hanggar, dan lain-lain).
- Konsesi terhadap usaha-usaha di bandara.
- Parkir dan pas bandara.
- Utilitas (pemakaian listrik, air, telepon, dan *internet services*).
- Sewa tempat reklame.
- Event and promotion*
- Lounge*
- Maintenance and service fee*

Kinerja layanan nonaeronautika Angkasa Pura I pada tahun 2019 mencatat pertumbuhan yang beragam. Beberapa jenis layanan yang mengalami pertumbuhan positif antara lain sewa reklame, *event* dan promosi, dan jasa pergudangan kargo. Kemudian, jenis layanan yang tercatat memiliki pertumbuhan negatif antara lain sewa, konsesi, perparkiran, *lounge*, serta *maintenance and service*. Menurunnya jumlah pengguna bandara yang dipicu oleh tingginya tarif penumpang pesawat terbang menjadi faktor utama menurunnya kinerja Angkasa Pura I, termasuk juga pada layanan non-aeronautika.

Kinerja tiga tahun terakhir terkait layanan nonaeronautika Angkasa Pura I disajikan pada tabel berikut ini:

Kinerja Pelayanan Jasa Non-Aeronautika Angkasa Pura I Tahun 2017-2019

Uraian	Satuan	Pertumbuhan 2019 (%)	2019	2018	2017
Sewa	m <sup>2</sup> xbulan	27%	9.488.436	7.490.291	8.542.321
Konsensi	Rp/000	-7%	26.023.806.416	27.881.233.723	9.570.569.203
Parkir Mobil	Lembar	-15%	28.264.917	33.371.374	29.096.030
Parkir Motor	Lembar	-7%	10.455.258	11.232.860	9.762.063
Pas Bandara	Lembar	-55%	50.597	113.496	221.718
Pemakaian Listrik	Kwh	-17%	43.807.615	52.675.053	45.850.618
Pemakaian Air	m <sup>3</sup>	19%	626.363	525.845	495.704
Pemakaian Telepon	PwtxBln	-11%	18.423	20.702	21.391
Layanan Data	KiloByte	24%	1.228	994	854
Sewa Tempat Reklame	m <sup>2</sup> xbulan	534%	76.674	12.087	20.766
<i>Event and Promotion</i>	EA	171%	9.971	3.679	7.650
<i>Lounge</i>	Pax	-33%	197.788	295.891	575.135
Konsesi <i>General Aviation Terminal (GAT)</i>	Rp/000	-	0	0	15.111.387
<i>Maintenance and Service Fee</i>	EA	-60%	5.474	13.711	21.426
Total Jasa Gudang Cargo	Kg	5%	91.179.716	86.754.808	238.361.160
Jasa Gudang <i>Cargo Out-Domestic</i>	Kg	66%	14.964.611	9.001.475	74.994.202
Jasa Gudang <i>Cargo Out-International</i>	Kg	122%	18.831.844	8.471.092	36.081.086
Jasa Gudang <i>Cargo Inc- Domestic</i>	Kg	119%	22.089.108	10.072.73	105.326.396
Jasa Gudang <i>Cargo Inc- International</i>	Kg	-40%	35.294.152	59.210.067	21.959.476



### SEWA

Pada tahun 2019, jasa/layanan sewa tercatat sebesar 9.488.436 m<sup>2</sup>, naik sebesar 27% atau 1.998.145 m<sup>2</sup> dari 7.490.291 m<sup>2</sup> tahun 2018. Salah satu penyebab bertambahnya jumlah luasan layanan sewa yaitu pengembangan bandara baru di tahun 2019.

### KONSESI

Angkasa Pura I memperoleh pendapatan konsesi dari perusahaan yang melakukan usaha di bidang *food and beverage, retail, services* dan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU), *regulated agent (RA), Ground Handling, dan in-flight catering* di bandar udara. Pendapatan jasa ini berasal dari hak penggunaan fasilitas bandar udara kepada pihak ketiga terkait usaha yang dilakukan di bandara.

Per 31 Desember 2019, realisasi produksi konsesi yaitu sebesar Rp26.023.806.416 ribu. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp27.881.233.723 ribu, terjadi penurunan sebesar 7% atau Rp1.857.427.307 ribu.

### PARKIR MOBIL DAN MOTOR

Angkasa Pura I memiliki fasilitas parkir mobil dan motor bagi para pengguna bandara. Layanan parkir motor tercatat mencapai 10.455.258, turun 7% atau 777.702 unit dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 11.232.860 unit. Kemudian, parkir mobil juga mengalami penurunan sebesar 15% atau 5.106.457 unit dari 33.371.374 unit tahun 2018 menjadi 28.264.917 tahun 2019. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya pengguna jasa penerbangan akibat harga tiket yang terlalu tinggi dan sulit terjangkau masyarakat.

### PAS BANDARA

Total pas bandara dalam satu tahun periode pelaporan terakhir tercatat sebesar 50.597 lembar, turun 55% atau 62.899 lembar dari 113.496 lembar tahun 2018. Berkurangnya pengguna jasa penerbangan juga menjadi penyebab menurunnya penggunaan fasilitas pas bandara.

### SEWA TEMPAT REKLAME

Kinerja sewa tempat reklame tahun 2019 mencatat pertumbuhan yang signifikan, yaitu 534% atau 64.587 m<sup>2</sup>, dari 12.087 m<sup>2</sup> tahun 2018 menjadi 76.674 m<sup>2</sup> tahun 2019. Penyebab utama tingginya pertumbuhan pada layanan ini yaitu oleh perubahan pola kerja sama yang semula sewa reklame menjadi konsesi *advertising* pada beberapa bandara.

### LAYANAN DATA

Angkasa Pura I menyediakan layanan data di bandaradalamrangkameningkatkankenyamanan pengguna jasa transportasi penerbangan. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan pemakaian layanan data sebesar 24% atau 234 EA, dari 994 EA tahun 2018 menjadi 1.228 EA pada tahun 2019. Meningkatnya gaya hidup digitalisasi di Indonesia mendorong adanya permintaan layanan data di berbagai tempat, termasuk di wilayah bandara.

### LOUNGE

Sejalan dengan menurunnya jumlah pengguna jasa transportasi penerbangan, jumlah pengguna *lounge* tumbuh negatif sebesar 33%. Jumlah pengguna *lounge* turun sebesar 98.103 pax dari 295.891 pax tahun 2018 menjadi 197.788 pax tahun 2019.

### WAREHOUSING

Selain sewa tempat reklame yang tumbuh signifikan, kegiatan layanan gudang kargo juga mengalami kinerja yang cukup baik dengan pertumbuhan sebesar 5%. Total jasa gudang kargo tahun 2019 tercatat mencapai 91.179.716 kg, atau naik 4.424.908 kg dibandingkan kinerja satu tahun sebelumnya. Adanya peningkatan tersebut mengindikasikan permintaan pasar terhadap jasa pengiriman melalui udara masih diminati pasarsejalan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang masih positif.

### KAPASITAS PRODUKSI/JASA NONAERONAUTIKA (NONKEBANDARUDARAAN)

Angkasa Pura I pada tahun 2019 melakukan peningkatan kapasitas layanan nonaeronautika. Terjadinya penurunan beberapa jenis layanan tidak menyurutkan rencana Angkasa Pura I untuk terus mengembangkan kapabilitasnya agar dapat meraih peluang yang lebih besar pada tahun-tahun yang akan datang.

Beberapa upaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan jasa nonaeronautika diantaranya peningkatan alat produksi sewa untuk bandara baru serta perubahan pola kerja sama dari area (konsesi) menjadi per titik (sewa reklame).

Peningkatan Kapasitas Pelayanan Jasa Non-Aeronautika PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Uraian	Satuan	Pertumbuhan 2019 (%)	Kapasitas 2019	Kapasitas 2018
Sewa	m <sup>2</sup> xbulan	8%	9.488.400	7.490.291
Konsensi	Rp/000	-6%	26.334.753	27.908.952
Parkir Mobil	Lembar	-15%	28.263.548	33.355.753
Parkir Motor	Lembar	-7%	10.455.258	11.232.860
Pas Bandara	Lembar	-55%	50.597	113.496
Pemakaian Listrik	Kwh	-17%	43.805.615	52.675.053
Pemakaian Air	m <sup>3</sup>	19%	626.363	525.845
Pemakaian Telepon	PwtxBln	-11%	18.480	20.702
Layanan Data	KiloByte	24%	1.228	994
Sewa Tempat Reklame	m <sup>2</sup> xbulan	141%	76.674	31.860
<i>Event and Promotion</i>	EA	171%	9.971	3.679
<i>Lounge</i>	Pax	-33%	197.788	295.891
<i>Konsesi General Aviation Terminal (GAT)</i>	Rp/000	-	-	-
<i>Maintenance and Service Fee</i>	EA	-60%	5.474	13.711
Total Jasa Gudang Cargo	Kg	5%	91.179.716	86.754.807
<i>Jasa Gudang Cargo Out-Domestic</i>	Kg	66%	14.964.611	9.001.475
<i>Jasa Gudang Cargo Out-International</i>	Kg	122%	18.831.844	8.471.092
<i>Jasa Gudang Cargo Inc- Domestic</i>	Kg	119%	22.089.108	10.072.173
<i>Jasa Gudang Cargo Inc- International</i>	Kg	-40%	35.294.152	59.210.067

### PENJUALAN/PENDAPATAN USAHA NON-AERONAUTIKA (NONKEBANDARUDARAAN)

Di tengah terjadinya penurunan jumlah penerbangan dan penumpang, pada tahun 2019, Angkasa Pura I berhasil meningkatkan pendapatan dari layanan nonaeronautika. Dengan pertumbuhan tersebut, total pendapatan nonaeronautika naik dari Rp3,41 triliun tahun 2018 menjadi Rp3,66 triliun pada tahun 2019.

Pendapatan konsesi yang tumbuh 10% memberi kontribusi pendapatan terbesar pada tahun 2019 bagi Angkasa Pura I, yaitu Rp1,71 triliun. Di sisi

lain, kontribusi pendapatan terendah berasal dari *event* dan promosi, sebesar Rp37.63 miliar. Seiring dengan menurunnya jumlah pergerakan penumpang, pendapatan dari ruang tunggu juga menurun sebesar 35%, dari Rp211,33 miliar menjadi Rp138,29 miliar.

Tabel berikut menyajikan data penjualan/pendapatan Angkasa Pura I dari layanan nonaeronautika dalam tiga tahun terakhir:

Penjualan/Pendapatan Usaha dari Jasa Non-Aeronautika PT Angkasa Pura I (Persero) tahun 2017-2019

Keterangan	Pertumbuhan 2019 (%)	2019 (ribu Rp)	2018 (ribu Rp)	2017 (ribu Rp)
Pemakaian Sarana Non-Aeronautika	-6%	420.492.455	447.436.647	335.052.570
Pendapatan Sewa	9%	761.535.330	696.473.431	577.628.369
Pemakaian Ruang Tunggu	-35%	138.296.643	211.332.198	114.123.735
Pendapatan Konsesi	10%	1.707.521.693	1.554.211.200	1.267.167.188
Event dan Promosi	20%	37.636.364	31.267.755	35.066.205
Pergudangan dan Logistik	29%	295.897.412	229.173.525	201.756.729
Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan	8%	88.756.461	82.402.681	67.654.833
Jasa Lainnya	32%	205.473,57	155.141.527	70.042.205
Jumlah Pendapatan Non Aeronautika	7%	3.655.609.514	3.407.438.964	2.668.491.834

### PROFITABILITAS SEGMENT USAHA JASA AERONAUTIKA DAN NONAERONAUTIKA

Angkasa Pura I membukukan total pendapatan segmen aeronautika dan nonaeronautika mencapai Rp4,01 triliun dan Rp6,48 triliun pada tahun 2019. Pertumbuhan negatif jumlah pergerakan penumpang pada tahun tersebut menyebabkan pendapatan usaha untuk segmen aeronautika menurun sebesar Rp1,10 triliun atau 21,59%. Sebaliknya, Angkasa Pura I justru memperoleh pendapatan usaha segmen non-aeronautika yang meningkat sebesar Rp1,38 triliun atau sebesar 27,10%.

Sejalan dengan itu, dalam hal profitabilitas per segmen usaha, segmen aeronautika mencatat pertumbuhan negatif laba usaha sebesar Rp807 miliar atau 36,09%, sehingga total laba usaha segmen ini menjadi Rp1,43 triliun. Di sisi lain, laba usaha segmen non-aeronautika meningkat 72,89% atau Rp379,06 miliar, dengan total laba usaha tahun 2019 menjadi Rp1,37 triliun.

Tabel-tabel berikut ini menampilkan data kinerja keuangan per segmen usaha untuk tahun 2019 dan 2018 serta pertumbuhannya:

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha  
Jasa Aeronautika dan Non-aeronautika PT Angkasa Pura I (Persero) tahun 2019  
(dalam ribu Rp)

Uraian	2019				
	Kebandaraan	Non Bandara	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
<b>PENDAPATAN USAHA</b>					
Pihak Ketiga	3.891.295.455	4.740.250.147	8.631.545.602	-	8.631.545.602
Pihak Berelasi	121.738.203	1.740.811.505	1.862.549.708	(1.862.549.708)	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>4.013.033.658</b>	<b>6.481.061.652</b>	<b>10.494.095.310</b>	<b>(1.862.549.708)</b>	<b>8.631.545.602</b>
<b>BEBAN USAHA</b>					
Pihak Ketiga	2.391.618.455	3.546.247.396	5.937.865.851	-	5.937.865.851
Pihak Berelasi	191.010.882	1.561.377.821	1.752.388.703	(1.752.388.703)	-
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>2.582.629.337</b>	<b>5.107.625.217</b>	<b>7.690.254.554</b>	<b>(1.752.388.703)</b>	<b>5.937.865.851</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>1.430.404.321</b>	<b>1.373.436.435</b>	<b>2.803.840.756</b>	<b>(110.161.005)</b>	<b>2.693.679.751</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA</b>					
Pendapatan (Beban) Non Usaha	1.316.556	(663.259.946)	(661,943,390)	-	(661,943,390)
Laba(Rugi) Asosiasi	-	(8.952.137)	(8,952,137)	-	(8,952,137)
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>1.431.720.877</b>	<b>701.224.352</b>	<b>2.132.945.229</b>	<b>(110.161,005)</b>	<b>2.022.784.224</b>
Pajak Final	-	-	(109,731,383)	-	(109.731.383)
Pajak Penghasilan	-	-	(460,825,675)	-	(460.825.675)
<b>Laba setelah pajak</b>	<b>1.431.720.877</b>	<b>701.224,52</b>	<b>1.562.388.171</b>	<b>(110.161.005)</b>	<b>1.452.227.166</b>
<b>Laba Diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik Entitas Induk	-	-	-	-	1.451.359.978
Keperentingan Non Pengendali	-	-	-	-	867,88
<b>Total Laba Tahun Berjalan</b>	<b>1.431.720.877</b>	<b>701.224,52</b>	<b>1,562,388,171</b>	<b>(110.161.005)</b>	<b>1.452.227.166</b>

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha  
Jasa Aeronautika dan Non-aeronautika PT Angkasa Pura I (Persero) tahun 2018  
(dalam ribu Rp)

Uraian	2018				
	Kebandaraan	Non Bandara	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
<b>PENDAPATAN USAHA</b>					
Pihak Ketiga	5.007.316.777	3.513.770.533	8.521.087.310	-	8.521.087.310
Pihak Berelasi	110.865.981	1.585.342.726	1.696.208.707	(1.696.208.707)	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>5.118.182.758</b>	<b>5.099.113.259</b>	<b>10.217.296.017</b>	<b>(1.696.208.707)</b>	<b>8.521.087.310</b>

BEBAN USAHA					
Pihak Ketiga	2.707.645.131	2.896.647.452	5.604.292.583	-	5.604.292.583
Pihak Berelasi	172.258.081	1.408.087.038	1.580.345.119	(1.580.345.119)	-
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>2.879.903.212</b>	<b>4.304.734.490</b>	<b>7.184.637.702</b>	<b>(1.580.345.119)</b>	<b>5.604.292.587</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>2.238.279.546</b>	<b>794.378.765</b>	<b>3.032.658.311</b>	<b>(115.863.588)</b>	<b>2.916.794.723</b>
PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA					
Pendapatan (Beban) Non Usaha	-	(96.285.033)	(96.285.033)	-	(96.285.033)
Laba(Rugi) Asosiasi	-	2.552.006	2.552.006	-	2.552.006
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>2.238.279.546</b>	<b>700.645.738</b>	<b>2.938.925.284</b>	<b>(115.863.588)</b>	<b>2.823.061.696</b>
Pajak Final	-	-	128.127.639	-	128.127.639
Pajak Penghasilan	-	-	689.015.898	-	689.015.898
<b>Laba setelah pajak</b>	<b>2.343.454.753</b>	<b>700.645.738</b>	<b>2.121.781.747</b>	<b>(115.863.588)</b>	<b>2.005.918.159</b>
<b>Laba Diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik Entitas Induk	-	-	-	-	2,007,018,317
Keperentingan Non Pengendali	-	-	-	-	(1,100,156)
<b>Total Laba Tahun Berjalan</b>	<b>2.343.454.753</b>	<b>700.645.738</b>	<b>2.121.781.747</b>	<b>(115.863.588)</b>	<b>2.005.918.159</b>

**Pertumbuhan Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha  
Jasa Aeronautika dan Non-aeronautika PT Angkasa Pura I (Persero) tahun 2018  
(dalam ribu Rp)**

Uraian	2018									
	Kebandaraan		Non Bandara		Jumlah		Eliminasi		Konsolidasian	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
<b>PENDAPATAN USAHA</b>										
Pihak Ketiga	(1.116.021.322)	(22,29)	1.226.479.614	34,90	110.458.292	1,30	-	-	110.458.292	1,30
Pihak Berelasi	10.872.222	9,81	155.468.779	9,81	166.341.001	9,81	(166.341.001)	9,81	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>(1.105.149.100)</b>	<b>(21,59)</b>	<b>1.381.948.393</b>	<b>27,10</b>	<b>276.799.293</b>	<b>2,71</b>	<b>(166.341.001)</b>	<b>9,81</b>	<b>110.458.292</b>	<b>1,30</b>
<b>BEBAN USAHA</b>										
Pihak Ketiga	(316.026.676)	(11,67)	649.599.944	22,43	333.573.268	5,95	-	-	333.573.268	5,95
Pihak Berelasi	18.752.801	10,89	153.290.783	10,89	172.043.584	10,89	(172.043.584)	10,89	-	-
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>(297.273.875)</b>	<b>(10,32)</b>	<b>802.890.727</b>	<b>18,65</b>	<b>505.616.852</b>	<b>7,04</b>	<b>(172.043.584)</b>	<b>10,89</b>	<b>333.573.268</b>	<b>5,95</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>(807.875.225)</b>	<b>(36,09)</b>	<b>579.057.666</b>	<b>72,89</b>	<b>(228.817.559)</b>	<b>(7,55)</b>	<b>5.702.583</b>	<b>(4,92)</b>	<b>(223.114.976)</b>	<b>(7,65)</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA</b>										
Pendapatan (Beban) Non Usaha	1.316.556	-	(566.974.913)	588,85	(565.658.357)	587,48	-	-	(565.658.357)	587,48
Laba(Rugi) Asosiasi	-	-	(11.504.143)	(450,79)	(11.504.143)	(450,79)	-	-	(11.504.143)	(450,79)
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>(806.558.669)</b>	<b>(36,03)</b>	<b>578.614</b>	<b>0,08</b>	<b>(805.980.055)</b>	<b>(27,42)</b>	<b>5.702.583</b>	<b>(4,92)</b>	<b>(800.277.472)</b>	<b>(28,35)</b>
Pajak Final	-	-	-	-	(237.859.022)	(185,64)	-	-	(237.859.022)	(185,64)
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	(1.149.841.573)	(166,88)	-	-	(1.149.841.573)	(166,88)

# Tinjauan Keuangan

Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro dan Surja telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Angkasa Pura I untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Berdasarkan hasil audit, pihak KAP memberikan opini audit “wajar”, dalam

semua hal yang material, posisi keuangan Angkasa Pura I dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

## KINERJA KEUANGAN

Bagian ini membahas Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif, serta Laporan Arus Kas Konsolidasian,

yang mengindikasikan kinerja Angkasa Pura I selama tahun periode pelaporan 1 Januari-31 Desember 2019.

## LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

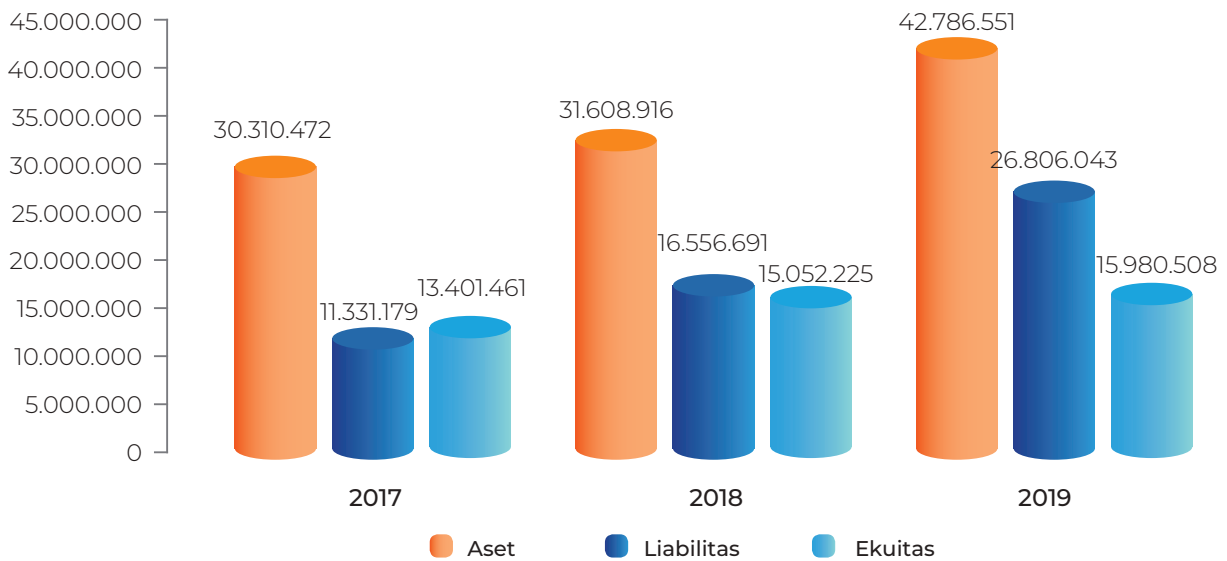
Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
<b>ASET</b>					
<b>Aset Lancar</b>					
Kas dan Setara Kas	2.361.789.792	75%	5.510.903.592	3.149.113.800	4.146.085.966
Investasi Jangka Pendek	187.755.531	39%	665.862.312	478.106.781	407.155.975
Piutang Usaha - Bersih					
Pihak Ketiga	(30.261.173)	-7%	389.314.007	419.575.180	427.375.259
Pihak Berelasi	48.116.078	53%	138.453.120	90.37.042	92.919.624
Piutang Lain-Lain	40.632.505	102%	80.344.191	39.711.686	19.053.290
Persediaan	(15.403.794)	-18%	69.404.026	84.807.820	68.668.359
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	(19.421.102)	-12%	139.959.625	159.380.727	72.003.022
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	(7.421.891)	-2%	291.022.438	298.444.329	225.606.033
Pajak Dibayar Dimuka	473.092.576	129%	840.957.804	367.865.228	105.569.123
Aset Lancar Lain-Lain	36.010.306	127%	64.277.125	28.266.819	13.395.768
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>3.074.891</b>	<b>60%</b>	<b>8.190.498.240</b>	<b>5.115.606.412</b>	<b>5.577.832.420</b>
<b>LIABILITAS</b>					
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>					
Beban Akrua	(89.751.509)	-6%	1.322.288.034	1.412.039.543	1,79.558.217
Utang Usaha:					
Pihak Ketiga	(332.574.858)	-57%	255.047.300	587.622.158	239.965.248



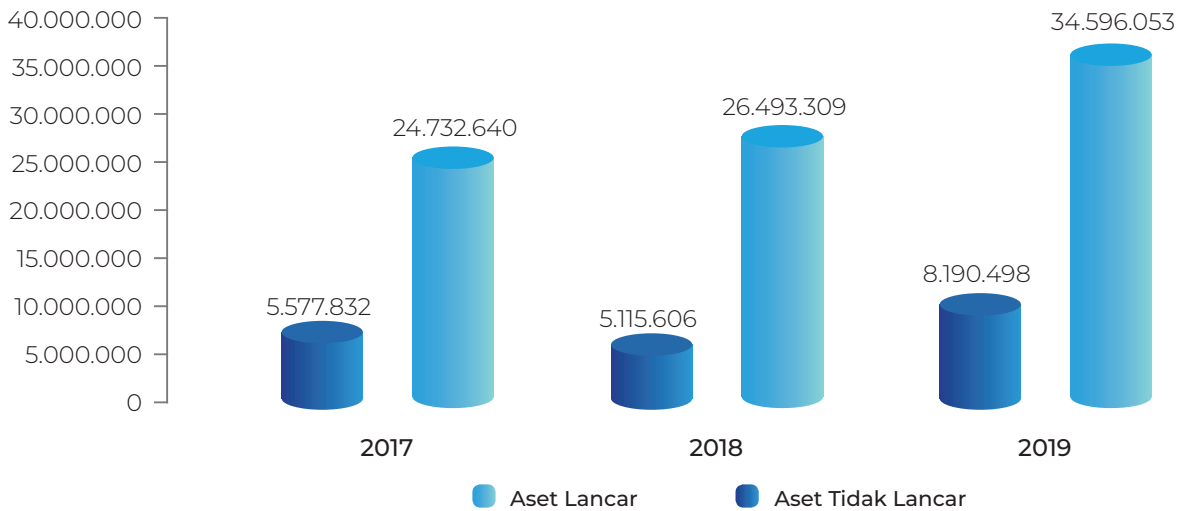
## Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Pihak Berelasi	(41.898.626)	-41%	59.820.083	101.718.709	10.812.049
Pendapatan Diterima Dimuka	(18.930.583)	-13%	128.332.276	147.262.859	97.657.593
Utang Pajak	32.266.598	8%	425.502.215	393.235.617	586.915.606
Utang Bank Jangka Pendek	52.379.600	50%	158.010.670	105.631.070	76.718.537
Bagian Jangka Pendek Pinjaman Jangka Panjang	(403.022.252)	-43%	538.975.837	941.998.089	720.938.954
Utang Lain-lain	(632.669.369)	-16%	3.292.812.136	3.925.481.505	1.232.182.579
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>(1.434.200.999)</b>	<b>-19%</b>	<b>6.180.788.551</b>	<b>7.614.989.550</b>	<b>3.948.861.194</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>					
Utang Bank Jangka Panjang	11.338.211.283	211%	16.724.208.207	5.385.996.924	3.665.693.887
Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah	1.195.495	0%	2.994.896.323	2.993.700.828	2.992.474.960
Utang Jangka Panjang Lainnya	218.442.607	128%	388.971.461	170.528.854	174.905.265
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	134.898.231	45%	437.293.206	302.394.975	549.244.430
Liabilitas pajak tangguhan	(9.194.317)	-10%	79.885.504	89.079.821	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>11.683.553.299</b>	<b>131%</b>	<b>20.625.254.701</b>	<b>8.941.701.402</b>	<b>7.382.318.542</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>10.249.352.300</b>	<b>62%</b>	<b>26.806.043.252</b>	<b>16.556.690.952</b>	<b>11.650.348.788</b>
<b>EKUITAS</b>					
Modal Saham	-	0%	6.414.412.000	6.414.412.000	6.414.412.000
Tambahan Modal Disetor			8.588.878		
Penyertaan Modal Negara (PMN)	-	0%	22.963.207	22.963.207	255.096.706
Nilai Buku Aset tetap kenavigasian dari Penyertaan Modal Negara (PMN)	-	0%	(37.004.793)	(37.004.793)	(269.138.292)
Akumulasi Penyusutan Aset tetap Kenavigasian dari BPYPDS	-	0%	408.393.524	408.393.524	408.393.524
Penghasilan Komprehensif Lain	(70.686.418)	-2387%	-67.725.696	2.960.722	74.064.750
Saldo Laba:					
Dicadangkan	1.545.404.103	25%	7.774.022.361	6.228.618.258	5.093.757.108
Laba Tahun Berjalan	(555.658.337)	-28%	1.451.359.978	2.007.018.315	1.418.577.150
Jumlah Ekuitas Yang Diatribusikan Ke:					
Pemilik Entitas Induk	927.648.226	6%	15.975.009.459	15.047.361.233	13.395.162.946
Kepentingan Non Pengendali	634.95	13%	5.498.388	4.863.436	6.298.096
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>928.283.178</b>	<b>6%</b>	<b>15.980.507.847</b>	<b>15.052.224.669</b>	<b>13.401.461.042</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>11.177.635.478</b>	<b>35%</b>	<b>42.786.551.099</b>	<b>31.608.915.621</b>	<b>24.732.640.778</b>

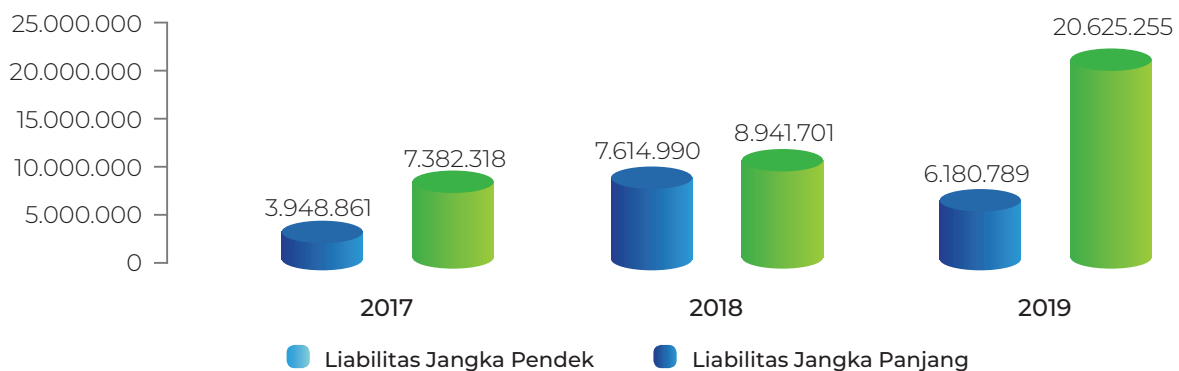
Posisi Keuangan PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (Rp juta)



Posisi Aset PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (Rp juta)



Posisi Liabilitas PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (Rp juta)



**ASET**

Perseroan mencatat total aset mengalami pertumbuhan sebesar 35% atau Rp11.177 miliar di tahun 2019 menjadi Rp42.786 miliar, dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar

Rp31.608 miliar. Pertumbuhan/penurunan total aset disebabkan oleh adanya peningkatan aset lancar sebesar Rp3.075 miliar dan aset tidak lancar sebesar Rp8.013 miliar.

Laporan Aset PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Aset Lancar	3.074.891.828	60%	8.190.498.240	5.115.606.412	5.577.832.420
Aset Tidak Lancar	8.102.743.650	31%	34.596.052.859	26.493.309.209	19.154.808.358
<b>Jumlah Aset</b>	<b>11.177.635.478</b>	<b>35%</b>	<b>42.786.551.099</b>	<b>31.608.915.621</b>	<b>24.732.640.778</b>

**ASET LANCAR**

Secara total, pada tahun 2019 aset lancar PT Angkasa Pura I (Persero) mengalami peningkatan sebesar Rp 3,075 miliar atau sebesar 60% dari tahun 2018. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh realisasi kas dan setara kas yang berasal dari pencairan

pinjaman untuk pembiayaan proyek Proyek pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, pengembangan Bandara Juanda Surabaya, dan pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Laporan Aset Lancar PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rupiah)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Kas dan Setara Kas	2.361.789.792	75%	5.510.903.592	3.49113.800	4.146.085.966
Investasi Jangka Pendek	187.755.531	39%	665.862.312	478.106.781	407.155.975
Piutang Usaha:					
Pihak Ketiga	(30.261.173)	-7%	389.314.007	419.575.180	427.375.259
Pihak Berelasi	48.119.078	53%	138.453.120	90.337.042	92.919.624
Piutang Lain-Lain	40.632.505	102%	80.344.191	39.711.686	19.053.290
Persediaan	(15.403.794)	-18%	69.404.026	84.807.820	68.668.359
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	(19.421.102)	-12%	139.959.625	159.380.727	72.003.022
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	(7.421.891)	-2%	291.022.438	298.444.329	225.606.033
Pajak Dibayar Dimuka	473.092.576	129%	840.957.804	367.865.228	105.569.123
Aset Lancar Lain-Lain	36.010.306	127%	64.277.125	28.266.819	13.395.768
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>3.074.891.828</b>	<b>60%</b>	<b>8.190.498.240</b>	<b>5.115.606.412</b>	<b>5.577.832.420</b>

### Kas dan Setara Kas

Jika dibandingkan dengan kas dan setara kas tahun 2018 sebesar Rp3,15 triliun, Angkasa Pura I pada tahun 2019, mengalami peningkatan posisi kas dan setara kas sebesar Rp2.262 miliar atau sebesar 75%. Hal tersebut dikarenakan:

- Perolehan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1,5 triliun, dari penerimaan pendapatan aeronautika dan nonaeronautika.
- Penggunaan kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp9,7 triliun, terutama

digunakan untuk penambahan aset tetap, antara lain untuk penambahan aset tetap pada Bandara Internasional Yogyakarta, perluasan terminal Bandara Juanda Surabaya, pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, dan pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

- Perolehan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp10,5 triliun, terutama dari penerimaan pinjaman jangka panjang.

Laporan Kas dan Setara Kas PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Kas	(286.626)	-15%	1.598.780	1.885.406	1.656.418
Bank	107.867.618	12%	987.863.812	879.996.194	733.442.312
Deposito	2.254.208.800	99%	4.521.441.000	2.267.232.200	3.410.987.236
<b>Total</b>	<b>2.361.789.792</b>	<b>75%</b>	<b>5.510.903.592</b>	<b>3.149.113.800</b>	<b>4.146.085.966</b>

### Investasi Jangka Pendek

Angkasa Pura I mencatat investasi jangka pendek meningkat sebesar Rp187 miliar atau 39% dari tahun 2018, yang tercatat sebesar Rp478 miliar. Peningkatan tersebut terutama dari adanya penambahan

deposito berjangka dari Bank BRI dan Bukopin, penambahan investasi pada obligasi, serta pencairan investasi reksadana Danareksa Melati Premium Dolar dan reksadana Sinarmas.

Laporan Investasi Jangka Pendek PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Deposito Berjangka > 3 Bulan	264.839.700	100%	264.839.700	-	10.200.000
Obligasi – tersedia untuk dijual	3.634.348	19%	22.790.392	19.156.044	19.178.167
Reksadana	(80.718.517)	-18%	378.232.220	458.950.737	377.777.808
<b>Total</b>	<b>187.755.531</b>	<b>39%</b>	<b>665.862.312</b>	<b>478.106.781</b>	<b>407.155.975</b>

### Piutang Usaha - Bersih

Piutang usaha mengalami peningkatan sebesar Rp17,8 miliar atau 4%, sehingga tercatat dari tahun 2018 sebesar Rp509,91 miliar menjadi Rp527,76 miliar pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama

dari peningkatan piutang usaha dari pihak berelasi sebesar Rp48,11 miliar dan berkurangnya piutang usaha dari pihak ketiga sebesar Rp30,26 miliar.

## Laporan Piutang Usaha-Bersih PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Pihak Ketiga	(30.261.173)	-7,21%	389.314.007	419.575.180	427.375.259
Pihak Berelasi	48.116.078	53,26%	138.453.120	90.337.042	92.919.624
<b>Total Piutang Usaha</b>	<b>17.854.905</b>	<b>3,50%</b>	<b>527.767.127</b>	<b>509.912.222</b>	<b>520.294.883</b>

## Piutang Lain-lain - Bersih

Piutang lain-lain - bersih mengalami peningkatan sebesar Rp40,6 miliar atau 102% dari Rp39,71 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp80,34 miliar pada tahun

2019. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan piutang pihak ketiga sebesar Rp40,62 miliar.

## Laporan Piutang Lain-lain-Bersih PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Pihak ketiga	40.627.573	93,69%	83.990.931	43.363.358	20.784.921
Penyisihan kerugian penurunan nilai	4.932	-0,14%	(3.646.740)	(3.651.672)	(1.731.631)
<b>Total Piutang Lain-lain - Bersih</b>	<b>40.632.505</b>	<b>102,32%</b>	<b>80.344.191</b>	<b>39.711.686</b>	<b>19.053.290</b>

## Persediaan

Persediaan mengalami penurunan sebesar Rp15,4 miliar atau 18%, sehingga tercatat Rp69,4 miliar pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp84,81 miliar

pada tahun 2018. Penurunan terjadi karena adanya peningkatan penggunaan persediaan suku cadang pemeliharaan, alat kantor dan percetakan.

## Laporan Aset Lancar PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rupiah)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Suku cadang pemeliharaan	(25.069.674)	-59%	17.195.257	42.264.931	36.884.042
Persediaan alat kantor dan percetakan	(3.568.130)	-11%	30.264.587	33.832.717	19.738.913
Persediaan barang dagang	12.333.554	208%	18.274.762	5.941.208	6.822.910
Persediaan bahan bakar	(26.589)	-1%	2.446.291	2.472.880	2.329.763
Persediaan hotel dan lounge	(601.467)	-32%	1.260.045	1.861.512	2.929.647
<b>Total</b>	<b>(16.932.306)</b>	<b>-20%</b>	<b>69.440.942</b>	<b>86.373.248</b>	<b>68.705.275</b>
Penyisihan penurunan nilai	1.528.512	-98%	(36.916)	(1.565.428)	(36.916)
<b>Total</b>	<b>(15,403,794)</b>	<b>-18%</b>	<b>69.404.026</b>	<b>84.807.820</b>	<b>68.668.359</b>

### Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka

Angkasa Pura I mencatat adanya penurunan uang muka dan beban dibayar di muka sebesar Rp19,42 miliar atau 12%, dari Rp159,38 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp139,96 miliar pada tahun 2019. Penurunan

uang muka dan beban dibayar di muka terjadi karena penurunan realisasi biaya karyawan dibayar di muka dan penggunaan persediaan dibayar di muka.

#### Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Bagian Jangka Pendek	(19.421.102)	-12%	139.959.625	159.380.727	(72.003.022)

### Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima mengalami penurunan sebesar Rp7,4 miliar atau 2%, dari Rp298,44 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp291,02 miliar pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama berasal

dari penurunan pendapatan yang masih harus diterima dari aeronautika sebesar Rp60,42 miliar dan peningkatan pendapatan yang masih harus diterima dari non aeronautika sebesar Rp51,45 miliar.

#### Pendapatan yang Masih Harus Diterima PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Aeronautika	(60.420.149)	-32%	131.198.556	191.618.705	174.811.169
Non Aeronautika	51.454.221	51%	152.838.505	191.618.705	44.263.507
Lainnya	1.544.037	28%	6.985.377	5.441.340	6.531.357
<b>Total</b>	<b>(7.421.891)</b>	<b>-2%</b>	<b>291.022.438</b>	<b>298.444.329</b>	<b>225.606.033</b>

### Pajak Dibayar di Muka

Pajak dibayar di muka mengalami peningkatan sebesar Rp473 miliar atau 129%. Pada tahun 2018 nilai pajak dibayar di muka tercatat sebesar Rp367,87, kemudian naik menjadi Rp840,96 miliar pada tahun 2019. Beberapa hal yang memicu kenaikan tersebut yaitu adanya penambahan pada PPN Masukan sebesar Rp400 miliar karena

adanya penambahan aset untuk proyek Bandara Internasional Yogyakarta dan penambahan terminal baru pada Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, serta adanya penambahan PPN masukan entitas anak atas pembelian garbarata dan *power mover system* di Bandara Internasional Yogyakarta dan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.



## Pajak Dibayar di Muka PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Perusahaan					
PPN Masukan	404.030.611	178%	631.013.856	226.983.245	33.388.706
Entitas Anak					
PPN Masukan	73.509.562	54%	209.943.948	136.434.386	69.656.825
PPh pasal 28	(4.447.597)	-100%	-	4.447.597	-
PPh pasal 22	-	-	-	-	57.416
PPh pasal 23	-	-	-	-	2.281.528
Pajak Lainnya	-	-	-	-	184.648
<b>Total</b>	<b>473.092.576</b>	<b>129%</b>	<b>840.957.804</b>	<b>367.865.228</b>	<b>105.569.123</b>

**Aset Lancar Lainnya**

Aset lancar lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp36,01 miliar atau 127%, dari Rp28,27 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp64,28 miliar

pada tahun 2019. Aset lancar lainnya yang tercatat tersebut berasal dari uang muka proyek.

## Aset Lancar Lainnya PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Aset Lancar Lain-Lain	36.010.306	127%	64.277.125	28.266.819	13.396.769

**ASET TIDAK LANCAR**

Jumlah aset tidak lancar yang dibukukan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp34,59 triliun, meningkat sebesar Rp8,1 triliun atau 30,58% dari tahun 2018 sebesar Rp26,49 triliun. Pertumbuhan aset tidak lancar Angkasa Pura I didominasi oleh adanya pertumbuhan aset tetap yang tumbuh sebesar Rp7,98 triliun atau 30,56%, terdiri dari:

- pengurangan aset tetap tanah sebesar Rp5,55 miliar
- pertumbuhan aset tetap bangunan lapangan sebesar Rp862,05 miliar
- gedung-gedung sebesar Rp606,32 miliar

- peralatan sebesar Rp472,39 miliar
- kendaraan sebesar Rp16,39 miliar
- instalasi sebesar Rp73,22 miliar

Seluruh peningkatan aset tidak lancar terkait dengan pengembangan Bandara Syamsudin Noor dan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta.

## Aset Tidak Lancar Lainnya PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Estimasi Tagihan Pajak	112.711.091	-	112.711.091	-	83.863.138
Aset Pajak Tangguhan	7.337.726	17,83%	48.494.898	41.157.172	-
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka Jangka Panjang	(21.656.639)	63,10%	12.665.215	34.321.854	52.741.388
Investasi Jangka Panjang	9.156.873	9,10%	109.819.185	100.662.312	86.642.338
Properti Investasi, Bersih	1.015.442	0,79%	128.888.175	127.872.733	247.036.296
Aset Tetap	7.989.126.253	30,56%	34.127.910.920	26.138.784.667	18.627.786.052
Aset Tidak Berwujud	1.144.092	2,70%	43.466.476	42.322.384	48.998.474
Aset Tidak Lancar Lainnya	3.909.352	47,75%	12.096.899	8.187.547	6.226.600
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>8.102.743.650</b>	<b>30,58%</b>	<b>34.596.052.859</b>	<b>26.493.309.209</b>	<b>19.154.808.358</b>

## Estimasi Tagihan Pajak

Estimasi tagihan pajak tercatat sebesar Rp112,71 miliar sedangkan pada tahun sebelumnya tidak ada estimasi tagihan pajak.

## Estimasi Tagihan Pajak PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Perusahaan	99.018.495	-	99.018.495	-	-
Entitas Anak	13.692.596	-	13.692.596	-	-
<b>Total</b>	<b>112.711.091</b>	<b>-</b>	<b>112.711.091</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan mengalami peningkatan sebesar Rp7,33 miliar atau 17,83%, dari Rp41,16 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp48,49 miliar pada tahun 2019.

## Aset Pajak Tangguhan PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Perusahaan	-	-	-	-	51.980.772
Entitas Anak	7.337.186	17,83%	48.494.898	41.157.712	31.882.366
<b>Total</b>	<b>7.337.186</b>	<b>17,83%</b>	<b>48.494.898</b>	<b>41.157.712</b>	<b>83.863.138</b>

### Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka Jangka Panjang

Uang muka dan biaya dibayar di muka mengalami penurunan sebesar Rp21,65 miliar atau 63,10%, dari senilai Rp34,32 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp12,66 miliar pada tahun 2019. Penurunan uang muka dan biaya dibayar di muka jangka panjang didominasi oleh amortisasi biaya bantuan uang

sewa rumah kepada karyawan Perusahaan senilai Rp27,37 miliar dan penambahan uang muka kontribusi tetap Bandar Udara Sentani yang dikelola Angkasa Pura I kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan senilai Rp10,29 miliar.

Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka Jangka Panjang  
PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Uang Muka dan beban dibayar dimuka	(41.077.741)	-21,21%	152.624.840	193.702.581	124.744.410
Bagian Jangka Pendek	19.421.102	-12,19%	(139.959.625)	(159.380.727)	(72.003.022)
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>(21.656.639)</b>	<b>-63,10%</b>	<b>12.665.215</b>	<b>34.321.854</b>	<b>52.741.388</b>

### Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang mengalami peningkatan sebesar Rp9,16 miliar atau 9,10%, dari senilai Rp100,66 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp109,82 miliar pada tahun 2019. Faktor yang

menyebabkan naiknya investasi jangka panjang pada tahun 2019 yaitu pembelian Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank BEX104BCN7 dengan *carrying value* Rp10,07 miliar.

Investasi Jangka Panjang PT (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Obligasi	11.986.195	89,71%	25.347.300	13.361.105	45.682.461
Penyertaan Saham pada Entitas Asosiasi	(2.829.322)	(3,24%)	84.471.885	87.301.207	86.300.400
Kerja sama Operasi	-	-	-	-	341.938
<b>Total</b>	<b>9.156.873</b>	<b>9,10%</b>	<b>109.819.185</b>	<b>100.662.312</b>	<b>86.642.338</b>

### Properti Investasi - Bersih

Properti investasi mengalami peningkatan nilai bersih sebesar Rp1,01 miliar atau 0,79%, dari

senilai Rp127,87 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp128,88 miliar pada tahun 2019.

Properti Investasi – Bersih PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
<b>Biaya Perolehan</b>					
Tanah	4.936.470				
Bangunan/Lapangan		21,30%	28.115.530	23.179.060	13.994.221
<b>Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai</b>					
Bangunan/Lapangan	3.921.028	10,22%	42.272.143	38.351.115	66.547.821
<b>Nilai Buku</b>	<b>1.015.442</b>	<b>0,79%</b>	<b>128.888.175</b>	<b>127.872.733</b>	<b>247.036.296</b>

### Aset Tetap

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, PAngkasa Pura I mencatat aset tetap yang naik sebesar Rp7.989 miliar atau 30,56%, dari senilai Rp26,138 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp34,127 miliar pada tahun 2019. Peningkatan tersebut

karena adanya proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin dan proyek pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo.

Aset Tetap PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
<b>Biaya Perolehan</b>					
Tanah	(5.556.041)	-0,09%	6.245.109.933	6.250.665.974	795.978.770
Bangunan (lapangan)	1.183.198.296	17,34%	8.008.456.026	6.825.257.730	5.324.562.457
Gedung-Gedung	784.289.394	12,11%	7.261.245.424	6.476.956.030	5.456.264.612
Alat Perhubungan Udara	(11.780.379)	-41,45%	16.638.040	28.418.419	28.441.193
Kendaraan	71.912.733	14,44%	569.900.886	497.988.153	482.998.121
Instalasi	162.396.437	12,83%	1.428.106.778	1,65.710.341	1.089.651.001
Peralatan	876.461.857	16,02%	6.348.936.733	5.472.474.876	4.760.468.424
Aset dalam Konstruksi	5.964.402.860	98,51%	12.018.982.252	6.054.579.392	6.425.749.706
<b>Total</b>	<b>9,025,325,157</b>	<b>27,46%</b>	<b>41.897.376.072</b>	<b>32.872.050.915</b>	<b>24.364.114.284</b>
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai	1.036.198.904	15,39%	7.769.465.152	6.733.266.248	5.736.328.232
<b>Nilai Buku</b>	<b>7.989.126.253</b>	<b>30,56%</b>	<b>34.127.910.920</b>	<b>26.138.784.667</b>	<b>18.627.786.052</b>

### Aset Tak Berwujud

Angkasa Pura I mencatat aset tak berwujud yang mengalami peningkatan sebesar Rp1,15 miliar atau 2,70%, dari senilai Rp42,32 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp43,47 miliar pada tahun 2019. Aset tak berwujud perangkat lunak

mencakup biaya instalasi, implementasi dan jasa konsultasi pendukung perangkat lunak ERP. Beban amortisasi atas aset tak berwujud selama tahun 2019 dan 2018 seluruhnya dibebankan kepada beban operasional bandara.

Aset Tetap Tak Berwujud PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
<b>Biaya Perolehan</b>					
Perangkat lunak					
Perusahaan	6.254.052	7,79%	86.581.756	80.327.704	78.044.791
Entitas Anak	5.467.290	84,75%	11.918.089	6.450.799	4.313.532
Total	11.721.342	13,51%	98.499.845	86.778.503	82.358.323
<b>Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai</b>					
Perangkat lunak					
Perusahaan	9.679.548	22,27%	53.141.808	43.462.260	32.712.532
Entitas Anak	897.702	90,32%	1.891.561	993.859	647.317
Total	10.577.250	23,79%	55.033.369	44.456.119	33.359.849
<b>Total Aset Tak Berwujud Bersih</b>	<b>1.144.092</b>	<b>2,70%</b>	<b>43.466.476</b>	<b>42.322.384</b>	<b>48.998.474</b>

### Aset Tidak Lancar Lainnya

Aset tidak lancar mengalami peningkatan sebesar Rp3,91 miliar atau 47,75%, dari senilai

Rp8,19 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp12,10 miliar pada tahun 2019.

Aset Tidak Lancar PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Aset Tidak Lancar Lainnya	3.909.352	47,75%	12.096.899	8.187.547	6.226.600

### LIABILITAS

Liabilitas yang dibukukan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp26,81 triliun mengalami peningkatan sebesar Rp10,25 triliun atau 61,90% dibanding tahun sebelumnya.

Peningkatan liabilitas salah satunya disebabkan karena peningkatan liabilitas jangka panjang sebesar Rp11,68 triliun atas pinjaman bank jangka panjang.

## Liabilitas PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Liabilitas Jangka Pendek	(1.434.200.999)	18,83%	6.180.788.551	7.614.989.550	3.948.861.194
Liabilitas Jangka Panjang	11.683.553.299	130,66%	20.625.254.701	8.941.701.402	7.382.318.542
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>10.249.352.300</b>	<b>61,90%</b>	<b>26.806.043.252</b>	<b>16.556.690.952</b>	<b>11.650.348.788</b>

## LIABILITAS JANGKA PENDEK

Liabilitas jangka pendek tahun 2019 sebesar Rp6.181 miliar, mengalami penurunan 18,83% atau Rp1.434 miliar. Penurunan tersebut berasal dari penurunan

utang lain-lain sebesar Rp632,67 miliar atas pelunasan utang perolehan aset tetap sebesar Rp 464,78 miliar.

## Liabilitas Jangka Pendek PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Utang Usaha	(374.473.484)	(54,32%)	314.867.383	689.340.867	250.777.297
Utang Lain-lain	(632.669.369)	(16,12%)	3.292.812.136	3.925.481.505	1.232.182.579
Pendapatan Diterima Dimuka	(18.930.583)	(12,85%)	128.332.276	147.62.859	97.657.593
Beban Akrua	(89.751.509)	(6,36%)	1.322.288.034	1.412.039.543	1.379.558.217
Utang Pajak	32.266.598	8,21%	425.502.215	393.235.617	267.746.554
Utang Bank Jangka Pendek	52.379.600	49,59%	158.010.670	105.631.070	76.718.537
Bagian Jangka Pendek Pinjaman Jangka Panjang	(403.022.252)	(42,78%)	538.975.837	941.998.089	644.20.417
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>(1.434.200.999)</b>	<b>(18,83%)</b>	<b>6.180.788.551</b>	<b>7.614.989.550</b>	<b>3.948.861.194</b>

## Utang Usaha

Utang usaha mengalami penurunan sebesar Rp374 miliar atau 54,32%, dari senilai Rp689 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp314 miliar pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama

dari pelunasan utang usaha pihak ketiga atas konstruksi Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo senilai Rp307 miliar.

## Utang Usaha PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Pihak Ketiga	(332.574.858)	(56,60%)	255.047.300	587.622.158	239.965.248
Pihak Berelasi	(41.898.626)	(41,19%)	59.820.083	101.718.709	10.812.049
<b>Utang Usaha</b>	<b>(374.473.484)</b>	<b>(54,32%)</b>	<b>314.867.383</b>	<b>689.340.867</b>	<b>250.777.297</b>



### Utang Lain-Lain

Utang lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp632,67 miliar atau 16,12%, dari senilai Rp3,93 triliun pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp3,29

triliun pada tahun 2019. Penurunan tersebut berasal dari pelunasan utang dari perolehan aset tetap sebesar Rp 464,78 miliar.

Utang Lain-lain PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Perolehan Aset Tetap	(464.783.074)	(13,86%)	2.889.176.416	3.353.959.490	718.602.046
Jaminan Pelanggan	(126.834.446)	(34,23%)	243.728.335	370.562.781	367.904.347
Imbalan Kerja Tantiem	(25.000.000)	(25,00%)	75.000.000	100.000.000	40.869.678
Titipan Debitur	(8.822.327)	(28,29%)	22.364.293	31.186.620	47.694.000
Jaminan Vendor	(10.455.155)	(34,29%)	20.032.940	30.488.095	16.296.494
Titipan Pengelola	(4.470.744)	(18,98%)	19.078.496	23.549.240	21.652.326
Titipan BMKG dan DJU	(500.475)	(3,81%)	12.643.085	13.143.560	14.133.950
Utang luran	4.898.255	214,52%	7.181.591	2.283.336	4.525.375
Titipan/utang Lain-lain	3.298.597	1.069,64%	3.606.980	308.383	2.057.363
<b>Total</b>	<b>(632.669.369)</b>	<b>(16,12%)</b>	<b>3.292.812.136</b>	<b>3.925.481.505</b>	<b>1.232.182.579</b>

### Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka mengalami penurunan sebesar Rp19 miliar atau 12,85%, dari senilai Rp147 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp128 miliar pada tahun 2019. Terjadinya

penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan pendapatan domestik yang diterima di muka sebesar Rp18 miliar.

Pendapatan Diterima di Muka PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Pendapatan Domestik	(18.842.192)	(12,83%)	128.075.183	146.917.375	97.436.153
Pendapatan Internasional	(88.391)	(25,58%)	257.093	345.484	221.440
<b>Total</b>	<b>(18.930.583)</b>	<b>(12,85%)</b>	<b>128.332.276</b>	<b>147.262.859</b>	<b>97.657.593</b>

### Beban Akrua

Beban akrual mengalami penurunan sebesar Rp89,75 miliar atau 6,36% dari senilai Rp1,41 triliun di tahun 2018 menjadi sebesar Rp1,322 triliun. Turunnya beban akrual terutama dipicu oleh

penurunan pelayanan bandara sebesar Rp92,97 miliar meski pada beberapa pos akun lainnya terdapat peningkatan.

## Beban Akrua PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Pegawai	(42.158.708)	(8,87%)	432.869.194	475.027.902	393.061.087
Pelayanan bandara	(92.969.751)	(20,88%)	352.327.734	445.297.485	279.028.352
Umum	(41.541.992)	(15,12%)	233.257.539	274.799.531	446.439.085
Pemeliharaan	34.931.550	77,01%	80.289.872	45.358.322	90.923.458
Sewa	21.558.266	48,09%	66.389.530	44.831.264	56.046.321
Bunga	7.396.110	18,88%	46.576.249	39.180.139	35.157.897
Utilitas	8.525.051	31,34%	35.726.758	27.201.707	32.340.238
Pajak	8.618.819	42,89%	28.713.370	20.094.551	20.067.543
Persediaan	7.519.627	58,02%	20.480.106	12.960.479	9.778.110
Lain-Lain	(1.630.481)	(5,98%)	25.657.682	27.288.163	16.716.126
<b>Total</b>	<b>(89.751.509)</b>	<b>(6,36%)</b>	<b>1.322.288.034</b>	<b>1.412.039.543</b>	<b>1.379.558.217</b>

## Utang Pajak

Utang pajak mengalami peningkatan sebesar Rp32,27 miliar atau 8,21%, dari senilai Rp393,24 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp425,50 miliar pada tahun 2018. Peningkatan tersebut berasal dari PPh Pasal 4 (2) final sebesar Rp28,37

atas pekerjaan konstruksi pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin dan proyek Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kulon Progo.

## Utang Pajak PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Perusahaan					
PPN Masukan	2.881.676	1,97%	149.507.016	146.625.340	22.471.377
PPN Keluaran	8.645.193	10,49%	91.028.438	82.383.245	70.381.766
PPh Pasal 4 (2)	28.373.552	74,86%	66.273.593	37.900.041	3.407.953
PPh Pasal 25	1.202.291	7,83%	16.558.482	15.356.191	11.273.022
Pph Pasal 21	(14.202.551)	(65,71%)	7.412.242	21.614.793	14.883.079
PPh Pasal 23	245.520	7,13%	3.688.088	3.442.568	2.269.604
PPh Pasal 22	758.702	195,01%	1.147.767	389.065	329.191
<b>PPh Pasal 29</b>	<b>(363.867)</b>	<b>(100,00%)</b>	<b>-</b>	<b>363.867</b>	<b>48.619.955</b>

## Utang Pajak PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Entitas Anak					
PPN Keluaran	24.539.506	47,21%	76.519.623	51.980.117	38.635.869
PPH Pasal 25	(16.380.347)	(77,06%)	4.875.814	21.256.161	723.482
PPH Pasal 23	3.065.636	265,41%	4.220.704	1.155.068	1.448.143
Pph Pasal 21	483.238	29,62%	2.114.579	1.631.341	1.657.339
PPH Pasal 4 (2)	(411.484)	(28,82%)	1.016.195	1.427.679	5.370.398
PPH Pasal 29	(5.233.947)	(100,00%)	-	5.233.947	15.732.696
Pajak Lainnya	(1.336.520)	(53,97%)	1.139.674	2.476.194	30.505.004
<b>Total</b>	<b>32.266.598</b>	<b>8,21%</b>	<b>425.502.215</b>	<b>393.235.617</b>	<b>267.746.554</b>

## Utang Bank Jangka Pendek

Utang bank jangka pendek mengalami peningkatan sebesar Rp52,38 miliar atau 49,59%, dari senilai Rp105,63 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp158,01 miliar pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya penambahan utang bank dari entitas anak PT Angkasa Pura Properti dan PT Angkasa Pura

Suport, masing-masing sebesar Rp116 miliar kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dan Rp24 miliar kepada Bank Syariah Mandiri, serta terdapat realisasi pembayaran atas utang bank tersebut, masing-masing sebesar Rp52 miliar dan Rp36 miliar pada periode 2019.

## Liabilitas PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Entitas Anak					
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	64.070.000	148,31%	107.270.000	43.200.000	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	0,00%	26.431.070	26.431.070	41.000.000
PT Bank Syariah Mandiri	(11.690.400)	(32,47%)	24.309.600	36.000.000	35.718.537
<b>Total</b>	<b>52.379.600</b>	<b>49,59%</b>	<b>158.010.670</b>	<b>105.631.070</b>	<b>76.718.537</b>

### Bagian Jangka Pendek Pinjaman Jangka Panjang

Bagian jangka pendek dari utang bank jatuh tempo mengalami penurunan sebesar Rp403,02 miliar atau 42,78%, dari senilai Rp942 pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp538,98 miliar pada tahun 2019.

### LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang tahun 2019 sebesar Rp20,62 triliun, mengalami peningkatan Rp11,68 triliun atau 131% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp8,94 triliun. Naiknya liabilitas jangka panjang terutama dipengaruhi oleh kenaikan utang bank jangka panjang sebesar Rp11,34 triliun.

Liabilitas Jangka Panjang PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Utang Bank Jangka Panjang	11.338.211.282	211%	16.724.208.204	5.385.996.924	3.665.693.887
Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah	1.195.495	0,04%	2.994.896.323	2.993.700.828	2.992.474.960
Utang Jangka Panjang Lainnya	218.891.660	128%	389.420.515	170.528.854	174.905.265
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	134.898.231	45%	437.293.206	302.394.975	549.244.430
Liabilitas pajak tangguhan	(9.194.318)	-10%	79.885.504	89.079.821	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>11.684.002.350</b>	<b>131%</b>	<b>20.625.703.752</b>	<b>8.941.701.402</b>	<b>7.382.318.542</b>

### Utang Bank Jangka Panjang

Utang bank jangka panjang mengalami peningkatan sebesar Rp11.338 miliar atau 211%, dari senilai Rp5.385 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp16.724 miliar pada tahun 2019, yang disebabkan oleh:

- Adanya penarikan fasilitas pinjaman bank sebesar Rp11,4 triliun yang digunakan untuk pembayaran proyek pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo, perluasan terminal penumpang Bandara Juanda Surabaya, pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, perluasan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dan pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, yang berasal dari:
  - a. Pinjaman sindikasi sebesar Rp2,5 triliun,
  - b. Pinjaman baru dari Bank Syariah Mandiri, BTN, Bank Mandiri sebesar Rp5 triliun,
  - c. Pinjaman dari BRI Syariah, BTN dan SMI masing-masing sebesar Rp770 miliar, Rp1,5 triliun, dan Rp1,6 triliun selama tahun 2019.

Selain itu terdapat pula pinjaman jangka panjang dari Bank Mandiri, BRI, dan BNI yang direklasifikasi ke bagian jangka pendek karena telah jatuh tempo sebesar Rp483 miliar.

- Adanya kenaikan utang bank jangka panjang pada entitas anak, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Penambahan pada Angkasa Pura Suport sebesar Rp230 miliar kepada Bank BNI dan BSM disertai dengan adanya realisasi pembayaran sebesar Rp31 miliar pada bank yang sama.
  - b. Penambahan pada Angkasa Pura Properti sebesar Rp15,5 miliar kepada Bank Muamalat, serta terdapat realisasi pembayaran sebesar Rp1 miliar pada bank yang sama.

## Utang Bank Jangka Panjang PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Perusahaan	10.757.089.701	171%	17.032.599.228	6.275.509.527	4.243.683.310
Entitas Anak	213.761.562	343%	276.036.763	62.275.201	66.230.994
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(35.662.232)	364%	(45.451.947)	(9.789.715)	-
Dikurangi: Bagian Jangka Pendek Utang Bank Jangka Panjang	403.222.252	-43%	(538.975.837)	(941.998.089)	(644.220.417)
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>11.338.211.283</b>	<b>211%</b>	<b>16.724.208.207</b>	<b>5.385.996.924</b>	<b>3.665.693.887</b>

## Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah

Utang obligasi dan sukuk ijarah tumbuh positif sebesar Rp1,19 miliar atau 0,04%, dari senilai Rp2.993 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar

Rp2.994 miliar pada tahun 2019. Hal tersebut karena penurunan biaya pinjaman yang belum diamortisasi.

## Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Utang Obligasi	-	0%	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
Utang Sukuk Ijarah	-	0%	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Biaya Pinjaman yang belum Diamortisasi	1.195.495	-19%	(5.103.677)	(6.299.172)	(7.525.040)
<b>Total</b>	<b>1.195.495</b>	<b>0,04%</b>	<b>2.994.896.323</b>	<b>2.993.700.828</b>	<b>2.992.474.960</b>

## Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang jangka panjang lainnya pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp388,97 miliar pada tahun 2019. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp218,44 miliar atau 128%, dari senilai

Rp170,53 miliar pada tahun 2018. Peningkatan disebabkan terutama dari peningkatan jaminan pelanggan dari pihak ketiga (PT Dufrindo International) sebesar Rp200 miliar.

## Utang Bank Jangka Panjang PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Pendapatan diterima dimuka	(5.071.418)	-5%	100.971.111	106.042.529	111.100.092
Jaminan Pelanggan	225.760.443	385%	284.446.771	58.686.328	62.105.179
Jaminan Usaha Pemasok	(1.175.185)	-31%	2.571.343	3.746.528	-
Lainnya	(1.071.233)	-52%	982.236	2.053.469	1.699.994
<b>Total</b>	<b>218.442.607</b>	<b>128%</b>	<b>388.971.461</b>	<b>170.528.854</b>	<b>174.905.265</b>

### Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Liabilitas imbalan kerja karyawan mengalami peningkatan sebesar Rp134 miliar atau 45%, dari senilai Rp302,39 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp437,29 miliar pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi

oleh adanya peningkatan liabilitas imbalan kerja untuk Program Tunjangan Hari Tua sebesar Rp79,85 miliar dan Program Kesehatan Pensiun sebesar Rp58,18 miliar.

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Perusahaan					
Tunjangan Hari Tua	79.846.505	100%	79.846.505	-	200.657.269
Tunjangan Perumahan	1.800.240	9%	22.513.726	20.713.486	13.079.459
Penghargaan Pengabdian	9.814.764	77%	22.482.051	12.667.287	13.004.383
Kesehatan Pensiun	58.181.220	100%	58.181.220	-	47.965.739
Dana Pensiun	(23.176.263)	-9%	229.669.098	252.845.361	265.546.625
Sub Total	126.466.466	44%	412.692.600	286.226.134	540.253.475
Entitas Anak	8.431.765	52%	24.600.606	16.168.841	8.990.955
<b>Total</b>	<b>134.898.231</b>	<b>45%</b>	<b>437.293.206</b>	<b>302.394.975</b>	<b>549.244.430</b>

### Liabilitas Pajak Tanggungan

Liabilitas pajak tanggungan mengalami penurunan sebesar Rp9,19 miliar atau 10%, dari sebelumnya Rp89,08 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp79,89 miliar pada tahun 2019. Penurunan

tersebut terutama dari penurunan liabilitas pajak tanggungan dari Perusahaan sebesar Rp16,92 miliar dan kenaikan liabilitas pajak tanggungan dari entitas anak sebesar Rp7,73 miliar.

Liabilitas Pajak Tanggungan PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Perusahaan	(16.922.514)	-20%	68.729.872	85.652.386	-
Entitas Anak	7.728.197	225%	11.155.632	3.427.437	-
<b>Total</b>	<b>(9.194.317)</b>	<b>-10%</b>	<b>79.885.504</b>	<b>89.079.821</b>	<b>-</b>



**EKUITAS**

Pada tahun 2019, ekuitas Perseroan mencapai Rp15.980 miliar, mengalami peningkatan sebesar 6,16% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp15.052

miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh saldo laba PT Angkasa Pura I (Persero) yang tumbuh positif.

Ekuitas PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Modal Saham	-	-	6.414.412.000	6.414.412.000	6.414.412.000
Penyertaan Modal Negara (PMN)	-	-	22.963.207	22.963.207	255.096.706
Nilai Buku Aset tetap kenavigasian dari Penyertaan Modal Negara (PMN)	-	-	(37.004.793)	(37.004.793)	(269.138.292)
Akumulasi Penyusutan Aset tetap Kenavigasian dari BPYPDS	-	-	408.393.524	408.393.524	408.393.524
Dicadangkan	1.545.404.103	24,81	7.774.022.361	6.228.618.258	5.093.757.108
Belum Dicadangkan	(555.658.337)	(27,69)	1.451.359.978	2.007.018.315	1.418.577.150
Penghasilan Komprehensif Lain	(70.416.691)	(2.617,02)	(67.725.696)	2.690.722	74.064.750
Jumlah Ekuitas Yang Diatribusikan Ke Pemilik Entitas Induk	927.648.226	6,16	15.975.009.459	15.047.361.233	13.395.162.946
Kepentingan Non Pengendali	634.952	13,06	5.498.388	4.863.436	6.298.096
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>928.283.178</b>	<b>6,17</b>	<b>15.980.507.847</b>	<b>15.052.224.669</b>	<b>13.401.461.042</b>

**MODAL SAHAM**

Modal dasar 12.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham, Modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp6.414.412.000 ribu atau sebanyak 6.414.412 saham.

**PENYERTAAN MODAL NEGARA**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2018 tanggal 27 September 2018, Perusahaan menerima pengurangan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia dengan nilai buku sebesar Rp232,13 miliar untuk dijadikan penambahan PMN ke dalam modal Perum LPPNPI.

Penyertaan Modal Negara PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Saldo Awal	-	-	255.096.706	255.096.706	255.096.706
Pengurangan	-	-	(232.133.499)	(232.133.499)	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.963.207</b>	<b>22.963.207</b>	<b>255.096.706</b>

### PENGALIHAN ASET TETAP KENAVIGASIAN

Pengurangan modal pemerintah melalui pengalihan aset kenavigasian ke Perum LPPNPI berdasarkan surat dari Menteri BUMN No: S-46/MBU/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang persetujuan pengalihan aset tetap kenavigasian kepada Perum LPPNPI dengan nilai buku sebesar Rp270,83 miliar.

Pengaruh atas pengalihan aset tetap kenavigasian kepada Perum LPPNPI, sebagai berikut:

- Aset tetap kenavigasian yang telah dijadikan PMN pada Perusahaan diserahkan kembali sebesar nilai bukunya yaitu Rp270,83 miliar, sesuai dengan surat Perusahaan No.AP.1.6724/PL.07/2013/PD-B tanggal 28 November 2013 perihal revisi usulan pengalihan aset tetap kenavigasian kepada Perum LPPNPI, serta berdasarkan Berita Acara Perubahan Nilai Aset yang Diserahterimakan No.BA. 656/KU.21/2013/PDB tanggal 30 Desember 2013.
- BPYBDS berupa aset tetap kenavigasian yang diserahkan kembali kepada Pemerintah RI adalah sebesar nilai perolehan Rp731,28 miliar yang terdiri dari Bandara Juanda Surabaya sebesar Rp 69,31 miliar, Bandara Sultan Hasanuddin - Makassar Rp26,01 miliar, Bandara Adisutjipto - Yogyakarta Rp17,83 miliar dan Makassar Air Traffic Services Center (MASTC) Rp635,95 miliar dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp408,39 miliar.
- Penyesuaian atas aset kenavigasian yang diserahkan adalah hasil rapat klarifikasi terkait daftar aset hasil penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang diselenggarakan pada tanggal 17 Oktober 2014. Adapun aset yang dikoreksi dari daftar penyerahan adalah tanah di Surabaya sebesar Rp93,96 miliar, tanah di Kupang Rp377,63 miliar dan MATSC sebesar Rp1,221 triliun.

Pengalihan Aset Tetap Kenavigasian PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Nilai Buku Aset tetap Kenavigasian	-	-	(269.138.292)	(269.138.292)	(270.831.524)
Koreksi Penyerahan Aset	-	-	232.133.499	232.133.499	1.693.232
	-	-	(37.004.793)	(37.004.793)	269.138.292
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Kenavigasian</b>	-	-	<b>408.393.524</b>	<b>408.393.524</b>	<b>408.393.524</b>

### SALDO LABA

Saldo laba tahun 2019 adalah sebesar Rp9.225 miliar meningkat Rp989 miliar atau 12,02% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp8.235 miliar.

Saldo Laba PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
<b>Saldo Laba</b>					
Dicadangkan	1.545.404.103	24,81	7.774.022.361	6.228.618.258	5.093.757.108
Belum Dicadangkan	(555.658.337)	(27,69)	1.451.359.978	2.007.018.315	1.418.577.150
<b>Total</b>	<b>989.745.766</b>	<b>12,02</b>	<b>9.225.382.339</b>	<b>8.235.636.573</b>	<b>6.512.334.258</b>

**PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

Pada tahun 2019 penghasilan komprehensif lain sebesar Rp67,72 miliar, mengalami penurunan Rp 70,41 miliar atau 2617% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp2,69 miliar.

**KEPENTINGAN NONPENGENDALI**

Kepentingan nonpengendali tahun 2019 sebesar Rp5,50 miliar mengalami peningkatan 13,06% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp4,86 miliar.

**EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KE PEMILIK ENTITAS INDUK**

Ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk meningkat Rp 927,65 miliar atau 6,16% dari Rp15.052 miliar di tahun 2018 menjadi Rp15.980 miliar.

Kepentingan Non Pengendali PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
PT Angkasa Pura Logistik	354.619	10,17	3.840.523	3.485.904	4.056.768
PT Angkasa Puro Support	36.748	2,91	1.298.311	1.261.563	2.076.171
PT Angkasa Pura Properti	763	1,00	76.749	75.986	102.244
PT Angkasa Pura Hotel	242.821	607,31	282.804	39.983	62.913
<b>Total</b>	<b>634.951</b>	<b>13,06</b>	<b>5.498.387</b>	<b>4.863.436</b>	<b>6.298.096</b>



## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
<b>PENDAPATAN USAHA</b>					
Dicadangkan	1.545.404.103	24,81	7.774.022.361	6.228.618.258	5.093.757.108
Pendapatan Aeronautika	(137.712.258)	(2,69)	4.975.936.088	5.113.648.346	4.525.855.700
Pendapatan Non Aeronautika	248.170.550	7,28	3.655.609.514	3.407.438.964	2.668.491.834
<b>TOTAL</b>	<b>110.458.292</b>	<b>1,30</b>	<b>8.631.545.602</b>	<b>8.521.087.310</b>	<b>7.194.347.534</b>
Beban Operasional Bandara	128,185,961	4,07	3.280.187.024	3.152.001.063	(2.528.911.02)
Beban Pegawai	36,791,374	2,37	1.590.667.332	1.553.875.958	(1.301.466.53)
Beban Umum dan Administrasi	41,400,403	4,06	1.030.352.218	1.020.434.219	(1.301.384.42)
Beban Pemasaran	(6.694.413)	(18,42)	29.640.873	36.335.286	(75.155.175)
Penghasilan Lain-Lain	(91.947.251)	(41,95)	127.257.058	219.204.309	48.872.595
Beban Lain-lain	41.942.688	68,93	102.793.058	60.850.370	(61.810.882)
<b>LABA USAHA</b>	<b>(223.114.945)</b>	<b>(7,65)</b>	<b>2.725.162.155</b>	<b>2.916.794.696</b>	<b>1.974.492.094</b>
Penghasilan Keuangan	29.477.416	17,46	198.326.544	168.849.128	253.144.578
Beban Keuangan	595.135.773	224,47	860.269.934	265.134.161	(334.861.609)
Bagian Laba Entitas Asosiasi	11,04,143	450,79	8.952.137	2.552.006	228.467
<b>LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>	<b>(800.277.472)</b>	<b>(28,5)</b>	<b>2.054.266.628</b>	<b>2.823.061.696</b>	<b>183.003.530</b>
Beban Pajak Final	(18.396.256)	(14,36)	109.731.383	128.127.639	(103.506.155)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>	<b>(781.881.216)</b>	<b>(29,01)</b>	<b>1.944.535.245</b>	<b>2.694.934.057</b>	<b>1.789.497.375</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN, BERSIH</b>	<b>(228.190.223)</b>	<b>(33,12)</b>	<b>492.308.079</b>	<b>689.015.898</b>	<b>(369.144.323)</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>(553.690.993)</b>	<b>(27,60)</b>	<b>1.452.227.166</b>	<b>2.005.918.159</b>	<b>1.420.53.052</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>					
<b>Pos Yang Akan Direklasifikasikan Ke Laba Rugi</b>					
Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual	15.063.368	543,82	12.293.462	(2.769.906)	18.377.017

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya PT Angkasa Pura I (Persero)  
dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
<b>Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasikan Ke Laba Rugi</b>					
Rugi Komprehensif Entitas Asosiasi	(914.867)	(58,98)	(2.466.064)	(1.551.197)	2.261.085
Laba (rugi) Aktuarial Imbalan Kerja	(13.741.192)	(20,58)	(80.524.121)	(66.782.929)	110.823.515
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(407.305)</b>	<b>(0,57)</b>	<b>(70.696.723)</b>	<b>(71.104.028)</b>	<b>126.939.447</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>(552.723.326)</b>	<b>(928,58)</b>	<b>1.381.530.443</b>	<b>1.934.253.769</b>	<b>1.547.292.499</b>
<b>Laba Tahun Berjalan Yang dapat Diatribusikan Kepada:</b>					
Pemilik Entitas Induk	(555.658.337)	(27,69)	1.451.359.978	2.007.018.315	1.418.577.150
Kepentingan Non Pengendali	1.967.344	178,82	867.188	(1.100.156)	1.775.902
Total	(553.690.993)	(27,60)	1.452.227.166	2.005.918.159	1.420.353.052
<b>Total Penghasilan (rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Yang dapat Diatribusikan Kepada:</b>					
Pemilik Entitas Induk	(554.240.827)	(8,64)	1.380.673.460	1.935.914.287	1.545.516.597
Kepentingan Non Pengendali	1.957.139	177,90	856.983	(1.100.156)	1.775.902
Total	(552.283.688)	-28,56	1.381.530.443	1.934.814.131	1.547.292.499
<b>Pos Yang Akan Direklasifikasikan Ke Laba Rugi</b>	<b>(86.627)</b>	<b>(27,69)</b>	<b>226.265</b>	<b>312.892</b>	<b>221.155</b>
Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual	(78.197)	(25,75)	225.458	303.655	212.696

## PENDAPATAN USAHA

Dibandingkan tahun 2018, realiasi pendapatan usaha tahun 2019 mengalami peningkatan tipis senilai Rp110,45 Miliar, akan tetapi secara performa jumlah tersebut masih di bawah RKAP sebesar 13,69% atau Rp1,37 triliun. Tidak tercapainya realisasinya pendapatan usaha diakibatkan oleh tidak terelasinya pengambilalihan Bandara Labuan Bajo, Bandara

Syukuran Aminuddin Amir Luwuk, Bandara Sentani Jayapura, dan Bandara APT Pranoto Samarinda yang pendapatannya telah dianggarkan sejak Januari 2019. Penyebab lainnya juga adalah adanya kenaikan tarif tiket pesawat yang berimbas kepada penurunan minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi udara.

Pendapatan Usaha PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Pendapatan Aeronautika	(137.712.258)	(2,69)	4.975.936.088	5.13.648.346	4.525.855.700
Pendapatan Non Aeronautika	248170.550	7,28	3.655.609.514	3.407.438.964	2.668.491.834
<b>Jumlah Pendapatan Usaha</b>	<b>110458.292</b>	<b>1,30</b>	<b>8.631.545.602</b>	<b>8.521.087.310</b>	<b>7.194.347.534</b>

## PENDAPATAN AERONAUTIKA

Pendapatan aeronautika mengalami penurunan sebesar Rp137,71 miliar atau 2,69%, dari Rp5.113 miliar di 2018 menjadi Rp4,975 miliar pada tahun 2019. Penurunan ini dipengaruhi oleh kenaikan

tarif tiket pesawat udara yang mengakibatkan turunnya minat konsumen untuk menggunakan moda transportasi udara.

Pendapatan Usaha PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
PJP4U (Pelayanan Jasa dan Pendaratan dan Penyimpanan Pesawat Udara/PJP4U)	172.749.303	23,99	892.877.554	720.128.251	574.447.311
PJP2U (Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara)/PJP2U	(314.787.318)	(8,18)	3.534.959.602	3.849.746.920	3.01.969.489
Pemakaian Aviobridge	54.599.007	30,59	233.100.869	178.501.862	137.776.838
Pemakaian Counter dan Conveyor	14.866.448	11,01	149.868.725	135.002.277	113.527.631
Pemakaian Baggage Handling System (BHS)	(9.791.560)	(99,95)	5.280	9.796.840	58.063.920
PJKP2U (Pelayanan jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara)	(55.348.138)	(25,10)	165.124.057	220.472.195	240.070.511
<b>Jumlah Pendapatan Aeronautika</b>	<b>(137.712.258)</b>	<b>(2,69)</b>	<b>4.975.936.088</b>	<b>5.113.648.346</b>	<b>4.525.855.000</b>



**PENDAPATAN NONAERONAUTIKA**

Pendapatan nonaeronautika mengalami kenaikan sebesar Rp248,17 miliar atau 7,28%, dari Rp3,41 triliun di 2018 menjadi Rp 3,65 triliun

di 2019. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan pendapatan konsesi dan jasa pergudangan.

Pendapatan Non-aeronautika PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Pemakaian Sarana Non-Aeronautika	(26.944.192)	(6,02)	420.492.455	447.436.647	335.052.570
Pendapatan Sewa	65.061.899	9,34	761.535.330	696.473.431	577.628.369
Pemakaian Ruang Tunggu	(73.035.555)	(34,56)	138.296.643	211.332.198	114.123.735
Pendapatan Konsesi	153.310.493	9,86	1.707.521.693	1.554.211.200	1.267,67.188
Event dan Promosi	6.368.609	20,37	37.636.364	31.267.755	35.066.205
Pergudangan dan Logistik	66.723.887	29,12	295.897.412	229.173.525	201.756.729
Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan	6.353.780	7,71	88.756.461	82.402.681	67.654.833
Jasa Lainnya	50.331.630	32,44	205.473.157	155.141.527	70.042.205
<b>Jumlah Pendapatan Non Aeronautika</b>	<b>248.170.550</b>	<b>7,28</b>	<b>3.655.609.514</b>	<b>3.407.438.964</b>	<b>2.668.491.834</b>

**BEBAN USAHA**

Beban usaha mengalami kenaikan sebesar Rp 302,09 miliar atau 5,39%, dari Rp5.604 miliar di 2018 menjadi Rp 5.906 miliar di 2019. Kenaikan tersebut terutama berasal kenaikan beban operasional

bandara karena adanya pengoperasional bandara terminal baru Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang dan sebagian terminal Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo.

Beban Usaha PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Beban Operasional Bandara	128.185.961	4,07	3.280.187.024	3.152.001.063	2.528.911.022
Beban Pegawai	36.791.374	2,37	1.590.667.332	1.553.875.958	1.301.466.536
Beban Umum dan Administrasi	9.917.999	0,97	1.030.352.218	1.020.434.219	1.301.384.420
Beban Pemasaran	(6.694.413)	(18,42)	29.640.873	36.335.286	75.155.175
Beban (Penghasilan) Lain-lain	(133.889.939)	(84,55)	(24.464.000)	(158.353.939)	12.938.287
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>302.090.833</b>	<b>5,39</b>	<b>5.906.383.447</b>	<b>5.604.292.614</b>	<b>5.219.855.440</b>

## LABA USAHA

Laba usaha mengalami penurunan sebesar Rp191,63 miliar atau 6,57%, dari Rp2.916 miliar di 2018 menjadi Rp2.725 miliar di 2019. Penurunan tersebut sejalan

dengan adanya penurunan minat konsumen akibat dari kenaikan harga tiket pesawat udara.

Laba Usaha PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Pendapatan Usaha	110.458.292	1,30	8.631.545.602	8.521.087.310	7.194.347.534
Beban Usaha	302.090.833	5,39	5.906.383.447	5.604.292.614	5.219.855.440
<b>Laba Usaha</b>	<b>(191.632.541)</b>	<b>(6,57)</b>	<b>2.725.162.155</b>	<b>2.916.794.696</b>	<b>1.974.492.094</b>

## PENGHASILAN KEUANGAN

Penghasilan keuangan Angkasa Pura I tahun 2019 tercatat sebesar Rp198,32 miliar, meningkat Rp29,5 miliar atau 17,46% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp168,85 miliar. Kenaikan tersebut terutama berasal

dari penghasilan bunga deposito yang naik cukup signifikan yaitu Rp23,9 miliar atau 17,58%.

Penghasilan Keuangan PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Bunga Deposito	23.908.306	17,58	159.922.623	136.014.317	177.190.874
Jasa Giro	(629.910)	(2,87)	21.91.949	21.921.859	68.48.786
Bunga Obligasi dan Reksa Dana	6.199.020	56,80	17.111.972	10.12.952	7.504.918
<b>Total</b>	<b>29.477.416</b>	<b>17,46</b>	<b>198.326.544</b>	<b>168.849.128</b>	<b>253.144.578</b>

## BEBAN KEUANGAN

Beban keuangan tahun 2019 sebesar Rp860,26 miliar meningkat Rp595,13 miliar atau 224,47% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp265,13 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan karena

berhentinya kapitalisasi bunga pinjaman atas proyek pengembangan Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang dan kenaikan pencairan pinjaman jangka panjang.

Beban Keuangan PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Bunga Pinjaman Bank dan Obligasi	594.438.647	226,39	857.007.177	262.568.530	333.007.634
Beban Administrasi bank	697.126	27,17	3.262.757	2.565.631	1.853.975
<b>Total</b>	<b>595.135.773</b>	<b>224,47</b>	<b>860.269.934</b>	<b>265.134.161</b>	<b>334.861.609</b>

### BAGIAN LABA ENTITAS ASOSIASI

Bagian laba entitas asosiasi tahun 2019 sebesar Rp8,95 miliar, menurun Rp11,5 miliar dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp2,55 miliar. Penurunan tersebut

disebabkan karena serapan rugi entitas asosiasi sepanjang tahun 2019.

Bagian Laba Entitas Asosiasi PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
PT Gapura Angkasa	(8.434.698)	(125,00)	(1.687.127)	6.747.571	5.480.053
PT Jasa Marga Bali Tol	(3.069.445)	(73,16)	(7.265.010)	(4.195.565)	(5.251.586)
<b>Total</b>	<b>(11.504.143)</b>	<b>(450,79)</b>	<b>(8.952.137)</b>	<b>2.552.006</b>	<b>228.467</b>

### LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan mengalami penurunan sebesar Rp768,8 miliar atau 27,23%, dari Rp2,823 miliar di 2018 menjadi

Rp2.054 miliar di 2019. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan laba usaha.

Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Laba Usaha	(191.632.541)	(6,57)	2.725.162.155	2.916.794.696	1.974.492.094
Pendapatan (Beban) Non Usaha	(577.162.500)	615,75	(670.895.527)	(93.733.027)	(81.488.564)
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>(768.795.041)</b>	<b>(27,23)</b>	<b>2.054.266.628</b>	<b>2.823.061.669</b>	<b>1.893.003.530</b>

### BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN, BERSIH

Beban pajak penghasilan badan bersih tahun 2019 sebesar Rp492,30 miliar, menurun 28,55% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp689,02 miliar.

Penurunan tersebut berasal dari sejalan dengan penurunan laba sebelum pajak penghasilan.

Beban Pajak Penghasilan Badan, Bersih, PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Pajak Kini	(52.507.048)	(9,82)	482.279.914	534.786.962	446.980.943
Pajak Tangguhan	(144.200.771)	(93,50)	10.028.165	154.228.936	(77.836.620)
<b>Beban pajak penghasilan Badan, Bersih</b>	<b>(196.707.819)</b>	<b>(28,55)</b>	<b>492.308.079</b>	<b>689.015.898</b>	<b>369.144.323</b>

## LABA TAHUN BERJALAN

Laba tahun berjalan mengalami penurunan sebesar Rp553,7 miliar atau 27,6%, dari Rp2,00 triliun di 2018

menjadi Rp1,45 triliun di 2019 yang disebabkan oleh menurunnya laba sebelum pajak penghasilan badan.

Laba Tahun Berjalan PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(768.795.041)	(27,23)	2.054.266.628	2.823.061.669	1.893.003.530
Beban Pajak Final	(18.396.229)	(14,36)	109.731.383	128.127.612	103.506.155
Beban pajak penghasilan Badan, Bersih	(196.707.819)	(28,55)	492.08.079	689.015.898	369.144.323
<b>Laba tahun Berjalan</b>	<b>(553.690.993)</b>	<b>(27,60)</b>	<b>1.452.227.166</b>	<b>2.005.918.159</b>	<b>1.420.353.052</b>

## LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami penurunan sebesar Rp555,7 miliar atau 27,69% dari Rp2,00 triliun di 2018 menjadi Rp1,451 triliun di 2019 dan laba tahun berjalan yang

dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali mengalami kenaikan sebesar Rp1,97 miliar atau 178,8% dari (rugi) Rp1,10 miliar di 2018 menjadi Rp867,18 juta (untung) di 2019.

Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	(555.658.337)	(27,69)	1.451.359.978	2.007.018.315	1.418.577.150
Laba tahun berjalan yang diatribusikan Kepentingan Non Pengendali	1.967.344	178,82	867.188	(1.100.156)	1.775.902
<b>Jumlah</b>	<b>(553.690.993)</b>	<b>(27,60)</b>	<b>1.452.227.166</b>	<b>2.005.918.159</b>	<b>1.420.353.052</b>

## PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK

Penghasilan (rugi) komperensif lain tahun berjalan setelah pajak mengalami penurunan sebesar Rp407,3 juta atau menurun 0,57% dari kerugian

komprehensif sebesar Rp71,10 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp70,6 miliar pada tahun 2019.

## Penghasilan (Rugi) Komprehensif PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>					
Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual	15.063.368	(543,82)	12.293.462	(2.769.906)	18.377.017
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>					
Rugi Komprehensif Entitas Asosiasi	(914.867)	(58,98)	(2.466.064)	(1.551.197)	(2.261.085)
Laba (rugi) Aktuarial Imbalan Kerja	(13.741.196)	(20,58)	(80.524.121)	(66.782.925)	110.823.515
<b>Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak</b>	<b>407.305</b>	<b>(0,57)</b>	<b>(70.696.723)</b>	<b>(71.104.028)</b>	<b>126.939.447</b>

### PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan mengalami penurunan sebesar Rp553,3 miliar atau 28,6% dari Rp1,934 miliar

pada tahun 2018 menjadi Rp1,381 miliar pada tahun 2019, yang terjadi sejalan dengan penurunan laba komprehensif tahun berjalan.

#### Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Pemilik Entitas Induk	(555.240.827)	(28,68)	1.380.673.460	1.935.914.287	1.545.516.597
Kepentingan Non Pengendali	1.957.139	(177,90)	856.983	(1.100.156)	1.775.902
<b>Penghasilan (rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Yang dapat Diatribusikan</b>	<b>(553.283.688)</b>	<b>(28,60)</b>	<b>1.381.530.443</b>	<b>1.934.814.131</b>	<b>1.547.292.499</b>

### LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

Total laba bersih per saham dasar mengalami penurunan sebesar Rp86.627 atau 27,69% dari Rp312.892 di tahun 2018 menjadi Rp226.265 di tahun

2019. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan laba tahun berjalan.

#### Laba Bersih per Saham Dasar PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Laba bersih per saham dasar	(86.627)	(27,69)	226.265	312.892	221.155

### LABA BERSIH PER SAHAM DILUSIAN

Total laba bersih per saham dilusian mengalami penurunan sebesar Rp78.197 atau 25,75% dari

Rp303.655 di 2018 menjadi Rp225.458 di 2019 sejalan dengan penurunan laba tahun berjalan.

Laba Bersih Per Saham Dilusian PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Laba bersih per saham dilusian	(78.197)	(25,75)	225.458	303.655	212.696

### LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Angkasa Pura I memiliki total arus kas yang tumbuh positif sebesar Rp2.362 miliar pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan keuangan

Angkasa Pura I yang baik dalam menunjang keberlangsungan usaha di masa depan.

Arus Kas PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(1.479.188.732)	(48,84%)	1.549.272.091	3.028.460.823	1.479.077.570
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(3.943.521.521)	67,38%	(9.795.788.494)	(5.852.266.973)	(1.712.940.714)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	8.808.740.124	496,81%	10.581.807.080	1.773.066.956	(481.794.326)
Dampak Bersih Perubahan Nilai Tukar atas Kas dan Setara Kas	(27.267.913)	(50,71%)	26.499.115	53.767.028	(34.471.560)
Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas	3.358.761.958	336,90%	2.361.789.792	(996.972.166)	(750.129.030)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	(996.972.166)	(24,05%)	3.149.113.800	4.146.085.966	4.896.214.996
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	2.361.789.792	75,00%	5510.903.592	3.149.113.800	4.146.085.966

### ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2019 sebesar Rp1.549 miliar menurun 48.8% atau Rp1.479 miliar dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp3.028 miliar. Hal ini terutama

disebabkan meningkatnya pembayaran kepada pemasok sebesar Rp852 miliar yang diikuti dengan pembayaran bunga sebesar Rp611 miliar.



Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan PT Angkasa Pura I (Persero)  
dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Penerimaan dari pelanggan	107.911.909	1,29	8.492.447.622	8.384.535.713	7.651.927.102
Pembayaran Kas Kepada Pemasok, Kontraktor, Pihak Ketiga Lainnya dan Karyawan	(852.097.043)	(19,60)	(5.199.390.450)	(4.347.293.407)	(4.559.452.804)
Pembayaran beban bunga	(610.784.435)	232,62	(873.352.965)	(262.568.530)	(334.861.609)
Pendapatan Bunga	29.477.412	17,46	198.326.544	168.849.132	160.711.289
Pembayaran Pajak	(153.696.575)	16,80	(1.068.758.660)	(915.062.085)	(1.439.246.408)
<b>Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>(1.479.188.732)</b>	<b>(48,84)</b>	<b>1.549.272.091</b>	<b>3.028.460.823</b>	<b>1.479.077.570</b>

#### ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI

Angkasa Pura I mencatat kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2019 sebesar Rp9.795 miliar meningkat 67,38% atau Rp3.943 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp5,85

triliun. Hal ini seiring dengan penambahan investasi pada perusahaan baik pada pengembangan bandara dan investasi keuangan.

Arus Kas untuk Aktivitas Investasi PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Pengeluaran untuk Investasi Jangka Pendek	(116.754.725)	(16,44)	(187.755.531)	(71.000.806)	(15.817.801)
Pengeluaran untuk Investasi Jangka Panjang	1.374.911	(10,29%)	(11.986.194)	(13.361.105)	(105.045.372)
Penambahan Aset Tetap	(3.828.141.707)	(66,37)	(9.596.046.769)	(5.767.905.062)	(1.586.664.397)
Penambahan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	(5.413.144)
<b>Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(3.943.521.521)</b>	<b>(67,38)</b>	<b>(9.795.788.494)</b>	<b>(5.852.266.973)</b>	<b>(1.712.940.714)</b>

#### ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun 2019 sebesar Rp10,6 triliun meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1,77 triliun.

Hal ini disebabkan adanya pencairan dana pinjaman untuk pengelolaan bandara sebesar Rp11 triliun.

## Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang	9.041.099.482	329,13%	11.788.080.717	2.746.981.235	-
Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang	(54.461.146)	(7,89%)	(744.659.425)	(690.198.279)	(341.794.326)
Pembayaran Dividen	(177.898.212)	(62,70%)	(461.614.212)	(283.716.000)	(140.000.000)
<b>Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<b>8.808.740.124</b>	<b>496,81%</b>	<b>10.581.807.080</b>	<b>1.773.066.956</b>	<b>(481.794.326)</b>

## TINGKAT KESEHATAN PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

Pada tahun 2019, Angkasa Pura I memperoleh predikat sehat kategori "AA" dengan nilai sebesar 90,50. Salah satu faktor utama kinerja tersebut yaitu pencapaian tingkat profitabilitas berada di atas target. Adapun realisasi kinerja Angkasa Pura I yang diukur atau dinilai dari 3 (tiga) aspek tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan  
Kinerja aspek Keuangan perusahaan Tahun 2019 tercapai sebesar 43.
2. Kinerja Operasional  
Kinerja operasional diukur berdasarkan SK. Dirjen Perhubungan Udara No. SKEP/284/X/1999 dan beberapa target yang diputuskan di dalam RUPS RKAP, yang berisi target *Customer Satisfaction*

*Index* (CSI) tingkat pelayanan terminal, dan pengembangan fasilitas dan investasi, Tahun 2019 tercapai dengan skor 33,50.

3. Kinerja Administrasi  
Kinerja administrasi perusahaan Tahun 2019 terealisasi dengan skor 14,00 yang meliputi ketepatan laporan perhitungan laporan tahunan, rancangan anggaran, laporan periodik dan kinerja PKBL.

Perhitungan tingkat kesehatan Angkasa Pura I tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kesehatan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

No	Indikator	Bobot	Satuan	Nilai 2019		Skor 2019	
				RKAP	Realisasi	RKAP	Realisasi
<b>A. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>							
1	Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15	%	39.71	57.77	15.00	15.00
2	Imbalan Investasi (ROI)	10	%	11.89	12.37	6.00	7.00
3	Rasio Kas	3	%	92.31	99.93	3.00	3.00
4	Ratio Lancar	4	%	144.25	132.52	3.00	3.00
5	Collection Period	4	Hari	26	22	4.00	4.00
6	Perputaran Persediaan	4	Hari	4	3	4.00	4.00
7	Perputaran Total Asset	4	%	29.44	28.46	1.00	1.00

Tabel Tingkat Kesehatan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

No	Indikator	Bobot	Satuan	Nilai 2019		Skor 2019	
				RKAP	Realisasi	RKAP	Realisasi
8	Ratio Modal Sendiri	6	%	38.01	37.35	6.00	6.00
<b>JUMLAH</b>		<b>50</b>				<b>42.00</b>	<b>43.00</b>
<b>B. ASPEK OPERASIONAL</b>							
1	Customer Satisfaction Index (CSI)	15	Skala Likert (1-5)	4.37	4.48	15.00	15.00
2	Tingkat Pelayanan						
	a. Pemeriksaan Security di Terminal						
	i Kondisi Normal	2.5	%	3.00	0.58	2.50	2.50
	ii Kondisi Khusus	2.5	%	8.00	2.31	2.50	2.50
	b. Fasilitas Umum						
	1) Kebersihan Toilet						
	Bandara DPS, SUB, UPG, BPN	1.5	Bintang	4	3	1.50	1.20
	Bandara MDC, JOG, SOC, SRG, LOP, KOE, AMQ, BIK, BDJ	1.0	Bintang	3	2	1.00	0.80
	2) Tingkat Kesejukan Ruang	2,5	%	95.00	98.00	2.50	2.50
3	Pengembangan Fasilitas dan Investasi						
	a. Pencapaian Tingkat daya serap program	5	%	100.00	78.30	5.00	4.00
	b. Pencapaian fisik investasi	5	%	75.00	77.88	5.00	5.00
<b>JUMLAH</b>		<b>35</b>				<b>35.00</b>	<b>33.50</b>
<b>B. ASPEK OPERASIONAL</b>							
1	Laporan Perhitungan tahunan	3	Waktu	15/02/2019	29/03/2019	3.00	3.00
2	Rancangan RKAP 2020	3	Waktu	31/10/2019	30/10/2019	3.00	3.00
3	Laporan Periodik	3	Waktu	Maks Tgl 31	Maks Tgl 31	3.00	3.00
4	Kinerja PUKK						
	Efektivitas penyaluran dana	3	%	98.36	97.70	3.00	3.00
	Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman	3	%	80.00	59.75	3.00	3.00
	Jumlah	15				15.00	14.00
	TOTAL A+B+C	100				92.00	90.50
<b>SKOR</b>		<b>TINGKAT KESEHATAN</b>				<b>Sehat (AA)</b>	
		<b>TARGET TINGKAT KESEHATAN</b>				<b>Sehat (AA)</b>	

## RASIO KEUANGAN

Secara umum, Angkasa Pura I memiliki rasio keuangan yang baik sepanjang tahun 2019 meski terdapat beberapa penurunan rasio keuangan. Angkasa Pura I dapat mempertahankan rasio laba terhadap aset di kisaran 68%, sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya. Kemudian, likuiditas juga baik dengan rasio lancar mencapai 99% pada tahun 2019, jauh lebih baik dari likuiditas

tahun 2018. Meski demikian, Angkasa Pura I perlu mewaspadaai naiknya rasio hutang baik terhadap aset maupun terhadap modal, yang disebabkan oleh penggunaan dana pihak ketiga untuk investasi yang dilakukan Angkasa Pura I pada tahun periode pelaporan.

Rasio Keuangan PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir

Uraian	Pertumbuhan 2019	2019	2018	2017
<b>RENTABILITAS</b>				
Rasio Laba Operasi	(3,02%)	31,57%	34,23%	27,45%
Laba Terhadap Aset	(2,95%)	3,39%	6,35%	5,74%
Rasio Operasi	1,45%	68,71%	67,63%	71,94%
<b>LIKUIDITAS</b>				
Rasio Lancar	65,34%	132,52%	67,18%	106,68%
Rasio Kas	52,30%	99,93%	47,63%	138,17%
<b>SOLVABILITAS</b>				
Rasio Hutang Terhadap Aset	10,27%	62,65%	52,38%	47,11%
Rasio Hutang Terhadap Modal	57,75%	167,74%	109,99%	86,93%
Rasio Hutang Terhadap Aset Tetap	15,20%	78,55%	63,34%	62,54%

# Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

## KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PENDEK

Berdasarkan hasil pengukuran, kemampuan Perseroan dalam melunasi kewajiban jangka pendek sangat baik, ini artinya Perseroan dapat membayar kewajiban lancarnya. Perkembangan kondisi likuiditas Perseroan selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan baik rasio lancar maupun rasio kas. Untuk rasio lancar tahun 2019 mengalami

kenaikan sebesar 97,26% dibandingkan dengan tahun 2018. Sedangkan, tingkat rasio kas tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 109,80% dibandingkan dengan tahun 2018. Kenaikan rasio likuiditas tersebut disebabkan adanya pencairan pinjaman dari bank oleh Angkasa Pura I.

Likuiditas PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir

Uraian	Pertumbuhan 2019	2019	2018	2017
Rasio Kas	52,30	99,93	47,63	106,68
Rasio Lancar	65,34	132,52	67,18	138,17

## KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PANJANG

Hasil pengukuran rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan Angkasa Pura I dalam melunasi seluruh utangnya di tahun 2019 tetap terjaga dalam batas aman. Rasio utang terhadap aset di tahun 2019 meningkat sebesar 19,61% dan untuk rasio hutang terhadap aset tetap di tahun 2019 tumbuh positif sebesar 24%. Walaupun terdapat peningkatan rasio tersebut namun secara

keseluruhan Perseroan masih mampu untuk memenuhi kewajibannya dengan aset yang dimiliki baik dari aset tetap maupun keseluruhan aset Perusahaan. Kemudian, rasio hutang terhadap modal di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 52,50%, hal ini disebabkan oleh pencairan pinjaman dari bank oleh Angkasa Pura I.

Solvabilitas PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir

Uraian	Pertumbuhan 2019	2019	2018	2017
Rasio Utang Terhadap Aset	10,27	62,65	52,38	47,11
Rasio Utang Terhadap Modal	57,75	167,74	109,99	86,93
Rasio Utang Terhadap Aset Tetap	15,20	78,54	63,34	62,54

## KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DARI EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN

Obligasi I Angkasa Pura I saat ini mendapatkan peringkat "AAA" sedangkan untuk Sukuk Ijarah mendapatkan peringkat "AAA<sub>sy</sub>" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat

tersebut menunjukkan kemungkinan pembayaran tepat waktu atas jumlah pokok dan bunga/cicilan imbalan.

## Peringkat Efek-efek yang Diterbitkan PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir

Keterangan	Peringkat		
	2019	2018	2017
Obligasi I PT Angkasa Pura I (Persero)	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo
Sukuk Ijarah	AAAsy oleh Pefindo	AAAsy oleh Pefindo	AAAsy oleh Pefindo

## KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Hasil pengukuran tingkat kolektibilitas Angkasa Pura I menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kolektibilitas piutang di tahun

2019 mencapai 20 hari, mengalami percepatan 1 hari dibandingkan kolektibilitas tahun 2018 yaitu sebanyak 21 hari.

## Kolektibilitas Piutang PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir

Uraian	Pertumbuhan 2019	2019	2018	2017
		Kolektibilitas Piutang	5	20 hari

## STRUKTUR MODAL

## KEBIJAKAN MANAJEMEN DAN DASAR PEMILIHAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Kebijakan manajemen atas struktur modal Angkasa Pura I sangat dipengaruhi oleh strategi pengembangan bandara yang sedang masif dilakukan. Saat ini jumlah liabilitas Angkasa Pura I lebih besar dari jumlah ekuitas dengan total liabilitas senilai Rp20,62 triliun sedangkan ekuitas senilai Rp15,98 triliun. Struktur modal yang memiliki liabilitas lebih besar dari ekuitas terkait erat dengan kebijakan investasi pengembangan

bandara baru di Yogyakarta, Semarang, Makassar, dan Banjarmasin.

## RINCIAN STRUKTUR MODAL

Struktur modal Angkasa Pura I tahun 2019 yaitu 62,65% berasal dari liabilitas dan 37,35% berupa ekuitas. Komposisi ini mengalami perubahan jika dibandingkan dengan 2018 yang memiliki struktur modal dan liabilitas berimbang sebesar 47,62% dan 52,38%. Meningkatnya nilai liabilitas disebabkan karena adanya pencairan pinjaman dari bank oleh Angkasa Pura I.

## Rincian Struktur Modal PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	Struktur Modal			Persentase dari Total Modal		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
Liabilitas Jangka Pendek	6,180.788.551	7.614.989.550	3,948.861.194	8,88%	24,09%	15,97%
Liabilitas Jangka Panjang	20.625.254.701	8.941.701.402	7.382.318.542	29,64%	28,29%	29,85%
Total Liabilitas	26.806.043.252	16.556.690.952	11.331.179.736	38,52%	52,38%	45,81%
Ekuitas	15.980.507.847	15.052.224.669	13.401.461.042	22,96%	47,62%	54,19%
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>42.786.551.099</b>	<b>31.608.915.621</b>	<b>24.732.640.778</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



## IKATAN MATERIAL TERKAIT INVESTASI BARANG MODAL

### NAMA PIHAK YANG MELAKUKAN IKATAN

Per 31 Desember tahun 2019, Angkasa Pura I memiliki ikatan investasi barang modal, dengan tujuan utama yaitu pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas di

bandara. Berikut ini tabel yang menyajikan data perikatan yang telah dilakukan Angkasa Pura I untuk barang modal.

Ikatan Investasi Barang Modal Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Uraian	Pertumbuhan 2019
<b>PELAYANAN</b>	
Penggantian 4 Unit Garbarata di Terminal Domestik	PT Bukaka Teknik Utama
Penambahan Jalur BHS untuk <i>Check-in Promenade</i>	PT Jalin Mitra Dyanda
Pengadaan dan Pemasangan <i>Video Wall Fids</i>	PT INALIX
Integrasi PBX di Lingkungan Angkasa Pura I	PT DATASCRIP
Implementasi <i>Business Intelligence</i>	PT CYBERTREND INTRABUANA
Pengadaan Kursi Tunggu Terminal 1 Bandara Juanda Surabaya	CV Putra Wijaya
Pengadaan dan Pemasangan Lampu LED untuk Peningkatan Intensitas Cahaya di Gedung Terminal	PT Angkasa Pura Suport
Perluasan Kanopi Terminal Kargo	PT Cipta Agora Lestari
Pengadaan dan Pemasangan AC Floor Standing dan Air Curtain di Gedung Terminal Bandara Sultan Hasanuddin - Makassar	PT Nusa Teknik Cemerlang
Pengadaan dan Pemasangan <i>Chiller</i>	PT Rasindo Tata Laksana
Pengadaan dan Pemasangan Trafo 500 kVA 6 Kv di Gardu Pompa	PT Deqha Elcomindo
Pengadaan Perangkat Media Informasi Interaktif	PT Dirgantara Engineering
Pengadaan 4 (Empat) Unit Timbangan Conveyor	PT Hexa Engineering Indonesia

### NILAI IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL

Realisasi ikatan investasi barang modal tahun 2019 sebanyak 285 program atau 78,30% dengan nilai kontrak sebesar Rp12,3 triliun dan daya serap fisik sebesar 77,88%. Seluruh transaksi menggunakan denominasi Rupiah, sehingga tidak ada langkah-langkah yang dilakukan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing.

Sumber dana yang digunakan untuk memenuhi ikatan material tersebut yaitu berasal dari pendanaan internal dan pendanaan eksternal yang terdiri dari penerbitan obligasi dan atau sukuk ijarah serta pinjaman lembaga keuangan dan atau nonkeuangan

Ikatan Investasi Barang Modal Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019 (dalam Rp)

Jenis dan Tujuan Investasi	Nilai Kontrak Periode Berjalan	Nilai Realisasi Fisik	Daya Serap Fisik
Operasional	2.116.112.908.262	1.385.987.066.217	65,50%
Pengembangan	10.185.513.329.819	8.194.764.597.522	80,46%
Total Investasi	12.301.626.238.081	9.580.751.663.739	77,88%

## REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

### JENIS DAN NILAI INVESTASI BARANG MODAL

Investasi barang modal yang bersifat aset tetap dan direalisasi pada tahun 2019 sebesar Rp9,15 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2018

sebesar Rp8,50 triliun. Data mengenai nilai investasi barang modal diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Realisasi Investasi Barang Modal PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam Rp)

Jenis Aset Tetap	Tujuan Investasi	2019	2018	2017
Tanah	Pengembangan Bandara	1.254.174	5.026.156.603	4.221.802
Bangunan (Lapangan)	Pengembangan Bandara	1.191.554.817	1.501.065.071	315.432.827
Gedung-gedung	Pengembangan Bandara	837.729.463	1.024.009.577	137.073.504
Kendaraan	Pengembangan Bandara	74.790.042	37.809.499	89.053.306
Instalasi	Pengembangan Bandara	181.940.444	176.960.843	50.000.356
Peralatan	Pengembangan Bandara	912.182.820	731.082.952	423.782.276
Aset dalam penyelesaian	Pengembangan Bandara	5.985.239.136	-	2.513.265.120
Jumlah		9.148.690.896	8.497.084.545	3.532.829.191

## Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, atau Restrukturisasi Utang dan Modal

Angkasa Pura I memiliki kegiatan investasi dan ekspansi sepanjang tahun 2019, tetapi tidak memiliki kegiatan divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, dan transaksi afiliasi.

### INVESTASI

Perseroan melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang pada berbagai instrumen keuangan, seperti deposito, reksadana, obligasi dan penyertaan saham.

Berikut ini tabel yang menampilkan data mengenai investasi yang dilakukan Angkasa Pura I.

## Investasi PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Jenis Aset Tetap	2019	2018	2017
<b>Investasi Jangka Pendek</b>			
Deposito Berjangka > 3 Bulan	264.839.700	-	10.200.000
Obligasi – tersedia untuk dijual	22.790.392	19.156.044	19.178.167
Reksadana	378.232.220	458.950.737	377.777.808
<b>Total Investasi Jangka Pendek</b>	<b>665.862.312</b>	<b>478.106.781</b>	<b>407.155.975</b>
<b>Investasi Jangka Panjang</b>			
Obligasi	25.347.300	13.361.105	45.682.461
Penyertaan Saham pada Entitas Asosiasi	84.471.885	87.301.207	86.300.400
Kerjasama Operasi	-	-	341.938
<b>Total Investasi Jangka Panjang</b>	<b>109.819.185</b>	<b>100.662.312</b>	<b>86.642.338</b>

**EKSPANSI**

Angkasa Pura I di tahun 2019 meneruskan kebijakan dan kegiatan ekspansi tahun sebelumnya yang mencakup program pengembangan 3 (tiga) bandara, yaitu Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, dan Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo. Dalam rangka pengembangan bandara tersebut, Direksi menerbitkan keputusan untuk membentuk organisasi dan tata kerja sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) nomor: KEP.176/OM.01.01/2014 tanggal 15 Desember 2014 telah dibentuk organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin.
2. Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) nomor: KEP.107/OM.01.01/2014 tanggal 26 Agustus 2014 telah dibentuk organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang.
3. Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) nomor: KEP.182/OM.01.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 atas perubahan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) nomor: KEP.108/OM.01.01/2014 tanggal 26 Agustus 2014 telah dibentuk organisasi dan Tata Kerja Proyek Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo.

# Pencapaian Target dan Target ke Depan

## PENCAPAIAN TARGET 2019

Angkasa Pura I melalui semua direktorat dan non direktorat telah merealisasikan sebagian program kerja yang telah direncanakan dalam RKAP Tahun 2019. Rincian kinerja

Angkasa Pura I pada 2019 dapat dilihat dari pencapaian target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Pencapaian Target Kinerja Pelayanan Jasa Aeronautika (Produksi) PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Uraian	Satuan	Realisasi 2019	RKAP 2019	Pencapaian
		3	4	5=3/4
1	2	3	4	5=3/4
<b>Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)</b>	<b>Ton</b>	<b>25.016.634</b>	<b>31.839.658</b>	<b>78,57%</b>
<i>PJP4U Domestic</i>	Ton	18.204.152	24.940.251	72,99%
<i>PJP4U International</i>	Ton	6.812.482	6.899.407	98,74%
<b>Pelayanan Extended Fee</b>	<b>Hari</b>	<b>6.680</b>	<b>7.861</b>	<b>84,98%</b>
<i>Pelayanan Extended Fee Domestic</i>	Hari	6.247	6.759	92,43%
<i>Pelayanan Extended Fee Internasional</i>	Hari	433	1.102	39,29%
<b>Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)</b>	<b>Hr</b>	<b>35.755.591</b>	<b>49.936.301</b>	<b>71,60%</b>
<i>PJP2U Domestic</i>	Hr	26.938.294	40.770.491	66,07%
<i>PJP2U International</i>	Hr	8.817.297	9.165.810	96,20%
<b>Aviobridge</b>	<b>Ton</b>	<b>28.302.004</b>	<b>35.778.657</b>	<b>79,10%</b>
<i>Avio Bridge Domestic</i>	Ton	17.488.015	24.846.097	70,39%
<i>Avio Bridge International</i>	Ton	10.813.989	10.932.560	98,92%
<b>Counter</b>	<b>Pax</b>	<b>35.640.003</b>	<b>49.842.910</b>	<b>71,50%</b>
<i>Counter Domestic</i>	Pax	26.933.352	40.775.927	66,05%
<i>Counter International</i>	Pax	8.706.651	9.066.983	96,03%
<b>BHS/HBS</b>	<b>Pax</b>	<b>528</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>BHS/HBS Domestic</i>	Pax	-	-	-
<i>BHS/HBS International</i>	Pax	528	-	-
<b>PJKP2U</b>	<b>Kg</b>	<b>327.143.126</b>	<b>479.890.611</b>	<b>68,17%</b>
<i>PJKP2U Out Domestic</i>	Kg	103.919.716	182.140.379	57,05%
<i>PJKP2U Out International</i>	Kg	52.948.163	56.844.654	93,15%
<i>PJKP2U Inc Domestic</i>	Kg	137.428.748	210.759.041	65,21%
<i>PJKP2U Inc International</i>	Kg	32.846.499	30.146.536	108,96%

## Pencapaian Target Kinerja Pelayanan Jasa Non-Aeronautika (Produksi) PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Uraian	Satuan	Realisasi 2019	RKAP 2019	Pencapaian
1	2	3	4	5=3/4
<b>Sewa -Sewa</b>	m <sup>2</sup> xbln	<b>9.488.436</b>	<b>13,184,118</b>	<b>71,97%</b>
Sewa Ruang	m <sup>2</sup> xbln	1.209.458	2.210.713	54,71%
Sewa Tanah	m <sup>2</sup> xbln	6.701.936	9.390.884	71,37%
Sewa Tempat	m <sup>2</sup> xbln	3.077	11.659	26,39%
Sewa Tempat Antena	m <sup>2</sup> xbln	19.694	20.270	97,16%
Sewa Cold Storage	m <sup>2</sup> xbln	3.624	-	
Sewa Gedung	m <sup>2</sup> xbln	-	-	-
Penyerahan Penggunaan Tanah	m <sup>2</sup> xbln	1.550.646	1.550.592	100,00%
Penyerahan Penggunaan Bangunan	m <sup>2</sup> xbln	-	-	
<b>Konsesi</b>		<b>26.023.806.416</b>	<b>26.533.268.692</b>	<b>98,08%</b>
Konsesi - Duty Free	Rp/000	1.826.896.224	2.361.628.973	77,36%
Konsesi - Food dan Beverages	Rp/000	1.277.306.807	1.538.202.291	83,04%
Konsesi - Retail	Rp/000	1.278.218.151	1.509.888.608	84,66%
Konsesi - Services	Rp/000	2.615.652.329	1.721.079.239	151,98%
Konsesi - Ground Handling	Rp/000	804.623.267	836.750.293	96,16%
Konsesi - Catering	Rp/000	506.914.461	533.818.037	94,96%
Konsesi - FTC	Ltr	15.955.737.172	16.527.262.086	96,54%
Konsesi - CIP Lounge	Rp/000	290.204.908	353.643.880	82,06%
Konsesi - Cargo	Rp/000	176.097.848	247.740.242	71,08%
Konsesi - Others	Rp/000	124.530.657	9.550.544	1303,91%
Konsesi - GAT	Rp/000	20.676.721	13.464.280	153,57%
Konsesi - Line Maintenance	Rp/000	670.176.732	679.110.677	98,68%
Konsesi - Advertising	Rp/000	476.771.137	201.129.543	237,05%
		<b>38.770.772</b>	<b>51.102.910</b>	<b>75,87%</b>
Parkir Mobil	Lbr	28.264.917	38.496.987	73,42%
Parkir Motor	Lbr	10.455.258	12.470.631	83,84%
Peron dan Waving Gallery	Lbr	-	-	
Pas Bandara	Lbr	50.597	135.291	37,40%

## Pencapaian Target Kinerja Pelayanan Jasa Non-Aeronautika (Produksi) PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Uraian	Satuan	Realisasi 2019	RKAP 2019	Pencapaian
1	2	3	4	5=3/4
<b>Utilitas</b>		44.453.629	42.157.307	105,45%
Pemakaian Listrik	Kwh	43.807.615	41.542.959	105,45%
Pemakaian Air	m <sup>3</sup>	62.363	593.666	105,51%
Pemakaian Telepon	PwtxBln	18.423	19.662	93,70%
Layanan Data	EA	1.228	1.020	120,39%
<b>Reklame</b>		76.674	54.808	139,89%
Sewa Tempat Reklame <i>Indoor</i>	M <sup>2</sup> xBln	59.388	29.157	203,68%
Sewa Tempat Reklame <i>Outdoor</i>	M <sup>2</sup> xBln	17.286	25.651	67,39%
<b>Event dan Promotion</b>		9.971	1.610	619,29%
Event dan Promotion	EA	9.971	1.610	619,29%
<b>Lounge</b>		197.788	345.084	57,32%
CIP Lounge Domestic	Pax	197.788	345.084	57,32%
CIP Lounge International	Pax	-	-	-
Executive Lounge Domestic	Pax	-	-	-
Executive Lounge International	Pax	-	-	-
<b>Jasa Gudang Cargo</b>		91.179.716	132.361.426	68,89%
Jasa Gudang Cargo <i>Out-Domestic</i>	Kg	14.964.611	9.669.174	154,77%
Jasa Gudang Cargo <i>Out-International</i>	Kg	18.831.844	29.132.477	64,64%
Jasa Gudang Cargo <i>Inc-Domestic</i>	Kg	22.089.108	17.195.362	128,46%
Jasa Gudang Cargo <i>Inc-International</i>	Kg	35.294.152	76.364.413	46,22%
<b>Maintenance dan Services Fee</b>		5.474	675	810,96%
Maintenance dan Services Fee	EA	5.474	675	810,96%

## Pencapaian Target Kinerja Keuangan dan Struktur Modal PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Uraian	Realisasi 2019	RKAP 2019	Pencapaian
<b>Aset</b>	42.808.050,310	44.263.727.962	96,71%
Aset Lancar	8.223.547.402	4.804.994.138	171,15%
Aset Tidak Lancar	34.584.502.908	39.458.733.824	87,65%
<b>Liabilitas</b>	26.827.542.463	27.437.353.468	97,78%
Liabilitas Jangka Pendek	6.201.838.709	3.330.903.507	186,19%
Liabilitas Jangka Panjang	20.625.703.754	24.106.449.961	85,56%



## Pencapaian Target Kinerja Keuangan dan Struktur Modal PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Uraian	Realisasi 2019	RKAP 2019	Pencapaian
<b>Ekuitas</b>	<b>15.980.507.847</b>	<b>1.826.374.491</b>	<b>94,97%</b>
Pendapatan Operasi	8.629.003	9.997.621	86,31%
Beban Operasi	5.962.330	6.885.900	86,59%
<b>Laba Operasi</b>	<b>2.666.673</b>	<b>3.111.721</b>	<b>85,70%</b>
Pendapatan Non Operasi	307.898	162.797	189,13%
Beban Non Operasi	942.835	635.956	148,25%
<b>Laba Non Operasi</b>	<b>(634.937)</b>	<b>(473.159)</b>	<b>134,19%</b>
Laba sebelum Pajak	2.031.736	2.638.562	77,00%
Beban Pajak Kini dan Tangguhan	(580.376)	(627.360)	92,51%
<b>Laba Bersih Tahun Berjalan</b>	<b>1.451.360</b>	<b>2.011.202</b>	<b>72,16%</b>

## PROYEKSI 2020

Sesuai dengan surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-574/MBU/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Aspirasi Pemegang Saham/ Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020, PT Angkasa Pura I (Persero) menyusun proyeksi kinerja Perseroan tahun 2020 dengan mengacu pada asumsi-asumsi dasar Penyusunan APBN. Analisis kondisi makro kemudian menjadi

landasan Angkasa Pura I untuk menetapkan asumsi ekonomi mikro pada konteks kegiatan usaha Perseroan, seperti PJP4U, PJP2U dan faktor ekonomi Perseroan lainnya.

Terkait proyeksi kebijakan dividen, Angkasa Pura I mengikuti kebijakan Kementerian BUMN selaku pemegang saham utama dan pengendali.

## Asumsi Ekonomi Makro Penyusunan APBN Tahun 2020

Pertumbuhan Ekonomi	5.3%
Tingkat Inflasi	3.1%
Nilai Tukar Mata Uang	Rp14.400/USD
Suku Bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	5.4%

## Asumsi Ekonomi Mikro

Peningkatan <i>Traffic</i>	Pesawat, Penumpang, dan Kargo
Kenaikan Tarif	PJP4U, PJP2U dan <i>Check-in Counter</i>
Peningkatan Alat Produksi	<i>Aviobridge</i> , BHS/HBS
Perubahan Pola Kerja Sama	Sewa Reklame dan Pengelolaan CIP <i>Lounge</i>

## Proyeksi Kinerja Pelayanan Jasa Aeronautika Angkasa Pura I Tahun 2020

Uraian	Satuan	Proyeksi 2020
1	2	3
<b>Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)</b>	<b>Ton</b>	<b>29.492.410</b>
<i>PJP4U Domestic</i>	<i>Ton</i>	<i>22.036.455</i>
<i>PJP4U International</i>	<i>Ton</i>	<i>7.455.955</i>
<b>Extended and Advance</b>	<b>Pax</b>	<b>6.546</b>
<i>Pelayanan Extended Fee Domestic</i>	<i>Pax</i>	<i>5.883</i>
<i>Pelayanan Extended Fee Int.</i>	<i>Pax</i>	<i>663</i>
<b>Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)</b>	<b>Hr</b>	<b>42.978.920</b>
<i>PJP2U Domestic</i>	<i>Hr</i>	<i>33.320.374</i>
<i>PJP2U International</i>	<i>Hr</i>	<i>9.658.546</i>
<b>Aviobridge</b>	<b>Ton</b>	<b>33.900.693</b>
<i>Aviobridge Domestic</i>	<i>Ton</i>	<i>21.971.443</i>
<i>Aviobridge International</i>	<i>Ton</i>	<i>11.929.250</i>
<b>Counter</b>	<b>Pax</b>	<b>42.712.588</b>
<i>Counter Domestic</i>	<i>Pax</i>	<i>33.159.860</i>
<i>Counter International</i>	<i>Pax</i>	<i>9.552.728</i>
<b>BHS/HBS</b>	<b>Pax</b>	<b>-</b>
<i>BHS/HBS Domestic</i>	<i>Pax</i>	<i>-</i>
<i>BHS/HBS Int.</i>	<i>Pax</i>	<i>-</i>
<b>PJKP2U</b>	<b>Kg</b>	<b>476.426.873</b>
<i>PJKP2U Out Dom.</i>	<i>Kg</i>	<i>205.331.772</i>
<i>PJKP2U Out Int.</i>	<i>Kg</i>	<i>55.887.400</i>
<i>PJKP2U Inc Dom.</i>	<i>Kg</i>	<i>177.959.766</i>
<i>PJKP2U Inc Int.</i>	<i>Kg</i>	<i>37.247.935</i>

## Pencapaian Target Kinerja Pelayanan Jasa Non-Aeronautika (Produksi) Angkasa Pura I Tahun 2019

Uraian	Satuan	Realisasi 2019
1	2	3
<b>Sewa -Sewa</b>	<b>m<sup>2</sup>xbln</b>	<b>11.512.048</b>
Sewa Ruang	m <sup>2</sup> xbln	1.589.651
Sewa Tanah	m <sup>2</sup> xbln	8.341.701
Sewa Tempat	m <sup>2</sup> xbln	8.628
Sewa Tempat Antena	m <sup>2</sup> xbln	21.477
Sewa Cold Storage	m <sup>2</sup> xbln	-
Sewa Gedung	m <sup>2</sup> xbln	-
Penyerahan Penggunaan Tanah	m <sup>2</sup> xbln	1.550.592
Penyerahan Penggunaan Bangunan	m <sup>2</sup> xbln	-
<b>Konsesi</b>		<b>27.533.014.015</b>
Konsesi - <i>Duty Free</i>	Rp/000	1,906.988.455
Konsesi - <i>Food dan Beverages</i>	Rp/000	1.609.865.445
Konsesi - <i>Retail</i>	Rp/000	1.491.488.330
Konsesi - <i>Services</i>	Rp/000	2.766.225.633
Konsesi - <i>Ground Handling</i>	Rp/000	821.583.960
Konsesi - <i>Catering</i>	Rp/000	530.944.687
Konsesi - <i>FTC</i>	Ltr	16.923.814.365
Konsesi - <i>CIP Lounge</i>	Rp/000	325.060.323
Konsesi - <i>Cargo</i>	Rp/000	301.129.488
Konsesi - <i>Others</i>	Rp/000	29.196.365
Konsesi - <i>GAT</i>	Rp/000	16.191.079
Konsesi - <i>Line Maintenance</i>	Rp/000	681.118.465
Konsesi - <i>Advertising</i>	Rp/000	129.407.421
		<b>47.682.482</b>
Parkir Mobil	Lbr	35.372.808
Parkir Motor	Lbr	12.265.572
Peron dan <i>Waving Gallery</i>	Lbr	902
Pas Bandara	Lbr	43.200
		<b>42.859.013</b>

## Pencapaian Target Kinerja Pelayanan Jasa Non-Aeronautika (Produksi) Angkasa Pura I Tahun 2019

Uraian	Satuan	Realisasi 2019
1	2	3
Pemakaian Listrik	Kwh	42.259.856
Pemakaian Air	m <sup>3</sup>	581.324
Pemakaian Telepon	PwtxBln	16.117
Layanan Data	EA	1.716
<b>Sewa Tempat Reklame</b>		<b>74.183</b>
Sewa Tempat Reklame <i>Indoor</i>	M <sup>2</sup> xBln	37.217
Sewa Tempat Reklame <i>Outdoor</i>	M <sup>2</sup> xBln	36.966
<b>Event dan Promotion</b>		<b>1.180</b>
Event dan Promotion	EA	1.180
<b>Lounge</b>		<b>-</b>
CIP Lounge Domestic	Pax	-
CIP Lounge International	Pax	-
Executive Lounge Domestic	Pax	-
Executive Lounge International	Pax	-
<b>Warehousing</b>		<b>59.745.481</b>
Jasa Gudang Cargo Out-Domestic	Kg	12.958.733
Jasa Gudang Cargo Out-International	Kg	2.518.186
Jasa Gudang Cargo Inc-Domestic	Kg	15.916.949
Jasa Gudang Cargo Inc-International	Kg	28.351.613
<b>Maintenance dan Services Fee</b>		<b>730</b>
Maintenance dan Services Fee	EA	730

## Proyeksi Kinerja Keuangan dan Struktur Modal PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2020

Uraian	Proyeksi 2020
<b>Aset</b>	<b>46.456.792.223</b>
Aset Lancar	5.404.722.599
Aset Tidak Lancar	41.052.069.624
<b>Liabilitas</b>	<b>30.618.759.030</b>
Liabilitas Jangka Pendek	5.196.201.230
Liabilitas Jangka Panjang	25.422.557.801

## Proyeksi Kinerja Keuangan dan Struktur Modal PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2020

Uraian	Proyeksi 2020
<b>Ekuitas</b>	<b>15.838.033.193</b>
Pendapatan Operasi	11.329.354.597
Beban Operasi	7.886.967.855
<b>Laba Operasi</b>	<b>3.442.386.742</b>
Pendapatan Non Operasi	162.143.115
Beban Non Operasi	1.615.940.818
<b>Laba Non Operasi</b>	<b>(1.453.797.703)</b>
Laba sebelum Pajak	1.988.589.039
Beban Pajak Kini dan Tangguhan	582.126.990
<b>Laba Bersih Tahun Berjalan</b>	<b>1.406.462.049</b>

## INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Dalam kurun waktu setelah tanggal laporan akuntan atau 28 Februari 2020, terdapat informasi dan fakta material sebagai berikut:

No	Deskripsi	Dampak Terhadap Kinerja	Dampak Terhadap Resiko Usaha
1	<p>Pada tanggal 13 Maret 2020 telah ditetapkan perubahan Direksi Angkasa Pura I berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-74/MBU/03/2020 Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I.</p> <p>Adapun Direksi yang dikukuhkan pemberhentian dengan hormat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN dimaksud adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sardjono Jhony Tjitrokusumo sebagai Direktur Pengembangan Usaha</li> <li>Novrihandri sebagai Direktur Keuangan</li> </ul> <p>Keputusan Menteri BUMN tersebut juga telah mengangkat Direksi baru sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dendi Tegar Daniyanto sebagai Direktur Pengembangan Usaha</li> <li>Andy Saleh Bratamihardja sebagai Direktur Keuangan</li> <li>Israwadi sebagai Direktur Kepatuhan, Aset, dan Pengadaan</li> </ul>	<p>Perubahan Direksi dan nomenklatur tersebut bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Angkasa Pura I.</p>	<p>Perubahan Direksi bertujuan untuk menghadapi resiko usaha Angkasa Pura I dalam memenuhi target investasi tahun 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, ditetapkan nomenklatur jabatan Direksi baru, yaitu Direktur Kepatuhan, Aset, dan Pengadaan guna memastikan kegiatan operasional, keuangan, dan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>

No	Deskripsi	Dampak Terhadap Kinerja	Dampak Terhadap Resiko Usaha
2	<p>Pada tanggal 20 Maret 2020 ditetapkan perubahan Dewan Komisaris dan penetapan Komisaris Independen Angkasa Pura I berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-85/MBU/03/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris, serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I. Anggota Dewan Komisaris yang dikukuhkan pemberhentian dengan hormat berdasarkan Keputusan Menteri tersebut adalah sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sdr. Harry Z. Soeratin sebagai Komisaris</li> <li>• Sdr. Suprasetyo sebagai Komisaris</li> <li>• Sdr. Ali Mochtar Ngabalin sebagai Komisaris</li> </ul> <p>Keputusan Menteri BUMN tersebut juga menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sdr. Wempi Saputra sebagai Komsiaris</li> <li>• Sdr. Danang Parikesit sebagai Komisaris</li> <li>• Sdr. Wihana Kirana Jaya sebagai Komisaris</li> <li>• Sdr. Erwan Agus Purwanto sebagai Komisaris</li> <li>• Sdr. Irfan Wahid sebagai Komisaris Independen</li> </ul> <p>Keputusan Menteri BUMN tersebut juga menetapkan Sdr. Tri Budi Satriyo sebagai Komisaris Independen.</p>	<p>Perubahan anggota Dewan Komisaris serta penetapan Komisaris Independen tersebut bertujuan untuk mendukung kinerja operasional, hukum, kondisi keuangan, dan kelangsungan usaha Angkasa Pura I.</p>	<p>Perubahan anggota Dewan Komisaris serta penetapan Komisaris Independen tersebut berdampak positif terhadap risiko usaha.</p>
3	<p>Pada tanggal 8 April 2020 telah dilaksanakan penandatanganan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I Nomor KEP.02/DK.AP.I/2020 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas serta Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit Angkasa Pura I.</p> <p>Keputusan Dewan Komisaris tersebut menetapkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Harry Z. Soeratin sebagai Ketua Komite Audit serta mengalihkan tugas Sdr. Djoko Sasono menjadi Wakil Ketua I Komite audit. Keputusan Dewan Komisaris tersebut juga menetapkan pengangkatan anggota-anggota Komite Audit sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sdr. Erwan Agus Purwanti sebagai Ketua Komite Audit</li> <li>• Sdr. Wempi Saputra sebagai Wakil Ketua II Komite Audit</li> </ul>	<p>Perubahan Komite Audit tersebut bertujuan untuk mendukung kinerja operasional, hukum, kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Angkasa Pura I.</p>	<p>Perubahan Komite Audit tersebut berdampak positif terhadap risiko usaha.</p>



## KEBIJAKAN, PENGUMUMAN, DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

### KEBIJAKAN DIVIDEN

Angkasa Pura I secara rutin melakukan pembayaran dividen setiap tahun berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pembayaran dividen dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS dalam Rapat Pertanggungjawaban Manajemen tahun berjalan. Kebijakan pembagian dividen PT Angkasa Pura I (Persero) selalui mempertimbangkan profitabilitas dan ekspansi usaha, serta penyisihan laba sesuai dengan kebutuhan operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

Pengurangan laba yang dialokasikan untuk dividen dan cadangan Perseroan tahun 2019 berasal dari kinerja Perseroan tahun 2018 ditentukan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dinyatakan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Angkasa Pura I (Persero) No. Risalah RUPS Nomor: AP.I.3972/KU.01.03/2019/DU-B tanggal 20 Mei 2019.

### PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Untuk tahun buku 2018, Angkasa Pura I telah melakukan pembagian dividen sebesar Rp461.614 juta dengan *Dividend Payout Ratio* sebesar 23%. Pembagian dividen telah dilakukan sepenuhnya pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan September 2019. Dengan demikian tidak ada kewajiban pembayaran dividen yang tertunda.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu untuk tahun buku 2017, dividen yang dibayarkan jauh lebih besar. Pada tahun 2018, pembayaran dividen untuk tahun buku 2017 ditetapkan sebesar Rp283,716 juta dengan *Dividend Payout Ratio* sebesar 20%. Seluruh kewajiban pembayaran dividen tersebut telah dilakukan seluruhnya oleh Angkasa Pura I.



## Pengumuman dan Pembayaran Dividen PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun Buku 2014-2018

Tahun Buku	Pembagian Dividen (Rp juta)	Laba Usaha (Rp juta)	Dividen per Lembar saham (Rp ribu)	Dividen Payout Ratio	Dasar Pembagian	Tanggal Pengumuman	Tanggal Pembayaran
2018	461.614	2.007.018	71,97	23%	Risalah RUPS Nomor: AP.I.3972/KU.01.03/2019/DU-B	20 Mei 2019	20 Jun 2019 19 Jul 2019 20 Agu 2019 20 Sep 2019
2017	283.716	1.418.577	44,23	20%	Risalah RUPS Nomor: AP.I.2559/KU.01.03/2018/DU-B	24 April 2018	22 Mei 2018 21 Juni 2018 24 Juli 2018 23 Agu 2018 24 Sep 2018
2016	140.000	1.158.800	21,83	12,08%	Risalah RUPS Nomor: AP.I.2406/KU/03/2017/DU-B	9 Mei 2017	7 Juni 2017
2015	168.309	841.542	26,24	20%	Berita Acara RUPS Nomor 19 Tanggal 17 Mei 2016	17 Mei 2016	14 Juni 2016
2014	185.720	928.601	63,47	20%	Risalah RUPS Nomor: AP.I.2608/TU/03.04/2014	12 Mei 2015	4 Juni 2015 7 Juli 2015

## PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM

Angkasa Pura I hingga saat ini belum memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (*Employee Stock Ownership Plan/ESOP* dan *Management Stock Ownership Plan/MSOP*). Dengan demikian, laporan ini tidak

menyajikan data dan informasi mengenai opsi saham, jumlah saham, jangka waktu pelaksanaan, harga pelaksanaan, dan persyaratan program ESOP dan MSOP tersebut.

## REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (LRPD), Angkasa Pura I menyampaikan LRPD secara berkala setiap enam bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Secara umum, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dari Obligasi dan Sukuk

Ijarah Angkasa Pura I digunakan sesuai dengan rencana, yaitu untuk pengembangan lima bandar udara dan investasi rutin bandar udara.

Tabel berikut ini ringkasan dari realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Angkasa Pura I

## Ringkasan Realisasi Penggunaan Dana PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir

Uraian	Tanggal, Bulan dan Tahun	Jumlah (Rp)
Penawaran Umum (Obligasi dan Sukuk Ijarah)	10 November 2016	
Jumlah hasil penawaran umum		3.000.000.000.000
Biaya penawaran umum		8.789.785.708
Hasil bersih		2.991.210.214.292

## Ringkasan Realisasi Penggunaan Dana PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir

Uraian	Tanggal, Bulan dan Tahun	Jumlah (Rp)
Rencana Penggunaan Dana		
Pendanaan 5 (lima) Proyek Pengembangan Bandar Udara		2.243.407.660.719
Pendanaan Investasi Rutin		747.802.553.573
Total Rencana Penggunaan Dana		2.991.210.214.292
Realisasi Penggunaan Dana		
Pendanaan 5 (lima) Proyek Pengembangan Bandar Udara	2016	474.000.000.000
	2017	1.348.621.902.001
	2018	626.515.340.865
	2019	31.319.020.243
<b>Total Pendanaan 5 (lima) Proyek Pengembangan Bandar Udara</b>		<b>2.480.456.263.109</b>
Pendanaan Investasi Rutin	2016	0
	2017	510.542.716.153
	2018	211.235.0300
	2019	<b>510.753.951.183</b>
<b>Total Pendanaan Investasi Rutin</b>		<b>2.991.210.214.292</b>
<b>Total Realisasi Penggunaan Dana</b>		
Sisa Dana Hasil Penawaran Umum	Per 31 Desember 2019	0

## INFORMASI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

### TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI AFILIASI

Sebagai badan usaha yang dimiliki Pemerintah, Angkasa Pura I menyadari adanya pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Perseroan, baik berdasarkan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Terkait hal tersebut, dalam rangka penerapan tata kelola yang baik, Angkasa Pura I secara konsisten mengidentifikasi jika ada transaksi yang berelasi

dan mengandung benturan kepentingan. Transaksi dilakukan atas dasar alasan kebutuhan dan bebas dari konflik kepentingan serta telah dilakukan secara wajar sesuai peraturan perundang-undangan. Pihak-pihak yang teridentifikasi berelasi dengan Angkasa Pura I dapat dilihat pada tabel berikut.

#### Pihak Berelasi PT Angkasa Pura I (Persero) Berdasarkan Hubungan Kepemilikan dan/atau Kepengurusan

No	Pihak Berelasi	Sifat Hubungan Berelasi
1.	Pemegang saham/ <i>shareholder</i>	Pemerintah Republik Indonesia
2.	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
		PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
		PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk.
		PT Bank Tabungan Negara
		PT Bank Syariah Mandiri
		PT Bank BRI Syariah
		PT Bank BNI Syariah
		PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.
		PT Pertamina (Persero)

## Pihak Berelasi PT Angkasa Pura I (Persero) Berdasarkan Hubungan Kepemilikan dan/atau Kepengurusan

No	Pihak Berelasi	Sifat Hubungan Berelasi
2.	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
		PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
		PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
		Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi
		Penerbangan Indonesia (LPPNPI)
		PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
		Indonesia Infrastructure Finance
		Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya
		Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya
3.	Entitas Anak	PT Angkasa Pura Support
		PT Angkasa Pura Hotel
		PT Angkasa Pura Logistik
		PT Angkasa Pura Property
		PT Angkasa Pura Retail
4.	Entitas Asosiasi	PT Jasa Marga Bali penyertaan saham
		PT Gapura Angkasa penyertaan saham
5.	Entitas Imbalan Paska Kerja	Dana Pensiun Angkasa Pura/Angkasa Pura Pension Fund
6.	Personel, Manajemen Kunci	Dewan Direksi
		Komisaris

Selama tahun 2019, tidak terdapat transaksi dengan pihak berafiliasi yang mengandung benturan kepentingan. Rincian akun dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yaitu sebagai berikut:

## Transaksi dengan Pihak Berelasi PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	2019	2018	2017
<b>Aset</b>			
Kas dan setara kas	2.439.450.313	1.843.411.485	2.209.464.284
Investasi dalam efek jangka pendek	157.630.092	62.030.398	60.711.992
Piutang usaha	138.453.120	90.334.042	92.919.624
Piutang lain lain	-	-	-
Piutang jangka panjang	-	-	-
Investasi jangka panjang	99,749,084	100.662.312	86.300.400
Liabilitas Jangka Panjang	20.625.703.754	24.106.449.961	85,56%

## Transaksi dengan Pihak Berelasi PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian	2019	2018	2017
<b>Jumlah</b>	<b>2.835.282.609</b>	<b>2.096.438.237</b>	<b>2.449.396.300</b>
Persentase dari total aset		6,63%	9,90%
<b>Liabilitas</b>			
Utang usaha	59.820.083	101.718.709	10.812.049
Utang Bank dan Pinjaman Sindikasi	14.918.352.118	5.537.983.907	3.814.506.307
Utang lancar lain lain	99.967.076	1.371.998.743	366.422.705
<b>Ekuitas</b>			
Penyertaan Modal Negara	6.414.412.000	22.963.207	255.096.706
<b>Jumlah</b>	<b>21.492.551.277</b>	<b>13.426.113.359</b>	<b>10.606.153.061</b>
Persentase dari total liabilitas dan Ekuitas	50,3%	42,48%	17,98%

**LIABILITAS KONTIJENSI**

Per 31 Desember 2019, tidak ada perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perseroan, Dewan Komisaris, Direksi, atau Entitas Anak Angkasa Pura I. Meski demikian, beberapa perkara penting tahun-tahun sebelumnya yang masih perlu ditindaklanjuti oleh Angkasa Pura I, yaitu:

**a) PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah)**

Perseroan menerima gugatan perdata dari BNI Syariah dengan nilai gugatan sebesar Rp85.334.939 terkait pembayaran kepada PT Slipi Raya Utama yang tidak melalui rekening BNI Syariah sehubungan dengan pekerjaan pembangunan terminal penumpang dan fasilitas penunjangnya di Bandara Internasional Lombok.

Berdasarkan Putusan No. 315/PDT/2015/PTDKI.jo.No.556/PDT.G/2013/PN. JKT.PST dan Putusan Nomor 315/PDT/2015/PT DKI, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan gugatan dari BNI Syariah dan menghukum Perseroan untuk melaksanakan prestasinya sebesar Rp2.491.890. Atas putusan tersebut, Perseroan mengajukan permohonan kasasi tanggal 26 Januari 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan

telah membukukan pencadangan biaya sebesar Rp87.826.828 pada akun beban akrual.

Pada tahun 2018, Perseroan menerima Putusan Mahkamah Agung Nomor 1461 K/PDT/2017 tanggal 27 September 2017 di mana Perseroan dihukum untuk melaksanakan prestasinya sebesar Rp2.491.890. Atas hal tersebut, pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan telah membukukan pendapatan sebesar Rp85.334.939 pada akun penghasilan lain-lain.

**b) PT Sepinggian Sarana Utama (SSU)**

PT Sepinggian Sarana Utama (SSU) mengajukan permohonan arbitrase kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di mana SSU menyatakan bahwa Perseroan telah melakukan tindakan ingkar janji atas perjanjian kerja sama pembangunan dan pengusahaan hotel transit di Bandar Udara Sepinggian Balikpapan. Pada tanggal 5 Juli 2018, Perseroan menerima Putusan Perkara No. 982/X/ARB-BANI/2017 dari BANI dimana Perseroan diperintahkan untuk membayar ganti rugi atas investasi yang sudah dilakukan SSU dan mengembalikan uang jaminan kesungguhan kepada SSU masing-masing sebesar Rp104.793.567 dan Rp3.750.000.

Perseroan menyampaikan surat permohonan

kepada Ketua Pengadilan Jakarta Pusat yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Oktober 2018 yang menyatakan antara lain:

1. Putusan arbitrase melanggar ketertiban umum karena mengabaikan laporan hasil audit investigatif Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
2. Berdasarkan risalah rapat tanggal 16 Agustus 2018 dengan SSU, SSU tidak keberatan apabila ganti rugi dihitung dengan kewajiban-kewajibannya.
3. SSU setuju nilai ganti rugi dikurangi dengan pembayaran atas koridor penghubung.
4. SSU masih memiliki kewajiban pembayaran sewa tanah dan konsesi kepada termohon eksekusi.
5. SSU berkewajiban menyerahkan tanah milik Perseroan dan hotel transit menjadi milik Perseroan.

Perseroan menyampaikan surat permohonan kembali kepada Ketua Pengadilan Jakarta Pusat yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 November 2018 yang menyatakan antara lain:

1. SSU setuju nilai ganti rugi dikurangi dengan pembayaran atas bangunan koridor penghubung yang menjadi bagian dari hotel transit.
2. SSU masih memiliki kewajiban pembayaran

sewa tanah dan konsesi kepada termohon eksekusi.

3. Perlu dilakukan penilaian ulang atas nilai aset hotel tersebut.

Pada tanggal 15 Mei 2019, Perseroan dan SSU menandatangani surat pedamaian dimana SSU sepakat untuk menyerahkan tanah berkit bangunan hotel ke Perseroan dan Perseroan membayar sebesar Rp 86,7 miliar. Pada tanggal 16 Mei 2019, Perseroan telah melakukan pembayaran sejumlah tersebut kepada SSU.

#### PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada tahun 2019, Angkasa Pura I tidak melakukan penyesuaian atau perubahan kebijakan akuntansi. Namun, efektif per tanggal 1 Januari 2019, Angkasa Pura I menerapkan beberapa standar akuntansi baru yang relevan sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang berlaku umum secara internasional. Tabel berikut menyajikan penjelasan mengenai perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang baru.

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Dimulai pada dan Setelah Tanggal 1 Januari 2019

No	Standar Akuntansi	Adopsi atas IFRS/IAS	Ringkasan Perubahan	Dampak terhadap Angkasa Pura I
1.	ISAK 33	IFRIC 22	Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan.
2.	ISAK 34	IFRIC 23	Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan.
3.	Amandemen PSAK 24 (Penyesuaian 2018)	Amendments to IAS 19	Imbalan Kerja tentang Amandemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan.



## Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Dimulai pada dan Setelah Tanggal 1 Januari 2019

No	Standar Akutansi	Adopsi atas IFRS/IAS	Ringkasan Perubahan	Dampak terhadap Angkasa Pura I
4.	PSAK 22 (Penyesuaian 2018)	Annual Improvements to IFRSs 2015-2017 Cycle – IFRS 3	Kombinasi Bisnis.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan.
5.	PSAK 26 (Penyesuaian 2018)	Annual Improvements to IFRSs 2015-2017 Cycle – IAS 23	Biaya Pinjaman.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan.
6.	PSAK 46 (Penyesuaian 2018)	Annual Improvements to IFRSs 2015-2017 Cycle – IAS 12	Pajak Penghasilan.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan.
7.	PSAK 66 (Penyesuaian 2018)	Annual Improvements to IFRSs 2015-2017 Cycle – IFRS 11	Pengaturan Bersama.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan.

## DAMPAK STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK)

Perseroan telah menganalisis penerapan standar akuntansi tersebut di atas dan penerapan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan.

## INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

## PERUBAHAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pada tahun 2019, terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap kegiatan usaha Angkasa Pura I, yaitu:

No	Standar Akuntansi	Adopsi atas IFRS/IAS	Ringkasan Perubahan	Dampak terhadap Angkasa Pura I
1.	Kementerian Keuangan	128/PMK.010/2019	Pemberian pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/ atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.	Angkasa Pura I meningkatkan pengembangan SDM berbasis kompetensi dan pemagangan pegawai, penetapan ketentuannya berada di Unit Training and Development.
2.	Kementerian BUMN	PER-01/MBU/2019	Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.	Terkait perubahan peraturan tersebut berdampak pada kenaikan gaji dan tantiem Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia dan Umum.
3.	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan	PER-05/PJ/2019	Badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.	Saat ini pemotongan zakat profesi pegawai sebesar 2,5% dari penghasilan ditransfer ke rekening Badan Amil Zakat Nasional.

No	Standar Akutansi	Adopsi atas IFRS/IAS	Ringkasan Perubahan	Dampak terhadap Angkasa Pura I
4.	Kementerian Perhubungan	166	Tatanan Kebandarudaraan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan status bandar udara dari domestik menjadi internasional;</li> <li>b. Penentuan standar peranan, fungsi, dan klasifikasi bandar udara;</li> <li>c. Pemenuhan sertifikat bandar udara pada setiap bandar udara;</li> <li>d. Turut serta berperan aktif dalam mendukung kebijakan "Asean Open Sky" dengan pengaturan slot time pesawat udara dalam memaksimalkan potensi peningkatan pergerakan pesawat, penumpang dan kargo.</li> </ul>

### HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Manajemen Angkasa Pura I senantiasa melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha di masa mendatang. Penilaian dilakukan berdasarkan berbagai faktor seperti analisis kekuatan kondisi

keuangan maupun nonkeuangan. Hingga akhir tahun 2019 tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Angkasa Pura I, baik yang terkait operasional dan pemasaran maupun keuangan. Selain itu juga tidak ada hal-hal yang dapat menimbulkan risiko pada industri kebandarudaraan sepanjang tahun 2019.

## PENGUNGKAPAN PAJAK

### PUBLIKASI PEMBAYARAN PAJAK

Angkasa Pura I dalam kegiatan operasionalnya telah menjalankan tata kelola Perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang dilakukan secara transparan dan akuntabel khususnya dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakannya, hak

dan kewajiban perpajakannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Total pembayaran pajak periode Januari sampai dengan Desember 2019, dapat dilihat pada tabel berikut.

Pembayaran Pajak PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam ribu Rp)

Uraian Pajak	2019	2018	2017
PPh Pasal 21	198.882.750	162.789.707	124.603.089
PPh Pasal 22	5.641.914	4.523.965	-
PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26	28.491.494	26.348.212	20.551.619
PPh Pasal 4 Ayat 2	248.509.945	132.485.016	55.605.562
PPh Badan	485.287.229	432.540.331	379.062.029
Pajak Pertambahan Nilai (1111)	621.337.506	646.830.078	783.739.976
Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut (1107)	1.040.720.298	698.144.910	-
SWPD3D/BNN dan Beban Pajak Lain-lain	157.830.977	166.345.493	32.192.035
Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Daerah Lainnya	180.369.880	139.173.979	149.707.340
Total	2.967.071.993	2.409.181.695	1.545.461.649

## KEPATUHAN PEMBAYARAN DAN SENGKETA PAJAK

Pada periode 2019, Angkasa Pura I menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan, dengan demikian tidak terdapat ketidakpatuhan Perseroan dalam hal kewajiban membayar pajak. Selain itu, per 31 Desember 2019, Angkasa Pura I tidak memiliki sengketa pajak.

Dalam memenuhi ketentuan perpajakan, Angkasa Pura I mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku dan melakukan rekonsiliasi fiskal. Kemudian, laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Badan tahun 2019. Pada tahun 2019, terdapat beberapa penyesuaian perhitungan perpajakan, yaitu:

## DASAR PERPAJAKAN

Data Rekonsiliasi Fiskal untuk Perpajakan PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir

Uraian Pajak	2019	2018	2017
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian	1.944.535.245	2.694.934.057	1.789.497.375
Beban Pajak	492.308.079	689.015.898	369.144.323
Aset Pajak Tangguhan	48.494.898	41.157.712	83.863.138
Liabilitas Pajak Tangguhan	79.885.504	89.079.821	-



## KINERJA ENTITAS ANAK

Sampai dengan tahun 2019, Perseroan telah memiliki 5 (lima) entitas anak. Penjelasan mengenai entitas anak disajikan dalam bagian Profil dalam Laporan Tahunan ini. Adapun kinerja entitas anak tersebut disajikan sebagai berikut.

### PT ANGKASA PURA SUPPORT

PT Angkasa Pura Support memiliki kinerja yang baik sepanjang tahun 2019 dengan mencatat pendapatan usaha sebesar Rp1.524,722 miliar, naik 23,03% atau Rp285.437 miliar dari Rp1.239,29 miliar tahun sebelumnya. Seiring dengan itu, laba usaha tumbuh negatif sebesar -2,19% atau Rp3.713 miliar, sehingga laba usaha tahun 2019 tercatat sebesar Rp166,028 miliar dari Rp169,74 miliar

tahun sebelumnya. Laba bersih tercatat turun sebesar -16,69% atau Rp29.626 miliar menjadi Rp147,829 miliar pada tahun 2019. Dari sisi neraca keuangan, PT Angkasa Pura Support mencatat aset perusahaan naik 36,84% atau Rp375.311 miliar dari Rp1.018,67 miliar tahun 2018 menjadi Rp1,393,988 miliar tahun 2019.

Kinerja Keuangan PT Angkasa Pura Support dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam Rp juta)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Aset	375.311	36,84	1.393.988	1.018.677	810.800
Liabilitas	301.765	73,41	712.818	411.053	331.840
Ekuitas	73.546	12,1	681.170	607.624	468.960
Pendapatan Usaha	285.437	23,03	1.524.722	1.239.285	1.017.802
Beban Usaha	289,15	27,03	1.358.694	1.069.544	863.177
Laba Usaha	3,713	-2,19	166.028	169.741	154.625
Pendapatan Non Usaha	21,66	-89,55	2.527	24.187	15.877
Beban Non Usaha	4.253	25,82	20.726	16.473	20.942
Laba Non Usaha	1.036	6	18.199	7.714	-5.065
Total Pendapatan	263.777	20,88	1.527.249	1.263.472	1.033.679
Total Beban	293.403	27,02	1.379.420	1.086.017	884.119
Laba Bersih	29.626	-16,69	147.829	177.455	149.561
Beban Pajak Kini dan Tanggungan	20.348	82,31	45.070	24.722	37.841
Laba (Rugi) Setelah Pajak	49.973	-32,72	102.760	152.733	111.719
<i>Cash Ratio</i>			159,71%	35,8%	35,67%
<i>Current Ratio</i>			21,78%	192,75%	219,04%
<i>Test Acid Ratio</i>			44,51%	70,06%	123,76%
<i>Return on Asset</i>			7,37%	14,99%	13,78%
<i>Return on Equity</i>			15,09%	25,14%	23,33%



#### PT ANGKASA PURA LOGISTIK

Pendapatan usaha PT Angkasa Pura Logistik tercatat sebesar Rp386.003 miliar pada tahun 2019, naik 7,49% atau Rp26.909 miliar dari Rp359,09 miliar tahun sebelumnya. Laba usaha tumbuh negatif sebesar -45,17% atau Rp30.494 miliar, menjadi sebesar Rp37.014 miliar tahun 2019 dari Rp67,51 miliar tahun sebelumnya. Kemudian, PT Angkasa Pura Logistik membukukan laba bersih yang turun sebesar -48,39% atau Rp 35.681

miliar, dari Rp73,73 miliar tahun 2018 menjadi Rp38.050 miliar pada tahun 2019. Dari sisi neraca keuangan, PT Angkasa Pura Logistik memiliki aset perusahaan naik 22,21% atau Rp55.051 miliar dari Rp247,877 miliar tahun 2018 menjadi Rp302.928 miliar tahun 2019.

Kinerja Keuangan PT Angkasa Pura Logistik dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam juta Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Aset	55.051	22,21	302.928	247.877	250.85
Liabilitas	37.32	50,72	110.902	73.582	118.363
Ekuitas	17.731	10,17	192.026	174.295	132.487
Pendapatan Usaha	26.909	7,49	386.003	359.094	370.411
Beban Usaha	57.402	19,69	348.988	291.586	280.632
Laba Usaha	30.494	-45,17	37.014	67.508	89.779
Pendapatan Non Usaha	6.076	-84,1	1.149	7.225	5.712
Beban Non Usaha	889	-88,68	113	1.002	2.111



## Kinerja Keuangan PT Angkasa Pura Logistik dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam juta Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Laba Non Usaha	5.187	-83,36	1.036	6.223	3.601
Total Pendapatan	20.833	5,69	387.152	366.319	376.123
Total Beban	56.514	19,32	349.102	292.588	282.743
Laba Bersih	35.681	-48,39	38.05	73.731	93.379
Beban Pajak Final (4 ayat 2 dan 23)	359.388	0	612	360	0
Baban Pajak Kini dan Tangguhan	6.764	-37,2	11.42	18.184	23.224
Laba (Rugi) Setelah Pajak	29.169	-52,85	26.018	55.187	70.156
<i>Cash Ratio</i>			141,53%	107,51%	65,08%
<i>Current Ratio</i>			19,60%	268,01%	185,21%
<i>Test Acid Ratio</i>			181,53%	165,75%	94,81%
<i>Return on Asset</i>			8,59%	22,26%	27,79%
<i>Return on Equity</i>			13,55%	31,66%	52,95%





## PT ANGKASA PURA PROPERTI

Pada tahun 2019, terdapat penurunan pendapatan usaha PT Angkasa Pura Properti sebesar Rp206,116 miliar. Jika dibandingkan dengan pendapatan usaha tahun sebelumnya sebesar Rp449,32 miliar, maka pendapatan usaha tersebut mengalami penurunan sebesar -45,87%. Dari sisi laba, PT Angkasa Pura Properti memiliki laba usaha yang tumbuh negatif sebesar -62,91% atau Rp26,578 miliar, dari Rp42,24 miliar tahun 2018 menjadi

Rp15,670 miliar tahun 2019. Laba bersih tercatat Rp10,790 miliar pada tahun 2019, yang turun sebesar -73,60% atau Rp30,083 miliar, dari Rp40,87 miliar tahun 2018. PT Angkasa Pura Properti juga membukukan total aset yang naik 10,67% atau Rp51,801 miliar dari Rp485,60 miliar tahun 2018 menjadi Rp537,39 miliar tahun 2019.

Kinerja Keuangan PT Angkasa Pura Properti dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam juta Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Aset	51.801	10,67	537.396	485.595	331.868
Liabilitas	55.394	19,95	333.024	277.630	150.670
Ekuitas	3.593	-1,73	204.371	207.964	181.169
Pendapatan Usaha	206.116	-45,87	243.204	449.320	299.817
Beban Usaha	179.538	-44,10	227.534	407.072	282.815
Laba Usaha	26.578	-62,91	15.670	42.248	17.002
Pendapatan Non Usaha	767	48,28	2.355	1.588	2.225
Beban Non Usaha	4.271	144,14	7.234	2.963	1.185
Laba Non Usaha	3.504	254,85	(4.879)	(1.375)	1.039
Total Pendapatan	205.349	-45,54	245.559	450.908	302.041
Total Beban	175.267	-42,74	234.768	410.035	284.000
Laba Bersih	30.083	-73,60	10.790	40.873	18.041
Beban Pajak Final (4 ayat 2 dan 23)	4.919	0,00	9.598	14.517	0
Beban Pajak Kini dan Tanggihan	70.283	-98,99	717	71.000	2.485
Laba (Rugi) Setelah Pajak	24.517	-92,77	123,04%	29,20%	20,29%
<i>Cash Ratio</i>			16,79%	142,73%	171,95%
<i>Current Ratio</i>			47,05%	56,41%	51,56%
<i>Test Acid Ratio</i>			0,36%	5,44%	4,96%
<i>Return on Asset</i>			0,93%	12,71%	8,59%
<i>Return on Equity</i>			13,55%	31,66%	52,95%

### PT ANGKASA PURA HOTEL

Pendapatan usaha PT Angkasa Pura Hotel memiliki pertumbuhan positif 2,94% atau Rp11,6 miliar dari Rp395,495 miliar tahun 2018 menjadi Rp 407,109 miliar pada tahun 2019. Kemudian, sejalan dengan itu, laba usaha perusahaan turun dari Rp28,72 miliar tahun 2018, turun sebesar -58,40% atau Rp16,771 miliar, menjadi Rp11,949 miliar tahun 2019. Laba bersih tahun 2019 dibukukan lebih

rendah sebesar -46,40% atau Rp12,718 miliar, dari Rp27,409 miliar tahun 2018 menjadi Rp14,691 miliar pada tahun 2019. Dengan adanya penurunan laba, PT Angkasa Pura Hotel tercatat memiliki aset sebesar Rp738,817 miliar pada tahun 2019, naik dari Rp728,23 miliar tahun 2018 sebesar 1,45% atau Rp10,592 miliar.

Kinerja Keuangan PT Angkasa Pura Hotel dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam juta Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Aset	10.592	1,45	738.817	728.225	708.033
Liabilitas	5.051	6,44	83.539	78.488	74.539
Ekuitas	5.541	0,85	655.278	649.737	633.494
Pendapatan Usaha	11.614	2,94	407.109	395.495	265.240
Beban Usaha	28.384	7,74	395.163	366.779	252.978
Laba Usaha	16.771	-58,4	11.945	28.716	12.261
Pendapatan Non Usaha	200	5,11	4.108	3.908	3.855
Beban Non Usaha	3.853	-73,87	1.362	5.215	311
Laba Non Usaha	4.052	-310,05	2.745	1.307	3.544
Total Pendapatan	11.813	2,96	411.216	399.403	269.095
Total Beban	24.532	6,59	396.526	371.994	253.290
Laba Bersih	12.718	-46,4	14.691	27.409	15.805
Beban Pajak Final (4 ayat 2 dan 23)	64.992	0	8	65	0
Beban Pajak Kini dan Tanggahan	5.991	-53,61	5.184	11.175	2.998
Laba (Rugi) Setelah Pajak	6.671	-41,26	9.498	16.169	12.807
<i>Cash Ratio</i>			313,85%	150,45%	142,29%
<i>Current Ratio</i>			191,60%	273,44%	266,07%
<i>Test Acid Ratio</i>			325,53%	224,17%	221,56%
<i>Return on Asset</i>			1,29%	2,22%	1,81%
<i>Return on Equity</i>			1,45%	2,49%	2,02%

## PT ANGKASA PURA RETAIL

Secara umum, kinerja keuangan PT Angkasa Pura Retail cukup baik dengan total pendapatan usaha tahun 2019 sebesar Rp106,312 miliar, naik 18,39% atau Rp16,515 miliar dari pendapatan usaha 2018 sebesar Rp89,80 miliar. Kemudian, laba usaha dan

laba bersih tahun 2019 tercatat sebesar Rp7,259 miliar dan Rp8,933 miliar. Jika ditinjau dari kinerja tahun 2018, laba usaha tumbuh negatif sebesar -75,81% atau Rp22,748 miliar, sedangkan laba bersih turun sebesar -74,42% atau Rp25,987 miliar.

Kinerja Keuangan PT Angkasa Pura Retail dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam juta Rp)

Uraian	Pertumbuhan 2019		2019	2018	2017
	(Rp)	%			
Aset	9.162	11	90.226	81.064	73.261
Liabilitas	3.591	13,33	30.535	26.944	32.612
Ekuitas	5.571	10,29	59.691	54.12	40.649
Pendapatan Usaha	16.515	18,39	106.312	89.797	69.698
Beban Usaha	39.263	65,67	99.053	59.79	60.954
Laba Usaha	22.748	-75,81	7.259	30.007	8.744
Pendapatan Non Usaha	5.217	-74,83	1.755	6.972	4.656
Beban Non Usaha	1.977	-96,02	82	2.059	2.584
Laba Non Usaha	3.24	-65,94	1.673	4.913	2.073
Total Pendapatan	11.298	11,68	108.067	96.769	74.354
Total Beban	37.286	60,28	99.135	61.849	65.537
Laba Bersih	25.987	-74,42	8.933	34.92	10.817
Beban Pajak Final (4 ayat 2 dan 23)	4.002	0	963	4.965	0
Beban Pajak Kini dan Tanggungan	14.673	-88,14	1.975	16.648	0
Laba (Rugi) Setelah Pajak	7.312	-54,95	5.995	13.307	10.817
<i>Cash Ratio</i>			264,35%	191,12%	46,51%
<i>Current Ratio</i>			130,13%	259,33%	154,12%
<i>Test Acid Ratio</i>			450,76%	219,04%	121,63%
<i>Return on Asset</i>			6,64%	16,42%	14,76%
<i>Return on Equity</i>			10,04%	24,59%	26,61%



# Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan proses penerapan prinsip *corporate governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan *soft structure*, sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

PT Angkasa Pura I (Persero) senantiasa berkomitmen untuk menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada regulasi, ketentuan yang berlaku, serta anggaran dasar Perseroan.

# Kerangka dan Struktur Tata Kelola

## DASAR KEBIJAKAN PENERAPAN GCG

PT Angkasa Pura I (Persero) menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai landasan utama pelaksanaan kegiatan usaha, baik di lingkungan entitas induk maupun di entitas anak. Pada tahun 2019, upaya Angkasa Pura I menerapkan GCG mendapatkan penghargaan, antara lain “*The Most Committed GRC Leader 2019*” untuk Direktur Utama dan “*Top GRC 2019 #3 Stars*” pada ajang “*Top GRC 2019*” yang diadakan oleh Majalah Top Business, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA), Institute Compliance Professional Indonesia (ICoPI), dan Asia Business Research.

Secara prinsip, penerapan GCG di lingkungan Angkasa Pura I mengacu berbagai regulasi, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan Perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.
5. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
6. Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Terbuka.

9. Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Selain itu, PT Angkasa Pura I (Persero) juga menerapkan GCG berdasarkan prinsip praktik bisnis terbaik nasional maupun internasional, yaitu:

1. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
2. Prinsip-prinsip tata kelola untuk perusahaan milik negara yang dikembangkan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
3. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Lebih jauh lagi, penerapan GCG didukung oleh pedoman internal Perusahaan, yang mencakup pedoman perilaku, fungsi dan tugas organ Perusahaan dalam menjalankan GCG. Salah satu tujuannya yaitu untuk membangun budaya perusahaan yang beretika dan tangguh dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG. Per akhir tahun 2019, pedoman internal yang dimiliki Perusahaan yaitu:

1. Pedoman *Corporate Governance* (*Code of Corporate Governance*).
2. Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*)
3. Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*).
4. Piagam Komite Audit.
5. Piagam Internal Audit.
6. Perjanjian Kerja Bersama 2017-2019.
7. Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
8. Pedoman *Whistleblowing System*.
9. Pedoman Manajemen Risiko.
10. Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi.
11. Pedoman Kepatuhan.
12. Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
13. Kebijakan-kebijakan lainnya dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Perusahaan.



## KERANGKA PENERAPAN GCG

Penerapan GCG di lingkungan Angkasa Pura I didukung oleh keberadaan Organ Utama dan Organ Penunjang pelaksanaan GCG serta infrastruktur Perusahaan yang membuat proses tata kelola berjalan dengan baik. Organ Utama pelaksana GCG terdiri atas Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. Adapun Organ Penunjang pelaksana GCG meliputi Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko Usaha dan Good Corporate Governance, Komite Audit Internal, dan Komite Manajemen Risiko.

### Governance Structure

- Organ Utama
- Organ Penunjang
- Infrastruktur



### Governance Process

- Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan
- Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
- Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- Tanggung Jawab Direksi
- Pengungkapan Informasi dan Transparansi



### Governance Outcome

- Mengoptimalkan nilai Perusahaan sehingga memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
- Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan.
- Mendorong Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi nilai moral tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta membangun kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan hidup.
- Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.
- Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.



## STRUKTUR DAN MEKANISME GCG

Struktur penerapan GCG Angkasa Pura I terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi yang memastikan GCG dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan sesuai dengan berbagai regulasi dan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi didukung oleh berbagai organ pendukung, yaitu komite-komite di bawah Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko, dan Internal Audit.

Lebih jauh lagi, mekanisme GCG dilaksanakan berdasarkan oleh berbagai prinsip, regulasi dan pedoman terkait GCG. Setiap organ memiliki tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Direksi menjadi pengelola utama kegiatan usaha sedangkan Dewan Komisaris melaksanakan fungsi utama mengawasi jalannya Perusahaan. Keduanya bergerak selaras dengan arahan RUPS. Organ-organ pendukung menjadi ujung tombak utama di Angkasa Pura I untuk memastikan prinsip-prinsip GCG dijalankan dalam kegiatan sehari-hari.



## Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tata kelola tertinggi yang menjadi mekanisme pengambilan keputusan penting dan strategis oleh Pemegang Saham. Setiap tahun Angkasa Pura I melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang terdiri dari:

- RUPST untuk pembahasan Rencana dan Anggaran Kerja Perusahaan (RUPS RAKP)
- RUPST untuk Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan.

Selain RUPST, jika diperlukan, Angkasa Pura I dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

### HAK PEMEGANG SAHAM

Di dalam RUPS, Pemegang Saham memiliki hak-hak berikut:

1. Menghadiri RUPS dan memberikan suara pada RUPS
2. Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) baik dari Dewan Komisaris maupun Direksi mengenai keuangan atau hal-hal lain yang menyangkut Perusahaan
3. Memperoleh pembagian laba Perusahaan (dividen)

4. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktu meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu sesuai dengan Anggaran Dasar
5. Mengalihkan kepemilikan saham Perusahaan

### WEWENANG RUPS

Secara umum, RUPS memiliki wewenang khusus yang tidak dapat dimiliki atau dilaksanakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu:

1. Memberikan persetujuan atas RJPP dan RKAP
2. Menetapkan perhitungan alokasi laba Perusahaan untuk:
  - a. Dividen kepada Pemegang Saham
  - b. Cadangan
  - c. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
3. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris
4. Menetapkan target kinerja masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris
5. Melakukan penilaian kinerja secara kolektif maupun individu atas Direksi dan Dewan Komisaris
6. Menetapkan Auditor Eksternal untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan

7. Menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.
8. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap oleh seorang Dewan Komisaris
9. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap oleh Direksi pada Anak Perusahaan
10. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi
11. Membubarkan atau melikuidasi Perusahaan

#### PROSES PENYELENGGARAAN RUPS DAN PEMUNGUTAN SUARA

Angkasa Pura I menyelenggarakan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku. RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% bagian dari jumlah saham dengan hak suara atau perwakilannya, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar menentukan lain. Sebelum melaksanakan RUPS, Angkasa Pura I melakukan pengumuman dan pemanggilan RUPS, dengan memberikan informasi tanggal, waktu, tempat,

dan mata acara RUPS. Informasi mengenai penyelenggaraan RUPS tersedia dan dapat diakses oleh Pemegang Saham di Kantor Angkasa Pura I sejak pemanggilan RUPS hingga tanggal RUPS diadakan.

#### PELAKSANAAN RUPS RKAP UNTUK TAHUN BUKU 2019 DAN REALISASINYA

RUPS RKAP Angkasa Pura I untuk Tahun Buku 2019 telah dilaksanakan pada tanggal 10 Januari tahun 2019 di Kantor Kementerian BUMN Ruang Rapat Lt. 6, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat. Undangan RUPS tentang Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 telah disampaikan kepada Pemegang Saham melalui surat No. A.P.I.134/K.U.01.03/2019/DU-B tanggal 9 Januari 2019. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi menghadiri RUPS RAKP untuk Tahun Buku 2018. Hasil keputusan RUPS disampaikan kepada Pemegang Saham melalui situs [www.silaba.bumn.go.id](http://www.silaba.bumn.go.id) pada tanggal 29 Maret 2019. Risalah RUPS juga telah dimuat di laman Perseroan ([www.ap1.co.id](http://www.ap1.co.id)).

#### Keputusan RUPS RKAP untuk Tahun Buku 2019

##### Agenda Pertama

##### Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019

##### Keputusan

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

##### a. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

##### Aset

Aset Lancar	Rp	4.804.994 Juta
Aset Tidak Lancar	Rp	39.458.734 Juta
<b>Jumlah Aset</b>	<b>Rp</b>	<b>44.263.728 Juta</b>

##### Liabilitas dan Ekuitas

Liabilitas Jangka Pendek	Rp	3.330.904 Juta
Liabilitas Jangka Panjang	Rp	24.106.450 Juta
Ekuitas	Rp	16.826.374 Juta
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>Rp</b>	<b>44.263.728 Juta</b>

## Keputusan RUPS RKAP untuk Tahun Buku 2019

## Agenda Pertama

## Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019

## b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian

## Pendapatan Usaha

Pendapatan Usaha	Rp	9.997.620 Juta
------------------	----	----------------

Beban Operasi	Rp	7.028.255 Juta
---------------	----	----------------

<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>Rp</b>	<b>2.969.365 Juta</b>
--------------------------	-----------	-----------------------

Pendapatan (Beban) Lain-lain	Rp	(428.499) Juta
------------------------------	----	----------------

<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</b>	<b>Rp</b>	<b>2.543.998 Juta</b>
----------------------------------	-----------	-----------------------

Pajak Penghasilan	Rp	528.766 Juta
-------------------	----	--------------

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	Rp	2.015.232 Juta
-----------------------------------	----	----------------

Kepentingan Non Pengendali	Rp	(4.030) Juta
----------------------------	----	--------------

<b>Laba (Rugi) Bersih Diatribusikan ke Entitas Induk</b>	<b>Rp</b>	<b>2.011.201 Juta</b>
--	-----------	-----------------------

## c. Investasi

Operasional	Rp	3.554.343 Juta
-------------	----	----------------

Pengembangan	Rp	13.971.822 Juta
--------------	----	-----------------

<b>Total Investasi</b>	<b>Rp</b>	<b>17.526.165 Juta</b>
------------------------	-----------	------------------------

## d. Sumber Daya Manusia

Organik	:	3.697 orang
---------	---	-------------

Pendukung	:	6.105 orang
-----------	---	-------------

<b>Total Pegawai</b>	<b>:</b>	<b>9.802 orang</b>
----------------------	----------	--------------------

## e. Tingkat Kesehatan Perusahaan

Target tingkat kesehatan RKAP tahun 2019 sesuai dengan perhitungan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBI/2002 ditargetkan skor 92,0 atau Kategori Sehat AA

## f. RKA Dewan Komisaris Tahun 2019 sebagaimana yang tertera dalam buku RKAP Tahun 2019.

## Agenda Kedua

## Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2019

## Keputusan

## a. Program Kemitraan

## Dana Tersedia

Saldo Awal	Rp	-
------------	----	---

Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan	Rp	24.208 Juta
------------------------------------	----	-------------

Penerimaan Jasa Administrasi Pinjaman	Rp	3.251 Juta
---------------------------------------	----	------------

Penerimaan Lain	Rp	44 Juta
-----------------	----	---------

<b>Jumlah Dana Tersedia</b>	<b>Rp</b>	<b>30.503 Juta</b>
-----------------------------	-----------	--------------------

## Penyaluran Dana

Penyaluran Pinjaman ke Mitra Binaan	Rp	25.570 Juta
-------------------------------------	----	-------------

Penyaluran dana pembinaan/hibah	Rp	2.933 Juta
---------------------------------	----	------------

Penyaluran BUMN Khusus	Rp	2.000 Juta
------------------------	----	------------

<b>Jumlah Penyaluran Dana</b>	<b>Rp</b>	<b>30.503 Juta</b>
-------------------------------	-----------	--------------------

<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>0 Juta</b>
--------------------	-----------	---------------

## Agenda Kedua

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan  
dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2019

## a. Program Bina Lingkungan

**Dana Tersedia**

Saldo Awal	Rp	- Juta
Penerimaan Lain	Rp	- Juta
Tambahan dari BUMN Pembina	Rp	39.662 Juta
Penerimaan Lain	Rp	- Juta
<b>Jumlah Dana Tersedia</b>	<b>Rp</b>	<b>39.662 Juta</b>

**Penyaluran Dana**

Penyaluran Dana Bina Lingkungan	Rp	39.662 Juta
<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>- Juta</b>

## Agenda Ketiga

Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*) antara  
Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2019.**Keputusan**

Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*) antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Pemegang Saham PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019 yang mengacu pada Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan Surat Menteri BUMN Nomor S-564/MBU/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019.

## Agenda Keempat

Persetujuan dan Pengesahan *Key Performance Indicator* antara  
Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2019**Keputusan**

Menyetujui dan mengesahkan kontrak *Key Performance Indicator* (KPI) antara Dewan Komisaris dengan pemegang saham tahun 2019 yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 jo. Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

## Agenda Kelima

## Penetapan Indikator Aspek Operasional Tahun 2017

**Keputusan**

Menyetujui dan mengesahkan penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Tahun 2019 PT Angkasa Pura I (Persero) yang merupakan usulan dari Dewan Komisaris.

## Agenda Keenam

## Penyetujuan Penerbitan Obligasi/Sukuk dan/atau Pinjaman Bank/Nonbank

**Keputusan**

Menyetujui penerbitan obligasi/sukuk dan/atau pinjaman bank/nonbank sebesar Rp13 triliun dengan ketentuan, yaitu:

- a. Menaati seluruh peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan penerbitan obligasi/sukuk dan pinjaman bank/nonbank serta memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);

- b. Pelaksanaannya dilakukan secara hati-hati (*prudent*) dan melakukan mitigasi risiko yang berpotensi muncul mulai dari aspek legal, aspek operasional, dan aspek keuangan perusahaan
- c. Penerbitan Obligasi/Sukuk agar dilakukan dengan memperhatikan pemilihan waktu dan tenor yang sesuai dengan kebutuhan pendanaan;
- d. Dewan Komisaris agar melakukan pengawasan, evaluasi dan monitoring secara berkala atas pelaksanaan penerbitan obligasi/sukuk dan pinjaman bank/nonbank tersebut memerhatikan nilainya sangat material bagi perusahaan
- e. Persetujuan penerbitan obligasi/sukuk dan pinjaman bank/nonbank tersebut diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.

### Agenda Ketujuh

#### Persetujuan Pelimpahan Kewenangan.

##### Keputusan

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada:

- a. Direksi untuk melakukan perubahan dan relokasi anggaran program/kegiatan dalam satu kelompok investasi dengan nilai maksimum 10% dari total nilai investasi tahun 2019 pada kelompok investasi tersebut tahun 2019.
- b. Dewan Komisaris untuk melakukan persetujuan perubahan penambahan/penghapusan antarprogram/kegiatan antarkelompok investasi dengan nilai maksimum 10% dari total investasi tahun 2019 tanpa merubah nilai total investasi.

#### Arahan RUPS RKAP untuk Tahun Buku 2019 dan Tindak Lanjutnya

No	Arahan	Tindak Lanjut
1.	Buku RKAP, RKA-PKBL, RKA Dewan Komisaris dan KPI ( <i>Key Performance Indicator</i> ) Dewan Komisaris tahun 2018 yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta saran dan rekomendasi Dewan Komisaris dalam pelaksanaan RKAP Tahun 2018 sebagaimana disampaikan Surat Tanggapan Dewan Komisaris Nomor 76/DK.AP.1/2018 tanggal 18 Desember 2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan RUPS ini dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2018 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris.	Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2019 berpedoman kepada Buku RKAP, RKA-PKBL, RKA Dewan Komisaris dan KPI ( <i>Key Performance Indicator</i> ) Dewan Komisaris tahun 2018 yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta saran dan rekomendasi Dewan Komisaris dalam pelaksanaan RKAP Tahun 2018 sebagaimana disampaikan Surat Tanggapan Dewan Komisaris Nomor 76/DK.AP.1/2018 tanggal 18 Desember 2018 dan melaporkan secara berkala kepada pemegang saham dengan tepat waktu.
2.	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk:	
a.	Melakukan <i>cascading &amp; deployment</i> target-target RKAP dan KPI Korporat ke pejabat/karyawan tingkat bawah, seluruh wilayah, cabang, dan unit kerja, termasuk anak perusahaan.	Direksi telah mempersiapkan <i>cascading</i> dan <i>deployment</i> target RKAP dan Korporat sesuai arahan RUPS.
b.	Melaksanakan RKAP secara efektif dengan biaya efisien, bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengupayakan yang terbaik dalam mencapai target-target RKAP demi memajukan perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan prinsip-prinsip GCG dan profesionalisme.	Melakukan <i>early warning</i> terhadap realisasi RKAP agar target-target dalam RKAP dapat tercapai.



No	Arahan	Tindak Lanjut
c.	Melakukan sinergi BUMN sesuai dengan target RKAP serta aktif berperan serta mendukung kebijakan konsolidasi BUMN, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko.	Telah melakukan sinergi BUMN sesuai dengan target RKAP serta aktif berperan serta mendukung kebijakan konsolidasi BUMN, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko.
d.	<p>Nilai anggaran investasi yang cukup besar perlu menjadi perhatian dan harus diupayakan pencapaiannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja perusahaan, kualitas pelayanan kepada para pengguna bandara, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta Proyek Strategis Nasional. Pelaksanaan program investasi agar didukung dengan perencanaan dan persiapan yang lebih matang sehingga risiko kegagalan dapat dihindari.</p>	<p>Walaupun terjadi penurunan <i>traffic</i> diakibatkan kenaikan tiket pesawat, namun Angkasa Pura I tetap berkomitmen pada dukungan pembangunan nasional dan Proyek Strategis Nasional.</p> <p>Angkasa Pura I juga menerapkan kebijakan strategis terkait investasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Cost and risk management</i>, yaitu melakukan investasi secara selektif dengan berfokus pada efisiensi biaya, manajemen risiko, dan melaksanakannya dengan prinsip-prinsip pengelolaan perseroan kelas dunia dan tata kelola perusahaan dengan baik dan benar.</li> <li>• Menetapkan standar biaya operasional sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pelelangan pekerjaan.</li> <li>• <i>Reengineering</i> infrastruktur jaringan data Angkasa Pura I yang dimaksudkan sebagai pemutakhiran jaringan di bandara dalam rangka mendukung operasional bisnis dan sebagai infrastruktur utama pendukung bisnis <i>digital monetizing</i> di bandara (saat ini sedang dalam tahap persiapan pengadaan).</li> <li>• <i>Predictive analytics</i> yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan di level <i>top management</i>, sudah dalam tahap <i>user requirement gathering</i> melalui <i>event design thinking</i> yang dilaksanakan di Bali tanggal 3 Maret 2020.</li> <li>• AOCS sebagai fasilitas pendukung ACDM (<i>Airport Collaborative Decision Making</i>) dalam proses operasional bandara (saat ini sedang dalam tahap penyusunan dokumen pengadaan setelah dilaksanakan proses standardisasi oleh konsultan perencana AOCS).</li> </ul> <p>Pengoperasian Bandara Internasional Yogyakarta, terminal baru Bandara Internasional Syamsudin Noor, kendaraan <i>foam tender</i> tipe 1 PKP-PK di lima bandara, <i>overlay</i> (Bandara Internasional Sam Ratulangi, Bandara Internasional El Tari, Bandara Internasional Syamsudin Noor), dimulainya pembangunan terminal baru Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, dan T1 Bandara Internasional Juanda, serta ditandatangani KPBU-PKS Bandara Internasional Sentani.</p>
e.	<p>Dalam rangka mendukung operasional dan pengembangan perusahaan, Direksi agar terus meningkatkan kualitas SDM yang profesional serta menerapkan mekanisme <i>reward &amp; punishment</i> secara objektif dan sistem remunerasi berbasis kinerja yang dapat memacu produktivitas karyawan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem remunerasi telah menganut pola 3P, yaitu <i>Pay for Person</i>, <i>Pay for Position</i>, dan <i>Pay for Performance</i> sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP.193/KP.10/2017/DU tanggal 1 November 2017. <i>Pay for Person</i> diberikan dalam bentuk gaji dasar, <i>Pay for Position</i> diberikan dalam bentuk tunjangan jabatan, tunjangan transportasi/mobilitas, dan <i>Pay for Performance</i> diberikan dalam bentuk insentif merit/kinerja.</li> <li>• Mekanisme pemberian <i>reward</i> sudah dilakukan secara obyektif dengan dilakukannya pemberian bonus kepada pegawai tahun 2018 dan 2019 dengan memperhitungkan perolehan capaian <i>Performance Management System</i> (PMS) masing-masing pegawai dan KPI masing-masing lokasi kerja.</li> <li>• Mekanisme pemberian <i>punishment</i> juga telah dilakukan secara obyektif dengan menerapkan aturan disiplin pegawai yang terdapat pada Keputusan Direksi Nomor: KEP.81/KP.14/2018/DU tentang Disiplin Pegawai dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 98 sampai dengan Pasal 138.</li> </ul>
f.		

No	Arahan	Tindak Lanjut
f.	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mempercepat penyelesaian permasalahan terkait aset perusahaan, termasuk pengalihan aset kenavigasian kepada Perum LPPNPI.	II. Pengalihan Alat Kenavigasian - BPYBDS: Harmonisasi RPP: telah dilaksanakan rapat klarifikasi RPP penambahan PMN RI ke dalam modal Perum LPPNPI pada tanggal 6 Maret 2020 di Kementerian Sekretariat Negara yang dipimpin oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, dengan hasil rapat bahwa RPP akan dikembalikan kepada Kementerian Keuangan untuk dilakukan evaluasi kembali atas perbedaan nilai hasil <i>review</i> BPKP dan nilai BAST PMN untuk Bandara Juanda Surabaya.
g.	Terus melakukan pengawasan dan pembinaan anak perusahaan serta menjalankan mekanisme <i>subsidiary governance</i> yang baik, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan serta memberikan kontribusi optimal dan/atau kegiatan bisnisnya menunjang kinerja perusahaan induk.	Untuk meningkatkan <i>value creation</i> anak perusahaan, Angkasa Pura I telah melakukan pembinaan kepada anak perusahaan melalui arahan-arahan strategis sesuai dengan arah pengembangan jangka panjang perusahaan dalam rangka pencapaian target dan peningkatan kinerja baik secara finansial maupun operasional, melakukan analisis terhadap kinerja anak perusahaan dan memberikan saran serta panduan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan performa usaha.
3.	Dalam rangka pengembangan bisnis dan peningkatan nilai perusahaan, agar:	
a.	Melakukan pengembangan bisnis pengelolaan bandara yang diselenggarakan melalui penunjukan Pemerintah atau tender pengelolaan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per tanggal 1 Januari 2020 Angkasa Pura I telah resmi mengelola Bandara Sentani Jayapura melalui skema kerja sama pemanfaatan BMN dengan Kementerian Perhubungan RI. Adapun saat ini Angkasa Pura I sedang fokus melaksanakan pengalihan operasional bandara dan pengelolaan usaha eksisting serta merealisasikan kewajiban investasi sebelum mengembangkan bisnis nonorganik lainnya.</li> <li>2. Angkasa Pura I telah memenuhi kualifikasi sebagai peserta dalam proses seleksi KPBU Hang Nadim Batam. Dalam seleksi tersebut, Angkasa Pura I berkonsorsium dengan Incheon International Airport Corporation dan PT Wijaya Karya (Persero). Saat ini proses seleksi KPBU dalam tahap RFP.</li> <li>3. Pada tanggal 13 Januari 2020 telah ditandatangani perjanjian kerja sama antara Angkasa Pura I dengan Incheon International Airport Corporation (IIAC) tentang penempatan SDM di Terminal 4 Bandara Kuwait. Kerja sama ini adalah Angkasa Pura I akan menempatkan beberapa pegawainya untuk mengelola Bandara Kuwait bersama IIAC. SDM yang akan ditempatkan adalah dari bidang <i>security</i>, operasional, dan komersial.</li> </ol>
b.	Melakukan kerja sama global dan/atau <i>strategic partnership investment participation</i> .	Angkasa Pura I akan segera menjalankan proses seleksi mitra strategis pengembangan dan pengelolaan Bandara Internasional Lombok. Saat ini Angkasa Pura I telah menyelesaikan <i>feasibility study</i> dan dokumen seleksi, serta telah memperoleh tanggapan tertulis Dewan Komisaris dan dukungan pemegang saham untuk menjalankan proses seleksi tersebut.
c.	Melakukan pengembangan bisnis nonorganik di bidang usaha yang potensial dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.	<p>Saat ini Angkasa Pura I telah berupaya melakukan pengembangan bisnis melalui kejasama pemanfaatan lahan-lahan/aset <i>idle</i> sebagai upaya untuk menciptakan bisnis baru (<i>new business</i>) melalui kajian-kajian yang komprehensif serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sehingga diharapkan dapat menciptakan bisnis yang potensial dan <i>feasible</i> sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Adapun rencana kerja sama pemanfaatan atas lahan/aset <i>idle</i> yang saat ini sedang diupayakan di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana kerja sama pemanfaatan lahan di Sunset Road Bali seluas 16.385 m<sup>2</sup>, untuk pengembangan LRT <i>integrated area</i>;</li> <li>2. Rencana kerja sama pemanfaatan lahan Teluk Kelan Bali untuk pengembangan <i>cottage</i> dan <i>premium factory outlet</i>;</li> <li>3. Rencana kerja sama pemanfaatan ekas terminal lama dan bekas hotel bandara di Balikpapan untuk pengembangan bisnis <i>airport hotel</i> dan MICE yang terintegrasi;</li> </ol>

No	Arahan	Tindak Lanjut
c.	Melakukan pengembangan bisnis nonorganik di bidang usaha yang potensial dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Rencana kerjasama pemanfaatan bekas terminal Bandara Selaparang di Mataram, berupa pengembangan bisnis <i>one stop entertainment &amp; recreation indoor and outdoor</i> dengan bentuk promosi sebagai Selaparang Aero Xperience;</li> <li>5. Rencana kerjasama pemanfaatan lahan <i>airport city</i> Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo, berupa pengembangan MICE, hotel, retail, perkantoran, logistik, dan residensial;</li> <li>6. Rencana kerjasama pemanfaatan lahan Demangan dan Babarsari di Yogyakarta;</li> <li>7. Rencana kerjasama pemanfaatan lahan Cendrawasih di Banjarmasin;</li> <li>8. Rencana kerjasama pemanfaatan lahan Semabung di Surabaya berupa pengembangan area gudang Pusat Logistik Berikat (PLB).</li> </ol> <p>Saat ini PT Angkasa Pura I telah merencanakan kerja sama pengembangan komersial dan operasional pada Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali (Fase II). Progres saat ini, telah dilakukan finalisasi kajian kelayakan, yang tentunya dalam pembuatan kajian telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sehingga diharapkan dapat menciptakan bisnis yang potensial dan <i>feasible</i> sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Paralel dengan hal tersebut, telah disiapkan pula rancangan dokumen seleksi untuk mencari mitra strategis. Adapun rencana kerja sama ini adalah PT Angkasa Pura I dibantu mitra strategis melakukan pengembangan komersial dan operasional melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.</p>
d.	Melakukan penataan portofolio bisnis anak perusahaan dan/ atau perusahaan terafiliasi untuk menjalankan bisnis yang lebih terintegrasi dan prospektif.	Untuk meningkatkan <i>value creation</i> anak perusahaan, PT Angkasa Pura I telah melakukan pembinaan kepada Anak Perusahaan melalui arahan- arahan strategis sesuai dengan arah pengembangan jangka panjang perusahaan dalam rangka pencapaian target dan peningkatan kinerja baik secara finansial maupun operasional, melakukan analisis terhadap kinerja anak perusahaan dan memberikan saran serta panduan langkah- langkah perbaikan untuk meningkatkan performa usaha.
4.	Dalam rangka pengelolaan fungsi-fungsi talent management dengan sistematika yang lebih baik, memastikan ketersediaan dan kesiapan <i>talent</i> untuk <i>sustainable growth</i> dari BUMN, menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemilihan calon Direksi BUMN, serta meningkatkan daya tarik BUMN dalam mempertahankan dan/atau mengembangkan talent terbaik yang ada di BUMN, Direksi diminta dukungan dan komitmen dalam:	
a.	Menyelenggarakan <i>talent management system</i> sekaligus menyiapkan <i>talent</i> perusahaan menjadi <i>talent pool</i> di Kementerian BUMN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angkasa Pura I telah memiliki Keputusan Direksi tentang pola karir pegawai yang di dalamnya mengatur tentang pola pergerakan karir pegawai, persyaratan jabatan, <i>succession planning</i>, dan <i>talent mobility</i>.</li> <li>- Kebijakan tersebut akan diintegrasikan dengan sistem informasi yang mengadopsi prinsip GCG (transparansi, akuntabel, <i>responsibility</i>, <i>independency</i>, dan <i>fairness</i>) yang memudahkan pegawai untuk dapat mengatur pola karirnya selama menjadi pegawai perusahaan.</li> <li>- Dalam penyiapan <i>talent</i> perusahaan, Angkasa Pura I telah melakukan asesmen kompetensi berjenjang sesuai dengan level jabatannya yang mengacu pada kamus kompetensi Kementerian BUMN dan Perusahaan dengan menggunakan salah satu Lembaga asesmen yang direkomendasikan oleh Kementerian BUMN.</li> </ul>
b.	Menyediakan <i>talent pool</i> di setiap BUMN minimal sebesar 20%.	Pada tahun 2019, Angkasa Pura I telah mendaftarkan calon suksesor BOD-1 sebanyak 28% atau 14 orang dari total pegawai organik yang menempati posisi Dewan Direksi-1 di perusahaan, yaitu 50 orang.
c.	Menyiapkan kandidat calon Direksi dari pejabat satu tingkat di bawah Direksi (BOD-1) sejumlah 3 suksesor per posisi Direksi.	Pada tahun 2019, Angkasa Pura I telah mendaftarkan calon suksesor Direksi dari pejabat satu level di bawah Direksi (BOD-1) sebanyak 3 orang.

No	Arahan	Tindak Lanjut
5.	<p>Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, Tantiem/Insentif Kinerja merupakan beban biaya yang harus dianggarkan secara spesifik dalam RKAP tahun 2019 dan realisasinya berdasarkan pencapaian target kinerja tahun 2019 yang diputuskan dalam RUPS tahunan.</p>	<p>Telah dianggarkan dalam RKAP tahun 2019 sesuai dengan arahan RUPS, untuk realisasi penghasilan Direksi dan Komisaris berdasarkan Surat Menteri BUMN Nomor : S-4 52/MBU/D5/05/2019 tanggal 31 Mei 2019.</p>
6.	<p>Dalam rangka program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan bina lingkungan (PKBL) maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p>	<p>BUMN dengan usaha kecil dan bina lingkungan (PKBL) maka perlu</p>
a.	<p>Menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor:PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang PKBL.</p>	<p>Angkasa Pura I telah menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor:PER-09/MBU/07/2015 pada tanggal 3 Juli 2015</p>
b.	<p>Dalam rangka pelaksanaan PKBL agar memperhatikan RKA PKBL Tahun 2019 Angkasa Pura I.</p>	<p>Dalam pelaksanaan program PKBL tahun 2019 Angkasa Pura I telah merealisasikan program tersebut sesuai dengan RKA PKBL tahun 2019.</p>
7.	<p>Terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor (BPK, BPKP, KAP, dan SPI) yang belum tuntas, Direksi agar memprioritaskan dan mendorong penyelesaiannya dengan target waktu dan penanggung jawab yang jelas. Fungsi dan peran SPI agar lebih dioptimalkan untuk membantu penyelesaian temuan, serta mendeteksi dan mencegah pelanggaran lebih dini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· KAP: Atas pengendalian internal dan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diselesaikan pada tahun yang sama pada saat pelaksanaan Audit KAP.</li> <li>· BPK: Atas temuan rekomendasi BPK yang belum selesai saat ini masih dalam proses penyelesaian tindak lanjut mengingat upaya penyelesaian melibatkan keputusan pihak eksternal (TNI AL, Ditjen Binamarga, dan pihak maskapai internasional)</li> <li>· Tindak lanjut Temuan SPI: Atas rekomendasi SPI, kantor cabang melakukan pemutakhiran tindak lanjut setiap bulan dengan mengirimkan setiap tanggal 5 dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh masing-masing Auditor.</li> </ul>
		<p>Untuk saat ini sudah dilaksanakan fungsi dan peran SPI sebagai "<i>consultant audit</i>" yang dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan proses tata kelola organisasi.</p>

### PELAKSANAAN RUPS PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UNTUK TAHUN BUKU 2018 DAN REALISASINYA

Angkasa Pura I telah menyelenggarakan RUPS pada tanggal 20 Mei 2019 dengan agenda utama yaitu Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2018. RUPS dilaksanakan di Kantor Kementerian BUMN Ruang Rapat lantai 13, Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 13 Jakarta Pusat. Undangan RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan

Perusahaan Tahun Buku 2018 telah disampaikan kepada para Pemegang Saham melalui surat No. AP.1.3931/KU.01.03/2019/DU pada tanggal 17 Mei 2019. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi menghadiri RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2019. Hasil keputusan RUPS disampaikan kepada Pemegang Saham melalui situs [www.silaba.bumn.go.id](http://www.silaba.bumn.go.id) pada tanggal 29 Maret 2019. Risalah RUPS juga telah dimuat di *website* Perseroan ([www.ap1.co.id](http://www.ap1.co.id)).

#### Keputusan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2018 dan Realisasinya

##### Agenda Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2018.

##### Keputusan

Menyetujui Laporan Tahunan dan Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

##### a. Laporan Laba Rugi Konsolidasian

Uraian	Rp Juta
Pendapatan Usaha	8.521.087,31
Beban Usaha	5.604.292,59
<b>Laba/Rugi Usaha</b>	<b>2.916.794,72</b>
Laba (Rugi) Nonusaha/Lain-lain	93.733,02
<b>Laba Rugi Sebelum Pajak</b>	<b>2.823.061,70</b>
Pajak Penghasilan	817.143,54
<b>Laba Bersih Tahun Berjalan</b>	<b>2.005.918,16</b>
Penghasilan Komprehensif Lain	(71.104,03)
<b>Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>1.934.814,13</b>
<b>Laba yang Dapat Diatribusikan Kepada</b>	
Pemilik Entitas Induk	2.007.018,32
Kepentingan Nonpengendali	(1.100,16)

## b. Laporan Posisi Keuangan

Uraian	Rp Juta
<b>Aset</b>	
Aset Lancar	5.115.606,41
Aset Tidak Lancar	26.439.309,21
<b>Jumlah Aset</b>	<b>31.608.915,62</b>
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>	
Liabilitas Jangka Pendek	7.614.989,55
Liabilitas Jangka Panjang	8.941.701,40
Ekuitas	15.052.224,67
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>31.608.915,62</b>

## c. Tingkat Kinerja Perusahaan

Tingkat Kesehatan	Sehat (AA), Skor 90,50
Skor KPI	113,06

## Agenda Kedua

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun 2018 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tanggal 20 Maret 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2018.

## Keputusan

## a. Laporan Posisi Keuangan

Uraian	Rp Juta
<b>Aset</b>	
Aset Lancar	
Kas dan bank	262,96
Piutang pinjaman mitra binaan	48.039,10
Piutang jasa administrasi piutang pinjaman	300,62
Aset tidak lancar	
Aset tetap bersih	1.803,92
<b>Jumlah Aset</b>	<b>50.406,60</b>
<b>Liabilitas dan Aset Neto</b>	
Liabilitas Jangka Pendek	492,74
Aset Neto	49.913,86
<b>Jumlah Liabilitas dan Neto</b>	<b>50.406,60</b>



## b. Laporan Aktivitas

Uraian	Rp Juta
Pendapatan jasa administrasi piutang pinjaman	3.350,15
Pendapatan bunga	77,42
<b>Total Pendapatan</b>	<b>3.427,56</b>
Penyaluran dana bina lingkungan	3.131,13
Beban administrasi dan umum	11,58
Beban penyusutan aset tetap	580,34
Beban penyisihan penurunan nilai piutang	5.249,15
<b>Total Beban</b>	<b>8.927,21</b>
<b>Penurunan Aset Neto Tidak Terikat Tahun Berjalan</b>	<b>(5.544,65)</b>
<b>Aset Neto Awal Tahun</b>	<b>55.458,50</b>
<b>Aset Neto Akhir Tahun</b>	<b>49.913,86</b>

c. Tingkat Efektivitas penyaluran: 99,03% (skor 3)

d. Tingkat Kolektibilitas pinjaman: 65% (skor 2)

Status: Terealisasi

## Agenda Ketiga

Penetapan penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2018 .

**Keputusan**

Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 sebesar Rp2.007.018.315.308,- yaitu:

- Dividen sebesar Rp461.614.212,520,84 atau 23%
- Cadangan sebesar Rp1.545.404.102.787,16 atau 77%

Status: Terealisasi

## Agenda Kelima

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019.

**Keputusan**

Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 sebesar Rp2.007.018.315.308,- yaitu:

- Menetapkan kembali KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019.
- Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

Status: Terealisasi

Arahan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan  
untuk Tahun Buku 2018 dan Tindak Lanjutnya

No	Arahan	Tindak Lanjut
1.	Semua temuan, catatan dan saran/rekomendasi dari Auditor (KAP dan BPK-RI) pada tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai, agar diprioritaskan dan ditindaklanjuti secara tuntas oleh Direksi dalam tahun 2019.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· KAP: Atas pengendalian internal dan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tahun buku 2018 sudah diselesaikan pada tahun yang sama pada saat pelaksanaan Audit KAP.</li> <li>· BPK: Atas temuan dan rekomendasi BPK yang belum selesai saat ini masih dalam proses penyelesaian tindak lanjut.</li> </ul>
2.	Direksi agar menyampaikan kepada Menteri BUMN Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan PKBL Perseroan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2020.	Telah menyampaikan laporan keuangan dan laporan keuangan PKBL perseroan Tahun Buku 2019 pada tanggal 29 Februari 2020 melalui portal pelaporan, dan masih sesuai dengan target penyampaian laporan keuangan berdasarkan konfirmasi dengan Kementerian BUMN.
3.	Dalam rangka mendukung kebijakan pembentukan perusahaan <i>holding</i> BUMN Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara, Direksi agar melakukan sosialisasi internal dan langkah persiapan lainnya untuk kelancaran proses implementasinya.	Direksi telah melakukan sosialisasi internal dan membentuk tim khusus yang menangani persiapan pembentukan perusahaan <i>holding</i> BUMN untuk kelancaran proses persiapan pembentukan perusahaan <i>holding</i> BUMN.
4.	Terkait dengan pemberlakuan PSAK 71, 72, dan 73 yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020, Direksi agar dapat melakukan persiapan secara lebih dini serta melakukan analisis dan memitigasi dampaknya terhadap bisnis dan laporan keuangan perusahaan.	Manajemen telah melaksanakan analisis dan mitigasi risiko terhadap bisnis dan laporan keuangan perusahaan dengan menunjuk konsultan pendamping dalam rangka implementasi PSAK 71, 72, dan 73.
5.	Dalam rangka mendukung Pemerintah dalam merealisasikan Proyek Strategis Nasional dan peningkatan konektivitas, Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris, diminta untuk fokus dan memprioritaskan pelaksanaan pembangunannya sesuai target dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.	Direksi telah memprioritaskan pelaksanaan pembangunan bandara sesuai dengan target dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.
6.	Dengan memperhatikan pencapaian investasi tahun 2018, Direksi agar melakukan evaluasi atas kendala dan permasalahan yang terjadi guna dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga program investasi tahun 2019 dapat tercapai.	PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan program investasi tahun 2019 antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan lelang tidak mengikat.</li> <li>2. Percepatan pelaksanaan realisasi fisik program <i>multiyears</i> tahun sebelumnya.</li> </ul>
7.	Kinerja anak perusahaan agar terus dioptimalkan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan serta memberikan kontribusi serta menunjang kinerja dan bisnis induk.	Pada tahun 2019, anak perusahaan memberikan kontribusi laba sebesar Rp146.000.000.000 kepada PT Angkasa Pura I (Persero) dan anak perusahaan telah menunjang bisnis induk antara lain dengan berkontribusi dalam pencapaian CSI ( <i>Customer Satisfaction Index</i> ) di bandara-bandara PT Angkasa Pura I (Persero), mendukung operasional bandara-bandara baru dan bandara eksisting, serta mengembangkan pasar di luar PT Angkasa Pura I (Persero).
8.	Proaktif berkoordinasi dengan instansi terkait guna menyelesaikan permasalahan aset-aset perusahaan yang berkaitan dengan pihak ketiga.	Angkasa Pura I telah intens dalam berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi teknis terkait guna menyelesaikan permasalahan aset-aset perusahaan yang berkaitan dengan pihak ketiga, antara lain dengan pihak Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, BPKP, Kejari/Kejati, Setwapres, Kanwil/Kantah BPN.

Arahan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan  
untuk Tahun Buku 2018 dan Tindak Lanjutnya

No	Arahan	Tindak Lanjut
9.	Direksi agar terus mengupayakan peningkatan kinerja perusahaan antara lain melalui penciptaan budaya organisasi modern yang efektif dan produktif, peningkatan kualitas SDM yang profesional serta mengedepankan <i>service excellence</i> dalam pengelolaan bandara sesuai standar internasional.	Direksi telah mengupayakan peningkatan kinerja perusahaan antara lain melalui langkah <i>revenue enhancement</i> , dan <i>cost leadership</i> sehingga membentuk organisasi modern yang efektif dan produktif, peningkatan kualitas SDM yang profesional serta mengedepankan <i>service excellence</i> dalam pengelolaan bandara sesuai standar internasional.
10.	Fungsi dan peran SPI agar lebih dioptimalkan dalam <i>monitoring</i> dan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan serta dalam membangun <i>early warning system</i> sehingga pelanggaran/kecurangan bisa dicegah atau dideteksi lebih dini.	Untuk <i>monitoring</i> tindak lanjut temuan dari masing-masing kantor cabang mengirimkan pemutakhiran tindak lanjut secara rutin dari kantor cabang setiap tanggal 5 setiap bulan yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh masing-masing Auditor. <i>Early warning system</i> diwujudkan melalui pemberian jasa konsultasi oleh SPI pada tahun 2019 dengan adanya fungsi konsultasi yang terpisah dari audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu.
11.	Untuk menunjang peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan BUMN, Direksi agar melakukan pengisian dan pemutakhiran data portal Silaba, portal Aset, portal SDM, portal PKBL, dan portal Publik secara akurat dan tepat waktu.	PT Angkasa Pura I (Persero) telah melakukan pengisian dan pemutakhiran data portal Silaba, portal Aset, portal SDM, portal PKBL, dan portal Publik secara akurat dan tepat waktu.
12.	Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan PKBL, Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal, Laporan Penilaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang telah diaudit oleh KAP, Risalah Rapat Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018 dan tanggapan Dewan Komisaris adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Rapat ini.	Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan PKBL, Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal, Laporan Penilaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang telah diaudit oleh KAP, Risalah Rapat Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018 dan tanggapan Dewan Komisaris adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Rapat ini.
13.	Dalam menjalankan setiap kegiatan operasional perusahaan, Direksi beserta jajaran diminta agar senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> secara konsisten.	Dalam menjalankan setiap kegiatan operasional perusahaan, Direksi beserta jajaran telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> secara konsisten. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direksi Angkasa Pura I sesuai Surat Edaran Nomor ED.32/OM.04/2019/DU tentang Instruksi Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> ) di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero).

## PELAKSANAAN RUPS RKAP UNTUK TAHUN BUKU 2018 DAN REALISASINYA

Pada tanggal 10 Januari 2018, RUPS RKAP untuk Tahun Buku 2018 telah dilaksanakan di Kantor Kementerian BUMN Ruang Rapat lantai 9, Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 13, Jakarta Pusat. Undangan RUPS tentang Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 disampaikan

pada Pemegang Saham melalui surat No. AP.I.95/KU.01.03/2018 tanggal 8 Januari 2018. Seluruh anggota Dewan komisaris dan Direksi menghadiri RUPS RKAP untuk tahun 2018. Pemegang Saham dapat melihat Hasil keputusan RUPS melalui situs [www.silaba.bumn.go.id](http://www.silaba.bumn.go.id) pada tanggal 1 Februari 2018. Risalah RUPS juga telah dimuat di *website* Perseroan ([www.ap1.co.id](http://www.ap1.co.id)).

### Keputusan RUPS RKAP Tahun 2018

#### Agenda Pertama

#### Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018

##### Keputusan

Mengesahkan RKAP Tahun 2018 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

##### a. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Angkasa Pura I (Persero) tahun 2018 ditargetkan Total Aset sebesar Rp38.712.753 juta atau meningkat 55,4% dari prognosa tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

##### Aset

Aset Lancar	Rp	3.889.066 juta
Aset Tidak Lancar	Rp	34.823.687 juta
<b>Jumlah Aset</b>	<b>Rp</b>	<b>38.712.753 juta</b>

##### Liabilitas dan Ekuitas

Liabilitas Jangka Pendek	Rp	2.880.142 juta
Liabilitas Jangka Panjang	Rp	21.464.765 juta
Ekuitas	Rp	14.367.846 juta
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>Rp</b>	<b>38.712.753 juta</b>

##### b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian

Laba Rugi Konsolidasian PT Angkasa Pura I (Persero) tahun 2018 ditargetkan Laba yang Dapat Diatribusikan sebesar Rp1.565.180 juta atau meningkat 19,1% dari prognosa tahun 2017, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan Usaha	Rp	8.560.498 juta
Beban Operasi	Rp	(6.188.761) juta
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>Rp</b>	<b>2.371.737 juta</b>
Pendapatan (Beban) Lain-lain	Rp	(296.712) juta
Bagian Laba Entitas Asosiasi	Rp	(3.500) juta
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</b>	<b>Rp</b>	<b>2.071.525 juta</b>
Pajak Penghasilan	Rp	(504.193) juta
<b>Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan</b>	<b>Rp</b>	<b>1.567.332 juta</b>
Kepentingan Nonpengendali	Rp	(2.152) juta
Laba (Rugi) yang Dapat Diatribusikan	Rp	1.565.180 juta

**c. Investasi**

Operasional	Rp	3.959.961 Juta
Pengembangan	Rp	14.841.814 Juta
<b>Total Investasi</b>	<b>Rp</b>	<b>18.801.775 Juta</b>

**d. Sumber Daya Manusia**

Pegawai Organik	:	3.531 orang
Pegawai Pendukung	:	5.643 orang
<b>Total Pegawai</b>	<b>:</b>	<b>9.174 orang</b>

**e. Tingkat Kesehatan Perusahaan**

Target tingkat kesehatan RKAP tahun 2018 sesuai perhitungan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 ditargetkan skor 92 atau Kategori Sehat AA.

**f. RKA Dewan Komisaris**

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris sebagaimana yang tertera di dalam Buku RKAP Tahun 2018 Angkasa Pura I.

Status: Terealisasi

## Agenda Pertama

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan  
dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2018**Keputusan**

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018, sebagai berikut:

**a. Program Kemitraan**

Saldo Awal	Rp	0 juta
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan	Rp	26.098 juta
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	Rp	4.836 juta
Pendapatan Lain	Rp	81 juta
Penerimaan Lain	Rp	0 juta
Alokasi Beban BUMN Pembina	Rp	0 juta
<b>Jumlah Jasa Tersedia</b>	<b>Rp</b>	<b>31.016 juta</b>
<b>Penyaluran Dana dan Biaya Operasional</b>		
Penyaluran Pinjaman kepada Mitra Binaan	Rp	27.031 juta
Penyaluran melalui BUMN Pembina Lain	Rp	0 juta
Penyaluran Dana Pembinaan MB (Hibah)	Rp	3.984 juta
<b>Jumlah Penyaluran Dana dan Biaya Operasional</b>	<b>Rp</b>	<b>31.016 juta</b>
<b>Saldo Dana per 31 Desember</b>	<b>Rp</b>	<b>0 juta</b>

**b. Program Bina Lingkungan****Dana Tersedia**

Saldo Awal	Rp	0 juta
Alokasi Beban Perusahaan	Rp	34.764 juta
<b>Jumlah Dana Tersedia</b>	<b>Rp</b>	<b>34.764 juta</b>
<b>Penyaluran Dana</b>		
Penyaluran Dana Bina Lingkungan	Rp	34.764 juta
<b>Saldo Dana per 31 Desember</b>	<b>Rp</b>	<b>0 juta</b>

**Status: Terealisasi**

## Agenda Ketiga

Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2018

**Keputusan**

Menyetujui dan mengesahkan *Key Performance Indicator* (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2018 antara Direksi dan Dewan Komisaris Angkasa Pura I dengan Pemegang Saham PT Angkasa Pura I (Persero), yang telah mengacu pada Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan surat Menteri BUMN Nomor S-487/MBU/08/2017 tanggal 31 Agustus 2017 perihal Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018.

**Status: Terealisasi**

## Agenda Keempat

Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2018

**Keputusan**

Menyetujui dan mengesahkan *Key Performance Indicator* (KPI) Tahun 2018 antara Dewan Komisaris Angkasa Pura I dengan Pemegang Saham PT Angkasa Pura I (Persero) yang telah mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 jo. PER-01/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

**Status: Terealisasi**

## Agenda Kelima

Persetujuan Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Tahun 2018.

**Keputusan**

Menyetujui dan mengesahkan penerapan indikator aspek operasional untuk penilaian tingkat kesehatan tahun 2018 Angkasa Pura I yang merupakan usulan dari Dewan Komisaris.

**Status: Terealisasi**

## Agenda Keenam

Penerbitan Obligasi dan/atau Pinjaman Bank/Nonbank Sebesar Rp13,5 triliun.

**Keputusan**

Menyetujui penerbitan obligasi dan/atau pinjaman bank/honbank sebesar Rp13,5 triliun dengan ketentuan, yaitu:



- a. Mentaati seluruh peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan penerbitan obligasi dan pinjaman bank/nonbank serta memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
- b. Pelaksanaan dilakukan secara hati-hati/*prudent* dan melakukan mitigasi risiko terhadap semua risiko yang berpotensi muncul, mulai dari aspek legal, aspek operasional, dan aspek keuangan Angkasa Pura I.
- c. Penerbitan obligasi agar dilakukan dengan memperhatikan pemilihan waktu dan tenor yang tepat serta memperhitungkan potensi risiko yang ada, terutama risiko gagal bayar (*default risk*).
- d. Dewan Komisaris agar melakukan pengawasan, evaluasi, dan *monitoring* secara berkala atas pelaksanaan penerbitan obligasi dan pinjaman bank/nonbank tersebut memperhatikan nilainya sangat material bagi Angkasa Pura I.
- e. Persetujuan penerbitan obligasi dan pinjaman bank/nonbank tersebut diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan ini.

**Status: Terealisasi**

#### Agenda Ketujuh

Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perubahan dan relokasi anggaran antar program/kegiatan termasuk perubahan penambahan/penghapusan program/kegiatan investasi tahun 2018 dengan nilai total maksimum 10% dari total investasi tanpa merubah nilai total investasi

#### Keputusan

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada:

- a. Direksi untuk melakukan perubahan dan relokasi anggaran antar program/kegiatan investasi dengan nilai maksimum 10%.
- b. Dewan Komisaris untuk melakukan persetujuan perubahan penambahan/penghapusan program/kegiatan investasi dengan nilai maksimum 10% dari total investasi tahun 2018 tanpa merubah nilai total investasi.

**Status: Terealisasi**

#### Arahan RUPS RKAP Tahun 2018 dan Tindak Lanjutnya

No	Arahan	Tindak Lanjut
1.	Buku RKAP, RKA-PKBL, RKA Dewan Komisaris dan KPI Dewan Komisaris tahun 2018 yang telah disetujui dan disahkan RUPS serta saran dan rekomendasi Dewan Komisaris dalam pelaksanaan RKAP Tahun 2018, sebagaimana disampaikan Surat Tanggapan Dewan Komisaris Nomor 01/DK.AP.I/2008 tanggal 8 Januari 2018, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan RUPS ini dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2018 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris.	Buku RKAP, RKA-PKBL, RKA Dewan Komisaris dan KPI Dewan Komisaris tahun 2018 yang telah disetujui dan disahkan RUPS serta saran dan rekomendasi Dewan Komisaris dalam pelaksanaan RKAP Tahun 2018, sebagaimana disampaikan Surat Tanggapan Dewan Komisaris Nomor 01/DK.AP.I/2008 tanggal 8 Januari 2018, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan RUPS ini dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2018 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris.

## Arahan RUPS RKAP Tahun 2018 dan Tindak Lanjutnya

No	Arahan	Tindak Lanjut
2.	<p>Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sinergi antar-BUMN yang direalisasikan sesuai target dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip GCG.</li> <li>Nilai investasi yang cukup besar perlu menjadi perhatian dan harus diupayakan pencapaiannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja PT Angkasa Pura I (Persero), peningkatan pelayanan kepada para pengguna bandara, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta Program Proyek Strategis Nasional.</li> <li>Mempersiapkan kebutuhan kompetensi SDM sesuai dengan arah pengembangan Perusahaan kedepannya.</li> <li>Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian atas permasalahan aset Perusahaan.</li> <li>Terus melakukan pengawasan dan pembinaan Anak Perusahaan, agar setiap aksi korporasi yang dilakukan dapat meningkatkan kinerja Perusahaan dan memberikan kontribusi yang optimal bagi PT Angkasa Pura I (Persero).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) telah senantiasa mengupayakan sinergi antar-BUMN yang direalisasikan sesuai target dengan menjunjung tinggi prinsip GCG.</li> <li>Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) telah memperhatikan realisasi penggunaan investasi untuk mendukung peningkatan kinerja Perusahaan, peningkatan pelayanan kepada para pengguna bandara, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta Program Proyek Strategis Nasional.</li> <li>Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) telah mempersiapkan kebutuhan kompetensi SDM sesuai dengan arah pengembangan Perusahaan ke depannya.</li> <li>Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris telah melaksanakan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian atas permasalahan aset Perusahaan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bandara Juanda Surabaya: Direktur SDM dan Umum memaparkan secara singkat permasalahan aset tanah di Bandara Juanda-Surabaya kepada Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN dalam rapat koordinasi dengan Pejabat Kementerian ATR/BPN Wilayah Jawa Timur terkait Penyelesaian Aset Bermasalah BUMN di Wilayah Jawa Timur pada tanggal 21 Desember 2018 sesuai undangan Kementerian BUMN Nomor Und-39/07.MBU.4/12/2018, yang telah ditindaklanjuti dengan penyampaian surat kepada Dirjen Pengadaan Tanah ATR Nomor AP.I.626/HK.08.08/2019/DP-B tanggal 23 Januari 2019 terkait penyampaian data dukung berupa Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 592/KM.6/2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan.</li> <li>- Perum LPPNPI: telah dilaksanakan rapat pembahasan terkait pengenaan tarif sewa tanah dan ruangan kepada Perum LPPNPI, PT Angkasa Pura I (Persero) yang diwakili oleh Direktur Pelayanan dan Pemasaran bersama Kementerian BUMN, Perum LPPNPI dan PT Angkasa Pura II (Persero). Terus melakukan pengawasan dan pembinaan Anak Perusahaan, agar setiap aksi korporasi yang dilakukan dapat meningkatkan kinerja Perusahaan dan memberikan kontribusi yang optimal bagi PT Angkasa Pura I (Persero).</li> </ul> </li> </ol>
3.	<p>Dalam rangka pengelolaan fungsi-fungsi manajemen talenta dengan sistematis yang lebih baik, memastikan ketersediaan dan kesiapan talenta untuk <i>sustainable growth</i> dari BUMN, menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemilihan calon direksi BUMN, serta meningkatkan daya tarik BUMN dalam mempertahankan dan/atau mengembangkan <i>talent</i> terbaik yang ada di BUMN, direksi diminta dukungan dan komitmen untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan sistem manajemen talenta sekaligus menyiapkan talenta PT Angkasa Pura I (Persero) menjadi <i>talent pool</i> di Kementerian BUMN.</li> <li>Menyediakan <i>talent pool</i> di setiap BUMN minimal 20%.</li> <li>Menyediakan kandidat calon direksi dari BOD-1 sejumlah 3 suksesor per posisi BOD.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>PT Angkasa Pura I (Persero) telah melaksanakan fungsi sistem manajemen talenta untuk masuk ke dalam <i>talent pool</i> Kementerian BUMN dan menyediakan kandidat calon direksi.</li> <li>Telah mendaftarkan 7 (tujuh) direksi PT Angkasa Pura I (Persero) atau seluruh direksi ke dalam <i>talent pool</i> di Kementerian BUMN.</li> <li>Menyediakan kandidat calon direksi dari BOD-1 dengan jumlah keseluruhan yaitu 56 orang dan jumlah terdaftar 17 orang atau 30%. Adapun jumlah dengan minimal 2,83 adalah sejumlah 6 orang. Jumlah yang belum terdaftar adalah 39 orang. Adapun 11% telah memenuhi syarat.</li> </ol>

## Arahan RUPS RKAP Tahun 2018 dan Tindak Lanjutnya

No	Arahan	Tindak Lanjut
4.	Tantiem/Insentif Kinerja merupakan beban biaya yang harus dianggarkan secara spesifik dalam RKAP tahun 2018 dan realisasinya berdasarkan pencapaian target kinerja tahun 2018 yang diputuskan dalam RUPS Tahunan.	Telah dianggarkan sesuai dengan arahan RUPS.
5.	Dalam rangka program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan bina lingkungan (PKBL), maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Direksi diminta untuk menetapkan SOP pelaksanaan PKBL yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN.</li> <li>Dalam rangka pelaksanaan PKBL agar memperhatikan telaah RKA PKBL Tahun 2018 PT Angkasa Pura I (Persero).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP untuk menyesuaikan Peraturan tersebut adalah sebagai berikut: Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.239/KU.12/2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal Perubahan atas Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.103/KU.12/2017 tentang Pedoman Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero).</li> <li>Seluruh pelaksanaan kegiatan PKBL telah sesuai dengan telaah RKA 2018 kecuali dalam pencapaian kolektibilitas di mana target dalam telaah adalah 80% dan realisasi kolektibilitas tahun 2018 adalah sebesar 74,54%.</li> </ol>
6.	Temuan, catatan dan saran Dewan Komisaris, Auditor Internal maupun Auditor Eksternal atas Laporan Keuangan tahun sebelumnya agar ditindaklanjuti secara tuntas oleh Direksi dalam tahun 2018.	Temuan, catatan, dan saran Dewan Komisaris, Auditor Internal maupun Auditor Eksternal atas Laporan Keuangan tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh Direksi dan telah disampaikan kepada BPK untuk mendapatkan ketetapan.

#### PELAKSANAAN RUPS PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UNTUK TAHUN BUKU 2017 DAN REALISASINYA

Pada tahun 2018, RUPS terkait Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2017 telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2018 di Kantor Kementerian BUMN Ruang Rapat lantai 13, Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 13, Jakarta.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi menghadiri acara tersebut setelah menerima Surat Undangan No. AP.I.2495/KU.01.03/2018 per tanggal 20 April 2018 tentang RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2017. Pada tanggal 15 Februari 2018, hasil keputusan RUPS disampaikan kepada Pemegang Saham melalui situs [www.fis.bumn.go.id](http://www.fis.bumn.go.id) dan risalah RUPS dimuat di *website* perseroan ([www.ap1.co.id](http://www.ap1.co.id)).

#### Keputusan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2017

##### Agenda Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perusahaan dan Anggota Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perusahaan selama Tahun Buku 2017.

##### Keputusan

Persetujuan Laporan Tahunan dan Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2017, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh KAP Djoko, Sisik, dan Indra, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

#### a. Laporan Laba Rugi Konsolidasian

Laporan Bersih Konsolidasian Tahun Buku 2017 sebesar Rp1.420.353.052.438 yaitu dengan rincian laba sebagai berikut:

Pendapatan Usaha	Rp	7.194.348
Beban Usaha	Rp	5.306.848
<b>Laba/Rugi Usaha</b>	<b>Rp</b>	<b>1.887.500</b>
Pendapatan Nonusaha (Lain-lain)	Rp	(98.003)
Laba Rugi Sebelum Pajak	Rp	1.789.497
Pajak Penghasilan	Rp	369.144
<b>Laba Bersih Tahun Berjalan</b>	<b>Rp</b>	<b>1.420.353</b>
Penghasilan Komprehensif Lain	Rp	126.939
<b>Laba Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>Rp</b>	<b>1.547.292</b>
<b>Laba yang Dapat Diatribusikan Kepada</b>		
Pemilik Entitas Induk	Rp	1.418.577
Kepemilikan Nonpengendali	Rp	1.776
<b>Jumlah Laba yang Dapat Diatribusikan</b>	<b>Rp</b>	<b>1.420.353</b>

#### b. Laporan Posisi Keuangan

Total Aset atau Liabilitas dan Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp25.051.809.830.022 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Aset</b>		
Aset Lancar	Rp	5.897.001
Aset Tidak Lancar	Rp	19.154.809
<b>Jumlah Aset</b>	<b>Rp</b>	<b>25.051.810</b>
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>		
Liabilitas Jangka Pendek	Rp	4.268.030
Liabilitas Jangka Panjang	Rp	7.382.319
Ekuitas	Rp	13.401.461
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>Rp</b>	<b>25.051.810</b>

#### c. Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*)

Realisasi Kontrak Manajemen Tahun 2017 adalah:

No	Uraian	Skor	
1	Perspektif Keuangan dan Pasar	Pertumbuhan Pendapatan Nonaeronautika	2,65
		EBITDA	6,22
		<i>Operating Ratio</i>	6,11
		<i>Duty Free Sales per Passengers</i>	5,41
2	Perspektif Fokus Pelanggan	Indeks Kepuasan Pelanggan	8,40

No	Uraian	Skor
	Tingkat Pelayanan ( <i>Level of Service</i> ):	
	a. PJP4U	
	1) <i>Skid Resistance</i>	1,05
	2) <i>Response Time</i> Fasilitas PKPPK	1,00
	3) Ketersediaan <i>Airfield Lighting Serviceability</i>	1,04
	b. PJP2U	
	1) <i>Baggage Handling Performance</i>	
	i. Penyerahan Bagasi Pertama	0,53
	ii. Penyerahan Bagasi Terakhir	0,53
	1) Pemeriksaan Sekuriti Penumpang dan Barang di Terminal	
	i. Kondisi Normal	1,00
	ii. Kondisi Khusus	1,00
	3) Fasilitas Umum Kesejukan Ruang Terminal	1,05
	Inovasi Produk ke Pelanggan	7,35
3	Perspektif Efektifitas Produk dan Proses	Indeks Kepuasan Pelanggan
	a. Realisasi Program Investasi	2,92
	b. Realisasi Fisik Investasi	1,38
	Implementasi <i>Roadmap</i> BUMN Sektor Konektivitas	4,38
	Implementasi Sinergi BUMN	5,00
	<i>Increase Number of Cargo Capacity and Handling</i>	5,25
4	Perspektif Efektifitas Produk dan Proses	Rata-rata KPI Individu
	Indeks Kepuasan Pegawai	8,00
5	Perspektif Kepemimpinan Tata Kelola dan Tanggung Jawab Masyarakat	Skor Implementasi GCG
	Skor Implementasi KPKU	3,12
	Efektivitas Penyaluran PKBL	4,80
	Penyamapian Laporan Elektronik	6,15
	<b>Total</b>	96,43

#### d. Realisasi Investasi

Realisasi Investasi Tahun 2017 adalah:

No	Uraian	Jumlah
<b>Rutin</b>		
1	Keselamatan Penerbangan/Keamanan Pelayanan	503.899
2	Pelayanan	492.389
3	Pendapatan	663.689
<b>Non-Rutin</b>		
4	Pengembangan Bandara	750.243
<b>Jumlah</b>		2.410.220

#### e. Sumber Daya Manusia

Realisasi Sumber Daya Manusia Tahun 2017 adalah:

No	Uraian	Jumlah (Rp Juta)
1	Pegawai Tetap	3.350
2	Pegawai Tidak Tetap	5.378
<b>Jumlah</b>		<b>8.728</b>

#### f. Laporan Posisi Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Uraian	Jumlah (Rp Juta)
<b>Aset</b>	
Kas dan Setara Kas	663.451
Piutang Penyaluran kepada BUMN Lain	5.000.000
Piutang Pinjaman MB Bersih	47.512.786
Piutang Lain-lain	385.791
Aset Tetap Bersih	2.384.264
<b>Jumlah Aset</b>	<b>55.916.292</b>
<b>Liabilitas dan Aset Bersih</b>	
Liabilitas	457.787
Aset Bersih	55.458.505
<b>Jumlah Liabilitas dan Aset Neto</b>	<b>55.916.292</b>

#### g. Laporan Aktivitas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Uraian	Jumlah (Rp Juta)
<b>Penerimaan</b>	
Alokasi Laba dari BUMN Pembina	4.059.477
<b>Pendapatan</b>	
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	4.004.018
Pendapatan Bunga	282.582
Pendapatan Lain-lain	280.701
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>8.626.778</b>
Penyaluran Dana Pembinaan PK	2.763.270
Penyaluran Dana Bina Lingkungan	7.858.054
Beban Administrasi PK dan BL	16.765
Beban Penyusutan Aktiva Tetap	599.317
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang	722.376
<b>Jumlah Penyaluran dan Beban</b>	<b>11.959.782</b>
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih	(3.333.004)
<b>Aset Bersih pada Awal Periode</b>	<b>58.791.509</b>
<b>Aset Bersih pada Akhir Periode</b>	<b>55.458.505</b>



**h. Tingkat Kinerja Perusahaan**

Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Tingkat Kesehatan BUMN dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Realisasi Bobot
A. Aspek Keuangan	44,50
B. Aspek Operasional	33,00
C. Aspek Administrasi	15,00
<b>Total</b>	<b>92,50 "SEHAT AA"</b>

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perusahaan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perusahaan, serta terhadap pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017, dengan ketentuan:

- Sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan prosedur hukum yang berlaku, dan
- Tindakan tersebut tercatat dan dilaporkan dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.

**Status: Terealisasi**

**Agenda Kedua**

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan selama Tahun Buku 2017.

**Keputusan**

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2017 sebesar Rp1.418.577.150.922 yaitu:

- Dividen sebesar Rp283.716.000.000 atau 20,00%.
- Cadangan sebesar Rp1.134.861.150.922 atau 80,00%.

**Status: Terealisasi**

**Agenda Ketiga**

Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris.

**Keputusan**

Penetapan besarnya gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya tahun 2018 serta tantiem tahun buku 2017 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Angkasa Pura I akan ditetapkan secara tersendiri.

**Status: Terealisasi**

**Agenda Keempat**

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018.

**Keputusan**

- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan proses pelelangan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berafiliasi Internasional dalam rangka audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018.
- Menyampaikan hasil pengadaan KAP kepada Menteri BUMN untuk dilakukan penetapan atas KAP yang melaksanakan audit Laporan Keuangan dan Laporan Pelaksanaan PKBL untuk Tahun Buku 2018.

**Status: Terealisasi**

## Arahan RUPS RKAP Tahun 2018 dan Tindak Lanjutnya

No	Arahan	Tindak Lanjut
1.	Semua temuan, catatan dan saran Dewan Komisaris, Audit Internal, maupun Auditor Eksternal atas Laporan Keuangan tahun 2017 agar ditindaklanjuti secara tuntas oleh Direksi dalam tahun 2018. Direksi agar mengupayakan temuan yang sama dalam bidang yang sama tidak boleh terjadi lagi pada masa yang akan datang dan hasil tindak lanjutnya agar dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.	Direksi telah mengupayakan temuan yang sama dalam bidang yang sama tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang dan hasil tindak lanjutnya telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
2.	Menyampaikan kepada Menteri BUMN Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2019.	Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2019.
3.	Berkenaan dengan surat Direksi Nomor AP.I.2264/OM.04/2018/DU tanggal 11 April 2018 hal Perubahan Nomenklatur Jabatan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero), Direksi diminta untuk menyusun kajian, yang memuat antara lain tugas dan fungsi, beban kerja masing-masing Direktorat serta tanggapan Dewan Komisaris, selanjutnya disampaikan dalam surat tersendiri untuk mendapatkan keputusan Pemegang Saham.	Direksi telah menyusun kajian, yang memuat antara lain tugas dan fungsi, beban kerja masing-masing Direktorat dengan hasil kajian yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. KEP.101/OM.01.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero).
4.	Terkait dengan pengembangan Proyek Strategis Nasional, kepada Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris, diminta untuk dapat melaksanakan pembangunannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.	Pembangunan proyek bandara telah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.
5.	Melakukan evaluasi atas realisasi investasi tahun 2017, yang selanjutnya hasil evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan realisasi investasi sesuai dengan program investasi tahun 2018 serta mendorong pertumbuhan dan peningkatan kinerja Perusahaan guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional di tahun yang akan datang.	Seluruh unit kerja di PT Angkasa Pura I (Persero) telah melakukan evaluasi atas realisasi investasi tahun 2017 untuk meningkatkan realisasi investasi tahun 2018 serta mendorong pertumbuhan dan peningkatan kinerja Perusahaan guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional di tahun yang akan datang.
6.	Aset-aset BPYBDS dalam rangka peralihan status Perum LPPNPI dari Kementerian Perhubungan, dan eks-PT Angkasa Pura I (Persero) yang belum terealisasi menjadi Penyertaan Modal Negara Perum LPPNPI, diminta Direksi untuk terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya (Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, BPKP).	Penyelesaian peralihan aset-aset BPYBDS kepada Perum LPPNPI yang belum terealisasi menjadi Penyertaan Modal Negara Perum LPPNPI, telah dilaksanakan rapat Lanjutan Pembahasan Antar Kementerian Terkait Penyempurnaan Konsep Kajian Bersama dan Draft RPP Penambahan PMN pada Perum LPPNPI (BPYBDS Kementerian Perhubungan eks-PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero)) pada tanggal 18 Januari 2019 dengan Perum LPPNPI, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN serta Kementerian Hukum dan HAM, dengan hasil rapat akan dilakukan kajian oleh Kementerian Keuangan terkait mekanisme pengalihan aset-aset BPYBDS tersebut, yang akan ditindaklanjuti dengan rencana rapat pada tanggal 8 Februari 2019 di Yogyakarta sesuai undangan rapat Perum LPPNPI Nomor UND.KRT.01.05/00/LPPNPI/02/2019/212.

## Arahan RUPS RKAP Tahun 2018 dan Tindak Lanjutnya

No	Arahan	Tindak Lanjut
7.	Melakukan optimalisasi pembinaan Anak Perusahaan, sehingga setiap aksi korporasi yang dilakukan dapat meningkatkan kinerja Perusahaan.	Untuk meningkatkan <i>value creation</i> Anak Perusahaan, PT Angkasa Pura I (Persero) telah melakukan pembinaan kepada Anak Perusahaan melalui arahan strategis dalam rangka pencapaian target dan peningkatan kinerja baik secara finansial maupun operasional, analisis terhadap kinerja Anak Perusahaan dan memberikan saran serta panduan langkah-langkah perbaikan, evaluasi performa kegiatan usaha.
8.	Menyelesaikan seluruh permasalahan aset-aset Perusahaan yang berkaitan dengan pihak ketiga (antara lain TNI, Kementerian Pehubungan dan Perum LPPNPI).	<p>Progres penyelesaian seluruh permasalahan aset-aset Perusahaan dengan pihak ketiga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TNI: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bandara Juanda Surabaya: telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Pejabat Kementerian ATR/BPN Wilayah Jawa Timur terkait penyelesaian aset bermasalah BUMN di wilayah Jawa Timur pada tanggal 21 Desember 2018 sesuai undangan Kementerian BUMN Nomor Und-39/07.MBU.4/12/2018. Progres terakhir, dalam tahap penyusunan evaluasi atau kajian secara komprehensif terkait tindak lanjut penyelesaian permasalahan <i>double account</i> sesuai arahan Tim Biro Hukum Kementerian BUMN pada tanggal 24 Januari 2019.</li> <li>b. Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan dan Bandara Sam Ratulangi Manado: telah dilaksanakan rapat pembahasan <i>draft</i> perjanjian kerja sama antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan TNI AU pada Bandara Sam Ratulangi Manado, Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada tanggal 29 Januari 2018 sesuai undangan rapat PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor AP.I.609/HK.06/2019/DP-B. Progres terakhir, dalam tahap revisi <i>draft</i> perjanjian kerja sama pinjam pakai lahan dengan TNI AU.</li> <li>c. Bandara Internasional Lombok: dalam tahap pengukuran luas lahan yang akan digunakan oleh TNI AU.</li> <li>d. Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang: dalam tahap evaluasi dan pembahasan terkait penyerahan aset terminal lama kepada TNI AD.</li> <li>e. Bandara Adisutjipto Yogyakarta dan Bandara Adi Soemarmo Solo: dalam tahap kajian perhitungan usulan besaran kontribusi tetap yang akan diberikan kepada TNI AU.</li> </ol> </li> <li>2. Kementerian Perhubungan: terkait pembayaran sewa BMN di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan Bandara Juanda Surabaya, dalam tahap pembahasan <i>draft</i> Perjanjian Kerja Sama.</li> <li>3. Perum LPPNPI: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terkait pengenaan besaran sewa tanah dan ruang, dalam tahap pembahasan tindak lanjut dengan Kementerian BUMN dan Perum LPPNPI.</li> <li>b. Terkait pengalihan aset kenavigasian tahap II, terdapat beberapa Kantor Cabang Perum LPPNPI yang belum sepakat atas hasil inventarisasi aset tersebut.</li> </ol> </li> </ol>

## Arahan RUPS RKAP Tahun 2018 dan Tindak Lanjutnya

No	Arahan	Tindak Lanjut
9.	Mengembangkan pengelolaan bandara sehingga dapat meningkatkan kinerja bandara keseluruhan khususnya nonaeronautika dengan standar internasional. Untuk kinerja bandara yang masih rugi, agar dilakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh supaya tidak menjadi beban bagi PT Angkasa Pura I (Persero) secara konsolidasian.	Sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja bandara keseluruhan, khususnya nonaeronautika dengan standar internasional Angkasa Pura I telah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan kelas dunia dengan tata kelola perusahaan yang baik dan benar, meningkatkan kinerja Perusahaan secara efektif dan berkesinambungan ( <i>service excellence</i> dan <i>profitable revenue</i> ), serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya Perusahaan yang meliputi SDM, sistem, organisasi dan fasilitas. Untuk kinerja bandar udara yang masih rugi Angkasa Pura I telah melakukan langkah-langkah antara lain pengembangan bisnis noninti (nonoperasional bandara) melalui pembentukan/ pengembangan Anak Perusahaan untuk mengoptimalkan pendapatan bisnis, terutama pendapatan nonaeronautika serta perubahan model bisnis dengan Anak Perusahaan.
10.	Mematuhi dan melaksanakan ketentuan, prosedur hukum dan Anggaran Dasar Perusahaan dan manajemen risiko secara sungguh-sungguh dalam setiap kegiatan Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).	Angkasa Pura I telah mematuhi dan melaksanakan ketentuan, prosedur hukum dan Anggaran Dasar Perusahaan dan manajemen risiko secara sungguh-sungguh dalam setiap kegiatan Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).
11.	Meningkatkan <i>compliance</i> /pemenuhan portal aset, portal <i>Financial Information System</i> (FIS), portal SDM, portal PKBL, portal <i>Integrated Talent Management System</i> (ITMS) dan portal publik. Sehubungan peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan Perusahaan, kami minta agar pemutakhiran data, ketepatan dan kelengkapan pengisian portal tersebut menjadi perhatian utama Dewan Pengawas dan Direksi.	Angkasa Pura I senantiasa meningkatkan pemenuhan portal aset, portal <i>Financial Information System</i> (FIS), portal SDM, portal PKBL, portal <i>Integrated Talent Management System</i> (ITMS) dan portal publik.
12.	Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan PKBL, Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal, Laporan Penilaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang telah diaudit oleh KAP Djoko, Sidik & Indra, Risalah Rapat Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2017 dan tanggapan Dewan Komisaris adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Rapat ini.	Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan PKBL, Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal, Laporan Penilaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang telah diaudit oleh KAP Djoko, Sidik & Indra, Risalah Rapat Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2017 dan tanggapan Dewan Komisaris adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Rapat ini.

# Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Angkasa Pura I bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan usaha perusahaan dan pemenuhan prinsip-prinsip GCG. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, dan peraturan lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham. Angkasa Pura I juga menjamin bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan, dan komitmen untuk memenuhi tugas, fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif, tepat, dan cepat. Dewan Komisaris harus dapat bertindak secara independen, tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*), baik antar anggota maupun dengan anggota Direksi, yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas.

## BOARD CHARTER DEWAN KOMISARIS

*Board Charter/Board Manual* Dewan Komisaris tertuang dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.144/OM.01/2019 KEP.06/DK.AP.I/2019 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Secara umum, *Board Charter* Dewan Komisaris mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Persyaratan dan Komposisi Dewan Komisaris.
2. Tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
4. Wewenang Dewan Komisaris.
5. Hak Dewan Komisaris.
6. Etika jabatan.
7. Rapat Dewan Komisaris.
8. Komite-komite Dewan Komisaris.
9. Sekretaris Dewan Komisaris.

## KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris Angkasa Pura I dipilih dan diangkat berdasarkan kriteria yang tercantum dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Charter/Board Manual*). Saat ini seluruh anggota Dewan Komisaris Angkasa Pura I

telah memenuhi kriteria tersebut, yaitu:

- a. Kriteria formal, yaitu:
  - Cakap melakukan perbuatan hukum.
  - Tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
  - Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain.
  - Tidak memegang jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, BUMS, dan jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon/anggota Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
  - Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai dalam rangka menjalankan fungsinya.
- b. Kriteria material, yaitu:
  - Memiliki integritas, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji, serta perbuatan lain yang merugikan Perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
  - Memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
  - Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Secara garis besar, tugas pokok Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Mematuhi Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
2. Menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan prinsip itikad baik, kehati-hatian, dan tanggung jawab untuk kepentingan Perusahaan, sesuai maksud dan tujuan Perusahaan.
3. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP dan RKAP serta ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
4. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
5. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
6. Menetapkan kebijakan/mekanisme mengenai pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Komisaris terhadap rancangan RJPP dan RKAP.
7. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP.
8. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris untuk memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJPP.
9. Menyusun rencana untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan Direksi menjalankan pengurusan Perusahaan sesuai dengan RKAP dan/atau RJPP, serta memasukannya ke dalam rencana kerja tahunan Dewan Komisaris.
10. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS.
11. Menetapkan kebijakan yang mengatur tentang pembahasan gejala menurunnya kinerja Perusahaan, memberikansaran kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada penurunan kinerja Perusahaan, dan melaporkan kepada RUPS jika terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
12. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan, serta melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala penurunan kinerja Perusahaan.
13. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan.
14. Menetapkan kebijakan/pedoman yang mengatur Komisaris untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, serta perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga.
15. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris yang membahas kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, serta perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga. serta memasukan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris.
16. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
17. Menetapkan kebijakan dan pedoman untuk memantau penerapan prinsip-prinsip GCG.
18. Menyusun rencana penelaahan prinsip-prinsip GCG dan memasukan dalam rencana kerja tahunan Dewan Komisaris.
19. Memantau dan memastikan efektivitas praktik GCG yang diterapkan Perusahaan.
20. Menetapkan kebijakan mengenai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang memadai serta menyusun



rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berikutnya.

21. Menetapkan secara tertulis kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris, mengevaluasi capaian kinerja Dewan Komisaris dan menuangkan ke dalam risalah rapat Dewan Komisaris, serta melaporkan penilaian kinerja tersebut dalam laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

### WEWENANG DAN HAK DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki beberapa wewenang dan hak terkait pelaksanaan tugasnya, yakni:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, dan dokumen-dokumen lainnya serta memeriksa kas dan surat berharga untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan.
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu.
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu.
10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

13. Menerima honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
14. Mendapatkan fasilitas dari Perusahaan sesuai dengan hasil penetapan RUPS.
15. Menerima tantiem yang besarnya ditetapkan oleh RUPS apabila Perusahaan mencapai tingkat keuntungan atau mengalami peningkatan kinerja.

### ETIKA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Selanjutnya, dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris wajib memenuhi etika jabatan sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) maupun mengambil keuntungan pribadi dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perusahaan, selain dari penghasilan yang sah.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain termasuk setiap perubahannya.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan pengungkapan jika terjadi benturan kepentingan. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan terhadap Dewan Komisaris lain yang berkaitan dengan hal tersebut.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap anggota Dewan Komisaris harus:
  - a. Mematuhi Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.
  - b. Menjalankan tugas pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab untuk kepentingan

- Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- c. Melampirkan Pakta Integritas dalam usulan Direksi yang harus mendapat rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan pemegang saham.
  - d. Memperbaharui surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan secara berkala/pada setiap awal tahun.

Jika anggota Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan, maka anggota tersebut dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan. Anggota yang bersangkutan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang terkait dengannya. Keputusan yang dibuat harus tetap mengutamakan kepentingan ekonomi Perusahaan.

#### KEPUTUSAN YANG PERLU MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki peran signifikan dalam berbagai keputusan usaha Angkasa Pura I. Beberapa keputusan penting yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris antara lain:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.
2. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), bangun guna serah (*Build Operate Transfer/BOT*), bangun milik serah (*Build Own Transfer/BOwT*), dan bangun serah guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.
3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali:
  - a. Pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis.
  - b. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya.
  - c. Pinjaman yang diberikan kepada Anak Perusahaan dengan ketentuan melaporkan pinjamannya kepada Dewan Komisaris.

4. Menghapuskan daftar dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati.
5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

#### MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dan/atau diberhentikan sewaktu-waktu sebelum periode jabatannya berakhir dengan berbagai alasan, sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015. Tata cara pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga diatur dalam peraturan tersebut. Beberapa alasan pemberhentian Dewan Komisaris antara lain karena Dewan Komisaris:

- Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
- Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;
- Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;
- Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
- Mengundurkan diri.

Selain berdasarkan ketentuan alasan pemberhentian di atas, anggota Dewan Komisaris juga dapat diberhentikan oleh Menteri BUMN atau RUPS karena alasan lainnya demi kepentingan dan tujuan BUMN dan/atau Perusahaan, misalnya, tetapi tidak terbatas pada:

- Diberhentikan dalam rangka restrukturisasi Perusahaan;
- Memasuki masa usia pensiun; dan/atau
- Diangkat menjadi aparatur sipil negara yang merupakan penugasan dari kementerian teknis atau instansi Pemerintah lain.

## PROSES NOMINASI DAN PEMILIHAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS melalui proses nominasi dan pemilihan yang transparan. Pemegang saham berwenang untuk memilih Dewan Komisaris yang memiliki keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku baik, dan dedikasi untuk Perusahaan melalui rangkaian proses berikut:

1. Menentukan kriteria penilaian umum calon anggota Dewan Komisaris.
2. Membentuk tim seleksi calon anggota Dewan Komisaris.
3. Mengangkat anggota Dewan Komisaris, termasuk mengangkat Komisaris Utama.

## KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Angkasa Pura I mengangkat Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011. Per akhir tahun 2019, seluruh anggota Dewan Komisaris yang terpilih telah memenuhi kriteria dan syarat yang ditentukan dalam uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, kebijakan GCG, dan ketentuan lainnya.

Komposisi dan dasar pengangkatan anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Periode 1 Januari 2019 – 30 April 2019  
Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Djoko Sasono	Komisaris Utama	Kementerian BUMN	SK.210/MBU/07/2018	19 Juli 2018
Tri Budi Satriyo	Komisaris	Kementerian BUMN	SK.210/MBU/07/2018	19 Juli 2018
Harry Z. Soeratin	Komisaris	Kementerian BUMN	SK-17/MBU/01/2018	16 Januari 2018
Anandy Wati	Komisaris	Kementerian BUMN	SK.75/MBU/2014	7 April 2014
Suprasetyo	Komisaris	Kementerian BUMN	SK.65/MBU/4/2017	4 April 2017
Ali Mochthar Ngabalin	Komisaris	Kementerian BUMN	SK.210/MBU/07/2018	19 Juli 2018

Periode 1 Mei 2019 – 31 Agustus 2019  
Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Djoko Sasono	Komisaris Utama	Kementerian BUMN	SK.210/MBU/07/2018	19 Juli 2018
Tri Budi Satriyo	Komisaris	Kementerian BUMN	SK.210/MBU/07/2018	19 Juli 2018
Harry Z. Soeratin	Komisaris	Kementerian BUMN	SK-17/MBU/01/2018	16 Januari 2018
Suprasetyo	Komisaris	Kementerian BUMN	SK.65/MBU/4/2017	4 April 2017
Ali Mochthar Ngabalin	Komisaris	Kementerian BUMN	SK.210/MBU/07/2018	19 Juli 2018

Periode 1 September – 31 Desember 2019  
Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Djoko Sasono	Komisaris Utama	Kementerian BUMN	SK.210/MBU/07/2018	19 Juli 2018
Tri Budi Satriyo	Komisaris	Kementerian BUMN	SK.210/MBU/07/2018	19 Juli 2018
Harry Z. Soeratin	Komisaris	Kementerian BUMN	SK-17/MBU/01/2018	16 Januari 2018
Suprasetyo	Komisaris	Kementerian BUMN	SK.65/MBU/4/2017	4 April 2017
Ali Mochthar Ngabalin	Komisaris	Kementerian BUMN	SK.210/MBU/07/2018	19 Juli 2018

### PROGRAM ORIENTASI BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BARU

Di Angkasa Pura I, anggota Dewan Komisaris yang baru wajib mengikuti kegiatan orientasi untuk memahami kegiatan dan kondisi Perusahaan. Program orientasi ini dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan, maupun pihak lain yang menjalankan fungsi yang sama, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 serta SK-16/S.MBU/2012 yang dituangkan pada *Board Manual*. Pada tahun 2019, program orientasi telah dilaksanakan berdasarkan Surat Sekretariat Dewan Komisaris Nomor 115/Sek.Dekom/2018, tanggal 23 Juli 2018 perihal Program Pengenalan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Baru.

Pada pelaksanaan program orientasi, Dewan Komisaris menerima penjelasan materi terkait prinsip-prinsip GCG, gambaran umum Perusahaan, kewenangan yang didelegasikan kepada anggota, serta tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga menyiapkan jadwal pertemuan antara anggota baru dengan Direksi, Direktur Utama, maupun Komisaris Utama Perusahaan untuk menyampaikan materi presentasi. Anggota baru dapat mengajukan pertanyaan tertulis terkait presentasi yang disampaikan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat-pejabat Perusahaan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Program orientasi juga memfasilitasi anggota baru untuk berkunjung ke unit kerja, kantor cabang, maupun proyek Perusahaan.

Di tahun 2019 tidak dilaksanakan program orientasi bagi anggota dewan komisaris baru.

### PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Tugas pengawasan Dewan Komisaris dibagi ke dalam beberapa bidang sesuai dengan jabatannya agar setiap anggota dapat menjalankan tanggung jawab dan wewenang masing-masing secara fokus, efektif, dan efisien. Pembidangan tugas Dewan Komisaris disesuaikan dengan pembagian tugas Direksi, sehingga tiap anggota Dewan Komisaris memperoleh kejelasan atas peran mereka masing-masing, baik secara kolektif maupun individual.

## Pembidangan Tugas Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Djoko Sasono	Komisaris Utama	Fungsi koordinasi dengan segenap anggota dewan komisaris maupun perangkat dewan komisaris terkait dengan tugas dan wewenang dewan komisaris pada fungsi internal audit, sekretaris perusahaan, <i>legal, corporate planning and transformation</i> , serta <i>compliance and risk management</i> . Beliau juga merangkap peran sebagai Wakil Ketua II Komite Audit.
Anandy Wati	Komisaris merangkap Komisaris Independen	Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang dewan komisaris pada bidang sumber daya manusia, meliputi fungsi pada <i>human capital, training and development, general services, corporate social responsibility</i> dan merangkap sebagai ketua Komite Audit.
Harry Z. Soeratin	Komisaris	Membidangi kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang dewan komisaris pada bidang keuangan, meliputi fungsi pada <i>accounting, finance, dan procurement</i> dan merangkap sebagai anggota Wakil Ketua I Komite Audit.
Suprasetyo	Komisaris	Menangani kegiatan dengan tugas dan wewenang dewan komisaris pada bidang teknik dan operasi, meliputi, fungsi pada <i>airport peration, airport security, airport safety, airport engineering, airport facility dan maintenance, airport equipment, dan airport development</i> serta merangkap sebagai Ketua Komite Risiko Usaha dan GCG.
Ali Mochtar Ngabalin	Komisaris	Membidangi pemasaran meliputi fungsi pada <i>aeronautical business, non aeronautical business, airport services and hospitality, dan airport tourism and connectivity</i> serta merangkap sebagai Wakil Ketua I Komite Risiko Usaha dan GCG.
Tri Budi Satriyo	Komisaris	Membidangi pengembangan usaha meliputi fungsi pada <i>business development and international relations, business portofolio, information technology, dan airport digital</i> , serta merangkap sebagai Wakil Ketua II Komite Risiko Usaha dan GCG.

**KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS**

Sesuai *Board Manual*, anggota Dewan Komisaris tidak boleh memangku jabatan rangkap sebagai berikut:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Swasta.
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

## Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Nama	Jabatan pada Angkasa Pura I	Rangkap Jabatan pada Angkasa Pura I	Rangkap Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Djoko Sasono	Komisaris Utama	Wakil Ketua II Komite Audit	Sekjen	Kementerian Perhubungan
Anandy Wati	Komisaris Independen	Ketua Komite Audit	Tidak ada	Tidak ada
Tri Budi Satriyo	Komisaris	Wakil Ketua II Komite Risiko Usaha dan GCG	Masekal Muda	TNI AU

## Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Nama	Jabatan pada Angkasa Pura I	Rangkap Jabatan pada Angkasa Pura I	Rangkap Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Suprasetyo	Komisaris	Ketua Komite Risiko Usaha dan GCG	Tidak ada	Tidak ada
Harry Z. Soeratin	Komisaris	Ketua Komite Audit	Kepala Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial	Kementerian Sosial
Ali Mochthar Ngabalin	Komisaris	Wakil Ketua I Komite Risiko Usaha dan GCG	Juru Bicara Pemerintah dan Kantor Staf Presiden	Kantor Staf Presiden

### KOMISARIS INDEPENDEN DAN PERNYATAAN TENTANG INDEPENDENSI

Pada tanggal 26 April 2019 telah ditetapkan berakhirnya masa jabatan Anandy Wati sebagai Komisaris Independen dan hingga pada laporan tahunan ini disampaikan, belum ada penunjukan Komisaris Independen oleh Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham. Sehingga pada Laporan Tahunan ini tidak tersedia informasi terkait pernyataan independensi masing-masing Komisaris Independen.

Meski demikian, Angkasa Pura I tetap memperhatikan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011, yakni ketentuan bahwa Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan.

Selain itu, *Board Manual* Dewan Komisaris Angkasa Pura I juga menetapkan kriteria independen sebagai berikut:

1. Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan yang terafiliasi dengan Angkasa Pura I.
2. Tidak bekerja pada pemerintah, termasuk departemen, lembaga, dan kemiliteran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Tidak bekerja di Perusahaan atau afiliasinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
4. Tidak memiliki keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Perusahaan atau perusahaan yang

menyediakan jasa dan produk kepada Angkasa Pura I dan afiliasinya.

5. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan.

### RAPAT DEWAN KOMISARIS

Angkasa Pura I telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar, Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011, serta SK-16/S.MBU/2012 terkait Rapat Dewan Komisaris yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat internal antara anggota Dewan Komisaris maupun rapat dengan Direksi. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Penyampaian panggilan rapat dapat dilakukan secara mendadak jika dalam keadaan mendesak.

Komisaris Utama bertugas untuk memimpin rapat dan dapat mendelegasikan tugasnya kepada anggota Komisaris yang ditunjuk. Pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak tercapai kesepakatan maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. Keputusan dalam rapat dianggap sah dan mengikat apabila rapat dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris atau yang mewakili.



## AGENDA, TANGGAL, DAN KEHADIRAN PESERTA DALAM RAPAT DEWAN KOMISARIS

### 1. Rapat Internal Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2019, agenda, tanggal, dan frekuensi kehadiran peserta Rapat Internal Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Rapat Internal Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran
1	31 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Usulan Struktur Organisasi Proyek Bandara Sultan Hasanuddin Makassar</li> <li>Pembahasan Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Sama sampai dengan 5 Tahun</li> <li>Pembahasan Rencana Hibah Dana PKBL kepada BUMN Khusus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Djoko Sasono</li> <li>Tri Budi Satriyo</li> <li>Anandy Wati</li> <li>Ali Mochtar Ngabalin</li> <li>Suprasetyo</li> <li>Harry Z. Soeratin</li> </ol>
2	12 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Permohonan Izin Kerja Sama Usaha Pengelolaan Penguat Sinyal selama 5 tahun kepada PT Angkasa Pura I (Persero)</li> <li>Pembahasan Usulan Penghapusan Aktiva Tetap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Djoko Sasono</li> <li>Tri Budi Satriyo</li> <li>Anandy Wati</li> <li>Ali Mochtar Ngabalin</li> <li>Suprasetyo</li> <li>Harry Z. Soeratin</li> </ol>
3	26 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Pemutakhiran Perkembangan Persiapan Pengoperasian Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo</li> <li>Pembahasan Rencana <i> Holding </i> BUMN (Transportasi Udara)</li> <li>Pembahasan Evaluasi Hasil Tindaklanjut GCG PT Angkasa Pura I (Persero)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Djoko Sasono</li> <li>Tri Budi Satriyo</li> <li>Anandy Wati</li> <li>Ali Mochtar Ngabalin</li> <li>Suprasetyo</li> <li>Harry Z. Soeratin</li> </ol>
4	24 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Laporan Tahunan Tahun 2018 PT Angkasa Pura I (Persero)</li> <li>Pembahasan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Djoko Sasono</li> <li>Tri Budi Satriyo</li> <li>Anandy Wati</li> <li>Ali Mochtar Ngabalin</li> <li>Harry Z. Soeratin</li> <li>Suprasetyo</li> </ol>
5	16 Mei 2019	Pembahasan Persetujuan Masa Kerja Sama Pengelolaan Reklame di Terminal Baru Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Djoko Sasono</li> <li>Tri Budi Satriyo</li> <li>Ali Mochtar Ngabalin</li> <li>Suprasetyo</li> <li>Harry Z. Soeratin</li> </ol>
6	27 Juni 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Kinerja Triwulan I &amp; April-Mei 2019</li> <li>Pembahasan Usulan SOP Kerja Sama Strategis</li> <li>Pembahasan Kerja Sama Penguat Sinyal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Djoko Sasono</li> <li>Tri Budi Satriyo</li> <li>Harry Z. Soeratin</li> <li>Suprasetyo</li> <li>Ali Mochtar Ngabalin</li> </ol>
7	29 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Realisasi Kinerja s.d Juni 2019</li> <li>Pembahasan Usulan Revisi RKAP 2019</li> <li>Pembahasan Kerja Sama Strategis Pengembangan dan Pengelolaan Bandara Lombok</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Djoko Sasono</li> <li>Tri Budi Satriyo</li> <li>Ali Mochtar Ngabalin</li> <li>Suprasetyo</li> <li>Harry Z. Soeratin</li> </ol>
8	27 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Revisi RKAP Tahun 2019 PT Angkasa Pura I (Persero)</li> <li>Pembahasan Rencana Kontrak Perjanjian Kerja Sama 5 Tahun di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin</li> <li>Pembahasan Rencana Kontrak Perjanjian Kerja Sama 5 Tahun di Bandara Juanda Surabaya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Djoko Sasono</li> <li>Tri Budi Satriyo</li> <li>Ali Mochtar Ngabalin</li> <li>Suprasetyo</li> <li>Harry Z. Soeratin</li> </ol>

## Rapat Internal Dewan Komisaris Angkasa Pura I Tahun 2019

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran
9	22 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Usulan Revisi RKAP Investasi Tahun 2019 Angkasa Pura I</li> <li>Pembahasan Persetujuan Kerja Sama dengan Jangka Waktu 5 (lima) Tahun di Bandara SAMS Sepinggang Balikpapan</li> <li>Pembahasan Persetujuan Kerja Sama dengan Jangka Waktu 5 (lima) Tahun di Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo</li> <li>Permohonan Tanggapan atas Kerja Sama <i>Build Operate Transfer</i> (BOT) Hotel di Terminal Baru Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin</li> <li>Permohonan Persetujuan Kerja Sama Pembangunan &amp; Pengusahaan Hotel di Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Djoko Sasono</li> <li>Tri Budi Satriyo</li> <li>Ali Mochtar Ngabalin</li> <li>Suprasetyo</li> <li>Harry Z. Soeratin</li> </ol>
10	27 November 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan usulan RKAP Tahun 2020 Angkasa Pura I</li> <li>Pembahasan Usulan Penghapusan Aktiva Tetap Angkasa Pura I</li> <li>Pembahasan Pedoman Kerja Sama Mitra Strategis</li> <li>Pembahasan Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga</li> <li>Pembahasan Penyertaan Modal Kepada Anak Perusahaan</li> <li>Pembahasan Perubahan Anggaran Dasar Angkasa Pura I</li> <li>Pembahasan Pemilihan Lembaga PPIP</li> <li>Pembahasan Hasil Audit BPK</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Djoko Sasono</li> <li>Harry Z. Soeratin</li> <li>Ali Mochtar Ngabalin</li> <li>Suprasetyo</li> <li>Tri Budi Satriyo</li> </ol>
11	10 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Perubahan Anggaran Dasar Angkasa Pura I</li> <li>Pembahasan Pemilihan Lembaga PPIP</li> <li>Pembahasan Pedoman Kerja Sama Mitra Strategis</li> <li>Pembahasan Pengelolaan Layanan Penguat Sinyal oleh PT Angkasa Pura Suport</li> <li>Pembahasan <i>Capsule</i> Hotel di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali</li> <li>Pembahasan Pembangunan dan Pengelolaan <i>Airport Hotel</i> di Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo</li> <li>Pembahasan Penyertaan Modal Kepada Anak Perusahaan Pembahasan Hasil Audit BPK</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Djoko Susono</li> <li>Tri Budi Satriyo</li> <li>Ali Mochtar Ngabalin</li> <li>Suprasetyo</li> <li>Harry Z. Soeratin</li> </ol>
12	16 Desember 2019	Penilaian Kinerja Direksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Djoko Susono</li> <li>Tri Budi Satriyo</li> <li>Ali Mochtar Ngabalin</li> <li>Suprasetyo</li> <li>Harry Z. Soeratin</li> </ol>

## 2. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Komisaris Utama dapat mengundang Direktur Utama untuk mengadakan rapat gabungan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan. Rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan

untuk membahas laporan-laporan berkala dari Direksi. Selain itu, rapat gabungan juga merupakan tempat untuk membahas suatu permasalahan, memberikan tanggapan, catatan, dan nasihat kepada Direksi terkait masalah tersebut yang dituangkan dalam risalah rapat.

Sepanjang tahun 2019, agenda, tanggal, dan frekuensi kehadiran peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran		Keterangan
			Dewan Komisaris	Direksi	
1	23 Januari 2019	Pembahasan RJPP Tahun 2019-2023 Angkasa Pura I	1. Djoko Sasono 2. Tri Budi Satriyo 3. Harry Z. Soeratin 4. Anandy Wati	Novrihandri	Ali Mochtar Ngabalin dan Suprasetyo dinas keluar kota
2	31 Januari 2019	1. Pembahasan Progres RJPP Tahun 2019-2023 Angkasa Pura I 2. Pembahasan Progres Proyek Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo	1. Djoko Sasono 2. Tri Budi Satriyo 3. Anandy Wati 4. Ali Mochtar Ngabalin 5. Suprasetyo	1. Faik Fahmi 2. Wendo Asrul Rose 3. Devy Suradji 4. Adi Nugroho 5. Sardjono Jhony T.	Harry Z. Soeratin Dinas keluar kota
3	12 Februari 2019	Pembahasan Tindaklanjut KAP Tahun 2018 Angkasa Pura I	1. Djoko Sasono 2. Tri Budi Satriyo 3. Anandy Wati 4. Ali Mochtar Ngabalin 5. Harry Z. Soeratin 6. Suprasetyo	1. Faik Fahmi 2. Wendo Asrul Rose 3. Lukman F. Laisa 4. Devy Suradji 5. Novrihandri 6. Adi Nugroho 7. Sardjono Jhony T.	
4	26 Maret 2019	1. Pembahasan Perkembangan Persiapan Pengoperasian Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo 2. Pembahasan Rencana <i> Holding </i> BUMN (Transportasi Udara) 3. Pembahasan Evaluasi Hasil Tindaklanjut GCG Angkasa Pura I	1. Djoko Sasono 2. Tri Budi Satriyo 3. Anandy Wati 4. Ali Mochtar Ngabalin 5. Harry Z. Soeratin 6. Suprasetyo	1. Faik Fahmi 2. Lukman F. Laisa 3. Devy Suradji 4. Novrihandri 5. Adi Nugroho 6. Sardjono Jhony T	
5	16 Mei 2019	1. Persiapan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun 2018 Angkasa Pura I 2. Persiapan Posko Monitoring Angkutan Lebaran 3. Progres Proyek Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo	1. Djoko Sasono 2. Tri Budi Satriyo 3. Ali Mochtar Ngabalin 4. Suprasetyo 5. Harry Z. Soeratin 6. Anandy Wati	1. Faik Fahmi 2. Lukman F. Laisa 3. Wendo Asrul Rose 4. Devy Suradji 5. Adi Nugroho 6. Sardjono Jhony T	
6	29 Juli 2019	1. Pembahasan Kerja Sama Strategis Pengembangan dan Pengelolaan Bandara Lombok 2. Pembahasan Realisasi Kinerja s.d Juni 2019 3. Pembahasan Usulan Revisi RKAP 2019	1. Djoko Sasono 2. Tri Budi Satriyo 3. Ali Mochtar Ngabalin 4. Harry Z. Soeratin 5. Suprasetyo	1. Faik Fahmi 2. Lukman F. Laisa 3. Wendo Asrul Rose 4. Devy Suradji 5. Adi Nugroho 6. Sardjono Jhony T	
7	30 September 2019	1. Pembahasan Rencana Operasional Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo dan Kereta Bandara Adi Soemarmo Solo 2. Pembahasan <i> Update </i> Rencana <i> Holding </i> Transportasi Udara	1. Djoko Sasono 2. Tri Budi Satriyo 3. Ali Mochtar Ngabalin 4. Harry Z. Soeratin 5. Suprasetyo	1. Faik Fahmi 2. Wendo Asrul Rose 3. Lukman F. Laisa 4. Devy Suradji 5. Novrihandri 6. Adi Nugroho 7. Sardjono Jhony T.	

## Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran		Keterangan
			Dewan Komisaris	Direksi	
8	31 Oktober 2019	Pembahasan Usulan RKAP Tahun 2020 Angkasa Pura I	1. Djoko Sasono 2. Harry Z. Soeratin 3. Ali Mochtar Ngabalin 4. Suprasetyo	1. Lukman F. Laisa 2. Novrihandri	Pak Tri Budi Dinas Luar Kota
9	5 – 6 November 2019	Pembahasan Usulan RKAP Tahun 2020	1. Djoko Sasono 2. Suprasetyo 3. Tri Budi Satriyo 4. Ali Mochtar Ngabalin 5. Harry Z. Soeratin	1. Novrihandri 2. Wendo Asrul Rose	
10	27 November 2019	1. Pembahasan Usulan RKAP Tahun 2020 Angkasa Pura I 2. Pembahasan Pedoman Kerja Sama Mitra Strategis	1. Djoko Sasono 2. Ali Mochtar Ngabalin 3. Harry Z. Soeratin 4. Suprasetyo 5. Tri Budi Satriyo	1. Faik Fahmi 2. Wendo Asrul Rose 3. Lukman F. Laisa 4. Devy Suradji 5. Novrihandri 6. Adi Nugroho 7. Sardjono Jhony T	
11	5 Desember 2019	Pembahasan Usulan RKAP Tahun 2020 Angkasa Pura I	1. Harry Z. Soeratin 2. Suprasetyo 3. Tri Budi Satriyo 4. Ali Mochtar Ngabalin	Novrihandri	Djoko Sasono dan Ali Mochtar Ngabalin Dinas Luar Kota
12	20 Desember 2019	Pemaparan Hasil Audit Interim	1. Djoko Sasono 2. Ali Mochtar Ngabalin 3. Harry Z. Soeratin 4. Tri Budi Satriyo 5. Pak Suprasetyo	1. Faik Fahmi 2. Novrihandri 3. Devi Suradji 4. Adi Nugroho	

## FREKUENSI KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2019, Dewan Komisaris tercatat telah melaksanakan dua belas kali rapat internal Dewan

Komisaris dan dua belas kali rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. Frekuensi dan kehadiran tiap Dewan Komisaris adalah sebagai berikut

## Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Angkasa Pura I Tahun 2019

Nama	Jabatan	Periode	Rapat Internal			Rapat Gabungan		
			Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Djoko Sasono	Komisaris Utama	19 Juli 2018 - sekarang	12	12	100	12	11	91,7
Tri Budi Satriyo	Komisaris	19 Juli 2018 - sekarang	12	12	100	12	11	91,7
Harry Z. Soeratin	Komisaris	16 Januari 2018 - sekarang	12	12	100	12	11	91,7

## Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Angkasa Pura I Tahun 2019

Nama	Jabatan	Periode	Rapat Internal			Rapat Gabungan		
			Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Anandy Wati	Komisaris Independen	7 April 2014 - 7 April 2019	4	4	100	4	4	100
Suprasetyo	Komisaris	4 April 2017 - Sekarang	12	12	100	12	11	91,7
Ali Mochtar Ngabalin	Komisaris	19 Juli 2018 - Sekarang	12	12	100	12	10	83,3

### KEPUTUSAN, REKOMENDASI, DAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dari berbagai kegiatan pelaksanaan tugas di atas, Dewan Komisaris mengeluarkan beberapa keputusan dan rekomendasi yang tertuang dalam

surat keputusan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, antara lain:

## Keputusan, Rekomendasi, dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

No	Nomor	Tanggal	Perihal
1	KEP.01/DK.AP.I/2019	2 Januari 2019	Piagam ( <i>Charter</i> ) Komite Risiko Usaha & Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCC) dalam Susunan Organ/Perangkat Pendukung Dewan Komisaris Angkasa Pura I
2	KEP.02/DK.AP.I/2019	7 Mei 2019	Pedoman Tata Kelola Perusahaan ( <i>Code Of Corporate Governance</i> ) Angkasa Pura I
3	KEP.03/DK.AP.I/2019	7 Mei 2019	Pedoman Etika Perusahaan ( <i>Code Of Conduct</i> ) Angkasa Pura I
4	KEP.04/DK.AP.I/2019	7 April 2019	Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit Angkasa Pura I
5	KEP.05/DK.AP.I/2019	1 Juli 2019	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Angkasa Pura I
6	KEP.06/DK.AP.I/2019	1 November 2019	Pengangkatan Kembali Sekretaris Dewan Komisaris Angkasa Pura I

### PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada periode pelaporan, yang mencakup:

1. Melaksanakan 12 kali Rapat Internal Dewan Komisaris dan 12 kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.
2. Melaksanakan Rapat Komite Audit serta Komite Risiko Usaha dan GCC.

3. Melaksanakan Rapat dengan Kementerian BUMN/Pemegang Saham
4. Mengikuti RUPS sebanyak 4 kali.

Atas berbagai kegiatan tersebut, Dewan Komisaris dinilai secara berkala dalam rangka memantau efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan kinerja Dewan Komisaris serta bertujuan untuk meningkatkan kinerja masa mendatang.

## PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS BERDASARKAN KPI

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris setiap tahunnya, yakni mencakup aspek:

1. Pengawasan dan Pengarahan
2. Pelaporan
3. Dinamis/lainnya

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan KPI adalah Pemegang

Saham melalui mekanisme Kontrak Manajemen Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham pada saat RUPS. Penilaian dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan amanat Pemegang Saham.

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan KPI pada tahun 2019 ditunjukkan pada tabel berikut.

Penilaian *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Key Performance Indicator	Skor Capaian	
	Bobot	Skor
Keuangan dan Pasar Pengawasan dan Pengarahan	60	59,50
Fokus Pelanggan Pelaporan	30	30
Efektivitas Produk dan Proses Dinamis/lainnya	10	10
<b>Bobot</b>	<b>100</b>	<b>99,50</b>

## PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS BERDASARKAN GCG ASSESSMENT

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris juga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yakni melalui *GCG assessment*. Pihak yang melakukan penilaian kinerja melalui *GCG assessment* adalah pihak eksternal yang independen, yakni PT Sierra Bisnis Konsulting. Pelaksanaan penilaian mengacu pada peraturan dalam Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan *GCG assessment* meliputi:

1. Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran Dewan Komisaris.
2. Pembagian tugas dan penetapan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
3. Pemberian persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.

4. Pemberian arahan kepada Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.
5. Pelaksanaan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.
6. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
7. Peran dalam pencalonan anggota Direksi, penilaian kinerja Direksi (individu dan kelompok), serta pengusulan tantiem/insentif kinerja Direksi.
8. Pelaksanaan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut Dewan Komisaris.
9. Pemantauan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
10. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadirannya dalam rapat tersebut.
11. Terdapatnya Sekretaris Dewan Komisaris yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan Dewan Komisaris.



12. Terdapatnya Komite Dewan Komisaris yang efektif.

Berdasarkan kriteria penilaian tersebut, kinerja Dewan Komisaris di tahun 2019 memperoleh skor 34.14 dengan capaian 97,55% dan predikat sangat baik. Pencapaian tersebut meningkat dari tahun penilaian sebelumnya.

#### **PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIANNYA**

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, Komite Risiko Usaha dan GCG, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Pada tahun 2019, Dewan Komisaris menilai komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif.

Pada tahun 2019, Komite Audit telah menjalankan tugasnya melalui kegiatan berikut:

1. Menyelenggarakan 17 kali rapat Komite Audit dan 5 kali rapat koordinasi dengan Satuan Pengawas Internal (SPI)
2. Melaksanakan penilaian kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan Satuan Pengendalian Internal (SPI).
3. Memberikan rekomendasi penyempurnaan SPI dan pelaksanaannya
4. Melaksanakan penilaian atas prosedur evaluasi terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan

Kemudian, Komite Risiko Usaha dan GCG sepanjang tahun 2019 telah melaksanakan tugasnya melalui kegiatan berikut:

1. Menyelenggarakan 30 kali rapat Komite Risiko Usaha dan GCG.
2. Melaksanakan pemantauan, kajian, dan rekomendasi atas penerapan manajemen risiko.
3. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas penerapan GCG Perusahaan.
4. Melakukan pendampingan audit laporan keuangan tahun buku 2018

Terkait dengan kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi, per akhir tahun 2019 tercatat komite ini telah melaksanakan kegiatan berikut:

1. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengusulan remunerasi Direksi.
2. Menyusun rencana Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas pengusulan remunerasi Direksi.

# Direksi

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengurus usaha dan manajemen Perusahaan agar mencapai tujuan Perusahaan. Selain itu, Direksi juga mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Direksi juga wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

## BOARD CHARTER DIREKSI

*Board Charter/Board Manual* Direksi tertuang dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.144/OM.01/2019 KEP.06/DK.AP.I/2019 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Secara umum, *Board Charter* Direksi mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Persyaratan dan komposisi Direksi.
2. Tanggung jawab Direksi.
3. Tugas dan kewajiban Direksi.
4. Wewenang Direksi.
5. Hak-hak Direksi.
6. Independensi Direksi.
7. Etika jabatan.
8. Penetapan Kebijakan Pengurusan Perusahaan oleh Direksi.
9. Pendelegasian Wewenang di Antara Anggota Direksi Perusahaan.
10. Pembagian Tugas Direksi.
11. Rapat Direksi.
12. Hubungan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan.
13. Sekretaris Perusahaan.
14. Satuan Pengawas Intern.
15. Tim Direksi/Penggunaan Saran Profesional.

## KRITERIA DIREKSI

Seluruh anggota Direksi Angkasa Pura I ditetapkan sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Charter/Board Manual*), mencakup hal-hal berikut:

- a. Kriteria formal, yaitu:
  - Cakap melakukan perbuatan hukum.
  - Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan.
  - Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
  - Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain.
  - Tidak memegang jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, BUMS, dan jabatan lain sebagai pejabat dalam jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah, serta jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## b. Kriteria material, yaitu:

- Memiliki integritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan berperilaku baik, yaitu tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji, serta perbuatan lain yang dapat dikategorikan memberikan keuntungan pribadi dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan Perusahaan yang sehat.
- Memiliki kompetensi teknis/keahlian, bahwasanya yang bersangkutan memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian yang memadai di bidang

usaha Perusahaan, memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Angkasa Pura I, memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, serta memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.

- Memiliki psikologis yang baik, bahwasanya yang bersangkutan memiliki tingkat pengetahuan dan tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi Perusahaan.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Direksi yaitu:

1. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.
2. Memastikan seluruh aktivitas Perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Keputusan RUPS.
3. Mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan hubungan baik dengan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lain.
4. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
5. Mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar Angkasa Pura I.
6. Menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan.
7. Menyelenggarakan dan menyimpan daftar khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas.
9. Menyusun daftar calon manajemen satu tingkat di bawah Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, jika diperlukan.
10. Melaksanakan tugas-tugas lainnya, antara lain:
  - Mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi dan rencana kerja Perusahaan.
  - Mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi manajemen risiko, sistem pengendalian internal, sistem akuntansi dan pembukuan, serta keterbukaan dan kerahasiaan informasi.
  - Melaksanakan etika berusaha dan budaya anti korupsi.

## WEWENANG DAN HAK DIREKSI

Berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, Direksi memiliki wewenang dan hak untuk:

1. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
2. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan.
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi atau kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam atau di luar Pengadilan.
4. Menetapkan pedoman pengadaan barang/jasa oleh Perusahaan yang menguntungkan bagi Perusahaan, baik harga maupun kualitas barang/jasa tersebut.
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menetapkan target kinerja dan pedoman/sistem penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi yang ditetapkan secara obyektif dan transparan.
7. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit di bawah Direksi dan tingkat Perusahaan.
8. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.
9. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan dan pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan Keputusan RUPS.
10. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.
11. Menerima gaji dan tunjangan/fasilitas lainnya, termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
12. Kewenangan lainnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.

## ETIKA JABATAN DIREKSI

Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan etika jabatan sebagai berikut:

1. Anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan/atau kegiatan Perusahaan, selain penghasilan yang sah.
2. Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain di dalam Daftar Khusus.

Dalam hal anggota Direksi memiliki benturan kepentingan, maka anggota Direksi tersebut dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan. Anggota Direksi yang bersangkutan

wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang terkait dengannya. Keputusan yang dibuat tersebut harus tetap mengutamakan kepentingan ekonomi Perusahaan.

## MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dan diberhentikan sewaktu-waktu sebelum periode jabatannya berakhir dengan berbagai alasan, sesuai dengan pengaturan dalam *Board Manual* PT Angkasa Pura I (Persero). Beberapa tata cara dan alasan pemberhentian Direksi meliputi:

1. Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
3. Jabatan anggota Direksi akan berakhir, jika:
  - a. Masa jabatan berakhir.
  - b. Mengundurkan diri sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Meninggal dunia.
  - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
4. RUPS dapat memberhentikan jabatan anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.
5. Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jika mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.
6. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
7. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara tersebut, Dewan Komisaris diwajibkan untuk memanggil RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan pada anggota Direksi tersebut untuk membela diri.
8. Jika RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka pemberhentian sementara tersebut dinyatakan batal dan anggota Direksi yang diberhentikan kembali menjalankan tugas dengan kuasa dan kewenangan yang sama.
9. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya dan berlaku sejak tanggal disetujui permohonan pengunduran dirinya oleh RUPS, namun jika tidak ada keputusan dari RUPS maka anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang diminta atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
10. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawaban oleh RUPS.

## MASA JABATAN DIREKSI

Anggota Direksi memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun dalam satu periode. Meski demikian, RUPS memiliki hak untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu karena alasan

tertentu. Setelah periode jabatan berakhir, anggota Direksi dapat diangkat lagi oleh RUPS untuk 1 (satu) kali periode jabatan berikutnya.

## KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DIREKSI

Penentuan komposisi dan pengangkatan Direksi Angkasa Pura I disesuaikan dengan kebutuhan dan strategi bisnis Perusahaan. Saat ini, seluruh anggota Direksi yang terpilih telah memenuhi kriteria dan syarat yang ditentukan dalam uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran

Dasar, kebijakan GCG, dan ketentuan lainnya.

Komposisi dan dasar pengangkatan anggota Direksi sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Komposisi Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Faik Fahmi	Direktur Utama	Kementerian BUMN	SK Menteri Negara BUMN No. SK-289/MBU/12/2017	22 Desember 2017
Novrihandri	Direktur Keuangan	Kementerian BUMN	SK Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. SK-222/MBU/11/2015	9 November 2015
Devy Suradji	Direktur Pemasaran dan Pelayanan	Kementerian BUMN	SK Menteri Negara BUMN No. SK-289/MBU/12/2017	22 Desember 2017
Wendo Asrul Rose	Direktur Operasi	Kementerian BUMN	SK Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. SK-222/MBU/11/2015	9 November 2015
Lukman F. Laisa	Direktur Teknik	Kementerian BUMN	SK Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. SK-53/MBU/03/2018	5 Maret 2018
Adi Nugroho	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	Kementerian BUMN	SK Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. SK-222/MBU/11/2015 tanggal	9 November 2015
Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Direktur Pengembangan Usaha	Kementerian BUMN	SK Menteri Negara BUMN No. SK-155/MBU/08/2017	11 Agustus 2017



## PROGRAM ORIENTASI DIREKSI BARU

Anggota Direksi Angkasa Pura I yang baru wajib mengikuti orientasi. Tujuannya agar Direksi memahami kegiatan dan kondisi Perusahaan dengan baik. Orientasi tersebut dijalankan sesuai dengan peraturan yang tercantum pada *Board Manual* dengan pelaksana program orientasi yaitu Sekretaris Perusahaan. Sepanjang tahun 2019, tidak ada perubahan Direksi sehingga tidak dilaksanakan program orientasi Direksi.

Pada pelaksanaan program orientasi, Direksi meningkatkan pemahamannya mengenai prinsip-prinsip GCG, gambaran umum

Perusahaan, kewenangan yang didelegasikan kepada anggota, tugas dan tanggung jawab Direksi, hubungan kerja dengan Dewan Komisaris, serta hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh anggota Direksi. Melalui orientasi, Sekretaris Perusahaan mengadakan pertemuan antara anggota Direksi baru dengan Dewan Komisaris, Pejabat Perusahaan, Direktur Utama, maupun Komisaris Utama Perusahaan. Selain pertemuan, program orientasi juga memfasilitasi anggota baru untuk berkunjung ke unit kerja, kantor cabang, maupun proyek Perusahaan.

## RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI

Di Angkasa Pura I, masing-masing anggota Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, sesuai dengan jabatan yang dimilikinya. Pembagian ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab anggota Direksi diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. KEP.101/OM.01.01/2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Angkasa Pura I.

Rincian pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi adalah sebagai berikut.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Anggota Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Faik Fahmi	Direktur Utama	Memastikan penyelenggaraan fungsi pengurusan/pengelolaan oleh para anggota Direksi sesuai tugas pokok Perseroan melalui penetapan kebijakan yang dilakukan oleh Direktur dan pengendalian pelaksanaan tugas <i>internal audit, corporate secretary, legal, corporate planning and transformation</i> serta <i>compliance and risk management</i> guna mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan sesuai dengan anggaran dasar dan kebijakan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Novrihandri	Direktur Keuangan	Memastikan tercapainya peningkatan <i>Customer Satisfaction Index (CSI)</i> , peningkatan pendapatan aeronautika dan nonaeronautika serta kontribusi terhadap lingkungan melalui penetapan kebijakan dan strategi bidang keuangan dan pengadaan barang/jasa guna mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
Devy Suradji	Direktur Pemasaran dan Pelayanan	Memastikan tercapainya peningkatan <i>Customer Satisfaction Index (CSI)</i> , peningkatan pendapatan aeronautika dan nonaeronautika, serta kontribusi terhadap lingkungan melalui penetapan kebijakan dan strategi bidang pemasaran dan pelayanan guna mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

## Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Anggota Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Wendo Asrul Rose	Direktur Operasi	Memastikan tercapainya peningkatan <i>Customer Satisfaction Index</i> (CSI), peningkatan pendapatan aeronautika dan nonaeronautika, serta kontribusi terhadap lingkungan melalui penetapan kebijakan dan strategi bidang operasi guna mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
Lukman F. Laisa	Direktur Teknik	Memastikan tercapainya peningkatan <i>Customer Satisfaction Index</i> (CSI), peningkatan pendapatan aeronautika dan nonaeronautika, serta kontribusi terhadap lingkungan melalui penetapan kebijakan dan strategi bidang teknik guna mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
Adi Nugroho	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	Memastikan tercapainya peningkatan <i>Customer Satisfaction Index</i> (CSI), peningkatan pendapatan aeronautika dan nonaeronautika, serta kontribusi terhadap lingkungan melalui penetapan kebijakan dan strategi bidang sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan, pelayanan umum, serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) guna mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Direktur Pengembangan Usaha	Memastikan tercapainya peningkatan <i>Customer Satisfaction Index</i> (CSI), peningkatan pendapatan aeronautika dan nonaeronautika, serta kontribusi terhadap lingkungan melalui penetapan kebijakan dan strategi bidang kerja sama, pengembangan usaha dan teknologi informasi guna mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

## KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Direksi Angkasa Pura I tidak memiliki rangkap jabatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. Angkasa Pura I senantiasa

mengungkapkan daftar rangkap jabatan dari anggota Direksi Perusahaan yang sedang menjabat. Daftar rangkap jabatan anggota Direksi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

## Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan pada Angkasa Pura I	Rangkap Jabatan pada Angkasa Pura I	Rangkap Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan
Faik Fahmi	Direktur Utama	Tidak ada	Komisaris Utama	PT Angkasa Pura Suport
Wendo Asrul Rose	Direktur Operasi	Tidak ada	Komisaris	PT Gapura Angkasa
Novrihandri	Direktur Keuangan	Tidak ada	Komisaris Utama Dewan Pengawas	PT Angkasa Pura Logistik Dapenna
Adi Nugroho	Direktur SDM dan Umum	Tidak ada	Komisaris Utama	PT Angkasa Pura Hotel
Lukman F. Laisa	Direktur Teknik	Tidak ada	Komisaris Utama	PT Angkasa Pura Properti

## Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan pada Angkasa Pura I	Rangkap Jabatan pada Angkasa Pura I	Rangkap Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan
Devy Suradji	Direktur Pemasaran dan Pelayanan	Tidak ada	Komisaris Utama	PT Angkasa Pura Retail
Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Direktur Pengembangan Usaha	Tidak ada	Komisaris	PT Jasa Marga Bali Tol

## RAPAT DIREKSI

Direksi Angkasa Pura I memenuhi ketentuan untuk melaksanakan Rapat Direksi secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Selain itu, Direksi juga memiliki agenda Rapat Rutin Internal Direksi yang dilaksanakan 1 (satu) kali seminggu pada hari Selasa, serta rapat dengan para General Manager, Group Head, dan Direksi Anak Perusahaan, dan menghadiri Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan. Pada keadaan mendesak, panggilan rapat dapat dilakukan dalam periode waktu yang lebih singkat.

Agenda rapat disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan dan diedarkan kepada anggota Direksi sebelum pelaksanaan rapat untuk mendapatkan saran. Anggota Dewan Komisaris berhak mengusulkan

penambahan agenda rapat yang ingin dibahas pada saat rapat. Selain itu, agenda rapat harus disusun berdasarkan hasil dari evaluasi rapat sebelumnya. Keputusan Rapat Direksi dikatakan sah dan mengikat apabila rapat dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau perwakilannya yang sah. Di sisi lain, dalam pembahasan mata acara tambahan lain-lain, Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali rapat dihadiri oleh seluruh anggota Direksi atau wakilnya yang sah dan telah menyetujui penambahan mata acara rapat tersebut.

AGENDA, TANGGAL, DAN KEHADIRAN PESERTA  
DALAM RAPAT DIREKSI

## 1. Rapat Internal Dewan Direksi

Pada tahun 2019, Direksi telah melaksanakan agenda Rapat Direksi sebanyak 38 kali dengan rincian sebagai berikut.

## Agenda, Tanggal, dan Peserta Rapat Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

No	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
1.	3 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan terkait bandara di Bali Utara</li> <li>- Pembahasan surat usulan untuk Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sebagai tuan rumah kegiatan Airports Council International (ACI) Customer Experience Global Summit.</li> <li>- Paparan kajian konsultan terkait pengalihan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) ke Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).</li> <li>- Usulan suksesor General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.</li> <li>- Pembahasan tantiem dan bonus tahun 2018 (rahasia dan terbatas).</li> <li>- Lain-lain (pembahasan iklan Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang).</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Hadir	
2.	9 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2019.</li> <li>- Tindak lanjut rencana jangka panjang perusahaan (RJPP).</li> <li>- Perencanaan dan pembuatan perluasan lantai 2 <i>check-in counter</i> penumpang di terminal internasional (Paket IV) Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali oleh Angkasa Pura Properti.</li> <li>- Paparan perluasan terminal Bandara Sam Ratulangi Manado oleh konsultan (PT Penta).</li> <li>- Suksesor General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.</li> <li>- Lain-lain (kegiatan komersial fase 2 Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali; kesiapan operasi dan komersial Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo)</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Hadir	
3.	22 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan alat untuk fasilitas imigrasi di bandara-bandara Angkasa Pura I.</li> <li>- Presentasi program desain barang seni (<i>artwork</i>) di Bandara Internasional Yogyakarta dan Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang dari konsultan.</li> <li>- Persiapan komersial dan operasional Bandara Internasional Yogyakarta (YIA).</li> <li>- <i>Progress</i> pengambilalihan bandara UPT (Bandara APT Pranoto Samarinda, Bandara Syukuran Aminudin Amin Luwuk Sulawesi Tengah, dan Bandara Sentani Jayapura).</li> <li>- Penjelasan tentang penanggung jawab pemanfaatan lahan <i>idle</i>.</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Tidak Hadir	Izin
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Hadir	

No	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
4.	28 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Update</i> rencana kegiatan dalam rangka HUT Angkasa Pura I.</li> <li>- <i>Update</i> penyelesaian Hotel Hakaya Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggang Balikpapan.</li> <li>- Sosialisasi <i>performance management</i> untuk Direksi.</li> <li>- Pembahasan usulan suksesor tingkat Vice President atau General Manager.</li> <li>- Antisipasi terkait penurunan <i>traffic</i> di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggang Balikpapan.</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Tidak Hadir	Izin sakit
			Novrihandri	Tidak Hadir	Cuti
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Tidak Hadir	Perjalanan dinas
5.	6 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyerahan Surat Keputusan (SK) Direksi Anak Perusahaan.</li> <li>- Laporan Kantor Akuntan Publik (KAP) terkait laporan keuangan 2018 dan <i>treatment</i> konsesi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) Kementerian Perhubungan.</li> <li>- <i>Update</i> penyelesaian permasalahan PT Sepinggang Sarana Utama, Hotel Hakaya di Balikpapan (penjelasan konsultan hukum).</li> <li>- Persiapan rapat koordinasi kawasan konservasi dalam pekerjaan pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.</li> <li>- Audiensi PWC terkait <i>holding</i> BUMN.</li> <li>- Program pengambilan bandara UPT milik Kementerian Perhubungan.</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Tidak Hadir	Izin sakit
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Tidak Hadir	Perjalanan dinas
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Hadir	
6.	11 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerjaan teknologi informasi pada proyek di lingkungan Angkasa Pura I.</li> <li>- Penjelasan <i>feasibility study</i> pengembangan proyek Terminal 3 (T3) Bandara Juanda Surabaya.</li> <li>- <i>Masterplan</i> Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.</li> <li>- Usulan PT Angkasa Pura Properti dan PT Angkasa Pura Suport sebagai <i>inhouse maintenance</i>.</li> <li>- Audiensi PWC terkait <i>holding</i> BUMN.</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Hadir	
7.	19 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Progress</i> persiapan operasional dan pelayanan Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo.</li> <li>- <i>Progress</i> pekerjaan teknologi informasi pada proyek Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo.</li> <li>- <i>Progress</i> usulan Angkasa Pura Properti dan Angkasa Pura Supports sebagai <i>inhouse maintenance</i>.</li> <li>- <i>Progress</i> pengambilalihan bandara-bandara UPT Kementerian Perhubungan.</li> <li>- GVK.</li> <li>- <i>Corrective action</i>.</li> <li>- Kerja sama di Bandara Internasional Lombok.</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Tidak Hadir	Perjalanan dinas
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Hadir	

No	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
8.	Maret 2019	- Proyek Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo.	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Hadir	
9.	19 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Progress</i> pengambilalihan Bandara UPT Kementerian Perhubungan.</li> <li>- Penjelasan tentang penanggung jawab pemanfaatan lahan <i>idle</i>.</li> <li>- <i>Update</i> proyek Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang.</li> <li>- <i>Update</i> proyek Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin.</li> <li>- <i>Holdering</i> BUMN sarana dan prasarana perhubungan udara.</li> <li>- <i>Groundbreaking</i> Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Hadir	
10.	26 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilihan pemenang sayembara desain seragam <i>customer services officer</i>.</li> <li>- <i>Transformation blueprint, alignment, cascading, organization</i>.</li> <li>- Persiapan pengoperasian Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo.</li> <li>- Kajian bersama pembentukan <i>holding</i> sarana dan prasarana perhubungan udara.</li> <li>- Tindak lanjut atas hasil asesmen <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> tahun buku 2017.</li> <li>- Hal lain terkait <i>corrective action</i>.</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Tidak Hadir	Perjalanan dinas
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Tidak Hadir	Perjalanan dinas
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Hadir	
11.	8 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan <i>corrective action</i>.</li> <li>- Penjelasan <i>update</i> tentang lahan <i>idle</i>.</li> <li>- Penunjukkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam rangka <i>holdering</i> BUMN.</li> <li>- Jalan akses menuju terminal baru Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.</li> <li>- Lain-lain (pelaksanaan hari ulang tahun BUMN)</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Hadir	



No	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
12.	16 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan <i>corrective action</i> terhadap penurunan kinerja keuangan.</li> <li>- Laporan manajemen realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) hingga Maret 2019.</li> <li>- <i>Progress update procurement transformation roadmap</i>.</li> <li>- Lanjutan pembahasan <i>progress update procurement transformation roadmap</i>.</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Hadir	
13.	30 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan strategi terkait kasus PT Sepinggang Sarana Utama (SSU), pemilik Hotel Hakaya Balikpapan.</li> <li>- Pembahasan konsesi bandara kepada Kementerian Perhubungan.</li> <li>- Pembahasan <i>corrective action</i> terhadap penurunan kinerja keuangan (pendapatan dan biaya).</li> <li>- <i>Commercial management</i> Bandara SAMS Sepinggang Balikpapan (2019-2024).</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Hadir	
14.	8 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindak lanjut somasi GVK terkait pembayaran <i>capacity study</i> dan <i>new masterplan</i> bandara.</li> <li>- Somasi terkait kerja sama proyek pengembangan Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo.</li> <li>- Usulan izin prinsip hotel di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin oleh PT Angkasa Pura Hotel.</li> <li>- Paparan Bandara I Gusti Ngurah Rai fase 2.</li> <li>- <i>Master concessionaire</i> di Bandara SAMS Sepinggang Balikpapan.</li> <li>- Suksesor Vice President Information Technology.</li> <li>- <i>Strategic partnership</i> Bandara Internasional Lombok.</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Tidak Hadir	Perjalanan dinas
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Tidak Hadir	Perjalanan dinas
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Hadir	
			15.	13 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanggungjawaban laporan tahunan 2018.</li> <li>- Paparan <i>video wall</i> dan <i>barrier gate</i> di lobi kantor pusat dan kenaikan biaya renovasi lobby kantor pusat.</li> <li>- Finalisasi pembahasan <i>inhouse maintenance</i>.</li> <li>- Usulan remunerasi Direksi dan Vice President.</li> <li>- Pembahasan hasil investigasi P4DP (rahasia).</li> <li>- Pembahasan <i>corrective action</i> terhadap penurunan kinerja keuangan.</li> </ul>
Wendo Asrul Rose	Hadir				
Novrihandri	Hadir				
Adi Nugroho	Hadir				
Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir				
Devy Suradji	Hadir				
Lukman F. Laisa	Hadir				

No	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
16.	28 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Studi kelayakan lokasi dan penyusunan rencana induk bandara baru di Provinsi Jawa Timur.</li> <li>- Alur dan fungsi ruang pengembangan terminal Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.</li> <li>- Demo rencana sistem <i>procurement</i>.</li> <li>- Paparan <i>content management platform</i>.</li> <li>- Penyelesaian permasalahan GVK.</li> <li>- Paparan <i>roadmap</i> teknologi informasi dari Angkasa Pura Supports dan Gugus Tugas - <i>Digital Transformation Program</i>.</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Hadir	
17.	14 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Video conference</i> terkait <i>corrective action</i> terhadap penurunan kinerja.</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Hadir	
18.	18 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana kerja sama dengan Dirjen Imigrasi.</li> <li>- Pembahasan <i>corrective action</i> terhadap penurunan kinerja keuangan (pendapatan dan biaya).</li> <li>- Pembahasan kinerja triwulan I tahun 2019.</li> <li>- Proposal pengembangan hotel Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) - Kulon Progo.</li> <li>- Usulan suksesor 1 level di bawah Direksi (rahasia).</li> <li>- <i>Progress</i> pengambilalihan kerja sama bandara baru (Bandara Sentani Jayapura)</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Tidak Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Tidak Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Hadir	
19.	25 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindaklanjut terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) anak perusahaan (tantiem, remunerasi dan target).</li> <li>- <i>Strategic partnership</i> Bandara Lombok Praya.</li> <li>- Pembahasan <i>corrective action</i> terhadap penurunan kinerja keuangan.</li> <li>- <i>Information technology roadmap</i>.</li> <li>- <i>Digital airport roadmap</i>.</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Hadir	

No	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
20.	2 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Kick of meeting transformation project (transformation business, organization, and workforce of Angkasa Pura I towards a global airport player).</i></li> <li>- Pembahasan <i>corrective action</i> terhadap penurunan kinerja keuangan.</li> <li>- <i>Strategic partnership</i> Bandara Lombok Praya - <i>progress dan timeline.</i></li> <li>- Penyempurnaan desain paket 1 proyek pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.</li> <li>- Tindak lanjut somasi GVK terkait <i>capacity study.</i></li> <li>- Somasi GVK terkait <i>masterplan</i> Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo.</li> <li>- <i>Progress</i> pembuatan e-POS di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang.</li> <li>- Pembahasan <i>procurement transformation.</i></li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Hadir	
21.	8 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan <i>corrective action</i> terhadap penurunan kinerja keuangan.</li> <li>- Persiapan rapat Direksi dan Komisaris: kinerja operasi dan keuangan hingga Mei 2019.</li> <li>- Remunerasi</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	Perjalanan dinas
			Devy Suradji	Hadir	
Lukman F. Laisa	Hadir				
22.	16 Juli 2019	- Penyelesaian permasalahan GVK.	Faik Fahmi	Tidak Hadir	Perjalanan dinas
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Tidak Hadir	Cuti
Lukman F. Laisa	Hadir				
23.	26 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan rapat Direksi dan Komisaris: realisasi RKAP hingga semester I tahun 2019, usulan revisi RKAP eksploitasi dan investasi tahun 2019.</li> <li>- Pembahasan desain terminal baru Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.</li> <li>- Persiapan operasional Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo.</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
Lukman F. Laisa	Hadir				

No	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
24.	29 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan rapat Direksi dan Komisaris: realisasi RKAP semester I tahun 2019, usulan revisi RKAP eksploitasi dan investasi tahun 2019, <i>strategic partnership</i> Bandara Internaional Lombok.</li> <li>- <i>Strategic procurement</i> terkait <i>business process</i> dan pembahasan <i>e-procurement</i> terkait dengan Divisi Teknologi Informasi.</li> <li>- Pembahasan valuasi bisnis dan aset Angkasa Pura I dalam rangka pembentukan <i>holding</i> aviasi.</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Hadir	
25.	8 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsep <i>owned brand hotel</i> Angkasa Pura Hotel di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.</li> <li>- Kerja sama <i>partnership</i> Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali fase 2.</li> <li>- Progress persiapan "<i>The 2nd ACI Customer Experience Global Summit 2019</i>".</li> <li>- Konsep interior Terminal 1 (T1) Bandara Juanda Surabaya.</li> <li>- Paparan Bandara Jawa Timur baru.</li> <li>- Persiapan pengoperasian penuh Bandara Internasional Yogyakarta.</li> <li>- <i>ICT e-POS real time (service agent)</i></li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Tidak Hadir	Perjalanan dinas
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Hadir	
26.	21 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsep <i>owned brand hotel</i> Angkasa Pura Hotel.</li> <li>- Pembahasan penambahan modal anak perusahaan.</li> <li>- <i>Progress project management Aeronautical Information Publication (AIP) dan Airport Operation Control Center (AOCC/s)</i></li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Tidak Hadir	Perjalanan dinas
27.	12 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjelasan kronologis Bandara Labuan Bajo.</li> <li>- Penunjukkan Angkasa Pura Suport terkait <i>Airport Operation Control Center (AOCC)</i> dan <i>Aeronautical Information Publication (AIP)</i> Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo.</li> <li>- <i>Progress</i> proyek Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo.</li> <li>- Paparan <i>artwork</i> dan interior gedung terminal Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.</li> <li>- <i>Update</i> revisi RKAP tahun 2019.</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Hadir	

No	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
28.	17 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan dengan mitra Incheon Airport: presentasi Bandara Hang Nadim Batam.</li> <li>- <i>Progress update</i> Bandara Sentani Jayapura.</li> <li>- Pembahasan terkait (pola karir, konsep pensiun dini, skema SDM Bandara Sentani Jayapura).</li> <li>- Usulan RKAP 2020.</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Tidak Hadir	Perjalanan dinas
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Hadir	
29.	30 September 2019 – 1 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian masalah <i>common use check-in system</i> (CUCS).</li> <li>- Terkait pembentukan holding, kewenangan perjanjian 5 tahun, pembangunan hotel Angkasa Pura Hotel di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.</li> <li>- Paparan hasil audit gedung.</li> <li>- Realisasi RKAP 2019 (dengan anak perusahaan)</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Hadir	
30.	9 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan terkait perubahan perjanjian kerja bersama (PKB) tahun 2019-2021.</li> <li>- Laporan anak perusahaan: kinerja hingga September 2019 dan target program kerja yang akan dicapai hingga Desember 2019.</li> <li>- Paparan <i>breakdown</i> pendapatan nonaeronautika (potensi peningkatan pendapatan) dan pemanfaatan aset berpotensi <i>impairment</i>.</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Hadir	
31.	15 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Anak Perusahaan: kinerja hingga September 2019 dan target program kerja yang akan dicapai hingga Desember 2019.</li> <li>- <i>Service agent &amp; common use check-in system</i> (CUCS).</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
			Lukman F. Laisa	Hadir	

No	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
32.	22 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjelasan terkait <i>enterprise architecture development</i>.</li> <li>- Usulan RKAP tahun 2020.</li> <li>- Realisasi capaian <i>Key Performance Index (KPI)</i> triwulan III tahun 2019.</li> <li>- Laporan <i>progress</i> pekerjaan <i>transforming business, organization, and workforce of Angkasa Pura I towards a global airport player</i> oleh Korn Ferry.</li> <li>- Pembahasan suksesor General Manager, Vice President, dan Direksi anak perusahaan (rahasia).</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
Lukman F. Laisa	Hadir				
33.	13 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Progress</i> laporan <i>Key Performance Index (KPI)</i> tahun 2019.</li> <li>- Usulan bentuk kontribusi untuk seleksi koridor domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.</li> <li>- Penjelasan final terkait prokon SITA Technology oleh Tim Teknologi Informasi, Aeronautika, dan Angkasa Pura Suport (untuk diambil keputusan).</li> <li>- Portal Angkasa Pura I.</li> <li>- Penjelasan terkait perbandingan produk <i>data integration (service agent/e-POS)</i>.</li> <li>- Penjelasan terkait penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) terkait investasi LinkAja.</li> <li>- Lain-lain (konsep Kelan Bay).</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
Lukman F. Laisa	Hadir				
34.	20 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Progress</i> laporan <i>Key Performance Index (KPI)</i> tahun 2019.</li> <li>- Pembahasan tindak lanjut rapat teknis usulan RKAP tahun 2020 dengan pemegang saham.</li> <li>- Bahan paparan kunjungan kerja Komisi V dan Komisi VI DPR RI di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.</li> <li>- Lain - lain (arahan Menteri BUMN kepada Direktur Utama).</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Tidak Hadir	Cuti
			Devy Suradji	Hadir	
Lukman F. Laisa	Hadir				
35.	26 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paparan Bandara Jawa Timur baru.</li> <li>- Pembahasan usulan RKAP tahun 2020.</li> <li>- Pedoman kerja sama mitra strategis.</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Tidak Hadir	Perjalanan dinas
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
Lukman F. Laisa	Hadir				



No	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Keterangan
36.	3 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paparan usulan RKAP tahun 2020 (persiapan RUPS).</li> <li>- Paparan KPI tahun 2020.</li> <li>- Pembayaran pembentukan konsorsium Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Bandara Hang Nadim Batam.</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
37.	11 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan kinerja dan penambahan modal anak usaha.</li> <li>- Pembahasan terkait <i>impairment</i> atas aset tidak produktif.</li> <li>- Paparan <i>review</i> komprehensif SITA oleh Tim IT, Aeronautika, dan Angkasa Pura Supports.</li> <li>- Paparan terkait kajian mendalam konsorsium untuk kelola Bandara Hang Nadim Batam.</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Hadir	
38.	17 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Update</i> pelaksanaan transformasi oleh konsultan Korn Ferry.</li> <li>- Persiapan peresmian terminal baru Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.</li> <li>- Bahan paparan rapat teknis bersama Wakil Menteri BUMN.</li> </ul>	Faik Fahmi	Hadir	
			Wendo Asrul Rose	Hadir	
			Novrihandri	Hadir	
			Adi Nugroho	Hadir	
			Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Hadir	
			Devy Suradji	Tidak Hadir	Perjalanan dinas
Lukman F. Laisa	Hadir				

## FREKUENSI KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Selama tahun 2019, Direksi telah mengikuti Rapat Internal sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan

Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali. Frekuensi dan kehadiran rapat masing-masing Direksi adalah sebagai berikut:

## Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Nama	Jabatan	Rapat Internal			Rapat Gabungan		
		Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Faik Fahmi	Direktur Utama	38	37	97,37	12	8	66,67
Wendo Asrul Rose	Direktur Operasi	38	34	89,47	12	7	58,33
Novrihandri	Direktur Keuangan	38	33	86,84	12	10	83,33
Adi Nugroho	Direktur SDM dan Umum	38	35	92,11	12	7	58,33
Lukman F. Laisa	Direktur Teknik	38	36	94,74	12	7	58,33
Devy Suradji	Direktur Pemasaran dan Pelayanan	38	36	94,74	12	8	66,67
Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Direktur Pengembangan Usaha	38	36	94,74	12	7	58,33

## KEPUTUSAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Sepanjang tahun 2019, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain melalui berbagai keputusan strategis Direksi terkait:

1. Penetapan visi dan misi baru Angkasa Pura I
2. Penyusunan perencanaan Perusahaan dan perumusan Rencana Jangka Panjang Perusahaan.
3. Pemenuhan target kinerja Perusahaan berdasarkan aspek keuangan, operasional, dan administrasi.
4. Pengembangan usaha Perusahaan, antara lain melalui pengembangan beberapa bandara di wilayah Banjarmasin, Semarang, dan Yogyakarta.
5. Perumusan *corrective action* dan langkah *revenue enhancement* untuk menghadapi penurunan *traffic*.
6. Penyelenggaraan Rapat Direksi, menghadiri Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris, dan RUPS.
7. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal, termasuk menindaklanjuti temuan Internal Audit dan auditor eksternal.
8. Penyelesaian permasalahan Perusahaan,

khususnya permasalahan hukum yang sedang dihadapi Perusahaan.

9. Pengawasan kinerja dan permasalahan Anak Perusahaan.
10. Pelaksanaan tugas lainnya terkait kepengurusan perusahaan.

Dari berbagai kegiatan pelaksanaan tugas di atas, Direksi mengeluarkan beberapa keputusan dan rekomendasi yang tertuang dalam Surat Keputusan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, antara lain disajikan pada tabel berikut.

## Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

No	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
1.	SKEP.07/KB.08/2019	18 Januari 2019	Pelaksanaan Tugas Penyelarasan Program Kerja Tahun 2019 Direktur Pemasaran Pelayanan
2.	SKEP.09/KU.11/2019	28 Januari 2019	Tim Pendanaan Korporasi Melalui Pinjaman Lembaga Keuangan di Angkasa Pura I
3.	SKEP.10/HM.02/2019	1 Februari 2019	Pelaksanaan Tugas Pemilihan Duta Bandara Tahun 2019
4.	SKEP.40/HM.02/2019	8 Februari 2019	Pengelolaan Informasi Dokumentasi PPID di Lingkungan Angkasa Pura I
5.	SKEP.44/KP.10/2019	15 Februari 2019	Tunjangan Hari Raya 2019
6.	SKEP.74/KU.01.01/2019	27 Februari 2019	Komite Penyusunan RKAP Investasi Angkasa Pura I Tahun 2020
7.	SKEP.82/KP.14/2019	19 Maret 2019	Panitia Pembinaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai P4DP Kantor Pusat
8.	SKEP.87/PL.07/2019	27 Maret 2019	Perubahan SKEP.193/2018 Penghapusan Aktiva Tetap Tidak Produktif Milik Angkasa Pura I
9.	SKEP.99/TK.09/2019	16 April 2019	Perpanjangan Tim Teknis Monitoring Evaluasi Pelaksanaan <i>Overlay Runway</i> Bandara di Lingkungan Angkasa Pura I
10.	SKEP.103/DL.04.02/2019	25 April 2019	Pelatihan Airport Officer Management Batch V Tahun 2019
11.	KEP.105/KB.03/2019	26 April 2019	Tarif Masuk Pelataran Terminal di Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo
12.	SKEP.106/KB.03.05/2019	30 April 2019	Tarif Masuk Pelataran Terminal di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali
13.	SKEP.109/OM.04/2019	3 Mei 2019	Tim Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Tahun 2019
14.	SKEP.111/OM.04/2019	7 Mei 2019	Pedoman Etika Perusahaan
15.	KEP.114/OM.02.08/2019	13 Mei 2019	Pedoman Pembuatan Perjanjian Komersial dengan Menggunakan <i>Generate Legal</i>
16.	KEP.130/OM.02.06/2019	14 Juni 2019	Pedoman Kegiatan Komersial SBU Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali
17.	SKEP.142/OM.04/2019	9 Juli 2019	Tim Pengembangan Human Capital Information System (HCIS)
18.	SKEP.144/OM.01/2019	12 Juli 2019	Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris
19.	SKEP.150	1 Agustus 2019	Tim Seleksi Area Komersial <i>Master Concessionary</i> Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan
20.	SKEP.161/OM.01/2019	28 Agustus 2019	Tim Implementasi Inovasi Angkasa Pura I
21.	KEP.166/OM.01.01/2019	30 September 2019	Perubahan KEP.86/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tanggung Jawab
22.	KEP.167/KP.04/2019	7 Oktober 2019	Pola Pelatihan dan Pengembangan Pegawai Angkasa Pura I
23.	SKEP.180	7 November 2019	Tim Perluasan Terminal dan Fasilitas di Bandara Sam Ratulangi Manado

### Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

No	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
24.	KEP.204/KU.13/2019	23 Desember 2019	Pedoman Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ CSR Angkasa Pura I
25.	SKEP.200	23 Desember 2019	Tarif PJP4U dan PJP2U <i>counter check-in</i> Bandara Sentani Jayapura
26.	KEP.208/KB.08/2019	28 Desember 2019	Tarif PJP2U untuk Angkutan Udara Dalam Negeri dan Luar Negeri pada Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang
27.	KEP.212/HK.01.01/2019	31 Desember 2019	Perubahan KEP.69/2018 Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran

## PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Kinerja Direksi secara berkala berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah disahkan oleh Pemegang Saham melalui Kontrak Manajemen. Selain itu, penilaian kinerja Direksi juga dilakukan melalui pendekatan *GCG assessment*.

### PENILAIAN KINERJA DIREKSI BERDASARKAN KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

Penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI dilaksanakan mengacu pada Surat Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 dan sesuai arahan *Shareholder Aspiration* No. S-487/MBU/08/2017 tanggal 31 Agustus 2017. Indikator penilaian kinerja Direksi meliputi:

1. Keuangan dan Pasar;
2. Fokus Pelanggan;
3. Efektivitas Produk dan Proses;
4. Fokus Tenaga Kerja;
5. Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Masyarakat; serta
6. *Agent of Development*.

Pemegang Saham melakukan penilaian kinerja Direksi dalam RUPS pada saat Direksi menyampaikan pertanggungjawaban kinerja periode 2019. Hasil penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI tahun 2019 ditunjukkan pada tabel berikut.

Penilaian *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

<i>Key Performance Indicator</i>	Skor Capaian	
	Bobot	Skor
Keuangan dan Pasar	20,00	17,50
Fokus Pelanggan	20,00	20,68
Efektivitas Produk dan Proses	17,00	10,72
Fokus Tenaga Kerja	16,00	16,70
Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Masyarakat	15,00	15,00
<i>Agent of Development</i>	10,00	9,75
<b>Bobot</b>	<b>100,00</b>	<b>90,35</b>

## PENILAIAN KINERJA DIREKSI BERDASARKAN GCG ASSESSMENT

Selain berdasarkan KPI, kinerja Direksi juga dinilai berdasarkan GCG *assessment*. Pihak yang melakukan penilaian kinerja melalui GCG *assessment* adalah pihak eksternal yang independen, yakni PT Sierra Bisnis Konsulting. Pelaksanaan penilaian mengacu pada peraturan dalam Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

Kriteria penilaian kinerja Direksi berdasarkan GCG *assessment* meliputi:

1. Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran Direksi.
2. Pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab Direksi yang jelas.
3. Penyusunan perencanaan perusahaan.
4. Pemenuhan target kinerja perusahaan.
5. Pelaksanaan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.
6. Pelaksanaan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
7. Pelaksanaan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan pemangku kepentingan.
8. Memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.
9. Pelaksanaan keterbukaan informasi dan komunikasi, serta penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham secara tepat waktu.
10. Penyelenggaraan rapat Direksi dan kehadiran pada rapat Dewan Komisaris.
11. Penyelenggaraan pengawasan *intern* yang berkualitas dan efektif.
12. Penyelenggaraan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif.
13. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kriteria penilaian tersebut, kinerja Direksi di tahun 2018 memperoleh skor 33,60 dengan capaian 95,99% dan predikat sangat baik. Pencapaian tersebut, meningkat dari tahun penilaian sebelumnya karena Direksi telah melakukan peningkatan pada kriteria sebagai berikut pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung secara jelas, telah menyusun perencanaan perusahaan, melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. Selain itu, Direksi juga telah melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Kinerja GCG Direksi yang sangat baik/baik yaitu dalam hal memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi dan juga penyelenggaraan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif. Kemudian, kinerja GCG yang perlu mendapatkan perhatian dan diperbaiki yaitu terkait ketersediaan pedoman dan prosedur pengendalian dan kerahasiaan informasi.

## PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI, UNIT INTERNAL AUDIT, UNIT COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT, DAN UNIT KERJA LAINNYA

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko yang bertanggung jawab langsung di bawah Direksi. Pada tahun 2019, Komite ini telah membantu Direksi untuk melaksanakan evaluasi kebijakan manajemen risiko dan melakukan *review* atas *Roadmap Implementasi Manajemen Risiko Perusahaan*. Selain itu, Komite Manajemen Risiko juga telah melaksanakan Rapat Rutin yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2019 dengan agenda pembahasan antara lain usulan penetapan *risk tolerance* Perusahaan, *refreshing* Pedoman Manajemen Risiko KEP.176/OM.02.05/2018, serta pembahasan risiko strategis Perusahaan. Sepanjang tahun periode pelaporan, Direksi menilai bahwa Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Selain Komite Manajemen Risiko, Direksi didukung oleh Unit Internal Audit dan Unit Compliance & Risk Management. Sesuai dengan KPI mereka setiap tahunnya, Unit Internal Audit menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik, yakni mampu menindaklanjuti 445 rekomendasi atas 449 rekomendasi dari total rekomendasi pemeriksaan operasional tahun 2019 atau sebesar 99 %. Di sisi lain, Unit Compliance & Risk Management membantu pelaksanaan tugas Direksi melalui penerapan sistem penilaian tingkat maturitas manajemen. Pada tahun 2019, perolehan nilai tingkat maturitas manajemen risiko Perusahaan mencapai 3.37 dari skala 5. Secara umum, seluruh jajaran manajemen Perusahaan telah mencapai hasil kinerja yang baik, terlihat pada nilai KPI Perusahaan yang mencapai angka 90.27 dari target 100.00.

# Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

## KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN PENERAPANNYA

Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN menjadi salah satu landasan bagi Angkasa Pura I untuk memastikan keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi.

Proses pemilihan Dewan Komisaris Angkasa Pura I tidak membedakan latar belakang identitas calon Komisaris, namun mengutamakan pertimbangan kualitas dan kompetensi. Terkait dengan aspek keberagaman, Angkasa Pura I berupaya agar komposisi anggota Dewan Komisaris memiliki pendidikan, pengalaman, dan keahlian yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Pada tahun 2019, Angkasa Pura I menyadari bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki gender laki-laki. Angkasa Pura I dapat memastikan bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu kesengajaan, namun lebih disebabkan oleh jumlah perempuan yang berminat untuk berkiprah di industri kebandarudaraan lebih sedikit dari pada minat laki-laki.

Komposisi keberagaman anggota Dewan Komisaris di tahun 2019 dapat dilihat lebih lanjut berikut ini.



## Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Gender	Pendidikan Terakhir	Pengalaman dan Keahlian
1	Djoko Sasono	Komisaris Utama	Laki-laki	Program Doktor, <i>Transportation Planning and Policy (Urban Engineering)</i>	Tata ruang, infrastruktur, sistem transportasi, perhubungan darat, perencanaan dan pengembangan
2	Harry Z. Soeratin	Komisaris	Laki-laki	Program Doktor, <i>Business and Commerce</i>	Keuangan, penyuluhan sosial
3	Suprasetyo	Komisaris	Laki-laki	Sarjana Teknik Kimia	Perhubungan udara, kendali mutu, keamanan penerbangan, pelayanan darurat
4	Ali Mochtar Ngabalin	Komisaris	Laki-laki	Program Doktor	Komunikasi politik, kebijakan publik
5	Tri Budi Satriyo	Komisaris	Laki-laki	Program Master, Manajemen	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, keamanan wilayah udara

## KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI DAN PENERAPANNYA

Kebijakan di PT Angkasa Pura I (Persero) terkait keberagaman Direksi dijalankan berdasarkan pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. Sesuai dengan regulasi tersebut, beberapa aspek persyaratan yang perlu dipenuhi oleh calon anggota Direksi antara lain pengalaman, keahlian, integritas, kepemimpinan, dan dedikasi yang tinggi terhadap industri kebandarudaraan, khususnya pada pengembangan Angkasa Pura I.

Pemilihan, penetapan dan pengangkatan Direksi Angkasa Pura I tidak berdasarkan pertimbangan identitas, namun lebih menekankan pada kemampuan dan keahlian serta etika perilaku individu. Angkasa Pura I juga memastikan keberagaman komposisi Direksi sesuai dengan kebutuhan strategi operasional, manajemen risiko

dan pengembangan usaha Perusahaan.

Per tahun 2019, Angkasa Pura I menilai bahwa jumlah profesional perempuan yang berkarir di industri kebandarudaraan sangat jauh lebih rendah dari pada jumlah profesional laki-laki. Oleh sebab itu, komposisi Direksi Angkasa Pura I per akhir tahun 2019 hanya ada satu perempuan. Angkasa Pura I memastikan bahwa hal tersebut bukanlah akibat kebijakan diskriminatif Perusahaan, namun merupakan hasil seleksi yang dilakukan secara profesional.

Tabel berikut menyajikan komposisi keberagaman anggota Direksi di tahun 2019 dapat dilihat lebih lanjut berikut ini.

## Keberagaman Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Gender	Pendidikan Terakhir	Pengalaman dan Keahlian
1	Faik Fahmi	Direktur Utama	Laki-laki	Sarjana Ekonomi	Layanan penerbangan, komersial dan pengembangan bisnis, kegiatan usaha pelabuhan
2	Novrihandri	Direktur Keuangan	Laki-laki	Program Master, Manajemen	Akuntansi, keuangan, pengembangan bisnis, sumber daya manusia

## Keberagaman Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Gender	Pendidikan Terakhir	Pengalaman dan Keahlian
3	Devy Suradji	Direktur Pemasaran dan Pelayanan	Perempuan	Program Master, <i>Environmental Health Management</i>	Manajemen, pengembangan kompetensi, pemasaran, komunikasi, pengembangan bandara
4	Wendo Asrul Rose	Direktur Operasi	Laki-laki	Sarjana Teknik Mesin	Operasionalisasi bandara, pengawasan teknis bandara
5	Lukman F. Laisa	Direktur Teknik	Laki-laki	Sarjana Teknik Sipil	Teknik sipil, konstruksi bandara, perencanaan, perhubungan udara
6	Adi Nugroho	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	Laki-laki	Program Doktor, <i>Service Management</i>	Komersialisasi, pengembangan usaha, analisa proyek
7	Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Direktur Pengembangan Usaha	Laki-laki	<i>Aviation College</i>	Penerbangan pesawat udara, manajemen bisnis dan operasional <i>airlines</i> , kewirausahaan industri layanan penerbangan

## PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Setiap tahun, Angkasa Pura I melakukan penilaian penerapan tata kelola, atau *GCG assessment*. Tujuannya yaitu agar Angkasa Pura I dapat mengetahui capaian kegiatan GCG serta aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas tata kelola perusahaan.

### KRITERIA PENILAIAN

GCG *assessment* dilaksanakan berdasarkan kriteria atau indikator penilaian yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Kriteria dan indikator tersebut meliputi aspek:

1. Komitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
4. Direksi;
5. Pengungkapan informasi dan transparansi; dan
6. Aspek lainnya.

### PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Pada tahun 2019, GCG *assessment* PT Angkasa Pura I (Persero) untuk tahun buku 2019 telah dilaksanakan oleh PT Sierra Bisnis Konsulting.

### SKOR PENILAIAN

Penilaian terhadap penerapan GCG yang dilakukan untuk tahun buku 2018 menunjukkan Angkasa Pura I berhasil meningkatkan capaian pelaksanaan GCG dengan hasil yang memuaskan. Hasil pencapaian nilai asesmen GCG Angkasa Pura I dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

## Hasil GCG Assessment PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2015-2019

Tahun Pelaksanaan Assessment GCG	Skor GCG Assessment	Kategori	Pelaksana
2019	91,58	Sangat Baik	PT Sierra Bisnis Konsulting
2018	91,34	Sangat Baik	PT Sierra Bisnis Konsulting
2017	90,85	Sangat Baik	PT Bumi Pertiwi Mandiri
2016	90,83	Sangat Baik	PT Adikarya Gemilang Solusindo
2015	90,46	Sangat Baik	PT Bumi Pertiwi Mandiri

Secara lebih rinci, hasil penilaian tiap indikator pelaksanaan GCG pada tahun 2019 untuk tahun buku 2018 adalah sebagai berikut.

## Hasil GCG Assessment PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

No	Kriteria	Bobot	Skor	Capaian (%)
1.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7	6,21	88,77
2.	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9	8,02	89,11
3.	Dewan Komisaris	35	34,14	97,55
4.	Direksi	35	33,60	95,99
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9	7,11	79,03
6.	Aspek Lainnya	5	2,50	50,00
<b>Skor Keseluruhan</b>		<b>100</b>	<b>91,58</b>	<b>91,58</b>
<b>Kualitas Penerapan GCG</b>		<b>Sangat Baik</b>		

Asesmen terhadap penerapan GCG menunjukkan nilai tata kelola yang baik terkait aspek Dewan Komisaris dengan capaian sebesar 97,55% dan aspek Direksi dengan capaian sebesar 95,99%. Pencapaian yang baik tersebut dipicu oleh faktor Aspek Dewan Komisaris dan Aspek Direksi yang memiliki bobot paling tinggi dari aspek yang lain yang mana terpenuhinya penilaian atas kedua aspek tersebut akan secara signifikan memengaruhi capaian skor yang diperoleh.

Namun demikian atas peningkatan capaian hasil asesmen GCG ini, Angkasa Pura I tetap perlu melakukan peningkatan sehingga memperoleh gambaran kondisi tata kelola Angkasa Pura I sebagai informasi atau masukan bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengambil keputusan penting khususnya menyangkut penyempurnaan penerapan GCG di masa yang akan datang. Adapun yang menjadi *area on improvement* sebagaimana tersebut dalam bagian Rekomendasi dan Tindak Lanjut.

## REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Terlepas dari GCG *assessment* yang menunjukkan hasil yang baik, Angkasa Pura I tetap berupaya untuk menyempurnakan pelaksanaan GCG di Perusahaan pada masa mendatang. Angkasa Pura I telah menerima dan menindaklanjuti

rekomendasi dari penilai GCG sebagai upaya perbaikan manajemen. Beberapa rekomendasi yang diterima oleh Angkasa Pura I sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut.

### Rekomendasi dan Tindak Lanjut hasil GCG Assessment PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di lingkup Direksi dan manajemen	Direktur Keuangan telah ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di lingkup Direksi dan manajemen.
2.	Menyusun pedoman dan/atau prosedur perihal pengendalian dan kerahasiaan informasi Perusahaan.	Telah diakomodir dengan Keputusan Direksi Nomor KEP.11/OM.02.08/2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Angkasa Pura I (Persero).
3.	Menetapkan uraian tugas bagi anggota Direksi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di lingkup Direksi dan manajemen.	Dalam proses penyusunan konsep Surat Keputusan Direksi perihal penanggung jawab implementasi GCG.
4.	Menandatangani komitmen untuk mematuhi Pedoman Etika Perusahaan.	Pengumpulan tanda tangan Dewan Komisaris dan Direksi untuk Lembar Pemberlakuan Pedoman dan Etika
5.	Mengesahkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi melalui keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi.	Dalam proses penyempurnaan dan pengajuan kembali Pedoman Pengendalian Gratifikasi untuk disahkan sebagai keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi.
6.	Menyusun Pedoman Pengendalian Internal.	Dalam proses penyusunan konsep Pedoman Pengendalian Internal.
7.	Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan budaya kepatuhan yang telah berjalan di Perusahaan.	Tingkat Kepatuhan pada Semester II tahun 2019 telah meningkat dari 93% menjadi 95%.
8.	Menyusun pedoman dan/atau prosedur pembinaan anak perusahaan.	Dalam proses penyusunan konsep pedoman dan/atau prosedur pembinaan anak perusahaan.
9.	Melengkapi pedoman dan/atau prosedur untuk seluruh aktivitas utama yang berjalan di Perusahaan.	Prosedur mutu untuk aktivitas utama Perusahaan telah dilengkapi.
10.	Melengkapi seluruh bandara kelolaan Perusahaan dengan sertifikasi keselamatan kerja.	Telah dilakukan sertifikasi.
11.	Melengkapi sertifikasi seluruh peralatan pada Kantor Cabang yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja.	Telah dilakukan sertifikasi.
12.	Menyusun dan/atau menyelaraskan RJPB bagi masing-masing bandara kelolaan Perusahaan dengan RJPP.	Menunggu umpan balik dari kantor cabang-kantor cabang atas draft RJPB yang disampaikan.
13.	Menyusun pedoman, prosedur dan/atau instruksi kerja perihal penilaian kinerja atau KPI unit kerja dan individu.	1. Dalam proses penyusunan konsep pedoman KPI untuk Unit Kerja. 2. KPI individu telah diakomodir dengan Keputusan Direksi Nomor KEP.70/OM.02.05/2013 tentang <i>Performance Management System (PMS)</i> PT Angkasa Pura I (Persero).
14.	Mengisi jabatan-jabatan struktural di Kantor-kantor Cabang yang masih mengalami kekosongan.	Untuk pengisian beberapa jabatan dalam proses penyusunan SKEP Direksi, dan untuk pengisian jabatan lainnya dalam pembahasan dengan Unit Pembina.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
15.	Melengkapi lisensi bagi seluruh pegawai di Kantor Cabang yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing mensyaratkan terpenuhinya kelengkapan lisensi dari instansi berwenang.	Telah menyampaikan permintaan kepada Unit Training & Development untuk mengikutsertakan Calon Pegawai dalam diklat <i>initial</i> sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi calon pegawai.
16.	Menyediakan sistem informasi yang menampung usulan secara mandiri perihal kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi setiap pegawai dalam memenuhi tanggung jawab dan tugas masing-masing.	Telah diakomodir dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti <i>e-Learning</i> Angkasa Pura I; CBT XScreeer; CBT Pro; APLICON; APLIX; dan APKNOW.
17.	Menetapkan secara formal melalui keputusan Direksi hasil perhitungan analisis beban kerja.	Akan menerbitkan tata cara perhitungan analisa beban kerja yang dikukuhkan melalui Keputusan Direksi.
18.	Menyediakan akses data bagi Unit Kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang perihal data pendidikan dan pelatihan yang harus diikuti oleh setiap pegawai, untuk memudahkan perencanaan pendidikan dan pelatihan.	Telah diakomodir dengan kalender akademik.
19.	Menginstruksikan kepada seluruh pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di intern maupun ekstern Perusahaan untuk melaksanakan <i>transfer knowledge</i> di unit kerja masing-masing.	Telah diakomodir dengan Keputusan Direksi Nomor KEP.167/KP.04/2019 tentang Pola Pelatihan dan Pengembangan Pegawai Angkasa Pura I.
20.	Menyusun dan mengadministrasikan dengan memadai memori serah terima jabatan dalam proses pergantian pejabat struktural.	1. Mengadakan pelantikan pejabat setiap adanya pergantian (mutasi/rotasi) jabatan 2. Mewajibkan pegawai yang mengalami rotasi/mutasi/promosi menyerahkan Berita Acara Serah Terima Jabatan sesuai dengan surat edaran Direksi yang berlaku
21.	Melengkapi seluruh aktivitas atau kegiatan inti Perusahaan dengan sistem teknologi informasi (sistem aplikasi) yang dibutuhkan.	Sudah terakomodir dengan aplikasi HCIS.
22.	Menyusun daftar aset tetap atau menyediakan identifikasi dalam daftar aset tetap eksisting perihal peralatan di Kantor Cabang yang menurut peraturan perundang-undangan harus tersedia dalam kondisi baik, untuk memudahkan pemantauan keberadaan dan kondisinya masing-masing.	Akan dilaksanakan pengelompokan data untuk aset mandatori dalam daftar aset perusahaan
23.	Melaksanakan asesmen atau evaluasi efektivitas pengendalian internal tingkat korporat.	Pengukuran akan dilaksanakan setelah Pedoman Pengendalian Internal diselesaikan oleh Unit Risk Management.
24.	Menindaklanjuti seluruh temuan hasil audit SPI.	Melengkapi laporan triwulan tindak lanjut temuan tahun 2018
25.	Melaksanakan pengukuran penjaminan mutu SPI (mengevaluasi mutu dan kinerja SPI untuk dibandingkan dengan standar profesi dan praktik-praktik terbaik).	Dalam proses penyusunan KAK untuk pemilihan konsultan pelaksana asesmen.
26.	Menyelesaikan status tuntutan, sengketa atau permasalahan yang terkait dengan transaksi bisnis dengan pihak lain atau mitra kerja yang masih berlangsung.	Menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang terkait dengan transaksi bisnis dengan pihak lain atau mitra kerja yang masih berlangsung.

# Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pelaksanaan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Selain memperhatikan ketentuan Pemerintah,

pemberian remunerasi mempertimbangkan beberapa aspek kinerja keuangan Perusahaan, seperti kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, kecukupan dan penguatan permodalan, dan aspek stabilitas keuangan. Kebijakan remunerasi juga ditentukan berdasarkan efektivitas manajemen risiko, serta potensi pendapatan di masa yang akan datang.

## REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

### PROSEDUR PENGUSULAN SAMPAI PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Prosedur pengusulan sampai penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris mengikuti ketentuan Peraturan Menteri BUMN dan sesuai dengan arahan RUPS. Pada umumnya, usulan remunerasi diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan pertimbangan yang dibuat oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Angkasa Pura I juga merespon peraturan lain yang mengatur tata kelola perusahaan sebagai BUMN, khususnya Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Pada saat laporan ini diterbitkan, tertanggal 22 April 2020, Angkasa Pura I telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang tertuang dalam SK Dewan Komisaris No. KEP.05/DK.AP.I/2020. Usulan remunerasi diteruskan kepada Pemegang Saham Utama dan Pengendali, untuk kemudian disahkan melalui mekanisme RUPS.

### INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018, indikator penetapan Remunerasi Dewan Komisaris mencakup:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan; dan
5. Faktor-faktor lain yang relevan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### STRUKTUR REMUNERASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris yang ditetapkan yaitu sebagai berikut.

Struktur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero)

No	Jenis Penghasilan	Keputusan	Keterangan
1.	Honorarium	Rp 101.250.000,-/bulan (45% dari Direktur Utama).	a. Komisaris Utama: 100% b. Komisaris: 90% dari Komisaris Utama
2.	Tunjangan		
	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sebesar 1 (satu) bulan honorarium.	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019.

## Struktur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero)

No	Jenis Penghasilan	Keputusan	Keterangan
	Tunjangan Transportasi	Diberikan sebesar 20% dari honorarium.	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019.
	Asuransi Purna Jabatan	Premi asuransi paling banyak 25% dari honorarium.	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019.
3.	Fasilitas Kesehatan	Asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan ( <i>at cost</i> ).	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019.
	Fasilitas Bantuan Hukum	Untuk pembiayaan jasa kantor pengacara / konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan.	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019.
4.	Tantiem/Insentif Kinerja		
	Tantiem/Insentif Kinerja	Memberikan tantiem sebesar Rp48.000.000.000,- untuk Direksi dan Dewan Komisaris.	Komisaris Utama: 45% dari tantiem Direktur Utama. Komisaris: 90% dari tantiem Komisaris Utama. Dibagikan secara proposional sesuai masa kerja aktif yang bersangkutan. Pajak atas tantiem ditanggung pribadi bukan Perusahaan.
	<i>Long Term Incentive</i>	Tidak diberikan.	

Tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima anggota Dewan Komisaris

## JUMLAH NOMINAL/KOMPONEN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Jumlah remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris yang telah direalisasikan untuk periode tahun buku 2019 adalah sebagai berikut.

## Nominal dan Komponen Remunerasi Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero)

Nama	Jabatan	Honor	Premi Asuransi	Tunjangan Komunikasi	Tunjangan Mobilitas	Tunjangan Hari Raya	Tantiem 2018	Total Selama 1 Tahun
Djoko Sasono	Komisaris Utama	78.750.000	19.687.500	3.937.500	15.750.000	78.750.000	-	669.375.000
Tri Budi Satriyo	Komisaris	70.875.000	17.718.750	3.543.750	14.175.000	70.875.000	-	708.750.000
Suprasetyo	Komisaris	70.875.000	17.718.750	3.543.750	14.175.000	70.875.000	1.102.131.406	2.160.977.650
Harry Z. Soeratin	Komisaris	70.875.000	17.718.750	3.543.750	14.175.000	70.875.000	-	1.346.625.000
Ali Mochtar Ngabalin	Komisaris	70.875.000	17.718.750	3.543.750	14.175.000	70.875.000	-	602.437.500



## KEBIJAKAN REMUNERASI DIREKSI

### PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

Penetapan Remunerasi bagi Direksi mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN dan sesuai dengan arahan RUPS. Usulan besaran remunerasi Direksi diajukan oleh Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.

Pada saat laporan ini diterbitkan, tertanggal 22 April 2020, Angkasa Pura I telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang tertuang dalam SK Dewan Komisaris No. KEP.05/DK.AP.I/2020 sehingga pelaksanaan fungsinya tidak lagi dibawah Komite Manajemen Risiko Usaha dan GCG.

Dewan Komisaris Angkasa Pura I meneruskan usulan remunerasi kepada Pemegang Saham Utama dan Pengendali, untuk kemudian disahkan melalui mekanisme RUPS.

### STRUKTUR REMUNERASI ANGGOTA DIREKSI

Struktur penetapan remunerasi bagi Direksi adalah sebagai berikut.

Struktur Penetapan Remunerasi Direksi PT Angkasa Pura I (Persero)

No	Jenis Penghasilan	Keterangan
1.	Gaji	Direktur Utama sebesar 100%. Direktur sebesar 90% dari gaji Direktur Utama.
2.	Tunjangan	
	Hari Raya Keagamaan	Anggota Direksi diberikan tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar 1 (satu) kali gaji setiap tahun.
	Perumahan	Anggota Direksi diberikan tunjangan perumahan sebesar 40% dari gaji dengan ketentuan maksimal sebesar Rp27.500.000.
	Asuransi Purna Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diberikan selama menjabat.</li> <li>Premi yang ditanggung perusahaan adalah maksimal 25% dari gaji dalam 1 tahun.</li> <li>Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi yang dikoordinasikan oleh unit yang mengelola fasilitas dan tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</li> <li>Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian.</li> </ul>
3.	Fasilitas	
	Kendaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Anggota Direksi hanya berhak atas 1 (satu) fasilitas kendaraan dari Perseroan.</li> <li>Fasilitas kendaraan termasuk dengan biaya pemeliharaan dan operasional diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.</li> <li>Spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh Menteri.</li> <li>Anggota Direksi yang tidak lagi menjabat wajib mengembalikan kendaraan dinas kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat.</li> </ol>

## Struktur Penetapan Remunerasi Direksi PT Angkasa Pura I (Persero)

No	Jenis Penghasilan	Keterangan
3.	Kesehatan	<p>a. Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya obat.</p> <p>b. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi serta suami/isteri dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan.</p> <p>c. Fasilitas kesehatan diberikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Rawat jalan dan obat.</li> <li>2). Rawat inap dan obat.</li> <li>3). <i>Medical check up</i> dengan ketentuan 1 (satu) kali setiap tahun dan dilakukan di dalam negeri.</li> </ol> <p>d. Apabila Dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat ke luar negeri, fasilitas kesehatan diberikan secara penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.</p>
	Bantuan Hukum	<p>a. Fasilitas bantuan hukum kepada anggota Direksi diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatan anggota Direksi dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>b. Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka dan terdakwa di lembaga peradilan.</p> <p>c. Jasa kantor pengacara atau konsultan hukum yang dapat dibebankan pembiayaannya adalah untuk 1 (satu) kantor pengacara/konsultan hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.</p> <p>d. Penunjukkan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan Perseroan.</p>
	Fasilitas Perumahan	Dalam hal Perseroan menyediakan rumah jabatan Direksi maka yang bersangkutan wajib mempergunakan rumah tersebut sebagai fasilitas perumahan dan yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan.

Tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima anggota Direksi

**Indikator Penetapan Remunerasi Direksi**

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018, indikator penetapan Remunerasi Dewan Komisaris mencakup:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan; dan
5. Faktor-faktor lain yang relevan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Direksi**

Jumlah remunerasi masing-masing anggota Direksi yang telah direalisasikan untuk periode tahun buku 2019 adalah sebagai berikut.

## Nominal dan Komponen Remunerasi Direksi PT Angkasa Pura I (Persero)

Nama	Jabatan	Gaji	Tunjangan Utilitas	Premi Asuransi	Tunjangan Hari Raya	Tantiem 2018	Total selama 1 Tahun
Faik Fahmi	Direktur Utama	175.000.000	27.500.000	43.750.000	202.500.000	71.613.674	3.229.113.674
Wendo Asrul Rose	Direktur Operasi	148.750.000	27.500.000	37.187.500	176.250.000	2.713.215.145	5.468.715.145
Novrihandri	Direktur Keuangan	148.750.000	27.500.000	37.187.500	176.250.000	2.713.215.145	5.468.715.145
Adi Nugroho	Direktur SDM dan Umum	148.750.000	27.500.000	37.187.500	176.250.000	2.713.215.145	5.468.715.145
Lukman F. Laisa	Direktur Teknik	148.750.000	27.500.000	37.187.500	176.250.000	-	2.310.625.000
Devy Suradji	Direktur Pemasaran dan Pelayanan	148.750.000	27.500.000	37.187.500	176.250.000	64.942.531	2.802.442.531
Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Direktur Pengembangan Usaha	148.750.000	27.500.000	37.187.500	176.250.000	1.057.244.572	3.794.744.572

## Pengungkapan Pemegang Saham

### KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham milik pribadi dan keluarganya di Perusahaan maupun pada perusahaan lain beserta perubahannya kepada Angkasa Pura I. Pengungkapan tersebut juga bertujuan untuk

menghindari benturan kepentingan terkait dengan kedudukan dan wewenang yang dimiliki oleh Dewan Komisaris. Rincian kepemilikan saham Dewan Komisaris di tahun 2019 yaitu sebagai berikut.

#### Kepemilikan Saham Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) per 31 Desember 2019

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris (dalam Lembar Saham) pada	
		Angkasa Pura I	Perusahaan Lain
Djoko Sasono	Komisaris Utama	Nihil	Nihil
Tri Budi Satriyo	Komisaris	Nihil	Nihil
Suprasetyo	Komisaris	Nihil	Nihil
Harry Z. Soeratin	Komisaris	Nihil	Nihil
Ali Mochtar Ngabalin	Komisaris	Nihil	Nihil

## KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Sama halnya dengan Dewan Komisaris, anggota Direksi Angkasa Pura I wajib mengungkapkan kepemilikan saham pribadi maupun keluarga di Angkasa Pura I maupun perusahaan lain untuk

menghindari benturan kepentingan. Tabel berikut menyajikan data detail mengenai kepemilikan saham Direksi di tahun 2019.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) per 31 Desember 2019

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham Dewan Direksi (dalam lembar saham) pada	
		PT Angkasa Pura I (Persero)	Perusahaan Lain
Faik Fahmi	Direktur Utama	Nihil	Nihil
Wendo Asrul Rose	Direktur Operasi	Nihil	Nihil
Novrihandri	Direktur Keuangan	Nihil	Nihil
Adi Nugroho	Direktur SDM dan Umum	Nihil	Nihil
Lukman F. Laisa	Direktur Teknik	Nihil	Nihil
Devy Suradji	Direktur Pemasaran dan Pelayanan	Nihil	Nihil
Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Direktur Pengembangan Usaha	Nihil	Nihil

## Hubungan Afiliasi

Angkasa Pura I memenuhi ketentuan peraturan regulasi untuk mengungkapkan hubungan afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi dalam Laporan Tahunan. Kriteria hubungan afiliasi yang diungkapkan meliputi.

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya.
5. Hubungan afiliasi antara Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

### HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris Angkasa Pura I tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun Pemegang Saham Pengendali. Dengan situasi tersebut, Dewan Komisaris diyakini mampu

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di Angkasa Pura I secara independen. Pengungkapan hubungan afiliasi tersebut di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

## Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan			Hubungan Keluarga Dengan			Hubungan Kepengurusan di Entitas Lain	
		Sesama Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Sesama Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Ya	Tidak
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Djoko Sasono	Komisaris Utama		√			√		√	
Tri Budi Satriyo	Komisaris		√			√		√	
Suprasetyo	Komisaris		√			√		√	
Harry Z. Soeratin	Komisaris		√			√		√	
Ali Mochtar Ngabalin	Komisaris		√			√		√	

## HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Angkasa Pura I memastikan anggota Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak lain yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Terkait itu, Direksi wajib mengungkapkan jika memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan

saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Pengungkapan hubungan afiliasi Direksi di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

## Hubungan Afiliasi Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi							
		Hubungan Keuangan Dengan			Hubungan Keluarga Dengan			Hubungan Kepengurusan di Entitas Lain	
		Dewan Komisaris	Sesama Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Sesama Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Ya	Tidak
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Faik Fahmi	Direktur Utama		√			√		√	
Wendo Asrul Rose	Direktur Operasi		√			√		√	
Novrihandri	Direktur Keuangan		√			√		√	
Adi Nugroho	Direktur SDM dan Umum		√			√		√	
Lukman F. Laisa	Direktur Teknik		√			√		√	
Devy Suradji	Direktur Pemasaran dan Pelayanan		√			√		√	
Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Direktur Pengembangan Usaha		√			√		√	

## Dewan Pengawas Syariah

PT Angkasa Pura I (Persero) merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di industri jasa kebandarudaraan dan tidak memiliki kegiatan usaha pembiayaan syariah. Oleh karena itu, PT Angkasa Pura I (Persero) tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah. Sejalan dengan hal tersebut,

Laporan Tahunan ini tidak menyajikan informasi mengenai nama anggota Dewan Pengawas Syariah dan tugas dan tanggung jawabnya, serta frekuensi Dewan Pengawas Syariah dalam memberikan nasihat dan sarat terkait prinsip syariah kepada jajaran manajemen.

## Sekretaris Dewan Komisaris

### PROFIL DAN RIWAYAT HIDUP SINGKAT SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS



**M. Rosyid Ariansyah**  
Sekretaris Dewan Komisaris

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Depok

**Usia/Umur dan Tanggal Lahir:**  
37 tahun, lahir di Klaten, 2 Agustus 1982.

#### Dasar Pengangkatan:

M. Rosyid Ariansyah diangkat menjadi Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-06/DK.AP.I/2019 tanggal 1 November 2019.

#### Riwayat Pendidikan:

- Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia, 2007.

#### Riwayat Pekerjaan:

- Kasubbag Tata Kelola Administrasi dan Keuangan, Kementerian BUMN .
- Sekretaris Dewan Komisaris, PT Reasuransi Internasional Indonesia.

### REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris di tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Mempersiapkan 12 rapat internal dan 12 kali rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta menyiapkan materi rapat.
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Mengadministrasikan dokumen-dokumen Dewan Komisaris, antara lain surat masuk maupun surat keluar, serta risalah rapat maupun dokumen lainnya.
4. Menyusun program rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris tahun 2019.
5. Menyusun laporan-laporan Dewan Komisaris tahun 2019.
6. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip GCG.
7. Menjadwalkan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke cabang-cabang Perusahaan.
8. Menyiapkan, mengendalikn, mengkoordinir dan melaporkan kegiatan Dewan Komisaris.

# Komite Audit

Angkasa Pura I memiliki Komite Audit yang membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi kinerja Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi. Komposisi Komite Audit terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua yang berasal dari anggota Dewan Komisaris, dan 2 (dua)

anggota dari luar Perusahaan yang tidak memiliki kaitan dengan manajemen, kepemilikan saham, maupun kegiatan usaha Perusahaan. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.

## DASAR PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Komite Audit Angkasa Pura I dibentuk atas dasar peraturan-peraturan berikut:

1. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
2. Peraturan Menteri BUMN N. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit pada BUMN
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris

## PIAGAM KOMITE AUDIT

Piagam Komite Audit Angkasa Pura I merupakan pedoman bagi Komite Audit yang disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Direksi No KEP.51.I/FG.01/2017 tahun 2017 tentang Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*). Dengan adanya Piagam Audit, maka Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara terarah, efektif dan efisien.

Piagam tersebut berisi ketentuan yang harus dipatuhi dalam perumusan dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit agar dapat bekerja secara independen, obyektif, mandiri, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Piagam Komite Audit juga mengatur tentang penyusunan dan penetapan rencana kerja serta penganggaran kegiatan Komite Audit setiap tahunnya.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Sesuai dalam Piagam Komite Audit, tugas Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern serta efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris serta tugas-tugas Komisaris lainnya

Komite Audit memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan. Seluruh kinerja Komite Audit dipertanggungjawabkan langsung kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan berkala (triwulanan dan tahunan) serta mempertanggungjawabkan tugas khusus dalam laporan pelaksanaan tugas.



## WEWENANG KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang tertentu, antara lain wewenang untuk mendapatkan informasi lengkap tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perusahaan. Selain itu, Komite Audit juga berwenang untuk meminta bantuan tenaga

ahli dan/atau konsultan dalam rangka melengkapi kebutuhan Komite Audit untuk melaksanakan tugasnya. Komite Audit dapat bekerja sama dengan Internal Audit untuk memperoleh informasi-infromasi yang dibutuhkan.

## STRUKTUR, KEANGGOTAAN, DAN KEAHLIAN KOMITE AUDIT

Hingga 31 Desember 2019, Komite Audit Angkasa Pura I terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang keduanya berasal dari Dewan Komisaris, serta 3 (tiga) orang anggota, masing-masing memiliki kualifikasi pendidikan

dan keahlian di bidang audit dan/atau akuntansi keuangan.

Secara rinci, susunan keanggotaan Komite Audit dapat dilihat pada tabel berikut.




Keanggotaan Komite Audit PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Bidang Keahlian
Ketua Komite Audit	Anandy Wati	Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-03/DK.AP.I/2018, Tanggal 31 Juli 2018*)	Bidang Komersial dan Pengembangan Usaha
	Harry Z. Soeratin	Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-04/DK.AP.I/2019, Tanggal 07 April 2019	Teknik Kebandarudaraan
Wakil Ketua Komite Audit	Harry Z. Soeratin	Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-03/DK.AP.I/2018, Tanggal 31 Juli 2018	Teknik Kebandarudaraan
	Djoko Sasono	Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-04/DK.AP.I/2019, Tanggal 07 April 2019 Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-03/DK.AP.I/2018, Tanggal 31 Juli 2018	Teknik Transportasi
Anggota Komite Audit	Syaiful	Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-06/DK.AP.I/2018, Tanggal 14 September 2018	Akuntansi, Audit
Anggota Komite Audit	Agus Waluyo	Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-07/DK.AP.I/2018, Tanggal 28 September 2018	Akuntansi, Audit
	Suka Edi Prasetyo	Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-05/DK.AP.I/2019, Tanggal 01 Juli 2019	Akuntansi, Audit

\*) Ibu Anandy Wati selaku Ketua Komite Audit berakhir 7 April 2019 dan digantikan Bapak Harry Z. Soeratin.

## PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT

### Profil dan Kualifikasi Komite Risiko Usaha dan *Good Corporate Governance*

Jabatan	Nama
 <p><b>Anandy Wati</b> Ketua (Periode 1 Januari - 7 April 2019)</p>	<p>Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta</p> <p>Usia/Umur dan Tanggal Lahir: 60 tahun, lahir di Semarang, 4 Desember 1959</p> <p>Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-03/DK.AP.I/2018, Tanggal 31 Juli 2018</p> <p>Riwayat Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta (1983)</li> <li>· Master of Public Management, Amerika Serikat (1991)</li> </ul> <p>Riwayat Pekerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Komisaris PT Angkasa Pura Airports (2014)</li> <li>· Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (2013)</li> <li>· Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan (2010)</li> <li>· Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan (2009)</li> </ul>
 <p><b>Harry Z. Soeratin</b> Ketua (Periode 7 April 2019 - sekarang)</p>	<p>Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada halaman 70 dalam Laporan Tahunan ini</p>
 <p><b>Djoko Sasono</b> Wakil Ketua (Periode 7 April 2019 - sekarang)</p>	<p>Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada halaman 69 dalam Laporan Tahunan ini</p>

Profil dan Kualifikasi Komite Risiko Usaha dan *Good Corporate Governance*

Jabatan	Nama
 <p data-bbox="194 891 292 947"><b>Syaiful</b> Anggota</p>	<p data-bbox="528 495 1031 521">Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta</p> <p data-bbox="528 548 850 600">Usia/Umur dan Tanggal Lahir: 59 tahun, lahir 15 Agustus 1958</p> <p data-bbox="528 629 1334 703">Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-06/DK.AP.I/2018, Tanggal 14 September 2018</p> <p data-bbox="528 732 1378 813">Riwayat Pendidikan:</p> <ul data-bbox="528 763 1378 813" style="list-style-type: none"> <li>• D3 dengan gelar Ajun Akuntan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1984) D4 dengan gelar Akuntan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1989)</li> </ul> <p data-bbox="528 842 1386 969">Riwayat Pekerjaan:</p> <ul data-bbox="528 869 1386 969" style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko pada berbagai BUMN (sekarang)</li> <li>• Konsultan bidang Akuntansi dan Keuangan (2002 - sekarang)</li> <li>• Kanton Akuntan Publik Dani Sudarsono dan Rekan (2001-2003)</li> </ul>
 <p data-bbox="194 1420 341 1476"><b>Agus Waluyo</b> Anggota</p>	<p data-bbox="528 999 1031 1025">Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta</p> <p data-bbox="528 1052 858 1104">Usia/Umur dan Tanggal Lahir: 46 tahun, lahir 23 Agustus 1973</p> <p data-bbox="528 1133 1437 1209">Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-07/DK.AP.I/2018, Tanggal 28 September 2018</p> <p data-bbox="528 1238 1437 1344">Riwayat Pendidikan:</p> <ul data-bbox="528 1265 1437 1344" style="list-style-type: none"> <li>• D3, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1994)</li> <li>• Sarjana Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaham Yogyakarta (2009)</li> </ul> <p data-bbox="528 1373 1437 1552">Riwayat Pekerjaan:</p> <ul data-bbox="528 1400 1437 1552" style="list-style-type: none"> <li>• Auditor Muda, Inspektorat Kementerian BUMN (2015 - sekarang)</li> <li>• Auditor, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur (2011 - 2015)</li> <li>• Auditor, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan DI Yogyakarta (1999 - 2011)</li> <li>• Auditor, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Provinsi Sumsel (1994 - 1997)</li> </ul>
 <p data-bbox="194 1921 392 1977"><b>Suka Edi Prasetyo</b> Anggota</p>	<p data-bbox="528 1581 1031 1608">Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta</p> <p data-bbox="528 1635 1345 1662">Usia/Umur dan Tanggal Lahir: 34 tahun, lahir di Tulungagung 1 Januari 1985</p> <p data-bbox="528 1688 1410 1740">Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-05/DK.AP.I/2019, Tanggal 1 Juli 2019</p> <p data-bbox="528 1769 1067 1850">Riwayat Pendidikan:</p> <ul data-bbox="528 1796 1067 1850" style="list-style-type: none"> <li>• D3, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2006)</li> <li>• Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia (2009)</li> </ul> <p data-bbox="528 1879 1126 1930">Riwayat Pekerjaan: Kepala Sub Bidang Jasa Keuangan, Kementerian BUMN</p>

## PELATIHAN KOMITE AUDIT

Uraian pelatihan bagi Komite Audit sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada halaman 160, bagian Pendidikan dan Pelatihan Manajemen pada laporan ini.

## INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Komite Audit wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman/*charter* Komite Audit. Angkasa Pura I selalu memastikan Komite Audit tidak dapat dipengaruhi oleh hubungan/keterkaitan yang dimiliki oleh anggota Komite Audit dengan Pemegang Saham,

Dewan Komisaris, Direksi, maupun Perusahaan agar tidak terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*). Rincian independensi Komite Audit diungkapkan pada tabel berikut.

Independensi Komite Audit PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali Tahun 2019

Nama	Jabatan	Hubungan dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali			
		Hubungan Keuangan	Hubungan Keluarga	Hubungan Kepengurusan	Hubungan Kepemilikan Saham
Harry Z. Soeratin	Ketua Komite Audit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Djoko Sasono	Wakil Ketua Komite Audit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Agus Waluyo	Anggota Komite Audit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Syaiful	Anggota Komite Audit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Suka Edi Prasetyo	Anggota Komite Audit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Independensi Komite Audit PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Dewan Komisaris Tahun 2019

Nama	Jabatan	Hubungan dengan Dewan Komisaris			
		Hubungan Keuangan	Hubungan Keluarga	Hubungan Kepengurusan	Hubungan Kepemilikan Saham
Harry Z. Soeratin	Ketua Komite Audit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Djoko Sasono	Wakil Ketua Komite Audit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Agus Waluyo	Anggota Komite Audit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Syaiful	Anggota Komite Audit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Suka Edi Prasetyo	Anggota Komite Audit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## Independensi Komite Audit PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Direksi Tahun 2019

Nama	Jabatan	Hubungan dengan Direksi			
		Hubungan Keuangan	Hubungan Keluarga	Hubungan Kepengurusan	Hubungan Kepemilikan Saham
Harry Z. Soeratin	Ketua Komite Audit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Djoko Sasono	Wakil Ketua Komite Audit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Agus Waluyo	Anggota Komite Audit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Syaiful	Anggota Komite Audit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Suka Edi Prasetyo	Anggota Komite Audit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## Independensi Komite Audit PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Sesama Anggota Komite Audit Tahun 2019

Nama	Jabatan	Hubungan dengan Sesama Anggota Komite Audit			
		Hubungan Keuangan	Hubungan Keluarga	Hubungan Kepengurusan	Hubungan Kepemilikan Saham
Harry Z. Soeratin	Ketua Komite Audit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Djoko Sasono	Wakil Ketua Komite Audit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Agus Waluyo	Anggota Komite Audit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Syaiful	Anggota Komite Audit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Suka Edi Prasetyo	Anggota Komite Audit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## RAPAT KOMITE AUDIT

Setiap tahunnya, Komite Audit melakukan pertemuan berkala, yang terdiri dari Rapat Internal dan Rapat Gabungan dengan Internal Audit. Penyelenggaraan rapat diselenggarakan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan rencana kerja dan pelaksanaannya, perkembangan Perseroan, pengendalian internal, tindak lanjut temuan hasil audit, dan hal terkait

lainnya. Hasil pembahasan dalam rapat tersebut penting sebagai sumber informasi dan rujukan dalam memberi saran kepada Dewan Komisaris.

## AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Realisasi pelaksanaan agenda rapat Komite Audit sepanjang tahun 2019 disajikan secara rinci pada tabel berikut.

## Pelaksanaan Agenda Rapat Komite Audit Tahun 2019

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
1	23 Januari 2019	Pembahasan RJPP Tahun 2019-2023 PT Angkasa Pura I (Persero)	1. Harry Z. Soeratin 2. Anandy Wati 3. Syaiful 4. Agus Waluyo
2	31 Januari 2019	1. Pembahasan Progres RJPP Tahun 2019-2023 PT Angkasa Pura I (Persero) 2. Pembahasan perkembangan Proyek Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo	1. Djoko Sasono 2. Anandy Wati 3. Syaiful 4. Agus Waluyo

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
3	12 Februari 2019	Pembahasan Tindaklanjut KAP Tahun 2018 Angkasa Pura I	1. Djoko Sasono 2. Anandy Wati 3. Harry Z. Soeratin 4. Agus Waluyo 5. Syaiful
4	26 Maret 2019	1. Pembahasan <i>update</i> perkembangan persiapan pengoperasian Bandara Internasional Yogyakarta 2. Pembahasan Rencana Holding BUMN (Transportasi Udara) 3. Pembahasan Evaluasi Hasil Tindaklanjut GCG Angkasa Pura I	1. Djoko Sasono 2. Anandy Wati 3. Harry Z. Soeratin 4. Agus Waluyo 5. Syaiful
5	24 April 2019	1. Pembahasan perkembangan Proyek Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo 2. Pembahasan Evaluasi Hasil Tindaklanjut GCG Angkasa Pura I	1. Djoko Sasono 2. Harry Z. Soeratin 3. Agus Waluyo 4. Syaiful
6	16 Mei 2019	1. Persiapan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun 2018 Angkasa Pura I 2. Persiapan posko <i>monitoring</i> Angkutan Lebaran; 3. Progres Proyek Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo;	1. Djoko Sasono 2. Harry Z. Soeratin 3. Agus Waluyo 4. Syaiful
7	27 Juni 2019	1. Pembahasan kinerja triwulan I dan s.d Mei 2019 2. Pembahasan usulan SOP kerja sama strategis 3. Pembahasan kerja sama penguat sinyal	1. Djoko Sasono 2. Harry Z. Soeratin 3. Syaiful 4. Suka Edi Prasetyo
8	29 Juli 2019	1. Pembahasan Kerja Sama Strategis Pengembangan dan Pengelolaan Bandara Lombok 2. Pembahasan Realisasi Kinerja s.d Juni 2019 3. Pembahasan Usulan Revisi RKAP 2019	1. Djoko Sasono 2. Harry Z. Soeratin 3. Syaiful 4. Suka Edi Prasetyo
9	27 Agustus 2019	1. Pembahasan Revisi RKAP Tahun 2019 Angkasa Pura I 2. Pembahasan Rencana Kontrak Perjanjian Kerja Sama 5 Tahun di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin 3. Pembahasan Rencana Kontrak Perjanjian Kerja Sama 5 Tahun di Bandara Juanda Surabaya	1. Djoko Sasono 2. Harry Z. Soeratin 3. Syaiful 4. Suka Edi Prasetyo
10	30 September 2019	1. Pembahasan Rencana Operasional Bandara Syamsudin Noor, Bandara Internasional Yogyakarta, dan Kereta Bandara Adi Soemarmo Solo 2. Pembahasan rencana <i>holding</i> transportasi udara	1. Djoko Sasono 2. Harry Z. Soeratin 3. Syaiful 4. Suka Edi Prasetyo
11	22 Oktober 2019	1. Pembahasan Usulan Revisi RKAP Investasi Tahun 2019 Angkasa Pura I 2. Pembahasan Persetujuan Kerja Sama dengan Jangka Waktu 5 (lima) Tahun di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan. 3. Pembahasan Persetujuan Kerja Sama dengan Jangka Waktu 5 (lima) Tahun di Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo 4. Permohonan Tanggapan atas Kerja Sama <i>Build Operate Transfer</i> (BOT) Hotel di Terminal Baru Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin 5. Permohonan Persetujuan Kerja Sama Pembangunan & Pengusahaan Hotel di Terminal Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo	1. Djoko Sasono 2. Harry Z. Soeratin 3. Syaiful 4. Suka Edi Prasetyo
12	31 Oktober 2019	1. Pembahasan Perkembangan Persiapan Pengoperasian Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo 2. Rapat pembahasan usulan RKAP Tahun 2020 Angkasa Pura I	1. Djoko Sasono 2. Harry Z. Soeratin 3. Syaiful 4. Suka Edi Prasetyo

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
13	5 – 6 November 2019	Pembahasan Usulan RKAP Tahun 2020	1. Harry Z. Soeratin 2. Syaiful 3. Suka Edi Prasetyo
14	27 November 2019	1. Pembahasan Usulan RKAP Tahun 2020 PT Angkasa Pura I (Persero) 2. Pembahasan Pedoman Kerja Sama Mitra Strategis	1. Djoko Sasono 2. Harry Soeratin 3. Syaiful 4. Suka Edi Prasetyo
15	5 Desember 2019	Pebahasan Usulan RKAP Tahun 2020 PT Angkasa Pura I (Persero)	1. Harry Z. Soeratin 2. Syaiful 3. Suka Edi Prasetyo
16	10 Desember 2019	1. Pembahasan Perubahan Anggaran Dasar PT Angkasa Pura I (Persero) 2. Pembahasan Pemilihan Lembaga PPIP 3. Pembahasan Pedoman Kerja Sama Mitra Strategis 4. Pembahasan Pengelolaan Layanan Penguat Sinyal oleh PT APS 5. Pembahasan Capsule Hotel di Bandara I Gusti NGurah Rai - Bali 6. Pembahasan Pembangunan dan Pengelolaan Airport Hotel di YIA 7. Pembahasan Penyertaan Modal Kepada Anak Perusahaan 8. Pembahasan Hasil Audit BPK	1. Djoko Susono 2. Harry Z. Soeratin 3. Syaiful 4. Suka Edi Prasetyo
17	20 Desember 2019	Pemaparan Hasil Audit Interim	1. Harry Z. Soeratin 2. Syaiful 3. Suka Edi Prasetyo

#### Agenda Rapat Koordinasi Komite Audit dengan Satuan Pengawas Internal PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
1	16 Januari 2019	Rekonsiliasi final saldo transaksi <i>intercompany</i>	Hotel Grand Orchardz Kemayoran
2	15 Mei 2019	<i>Focus Group Discussion</i> Peran Audit Internal dalam Pencegahan melalui Sistem Pengendalian Internal, Investigasi, dan Pengawasan Internal Berbasis Risiko	Hotel Holiday Inn Kemayoran
3	15 Juli 2019	Sosialisasi <i>Fraud Control Plan</i> dan <i>Fraud Risk Management</i> serta penandatanganan MoU bersama BPKP	Gedung Serbaguna - Angkasa Pura I
4	17 Juli 2019	Pembahasan TOR Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2019	Ruang Rapat Juanda - Angkasa Pura I
5	4 Oktober 2019	Penjelasan Pekerjaan ( <i>aanwijzing</i> ) Jasa Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Angkasa Pura I Tahun Buku 2019	Rapat Internal Procurement - Angkasa Pura I

#### FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Selama tahun 2019, Komite Audit telah melaksanakan 17 kali rapat yang dihadiri oleh anggota Komite Audit beserta undangan.

Frekuensi kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat Komite Audit sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut.



## Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Presentase
Anandy Wati	Ketua (Januari-April)	4	4	100%
Harry Z. Soeratin	Ketua (April-Desember) Wakil Ketua	17	16	94,12%
Djoko Sasono	Wakil Ketua	17	13	76,47%
Syaiful	Anggota	17	17	100%
Agus Waluyo	Anggota (Januari-Juni)	6	6	100%
Suka Edi Prasetyo	Anggota (Juni-Desember)	11	11	100%

## REALISASI KEGIATAN KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2019, Komite Audit telah melaksanakan agenda kegiatan, antara lain sebagai berikut :

### a). Program penilaian pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan SPI

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu:

- 1). Evaluasi pelaksanaan dan hasil audit, melalui pengamatan pelaksanaan audit lapangan, dilakukan secara *sampling*.
- 2). Monitoring tindak lanjut temuan audit, melalui rapat-rapat rutin yang dilaksanakan secara triwulanan.

### b). Program penilaian pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan auditor eksternal

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- 1). Melakukan proses penunjukan KAP. Telah dilakukan proses penunjukan KAP yang melakukan audit atas laporan keuangan Tahun 2018, melalui proses pelelangan/*beauty contest*. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan KAK, RAB, dan Spesifikasi Teknis Calon KAP, bekerja sama dengan SPI dan Unit Procurement melakukan proses pelelangan KAP dari proses pengumuman sampai usulan pemenang.
- 2). Evaluasi perencanaan audit, dilaksanakan melalui:
  - *Kick off/entry meeting*, yaitu tentang perencanaan interim audit.

- Rapat *monitoring progress* audit, yang dilakukan sekaligus dalam rangka menetapkan perencanaan audit lanjutan.

### 3). Evaluasi pelaksanaan dan hasil audit, telah dilakukan melalui:

- Pendampingan/Monitoring Pelaksanaan audit KAP di lapangan/cabang (*sampling*).
- Rapat *monitoring progress* audit,
- Rapat pembahasan draft laporan hasil audit, dan
- *Exit meeting* dalam rangka penyelesaian pelaksanaan audit.

### c). Program pemberian rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian intern & pelaksanaannya

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu:

- 1). Evaluasi Pelaksanaan Proyek Pengembangan Bandara, meliputi:
  - Proyek Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang,
  - Proyek Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin,
  - Proyek Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo
- 2). Evaluasi Prosedur Pengadaan Barang & Jasa
- 3). Evaluasi Optimalisasi Pemanfaatan Aset
- 4). Evaluasi Cabang Bandara yang mengalami kerugian

Kegiatan ini dilakukan melalui; penelitian terhadap dokumen dan observasi/ peninjauan lapangan.

**d). Program penilaian prosedur evaluasi terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan**

1). Evaluasi Laporan Manajemen Triwulanan & Tahunan.

2). Evaluasi Laporan Manajemen Lainnya.  
Kegiatan ini telah dilakukan melalui penelitian tentang hubungan logis antar data dalam laporan dan konfirmasi kepada manajemen/penanggung jawab kebenaran data.

**e). Program identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris**

Dilakukan sesuai arahan dari Dewan Komisaris atau berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, meliputi dari internal dan eksternal Angkasa Pura I, termasuk media massa (cetak dan elektronik).

**f). Program penyusunan rencana kerja dan anggaran Komite Audit**

Telah dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKAP PT Angkasa Pura I (Persero).

**g). Program rapat internal, minimal satu kali dalam satu bulan**

Selama tahun 2019 telah dilaksanakan Rapat Komite Audit kurang lebih sebanyak 17 kali, meliputi rapat internal Dewan Komisaris, rapat dengan Direksi maupun mengundang atau menghadiri undangan SPI dan/atau para Kepala (Group Head/Head) di lingkungan Angkasa Pura I.

**h). Program penyusunan laporan triwulanan dan tahunan**

Telah dibuat setelah suatu triwulan atau tahun berakhir.

**i). Program penyusunan laporan setiap pelaksanaan tugas**

Telah dilaksanakan segera setelah selesainya setiap penugasan.

**j). Program Pengembangan Profesi**

Selama Tahun 2019 Komite Audit telah mengikuti 4 (empat) kali pengembangan profesi berupa :

- *Workshop* Pemahaman PSAK 71, 72 dan 73 yang diselenggarakan oleh Indonesia of Audit Committee pada tanggal 25-26 Juli 2019 di Jakarta.
- *Workshop* CACP – *Certification in Audit Committee Practice* yang diselenggarakan oleh Indonesia Institute of Audit Committee pada tanggal 06-08 Agustus 2019 di Jakarta.
- Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VII- 2019 dengan tema "*Growth Sustainability and Risk Issue in Global Competition*" tanggal 28-29 November 2019.
- *Certified Risk Governance Professional ISO 31000 7 COSO*

## Komite Risiko Usaha dan Good Corporate Governance

Di Angkasa Pura I, terdapat Komite Usaha dan Good Corporate Governance (GCG) yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya mengawasi kebijakan Direksi terkait pengelolaan risiko, potensi risiko usaha, serta GCG. Anggota Komite Risiko Usaha dan Good Corporate

Governance diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan kemudian dilaporkan dalam RUPS. Ketua Komite Risiko Usaha dan *Good Corporate Governance* dijabat oleh seorang yang berasal dari anggota Dewan Komisaris.

## DASAR PEMBENTUKAN KOMITE RISIKO USAHA DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Komite Risiko Usaha dan *Good Corporate Governance* Angkasa Pura I dibentuk berdasarkan peraturan berikut:

- a. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
- b. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN.
- c. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris.

## PIAGAM KOMITE RISIKO USAHA DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Komite Risiko Usaha dan Good Corporate Governance (KRUG) menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan Piagam Komite Risiko dan Good Corporate Governance yang dimutakhirkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.01/DK.AP.I/2019 tanggal 02 Januari 2019.

Piagam Komite tersebut mengatur tentang pedoman untuk Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Perangkat Pendukung Dewan Komisaris Angkasa Pura I.

Piagam yang ditetapkan menjabarkan

tentang Landasan Hukum, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota, Tugas, Kewenangan, Persyaratan Keanggotaan, Tanggung Jawab, Rapat, Laporan/ Kajian, Akses Kerahasiaan Informasi, Rencana Kerja dan Anggaran, Penghasilan Anggota, Pendidikan dan Tenaga Penunjang, dan Penilaian Kinerja.

Dengan adanya *charter*/ piagam tersebut, menjadi *ground rules* bagi seluruh insan di Angkasa Pura I dalam berkoordinasi dan menindaklanjuti tugas dan fungsi Komite Risiko Usaha & GCG sebagai salah satu Perangkat Pendukung Dewan Komisaris

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE RISIKO USAHA DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Sesuai dengan pedomannya, tugas dan tanggung jawab Komite Risiko Usaha dan *Good Corporate Governance* yaitu:

(a) Tugas Pokok Terkait Risiko Usaha

1. Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan yang dilakukan oleh Unit Risk Management and Compliance, melalui pertemuan secara berkala maupun cara lainnya untuk membahas perkembangan dari tahapan-tahapan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Risk Management and Compliance Group.
2. Melakukan *review* atas penilaian risiko oleh Risk Management and Compliance Group terhadap rencana investasi Perusahaan yang material.
3. Melakukan pengawasan atas kegiatan Risk Management and Compliance Group dalam memantau pelaksanaan mitigasi risiko oleh unit-unit kerja terkait.
4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi Komite Risiko Usaha oleh Risk Management and Compliance

- Group.
5. Melakukan analisis dan evaluasi atas usulan RKAP dan *review* tahunan atas RJPP yang diajukan oleh Direksi.
  6. Melakukan penelaahan atas informasi risiko dan manajemen risiko Perusahaan dalam laporan-laporan yang akan dipublikasikan, melalui proses:
    - Diskusi bersama dengan manajemen.
    - Review atas draft dari laporan yang akan dipublikasikan.
  7. Melakukan pembahasan atas risiko-risiko penting pada unit-unit di lingkungan Perusahaan, sesuai kebutuhan.
  8. Dalam hal Direksi menganggap perlu menggunakan konsultan manajemen risiko independen untuk melakukan penelaahan kembali atas proses manajemen risiko yang telah diterapkan Perusahaan, maka tugas Komite Risiko Usaha dan GCG adalah:
    - Memberikan masukan tentang kriteria dan kompetensi konsultan.
    - Melakukan monitoring pekerjaan konsultan melalui Risk Management and Compliance Group.
- (b) Tugas Pokok Terkait *Good Corporate Governance*
1. Memastikan kelengkapan dan validitas dari *Corporate Governance Policy* (CGP), *Management Policy* (MP), dan *Standard Operating Procedure* (SOP) sesuai dengan kegiatan Perusahaan.
  2. Memastikan manajemen melaksanakan kegiatan usaha mengikuti ketentuan dalam CGP, MP, dan SOP.
  3. Memastikan pengawasan telah dilakukan terhadap penerapan CGP, MP, dan SOP.
  4. Mengevaluasi kebijakan tentang GCG dan Standar Etika serta tindak lanjut hasil penilaian yang dilakukan oleh eksternal konsultan.
  5. Melakukan penyelidikan dan verifikasi berdasarkan hasil temuan di lapangan berkaitan dengan pelanggaran etika dan pelanggaran praktik GCG yang terjadi di Perusahaan.
  6. Mengevaluasi dan melakukan penyempurnaan terhadap pedoman-pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.
  7. Memberikan nasihat, masukan, dan rekomendasi kepada Direksi mengenai standar-standar praktik terbaik penerapan GCG di Perusahaan.
  8. Membantu Direksi dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan secara berkesinambungan penerapan Etika Kerja dan Bisnis serta praktik GCG di seluruh wilayah kerja Perusahaan.
  9. Membantu tugas Direksi dalam pembinaan dan pengawasan efektivitas penerapan praktik GCG di Perusahaan sebagai upaya meningkatkan nilai Pemegang Saham, termasuk sosialisasi dan internalisasi.
  10. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan GCG oleh organ utama dan organ pendukung serta memberikan masukan penyempurnaan serta upaya-upaya pemantapannya.
  11. Menyusun mekanisme *reward and punishment* secara konsisten terkait penerapan praktik GCG di Perseroan. Selain memiliki tugas dan tanggung jawab terkait risiko usaha dan GCG, Komite Risiko Usaha dan Good Corporate Governance juga dapat diberikan tugas khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Pemberian tugas khusus kepada Komite Risiko Usaha dan GCG oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang antara lain menerangkan:
      - Nama anggota Komite Risiko Usaha dan GCG yang diberi tugas
      - Sifat dan lingkup pekerjaan
      - Tujuan dan sasaran pekerjaan
      - Waktu penugasan
      - Hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus dimaksud.

2. Tugas khusus dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan Rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan dari suatu hasil keputusan Rapat Direksi yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Komite Risiko Usaha dan Good Corporate Governance harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal secara terbatas hanya kepada anggota Komite Risiko Usaha dan *Good Corporate Governance* serta anggota Dewan Komisaris.

## STRUKTUR, KEANGGOTAAN, DAN KEAHLIAN KOMITE RISIKO USAHA DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pada tahun 2019, terdapat susunan anggota Komite Risiko Usaha & Good Corporate Governance Angkasa Pura I dengan Struktur KRUG sesuai dengan charter No. KEP.01/DK.AP.I/2019 terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Independen.

Secara rinci, susunan keanggotaan Komite Risiko Usaha & Good Corporate Governance dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Keanggotaan Komite Risiko Usaha dan *Good Corporate Governance* PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Jabatan	Nama	Dasar Pengangkatan	Bidang Keahlian
Ketua Komite Risiko Usaha dan GCG	Suprasetyo	Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-04/DK.AP.I/2018 Tanggal 31 Juli 2018	Teknik Kebandarudaraan
Wakil Ketua I Komite Risiko Usaha dan GCG	Ali Mochtar Ngabalin	Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-04/DK.AP.I/2018 Tanggal 31 Juli 2018	Ilmu Komunikasi
Wakil Ketua II Komite Risiko Usaha dan GCG	Tri Budi Satriyo	Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-04/DK.AP.I/2018 Tanggal 31 Juli 2018	Manajemen, SDM
Anggota Komite Risiko Usaha dan GCG	Riko Hendrawan	Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-08/DK.API/2018 Tanggal 01 November 2018	Keuangan
	Ganesha Dian Farisi	Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-06/DK.API/2016 Tanggal 26 Desember 2016	Ekonomi dan Risk Manajemen

## PROFIL KOMITE RISIKO USAHA DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

### Profil dan Kualifikasi Komite Risiko Usaha dan *Good Corporate Governance*

Jabatan	Nama
	<p>Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada halaman 71 dalam Laporan Tahunan ini</p>
<p><b>Suprasetyo</b> Ketua Komite Risiko Usaha dan GCG</p>	
	<p>Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada halaman 72 dalam Laporan Tahunan ini</p>
<p><b>Ali Mochtar Ngabalin</b> Wakil Ketua I Komite Risiko Usaha dan GCG</p>	
	<p>Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada halaman 73 dalam Laporan Tahunan ini</p>
<p><b>Tri Budi Satriyo</b> Wakil Ketua II Komite Risiko Usaha dan GCG</p>	

Jabatan	Nama
 <p data-bbox="156 846 526 922"><b>Ganesha Dian Farisi</b> Anggota Komite Risiko Usaha dan GCG</p>	<p data-bbox="571 443 1077 474">Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta</p> <p data-bbox="571 497 1029 555">Usia/Umur dan Tanggal Lahir: 31 tahun, lahir di Jakarta, 3 Desember 1989.</p> <p data-bbox="571 577 1324 658">Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.06/DK.API/2016 tanggal 27 Desember 2016</p> <p data-bbox="571 680 1372 792">Riwayat Pendidikan:</p> <ul data-bbox="571 712 1372 792" style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ekonomi, Universitas Padjajaran, 2012</li> <li>• Master of Business Administration, IPMI International Business School, 2015</li> </ul> <p data-bbox="571 815 1340 922">Riwayat Pekerjaan:</p> <ul data-bbox="571 846 1340 922" style="list-style-type: none"> <li>• 'Overseas Supports' and Technical Partner, KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia (2016-2018)</li> <li>• Monitoring, Evaluation, &amp; Development, Hub KSO SCISI (2012-2016),</li> </ul>
 <p data-bbox="156 1294 526 1370"><b>Riko Hendrawan</b> Anggota Komite Risiko Usaha dan GCG</p>	<p data-bbox="571 947 1117 978">Warga Negara Indonesia, berdomisili di Tangerang</p> <p data-bbox="571 1001 1021 1059">Usia/Umur dan Tanggal Lahir: 44 tahun, lahir di Tangerang, 26 April 1975.</p> <p data-bbox="571 1081 1308 1162">Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.08/DK.API/2018 tanggal 1 November 2018, yang berlaku hingga 1 November 2021</p> <p data-bbox="571 1184 1300 1350">Riwayat Pendidikan:</p> <ul data-bbox="571 1216 1300 1350" style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana, Manajemen Keuangan, Universitas Islam Jakarta, 2000</li> <li>• Master of Management in Corporate Finance, PPM-School of Management (2002)</li> <li>• Doktor Keuangan, Universitas Padjadjaran, 2008</li> <li>• Alumni Lemhannas PPRA Angkatan 53, 2015</li> </ul> <p data-bbox="571 1373 1380 1693">Riwayat Pekerjaan:</p> <ul data-bbox="571 1404 1380 1693" style="list-style-type: none"> <li>• Vice President of Business Portofolio Management Telkom Foundation (2014 – 2015)</li> <li>• Head of Finance Experts Group (2010- 2014)</li> <li>• Head of Institute of Research and Community Services, Telkom Insitute of Management (2012)</li> <li>• Head of Business Service and Training Program, Telkom Institute of Management (2010-2012)</li> <li>• Anggota Komite Risiko dan Investasi, PT POS Indonesia (2010-2012)</li> <li>• Anggota Komite Audit dan Investasi, PT POS Indonesia (2012-2014)</li> <li>• Anggota Komite Audit dan Investasi, PT PSGAS Telekomunikasi Indonesia (2011-2014)</li> </ul>

## PELATIHAN KOMITE RISIKO USAHA DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Uraian pelatihan bagi Komite Risiko Usaha dan Good Corporate Governance sepanjang tahun

2019 dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan Pelatihan Manajemen pada laporan ini.



## INDEPENDENSI KOMITE RISIKO USAHA DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Kinerja Komite Risiko Usaha dan GCG bersifat independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Angkasa Pura I memastikan sampai sejauh ini Komite Risiko Usaha dan GCG bebas dari benturan

kepentingan (*conflict of interest*) dan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif, profesional, dan independen. Rincian independensi Komite Risiko Usaha dan GCG diungkapkan pada tabel berikut.

Independensi Komite Risiko Usaha dan GCG PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali Tahun 2019

Nama	Jabatan	Hubungan dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali			
		Hubungan Keuangan	Hubungan Keluarga	Hubungan Kepengurusan	Hubungan Kepemilikan Saham
Suprasetyo	Ketua Komite Risiko Usaha dan GCG	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Ali Mochtar Ngabalin	Wakil Ketua I Komite Risiko Usaha dan GCG	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Tri Budi Satriyo	Wakil Ketua II Komite Risiko Usaha dan GCG	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Riko Hendrawan	Anggota Komite Risiko Usaha dan GCG	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Ganesha Dian Farisi	Anggota Komite Risiko Usaha dan GCG	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Independensi Komite Risiko Usaha dan GCG PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Dewan Komisaris Tahun 2019

Nama	Jabatan	Hubungan dengan Dewan Komisaris			
		Hubungan Keuangan	Hubungan Keluarga	Hubungan Kepengurusan	Hubungan Kepemilikan Saham
Suprasetyo	Ketua Komite Risiko Usaha dan GCG	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Ali Mochtar Ngabalin	Wakil Ketua I Komite Risiko Usaha dan GCG	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Tri Budi Satriyo	Wakil Ketua II Komite Risiko Usaha dan GCG	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Riko Hendrawan	Anggota Komite Risiko Usaha dan GCG	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Ganesha Dian Farisi	Anggota Komite Risiko Usaha dan GCG	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## Independensi Komite Risiko Usaha dan GCG PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Direksi Tahun 2019

Nama	Jabatan	Hubungan dengan Direksi			
		Hubungan Keuangan	Hubungan Keluarga	Hubungan Kepengurusan	Hubungan Kepemilikan Saham
Suprasetyo	Ketua Komite Risiko Usaha dan GCG	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Ali Mochtar Ngabalin	Wakil Ketua I Komite Risiko Usaha dan GCG	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Tri Budi Satriyo	Wakil Ketua II Komite Risiko Usaha dan GCG	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Riko Hendrawan	Anggota Komite Risiko Usaha dan GCG	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Ganesha Dian Farisi	Anggota Komite Risiko Usaha dan GCG	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## Independensi Komite Risiko Usaha dan GCG PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Sesama Anggota Komite Audit Tahun 2019

Nama	Jabatan	Hubungan dengan Sesama Anggota Komite Risiko Usaha dan GCG			
		Hubungan Keuangan	Hubungan Keluarga	Hubungan Kepengurusan	Hubungan Kepemilikan Saham
Suprasetyo	Ketua Komite Risiko Usaha dan GCG	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Ali Mochtar Ngabalin	Wakil Ketua I Komite Risiko Usaha dan GCG	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Tri Budi Satriyo	Wakil Ketua II Komite Risiko Usaha dan GCG	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Riko Hendrawan	Anggota Komite Risiko Usaha dan GCG	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Ganesha Dian Farisi	Anggota Komite Risiko Usaha dan GCG	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## RAPAT KOMITE RISIKO USAHA DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, setiap tahun Komite Risiko Usaha dan GCG melaksanakan rapat secara berkala. Tujuan rapat yaitu untuk membahas status kinerja komite dan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan risiko usaha dan tata kelola.

## AGENDA RAPAT KOMITE RISIKO USAHA DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pada tahun 2019, Komite Risiko Usaha dan Good Corporate Governance telah merealisasikan agenda rapat sebagai berikut.

Agenda Rapat Komite Risiko Usaha dan *Good Corporate Governance* PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

No	Jabatan	Hubungan dengan Dewan Komisaris
1.	4 Januari 2019	Permohonan Dukungan Penerbitan Izin Reklamasi Pada Pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali
2.	4 Januari 2019	Permohonan Pengesahaan Dokumen GCG
3.	16 Januari 2019	Permohonan Izin Kerja Sama Usaha Pengelolaan Penguat Sinyal Selama 5 (Lima) Tahun Kepada PT Angkasa Pura Suport
4.	17 Januari 2019	Dukungan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara (BMN) Bandara Sentani Jayapura
5.	23 Januari 2019	Data Dukung Penyelesaian Klaim Asuransi Atas Bangunan Terminal Lama Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
6.	-	Pengelolaan Pencapaian RKA Tahun 2019 Terkait dengan Risk Events pada Shifting Pilihan Moda Transportasi Melalui Tol Trans Jawa, serta Kondisi Threat dalam Pengelolaan Bandara Angkasa Pura I
7.	01 April 2019	Penyampaian Kelengkapan Dokumen Terkait Proses Seleksi Calon Mitra Usaha Pengelolaan Reklame di Terminal Baru Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang
8.	26 Februari 2019	Penawaran Kerja Sama Pembangunan Bandara Baru di Bali Utara
9.	12 Maret 2019	Penyampaian Perbaikan Dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Angkasa Pura I Tahun 2019-2023
10.	24 April 2019	Imbauan Pengendalian Penggunaan Anggaran di Lingkungan Angkasa Pura I
11.	06 Mei 2019	Laporan Capaian KPI PT Angkasa Pura I (Persero) Triwulan I Tahun 2019
12.	13 Mei 2019	Penyampaian Draft Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ( <i>Board Manual</i> )
13.	13 Mei 2019	Permohonan Persetujuan Kerja Sama dengan Jangka Waktu 5 Tahun di Bandara Juanda - Surabaya
14.	14 Mei 2019	Permohonan Persetujuan Pedoman Tata Kerja Seleksi Mitra Strategis dalam rangka Kerja Sama Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura I (Persero)
15.	16 Mei 2019	Penyampaian Dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan Angkasa Pura I Tahun 2019 - 2023
16.	14 Juni 2019	Laporan Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian atas Putusan Arbitrase (Sengketa Hotel Transit di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan)
17.	18 Juni 2019	Pedoman Kegiatan Commercial Strategic Business Unit (SBU) di Bandara I Gusti Ngurah Rai - Bali
18.	25 Juni 2019	Tanggapan Pemastian Aspek Legal dan GCG terkait Pengelolaan Penguat Sinyal PT Angkasa Pura Suport
19.	28 Juni 2019	Permohonan Tanggapan atas Tindak Lanjut Pembayaran Konsesi
20.	01 Juli 2019	Pengajuan Konsep Keputusan Direksi Angkasa Pura I tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang Bandara Sentani Jayapura
21.	19 Juli 2019	Permohonan Tanggapan Tertulis atas Rencana Kerja Sama Strategis Pengembangan dan Pengelolaan Bandara Internasional Lombok
22.	29 Juli 2019	Penyampaian Laporan Manajemen dan <i>Dashboard</i> Kinerja Manajemen Semester I Tahun 2019 Angkasa Pura I
23.	01 Agustus 2019	Permohonan persetujuan kerja sama dengan jangka waktu 5 (lima) tahun seleksi mitra usaha tahap II di Bandara Juanda Surabaya
24.	13 Agustus 2019	Permohonan Revisi RKAP Tahun 2019 Angkasa Pura I

Agenda Rapat Komite Risiko Usaha dan *Good Corporate Governance* PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

No	Jabatan	Hubungan dengan Dewan Komisaris
25.	21 Agustus 2019	Permohonan persetujuan kerja sama dengan jangka waktu 5 (lima) tahun di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin
26.	26 Agustus 2019	Permohonan persetujuan kerja sama dengan Jangka Waktu 5 (lima) Tahun di Bandara SAMS Sepinggang Balikpapan
27.	26 Agustus 2019	Permohonan persetujuan kerja sama dengan Jangka Waktu 5 (lima) Tahun di Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo
28.	25 September 2019	Permohonan Tanggapan atas Kerja Sama <i>Build Operate Transfer</i> (BOT) Hotel di Terminal Baru Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin
29.	4 Oktober 2019	Permohonan persetujuan kerja sama Pembangunan dan Pengusahaan Hotel di Terminal Bandar Internasional Yogyakarta Kulon Progo
30.	23 Oktober 2019	Penyampaian Laporan Manajemen dan <i>Dashboard</i> Kinerja Manajemen Triwulan III Tahun 2019 PT Angkasa Pura I (Persero)

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE RISIKO USAHA DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Sepanjang tahun 2019, Komite Risiko Usaha dan Good Corporate Governance telah melaksanakan 35 kali rapat yang dihadiri oleh anggota dan para undangan. Frekuensi kehadiran anggota Komite dalam rapat sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada berikut.

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Risiko Usaha dan *Good Corporate Governance* PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Presentase
Suprasetyo	Ketua Komite Risiko Usaha dan GCG	30	30	100%
Ali Mochtar Ngabalin	Wakil Ketua Komite Risiko Usaha dan GCG	30	30	100%
Tri Budi Satriyo	Wakil Ketua Komite Risiko Usaha dan GCG	30	30	100%
Riko Hendrawan	Anggota Komite Risiko Usaha dan GCG	30	30	100%
Ganesha Dian Farisi	Anggota Komite Risiko Usaha dan GCG	30	30	100%

REALISASI KEGIATAN KOMITE RISIKO USAHA DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Komite Risiko Usaha dan Good Corporate Governance telah melaksanakan agenda kegiatan tahun 2019 sejalan dengan yang tercantum dalam Piagam Komite Risiko Usaha dan Good Corporate Governance. Realisasi kegiatan tersebut yaitu:

Agenda Rapat Komite Risiko Usaha dan *Good Corporate Governance* PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

## Januari 2019

No.	Waktu	Deskripsi	Cabang / Unit Terkait
1.	07-08 Januari 2019	Pendampingan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018	-
2.	24-25 Januari 2019	Pemantauan Profil Pengelolaan Risiko terhadap Aset Bandara dan Pemantauan Persiapan Mitigasi Terkait dengan <i>Shifting</i> Moda Transportasi Tol Trans-Jawa	Cabang Surabaya (SUB)
3.	30 Januari 2019	Pemantauan Profil Pengelolaan Risiko terhadap Aset Bandara dan Pemantauan Persiapan Mitigasi Terkait dengan <i>Shifting</i> Moda Transportasi Tol Trans-Jawa	Cabang Semarang (SRG)

## Februari 2019

No.	Waktu	Deskripsi	Cabang / Unit Terkait
1.	05-06 Februari 2019	Pemantauan Profil Pengelolaan Risiko terhadap Aset Bandara dan Pemantauan Persiapan Mitigasi Terkait dengan <i>Shifting</i> Moda Transportasi Tol Trans-Jawa	Cabang Solo (SOC)
2.	07-08 Februari 2019	Pemantauan Profil Pengelolaan Risiko terhadap Aset Bandara dan Pemantauan Persiapan Mitigasi Terkait dengan <i>Shifting</i> Moda Transportasi Tol Trans-Jawa	Cabang Yogyakarta (JOG)
3.	15-16 Februari 2019	Pemantauan Profil Pengelolaan Risiko terhadap Aset Bandara	Cabang Bali (DPS)

## Maret 2019

No.	Waktu	Deskripsi	Cabang / Unit Terkait
1.	02-03 Maret 2019	Pemantauan Progress Integrasi Terminal dengan Kereta Cepat Solo	Cabang Solo (SOC)
2.	13-14 Maret 2019	Undangan Latihan PKD ke-102	Cabang Makassar (UPG)
3.	18-19 Maret 2019	Pembahasan Profil Risiko Kantor Cabang, serta penyusunan Taksonomi Risiko	Cabang Bali (DPS)

## April 2019

No.	Waktu	Deskripsi	Cabang / Unit Terkait
1.	01-02 April 2019	Pemantauan Realisasi PKBL di Surabaya	Cabang Surabaya (SUB)
2.	08-09 April 2019	Pemantauan Profil Risiko Cabang, dan Pelatihan Keadaan Darurat	Cabang Solo (SOC)
3.	10-12 April 2019	Pemantauan Profil Risiko Cabang, dan Pelatihan Keadaan Darurat	Cabang Semarang (SRG)

Agenda Rapat Komite Risiko Usaha dan *Good Corporate Governance* PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

## Mei 2018

No.	Waktu	Deskripsi	Cabang / Unit Terkait
1.	24 Mei 2019	Uji <i>Spot Sampling</i> Pengelolaan IBCS di Terminal Bandara	Cabang Balikpapan (BPN)
2.	25 Mei 2019	Uji <i>Spot Sampling</i> Pengelolaan IBCS di Terminal Bandara	Cabang Bali (DPS)
3.	27 Mei 2019	Seleksi Mitra Usaha Terminal 1 di Bandara	Cabang Surabaya (SUB)
4.	28 Mei 2019	Peninjauan Kerja Sama Reklame di Terminal Bandara	Cabang Semarang (SRG)

## Juni 2019

No.	Waktu	Deskripsi	Cabang / Unit Terkait
1.	24-25 Juni 2019	Sampling Pelaksanaan Asesmen <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Tahun Buku 2018	Cabang Semarang (SRG)

## Juli 2019

No.	Waktu	Deskripsi	Cabang / Unit Terkait
1.	09-10 Juli 2019	Sampling Pelaksanaan Asesmen <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Tahun Buku 2018	Cabang Banjarmasin (BDJ)
2.	17-18 Juli 2019	Sampling Pelaksanaan Asesmen <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Tahun Buku 2018	Cabang Balikpapan (BPN)
3.	26-27 Juli 2019	Sampling Pelaksanaan Asesmen <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Tahun Buku 2018	Cabang Surabaya (SUB)
4.	27 Juli 2019	Monitoring Mitigasi Trafik terhadap RKAP Tahun 2019	Cabang Bali (DPS)
5.	30 Juli 2019	Sampling Pelaksanaan Asesmen <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Tahun Buku 2018	Cabang Semarang (SRG)
6.	31 Juli 2019	Sampling Pelaksanaan Asesmen <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Tahun Buku 2018	Cabang Solo (SOC)

## Agustus 2019

No.	Waktu	Deskripsi	Cabang / Unit Terkait
1.	22 Agustus 2019	Seleksi Mitra Usaha Terminal 1 di Bandara	Cabang Surabaya (SUB)

## September 2019

No.	Waktu	Deskripsi	Cabang / Unit Terkait
1.	04-05 Sept. 2019	Pemantauan dan Pembahasan Prognosa Laporan Keuangan Tahun 2019	Cabang Semarang (SRG)
2.	17 Sept. 2019	Pemantauan dan Pembahasan Prognosa Laporan Keuangan Tahun 2019	Cabang Solo (SOC)
3.	18 Sept. 2019	Pemantauan dan Pembahasan Prognosa Laporan Keuangan Tahun 2019	Cabang Yogyakarta (JOG)

Agenda Rapat Komite Risiko Usaha dan *Good Corporate Governance* PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

## Oktober 2019

No.	Waktu	Deskripsi	Cabang / Unit Terkait
1.	01 Oktober 2019	Pemantauan dan Pembahasan Prognosa Laporan Keuangan Tahun 2019	Cabang Surabaya (SUB)
2.	02 Oktober 2019	Pemantauan dan Pembahasan Prognosa Laporan Keuangan Tahun 2019	Cabang Makassar (UPG)
3.	03 Oktober 2019	Pemantauan dan Pembahasan Prognosa Laporan Keuangan Tahun 2019	Cabang Bali (DPS)

## Desember 2019

No.	Waktu	Deskripsi	Cabang / Unit Terkait
1.	03-04 Des. 2019	Pemantauan Rencana Pengelolaan <i>Mezzanine</i> Terminal Keberangkatan Internasional Bandara	Cabang Bali (DPS)

## Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk meningkatkan penerapan prinsip GCG terkait transparansi proses nominasi dan remunerasi, pada saat laporan ini diterbitkan, tertanggal 22 April 2020, PT Angkasa Pura I (Persero) telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang tertuang dalam SK Dewan Komisaris No. KEP.05/DK.AP.I/2020.

Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) meneruskan usulan remunerasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Pemegang Saham Utama dan Pengendali, untuk kemudian disahkan melalui mekanisme RUPS.

### PEDOMAN DAN DASAR PELAKSANAAN FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

Fungsi nominasi dan remunerasi mencakup tanggung jawab untuk melaksanakan, mengatur, dan menegakkan prinsip-prinsip GCG dalam hal pencalonan posisi strategis manajemen dan menetapkan besaran remunerasi bagi Direksi yang ditetapkan Kementerian BUMN

selaku Rapat Umum Pemegang Saham. Tugas, tanggung jawab, wewenang serta prosedur kerja Komite Nominasi dan Remunerasi diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero).



## TUGAS TERKAIT NOMINASI DIREKSI

Tugas Dewan Komisaris terkait nominasi Direksi yang dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi:

1. Memberikan rekomendasi mengenai komposisi jabatan, kebijakan dan kriteria, serta kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
3. Mengusulkan calon-calon anggota Direksi yang baru kepada RUPS.
4. Sebagai *talent committee* untuk eksekutif BUMN (Direksi dan Pejabat satu tingkat di bawah Direksi).

## TUGAS TERKAIT REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Tugas Dewan Komisaris terkait Remunerasi Direksi yang dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi:

1. Memberikan rekomendasi mengenai struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi.
2. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

## KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Komite Risiko Usaha dan Good Corporate Governance berperan mendukung proses pergantian Direksi berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. Peraturan tersebut antara lain mengatur mengenai hal-hal berikut:

1. Persyaratan calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan formal dan materil, serta persyaratan lain yang ditetapkan.
2. Persiapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dan evaluasi mencakup:
  - Penyusunan daftar anggota Direksi yang habis masa jabatannya;
  - Penjaringan bakal calon anggota Direksi; serta
- Pembentukan tim untuk melakukan UKK dan evaluasi.
3. Proses UKK dan evaluasi, yaitu:
  - UKK dilakukan oleh tim dan/atau lembaga profesional.
  - Hasil UKK dievaluasi oleh tim dan disampaikan kepada Menteri untuk mendapat keputusan.
4. Proses pengangkatan anggota Direksi, yaitu:
  - Menteri dapat melakukan wawancara terhadap hasil UKK dan evaluasi yang dilakukan oleh tim dan/atau lembaga profesional.
  - Menteri mengangkat calon anggota Direksi terpilih berdasarkan Keputusan Menteri/RUPS.

## STRUKTUR, KEANGGOTAAN, INDEPENDENSI, DAN RAPAT KOMITE

Penjelasan mengenai struktur, nama, jabatan, riwayat hidup, serta pengungkapan independensi dan pelaksanaan rapat nominasi dan remunerasi

oleh Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian “Dewan Komisaris” di dalam Laporan ini.

## REALISASI KEGIATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sepanjang tahun 2019, fungsi nominasi dan remunerasi telah terlaksana dengan baik oleh Dewan Komisaris. Realisasi kegiatan fungsi

nominasi dan remunerasi di tahun 2019 yaitu memberikan usulan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2019 sebelum diajukan ke RUPS.

## Sekretaris Perusahaan



Angkasa Pura I memiliki Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang mendukung kinerja Direksi dalam aspek keterbukaan Perusahaan. Fungsi utama Sekretaris perusahaan yaitu menjalin komunikasi internal dan eksternal, mengelola hubungan investor, menangani kesekretariatan pimpinan

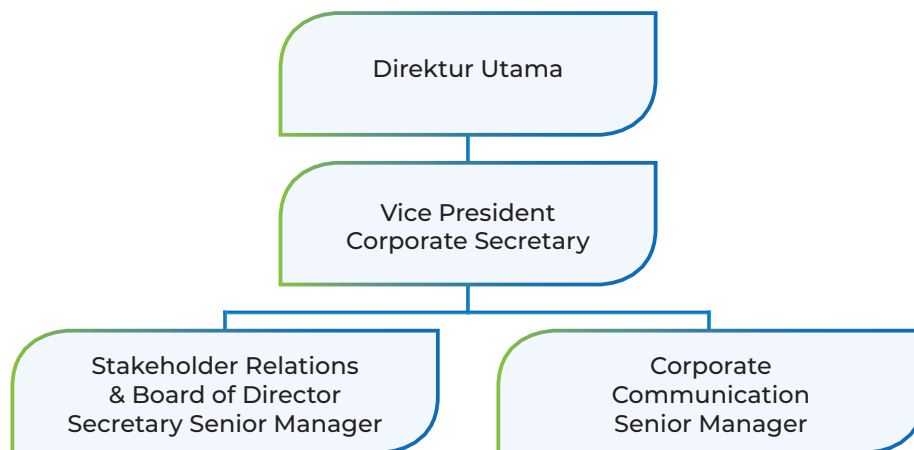
Angkasa Pura I, serta memastikan kepatuhan Angkasa Pura I terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

## STRUKTUR SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan membawahkan 2 (dua) unit, yakni Corporate Communication dan Stakeholder Relations and Board of Director Secretary. Pengaturan mengenai struktur Sekretaris Perusahaan ini tercantum dalam Keputusan Direksi No. KEP.101/OM.01.01/2018 tanggal 8 Juni

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero).

Struktur Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura I (Persero) adalah sebagai berikut.



## URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Berdasarkan No. KEP.101/OM.01.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat, Unit Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Tugas Vice President Corporate Secretary yaitu memastikan tercapainya peningkatan citra Perusahaan melalui pengelolaan komunikasi Perusahaan (eksternal dan internal), administrasi, dan hubungan antarpemangku kepentingan Perusahaan guna mendukung pencapaian *Customer Satisfaction Index* (CSI) berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan prinsip GCG serta melaksanakan kepatuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Perusahaan.
2. Tanggung jawab Vice President Corporate Secretary yaitu sebagai berikut:
  - a. Memastikan tersedianya RKAP.
  - b. Memastikan tercapainya kontrak manajemen yang telah disepakati.
  - c. Memastikan perannya sebagai *people manager* pada unit kerjanya.
  - d. Memastikan kegiatan unit kerjanya berjalan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah ditetapkan.
  - e. Memastikan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya sesuai dan relevan dengan sistem manajemen yang diterapkan Perusahaan.
  - f. Memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan unit kerjanya terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Perusahaan.
  - g. Memastikan terselenggaranya kegiatan yang mendukung citra Perusahaan semakin baik.
  - h. Memastikan terjalannya komunikasi dengan pihak internal, eksternal dan media.
  - i. Memastikan informasi/fakta material terkait obligasi dilaporkan kepada pihak yang menerima laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - j. Memastikan tersedianya informasi dan dokumentasi Perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan.

## PROFIL DAN RIWAYAT HIDUP SINGKAT SEKRETARIS PERUSAHAAN

Jabatan	Nama
 <p data-bbox="193 748 448 801"><b>Handy Heryudhitiawan</b> VP Corporate Secretary</p>	<p data-bbox="528 405 1050 432">Warga Negara Indonesia, berdomisili di Makassar</p> <p data-bbox="528 456 975 510">Usia/Umur dan Tanggal Lahir: 44 tahun, lahir di Jakarta, 25 Agustus 1976.</p> <p data-bbox="528 537 1414 613">Dasar Pengangkatan: Handy Heryudhitiawan diangkat menjadi Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKEP.1649/KP.07.03/2018 tanggal 28 Agustus 2018.</p> <p data-bbox="528 640 746 667">Riwayat Pendidikan:</p> <ul data-bbox="528 669 1331 775" style="list-style-type: none"> <li>• Diploma, PLP Curug, 1997</li> <li>• Sarjana, Manajemen Ekonomi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, 2003</li> <li>• Magister Manajemen, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2005</li> </ul> <p data-bbox="528 801 730 828">Riwayat Pekerjaan:</p> <ul data-bbox="528 831 1422 1120" style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksana ATC Junior (1997 – 1999)</li> <li>• Pelaksana ATC Senior (1999 – 2002)</li> <li>• Pelaksana ATC Radar (2002 – 2009)</li> <li>• ATS Training Specialist (2009 – 2011)</li> <li>• Kepala Humas Proyek Pengembangan Bandara Sepinggan Balikpapan pada (2011 – 2013)</li> <li>• Corporate Communication Department Head PT Angkasa Pura I (Persero) pada (2013 – 2015)</li> <li>• General Manager Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin pada (2015 – 2017)</li> <li>• General Manager Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, (2017 – 2018)</li> </ul>

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2019, Sekretaris Perusahaan tidak mengikuti kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan.

## REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugasnya antara lain sebagai berikut:

1. Pembinaan, *monitoring*, dan asistensi pengelolaan administrasi perkantoran dan kearsipan di Kantor Cabang dan Proyek Pengembangan Bandara di 13 bandara dan Kantor Pusat
2. Pendampingan kunjungan kerja Direksi
3. Penyelamatan dan pengamanan arsip vital perusahaan
4. Rapat koordinasi administrasi dan kearsipan serta rapat koordinasi komunikasi 2019
5. Pelaksanaan rapat Direksi sebanyak 38 kali
6. Pengembangan SDM dan studi banding
7. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi internal Perusahaan (antar unit/antar cabang)
8. Meningkatkan citra positif perusahaan, meningkatkan efektivitas komunikasi, keterbukaan informasi dan transparansi, menumbuhkan kepercayaan masyarakat/*stakeholder*
9. Meningkatkan dan memperkuat hubungan dengan media
10. Meningkatkan dan memperkuat hubungan dengan mitra kerja/mitra usaha dan komunitas
11. Meningkatkan dan memperkuat *brand image* korporat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan *event*.

# Komite Audit Internal

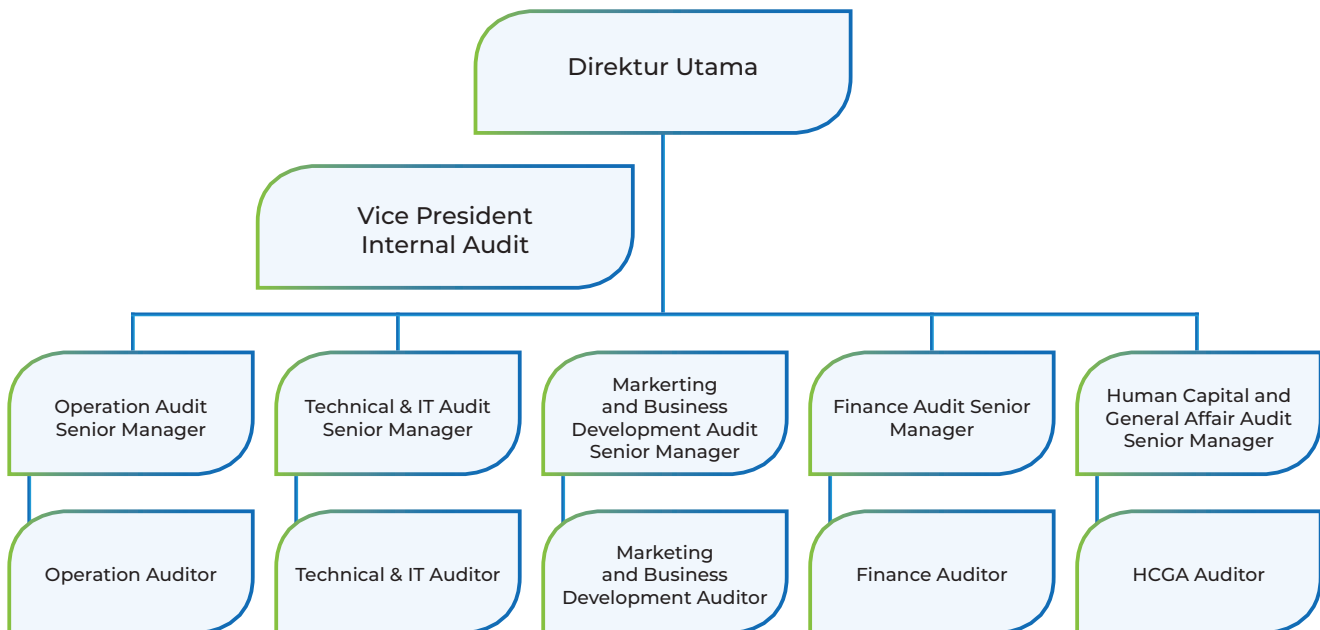
Angkasa Pura I memiliki Komite Audit Internal atau dikenal dengan Unit Internal Audit yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.101/OM.01.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat. Unit Internal Audit Angkasa Pura I bekerja di bawah Direksi dengan tujuan

untuk membantu Direktur Utama mengawasi efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan GCG di Angkasa Pura I. Pelaksanaan tugas Unit Internal Audit dapat bersinergi dengan Komite Audit dan Komite Risiko Usaha dan Good Corporate Governance.

## STRUKTUR ORGANISASI DAN KEDUDUKAN UNIT INTERNAL AUDIT

Unit Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dipimpin oleh Vice President Internal Audit. Pengangkatan dan pemberhentian Vice President Internal Audit dilakukan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Terdapat 5 (lima) departemen yang membantu pelaksanaan

tugas Unit Internal Audit, yaitu Operational Audit Department, Technical & Information Technology Audit Department, Marketing and Business Development Audit, Finance Audit department, dan Human Capital and General Affairs Audit Department.



## PIAGAM UNIT INTERNAL AUDIT DAN KODE ETIK AUDITOR

Unit Internal Audit Angkasa Pura I memiliki Piagam Internal Audit sebagai pedoman kerja yang telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Komisaris sejak Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Angkasa Pura I Nomor No.KEP51.I/PG.01/2017 Tahun 2017. Piagam Internal Audit mencakup pembahasan mengenai peran dan tanggung jawab serta dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan oleh Unit Internal Audit. Angkasa Pura I telah menyebarluaskan isi Piagam Internal Audit kepada seluruh karyawan dan pihak lain yang terkait agar mampu membangun kesepahaman dan kerja sama yang baik untuk mewujudkan visi dan misi Perusahaan terkait pelaksanaan internal audit.

Isi Piagam Internal Audit mencakup:

- A. Pendahuluan: berisi latar belakang serta visi dan misi Internal Audit.
- B. Internal Audit: berisi pengertian, struktur dan

kedudukan, fungsi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, ruang lingkup, akuntabilitas, serta standar profesi dan kode etik.

- C. Pola Hubungan: berisi hubungan internal auditor dengan *auditee*, eksternal auditor, serta dengan Komite Audit dan Komite Risiko Usaha dan Good Corporate Governance.
- D. Peningkatan Kualitas Internal Auditor.
- E. Jaminan Mutu.
- F. Penutup.

Selanjutnya Unit Internal Auditor memiliki Kode Etik Auditor yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Kode Etik Auditor memuat prinsip-prinsip yang wajib diterapkan, yaitu terdiri dari integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi.

## SISTEM INFORMASI INTERNAL AUDIT

Pelaksanaan audit oleh Internal Audit dibantu oleh keberadaan *System Information Management Audit* (SIMA) yang memungkinkan pencatatan data otomatis terhadap seluruh aktivitas operasional. Data yang terkumpul dari SIMA selanjutnya diolah

untuk memenuhi kebutuhan meningkatkan kualitas kinerja serta meningkatkan peran Internal Audit dalam upaya mengoptimalkan *Information and Technology General Control* (ITGC).

## URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT INTERNAL AUDIT

Tugas dan tanggung jawab Unit Internal Audit yaitu:

1. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran serta program kerja tahunan Unit Internal Audit.
2. Menyusun program audit untuk menjamin mutu kegiatan Unit Internal Audit.
3. Melaksanakan pengumpulan informasi dan pemeriksaan berbasis risiko, pengawasan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan, penilaian, penyajian, saran perbaikan, serta kegiatan *assurance* dan konsultasi untuk efisiensi dan efektivitas unit kerja sesuai dengan bidang tanggung jawabnya, yaitu: operation, technical, marketing and business development, finance and information

technology, human capital and general affair, corporate secretary, risk management and compliance, project management office, procurement, serta corporate planning and performance.

4. Melaksanakan evaluasi atas efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pengendalian intern, penerapan manajemen risiko dan tata kelola Perusahaan dalam proses bisnis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan Perusahaan yang berlaku, serta prinsip GCG.

5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan dan merekomendasikan perbaikan terhadap penyelenggaraan Perusahaan serta melaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
6. Bertindak sebagai *counterpart* dengan pihak eksternal auditor dan Komite Audit dalam kegiatan pemeriksaan di Perusahaan.
7. Melakukan pemeriksaan khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan Direktur Utama.
8. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut oleh unit kerja atas saran-saran perbaikan yang telah diberikan kepada Direktur Utama.
9. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalisme internal auditor dalam Unit Internal Audit dengan sertifikasi.

Di dalam menjalankan tugasnya, Unit Internal Audit Angkasa Pura I memiliki tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan audit.
2. Melakukan survei pendahuluan (*desk audit*).
3. Membuat audit program.
4. Pelaksanaan audit.
5. Membuat kertas kerja dan laporan.
6. Monitoring tindak lanjut.


## KEWENANGAN UNIT INTERNAL AUDIT

Unit Internal Audit berwenang untuk:

1. Memiliki akses, baik secara langsung dan tidak langsung, terhadap dokumen, catatan personal, dan fisik kekayaan Perusahaan di seluruh organ (fungsi) Perusahaan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dan mengadakan pertemuan atau rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.
3. Menetapkan metode, cara teknik, dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
4. Meminta saran dan pendapat dari pihak ketiga atau tenaga ahli jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
5. Memiliki peran besar dalam penilaian efektivitas GCG.
6. Mengembangkan kompetensi, peran, serta kinerja personil Unit Internal Audit melalui sertifikasi pada pelaksanaan audit operasional berbasis resiko, penilaian GCG, Information Technology, Kinerja Perusahaan/unit yang dilihat dari data *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan/Unit.
7. Menyusun dan mengembangkan sistem, pedoman, perencanaan, dan program kerja Unit Internal Audit sesuai dengan standar dan kode etik yang berlaku.
8. Mengambil keputusan dan langkah-langkah korektif di ruang lingkup kerja Unit Internal Audit berdasarkan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
9. Head of Internal Audit dan Internal Auditor tidak mempunyai kewenangan untuk:
  - a. Melakukan tugas-tugas operasional baik di Perusahaan maupun pada Anak Perusahaan.
  - b. Memberikan persetujuan transaksi akuntansi untuk Unit Internal Audit.
  - c. Mengatur aktivitas Pegawai Perusahaan diluar Unit Internal Audit, kecuali yang disetujui sebagai tambahan membantu Perusahaan.
  - d. Department, Finance Audit Department, serta Human Capital & General Services Audit Department.



## PROFIL DAN RIWAYAT HIDUP SINGKAT KEPALA UNIT INTERNAL AUDIT

Jabatan	Nama
	<p>Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta</p> <p>Usia/Umur dan Tanggal Lahir: 49 tahun, lahir di Medan, 23 Agustus 1971</p> <p>Dasar Pengangkatan: Israwadi diangkat menjadi Kepala Unit Internal Audit atau Vice President Internal Audit sejak 28 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKEP.1648/KP.07.03/2018.</p> <p>Riwayat Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana, Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung, 1995</li> <li>- Magister Manajemen, Marketing, Universitas Trisakti, 2005</li> </ul> <p>Riwayat Pekerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Keuangan, PT Angkasa Pura Hotel (2012-2016)</li> <li>- Corporate Secretary, PT Angkasa Pura I (Persero) (2016-2018)</li> </ul>
	<p><b>Israwadi</b> VP Internal Audit</p>

Ketua Unit Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

## JUMLAH DAN KUALIFIKASI ANGGOTA UNIT INTERNAL AUDIT

### SERTIFIKASI PROFESI ANGGOTA UNIT INTERNAL AUDIT

Internal Auditor Angkasa Pura I menggunakan Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dari Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dan Code of Ethic dari The Institute of Internal Auditors. Dengan mengacu pada standar tersebut, Unit Internal Audit Angkasa Pura I memiliki proses

audit yang berorientasi pada praktik terbaik di tingkat internasional.

Lebih jauh lagi, saat ini terdapat 20 orang anggota Unit Internal Audit Angkasa Pura I yang seluruhnya telah memiliki kualifikasi atau sertifikasi profesi dengan rincian sebagai berikut.

Kualifikasi Anggota Unit Internal Audit PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

No.	Nama	Jabatan	Kualifikasi
1.	Israwadi	Vice President Internal Audit	Audit Internal Lanjut II, Audit Forensik Dasar & Sertifikasi CRP, CPIA
2.	Jarot Handoko	Commercial Audit Senior Manager	Audit Internal Lanjut I, Audit Forensik Tingkat Menengah & Sertifikasi CRP, CPIA,
3.	Junius F. Walenta	Finance Audit Senior Manager	Audit Internal Dasar II, Audit Forensik Dasar & Sertifikasi CPIA
4.	Milda	Human Capital and General Services Audit Senior Manager	Audit Internal Tingkat Lanjutan
5.	Esti Dewi Fitriani	Technical & IT Audit Senior Manager	Audit Forensik Dasar, Sertifikasi QIA, CRP & CPIA
6.	I Made Adi Susilayasa	Auditor	Audit Internal Lanjut II, Audit Forensik Dasar, Sertifikasi CRP & CPIA
7.	Didi Suliyantono	Auditor	Audit Forensik Dasar, Sertifikasi QIA, CRP & CPIA
8.	Insan Kamil	Auditor	Audit Forensik Dasar Sertifikasi QIA & CRP

## Kualifikasi Anggota Unit Internal Audit PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

No.	Nama	Jabatan	Kualifikasi
9.	Herriyanto	Auditor	Audit Internal Dasar II dan Sertifikasi CPIA
10.	Tri Suliati	Auditor	Audit Internal Dasar & Sertifikasi CPIA
11.	Karel Rianto Rantetana	Auditor	Audit Internal Tingkat Dasar
12.	Titis Erawati	Auditor	Audit Internal Tingkat Dasar
13.	Reni Dewita	Auditor	Audit Internal Tingkat Dasar
14.	Triyanto	Auditor	Audit Internal Tingkat Dasar
15.	Binsar Reynold	Auditor	Audit Internal Tingkat Dasar
16.	Minda Afiani	Auditor	Audit Internal Tingkat Dasar
17.	Agni Indradi	Auditor	Audit Internal Tingkat Dasar
18.	Ujang Hendra	Auditor	Audit Internal Tingkat Dasar
19.	Roni Setioko	Auditor	Sertifikasi CRP, CPIA
20.	Titik Budi Utami	Internal Audit Officer	Sertifikasi CRP

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGOTA UNIT INTERNAL AUDIT TAHUN 2019

Untuk meningkatkan kompetensi Unit Internal Audit dalam menjalankan tugasnya, Angkasa Pura I memberi kesempatan bagi para anggota Unit Internal Audit untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.

Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti Internal Auditor sepanjang tahun 2019 isajikan dalam tabel berikut.

## Kualifikasi Anggota Unit Internal Audit PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Nama Peserta	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yaka Sulistya W</li> <li>• Karel Rianto R</li> <li>• Tri Suliati</li> <li>• I Made Adi S</li> </ul>	Certified Practitioner of Internal Audit I	YPIA	11 – 22 Maret 2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restu Suryaningsih</li> <li>• Titik Budi U</li> <li>• Israwadi</li> <li>• Junius F Walenta</li> <li>• Jarot Handoko</li> <li>• Insan Kamil</li> <li>• Didi Suliyantono</li> </ul>	Certified Practitioner of Internal Audit II	YPIA	13 – 24 Mei 2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Israwadi</li> <li>• Jarot Handoko</li> <li>• Junius F Walenta</li> </ul>	National Conference IIA - Solo	The Insitute Of Internal Auditors	24 – 25 Juni 2019
Israwadi	Workshop Audit Internal - Standar Audit Dan Kode Etik Profesi	YPIA	4 – 5 Juli 2019
Israwadi	National Anti Fraud Conference - Bali	Association Of Certified Fraud Examiners (ACFE)	9 – 11 Juli 2019

Nama Peserta	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan
Esti Dewi F	Workshop Integrating Grc Governance Risk And Compliance	Asia Anti Fraud	5 – 6 Agustus 2019
Esti Dewi F	Diklat Audit Intern TK Lanjutan	YPIA	16 – 28 September 2019
Titis Erawati	Diklat Audit TK Dasar	YPIA	18 – 2 Maret 2019
Esti Dewi F			17 – 29 Juni 2019
Agni Indradi			28 Oktober – 9 November 2019
Israwadi	Workshop Kerugian Negara Dalam Bumn Dan Bumn : Risiko Investasi Atau Korupsi	Asia Anti Fraud	7 – 8 November 2019
Israwadi	International Workshop Best Practices In Implementing Effective Governance	(Perhimpunan Auditor Internal Indonesia)	24 – 28 November 2019
Junius F Walenta	Diklat Audit Forensik PPAK TK Menengah	PPAK	9 – 16 Desember 2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herryanto</li> <li>• Osim</li> <li>• Insan Kamil</li> <li>• Milda</li> <li>• I Made Adi S</li> </ul>	Seminar Nasional Internal Audit	YPIA	24 – 25 April 2019

## URAIAN PELAKSANAAN TUGAS UNIT INTERNAL AUDIT TAHUN 2019

Sepanjang tahun 2019, Unit Internal Audit telah melaksanakan program kerjanya dengan efektif. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Unit Internal Audit pada tahun 2019 yaitu disajikan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Audit Operasional pada Kantor Cabang Bandara

Pelaksanaan audit operasional pada Kantor Cabang/Bandara berbasis risiko dengan daftar sebagai berikut:

### Pelaksanaan Audit Operasional Tahun 2019

No.	Pelaksanaan Audit	Tanggal Audit	Nomor Surat Perintah
1.	Bandara Lombok - Lombok Tengah	6 sd 15 Februari 2019	PRIN.DU. 44/PG.01/2019
2.	Bandara Pattimura - Ambon	6 sd 15 Februari 2019	PRIN.DU. 43/PG.01/2019
3.	Bandara Adi Soemarmo - Solo	25 Feb sd 8 Maret 2019	PRIN.DU. 63/PG.01/2019
4.	Bandara Adisutjipto - Yogyakarta	25 Feb sd 8 Maret 2019	PRIN.DU. 64/PG.01/2019
5.	Bandara El Tari - Kupang	18 sd 26 Maret 2019	PRIN.DU. 117/PG.01/2019
6.	Bandara Jenderal Ahmad Yani - Semarang	4 sd 16 April 2019	PRIN.DU. 141/PG.01/2019
7.	Bandara Sultan Syamsudin Noor - Banjarmasin	4 sd 16 April 2019	PRIN.DU. 151/PG.01/2019
8.	Bandara Frans Kaisiepo - Biak	23 April sd 2 Mei 2019	PRIN.DU. 185/PG.01/2019

## Pelaksanaan Audit Operasional Tahun 2019

No.	Pelaksanaan Audit	Tanggal Audit	Nomor Surat Perintah
9.	Bandara SAMS Sepinggan - Balikpapan	1 sd 5 Juli 2019	PRIN.DU. 258/PG.01/2019
10.	Bandara Sam Ratulangi - Manado	15 sd 19 Juli 2019	PRIN.DU. 277/PG.01/2019
11.	Bandara Sultan Hasanuddin - Makassar	5 sd 9 Agustus 2019	PRIN.DU. 330/PG.01/2019
12.	Bandara I Gusti Ngurah Rai - Bali	19 sd 23 Agustus 2019	PRIN.DU. 366/PG.01/2019
13.	Bandara Juanda - Surabaya	19 sd 13 September 2019	PRIN.DU. 370/PG.01/2019

2. Pendampingan Audit Eksternal  
Pendampingan audit eksternal yang telah dilakukan antara lain:
  - Pendampingan Audit Laporan Keuangan Tahun 2019 bersama KAP Purwanto, Sungkoro & Surja
  - Pendampingan Audit Klaim oleh BPKP untuk Pekerjaan Poyek Semarang, *Check in Counter* Bali dan Banjarmasin.
3. Memberikan jasa konsultasi kepada Unit Kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang:
  - Pembayaran Konsesi Jasa Kemandarudaraan
  - Penyelesaian Permasalahan Hukum Hotel Hakaya
  - Revisi terhadap KEP Pengadaan Barang & Jasa Angkasa Pura I
  - Pembayaran *Off Shore Marketing GVK*
  - Perubahan Luas Area Komitmen Finansial PT NU Prasada Champagne Gerai Prada Bar Bandara I Gusti Ngurah Rai
  - Ijin prinsip penyesuaian kerja sama pengelolaan media reklame SRG
  - Pengadaan kendaraan PKP-PK Foam Tender Tipe I (*e-Catalog*)
  - *Brand Corridor* Pekerjaan Penutup Atap Membrane Proyek Bandara Yogyakarta
  - Penyelesaian Pembayaran Konsesi No: SP.333/HK.06/2015/DU dengan Kementerian Perhubungan
  - Rencana Pembangunan Hotel Bandara di Terminal Baru Bandara Syamsudin Noor - Banjarmasin
  - Seleksi Mitra Usaha Bandara Jenderal Ahmad Yani – Semarang
  - Digital Transformation (AOCC/AOCS, AIP) Kepada PT. APS
  - Perpanjangan Mitra Usaha Terminal Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali
  - *Draft Request for Proposal* Kegiatan Pengusahaan dan Kerja Sama di Bandar Udara
  - Rangkap Jabatan yang dapat menimbulkan *Conflict of interest*
  - Evaluasi atas Ketentuan Penunjukan Langsung kepada Anak Perusahaan
  - Penawaran Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Teknolgi CAI PSS
  - Usaha EMPU dan Tarif Sewa Lahan GSE
  - Kerja Sama Angkasa Pura I dengan Jakarta Infrastruktur Propertindo
  - Penunjukan Langsung Kepada Anak Perusahaan terkait Master Konsesionaler BPN
  - Pembentukan Taskforce dalam rangka Keikutsertaan Angkasa Pura I pada proses seleksi KPBU Bandara Hang Nadim Batam
  - Draft MoU Angkasa Pura I - Perjanjian Konsorsium Hang Nadim dan Penempatan SDM Operasional Terminal 4 Bandara Kuwait.
  - Terkait Rencana Pemanfaatan Aset Eks Bandara Selaparang oleh PT. APS
  - Persetujuan Penyelesaian Addendum Perjanjian PT. Taurus Gemilang Paket D22 Terminal Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai – Bali
  - Alternatif Pembayaran *Security Deposit* Tahap II

Seluruh jajaran auditan bertanggung jawab dan berkewajiban menindaklanjuti setiap temuan hasil *assurance* dan *consulting* melalui jalur koordinasi dan kerja sama antar fungsi terkait. Rekapitulasi tindak lanjut temuan Internal Audit tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun 2019

Jumlah Temuan	Rekomendasi	Saldo	
		Temuan	Rekomendasi
160	449	1	4

## Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam melaksanakan pengendalian risiko, pengawasan atas kebijakan Perusahaan, dan optimalisasi

fungsi manajemen risiko. Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. SKEP.196/PG.01/2018 tanggal 12 Oktober 2018.

### STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Struktur Komite Manajemen Risiko yaitu:

1. Ketua Komite, yang dipimpin oleh Direktur Keuangan
2. Sekretaris Komite, yang dijabat oleh Vice President Compliance and Risk Management
3. Anggota Komite, yang terdiri dari para Direktur yang ditunjuk dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi di lingkungan Kantor Pusat.

Saat ini Komite Manajemen Risiko memiliki 33 anggota termasuk Ketua dan Sekretaris, dengan susunan pengurus sebagai berikut.

- A. Ketua  
Direktur Keuangan
- B. Sekretaris  
Vice President Compliance And Risk

Management

- C. Anggota
  1. Direktur Operasi
  2. Direktur Teknik
  3. Direktur Pemasaran dan Pelayanan
  4. Direktur Pengembangan Usaha
  5. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
  6. Vice President Internal Audit
  7. Vice President Corporate Secretary
  8. Vice President Legal
  9. Vice President Corporate Planning and Transformation
  10. Vice President Airport Operation
  11. Vice President Airport Security
  12. Vice President Airport Safety

13. Vice President Airport Engineering
14. Vice President Airport Facilities and Maintenance
15. Vice President Airport Equipment
16. Project Management Airport Development
17. Vice President Aeronautical Business
18. Vice President Non Aeronautical Business
19. Vice President Airport Services and Hospitality
20. Project Management Airport Tourism and Connectivity
21. Vice President Business Development and International Relations
22. Vice President Business Portfolio
23. Vice President Information Technology
24. Project Management Airport Digital
25. Vice President Accounting
26. Vice President Finance
27. Vice President Procurement
28. Vice President Human Capital
29. Vice President Training and Development
30. Vice President General Services
31. Vice President Corporate Social Responsibility

## URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Tugas dan tanggung jawab yang perlu dilaksanakan oleh Komite Manajemen Risiko meliputi:

1. Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang komprehensif secara tertulis.
  - a. Kebijakan tersebut meliputi penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*, baik risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko, maupun per aktivitas fungsional.
  - b. Kebijakan dan strategi manajemen risiko ditetapkan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang memengaruhi aktivitas usaha Perusahaan secara signifikan.
2. Bertanggung jawab atas pemantauan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan *exposure* yang diambil oleh Perusahaan secara keseluruhan, meliputi kegiatan evaluasi dan pengarahannya berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Unit Risk Management and Compliance dan Unit Internal Audit.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko Perusahaan secara berkala, meliputi kegiatan:
  - a. Metodologi pelaksanaan *risk assessment*.
  - b. Implementasi sistem informasi manajemen.
  - c. Ketepatan kebijakan, prosedur, serta penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*.
4. Melakukan kaji ulang (*review*) secara berkala untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan situasi, kondisi, serta perkembangan eksternal dan internal Perusahaan.
5. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
6. Memantau independensi kerja dari unit kerja yang membidangi fungsi Risk Management Kantor Pusat.
7. Memantau kegiatan yang dilakukan oleh Unit Risk Management and Compliance.
8. Mengembangkan budaya sadar risiko pada seluruh pegawai Perusahaan, melalui kegiatan komunikasi yang memadai kepada seluruh pegawai Perusahaan tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif.
9. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.

## PROFIL DAN RIWAYAT HIDUP SINGKAT KETUA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Saat ini Komite Manajemen Risiko dipimpin oleh Novrihandri selaku Direktur Keuangan. Profil Ketua Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian Profil Direksi di Laporan ini.

## URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Sepanjang tahun 2019, Komite Manajemen Risiko telah merealisasikan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif. Komite Manajemen Risiko melaksanakan pertemuan rutin guna memberi arahan kepada Vice President Compliance and Risk Management selaku

pengelola risiko di lingkungan Perusahaan. Selain itu, Komite melakukan *benchmarking* kepada perusahaan lain untuk tujuan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam hal tata kelola manajemen risiko perusahaan.

# Sistem Manajemen Risiko

Angkasa Pura I memastikan proses bisnis perusahaan berlangsung sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima melalui serangkaian proses manajemen risiko serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Penjabaran pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan tertuang dalam Ketetapan Direksi nomor KEP.77/PG.01/2014 tentang Pedoman Manajemen Risiko Angkasa Pura I yang memuat kebijakan umum manajemen risiko, peran dan tanggung jawab, proses Manajemen Risiko, prosedur kerja, instruksi kerja, dan formulir Manajemen Risiko.

Tujuan sistem Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Memetakan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan manajemen.

2. Memberikan arah dalam penerapan Manajemen Risiko mulai dari identifikasi, pengukuran, penentuan penanganan, pelaksanaan aktivitas pengendalian, pengomunikasian, dan pemantauan (*monitoring*).
3. Sebagai media pengembangan, sosialisasi, dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko dan peraturan pendukung lainnya dalam bidang manajemen risiko (*risk management*) secara berkala.
4. Sebagai petunjuk bagi pemangku kepentingan dalam mengelola Risiko usahanya.
5. Sebagai acuan bagi Internal Audit dalam melaksanakan audit berbasis risiko (*risk based audit*).

## STRATEGI PENGELOLAAN RISIKO

Angkasa Pura I menggunakan acuan ISO 31000 *Risk Management Standard* dalam penerapan manajemen risiko perusahaan. Proses

manajemen risiko meliputi 5 (lima) tahapan kegiatan sebagai berikut:



#### A. Komunikasi dan Konsultasi

Proses interaktif berupa tukar menukar informasi dan pendapat mengenai risiko dan pengelolaannya, konsultasi merupakan proses komunikasi antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan mengenai isu tertentu, terkait dengan pengambilan keputusan atau penentuan langkah tertentu dalam menangani risiko.

#### B. Menentukan Konteks

Merupakan langkah pemetaan kondisi lingkungan terkini sebagai sumber penyebab terjadinya risiko, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, dalam upaya pencapaian sasaran, terutama dalam rangka menetapkan kriteria risiko.

#### C. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

1. Identifikasi Risiko (*Risk Identification*)  
Identifikasi dilakukan secara teliti sehingga semua risiko (*risk*) yang relevan termasuk risiko-risiko (*risks*) yang berada di luar kendali Perusahaan, dapat dipastikan telah teridentifikasi.
2. Analisis Risiko (*Risk Analysis*)  
Analisis risiko meliputi penentuan besaran kemungkinan terjadinya risiko, besaran dampak kerugian, dengan memperhatikan sumber dan penyebab risiko serta pengendalian risiko yang sudah ada saat ini dan efektivitasnya.

#### 3. Evaluasi Risiko (*Risk Evaluation*)

Evaluasi risiko (*risk evaluation*) dilakukan untuk menetapkan risiko (*risk*) yang memerlukan penanganan risiko (*risk treatment*) berdasarkan skala prioritas.

#### D. Perlakuan Risiko (*Risk Treatment*)

Perlakuan risiko dilakukan untuk menyeleksi satu atau lebih alternatif metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengurangi eksposur. Pemilihan alternatif perlakuan risiko harus didasarkan atas analisis biaya perlakuan risiko dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh pada berbagai aspek terkait.

#### E. Pemantauan (*Monitoring*) dan Kaji Ulang (*Review*)

Pelaksanaan pemantauan meliputi pemantauan secara berkelanjutan oleh para pemilik risiko. Pengawasan pemantauan dilakukan oleh pimpinan pemilik risiko yang dilaksanakan secara berkala dan pihak ketiga melalui audit internal maupun eksternal yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan, kaji ulang merupakan peninjauan secara berkala terhadap efektivitas sistem manajemen risiko yang diberlakukan dan efektivitas pelaksanaan penanganan risiko untuk disempurnakan secara berkesinambungan.

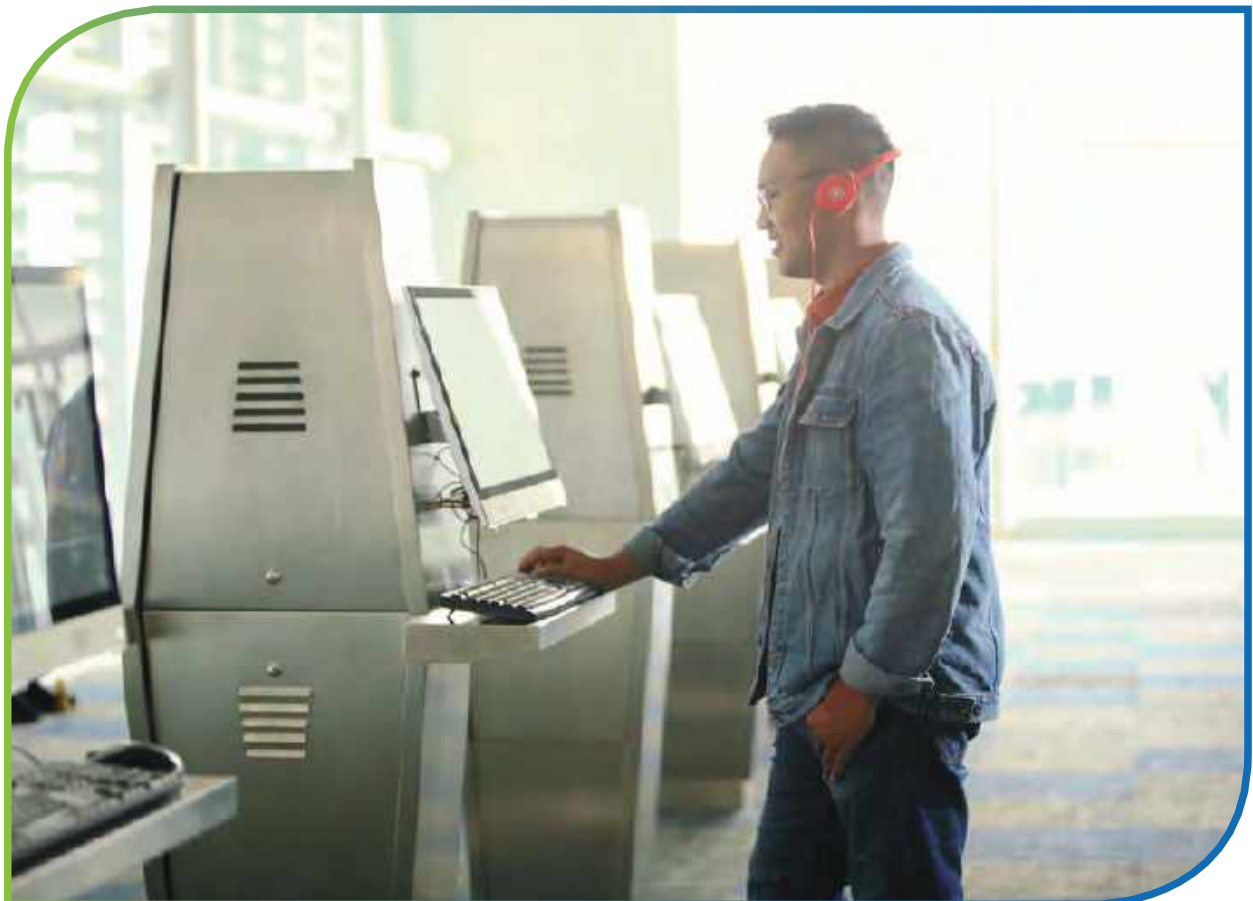
## PROFIL RISIKO DAN PENGELOLAANNYA

Risiko di perusahaan dikelompokkan ke dalam 6 (enam) kategori, adapun secara umum, risiko-risiko yang dihadapi Angkasa Pura I dalam

rangka pencapaian visi misi perusahaan jangka panjang, dijabarkan sebagai berikut:

No	Risiko	Uraian Risiko	Upaya Pengelolaan Risiko
1	Risiko Strategis	Berbagai ancaman/peluang yang berdampak terhadap berbagai sasaran strategis Perusahaan, yang ditimbulkan oleh berbagai faktor yang bersifat mendukung maupun menghambat pelaksanaan program - program strategis Perusahaan.	Secara aktif memantau berbagai perubahan lingkungan bisnis, baik yang bersifat mendukung maupun menghambat ketercapaian sasaran strategis, untuk mendeteksi adanya ancaman berbahaya yang harus dimitigasi dan peluang bermanfaat yang perlu dieksploitasi. Tercapainya berbagai sasaran strategis tahun 2019 merupakan gambaran hasil pengelolaan risiko strategis.

No	Risiko	Uraian Risiko	Upaya Pengelolaan Risiko
2	Risiko Keuangan	Berbagai ancaman/peluang yang berdampak terhadap berbagai sasaran pendapatan, sasaran biaya, maupun sasaran profitabilitas Perusahaan, yang ditimbulkan oleh berbagai faktor yang bersifat mendukung maupun menghambat kinerja keuangan Perusahaan.	Perusahaan melakukan pengelolaan Risiko Keuangan dengan cara aktif mencatat dan memonitor berbagai indikator keuangan Perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian Sasaran Pendapatan, Sasaran Biaya, dan Sasaran Profitabilitas, guna mendeteksi adanya ancaman yang harus dimitigasi dan peluang bermanfaat untuk dieksploitasi. Hasil pengelolaan Risiko Keuangan tergambar dalam kinerja keuangan Perusahaan.
3	Risiko Investasi	Berbagai ancaman/peluang yang berdampak terhadap Sasaran Investasi Perusahaan, yang ditimbulkan oleh berbagai faktor yang menghambat maupun menunjang pelaksanaan berbagai program investasi Perusahaan.	Perusahaan melakukan pengelolaan Risiko Investasi dengan cara memonitor perubahan lingkungan yang bersifat menghambat maupun mendukung ketercapaian berbagai sasaran investasi Perusahaan, guna mendeteksi timbulnya ancaman bahaya yang harus dimitigasi dan peluang bermanfaat untuk dieksploitasi. Hasil pengelolaan Risiko Investasi tergambar dalam kinerja capaian berbagai sasaran Perusahaan di bidang Investasi.
4	Risiko Operasional	Berbagai ancaman/peluang yang berdampak terhadap Sasaran Trafik dan Sasaran Produksi, yang ditimbulkan oleh berbagai faktor penghambat maupun faktor penunjang pelaksanaan berbagai program trafik dan produksi di setiap Cabang Bandara.	Perusahaan melakukan pengelolaan Risiko Operasional dengan cara memantau perubahan lingkungan operasional, baik eksternal maupun internal, yang menghambat maupun mendukung ketercapaian Sasaran Trafik dan Sasaran Produksi, guna mendeteksi timbulnya ancaman bahaya yang harus dimitigasi dan peluang bermanfaat untuk dieksploitasi. Hasil pengelolaan Risiko Operasional tergambar dalam kinerja capaian Sasaran Trafik dan Sasaran Produksi.



## PENILAIAN RISIKO

Berdasarkan serangkaian proses pemantauan risiko yang dilakukan baik di lingkungan kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Anak Perusahaan sampai dengan semester II 2019 jumlah risiko *active* yang teridentifikasi di Angkasa Pura I sebanyak 2.315 (dua ribu tiga ratus lima belas)

risiko yang terdiri dari 407 (empat ratus tujuh) risiko Kantor Pusat, 1.844 (seribu delapan ratus empat puluh empat) risiko Kantor Cabang dan 64 (enam puluh empat) risiko Proyek Pembangunan/ Pengembangan Bandara.

## REVIEW ATAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Angkasa Pura I senantiasa mengkaji ulang (*review*) efektivitas penerapan Sistem Manajemen Risiko. Mekanisme *review* dilakukan melalui pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan sistem informasi, dan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

data informasi terkait dengan risiko yang dimiliki oleh unit kerjanya secara *real time* dan terdokumentasi. Lebih lanjut, dengan adanya pengembangan sistem informasi manajemen risiko berbasis *online* ini, Dewan Direksi dapat ikut serta berperan aktif dalam proses pemantauan risiko di Perusahaan.

### PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Risiko Usaha dan GCG, secara berkala melakukan Rapat dengan Unit *Compliance and Risk Management* dalam rangka melakukan pemantauan terhadap risiko di lingkungan Perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pemilik risiko (*risk owner*) untuk mengurangi atas risiko tersebut. Unit *Compliance and Risk Management* melaporkan hasil pemantauan risiko di lingkungan perusahaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris minimal dua kali dalam setahun.

### KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO

Untuk memastikan kecukupan proses manajemen risiko telah dilakukan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan, Dewan Direksi melalui fungsi internal audit telah melakukan pemeriksaan, evaluasi, pelaporan, dan/atau rekomendasi perbaikan atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko yang kemudian ditindaklanjuti melalui evaluasi oleh Komite Manajemen Risiko.

### KECUKUPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Untuk menjawab kebutuhan perusahaan atas penyediaan data risiko secara *real time* dan mudah diakses, maka saat ini sedang dilakukan pengembangan terhadap modul sistem manajemen risiko berbasis *web*.

### EVALUASI PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Sebagai upaya memastikan penerapan manajemen risiko telah mampu berperan penting dalam membantu pencapaian tujuan Perusahaan, secara berkala mulai tahun 2014 melakukan evaluasi tahunan bersama dengan pihak eksternal untuk mengukur tingkat maturitas dalam implementasi manajemen risiko di Lingkungan Angkasa Pura I. Pengukuran maturitas ini bertujuan untuk memperoleh gambaran penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan dibandingkan dengan praktik-praktik terbaik (*best practices*) dan

Sistem ini bertujuan untuk mempermudah pengelola risiko di lingkungan perusahaan dalam melakukan pemantauan dan pembaharuan

mengidentifikasi penerapan manajemen risiko yang masih memerlukan penyempurnaan, sehingga dapat disusun rekomendasi guna penyempurnaan penerapan manajemen risiko di masa yang akan datang.

Pengukuran maturitas di lingkungan Perusahaan secara umum dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sekali, berdasarkan

serangkaian proses pengukuran Maturitas Manajemen Risiko. Pada tahun 2019, perolehan nilai tingkat maturitas manajemen risiko Perusahaan mencapai 3.37 dari skala 5. Secara umum, seluruh jajaran manajemen Perusahaan telah mencapai hasil kinerja yang baik, terlihat pada nilai KPI Perusahaan yang mencapai angka 90.27 dari target 100.00.

## Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan oleh Angkasa Pura I merujuk pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 Pasal 26 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Pengendalian internal adalah suatu proses yang melibatkan Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tercapainya efektivitas & efisiensi operasi dan keandalan pelaporan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Penerapan Pengendalian Internal (*Internal Control*) pada Angkasa Pura I menggunakan konsep *three lines of defense* sebagai berikut:

- a. Pengendalian lini pertama (*first line*), berada di posisi paling depan, dilakukan oleh unit operasional selaku pemilik risiko sekaligus pelaksana proses bisnis,
- b. Pengendalian lini kedua (*second line*) dilakukan oleh seluruh unit *support* yang memiliki fungsi kontrol secara langsung terhadap operasi perusahaan, seperti; *financial control, security, risk management, quality control, inspection and compliance*.
- c. Pengendalian lini ketiga (*three line*) adalah kegiatan penilaian (*assurance*) atas kontrol yang diselenggarakan pada lini pertama dan

kedua, dilakukan oleh unit yang independen dalam perusahaan, yaitu Unit Internal Audit.

### LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan pengendalian merupakan faktor yang mempengaruhi keseluruhan perusahaan terutama berkaitan dengan etika bisnis dan GCG. Lingkungan pengendalian dibangun sebagai pondasi yang efektif untuk mendukung berjalannya komponen pengendalian internal di Angkasa Pura I. Lingkungan pengendalian ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

#### 1. Integritas dan nilai-nilai etika

Beragam cara yang ditempuh oleh manajemen tingkat atas untuk menekankan tentang pentingnya integritas dan nilai etika di antara para personelnya dalam perusahaan.

#### 2. Komitmen dan kompetensi

Kesadaran manajemen akan pentingnya intelegensi, pelatihan, dan pengalaman setiap karyawan yang diperlukan dalam mengembangkan potensi mereka.

#### 3. Direktur dan Komite Audit

Direktur bertanggung jawab untuk

memastikan bahwa manajemen memenuhi tanggung jawabnya untuk menetapkan dan mempertahankan internal kontrol, sedangkan Komite Audit bertanggungjawab untuk mengenali penolakan manajemen atas pengendalian atau kecurangan dalam laporan keuangan dan menindaklanjuti hal tersebut secara tepat.

#### 4. Falsafah dan gaya operasi manajemen

Manajemen mempunyai peran yang besar dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang baik dalam suatu organisasi.

#### 5. Struktur organisasi

Menggambarkan garis hubungan wewenang dan pertanggungjawaban sehingga dapat memberikan kontribusi bagi lingkungan pengendalian, baik dalam hal memberikan kerangka (*framework*) secara menyeluruh bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasi.

#### 6. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab

Berupa memorandum tertulis mengenai kebijakan-kebijakan, aturan main, deskripsi pekerjaan, dan sebagainya.

#### 7. Kebijakan dan praktik pegawai

Berupa kemampuan menyediakan karyawan yang dapat dipercaya dan memiliki kemampuan pada bidangnya masing-masing.

### PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Pengendalian keuangan adalah tahap rencana keuangan yang diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana atau untuk mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan operasi. Sedangkan pengendalian operasional adalah proses penempatan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pengendalian Operasional dan Keuangan meliputi:

#### 1. Pengendalian fisik aset.

Pengendalian fisik aset di lingkungan perusahaan diarahkan untuk mengamankan dan melindungi aset-aset berisiko. Hal ini penting karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat pada mudahnya terjadi pencurian, penggelapan dan bentuk menipulasi lainnya terhadap aset yang merugikan perusahaan. Pengendalian fisik aset yang dapat dilakukan antara lain adalah pembatasan individu yang dapat mengakses penggunaan aset, data dan informasi, penyediaan keamanan yang cukup dan penerapan prosedur lainnya yang menjamin pengendalian fisik aset sesuai dengan tujuannya.

#### 2. Pemisahan fungsi.

Pemisahan fungsi diarahkan untuk mengurangi kesalahan, kecurangan dan pemborosan. Pemisahan fungsi di lingkungan Perseroan juga ditujukan untuk memperkuat sistem pengendalian internal. Pemisahan fungsi juga dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan sebagai upaya manajemen untuk mengantisipasi permasalahan yang tidak diinginkan yang akan terjadi di kemudian hari. Contoh pemisahan fungsi yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Tidak seorangpun diperbolehkan mengendalikan seluruh aspek utama kejadian dan transaksi dari awal sampai akhir proses.
- b. Kegiatan pemberian otorisasi, pemrosesan, pencatatan dan *review* harus dilaksanakan oleh pegawai (*personil*) yang berbeda.
- c. Tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi harus dilaksanakan sesuai dengan SOP dan instruksi kerja untuk menjamin dilakukannya pengendalian terhadap pemisahan fungsi.

3. Pelaksanaan kejadian dan transaksi.
  - a. Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa hanya kejadian dan transaksi valid yang dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan.
  - b. Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kejadian dan transaksi telah diotorisasi dengan benar oleh pegawai yang diberikan tugas dan tanggung jawab.
  - c. Pelaksanaan ketentuan dan persyaratan otorisasi secara jelas harus dirumuskan dan dikomunikasikan kepada Pimpinan Unit Kerja dan pegawai.
4. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas kejadian dan transaksi.  
Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas kejadian dan transaksi wajib dilakukan di lingkungan perusahaan untuk menjamin tersedianya informasi yang relevan, terpercaya dan tepat waktu untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan perusahaan.
5. Pembatasan akses dan akuntabilitas atas sumber daya dan pencatatannya.  
Akses terhadap sumber daya dan catatan perusahaan harus dibatasi hanya oleh

personil yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang kemudian harus memberikan akuntabilitas atas pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan atas seluruh catatan. Untuk menjamin pengendalian dijalankan dengan benar, aspek ini harus diverifikasi secara periodik dengan melakukan perbandingan jumlah yang tercatat dengan fisik yang tersedia.

6. Dokumentasi yang baik atas kejadian dan transaksi pengendalian.  
Setiap kejadian dan transaksi dalam perusahaan didokumentasikan dengan baik untuk menjamin bahwa seluruh kejadian dan transaksi tersebut dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Mendokumentasikan kejadian dan transaksi tersebut merupakan bagian dari pengendalian internal yang harus dilakukan secara memadai.

#### KESESUAIAN DENGAN COSO

Pengendalian internal yang dilaksanakan pada Angkasa Pura I telah sesuai dengan kerangka pengendalian internal *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO), yang terdiri atas 5 (lima) komponen yaitu:







### 1. Lingkungan Pengendalian

Melalui budaya SATU (Sinergi, Adaptif, Terpercaya dan Unggul), pemberlakuan GCG yang diatur dalam buku saku *code of conduct* yang telah disosialisasikan dan dibagikan kepada seluruh karyawan Angkasa Pura I yang disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas.

### 2. Penilaian Risiko

Angkasa Pura I telah menyediakan unit khusus yang menangani penilaian risiko, *profiling* risiko dan manajemen risiko. Semua risiko di-*register* oleh *risk owner* dan direncanakan mitigasi risikonya, sebagaimana tercantum dalam *risk profile*. Profil risiko dijadikan bahan oleh Internal Audit untuk melakukan *risk based audit*. Rencana mitigasi yang memerlukan biaya dan diusulkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) didasari oleh risiko apa yang mendasari.

### 3. Aktivitas Pengendalian

Angkasa Pura I telah melakukan aktivitas pengendalian sesuai dengan prinsip COSO,

melalui pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan. Selain itu, telah dilakukan pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, serta pemeriksaan kinerja secara independen, oleh internal Audit maupun eksternal Audit.

### 4. Informasi dan Komunikasi

Angkasa Pura I telah menyediakan informasi dan komunikasi melalui raker, rakor, sosialisasi, *e-mail corporate*, *web corporate*, *intranet*, HCIS (*Human Capital Information System*), *electronic library*, dan media lain yang telah disediakan. Pada saat audit oleh Internal Audit pun, dilakukan tahapan informasi dan komunikasi antara auditor dan *auditee*.

### 5. Pemantauan

Kegiatan pemantauan sesuai prinsip COSO dilakukan melalui *performance check* oleh pembina teknis dan audit internal oleh audit oleh eksternal.



## EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Evaluasi efektivitas sistem pengendalian dilaksanakan melalui audit, baik secara internal oleh internal Audit, maupun secara eksternal oleh eksternal Auditor. Manajemen bertanggungjawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif serta memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap jenjang organisasi Sistem Pengendalian Internal secara menyeluruh dan pengawasan yang dilakukan untuk mendukung asersi Direksi tentang efektifitas Sistem Pengendalian Internal Perseroan yang diterapkan.

Hasil evaluasi disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan Sistem Pengendalian Internal berjalan secara efektif. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2019, menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal Angkasa Pura I telah memadai.

# Akuntan Publik

Berdasarkan Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Angkasa Pura I setiap tahun melaksanakan pemeriksaan keuangan perusahaan menggunakan jasa audit eksternal. Terkait hal tersebut, Angkasa Pura I menjamin independensi auditor eksternal yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan agar audit yang dilakukan berkualitas dan hasilnya dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan.

Selama proses audit berlangsung, Angkasa Pura I memfasilitasi pertemuan rutin antara KAP dengan Komite Audit dan Manajemen. Dengan demikian, kegiatan audit dapat berjalan baik sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit serta target waktu yang telah ditetapkan.

## PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Selain oleh KAP, Angkasa Pura I juga diaudit oleh pihak eksternal lainnya, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Angkasa Pura I merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sesuai ketentuan wajib diaudit oleh kedua lembaga Pemerintah tersebut. KAP

bekerja sesuai kontrak dengan Perusahaan untuk melakukan audit kinerja laporan keuangan dan *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan. Di sisi lain, BPK dan BPKP menjalankan fungsi untuk mengaudit laporan keuangan, KPI, dan kinerja internal audit Perusahaan.

## PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Penunjukan KAP untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan Angkasa Pura I periode tahun 2019 dilaksanakan dengan metode pelelangan yang diawasi oleh Komite Audit serta Unit Audit Internal. Untuk audit tahun buku 2019, Angkasa

Pura I menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit.

## KANTOR AKUNTAN PUBLIK, NAMA AKUNTAN, DAN BIAYA JASA AUDIT

Pengungkapan daftar KAP, nama akuntan, biaya jasa yang dikeluarkan Perusahaan untuk akuntan selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Daftar Kantor Akuntan Publik Periode 5 Tahun Terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	Biaya* Jasa Audit	Izin KAP
2019	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	2 Periode	Moch. Dadang Syachruna	Rp 2.597.430.000	KMK NO. 603/KM.1/2015
2018	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja		Moch. Dadang Syachruna	Rp2.962.294.500	KMK NO. 603/KM.1/2015
2017	KAP Djoko, Sidik dan Indra	1 Periode	Indra Soesetiawan	Rp1.989.955.000	NIUKAP: 959/KM.1/2014
2016	KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan	3 Periode	Wijadi, Ak, CPA	Rp1.749.632.500	KEP-444/KM.1/2009
2015	KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan		Wijadi, Ak, CPA	Rp1.455.281.100	KEP-444/KM.1/2009

\* Biaya yang diberikan sudah termasuk biaya atas jasa lain yang diberikan akuntan.

## JASA LAIN YANG DIBERIKAN

Pada tahun 2019, KAP juga memberikan jasa lain selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir, yaitu:

1. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Angkasa Pura I (Persero) untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019;
2. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PT Angkasa Pura I (Persero) untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019;
3. Laporan Auditor Independen atas *Key Performance Indicator* untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019;
4. Laporan Hasil Evaluasi atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019;
5. Laporan Hasil Evaluasi/ Telaahan terhadap kecukupan pengendalian internal yang diterapkan manajemen PT Angkasa Pura I (Persero) tahun buku 2019.

## Perkara Penting

Sepanjang tahun 2019, terdapat perkara penting yang dihadapi oleh Angkasa Pura I, entitas anak, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris. Jumlah perkara yang telah selesai, baik perkara perdata maupun pidana yaitu sebanyak 6 (enam) kasus. Kemudian, total perkara perdata dan pidana yang masih dalam proses penyelesaian

tercatat sebesar 8 (delapan) kasus. Sebanyak 7 (tujuh) perkara yang telah selesai pada tahun 2019 tersebut merupakan perkara yang prosesnya dilanjutkan dari tahun sebelumnya.

Rangkuman jumlah perkara penting sepanjang tahun 2019 dapat dilihat berikut ini:

Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan, Entitas Anak, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi Berdasarkan Tipe Perkara Hukum Tahun 2019

No	Perkara	Jumlah Perkara	
		Telah Selesai	Dalam Proses Penyelesaian
1	Pidana	-	-
2	Perdata	6	8
Total		6	8

Catatan:

Termasuk Perkara Persaingan Usaha dan Pendampingan Tim Pengawal Pengamanan Pembangunan Pemerintah Pusat (TP4P) dan Hubungan Industrial

Selanjutnya, beberapa perkara penting yang dihadapi pada tahun 2019 beserta status perkara dan pengaruhnya terhadap Perusahaan dijelaskan sebagai berikut.

Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan, Entitas Anak, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi Tahun 2019

No	Pokok Perkara	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap Perusahaan	Risiko yang Dihadapi Perusahaan & Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan	Upaya Manajemen	Sanksi Administrasi
1	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Paulus Wuwungan melawan: a. Menteri Perhubungan Republik Indonesia b. PT Angkasa Pura I (Persero) c. Menteri BUMN Republik Indonesia	Proses penyelesaian berada di Tingkat Pengadilan Negeri Manado	Tidak ada	Tuntutan pembayaran ganti rugi sebesar Rp335.000.000.000	Monitoring dan pendampingan proses penyelesaian permasalahan tersebut	Tidak ada
	dengan nomor register perkara 252/Pdt.G/2019/PN.MND					
2	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Maria Nellie Awuy Sumakul melawan: a. Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara b. Presiden Direktur PT Angkasa Pura I (Persero) c. Menteri Keuangan Republik Indonesia d. Menteri BUMN Republik Indonesia	1 Periode	Indra Soesetiawan	Rp1.989.955.000	NIUKAP: 959/KM.1/2014	
	dengan nomor register perkara 465/Pdt.G/2016/PN.MND					

No	Pokok perkara	Status penyelesaian	Pengaruh terhadap perusahaan	Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan	Upaya manajemen	SANKSI ADMINISTRASI
3	Gugatan wanprestasi yang diajukan PT Aneka Glass Abadi melawan PT Makassar Indah Graha Sarana dan PT Angkasa Pura I (Persero) nomor register perkara 352/PDT.G/2010/PN.JKT.PST jo. 385/PDT/2011/PT.DKI jo. 2764 K/Pdt/2012 jo. 564 PK/PDT/2016	Proses penyelesaian permasalahan berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tidak ada	Tuntutan ganti rugi sebesar Rp.773.868.500	Monitoring dan pendampingan proses penyelesaian permasalahan tersebut	Tidak ada
4	Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Lalu Ramli cs melawan: a. PT Angkasa Pura I (Persero) b. Presiden Republik Indonesia c. Menteri BUMN d. Gubernur NTB e. Bupati Lombok Tengah f. Komisi Pemberantasan Korupsi g. Badan Pertanahan Nasional Kab. Lombok Tengah h. Komisi Nasional HAM RI i. Ketua DPRD NTB j. Ketua DPRD Kab Lombok Tengah  Dengan nomor register perkara 039/Pdt.G/2018/PN.Pya jo. 77/Pdt/2019/PT.Mtr	Proses penyelesaian berada di tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia	Tidak ada	Tuntutan ganti rugi sebesar Rp105.132.000.000 serta ganti kerugian materil dan moril sebesar Rp3.360.000.000.	Monitoring dan pendampingan proses penyelesaian permasalahan tersebut	Tidak ada
5	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Hamni dkk melawan: a. PT Angkasa Pura I (Persero) b. Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru c. Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru d. Lurah Syamsudin Noor	Proses penyelesaian berada di tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia	Tidak ada	Tuntutan ganti rugi sebesar Rp2.608.693.750	Monitoring dan pendampingan proses penyelesaian permasalahan tersebut	Tidak ada
6	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Muhammad Bin Abdurraup melawan: a. PT Angkasa Pura I (Persero) Syamsuddin Noor – Tergugat I b. General Manager PT Angkasa Pura I (Perseo) Kantor Cabang Bandar Udara Syamsudin Noor – Tergugat II  Dengan nomor register perkara 29/Pdt.G/2018/PN.BJB	Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 29/Pdt.G/2018/PN.BJB menyatakan menolak gugatan Penggugat.  Selanjutnya Penggugat mengajukan upaya hukum banding.	Tidak ada	· Kerugian materil: Ganti rugi secara pribadi Tanah 97200 m2 x Rp300.000,- = Rp 29.160.000.000,- Ganti rugi untuk kepentingan umum Tanah 97.200 m2 x Rp250.000,- = Rp 24.300.000.000,- · Kerugian Immateril Rp400.000,- x 12 = Rp4.800.000,-	Monitoring dan pendampingan proses penyelesaian permasalahan tersebut	Tidak ada

No	Pokok perkara	Status penyelesaian	Pengaruh terhadap perusahaan	Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan	Upaya manajemen	SANKSI ADMINISTRASI
7	Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan oleh Sdr. Wawan Zulmawan melawan PT Angkasa Pura I (Persero) dengan nomor register perkara 153/Pdt.Sus. PHI/2019/PN.JKT.PST jo 901 K/Pdt. Sus-PHI/2019	Proses Peradilan telah selesai. Gugatan Sdr. Wawan Zulmawan ditolak	Tidak ada	Tidak ada	Mengikuti putusan pengadilan	Tidak ada
8	Gugatan Kelebihan Bayar terhadap penetapan konsinyasi 103/Pdt.P.K/2017 yang diajukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) melawan Kerto Sertiko dengan nomor perkara 1156/Dju.4/HK.02/VIII/2018	Gugatan PT Angkasa Pura I (Persero) dikabulkan dan uang pengembalian sebesar Rp 589.833.086,- telah diterima.	Tidak ada	Tidak ada	Berkoordinasi dengan BPN dan Pengadilan Negeri Wates	Tidak ada
9	Klaim hutang atas harta kepailitan PT Kalstar Aviation oleh PT Angkasa Pura I (Persero) sebagaimana Putusan Pailit PT Kalstar Aviation Nomor 63/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Proses pelaksanaan lelang harta pailit yang dilakukan kurator	Pencatatan pembayaran hutang Kalstar menjadi pendapatan perusahaan	Tidak ada	Berkoordinasi dengan kurator	Tidak ada
10	Porses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	Proses Perdamaian telah disetujui oleh kreditur	Piutang PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) kepada PT Angkasa Pura I (Persero) dikonversi menjadi saham	Tidak ada	Mengikuti hasil rapat kreditur	Tidak ada
11	Gugatan Wanprestasi oleh PT Aksara Indah melawan PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Register Perkara Nomor 139/Pdt.G/2018/PN.SLEMAN	Putusan sidang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima	Pencatatan pembayaran hutang kalstar menjadi pendapatan perusahaan	Tidak ada	Berkoordinasi dengan kurator	Tidak ada
12	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Iwan Sardjono melawan: a. Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) cq. General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) b. Yusuf Maryoto c. Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru d. Badan Pertanahan Nasional (BPN) cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan cq. Kepala Kantor Pertanahan kota Banjarbaru	Proses penyelesaian berada di Tingkat Banding	Tidak ada	Tidak ada	Mengikuti Putusan Pengadilan	Tidak ada
	Dengan nomor register perkara 19/Pdt.G/2018/PN Bjb jo 25/PDT/2019/PTBJM					

No	Pokok perkara	Status penyelesaian	Pengaruh terhadap perusahaan	Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan	Upaya manajemen	SANKSI ADMINISTRASI
13	<p>Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara:</p> <p>a. Penggugat I : Suwarsi</p> <p>b. Penggugat II : Eko Wijanarko</p> <p>c. Penggugat III : DM.Endah Prihatini</p> <p>d. Penggugat IV : Hekso Leksmo Purnomowati E</p> <p>e. Penggugat V : Nugroho Budiyanto</p> <p>f. Penggugat VI : Rangga Eko Saputro</p> <p>g. Penggugat VII : Diah Putri Anggraini</p> <p>Melawan:</p> <p>a. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam V</p> <p>b. Direktur PT Angkasa Pura I</p> <p>Dengan nomor perkara 24/Pdt.G/2017/PN.Wat jo 62/Pdt/2018/PT YYK</p>	Proses Peradilan telah selesai.	Tidak ada	Tidak ada	Mengikuti Putusan Pengadilan	Tidak ada
14	<p>Penyelidikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 terkait tiket penumpang pesawat kelas ekonomi rute penerbangan domestik berjadwal sebagaimana Surat Plt Deputy Bidang Penegakan Hukum KPPU nomor 257/DH/P/V/21019</p>	Proses penyelidikan telah selesai	Tidak ada	Tidak ada	Mengikuti proses penyelidikan	Tidak ada
15	<p>Penyelidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Paket III Bali Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi</p>	Proses penyelidikan	Tidak ada	Tidak ada	Melakukan pendampingan hukum kepada para personel perusahaan yang diperiksa	Tidak ada
16	<p>Penyelidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Rubber Deposit Removal oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya</p>	Proses penyelidikan telah selesai	Tidak ada	Tidak ada	Melakukan pendampingan hukum kepada para personel perusahaan yang diperiksa	Tidak ada
17	<p>Penyelidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Berkaitan Dengan Jual Beli Rumah Susun di atas Tanah Hak Pengelolaan atas nama PT Angkasa Pura I (Persero)</p>	Proses Penyelidikan	Tidak ada	Tidak ada	Melakukan pendampingan hukum kepada para personel perusahaan yang diperiksa sebagai saksi	Tidak ada

## Sanksi Administratif

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Angkasa Pura I, anggota Dewan Komisaris dan Direksi

oleh otoritas terkait pasar modal, perbankan serta otoritas lainnya.

## Kode Etik

Angkasa Pura I memiliki pedoman perilaku atau kode etik perusahaan sebagai panduan bagi setiap individu yang bekerja di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero). Tujuannya agar perilaku individu

tersebut sesuai dengan budaya perusahaan dan sejalan dengan upaya pencapaian visi dan misi perusahaan, termasuk dalam hal penerapan GCG.

### POKOK-POKOK KODE ETIK

Pedoman kode etik Angkasa Pura I diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.43/OM.04/2014 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT

Angkasa Pura I (Persero). Kode etik Angkasa Pura I mengatur hal-hal yang meliputi:

Bab I	Pendahuluan Memuat dasar pemikiran; sasaran Pedoman Etika Perusahaan; tujuan Pedoman Etika Perusahaan, tanggung jawab pegawai Perusahaan terhadap implementasi Pedoman Etika Perusahaan; dan tanggung jawab para pimpinan Perusahaan terhadap implementasi Pedoman Etika Perusahaan.
Bab II	Visi, Misi, Komitmen dan Budaya Kerja Perusahaan Memuat visi; misi; komitmen Perusahaan; dan budaya kerja Perusahaan.
Bab III	Pedoman Etika Kerja Memuat etika dan perilaku Komisaris, Direksi, dan pegawai; keselamatan, kesehatan serta lingkungan kerja; hak kekayaan intelektual; sistem teknologi informasi dan komunikasi; penyimpanan dokumen; pencatatan dan pelaporan keuangan; pengamanan aktiva Perusahaan; kerahasiaan informasi; reputasi dan citra Perusahaan; benturan kepentingan; suap dan KKN; donasi, jamuan dan hadiah; biaya perjalanan dinas; dan kontribusi aktivitas politik.
Bab IV	Pedoman Etika Usaha Memuat kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan; hubungan Perusahaan dengan pelanggan, pemerintah, mitra kerja, pemasok, kreditur/investor, dan Anak Perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan afiliasi; dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
Bab V	Penerapan Pedoman Perilaku Memuat sosialisasi pedoman perilaku, arahan ringkas pelaksanaan pernyataan kepatuhan insan Perusahaan, saluran pengaduan masalah; dan sanksi terhadap pelanggaran pedoman perilaku.
Bab VI	Penutup



## KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

Secara terus menerus, Angkasa Pura I memastikan bahwa kode etik yang ada dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh Insan Perusahaan, termasuk anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan jajaran pegawai sesuai dengan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Angkasa Pura I Nomor KEP.111/OM.04/2019 dan Nomor KEP.03/DK.API/2019 tentang Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) PT Angkasa Pura I (Persero) maka setiap Insan PT Angkasa Pura I (Persero) setiap

tahunnya menandatangani pernyataan telah menerima, memahami dan setuju untuk mematuhi Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*). Demi mendukung tata kelola perusahaan yang baik, setiap pemasok yang akan bekerja sama dengan Angkasa Pura I juga diwajibkan menandatangani Pakta Integritas sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan perusahaannya ke dalam sistem *Vendor Management System* (VMS) Angkasa Pura I.

## PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Angkasa Pura I menjamin seluruh Insan Perusahaan di setiap tingkatan/jenjang memahami dan menerapkan kode etik melalui pelaksanaan sosialisasi kode etik. Setiap Insan Perusahaan memperoleh pengetahuan terkait kode etik Perusahaan melalui program

orientasi pegawai baru, pembagian buku saku pegawai, penyebaran informasi terkait Kode Etik Perusahaan pada *website* internal, serta melalui kegiatan dan media lainnya yang dimiliki Perusahaan.

## UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Upaya penerapan dan penegakan kode etik diselenggarakan melalui berbagai pendekatan, misalnya melalui mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran. Jika terdapat kecurigaan maupun dugaan pelanggaran terhadap kode etik, setiap individu di Angkasa Pura I wajib untuk melaporkannya kepada Direksi, Dewan Komisaris, maupun pimpinan unit kerja yang membidangi personalia. Dalam hal terdapat pelaporan, Angkasa Pura I berkomitmen melindungi dan menjamin kerahasiaan pelapor pelanggaran.

Setiap pelanggaran terhadap kode etik Perusahaan yang terbukti akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan. Pemberian sanksi dilakukan melalui proses yang objektif, independen, berjenjang, dan tidak bersifat diskriminatif. Penegakan kode etik dan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin pegawai Perusahaan juga dilaksanakan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK) dan Panitia Pembinaan dan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai (P4DP).

## JENIS SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Tabel berikut memaparkan berbagai jenis sanksi yang diberikan kepada pelanggar kode etik sesuai tingkatan kesalahannya:

## Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik di PT Angkasa Pura I (Persero)

Tingkat Sanksi	Jenis Sanksi
Disiplin Ringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peringatan/teguran lisan</li> <li>Peringatan/teguran tertulis</li> <li>Pernyataan tidak puas tertulis</li> <li>Penundaan kenaikan gaji berkala</li> </ul>
Disiplin Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.</li> <li>Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.</li> <li>Penurunan kelas jabatan pada kelas jabatan setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun</li> </ul>
Disiplin Berat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembebasan dari jabatan struktural dan tidak ditempatkan di jabatan struktural lainnya.</li> <li>Penurunan pangkat pada pangkat 2 (dua) tingkat lebih rendah atau lebih.</li> <li>Penurunan kelas jabatan pada kelas jabatan 2 (dua) tingkat atau lebih.</li> <li>Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai.</li> <li>Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai.</li> </ul>

## PELANGGARAN KODE ETIK TAHUN 2019

Selama tahun 2019, Angkasa Pura I telah menindak 13 pelanggaran atas kode etik. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2018, yang tercatat sebanyak 7 kasus.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi atas pelanggaran kode etik di Perusahaan telah dilakukan dan diharapkan dengan ketegasan yang telah dilakukan akan lebih meningkatkan kepatuhan insan Perusahaan.

## Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik di PT Angkasa Pura I (Persero)

Tingkat Sanksi	Jumlah Pelanggaran	
	2019	2018
Disiplin Ringan	3	-
Disiplin Sedang	1	1
Disiplin Berat	13	6
Jumlah	17	7

Tindak lanjut yang dilakukan Angkasa Pura I terkait dengan pelanggaran kode etik bermacam-macam sesuai dengan jenis pelanggarannya. Pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) kasus yang berakhir dengan pemecatan, 12 (dua belas) kasus ditindaklanjuti dengan penurunan kelas jabatan

pada kelas jabatan 2 (dua) tingkat atau lebih, 1 (satu) kasus ditindaklanjuti dengan penurunan kelas jabatan pada kelas jabatan setingkat lebih rendah, 3 (tiga) kasus ditindaklanjuti dengan surat peringatan.

# Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System* atau WBS) PT Angkasa Pura I (Persero) diatur melalui Keputusan Direksi No. KEP.192/PG.01/2016 yang kemudian diperbaharui melalui Keputusan Direksi No. KEP.69/PG.01/2018. Sosialisasi WBS dilakukan melalui video infografis dengan tujuan agar timbul kesadaran terkait *Whistleblowing System* dan termotivasi untuk mencegah tindak kecurangan dalam Perusahaan.

Tujuan penerapan WBS pada Angkasa Pura I yaitu untuk:

1. Mewujudkan prinsip GCG.
2. Menghindari tindak kecurangan (*fraud*), pelanggaran hukum dan pelanggaran etika, serta pelanggaran lainnya, sebab *Whistleblowing System* mampu mendorong tingkat pendeteksian dan pelaporan potensi tindakan-tindakan pelanggaran.
3. Mengurangi risiko yang dihadapi Angkasa Pura I akibat terjadinya segala bentuk pelanggaran.
4. Menyediakan mekanisme untuk menangani masalah pelanggaran secara internal, agar tidak menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
5. Mengungkapkan pelanggaran di Angkasa Pura I yang tidak sesuai dengan standar etika dan hukum.
6. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi pemangku kepentingan serta Insan Angkasa Pura I untuk melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian Perusahaan, baik finansial maupun non-finansial, yang dapat merusak citra dan keberlangsungan usaha Angkasa Pura I.

## PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

WBS berhak dimanfaatkan oleh setiap insan Angkasa Pura I tanpa memandang level jabatan dan diskriminasi gender. Pelapor dapat mengakses WBS secara *online* atau menyerahkan *hardcopy* dokumen laporan atau barang bukti kepada:



### Compliance Department

PT Angkasa Pura I (Persero)

Kantor Pusat, Jakarta

Grha Angkasa Pura I

Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B. 12 Kav 2

Gunung Sahari Selatan, Kemayoran

Jakarta Pusat, 10610

Indonesia

Website: [wbs.ap1.co.id](http://wbs.ap1.co.id)

Laporan melalui WBS dapat mencantumkan identitas maupun tidak (anonim), namun pengaduan wajib memberikan informasi, bukti, atau dugaan dengan jelas. Unsur-unsur laporan yang wajib dipenuhi yaitu penjelasan

mengenai dugaan pelanggaran, lokasi terjadinya pelanggaran, waktu pelanggaran dilakukan, dan pihak-pihak yang diduga terlibat melakukan pelanggaran.

## Akses WBS Online PT Angkasa Pura I (Persero)



## PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Jenis-jenis pengaduan yang dapat dilaporkan melalui WBS yaitu:

1. Penyalahgunaan fasilitas Perusahaan.
2. Pengancaman.
3. Penyelewengan uang Perusahaan.
4. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan atau kepentingan lain di luar Perusahaan.
5. Penggelapan aset Perusahaan.
6. Penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi.
7. Pelanggaran etika dan perbuatan asusila.
8. Pembocoran rahasia Perusahaan.
9. Pemerasan.
10. Pencurian.
11. Penipuan.
12. Kecurangan.
13. Pelanggaran disiplin.
14. Benturan kepentingan.
15. Korupsi.
16. Kolusi.
17. Nepotisme.

## PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Angkasa Pura I menjamin perlindungan bagi pelapor dan pihak terlapor yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.212/HK.01.01/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.69/PG.012018 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing*

*System*) Angkasa Pura I. Jaminan perlindungan diharapkan dapat mendorong keberanian untuk melaporkan dugaan pelanggaran di Perusahaan, sehingga WBS dapat bermanfaat secara efektif.

Bentuk perlindungan Angkasa Pura I bagi pelapor

yaitu antara lain jaminan kerahasiaan identitas dan isi laporan, serta jaminan keamanan dari perlakuan yang mengancam atau merugikan. Pelapor dilindungi dari tindakan pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, intimidasi, pelecehan, atau diskriminasi, serta dilindungi dari tindakan lain yang merugikan pribadi pelapor. Perlindungan bagi pelapor dilakukan dengan mengingat azas kerahasiaan antara pelapor dengan Perusahaan. Apabila pelapor membocorkan kerahasiaan terkait pelapor, terlapor, maupun informasi laporan,

maka Angkasa Pura I tidak lagi berkewajiban untuk menjamin kerahasiaan dan perlindungan yang menjadi hak bagi pelapor.

Di sisi lain, pihak terlapor juga memperoleh jaminan atas kerahasiaan identitas selama dugaan pelanggaran belum terbukti. Pihak terlapor juga diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan dan memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemukan.

## PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

*Whistleblowing System* dikelola Tim Pengelola *Whistleblowing System* yang dibentuk oleh Direksi melalui atas Keputusan Direksi Angkasa

Pura I Nomor: KEP.212/HK.01.01/2019, yang terdiri dari:

No.	Susunan Anggota	Kedudukan Dalam Tim
A	Dewan Komisaris	Pengawas
	Direksi	Penanggung Jawab
<b>Pelaksana</b>		
B	<i>Vice President Compliance and Risk Management</i>	Ketua
	<i>Compliance Senior Manager</i>	Wakil Ketua
	<i>Compliance Officer</i>	Administrator

Panitia Pembinaan dan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai (P4DP) Angkasa Pura I memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sanksi pelanggaran, dengan kewenangan sebagai berikut:

### 1. Dugaan Pelanggaran oleh Pegawai Angkasa Pura I

Penanganan laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh Pegawai PT Angkasa Pura I (Persero), termasuk Tim Pengelola *Whistle Blowing System* yang mengelola WBS menjadi kewenangan Direktur Utama.

### 2. Dugaan Pelanggaran oleh Gugus Tugas, Pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan Pegawai *Outsourcing* Angkasa Pura I

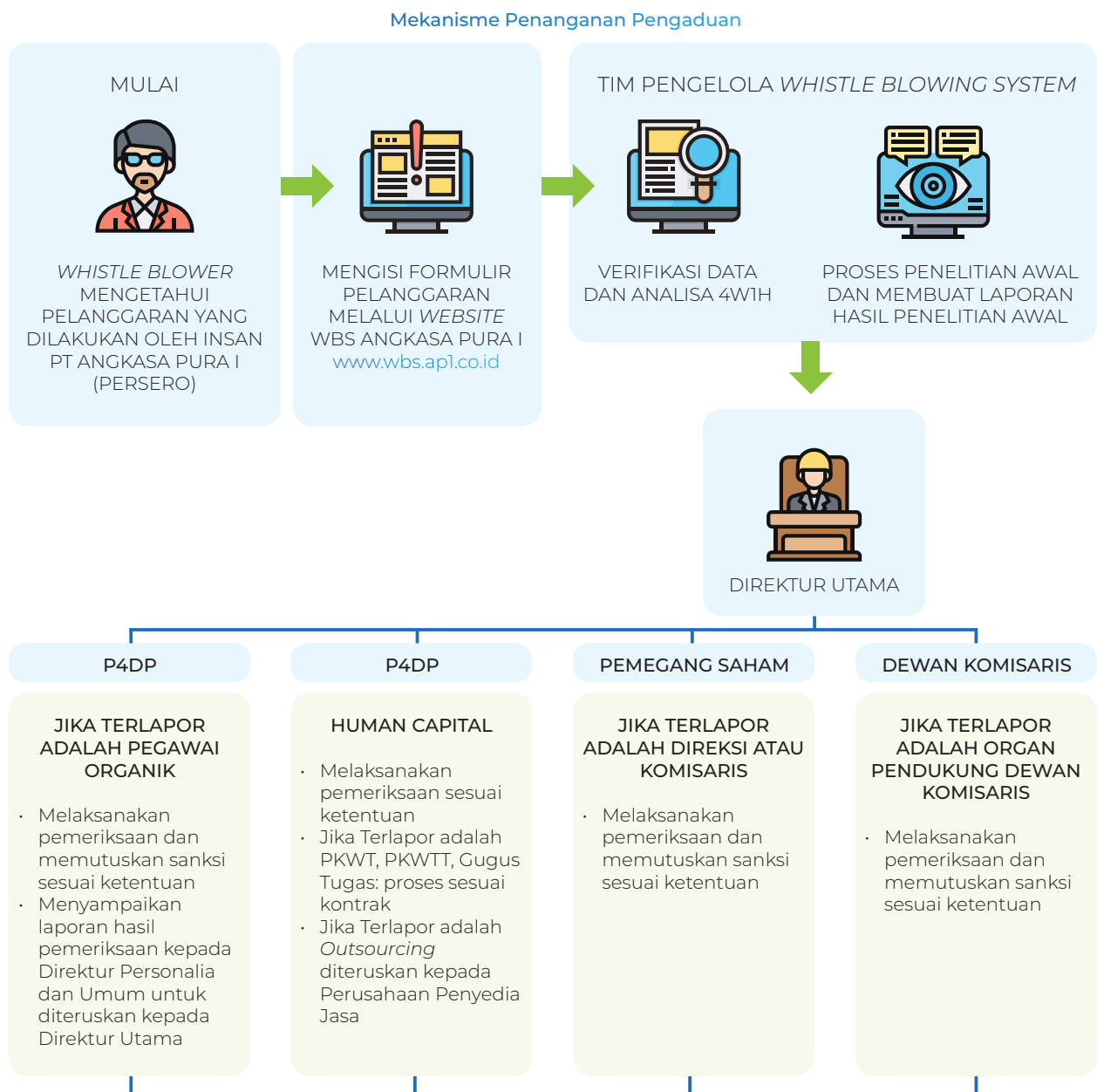
Penanganan laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh Gugus Tugas, PKWT, PKWTT, dan Pegawai *Outsourcing* Angkasa Pura I menjadi kewenangan Direktur Utama yang diteruskan kepada Vice President Human Capital agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

**3. Dugaan Pelanggaran oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris.**

Laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris, maka penanganannya disampaikan kepada Pemegang Saham/ Kementerian BUMN. Laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh anggota Direksi dapat ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris sesuai kewenangannya, sesuai RUPS dan Anggaran Dasar Perusahaan.

**4. Dugaan Pelanggaran oleh Organ Pendukung Dewan Komisaris.**

Penanganan laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh Organ Pendukung Dewan Komisaris disesuaikan dengan ketentuan terkait.





## HASIL PENANGANAN PENGADUAN

Pada tahun 2019, Angkasa Pura I tidak menerima pengaduan baru melalui *whistleblowing system*. Tidak ada proses pengaduan yang terbawa dari tahun sebelumnya.

Pengaduan Melalui WBS PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2017-2019

Tingkat Sanksi	2019	2018	2017
Jumlah pengaduan dari tahun lalu, per 31 Januari	0	0	0
Pengaduan yang masuk pada tahun buku	0	0	0
Pengaduan yang diproses, sepanjang tahun:	0	0	0
· Pengaduan yang diproses dan selesai, per 31 Desember			
· Pengaduan yang belum selesai diproses, per 31 Desember			
Jumlah pengaduan yang dilanjutkan tahun berikutnya	0	0	0



# Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

PT Angkasa Pura I (Persero) telah menerapkan 8 (delapan) prinsip pengelolaan Perusahaan sesuai Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai berikut:

Prinsip	Rekomendasi	Implementasi	Status
<b>Prinsip 1</b>			
Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	1. Cara atau prosedur teknis pengumpulan suara ( <i>voting</i> ) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Angkasa Pura I telah memiliki prosedur teknis pengumpulan suara yang terdapat dalam tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham.	<i>Comply</i>
	2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Hadir dalam RUPS Tahunan.	Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris hadir dalam RUPS.	<i>Comply</i>
	3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web paling sedikit 1 tahun.	Angkasa Pura I menyediakan Ringkasan Risalah RUPS dalam <i>website</i> Perseroan dalam tautan <a href="https://apl.co.id/id/hubungan-investor/rups">https://apl.co.id/id/hubungan-investor/rups</a>	<i>Comply</i>
<b>Prinsip 2</b>			
Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	1. Memiliki kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor.	Angkasa Pura I memiliki kebijakan komunikasi kepada Investor melalui <i>investor gathering</i> dan saat kegiatan <i>site visit</i> .	<i>Comply</i>
	2. Mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dalam situs web.	Situs <i>website</i> Angkasa Pura I memuat informasi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham dalam rangka menjalin komunikasi yang baik	<i>Comply</i>
<b>Prinsip 3</b>			
Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan Kondisi Perusahaan.	Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 komposisi Dewan Komisaris, PT Angkasa Pura I (Persero) harus memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen	<i>Comply</i>
	2. Penentuan Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Berdasarkan kebijakan Pemegang Saham, Dewan Komisaris telah dipilih dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, pengalaman serta kondisi, dan kompleksitas bisnis Angkasa Pura I.	<i>Comply</i>

Prinsip	Rekomendasi	Implementasi	Status
<b>Prinsip 4</b>			
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Angkasa Pura I memiliki kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris yang menjadi pedoman untuk menilai kinerja perusahaan. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dapat dilihat dalam laporan tahunan ini.	<i>Comply</i>
	2. Kebijakan penilaian sendiri diungkapkan dalam Laporan Tahunan.	Kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) telah dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs <i>website</i> Angkasa Pura I.	<i>Comply</i>
	3. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan pengunduran diri apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Alasan dan tata cara pemberhentian Dewan Komisaris di Angkasa Pura I dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Berdasarkan peraturan tersebut, alasan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris salah satunya adalah adanya Pemberhentian sewaktu-waktu, dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara dan atau dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.	<i>Comply</i>
	4. Dewan Komisaris atau KNR menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.	Dewan Komisaris Angkasa Pura I telah menyusun kebijakan terkait nominasi dan remunerasi.	<i>Comply</i>
<b>Prinsip 5</b>			
Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	1. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan serta efektivitas pengambilan keputusan.	Penentuan jumlah Direksi Perseroan mengacu pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dimana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, yang 1 (satu) di antaranya diangkat menjadi Direktur Utama.	<i>Comply</i>
	2. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Angkasa Pura I telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman komposisi Direksi sesuai dengan ketentuan keberagaman komposisi Direksi berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.	<i>Comply</i>

Prinsip	Rekomendasi	Implementasi	Status
Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	3. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan dalam Perseroan adalah Direktur Keuangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup di bidang akuntansi dan keuangan sebagaimana dapat dilihat dalam riwayat jabatan dan pendidikan Direksi pada bagian Profil Direksi.	Comply
Prinsip 6			
Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Direksi.	Direksi telah memiliki kebijakan Penilaian Sendiri yang tercantum dalam bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.	Comply
	2. Kebijakan penilaian sendiri diungkapkan dalam Laporan Tahunan.	Hasil Penilaian Sendiri Direksi diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan dalam bagian Tata Kelola Perusahaan.	Comply
	3. Direksi mempunyai kebijakan pengunduran diri apabila terlibat kejahatan keuangan.	Berdasarkan Anggaran Dasar Angkasa Pura I jo. Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014, setiap Anggota Direksi yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Direksi yang disebutkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 termasuk di dalamnya adalah tidak terlibat kejahatan keuangan maka jabatannya sebagai Direksi akan batal demi hukum.  Dalam hal Anggota Direksi tersebut mengundurkan diri maka akan diputuskan melalui mekanisme RUPS.	Comply
Prinsip 7			
Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan Melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	1. Memiliki Kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>Insider Trading</i> .	Saham Angkasa Pura I dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia. PT Angkasa Pura I (Persero) belum menerbitkan saham sehingga bukan merupakan Perusahaan Terbuka dan tidak memiliki potensi adanya <i>insider trading</i> .	Comply
	2. Kebijakan penilaian sendiri diungkapkan dalam Laporan Tahunan.	Dalam rangka implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> ), PT Angkasa Pura I (Persero) memiliki beberapa kebijakan anti korupsi dan anti fraud, melalui Pedoman Etika Perusahaan ( <i>Code of Conduct</i> ), <i>monitoring</i> atas Laporan harta kekayaan pejabat Negara (LHKPN), program Pengendalian Gratifikasi, serta sistem Pelaporan Pelanggaran ( <i>Whistleblowing System</i> ).	Comply

Prinsip	Rekomendasi	Implementasi	Status
Prinsip 7			
Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan Melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	3. Memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok dan vendor.	Salah satu prinsip di Pengadaan Barang/Jasa di Angkasa Pura I merupakan transparan, sehingga semua ketentuan dan informasi, termasuk syarat administrasi, teknis, dan harga, tata cara evaluasi, serta tata cara penetapan pemenang Pengadaan Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi semua Penyedia Barang/Jasa yang berminat. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam situs <i>electronic procurement</i> Angkasa Pura I, yaitu <a href="https://eproc.angkasapura1.co.id">https://eproc.angkasapura1.co.id</a> , dimana semua vendor dapat melihat pengumuman lelang di kolom info lelang. Selain itu, untuk vendor yang memiliki kualifikasi dan klasifikasi yang sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh Angkasa Pura I dan vendor tersebut telah secara aktif terdaftar dalam <i>Vendor Management System (VMS)</i> , maka secara otomatis vendor tersebut dapat terundang. Hal tersebut agar Angkasa Pura I dapat memperoleh barang/jasa yang diperlukan dengan harga kompetitif dan kualitas yang baik.	Comply
	4. Memiliki kebijakan pemenuhan hak-hak kreditur.	Dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan, Angkasa Pura I telah meminjam kepada bank dan masyarakat melalui penerbitan Obligasi I dan Sukuk Ijarah I pada tahun 2016. Kewajiban-kewajiban yang timbul dari peminjaman tersebut telah dipenuhi melalui pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu.	Comply
	5. Memiliki kebijakan sistem <i>Whistle Blowing</i> .	Angkasa Pura I telah memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran ( <i>Whistle Blowing System</i> ) berfungsi sebagai sarana dalam pencegahan, pengungkapan pelanggaran atau tindak kecurangan dalam Perusahaan dan telah dituangkan pada Keputusan Direksi Angkasa Pura I Nomor: KEP.192 PG.01/2016 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran ( <i>Whistleblowing System</i> ). Sistem Pelaporan Pelanggaran ( <i>Whistleblowing System</i> ) dapat diakses melalui <i>website</i> sehingga mempermudah pegawai maupun <i>stakeholder</i> Angkasa Pura I dalam pelaporan dugaan pelanggaran yang terjadi.	Comply
	6. Memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang Direksi dan Karyawan.	Angkasa Pura I memiliki kebijakan remunerasi berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.	Comply

Prinsip	Rekomendasi	Implementasi	Status
Prinsip 8			
Meningkatkan Keterbukaan Informasi.	1. Memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs <i>web</i> sebagai media keterbukaan informasi.	Angkasa Pura I juga aktif dalam berbagai sosial media sebagai media keterbukaan informasi dan promosi produk. Selain itu kita juga menggunakan sistem <i>mailing list</i> sebagai media keterbukaan informasi dan komunikasi kepada investor.	<i>Comply</i>
	2. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan, paling sedikit 5% selain Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Angkasa Pura I saat ini belum menerbitkan saham, sehingga Laporan Tahunan Angkasa Pura I tidak perlu mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham dimaksud.	<i>Comply</i>









# Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlibat dalam **pemberdayaan dan pengembangan ekonomi, sosial masyarakat, dan lingkungan sekitar** melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta kegiatan lain terkait operasi yang **adil, ketenagakerjaan, HAM, dan lingkungan hidup**. Hal ini dilakukan untuk senantiasa memberi **nilai tambah bagi pemangku kepentingan**.



# Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial

Selain menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG), PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai badan usaha juga melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Hal tersebut dijalankan sesuai dengan mandat UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pada praktiknya, pelaksanaan TJSL di Angkasa Pura I dijalankan secara strategis dengan memperhatikan isu dan pemangku kepentingan terkait.

Kinerja TJSL di lingkungan Angkasa Pura I ditangani oleh Unit Corporate Social Responsibility (CSR) yang bertanggungjawab kepada Direktur SDM dan Umum. Meski demikian, seluruh bagian yang ada di Angkasa Pura I tetap berperan serta dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial sesuai dengan bidang masing-masing terkait kegiatan operasional perusahaan.

## KOMITMEN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

PT Angkasa Pura I (Persero) memiliki komitmen pada tanggung jawab sosial yang dituangkan pada berbagai kebijakan terkait aspek sosial dan lingkungan, antara lain sebagai berikut:

- Surat Keputusan Direksi Angkasa Pura I No. KEP.32/M.01.01/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bandar Udara di PT Angkasa Pura I (Persero).
- Instruksi Direksi INST.DU.04/HK.01.02/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Langkah-Langkah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Bandar Udara PT Angkasa Pura I (Persero).
- Instruksi Direksi INST.DU.18/HK.01.02/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pengelolaan Limbah dan Zat Kimia/Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Bandar Udara PT Angkasa Pura I (Persero).
- Surat Keputusan Direksi Angkasa Pura I No. KEP.238/KU.13/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero).
- Keputusan Direksi No. KEP.121/KP.30/2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Fasilitas Pejabat, Perjalanan Dinas, dan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai PT Angkasa Pura I (Persero).
- Keputusan Direksi No. KEP.08/KP.10.43/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Manual Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Korporat PT Angkasa Pura I (Persero).
- Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.103/KU.13/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero).
- Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.239/KU.12/2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal Perubahan Atas Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.103/KU.12/2017 tentang Pedoman Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero).

## METODE DAN RUANG LINGKUP *DUE DILIGENCE* TERHADAP DAMPAK SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS PERUSAHAAN

Kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan Angkasa Pura I dilaksanakan untuk memberi dampak positif dan mengurangi dampak negatif dari kegiatan Perusahaan kepada pemangku kepentingan. Selain itu, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan berorientasi pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang juga mendukung keberlanjutan bisnis Perusahaan. Angkasa Pura I berupaya menilai dampak kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui kegiatan berikut:

- Survei *engagement* pegawai;
- Survei kepuasan pelanggan; dan
- *Focused Group Discussion* (FGD)

Perumusan program tanggung jawab sosial perusahaan diawali dengan proses riset oleh Unit CSR agar program yang dihasilkan relevan dan tepat sasaran serta mencakup seluruh pemangku

kepentingan yang terkait operasi bisnis pengelola bandara. Pada proses riset, perusahaan menggunakan pendekatan partisipatif di mana seluruh pemangku kepentingan dilibatkan pada tahap *hearing* melalui mekanisme *focus group discussion* untuk diidentifikasi masalah dan dibuatkan solusi programnya.

Pada proses riset awal ini, perusahaan juga melakukan *review* terhadap peraturan dan norma sosial yang berlaku untuk dijadikan dasar dan panduan utama dalam membuat program tanggung jawab sosial perusahaan, baik peraturan di bidang operasional bandara, pengelolaan lingkungan, hak atas tanah, hak pekerja, kesetaraan gender, hingga ke norma budaya setempat.

## PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERDAMPAK ATAU BERPENGARUH PADA DAMPAK DARI KEGIATAN PERUSAHAAN

Dalam melaksanakan TJSL, Angkasa Pura I berupaya untuk membangun hubungan harmonis dengan para pemangku kepentingan. Untuk itu, PT Angkasa Pura I (Persero) melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan bisnis Perusahaan sesuai dengan kepentingan dan kompetensi masing-masing. Pelibatan pemangku kepentingan dilaksanakan Angkasa Pura I sesuai dengan hasil pemetaan pemangku kepentingan dan topik penting yang menjadi perhatian masing-masing pemangku kepentingan.

Angkasa Pura I mengidentifikasi pemangku kepentingan berdasarkan *Stakeholder Engagement Standard* dari AA1000 versi tahun 2015, yakni sebagai berikut:

1. *Dependency*  
pemangku kepentingan yang teridentifikasi jika Perusahaan memiliki ketergantungan pada seseorang atau sebuah organisasi, atau sebaliknya.
2. *Responsibility*  
pemangku kepentingan yang teridentifikasi ketika Perusahaan memiliki tanggung jawab legal, komersial, atau etika terhadap seseorang atau sebuah organisasi.
3. *Tension*  
pemangku kepentingan yang teridentifikasi jika seseorang atau sebuah organisasi membutuhkan perhatian Perusahaan yang signifikan terkait isu ekonomi, sosial, atau lingkungan.

4. *Influence*

pemangku kepentingan yang teridentifikasi jika seseorang atau sebuah organisasi memiliki pengaruh terhadap Perusahaan atau strategi atau kebijakan pemangku kepentingan lain.

5. *Diverse Perspective*

pemangku kepentingan yang teridentifikasi jika seseorang atau sebuah organisasi memiliki pandangan yang berbeda yang

dapat memengaruhi situasi dan mendorong adanya aksi yang tidak ada sebelumnya.

6. *Proximity*

pemangku kepentingan yang teridentifikasi jika seseorang atau sebuah organisasi memiliki kedekatan geografis dan operasional dengan Perusahaan

Berdasarkan pendekatan tersebut di atas, maka Angkasa Pura I memetakan kepentingan dan aktor pemangku kepentingan sebagai berikut.



## Pelanggan

**Basis Penetapan / Identifikasi**

*Dependency, Responsibility, Tension, Influence, Proximity*

**Metode Pelibatan**

- Website dan *frontline information*
- Kunjungan langsung
- Layanan *call center*
- Survei kepuasan nasabah

**Frekuensi**

- Sesuai kebutuhan, tersedia setiap hari
- Sesuai kebutuhan, dapat dilakukan setiap saat dengan perencanaan
- Setahun sekali

**Topik/Masalah yang Muncul**

- Informasi beragam produk dan jasa
- Layanan pengaduan/ keluhan dan solusi
- Mendapatkan kepuasan layanan



## Pemegang Saham / Pemerintah

**Basis Penetapan / Identifikasi**

*Dependency, Responsibility, Influence, Proximity*

**Metode Pelibatan**

Pelaporan kinerja RUPS

**Frekuensi**

Setiap kuartal

- RUPST RKAP
- RUPST Evaluasi Kinerja Tahun Buku dan Penetapan Kinerja Keuangan
- RUPSLB

**Topik/Masalah yang Muncul**

- Kinerja keuangan
- Kinerja non-keuangan
- Kinerja sepanjang tahun tentang tata kelola, kinerja keuangan, non-keuangan, dan lain-lain



## Regulator

**Basis Penetapan / Identifikasi**

*Dependency, Responsibility, Tension, Influence, Diverse Perspective, Proximity*

**Metode Pelibatan**

- Rapat dengar pendapat
- Rapat koordinasi

**Frekuensi**

Sesuai kebutuhan, minimal satu tahun sekali

**Topik/Masalah yang Muncul**

- Pengurusan izin usaha dan regulasi
- Koordinasi terkait tata kelola bandar udara dan lain-lain

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



**Basis Penetapan / Identifikasi**

*Dependency, Responsibility, Tension, Influence, Diverse Perspective, Proximity*

**Metode Pelibatan**

Pelaporan pelaksanaan kepatuhan dan notifikasi pada OJK

**Frekuensi**

Setiap saat, minimal setahun sekali saat pelaporan tahunan

**Topik/Masalah yang Muncul**

Informasi tentang kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Kreditur



**Basis Penetapan / Identifikasi**

*Dependency, Responsibility, Tension, Influence, Diverse Perspective, Proximity*

**Metode Pelibatan**

- Letter of Credit
- Perjanjian Akad Kredit

**Frekuensi**

Sesuai kebutuhan, minimal setahun sekali melalui Laporan Tahunan

**Topik/Masalah yang Muncul**

- Sosialisasi kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan kepegawaian
- Kesetaraan kesempatan kerja dan jenjang karir
- Pengembangan karir, pelatihan, dan lain-lain
- Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja

Rekanan



**Basis Penetapan / Identifikasi**

*Dependency, Responsibility, Tension, Proximity*

**Metode Pelibatan**

Kontrak kerja

**Frekuensi**

Sesuai kebutuhan, minimal setahun sekali

**Topik/Masalah yang Muncul**

- Proses pengadaan yang objektif
- Kerja sama saling menguntungkan, transparan, dan adil
- Penjelasan lingkup pekerjaan
- Ketentuan tentang penagihan biaya pekerjaan

Masyarakat



**Basis Penetapan / Identifikasi**

*Dependency, Responsibility, Tension, Influence, Diverse Perspective, Proximity*

**Metode Pelibatan**

- Kerja sama strategis untuk menjalankan program-program CSR, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan
- Pertemuan dengan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan dan di lingkungan kampus

**Frekuensi**

Sesuai kebutuhan, dapat dilakukan setiap saat, minimal setahun sekali

**Topik/Masalah yang Muncul**

- Sosialisasi dan pelaksanaan program PKBL/CSR
- Cara mengoptimalkan pencapaian program PKBL/CSR
- Informasi tentang kegiatan perusahaan



## Media

### Basis Penetapan / Identifikasi

*Tension, Influence, Diverse Perspective*

### Metode Pelibatan

- Press release
- Press conference
- Media gathering
- Kunjungan ke kantor media

### Frekuensi

Sesuai kebutuhan, dapat dilakukan setiap saat, minimal setahun sekali

### Topik/Masalah yang Muncul

- Kinerja nonkeuangan
- Kinerja dan dampak dari kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan
- Informasi tentang kegiatan perusahaan
- Informasi terbaru terkait usaha dan produk yang perlu diketahui publik

## ISU-ISU PENTING SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN TERKAIT DAMPAK KEGIATAN PERUSAHAAN

Angkasa Pura I melaksanakan uji materialitas terkait isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menjadi perhatian khusus dari para pemangku kepentingan internal dan eksternal. Uji materialitas ini dilaksanakan setiap tahunnya melalui survei dan FGD yang dihadiri antara lain oleh pegawai Angkasa Pura I dari berbagai divisi,

pelanggan, pemasok/rekanan, media masa, dan sebagainya. Pada tahun 2019, dari hasil survei dan FGD yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2019 diperoleh beberapa topik material yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan, yakni:

### Ekonomi

1. Kinerja Ekonomi
2. Keberadaan Pasar
3. Tata Kelola
4. Kinerja Operasional



### Lingkungan

1. Energi
2. Air
3. Emisi
4. Limbah
5. Kualitas Suara



### Sosial

1. Ketenagakerjaan
2. Lingkungan kerja
3. Komunitas lokal
4. Kesehatan dan keselamatan pelanggan
5. Pemasaran dan pelabelan
6. Ketaatan dalam bidang sosial ekonomi



Hasil dari identifikasi topik material tersebut digunakan sebagai dasar penentuan strategi dan program kerja Angkasa Pura I untuk menangani isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan di masa mendatang. Selain itu, upaya ini juga merupakan salah satu wujud komitmen Angkasa Pura I

dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam merumuskan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan sejalan dengan keberlangsungan bisnis Perusahaan.

## KINERJA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN YANG MERUPAKAN KEWAJIBAN MAUPUN YANG MELEBIHI KEWAJIBAN

PT Angkasa Pura I (Persero) telah mematuhi kewajiban hukum dengan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia maupun norma-norma perilaku internasional. Meski demikian, program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) tidak sebatas untuk pemenuhan

kewajiban regulasi, tetapi secara sukarela melebihi kewajiban yang relevan dengan bisnis PT Angkasa Pura I (Persero).

Kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan PT Angkasa Pura I (Persero) sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang Merupakan Kewajiban		
Isu	Kegiatan/Program	Dasar Regulasi
Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperolehnya izin lingkungan dari studi AMDAL pembangunan bandar udara baru dan pengembangan bandar udara, yaitu izin lingkungan pengembangan Bandara Sam Ratulangi Manado dan Bandara SAMS Sepinggang Balikpapan</li> <li>Monitoring dan pelaporan lingkungan hidup bandar udara dan Kantor Pusat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).</li> </ul>
Keselamatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 166 Kriteria di 13 cabang/bandara Angkasa Pura I</li> <li>Pelaksanaan pengawasan dan pengukuran kinerja keselamatan kerja di seluruh bandara Angkasa Pura I</li> <li>Pembinaan K3 melalui program <i>safety briefing</i>, sosialisasi dan pelatihan K3.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja</li> </ul>
Keselamatan Bandara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi <i>Safety Management System</i> di seluruh bandara Angkasa Pura I</li> <li>Penetapan <i>Safety Target</i> dan <i>Safety Performance Indicator</i> di seluruh bandara Angkasa Pura I</li> <li>Pelaksanaan pengawasan dan pengukuran kinerja keselamatan bandara di seluruh bandara Angkasa Pura I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 62 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 (<i>Civil Aviation Safety Regulation Part 19</i>) tentang Sistem Manajemen Keselamatan (<i>Safety Management System</i>)</li> </ul>

## Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang Melebihi Kewajiban

Isu	Kegiatan/Program
Lingkungan	<p><b>Pelestarian Alam</b></p> <p>Sebagai bentuk tanggung jawab Angkasa Pura I terhadap lingkungan, telah dilakukan suatu kajian habitat yang hasilnya digunakan untuk memitigasi dampak kegiatan operasi penerbangan dengan melakukan kerja sama dan sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait untuk menyediakan habitat diluar wilayah bandara terutama untuk tumbuhan dan hewan endemis atau dilindungi. Salah satu contoh yang dilakukan adalah di Banjarmasin dan Surabaya dengan memanfaatkan hutan kota terdekat dan pemberdayaan masyarakat serta LSM.</p>
Kesehatan	<p><b>Pelayanan Kesehatan Keliling</b></p> <p>Merupakan program Angkasa Pura I untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil dan menyusui dan anak-anak, termasuk bayi dan balita. Program ini dilaksanakan di kantor cabang dan meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan, pengobatan gratis, dan pemberian makanan tambahan.</p>
Pendidikan	<p><b>Program Beasiswa Pendidikan Kebandarudaraan</b></p> <p>Angkasa Pura I memberikan beasiswa penuh kepada 30 siswa terpilih untuk menjalani pendidikan jenjang Diploma III dengan konsentrasi pendidikan kebandarudaraan. Para peserta merupakan siswa/siswi lulusan SMA dan SMK yang direkomendasikan oleh sekolah masing-masing melalui Dinas Pendidikan setempat.</p>

# Operasi yang Adil

## KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

PT Angkasa Pura I (Persero) memiliki Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) yang menjadi landasan komitmen dan kebijakan Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha secara beretika dan melaksanakan operasi yang berkeadilan (*fair operating practices*). Beberapa aspek yang tercakup di dalamnya yaitu aspek anti korupsi, persaingan sehat, kepatuhan kepada hukum, serta pengaturan tentang keterlibatan dalam aktivitas politik.

Lebih jauh lagi, pada praktiknya, Pedoman Etika Perusahaan mengatur perilaku beretika berikut:

- Dalam hubungan Perusahaan dengan pegawai dan tenaga kerja di luar pegawai di Perusahaan, serta hubungan industrial, Angkasa Pura I senantiasa menjaga dedikasi dan loyalitas sumber daya manusia sebagai aset penting Perusahaan. Angkasa Pura I senantiasa mendukung pengembangan kualitas sumber daya alam agar cakap, terlatih, dan berprestasi sesuai dengan kebutuhan visi, misi, serta program jangka panjang Perusahaan.
- Dalam hubungan Perusahaan dengan pengguna jasa, Angkasa Pura I menerapkan prinsip terbuka dalam bersaing, integritas, transparan, adil, dan akuntabel untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.
- Dalam hubungan Perusahaan dengan Pemerintah, Angkasa Pura I senantiasa mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hubungan Perusahaan dengan mitra usaha, Angkasa Pura I senantiasa menghormati hak-hak mitra usaha dan mitra strategis, di samping menuntut kewajibannya.





## RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASI YANG ADIL

Ruang lingkup dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan operasi yang berkeadilan (*fair operating practices*) di lingkungan kerja Angkasa Pura I mencakup hal-hal sebagai berikut:

### 1. Dukungan dan tindakan pencegahan korupsi melalui:

- Penetapan kebijakan gratifikasi dan anti-korupsi;
- Sosialisasi dan implementasi *good corporate governance, code of conduct*, kebijakan gratifikasi, dan anti korupsi;
- Saluran mekanisme pelaporan gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- Aktif berperan pada kegiatan-kegiatan yang menyuarakan akan budaya anti-korupsi.

### 2. Persaingan yang jujur dan adil (*fair competition*)

Angkasa Pura I berkomitmen menciptakan praktik bisnis yang bersih dan menjauhi segala bentuk kecurangan dengan menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai budaya dan etika bisnis yang harus dibangun dan dijalankan dalam menjaga iklim yang kondusif seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### 3. Menghormati hak kekayaan intelektual

Angkasa Pura I juga berkomitmen untuk menghormati hasil olah pikir dan ide kreatif yang terdaftar menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seperti hak paten, hak cipta, dan lainnya, baik yang dibuat oleh karyawan PT Angkasa Pura I (Persero) maupun yang dibuat oleh pemangku kepentingan perusahaan.

Selain itu, Angkasa Pura I juga mendorong para pihak untuk berpartisipasi aktif dalam melindungi hak kekayaan intelektual perusahaan. Setiap orang yang bekerja di lingkungan Angkasa Pura I wajib memperlakukan informasi terkait proses dan produk sebagai milik perusahaan, baik selama masa kerja maupun setelah individu yang

bersangkutan tidak bekerja lagi di PT Angkasa Pura I (Persero). Sebagai apresiasi, Angkasa Pura I memberikan insentif kepada individu yang berkontribusi dalam penemuan yang memiliki manfaat ekonomis bagi Perusahaan.

### 4. Menghindari perilaku pelanggaran hukum, terutama pengaruh politik (*responsible political involvement*)

Dalam menjalankan usaha, Angkasa Pura I mematuhi ketentuan dan peraturan perundangan sehingga terhindar dari perilaku pelanggaran hukum. Komitmen terhadap hal tersebut, salah satunya, sesuai dengan arahan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor: SE-07/MBU/20/2015 tentang Ketentuan Pencalonan Pejabat dan Karyawan BUMN sebagai Calon Kepala Daerah dan Larangan Penggunaan Sumber Daya BUMN Dalam Kegiatan Politik Praktis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Selain itu, komitmen terhadap hal tersebut juga dituangkan dalam pedoman etika (kode etik) terkait aktivitas politik.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan Angkasa Pura I tersebut mengatur hal-hal berikut:

- Angkasa Pura I tidak akan dan tidak memperbolehkan seorang pun melakukan pemaksaan kepada orang lain yang dapat membatasi hak individu tersebut untuk menyalurkan aspirasi politiknya.
- Angkasa Pura I tidak akan memberikan dana, aset, atau fasilitas Perusahaan untuk kepentingan partai politik maupun seorang atau lebih calon anggota badan legislatif kecuali sepanjang dibenarkan oleh undang-undang dan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tidak bertindak diskriminatif terhadap Insan Angkasa Pura I.
- Insan Angkasa Pura I dilarang membawa, memperlihatkan, memasang, serta

mengedarkan simbol, gambar, dan ornamen partai politik di lingkungan Perusahaan.

- e. Insan Angkasa Pura I yang aktif dalam partai politik dan/atau menjadi calon legislatif partai politik dalam pemilu perlu mengundurkan.

## RENCANA KEGIATAN

Angkasa Pura I senantiasa menjaga hubungan kerja dengan para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh dukungan dalam rangka mempromosikan penerapan kegiatan pengelolaan operasi yang adil. Kegiatan operasi yang adil Angkasa Pura I fokus pada aktivitas kerja dan usaha yang menciptakan hubungan kerja yang harmonis, saling menghargai, saling bertanggung jawab dan saling percaya antara insan Angkasa Pura I dengan para pemangku kepentingan agar mendukung keberhasilan pencapaian tujuan Angkasa Pura I.

Fokus tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang memfasilitasi komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di internal maupun eksternal perusahaan. Di internal perusahaan, sebagai bentuk forum komunikasi dua arah antara manajemen dengan seluruh karyawan dilakukan kegiatan “CEO Talks” di mana selain menyampaikan kebijakan strategis

arah perusahaan, manajemen juga berupaya mendengar aspirasi seluruh karyawan, baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang melalui metode *video conference*. Selain itu, terdapat beberapa saluran komunikasi lain di internal perusahaan untuk menjaga kepercayaan dan rasa saling menghargai.

Untuk menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan mitra kerja, perusahaan juga memiliki serangkaian *tools*, seperti *airlines gathering* untuk mitra maskapai, *tenant gathering* untuk para mitra *tenant* di bandara-bandara kelolaan perusahaan, dan *coffee morning* dengan seluruh mitra di bandara untuk menyamakan persepsi mengenai perkembangan terkini menyikapi potensi masalah yang akan terjadi sehingga dapat ditangani secara adil.

## DAMPAK KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASI YANG ADIL

Penerapan kegiatan operasi yang adil di Perusahaan dapat menciptakan suasana yang kondusif dan meningkatkan etos kerja pada lingkungan internal Angkasa Pura I. Selain itu, operasi yang adil dapat mendorong perbaikan

pengelolaan bisnis Angkasa Pura I melalui pengembangan nilai-nilai atau budaya positif yang mampu meningkatkan reputasi dan citra Angkasa Pura I.

## CAPAIAN DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2019, upaya Angkasa Pura I untuk melakukan praktik bisnis yang berkeadilan mendapatkan penghargaan “Tata Kelola BUMN Terbaik I” dari Anugerah BUMN 2019 oleh Majalah BUMN Track.

# Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM)

## KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Angkasa Pura I merupakan badan usaha yang menghormati prinsip-prinsip penegakan HAM di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi penerapan kegiatan *corporate social responsibility* terkait Hak Asasi Manusia (HAM) telah dilaksanakan oleh Angkasa Pura I yang dalam penerapannya selalu mengikuti ketentuan yang berlaku. Hingga saat ini perusahaan berkomitmen untuk mengikuti standardisasi untuk tanggung jawab sosial yaitu ISO 26000.

Salah satu upaya penegakan HAM yang signifikan di Angkasa Pura I yaitu terkait hak-hak dasar di lingkungan kerja. Komitmen Angkasa Pura I terhadap pemenuhan hak asasi

manusia di tempat kerja tercermin pada dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati bersama antara Serikat Pegawai dan Angkasa Pura I.

Bentuk komitmen penegakan HAM lainnya yaitu dilaksanakan oleh PT Angkasa Pura I dalam rangka relokasi warga terkait pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta. Dengan memperhatikan aspek HAM, Angkasa Pura I melakukan proses pemindahan masyarakat. Proses tersebut berjalan baik sehingga tidak ada gangguan yang signifikan dari warga yang direlokasi.

## RENCANA KEGIATAN

Perseroan memberikan perhatian serius berkaitan dengan dampak aktivitas operasional organisasi pada hak-hak asasi manusia (*due diligence*). Perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis dan operasional perusahaan baik dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan, para pegawai di lingkungan perusahaan, dan interaksi kepada masyarakat di wilayah kerja perusahaan. Pelibatan pemangku kepentingan dalam menyusun rencana kegiatan penting untuk memastikan pelaksanaan

kegiatan di bidang HAM menjadi tepat sasaran dan berdampak positif bagi para pemangku kepentingan dan Perusahaan.

Kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan dalam aspek HAM pada tahun 2019 meliputi pelatihan untuk warga yang terdampak pembangunan bandara yaitu pelatihan bahasa Inggris, profesi *security*, dan pelatihan kewirausahaan di Bandara Internasional Yogyakarta dan pelatihan mekanikal di sekitar Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang.

## RUMUSAN TERHADAP HAM

Salah satu upaya perumusan aspek HAM yaitu dengan mengadakan dialog antara Perusahaan dengan karyawan. Melalui PKB dan berdasarkan hubungan industrial yang baik, Angkasa Pura I telah mengidentifikasi berbagai aspek HAM, khususnya yang terkait hak-hak dasar di tempat kerja. Beberapa hal di antaranya yaitu mencakup jaminan hubungan ketenagakerjaan, hak dan kewajiban pekerja fasilitas serikat pekerja, waktu

kerja, lingkungan kerja, remunerasi dan manfaat sosial lainnya, kesetaraan dan nondiskriminasi, serta penyelesaian keluhan kesah bipartit maupun tripartit.

Angkasa Pura I tidak melakukan diskriminasi pada proses rekrutmen dengan cara menentukan kriteria khusus yang membedakan berbagai suku, ras, agama dan kondisi fisik yang beragam.

Semua calon pegawai memiliki kesempatan yang sama.

Pegawai perusahaan yang berasal dari berbagai suku, ras, agama, jenis kelamin dan kondisi

fisik yang berbeda-beda merupakan salah satu kekuatan dan fondasi perusahaan untuk selalu bersikap adil, anti diskriminasi dan melindungi hak-hak individu yang berkelanjutan.

## LINGKUP DAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan *corporate social responsibility* perusahaan selalu mengutamakan pendekatan, interaksi, komunikasi dan pelibatan masyarakat yang dilakukan tanpa intimidasi, penuh rasa hormat dan pemahaman budaya setempat serta hak-hak masyarakat dengan berlandaskan prinsip saling menguntungkan.

Perusahaan juga sangat menghormati hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*) yang dimiliki oleh masing-masing individu dan kelompok masyarakat yang menerima manfaat dari tanggung jawab sosial di wilayah kerja dan operasional perusahaan.

### 1. Kebebasan Berserikat

Hak berserikat dijamin penuh pelaksanaannya oleh Angkasa Pura I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut tercermin pada keberadaan Serikat Pegawai dan Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I untuk mewakili anggotanya dalam melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan perundingan dengan Perusahaan terkait hubungan kerja. Di sisi lain, Serikat Pegawai harus mematuhi ketentuan hubungan kerja dan mendukung program-program kerja Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan *Code of Conduct*.

Angkasa Pura I memberikan dukungan kepada Serikat Pegawai berupa bantuan yang tidak mengikat serta menyediakan ruangan sekretariat beserta kelengkapan dan fasilitas lainnya. Serikat Pegawai juga dapat mengajukan permintaan bantuan kepada manajemen Angkasa Pura I untuk mendukung program kerja tahunan Serikat Pegawai.

### 2. Waktu Kerja, Upah Lembur dan Cuti

Angkasa Pura I menghormati ketentuan waktu kerja dan upah lembur yang diatur oleh Perusahaan sebagai berikut:

- o Hari kerja Angkasa Pura I adalah 5 (lima) hari dalam seminggu.
- o Pelaksanaan jam kerja di Angkasa Pura I yaitu:
  - Hari Senin sampai dengan Kamis: pukul 08.00 sampai dengan 16.30 waktu setempat
  - Hari Jumat: pukul 08.00 sampai dengan 15.30 waktu setempat
  - Waktu istirahat diatur secara internal di unit kerja masing-masing.
- o Penyimpangan jumlah hari kerja dan jam kerja secara umum dapat dimungkinkan terutama bagi pegawai yang bertugas di bidang operasional dan diatur sebagai jam kerja *shift*.
- o Jumlah jam kerja *shift* bagi pegawai tidak boleh lebih dari 40 (empat puluh) jam seminggu dan selebihnya dihitung sebagai jam kerja lembur.
- o Pegawai yang melakukan kerja lembur berhak atas pembayaran kelebihan jam kerja.

Selain apresiasi Perusahaan atas waktu kerja dan upah lembur, Hak untuk mendapatkan izin cuti bagi pegawai juga merupakan salah satu hak yang dipenuhi oleh Angkasa Pura I sesuai dengan perjanjian pegawai yang berlaku. Ketentuan cuti pegawai meliputi:

- o Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.
- o Pegawai yang telah bekerja sekurang-

kurangnya 6 (enam) tahun atau kelipatannya secara terus menerus di Angkasa Pura I berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender dengan persetujuan atasan.

- o Pegawai yang sakit lebih dari 2 (dua) hari kerja sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja berhak memperoleh cuti sakit, dengan ketentuan pegawai tersebut harus memberitahu atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- o Pegawai wanita berhak atas cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan kalender yang pelaksanaannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- o Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas istirahat sakit selama 45 (empat puluh lima) hari kalender dengan menyampaikan surat keterangan dokter yang menyatakan pegawai bersangkutan mengalami gugur kandungan.
- o Cuti karena alasan penting, antara lain:
  - Pegawai melangsungkan pernikahan.
  - Istri/suami, anak/menantu, atau orang tua/mertua sakit keras atau dirawat di rumah sakit.
  - Istri/suami, anak/menantu, orang

tua/mertua atau saudara kandung meninggal dunia.

- Istri pegawai melahirkan.
- Mendapat musibah/bencana alam.
- Perjalanan ibadah keagamaan.

### 3. Relokasi Warga

Selama tahun 2019, Angkasa Pura I melakukan pembangunan serta perluasan di dua bandara, yaitu Bandara Internasional Yogyakarta dan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin. Pembangunan ini turut memberi dampak kepada penduduk di sekitar wilayah. Hal ini ditangani oleh Angkasa Pura I dengan proses relokasi serta pemberian kompensasi. Proses pemindahan penduduk dari lokasi proyek pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta dilaksanakan sejak tahun 2018. Masyarakat yang terdampak berada di wilayah lokasi proyek pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kecamatan Temon, Kulon Progo, Yogyakarta dan lokasi Proyek Pembangunan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung, Banjarmasin.

## DAMPAK KEGIATAN DAN CAPAIAN BIDANG HAM

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan di bidang HAM pada tahun 2019 berespons positif pada beberapa aspek. Salah satunya yaitu keberhasilan Angkasa Pura I menurunkan tingkat *turnover* karyawan sebesar 2,79%, lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 5,29%.

Secara umum, penghormatan terhadap HAM berdampak positif pada Angkasa Pura I dan para pemangku kepentingan dalam aspek potensi risiko yang dapat muncul dari pelanggaran HAM. Risiko tersebut antara lain insiden HAM yang berakibat pada memburuknya citra Perusahaan, turunnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap Perusahaan, adanya hukuman pengadilan,

hingga buruknya kestabilan kelangsungan usaha Perusahaan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Angkasa Pura I melakukan penggantian terhadap lahan yang digunakan untuk pembangunan bandar udara. Perpindahan di Bandara Internasional Yogyakarta melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang meliputi Pemerintah Daerah Kulon Progo, TNI, Polisi, dan lain-lain. Sedangkan perpindahan di sekitar lokasi proyek pembangunan Bandara Syamsudin Noor melibatkan instansi daerah yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kota.

Dari pembangunan Bandara Internasional

Yogyakarta, terdapat sekitar 2.700 KK yang direlokasi serta diberikan pelatihan *softskill* dan edukasi finansial. Total biaya relokasi dan pelatihan selama tahun 2019 mencapai Rp4,1

t triliun. Sementara dari pembangunan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, terdapat sekitar 832 KK yang direlokasi.

## DAMPAK KEGIATAN DAN CAPAIAN BIDANG HAM

Selama tahun 2019, PT Angkasa Pura I (Persero) tidak memperoleh penghargaan terkait HAM.

# Lingkungan Hidup

## KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Angkasa Pura I telah lama menaruh perhatian khusus pada aspek lingkungan hidup dan menjadikannya salah satu pilar utama dalam kegiatan CSR Perusahaan. Praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan khususnya di bidang lingkungan hidup diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.103/KU.13/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero). Perusahaan berkomitmen untuk berperan aktif dalam upaya melakukan penghijauan dan pembangunan bandara yang ramah lingkungan. Selain program CSR di bidang lingkungan, Angkasa Pura I juga senantiasa memerhatikan aspek lingkungan hidup dalam pengelolaan kebandarudaraan, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.32/OM.01.01/2015 tanggal 24 Maret 2015

tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bandar Udara di PT Angkasa Pura I (Persero) dan Kebijakan Lingkungan Perusahaan. Komitmen Perusahaan di bidang lingkungan hidup juga tercermin dalam kebijakan lain, yakni Instruksi Direksi INST.DU.04/HK.01.02/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Langkah-Langkah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Bandar Udara PT Angkasa Pura I (Persero) serta INST.DU.18/HK.01.02/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pengelolaan Limbah dan Zat Kimia/ Limbah Berbahaya dan Beraacun (B3) di Bandar Udara PT Angkasa Pura I (Persero) serta Faximile/ Edaran No 062/AP-I/2019 tanggal 10 Januari 2019 Perihal Penerapan Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai. Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan.

## DAMPAK DAN RISIKO LINGKUNGAN TERKAIT BISNIS PERUSAHAAN

Terdapat beberapa isu-isu lingkungan yang relevan dengan kegiatan bisnis Angkasa Pura I yang dapat terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung dari aktivitas bandara. Salah satu dampak terhadap lingkungan yang biasa terjadi adalah kebisingan dari aktivitas operasional bandara. Selain itu, risiko polusi udara juga merupakan dampak yang paling sulit dihindari akibat pengembangan dan pengoperasian bandara. Pengembangan dan operasional bandara yang membutuhkan lahan luas juga berpotensi menimbulkan risiko

lingkungan, ekonomi, dan pembangunan bagi masyarakat sekitar.

Angkasa Pura I menyadari bahwa jika isu-isu tersebut tidak ditangani dengan baik, maka dapat memicu potensi risiko yang terkait hubungan dengan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar bandara. Oleh karena itu, Angkasa Pura I telah memiliki kebijakan terkait manajemen lingkungan yang mengatur mitigasi, pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dimulai dari pembuatan dokumen AMDAL, pengurusan

perizinan lingkungan, meminta saran pendapat tanggapan warga terkait pengembangan bandara serta secara rutin memantau dampak lingkungan

yang ada dan mengelola dengan program-program lingkungan yang tepat guna.



## RENCANA KEGIATAN

Angkasa Pura I berkomitmen menjadikan lingkungan sekitar bandara menjadi lebih ramah lingkungan dengan cara melaksanakan beberapa program konservasi energi dalam kegiatan operasional bandara. Angkasa Pura I telah memasukkan konsep bandara ramah lingkungan (*eco-friendly airport*) melalui terminal baru Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang dan Bandara Internasional Yogyakarta yang diikuti pengimplementasian secara penuh standar ISO 14001:2015 terkait lingkungan oleh Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Perseroan juga telah memasukkan strategi lingkungan hidup ke dalam program-program *Corporate Social Responsibility (CSR)* seperti penanaman pohon, transplantasi terumbu karang, pelatihan masyarakat dan lainnya.

Upaya tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan di bidang lingkungan hidup tidak hanya dilakukan pada wilayah internal operasional Angkasa Pura I, tetapi juga berupa pelestarian alam di sekitar wilayah usaha Perusahaan dan daerah-daerah penyangga lainnya. Pada tahun 2019, kegiatan eksternal di bidang lingkungan hidup fokus pada pelaksanaan program penanaman pohon mangrove dan transplantasi terumbu karang di Bali dan Lombok. Program tersebut direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan hasil diskusi dan pertimbangan saran serta kebutuhan para pemangku kepentingan yang terkait.

## PELAKSANAAN KEGIATAN

Realisasi dari kebijakan PT Angkasa Pura I (Persero) terhadap upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Target dan Pencapaian Program Kerja Lingkungan Hidup Tahun 2019	
Sasaran Strategis	Realisasi
 <p>Peningkatan Kompetensi Pekerja dalam Bidang Lingkungan Bandara</p>	<p>Pada tahun 2019 telah dilaksanakan beberapa <i>training</i> kepada karyawan Angkasa Pura I antara lain <i>Airport Carbon Management Plan</i> dari Airports Council International, <i>GreenShip Professional</i>, Dasar-dasar Analisis Dampak Lingkungan, Bimtek <i>Environmental Reporting System (ERS)</i>, Bimtek Pengelolaan Limbah B3, dan lain-lain.</p>
 <p>Pelestarian Lingkungan dan Promosi Praktik Bisnis Berkelanjutan</p>	<p>Secara rutin Angkasa Pura I membuat laporan keberlanjutan dan telah memiliki kebijakan lingkungan hidup yang mengatur terkait pengelolaan dampak lingkungan, pencegahan pencemaran, efisiensi energi, pengurangan GRK, perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem khususnya tanaman khas daerah, adaptasi terhadap perubahan iklim serta perencanaan, pengembangan dan operasional yang mengacu prinsip pengembangan berkelanjutan, seperti penggunaan produk lokal, pengurangan penggunaan <i>single use plastic</i>, dan memenuhi persyaratan ruang terbuka hijau. Dalam perencanaan kami juga melakukan kajian kebencanaan dan klimatologi bekerja sama dengan BMKG untuk pengembangan bandara berkelanjutan.</p>



## Target dan Pencapaian Program Kerja Lingkungan Hidup Tahun 2019

### Sasaran Strategis

### Realisasi



Perolehan Izin Lingkungan dari Studi AMDAL  
Pembangunan Bandara Baru dan Pengembangan Bandara

Pembangunan dan pengembangan bandara wajib memiliki Izin Lingkungan melalui *system* OSS sebagai salah satu kepatuhan hukum, Untuk Pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Internasional Lombok, Bandara Adi Soemarmo Solo, Bandara Sultan Hassanudin Makassar dan Bandara Juanda Surabaya sudah memiliki Izin Lingkungan Komitmen dan melalui penilaian dokumen AMDAL, untuk SKKLH dan Izin Lingkungan Definitif di tahun 2019 sudah diperoleh Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan dan Bandara Sam Ratulangi Manado.



Monitoring dan Pelaporan Lingkungan Hidup Bandara dan Kantor Pusat

Sesuai peraturan dalam izin lingkungan dan *eco airport* dari KLHK dan DBU Kementerian Perhubungan, Setiap perusahaan wajib melaporkan kinerja pengelolaan lingkungannya kepada instansi terkait secara periodik, PT Angkasa Pura I (Persero) sudah memiliki *system* pelaporan *online* yaitu *Environmental Reporting System*, ACERT (ACI's *Airport Carbon and Emissions Reporting Tool*) dan telah terdaftar dalam sistem SIMPEL KLHK dan Fastronik KLHK untuk pelaporan monitoring RKL-RPL serta pemantauan pencegahan untuk *illegal wildlife trafficking*.

### KEGIATAN PROGRAM PENGHEMATAN KERTAS, ENERGI, DAN AIR

Sebagai wujud komitmen Angkasa Pura I dalam melestarikan lingkungan hidup, Perusahaan menerapkan kebijakan untuk menghemat penggunaan kertas dan mulai membiasakan komunikasi dengan sarana teknologi yang tidak menggunakan kertas (*paperless*). Mulai tahun 2019, Perusahaan juga telah menerapkan sistem tata naskah dinas elektronik.

Angkasa Pura I juga melakukan upaya penghematan energi melalui:

- Penggunaan sistem *Supervisory Control And Data Acquisition* (SCADA) untuk memonitor penggunaan listrik secara berkala di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang
- Penggunaan lampu LED di bandara
- Penggunaan eskalator yang menggunakan sensor untuk menghemat listrik
- Mengurangi durasi penggunaan *AC Standing dan centralized air conditioner* (AC) di terminal
- Penggunaan *solar cell* untuk penerangan jalan di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang dan Bandara El Tari Kupang
- Penggunaan *Building Automation System* di Bandara

Perusahaan juga menghemat air yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, salah satunya dengan cara menggunakan sumber air dari jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan tidak menggunakan air tanah. Efisiensi penggunaan air juga dilakukan dengan cara melakukan pengecekan instalasi air secara rutin untuk mencegah kebocoran, serta senantiasa menghimbau pegawai untuk menghemat penggunaan air. Upaya lain yang telah dilakukan untuk menghemat air diantaranya:

- Penggunaan air dari *Sewage Treatment Plan* (STP) mulai September 2019 di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali untuk mengurangi penggunaan air bawah tanah.
- Peningkatan penggunaan teknologi *reversed water osmosis* di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang dengan mendaur ulang air yang berasal dari air payau dan air hujan.
- Penggunaan keran air dengan sensor otomatis.

### KEGIATAN PROGRAM PELESTARIAN ALAM

PT Angkasa Pura I (Persero) berkomitmen untuk menjadikan lingkungan sekitar bandara menjadi lebih hijau dan mengembangkan bandara ramah lingkungan. Selain itu, PT Angkasa Pura I (Persero) mendukung program Pemerintah di bidang pelestarian alam di lingkungan sekitar wilayah operasional dan daerah-daerah penyangga lainnya sekaligus berperan menjadi koordinator BUMN Peduli Penghijauan untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sepanjang tahun 2019, PT Angkasa Pura I (Persero) telah melaksanakan kegiatan pelestarian alam berupa kampanye global "Switch Off Earth Hour 2019" yang diinisiasi

oleh Komunitas Earth Hour dan WWF-Indonesia serentak di 13 bandara. PT Angkasa Pura I (Persero) bersama WWF Indonesia juga menjalin kerja sama dalam program lainnya seperti konservasi dan edukasi, pelestarian lingkungan hidup, serta pengembangan pariwisata sesuai prinsip pengelolaan berkelanjutan.

Kegiatan program pelestarian alam di internal perusahaan juga meliputi pencegahan pencemaran lingkungan, program *green building*, *green procurement*, *green processes*, dan *reduce, reuse, recycle* (3R) yang mendukung tujuan *eco-airport*.

## DAMPAK KEGIATAN

### DAMPAK KEGIATAN PROGRAM PENGHEMATAN KERTAS, ENERGI, DAN AIR

Kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan di bidang lingkungan hidup sepanjang tahun 2019 telah memberikan dampak positif pada sisi ekonomi melalui penghematan biaya kertas, listrik, dan air. Dampak penghematan kertas, listrik, dan air secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut.

Penghematan Kertas, Energi, dan Air		
Keterangan	2019	2018
Rasio Biaya Listrik dan Air terhadap Total Pendapatan	1 : 1.14	1 : 0.98
Rasio Biaya Perlengkapan terhadap Total Aset	1 : 0.04	1 : 0.04
Rasio Biaya Listrik dan Air terhadap Total Aset	1 : 0.033	1 : 0.27

Penggunaan Listrik, Bahan Bakar, dan Air PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Tiga Tahun Terakhir				
Uraian	Satuan	2019	2018	2017
Listrik	kWh	243.636.176,80	244.478.698,59	230.355.873,56
BBM	liter	1.157.798,90	1.340.666,79	1.256.713,82
Air	m <sup>3</sup>	4.874.880,00	4.915.970,70	4.643.849,00

### DAMPAK KEGIATAN PROGRAM PELESTARIAN ALAM

Pelaksanaan kegiatan pencegahan pencemaran terhadap lingkungan, program *green building*, *green procurement*, *green processes*, dan *reduce, reuse, recycle* (3R) diharapkan dapat membantu mengurangi pemanasan global dan menjadi inspirasi bagi pihak-pihak lain untuk turut peduli menjaga dan memulihkan lingkungan hidup. Angkasa Pura I akan terus melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan untuk menjadikan seluruh bandara yang dikelola menjadi ramah lingkungan (*eco-airport*).

## SERTIFIKASI DI BIDANG LINGKUNGAN

PT Angkasa Pura I (Persero) senantiasa mempertahankan kinerja di bidang lingkungan untuk memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan kepada Perusahaan dalam

menangani isu-isu lingkungan yang terkait dengan operasional bisnis Perusahaan. Sertifikasi Bidang Lingkungan yang diperoleh PT Angkasa Pura I (Persero) antara lain:

Nama Sertifikasi	Deskripsi	Lokasi Bandara
<i>Airport Council International</i>	Sertifikasi yang diberikan oleh Airports Council International kepada bandara yang telah melakukan perhitungan, dan melakukan upaya dalam menurunkan jumlah emisi dan karbon yang dihasilkan oleh kegiatan operasional bandara. Saat ini masih dalam program persiapan sertifikasi	Bandara yang diusulkan adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali</li> <li>Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang</li> <li>Bandara Adi Soemarmo Solo</li> </ul>
Sertifikasi <i>Green Building</i>	<p>Bangunan bandara udara Angkasa Pura I diharapkan menjadi sebuah bangunan yang berkinerja hijau. Kinerja hijau ini mengikuti tolok ukur bangunan gedung hijau bernama <i>GreenShip</i>. Kegiatan ini meliputi berbagai pekerjaan, antara lain, perencanaan, pembangunan pengoperasian dan pemeliharaan, pengadaan serta kegiatan lain yang diperlukan.</p> <p>Keberhasilan dalam mengikuti tolok ukur ini disahkan dalam sertifikat <i>greenShip</i> yang diterbitkan oleh Green Building Council Indonesia (GBCI). Bila bangunan gedung sudah besertifikat, maka pemilik memiliki legitimasi untuk menyebutnya sebagai <i>green building</i>.</p> <p>Angkasa Pura I dalam proyek pengembangannya sudah menerapkan prinsip <i>green building</i> mulai dari tahap perencanaan, <i>design</i>, pembangunan dan operasional kedepannya. <i>Progress</i> saat ini adalah menunggu verifikasi sebelum diterbitkan sertifikasi dari GBCI.</p>	Bandara dalam proses sertifikasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang</li> <li>Bandar Udara Internasional Yogyakarta Kulon Progo</li> </ul>
Pengembangan dan Sertifikasi ISO 14001:2015	ISO 14001 merupakan bagian dari keseluruhan sistem manajemen yang termasuk di dalamnya struktur organisasi, aktifitas perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur-prosedur, proses dan sumber daya untuk pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijaksanaan lingkungan. Dengan Sistem Pengelolaan yang terintegrasi diharapkan bandara Angkasa Pura I dapat memenuhi kriteria <i>eco-airport</i> .	Bandara yang masih dalam proses <i>setup</i> dan menunggu sertifikasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.</li> <li>Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.</li> </ul>

# Ketenagakerjaan

## KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Angkasa Pura I berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di bidang ketenagakerjaan, yang mencakup berbagai aspek, antara lain:

- kesetaraan gender dan kesempatan kerja
- kesetaraan dalam program pendidikan dan pelatihan
- kesehatan dan keselamatan kerja
- hubungan industrial
- remunerasi
- program pensiun

Dalam aspek kesehatan kerja, komitmen Angkasa

Pura I tercermin dalam Keputusan Direksi No. KEP.121/KP.30/2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Fasilitas Para Pejabat, Perjalanan Dinas, dan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai PT Angkasa Pura I (Persero). Kebijakan tersebut menjamin pemeliharaan kesehatan pegawai oleh Angkasa Pura I. Selain jaminan kesehatan, komitmen Perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja juga tertuang dalam Keputusan Direksi No. KEP.08/KP.10.43/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Manual Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Korporat PT Angkasa Pura I (Persero).

## PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

Ruang lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan bidang tenagakerjaan sangat terkait erat dengan karakteristik operasional kebandarudaraan. Beberapa hal yang signifikan dan menjadi perhatian Angkasa Pura I yaitu kesetaraan gender dan kesempatan kerja, kesetaraan dalam program pendidikan dan pelatihan, hubungan industrial, remunerasi, serta program pensiun.

Perumusan program-program di bidang ketenagakerjaan dilakukan oleh Angkasa Pura I dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, melalui forum diskusi/survei/lainnya. Pelibatan pemangku kepentingan tersebut bertujuan untuk merumuskan inisiatif atau program serta isu-isu yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, agar Perusahaan dapat mengambil keputusan secara efektif dan tepat guna.

Sepanjang tahun 2019, isu-isu yang teridentifikasi oleh Angkasa Pura I yaitu

1. Adanya rencana pembentukan *Super Holding* BUMN bidang penerbangan oleh Kementerian BUMN sehingga memiliki potensi mempengaruhi status kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.
2. Semakin diperlukannya *e-learning* untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam menghadapi era digital serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu pelatihan pegawai.



## PERENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Program kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan di bidang ketenagakerjaan tercantum dalam RKAP Angkasa Pura I, khususnya pada Program Kerja Human Capital Group dan Training and Development Group. Kegiatan tersebut mencakup proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, penetapan remunerasi, hingga *retirement* pegawai. Seluruh rencana kegiatan di bidang ketenagakerjaan disusun sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku, yang pelaksanaannya berlandaskan pada penghargaan atas hak pegawai, anti-diskriminasi, dan partisipasi perempuan.

Angkasa Pura I memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk pegawai yang meliputi rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan khusus. Pemberian fasilitas kesehatan diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP121/KP.30/2004 tanggal 9 Desember 2004, tentang Fasilitas Para Pejabat, Perjalanan Dinas dan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai PT Angkasa Pura I (Persero)

Lebih jauh lagi, Angkasa Pura I memiliki kebijakan terkait kesehatan dan keselamatan kerja yang

tertuang dalam Keputusan Keputusan Direksi Nomor: KEP.08/KP.10.43/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Manual Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Korporat PT Angkasa Pura I (Persero)

Angkasa Pura I melibatkan kelompok pemangku kepentingan dalam menjalankan tanggung jawab sosial di bidang ketenagakerjaan, yaitu serikat pekerja. PT Angkasa Pura I (Persero) menjamin kebebasan berserikat untuk mewakili kepentingan karyawan dalam ketenagakerjaan, termasuk perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan pihak manajemen. PT Angkasa Pura I (Persero) secara rutin telah melakukan rapat dengan serikat pekerja. Rapat-rapat tersebut membahas terkait pemenuhan hak dan kewajiban karyawan ataupun perumusan sanksi disiplin jika terdapat pelanggaran disiplin oleh pegawai.

Pada tahun 2019, Angkasa Pura I mengalokasikan dana sebesar Rp49,98 miliar untuk program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan pada berbagai tingkat jabatan.

## URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Upaya Angkasa Pura I untuk bertanggung jawab sosial di bidang ketenagakerjaan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain serikat pekerja. Peran Direksi dan Manajemen Angkasa Pura I terkait ketenagakerjaan salah satunya melalui melakukan *review* atas inisiatif dan laporan yang disusun Perusahaan.

### KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Di bidang kesehatan pegawai, pada tahun 2019 Angkasa Pura I menyediakan pelayanan kesehatan seperti bantuan alat bantu baca, pengobatan dan

perawatan gigi, alat bantu dengar, protesa mata, serta fasilitas BPJS Kesehatan bagi setiap pegawai Perusahaan. Angkasa Pura I juga menerapkan mekanisme keselamatan dan kesehatan kerja (K3) para pegawai sebagai pendekatan preventif, yang meliputi pembinaan, penerapan, dan pemeliharaan K3 agar pegawai terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Pada tahun 2019, Angkasa Pura I tidak mengalami kecelakaan kerja maupun *fatality*.

Jumlah Kecelakaan Kerja PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2017-2019

Keterangan	2019	2018	2017
Jumlah <i>Fatality</i>	0	0	0
Jumlah Kecelakaan Berat	0	0	0
Jumlah Kecelakaan Ringan	0	0	0
Total Jumlah Kecelakaan	0	0	0

### KESETARAAN GENDER DAN KESEMPATAN KERJA

Angkasa Pura I memberikan kesempatan yang setara bagi para pihak tanpa memandang perbedaan etnik, agama, ras, kelas, gender, maupun kondisi fisik untuk mengikuti program rekrutmen kerja. Calon pegawai dipilih dan diangkat secara adil berdasarkan hasil seleksi dan evaluasi pada masa percobaan dan orientasi kerja.

Angkasa Pura I melakukan proses rekrutmen yang mengedepankan asas-asas keterbukaan, kewajaran, dan kesetaraan berdasarkan kebutuhan perusahaan dan kompetensi yang dimiliki oleh kandidat dengan memperhatikan ketersediaan tenaga kerja lokal maupun nasional.

Per akhir tahun 2019, Angkasa Pura I memiliki komposisi karyawan laki-laki sebesar 59%,

sedangkan karyawan perempuan sebesar 41%. Proporsi tersebut dipicu oleh minat laki-laki yang lebih besar untuk bekerja di industri kebandarudaraan dibandingkan dengan kaum perempuan.

### KESETARAAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Angkasa Pura I memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pegawai untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan, yang dilakukan dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kapasitas pegawai untuk menunjang operasional Perusahaan. Pada tahun 2019, tidak kurang dari 264 kali program pelatihan dan pendidikan telah diikuti oleh peserta dari level Direksi hingga pegawai dengan realisasi biaya penyelenggaraan sebesar Rp49,98 miliar.

### HUBUNGAN INDUSTRIAL

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada Serikat Pekerja Angkasa Pura I (SP AP I) dan Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I (AKA) sebagai perwakilan pegawai dalam hal ketenagakerjaan. Angkasa Pura I rutin mengadakan rapat dengan serikat pekerja terkait hak dan kewajiban pegawai dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

### REMUNERASI

Kebijakan remunerasi Angkasa Pura I mempertimbangan keterampilan, kompetensi, dan integritas pegawai serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini, seluruh pegawai Angkasa Pura I telah menerima remunerasi di atas standar upah

minimum yang berlaku di wilayah Perusahaan. remunerasi yang diterima oleh pegawai Angkasa Pura I mencakup:

- Penghasilan bulanan, mencakup gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan pangan, insentif prestasi, tunjangan kemahalan, tunjangan transport, tunjangan jabatan, dan tunjangan mobilitas.
- Penghasilan tahunan, mencakup bantuan sewa rumah, tunjangan cuti tahunan, tunjangan pendidikan anak sekolah, tunjangan hari raya, bonus, dan seragam dinas.
- Pemeliharaan kesehatan, mencakup rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan khusus.
- Penghasilan sesuai kondisi dan waktu tertentu.

Perbandingan Gaji Tertinggi dan Terendah PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Keterangan	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Perbandingan
Dewan Komisaris	78.750.000	78.750.000	1:1
Direksi	175.000.000	148.750.000	1:2
Karyawan			
Level I	56.960.324	35.267.515	1:6
Level II	30.636.027	27.651.992	1:1
Level III	20.015.658	18.256.753	1:1
Level IV	12.197.222	7.313.272	1:7

### PROGRAM PENSIUN

Salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan lainnya yang dilakukan Angkasa Pura I di bidang ketenagakerjaan yaitu inisiatif persiapan pra pensiun. Pegawai Angkasa Pura I dapat mengikuti Program Pelatihan Prapurnabakti dalam rangka menyiapkan masa pensiun. Berbagai aspek pengetahuan dan wawasan yang disampaikan dalam program pelatihan tersebut yaitu:

1. *Spiritual emotion power*;
2. Kiat menghadapi status purnabakti;
3. *Healthy secret*;
4. *Entrepreneurship*;

5. Menciptakan keluarga harmonis pasca purnabakti;
6. Kunjungan usaha; dan
7. Resolusi/*personal action plan* bersama Yakkap I.

Selain program persiapan pensiun, Angkasa Pura I menyediakan fasilitas berikut kepada pegawai yang telah memasuki masa pensiun:

1. Manfaat pensiun melalui Dana Pensiun Angkasa Pura I (Dapendra) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) serta jaminan pensiun oleh BPJS Ketenagakerjaan.
2. Manfaat Tunjangan Hari Tua (THT), yang



pengelolaannya dilakukan oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I (Yakkap I).

3. Pemeliharaan Kesehatan Pensiun oleh Yakkap I.
4. Manfaat Jaminan Hari Tua oleh BPJS Ketenagakerjaan.

#### MEKANISME PENGADUAN KETENAGAKERJAAN

Angkasa Pura I memiliki mekanisme pengaduan ketenagakerjaan yang tercantum dalam Keputusan Direksi No. KEP.41/KP.14/2013 tentang Panitia Pembinaan dan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai (P4DP) PT Angkasa Pura I (Persero). Dalam hal terdapat keluhan dan penyampaian saran, pegawai Angkasa Pura I dapat melakukan

hal-hal berikut:

1. Keluhan pegawai diminta untuk dibicarakan dengan atasan langsung terlebih dahulu.
2. Apabila tidak dapat terselesaikan, permasalahan dapat disampaikan kepada atasan dari atasan langsungnya.
3. Apabila belum dapat terselesaikan, maka pegawai dapat meneruskan kepada serikat pekerja.
4. Jika masih terdapat perbedaan, selanjutnya dapat ditempuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## URAIAN CAPAIAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

#### KESEHATAN DAN KESELAMATAN KARYAWAN

Angkasa Pura I menyediakan fasilitas kesehatan bagi pegawai dan anggota keluarganya yang mencakup:

1. Rawat jalan; Angkasa Pura I mengganti seluruh biaya berobat bagi pegawai yang berobat ke dokter selain dokter yang disediakan oleh Perusahaan.
2. Rawat inap; Angkasa Pura I memberikan fasilitas rawat inap bagi pegawai dan keluarganya sesuai dengan kelas kamar yang telah ditentukan berdasarkan golongan jabatan masing-masing.
3. Pelayanan khusus; Angkasa Pura I menyediakan bantuan fasilitas kesehatan yang meliputi alat bantu baca, pengobatan dan perawatan gigi, alat bantu dengar, protesa anggota gerak, dan protesa mata.

Selain itu, pada wilayah Kantor Pusat maupun Kantor Cabang Angkasa Pura I juga tersedia fasilitas klinik yang dapat dimanfaatkan oleh

pegawai. Fasilitas kesehatan tidak hanya dapat dinikmati bagi pegawai yang masih aktif, tetapi juga bagi pegawai yang telah pensiun beserta keluarganya, yakni berupa biaya rawat inap per orang per tahun sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang dikelola oleh Yakkap I.

Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan aspek yang menjadi perhatian khusus Angkasa Pura I. Potensi bahaya dan risiko K3 yang sering dijumpai pada industri kebandarudaraan antara lain adalah gangguan pendengaran pegawai akibat kebisingan, tabrakan antara kendaraan personel bandara, risiko kebakaran, dan lain sebagainya yang mampu menghambat jalannya kegiatan usaha Perusahaan. Oleh karena itu, Angkasa Pura I berkomitmen untuk mencegah berbagai risiko tersebut serta melindungi setiap orang, aset perusahaan, dan lingkungan sekitar dari potensi bahaya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Praktik kebijakan K3 yang diterapkan oleh seluruh jajaran manajemen Angkasa Pura I dan para pegawai. Kebijakan K3 Angkasa Pura I senantiasa dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait serta ditinjau secara berkala oleh Direksi. Kebijakan K3 yang dimiliki Angkasa Pura I mencakup upaya-upaya berikut:

- Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta kerusakan peralatan, properti, dan lingkungan kerja.
- Menciptakan lingkungan tempat kerja yang selamat, sehat, aman, dan nyaman bagi pegawai, pelanggan, mitra kerja, mitra usaha, maupun pihak lain yang berada di lingkungan Perusahaan untuk mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan K3 Angkasa Pura I.
- Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya terkait K3 serta evaluasi terhadap kepatuhannya.
- Secara berkesinambungan melakukan pembinaan, penerapan, dan pemeliharaan K3 di lingkungan Perusahaan.
- Memenuhi SDM yang kompeten, peralatan

laik operasi, metode kerja dan lingkungan kerja yang aman, serta anggaran yang memadai guna mendukung terlaksananya program-program K3.

- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan K3 guna terciptanya peningkatan K3 secara berkelanjutan dan kondisi K3 yang kondusif.

### PENGELOLA K3

Pengelolaan K3 di Kantor Pusat Angkasa Pura I adalah Departemen *Occupational Safety Health* pada *Unit Airport Safety Group* yang dibentuk pada tahun 2016. Di sisi lain, struktur organisasi pengelola K3 di Kantor Cabang dibagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan ukuran Kantor Cabang, yakni:

- Bandara Kelas Besar;
- Bandara Kelas Menengah;
- Bandara Kelas Kecil.

Struktur Pengelola K3 PT Angkasa Pura I (Persero) di Kantor Pusat dan Kantor Cabang

Kantor Pusat	Bandara Kelas Besar	Bandara Kelas Menengah	Bandara Kelas Kecil
1. Vice President Airport Safety	Airport Safety & Quality Senior Manager	Airport Security & Safety Senior Manager	1. Airport Operation & Technical Senior Manager* 2. Airport Operation & Safety Senior Manager**
2. Occupational Health and Safety Health Senior Manager	Safety Management System & Occupational Health and Safety Manager	Safety Management System & Occupational Health and Safety Manager	1. Airport Safety, Quality, and Risk Management Manager 2. Airport Operation, Services, Security, & Safety Manager***
3.a. Occupational Health and Safety Health Analyst	Safety Management System & Occupational Health and Safety Officer	Safety Management System & Occupational Safety Health Officer	Safety Management System & Occupational Safety Health Officer
3.a. Occupational Health and Safety Health Officer			

\*untuk Bandara Kupang dan Ambon

\*\*untuk Bandara Solo

\*\*\*untuk Bandara Biak

Selanjutnya, PT Angkasa Pura I melihat bahwa kesehatan pegawai yang dikelola dengan baik dapat memberikan dampak positif terhadap

produktivitas kerja pegawai. Peningkatan produktivitas pegawai di tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Pendapatan (Rp)	Jumlah Pegawai	Produktivitas (Rp)
2019	8.631.546.000.000	3.355	2.572.740.984
2018	8.521.087.000.000	3.370	2.528.512.463
2017	7.194.347.000.000	3.350	2.174.566.269

### TURNOVER KARYAWAN

Upaya tanggung jawab sosial di bidang ketenagakerjaan sepanjang tahun 2019 ditunjukkan dengan angka *turnover* pegawai

yang menurun 1,07% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tingkat *Turnover* Karyawan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2017-2019

Keterangan	2019	2018	2017
Pensiun	80	109	118
<i>Resign</i>	6	6	78
Meninggal	10	6	8
Lain-lain	2	0	4
Jumlah Karyawan Keluar	98	121	208
Jumlah Karyawan	3.355	3.374	3.350
Tingkat <i>Turnover</i>	2,92%	3,59%	4,85%

Selain tingkat *turnover*, dampak kuantitatif dari kegiatan di bidang ketenagakerjaan juga ditunjukkan dengan hasil survei kepuasan pegawai yang rutin dilaksanakan oleh Angkasa Pura I. Hasil indeks kepuasan pegawai Angkasa Pura I di tahun 2019 mencapai nilai 4.36, meningkat dari tahun 2018 yang bernilai 4,35. Nilai ini menunjukkan bahwa pegawai "Sangat Puas" dengan pengelolaan SDM oleh Angkasa Pura

I dengan catatan agar Perusahaan senantiasa mengadakan perbaikan pada beberapa aspek. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pegawai loyal terhadap Perusahaan, sebab Angkasa Pura I senantiasa mengakomodasi kebutuhan pegawai terkait kesejahteraan, peluang kerja, dan lingkungan kerja yang mendukung.

Indeks Kepuasan Karyawan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2017-2019

Keterangan	2019	2018	2017
Indeks Kepuasan Karyawan	<b>4.36</b>	<b>4.35</b>	<b>4.15</b>

## SERTIFIKASI DAN PENGHARGAAN

Angkasa Pura I merupakan perusahaan jasa kebandarudaraan pertama yang mendapatkan sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan 166 kriteria dari Kementerian Ketenagakerjaan. Hingga tahun 2019, tiga belas (13) bandara yang dikelola Angkasa Pura I yang memperoleh Sertifikat SMK3 dengan

capaian rata-rata 90,59. Selain itu, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan, dan Bandara Adi Soemarmo Solo memperoleh Sertifikat OHSAS 18001:2007 dari Sucofindo International Certification Services.

## Konsumen

Komitmen Angkasa Pura I untuk selalu memperhatikan kepuasan dan keselamatan konsumen tercermin pada Keputusan Direksi Nomor: KEP.38/OP.01/2009 tanggal 7 April 2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System/SMS*) di Bandar Udara yang Dikelola PT Angkasa Pura I (Persero).

Dengan adanya kebijakan tersebut, Angkasa Pura I berupaya memastikan keselamatan operasi penerbangan agar risiko terhadap keselamatan penerbangan dapat ditekan pada *level* yang dapat ditoleransi dan meminimalkan risiko cedera bagi para penumpang di area bandara.

Angkasa Pura I memiliki Unit Airport Security yang secara khusus bekerja memastikan terlaksananya program keamanan bandara untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan pada bandara di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero). Salah satu tujuan kegiatan *airport security* juga mencapai *Customer Satisfaction Index* (CSI) yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## AIRPORT SECURITY

Unit Airport Security Angkasa Pura I memiliki tiga departemen yang bertanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan untuk

konsumen, khususnya bidang keamanan penerbangan. Peran dan tanggung jawab masing-masing departemen dalam Unit Airport Security adalah sebagai berikut.

### Struktur Pengelola Bidang Keamanan Penerbangan PT Angkasa Pura I (Persero) di Kantor Pusat dan Kantor Cabang

Pekerjaan	Misi	Tanggung Jawab Utama
Vice President Airport Security	Memastikan pelayanan bidang <i>airport security</i> yang efektif melalui peningkatan kualitas dan kehandalan sumber daya manusia guna mendukung tercapainya CSI sesuai dengan standar aturan nasional dan internasional, RKAP, dan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan tercapainya <i>level of service</i> keamanan penerbangan</li> <li>Memastikan kesiapan pemenuhan regulasi di seluruh bandar udara</li> <li>Memastikan terimplementasinya kebijakan, strategi, dan SOP bidang <i>airport security protection</i>, <i>airport security screening</i> dan <i>airport security quality control</i></li> </ul>

## Struktur Pengelola K3 PT Angkasa Pura I (Persero) di Kantor Pusat dan Kantor Cabang

Pekerjaan	Misi	Tanggung Jawab Utama
Airport Security Protection Senior Manager	Memastikan keamanan penerbangan di bandar udara melalui pengelolaan kegiatan <i>airport security protection</i> yang efektif guna mendukung tercapainya CSI sesuai dengan standar aturan nasional dan internasional, RKAP, dan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan tersedianya kebijakan dan strategi sumber daya manusia, fasilitas dan SOP bidang <i>airport security protection</i></li> <li>Memastikan terlaksananya koordinasi keamanan dengan pihak eksternal/bantuan ahli</li> <li>Memastikan tersedianya <i>design</i> dan <i>layout</i> bandar udara sesuai dengan fungsi keamanan penerbangan</li> </ul>
Airport Security Screening Senior Manager	Memastikan keamanan penerbangan di bandar udara terhadap penumpang, personel pesawat udara dan barang bawaan melalui pengelolaan kegiatan <i>airport security screening</i> yang efektif guna mendukung tercapainya CSI sesuai dengan standar aturan nasional dan internasional, RKAP, dan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan tersedianya kebijakan, strategi dan SOP bidang <i>airport security screening</i></li> <li>Memastikan tersedianya <i>design</i> dan <i>layout</i> bandar udara sesuai dengan fungsi keamanan penerbangan</li> </ul>
Airport Security Quality Control Senior Manager	Memastikan pengelolaan kegiatan program pengawasan keamanan penerbangan di bandar udara untuk pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan bidang keamanan penerbangan yang efektif guna mendukung tercapainya CSI sesuai dengan standar aturan nasional dan internasional, RKAP, dan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan implementasi kegiatan pengamanan bandar udara yang sesuai dengan <i>Airport Security Programme (ASP)</i></li> <li>Memastikan <i>corrective action plan</i> hasil audit keamanan bandar udara berjalan sesuai dengan target yang ditentukan</li> <li>Memastikan ketersediaan dan pelaksanaan program penanggulangan keadaan darurat.</li> </ul>

## KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen (pengguna jasa), terutama dalam Aspek Keselamatan dan Kesehatan di area bandara, Angkasa Pura I kemudian menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sebagai pedoman dalam mengelola operasional bandara. Selain itu, PT Angkasa Pura I (Persero) juga memperhatikan pelaksanaan *Safety, Security, Services, and Compliance (3S+1C)* yang menjamin keselamatan operasi pesawat di bandara sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Selanjutnya, sebagai pelaku industri pengelola bandara, Angkasa Pura I mematuhi kewajiban

untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan yang diatur dalam:

- Keputusan Direksi No.KEP.38/OP.1/2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan di Bandar Udara yang Dikelola PT Angkasa Pura I (Persero),
- KEP.64/HK.03/2009 tentang Hukuman dalam Sistem Manajemen Keselamatan (*Non-Punitive Reporting Policy*) di PT Angkasa Pura I (Persero), serta
- Edaran No. ED.30/OP.02/2017/DU tentang Implementasi *Safety Management System*.

Aspek kesehatan dan keselamatan konsumen tentunya juga tidak terlepas dari kondisi

lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi karyawan. Terkait hal tersebut, Angkasa Pura I memiliki kebijakan keselamatan kerja yang diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.08/KP.10/43/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Manual Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (SMK3) Korporat PT Angkasa Pura I (Persero). Angkasa Pura I terus memastikan kebijakan keselamatan dipahami dan dipatuhi oleh seluruh pegawai dan pemangku kepentingan. Selain itu, Direksi Angkasa Pura I secara berkala meninjau kebijakan keselamatan agar tetap relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pada praktiknya, upaya Angkasa Pura I dalam menjamin keselamatan pengguna jasa antar lain melalui:

1. Mencegah *incident*, *serious incident*, dan *accident* melalui identifikasi *hazard* dan promosi keselamatan.
2. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan kebijakan lainnya terkait keselamatan serta mengevaluasi kepatuhannya.
3. Melakukan pembinaan, penerapan, dan pemeliharaan keselamatan di lingkungan Angkasa Pura I secara berkesinambungan.
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keselamatan untuk meningkatkan standar keselamatan secara berkelanjutan.

## RENCANA KEGIATAN

Salah satu bentuk rencana kegiatan tanggung jawab perusahaan bagi pengguna jasa adalah komitmen Angkasa Pura I untuk menyelesaikan pengaduan konsumen di bawah *Service Level Agreement* (SLA) dan mencapai nilai kepuasan konsumen di atas 4,0 dari skala 1 sampai dengan 5. Selain itu, Angkasa Pura I menerapkan sistem manajemen yang memastikan keselamatan pada seluruh kegiatan penerbangan sesuai dengan standar nasional dan internasional serta manual *Safety Management System* Bandara.

## KEGIATAN

### KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan prioritas yang diperhatikan oleh Angkasa Pura I agar para pengguna jasa bandara dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman di area lingkungan kerja bandara. Beberapa upaya yang telah dilakukan Angkasa Pura I terkait bidang K3 di sepanjang tahun 2019 meliputi kegiatan-kegiatan berikut.



## Kegiatan-kegiatan bidang K3 PT Angkasa Pura I (Persero) di Kantor Pusat dan Kantor Cabang

Nama Kegiatan	Sasaran	Realisasi
<p><i>OSH Promotion:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bulan K3 Nasional;</li> <li>2. OSH Campaign</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk meningkatkan citra perusahaan</li> <li>2. Membangun kesadaran akan pentingnya K3 di lingkungan kerja Angkasa Pura I</li> <li>3. Peningkatan penerapan K3 di lingkungan kerja bandara</li> </ol>	<p>Telah dilaksanakan bulan Januari-Maret 2019, kegiatan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Bulan K3</li> <li>2. Penandatanganan <i>Safety Commitment</i> bersama para <i>stakeholders</i></li> <li>3. Penghargaan K3 (K3 Award) dari Provinsi setempat, antara lain : <i>Zero Accident Award</i>, Penghargaan P2K3, Penghargaan Kinerja K3, Penghargaan Kepatuhan Pelaksanaan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan diatas 80%, Penghargaan Pencapaian Penerapan SMK3, Penghargaan Partisipasi Aktif Dalam Penerapan SMK3</li> <li>4. Sosialisasi dan seminar K3 dengan topik-topik antara lain : K3 dasar, <i>zero accident</i>, tanggap darurat, psikologi kesehatan kerja, P2HIV/AIDS, pencegahan bahaya kebakaran dan bantuan hidup dasar, ergonomi di tempat kerja, <i>defensive safety driving</i>, 5R (<i>housekeeping</i>), <i>hygiene sanitasi</i>, pengelolaan lingkungan kerja, dsb</li> <li>5. Pemasangan Spanduk/<i>Banner</i> Bulan K3</li> <li>6. Donor Darah dengan total kantong darah yang terkumpul (dari kantor pusat dan 13 kantor cabang bandara) sebanyak 1067 kantong darah</li> <li>7. Lomba dan Pameran K3</li> </ol>
<p><i>Annual Meeting Airport Safety Tahun 2019</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan capaian kinerja K3 di 13 (tiga belas) bandara Angkasa Pura I;</li> <li>2. Sinkronisasi program kerja strategis OSH kantor pusat dan kantor cabang sesuai <i>roadmap</i> Direktorat Operasi tahun 2019 - 2023;</li> </ol>	<p>Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 26 - 29 Maret 2019 di Yogyakarta dengan peserta dari Kantor Pusat dan seluruh Kantor Cabang, dengan hasil kesepakatan di bidang K3 yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah ditetapkan tingkat kekerapan terjadinya <i>Lost Time Injury</i> pada pegawai internal yaitu kurang dari sama dengan 1 (LTI FR <math>\leq</math> 1);</li> <li>2. Memastikan tingkat implementasi SMK3 pada seluruh proses bisnis bandara (baik di <i>airside</i> maupun <i>landside</i>) berada diatas 85 % melalui pelaksanaan Audit Internal minimal 1 (satu) tahun sekali;</li> <li>3. Bagi kantor cabang bandara agar dapat melakukan pengajuan <i>Zero Accident Award</i> dan P2HIV/AIDS ke Dinas Ketenagakerjaan setempat;</li> <li>4. Meningkatkan budaya lapor dan memastikan seluruh pihak dapat melaporkan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja bandar udara melalui media email, whatsapp, dll serta penyampaian laporan resmi hasil investigasi yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kecelakaan Sedang (perlu perawatan medis / cacat temporer);</li> <li>b. Kecelakaan Berat (Cacat Permanen);</li> <li>c. <i>Fatality</i> / Kematian;</li> <li>d. Kebakaran.</li> </ol> </li> <li>5. Optimalisasi <i>Online Reporting System</i> (ORS) yang terintegrasi dengan <i>Safety Management System</i>;</li> <li>6. Optimalisasi personil unit lain yang memiliki sertifikat bidang K3 melalui sosialisasi, <i>sharing knowledge</i> dan inspeksi K3;</li> <li>7. Melakukan peningkatan publikasi kegiatan K3 di kantor cabang melalui media sosial bekerja sama dengan Communication &amp; Legal Section sebagai wujud promosi keselamatan kepada publik;</li> <li>8. Melakukan persiapan implementasi ISO 45001:2018 melalui tahapan interpretasi, sosialisasi, pelatihan dan <i>Gap Analysis</i>.</li> </ol>
<p>Audit Internal SMK3 Tahun 2019 sesuai PP 50 Tahun 2012</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menentukan tingkat pemenuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang SMK3.</li> </ol>	<p>Audit Internal SMK3 di 10 (sepuluh) kantor cabang dilaksanakan oleh tim kantor pusat pada bulan Mei – Oktober 2019 dengan hasil sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang capaian 96,39%</li> <li>2) Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali capaian 98,19%</li> <li>3) Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan capaian 94,57%</li> <li>4) Bandara Adi Soemarmo Solo capaian 93,37%</li> <li>5) Bandara Adisutjipto Yogyakarta capaian 95,78 %</li> </ol>



## Kegiatan - kegiatan bidang K3 PT Angkasa Pura I (Persero) di Kantor Pusat dan Kantor Cabang

Nama Kegiatan	Sasaran	Realisasi
Audit Internal SMK3 Tahun 2019 sesuai PP 50 Tahun 2012	2. Menentukan tingkat pemenuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang SMK3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>6) Bandara El Tari Kupang capaian 94,60 %</li> <li>7) Bandara Juanda Surabaya capaian 98,19 %</li> <li>8) Bandara Sultan Hasanuddin Makassar capaian 98,19 %</li> <li>9) Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin capaian 96,98 %</li> <li>10) Bandara Sam Ratulangi Manado capaian 98,19 %</li> </ul>
Pemantapan Implementasi K3 di Proyek Pengembangan Bandara	Sebagai upaya pembinaan, penerapan, pemeliharaan dan evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja Proyek Pengembangan Bandara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilaksanakan <i>Hazard Identification Risk Assessment (HIRA)</i> pada tanggal 15 - 16 April 2019 dalam rangka monitoring aspek K3 di Proyek Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo</li> <li>2. Telah dilaksanakan kegiatan <i>Operational Readiness, Activation &amp; Transition (ORAT)</i> pada tanggal 22 - 30 April 2019 dalam rangka persiapan Verifikasi dan pengoperasian Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo</li> <li>3. Telah dilaksanakan pengecekan persiapan <i>Natural Disaster Tsunami Evacuation Exercise</i> di Proyek Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo pada tanggal 2 - 3 Mei 2019</li> <li>4. Telah dilaksanakan Pra Verifikasi Pengoperasian Terminal Baru Bandara Adi Soemarmo Solo pada tanggal 5 - 7 Agustus 2019</li> <li>5. Telah dilaksanakan Pra Verifikasi Pengoperasian <i>Taxiway</i> Baru di Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo pada tanggal 18 - 19 September 2019</li> <li>6. Telah dilaksanakan Verifikasi Pengoperasian Terminal Baru Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin pada tanggal 6 - 8 November 2019.</li> </ul>
Pelatihan Ahli K3 Listrik (Sertifikasi Kemenaker RI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam bidang K3</li> <li>2. Pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> </ul>	<p>Pelatihan dilaksanakan pada 28 Januari - 11 Februari tahun 2019 di Jakarta. Pelatihan tersebut bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja dari potensi bahaya listrik</li> <li>2. Menciptakan instalasi listrik yang aman, handal dan memberikan keselamatan bangunan beserta isinya</li> <li>3. Menciptakan tempat kerja yang selamat dan sehat untuk mendorong produktivitas.</li> </ul>
Bimbingan Teknis Interpretasi ISO 45001:2018 <i>Occupational Health &amp; Safety Management System</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pemahaman personil dalam terkait ISO 45001:2018 <i>Occupational Health &amp; Safety Management System</i></li> <li>2. Pemenuhan klausul ISO 45001:2018</li> </ul>	<p>Kegiatan Bimbingan Teknis ini dibagi menjadi 2 (dua) tahapan kegiatan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tahap I (07 - 08 Oktober 2019) Bimbingan Teknis Interpretasi ISO 45001:2018 untuk personil Airport Safety Group kantor pusat dan perwakilan anak perusahaan PT Angkasa Pura I (Persero).</li> <li>2. Tahap II (09 - 10 Oktober 2019) Bimbingan Teknis Interpretasi ISO 45001:2018 untuk personil OSH di seluruh kantor cabang</li> </ul> <p>Pelaksanaan Bimbingan Teknis selama 2 hari ini membahas mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. ISO 45001:2018 <i>Occupational Health &amp; Safety Management System</i></li> <li>2. Interpretasi pemenuhan klausul ISO 45001:2018</li> <li>3. Perbedaan antara ISO 45001:2018 dan OHSAS 18001:2007</li> </ul>

**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN (SAFETY MANAGEMENT SYSTEM)**

Pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan di Angkasa Pura I mencakup 4 (empat) pilar kegiatan berikut:

1. Kebijakan dan sasaran keselamatan (*safety policy*)
  - a. Komitmen dan tanggung jawab manajemen;
  - b. Tanggung jawab keselamatan;
  - c. Penunjukan Safety Manager/Officer;
  - d. Koordinasi rencana penanggulangan kondisi gawat darurat ; dan
  - e. Dokumentasi pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan.
2. Manajemen risiko keselamatan (*safety risk management*)
  - a. Identifikasi bahaya/gangguan; dan
  - b. Penilaian dan mitigasi risiko.
3. Jaminan keselamatan (*safety assurance*)
  - a. Pengukuran dan *monitoring* kinerja keselamatan;
  - b. Promosi keselamatan (*safety promotion*)
  - c. Pendidikan dan/atau pelatihan; dan
  - d. Sosialisasi keselamatan.

Berdasarkan keempat pilar Sistem Manajemen Keselamatan di atas, sepanjang tahun 2019 Angkasa Pura I telah melaksanakan beberapa program kerja terkait, yakni sebagai berikut.

**Program Kerja Sistem Manajemen Keselamatan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019**

Program Kerja	Sasaran	Hasil
Pelatihan Dalam Negeri	Untuk meningkatkan pengetahuan terkait SMS berdasarkan pada peraturan ICAO, meningkatkan kepedulian <i>Single Accountable</i> dalam mengembangkan dan mengimplementasikan SMS serta membangun budaya keselamatan di bandara	Telah dilaksanakan pelatihan <i>Basic Safety Management System for Trainer</i> pada tanggal 15 - 17 Oktober 2019 di Jakarta dengan hasil sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kompetensi dalam menjelaskan konsep dasar keselamatan</li> <li>2. Meningkatkan kemampuan identifikasi bahaya dan implementasi <i>safety management system</i> di lingkungan kerja</li> </ol>
<i>Airport Safety Annual Meeting</i>	Memastikan pelaksanaan <i>safety</i> pada seluruh operasional secara optimal melalui pengelolaan <i>safety management system</i> yang efektif guna mendukung terjaganya tingkat keselamatan operasional berdasarkan rencana kerja perusahaan yang sesuai dengan penerapan 4 pilar SMS ( <i>Policy, Risk Management, Assurance dan Promotion</i> )	Telah dilaksanakan <i>Airport Safety Annual Meeting</i> tahun 2019 pada tanggal 26 – 29 Maret 2019 di Yogyakarta, dengan kesepakatan di bidang <i>Safety Management System</i> sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan prosedur wajib <i>Safety Management System</i> yang mengacu pada dokumen SMS Manual meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prosedur terkait Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko;</li> <li>b. Prosedur terkait Sistem Pelaporan;</li> <li>c. Prosedur terkait Manajemen Perubahan;</li> <li>d. Prosedur terkait <i>Safety Inspection</i>;</li> <li>e. Prosedur terkait <i>Safety Investigation</i>;</li> <li>f. Prosedur terkait Audit Internal;</li> </ol> </li> <li>2. Memastikan unit terkait untuk memiliki prosedur <i>Method of Working Plan</i> (MOWP) dalam setiap pekerjaan yang berdampak pada operasional penerbangan;</li> <li>3. Memastikan usulan pendidikan dan pelatihan terkait bidang keselamatan disampaikan kepada unit terkait yaitu Human Capital/Training Development;</li> <li>4. <i>Safety Performance Indicator</i> masih menggunakan <i>Safety Performance Indicator</i> yang ada yaitu 1 per 10.000 pergerakan.</li> <li>5. Penetapan <i>Safety Target</i> Angkasa Pura I tahun 2019–2020 sebagai berikut:               <i>Serious Incident / Accident</i> diakibatkan <i>Foreign Object Debris</i> (FOD) lebih kecil atau sama dengan tahun             </li> </ol>

## Program Kerja Sistem Manajemen Keselamatan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Program Kerja	Sasaran	Hasil
<i>Airport Emergency Exercise in Safety Aspect (PKD)</i>	Untuk mengukur kemampuan personil dan peralatan setiap unit yang terlibat serta kepatuhan di dalam melaksanakan SOP dalam rangka kesiapan menanggulangi keadaan darurat menurut bidang tugasnya serta menguji dokumen/prosedur yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilaksanakan Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD) ke-102 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada tanggal 13 Maret 2019.</li> <li>2. Telah dilaksanakan Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD) ke- 103 di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada tanggal 26 Juni 2019.</li> <li>3. Telah dilaksanakan Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD) ke- 104 di Bandara Internasional Lombok pada tanggal 07 Agustus 2019.</li> <li>4. Telah dilaksanakan Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD) ke-105 di Bandara Pattimura Ambon pada tanggal 30 November 2019</li> </ol>
<i>Airport Emergency Exercise in Safety Aspect (PKD)</i>	Menyamakan persepsi dan penetapan <i>safety target</i> Angkasa Pura I tahun 2019-2020.	Telah dilaksanakan rapat dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan unit terkait pada tanggal 6 Februari 2019 di Jakarta.
Investigasi Internal	Upaya pencegahan terulangnya kembali suatu kejadian dan berprinsip tidak mencari siapa salah ( <i>no blame policy</i> )	Telah dilaksanakan pendampingan Komite Nasional Keselamatan Transportasi & Safety Management System Senior Manager Kantor Pusat terkait kejadian serius pesawat Garuda Indonesia B 738 PK GFL 258 pada tanggal 16 – 17 Maret 2019 di Yogyakarta.
<i>Airport Safety Update Meeting</i>	<p>Menyamakan persepsi terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan program pengukuran dan pengawasan kinerja keselamatan internal 13 kantor cabang;</li> <li>2. Persiapan pelaksanaan kegiatan <i>surveillance</i> APEX untuk 4 bandara yang telah melaksanakan di tahun 2016 &amp; 2017 (Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar);</li> <li>3. Persiapan rencana APEX untuk 4 bandara tahun 2019 (Bandara Internasional Lombok, Bandara Sam Ratulangi Manado, Bandara Adi Soemarmo Solo, dan Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang);</li> <li>4. Persiapan <i>annual safety audit</i> Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.</li> </ol> <p>Penambahan <i>joint safety program</i> dengan <i>stakeholder</i> bandara terkait <i>safety target</i>, <i>safety performance Indicator</i>, dan <i>safety program</i>, dengan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sebagai <i>pilot project</i>. Bentuknya berupa MoU yang berisi <i>safety program</i> masing-masing <i>stakeholders</i>.</p>	Telah dilaksanakan <i>Airport Safety Update Meeting</i> pada tanggal 12 April 2019 di Kantor Pusat Jakarta.

Sebagai wujud dari komitmen Angkasa Pura I dalam hal memastikan keselamatan dan kesehatan kerja demi kepuasan pengguna jasa,

sepanjang tahun 2019 PT Angkasa Pura I (Persero) telah melaksanakan berbagai upaya sebagai berikut.

#### Kegiatan Sistem Manajemen Keselamatan Konsumen PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Kegiatan	Sasaran	Hasil
<i>Runway Safety Team</i>	Memastikan kesiapan fasilitas dan peralatan <i>runway</i> dalam kondisi baik dan siap operasi.	Fasilitas <i>runway</i> di seluruh Bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dalam kondisi baik dan siap operasional.
<i>Bird Strike Committe</i>	Mengontrol/mengendalikan populasi hewan liar dan burung di sekitar bandara.	Laporan secara rutin setiap gangguan binatang liar dan burung yang berpotensi membahayakan penerbangan.
<i>Ramp Safety Campaign</i>	Meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan penerbangan melalui kampanye keselamatan.	Terwujudnya implementasi 3S + 1C ( <i>Safety, Security, Services and Compliance</i> )
Pengukuran dan Pengawasan Kinerja Keselamatan	Memastikan proses dan prosedur beroperasi secara efektif untuk mencapai tujuan keselamatan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui sejauh mana implementasi <i>Safety Management System</i> (SMS) seluruh kegiatan operasional bandara.	Telah dilaksanakan Pengukuran dan Pengawasan Kinerja Keselamatan di 11 (sebelas) bandara pada tahun 2019.
Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat	Mengukur kemampuan personel dan peralatan setiap unit yang terlibat serta kepatuhan di dalam melaksanakan SOP dalam rangka kesiapan menanggulangi keadaan darurat menurut bidang tugasnya serta menguji dokumen/prosedur yang berlaku.	Telah dilaksanakan latihan PKD di 4 (empat) bandara Angkasa Pura I.
<i>Foreign Object Debris (FOD) Cleaning</i>	Memastikan tidak adanya FOD yang berpotensi menjadi <i>hazard</i> bagi keselamatan penerbangan.	Telah dilaksanakan secara rutin setiap hari Jumat di seluruh bandara Angkasa Pura I.
<i>Safety Awareness/ Safety Promotion</i>	Menerapkan 3S + 1C pada setiap kegiatan operasional bandar udara.	Telah dilaksanakan <i>safety awareness</i> di 13 (tiga belas) bandara Angkasa Pura I.
<i>Safety Risk Assesment/ Inspeksi Lapangan</i>	Memastikan potensi <i>hazard</i> yang dapat mengganggu operasional keselamatan penerbangan.	Telah dilaksanakan dan dilaporkan secara rutin.
Pengecekan <i>Runway</i>	Memastikan kesiapan fasilitas dan peralatan <i>runway</i> dalam kondisi baik dan siap operasi.	Fasilitas <i>runway</i> di seluruh Bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura I dalam kondisi baik dan siap operasional.

#### Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat

Secara rutin, komitmen Angkasa Pura I melaksanakan Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD), dengan tujuan yaitu:

- Mengukur kemampuan personel dan peralatan setiap unit yang terlibat serta mengukur kepatuhan personel dalam melaksanakan *Standard Operation Procedure* (SOP) terkait kesiapan penanggulangan keadaan darurat sesuai bidang tugasnya.

Latihan PKD juga turut menguji dokumen/prosedur yang berlaku.

- Menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan secara optimal untuk mencegah kesalahan pada saat latihan serta keadaan darurat sesungguhnya.

Sepanjang tahun 2019, Angkasa Pura I telah melaksanakan Latihan PKD sebanyak 4 kali, yakni sebagai berikut.

## Kegiatan Latihan PKD PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

PKD	Lokasi	Pelaksanaan	Nilai PKD
PKD ke-102	Bandara Sultan Hasanuddin Makassar	13 Maret 2019	9,51
PKD ke-103	Bandara Internasional Adisutjipto	26 Juni 2019	9,51
PKD ke-104	Bandara Internasional Lombok	7 Agustus 2019	9,69
PKD ke-105	Bandara Pattimura Ambon	30 November 2019	9,45

### ***Aircraft Rescue & Fire Fighting (ARFF) Challenges 2019***

Individu di Angkasa Pura I memiliki kegiatan untuk bersosialisasi dan bertukar pengalaman serta pikiran (*sharing*) dengan pihak lain sesama profesi yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan dan di bandara. Kegiatan ini diselenggarakan secara rutin sejak pertama kali di Makassar tahun 1991 oleh Angkasa Pura I dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas diri personel ARFF dan kelompok agar lebih sigap dan tangkas.

Kegiatan ARFF tahun 2019 diselenggarakan pada tanggal 25 sd 26 september 2019 di Surakarta Solo yang diikuti oleh 56 anggota ARFF dari bandara yang dikelola Angkasa Pura I.

Tema penyelenggaraan ARFF Challenges di tahun 2019 adalah meningkatkan kerja sama dan kekompakan team dalam rangka mendukung *operation excellence* yang berarti bahwa Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan media bagi personil ARFF untuk bersosialisasi, berlatih, berbagi ilmu, bertukar pikiran, agar mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri setiap personel ARFF, yang dikemas dalam bentuk kompetisi serta sebagai wadah aktualisasi peraturan dengan perkembangan dunia aviasi sekarang.

### **SISTEM MANAJEMEN MUTU (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM)**

Menjaga mutu pelayanan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Angkasa Pura I kepada pelanggan. Pengguna jasa bandara memiliki ekspektasi kepada Angkasa Pura I untuk menerapkan sistem pelayanan yang efektif, oleh karena itu Angkasa Pura I memiliki rangkaian proses yang diperlukan dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu, yakni:

1. Menetapkan masukan yang diperlukan dan keluaran yang diharapkan dari proses;
2. Menetapkan urutan dan interaksi proses;
3. Menetapkan dan menerapkan kriteria, metode (termasuk pengukuran dan indikator kinerja terkait) yang diperlukan untuk memastikan operasi dan kendali proses yang efektif;
4. Menetapkan sumber daya yang diperlukan dan memastikan ketersediaannya;
5. Menunjuk penanggung jawab dan yang memiliki kewenangan untuk proses tersebut;
6. Menangani risiko dan peluang sesuai dengan persyaratan;
7. Mengevaluasi metode untuk memantau, mengukur, dan mengevaluasi proses guna memastikan tercapainya hasil yang diinginkan; dan
8. Meningkatkan proses dan sistem manajemen mutu.

Adapun program kerja terkait pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu yang telah dilaksanakan Angkasa Pura I sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut

## Kegiatan Sistem Manajemen Keselamatan Konsumen PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Kegiatan	Sasaran	Hasil
Program Rapat Koordinasi, Rapat Kerja, dan <i>Focus Group Discussion Quality Management</i>	Pemenuhan terhadap persyaratan pelanggan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilaksanakan Rapat Kerja Airport Safety Group pada tanggal 6-8 Maret 2019 berdasarkan persetujuan Direktur Operasi melalui Nota Dinas Vice President Airport Safety Nomor: DOF.36/OB.03.03/2019-B tanggal 21 Januari 2019.</li> <li>2. Telah dilakukan Airport Safety Annual Meeting tanggal 26 - 29 Maret 2019 berdasarkan persetujuan Direktur Operasi melalui Nota Dinas DOF.128/TU.03.04/2019 tanggal 4 Maret 2019 di Yogyakarta.</li> </ol>
Penilaian Mutu Pelaksanaan PKD di 4 Bandara	Untuk memastikan kegiatan Pelatihan Keadaan Darurat telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku	<p>Telah dilaksanakan Penilaian Mutu pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (14-15 Maret 2019)</li> <li>• Bandara Adisutjipto Yogyakarta (25-27 Juni 2019)</li> <li>• Bandara Internasional Lombok (7-9 Agustus 2019)</li> <li>• Bandara Pattimura Ambon (29-31 Oktober 2019)</li> </ul>
Program Sosialisasi dan Bimbingan Teknis/ <i>Quality Promotion</i>	Berkesinambungan melakukan pembinaan penerapan, pemeliharaan dan evaluasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang berdasarkan <i>Risk Based Thinking</i> di Lingkungan perusahaan (dokumentasi SMM).	<p>Telah dilaksanakan Audit Internal bersamaan dengan kegiatan Pengawasan dan Pengukuran Kinerja Keselamatan sebanyak 4 bandara, total 11 bandara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bandara Adisutjipto - Yogyakarta (14-17 Mei 2019)</li> <li>2. Bandara Juanda - Surabaya (14-17 Mei 2019)</li> <li>3. Bandara Syamsudin Noor - Banjarmasin (21-24 Mei 2019)</li> <li>4. Bandara Jenderal Ahmad Yani - Semarang (21-24 Mei 2019)</li> <li>5. Bandara Adi Soemarmo - Solo (18-21 Juni 2019)</li> <li>6. Bandara Internasional Lombok - Praya (18-21 Juni 2019)</li> <li>7. Bandara Sam Ratulangi - Manado (23-25 Juli 2019)</li> <li>8. Bandara SAMS Sepinggan - Balikpapan (23-25 Juli 2019)</li> <li>9. Bandara I Gusti Ngurah Rai - Bali (30 Juli - 1 Agustus 2019)</li> <li>10. Bandara El Tari - Kupang (21-23 Agustus 2019)</li> <li>11. Bandara Syamsudin Noor - Banjarmasin (9-11 Oktober 2019)</li> </ol>
Pendampingan Audit Eksternal ISO 9001:2015 (11 Cabang) dalam rangka <i>Surveillance Audit</i> kecuali Semarang	Untuk mendampingi Kantor Cabang dalam pelaksanaan Audit Sertifikasi maupun <i>Audit Surveillance</i> ISO 9001:2015 Kantor Cabang	<p>Telah dilaksanakan pendampingan Audit Eksternal Sertifikasi dan <i>Surveillance</i> ISO 9001:2015 di 10 bandara, kecuali Bandara Pattimura Ambon (10 Desember 2019), Bandara El Tari Kupang dan Bandara FRans Kaisiepo Biak (Tahun 2020).</p>

### Kegiatan Sistem Manajemen Mutu untuk Kemandarudaraan

Angkasa Pura I terus berupaya menerapkan dan mengelola sistem manajemen mutu dalam pengelolaan bandara berdasarkan standar ISO 9001:2015. Sebanyak 13 (tiga belas) bandara per akhir tahun 2019 telah mendapatkan sertifikat

manajemen mutu ISO 9001:2015. Beberapa upaya penjaminan mutu pelayanan telah dilaksanakan sepanjang tahun 2019 melalui kegiatan-kegiatan berikut.

## Kegiatan Sistem Manajemen Mutu untuk Kebandarudaraan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Kegiatan	Sasaran	Hasil
Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	Untuk memberikan jaminan mutu layanan, meningkatkan citra perusahaan dan menjaga kepercayaan pelanggan kepada perusahaan	Hingga Tahun 2019, 13 (tiga belas) Bandara telah tersertifikasi ISO 9001:2015 Ruang Lingkup PJP2U (Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara), PJP4U (Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara) dan PJKP2U (Pelayanan Jasa Pos & Kargo Pesawat Udara), kecuali Bandara El Tari Kupang.
Audit Mutu Internal	Memastikan Kantor Cabang telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan memastikan kesiapan Kantor Cabang sebelum Audit Sertifikasi atau Audit <i>Surveillance</i> oleh Lembaga Sertifikasi	12 bandara telah melaksanakan Audit Mutu Internal pada tahun 2019, Bandara Frans Kaisiepo Biak (Tahun 2020)
Rapat Tinjauan Manajemen	Memastikan isu-isu terkait Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dibahas dan ditindaklanjuti sebelum pelaksanaan Audit <i>Surveillance</i> maupun Sertifikasi	Seluruh bandara telah melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen pada tahun 2019
Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	Meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di lingkungan kerja Angkasa Pura I	Seluruh bandara telah melaksanakan Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 kepada pegawai operasional dan administrasi
Pelatihan Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	Meningkatkan pemahaman Tim ISO terkait Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Audit Mutu sebelum melaksanakan Audit Mutu Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh bandara telah melaksanakan Pelatihan Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015</li> <li>Telah dilakukan Pelatihan <i>International Registered Certified Auditor</i> ISO 9001:2015 (IRCA Lead Auditor) pada tanggal 29 Juli – 2 Agustus 2019 pada seluruh perwakilan QM Kantor Cabang dan Kantor Pusat</li> </ul>

## LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN

Angkasa Pura I menyediakan layanan pengaduan konsumen sebagai salah satu mekanisme untuk menjamin kepuasan masyarakat. Mekanisme pengaduan juga membantu Angkasa Pura I (Persero) memahami kebutuhan pengguna jasa, sehingga dapat mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan pelayanan dan fasilitas Perusahaan agar dapat memenuhi harapan konsumen.

Pengguna jasa Angkasa Pura I dapat menyampaikan pengaduan yang tersedia selama 24 jam dalam satu hari melalui:

Telepon : 172

Email : cc172@ap1.co.id

Twitter : @angkaspura172

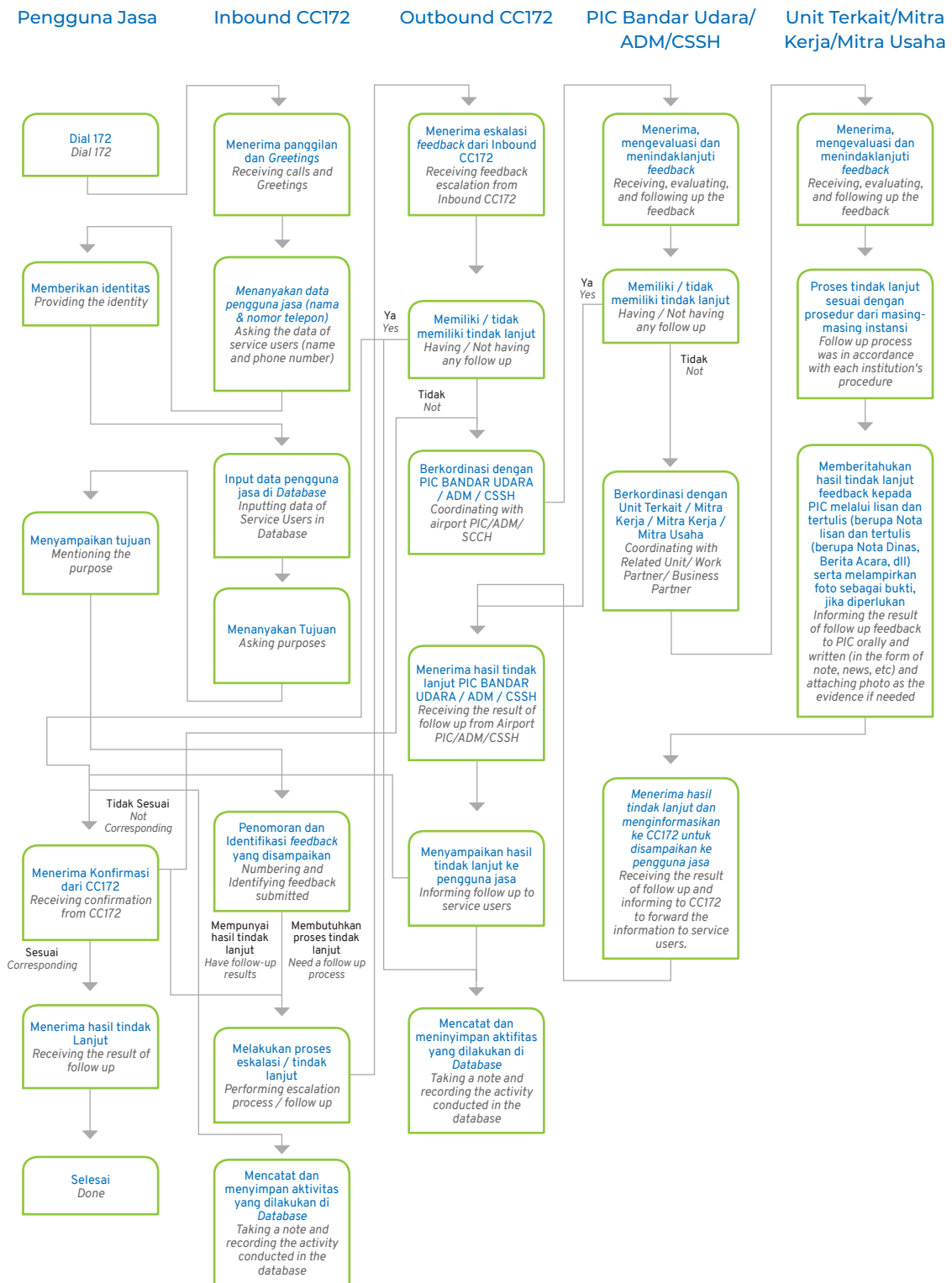
Facebook : AngkasaPura 172

*Contact center* PT Angkasa Pura I (Persero) didukung oleh 25 orang SDM yang memiliki kecakapan pengetahuan kebandarudaraan, bisnis proses Perusahaan, dan kemampuan berkomunikasi sesuai dengan SOP dan SLA.

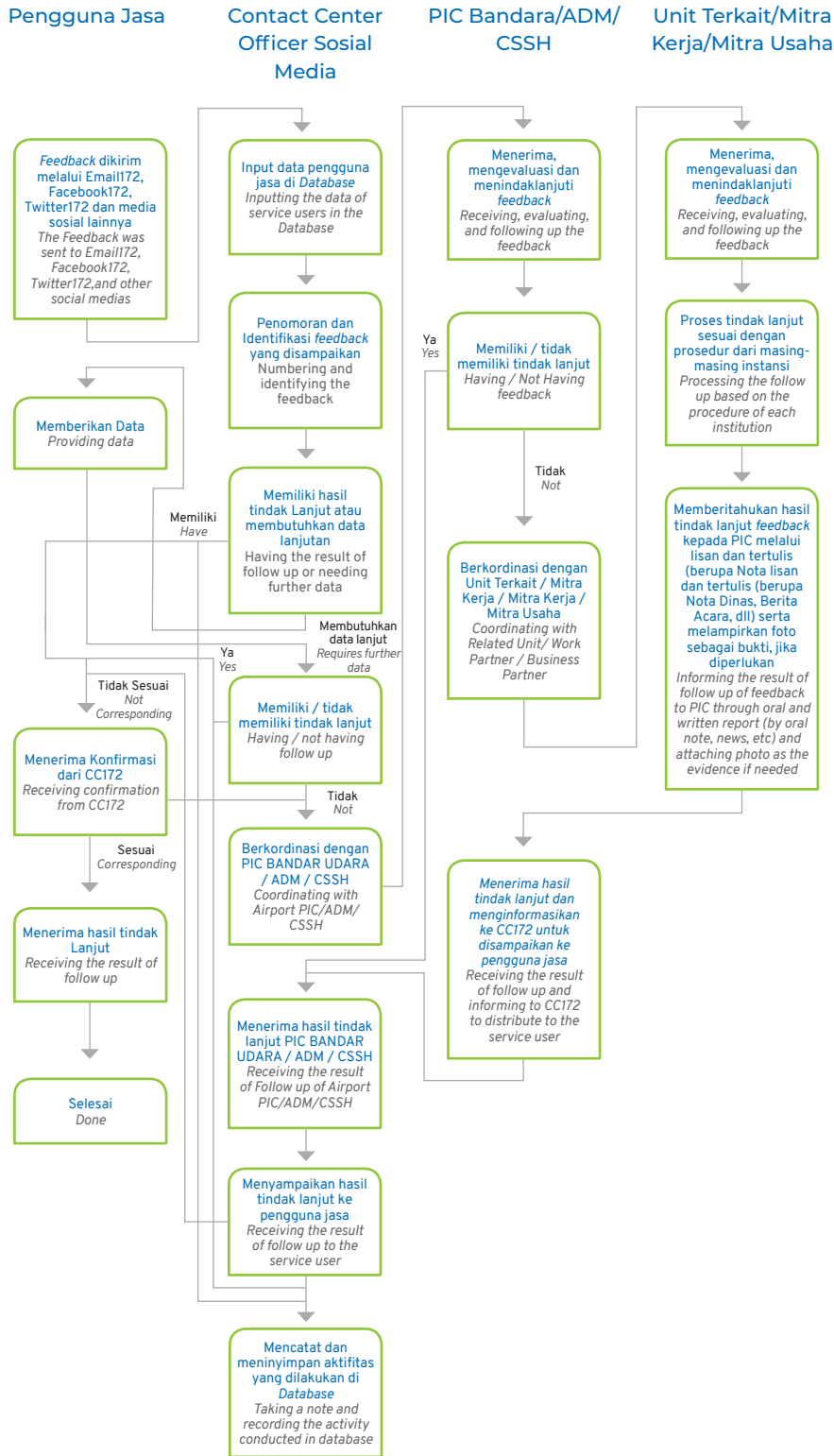
Proses kerja di *contact center* Angkasa Pura I adalah sebagai berikut.



Alur Pelayanan Feedback melalui Dial 172



Alur Pelayanan Feedback melalui Media Sosial



Alur Pelayanan Feedback melalui Customer Services

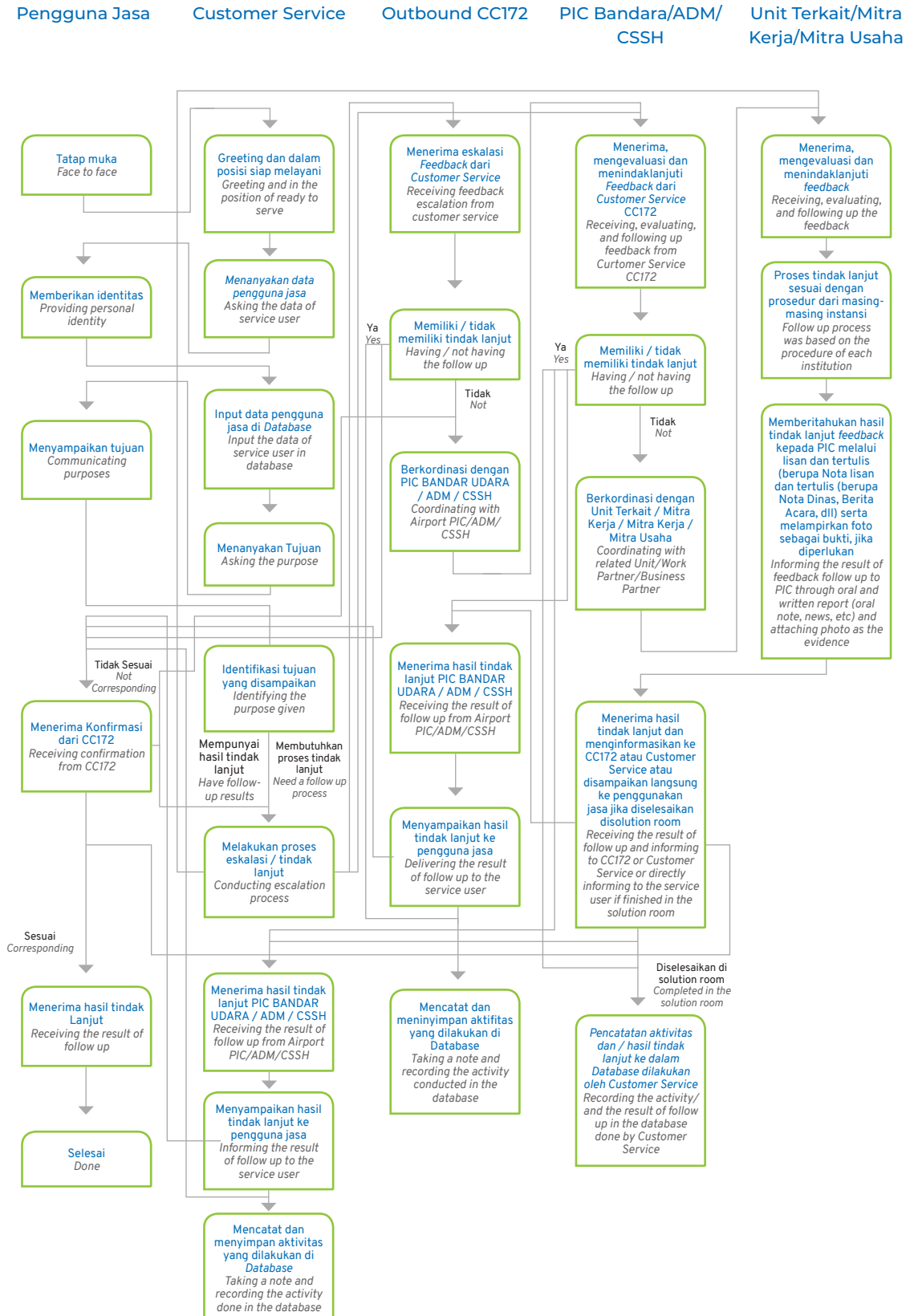
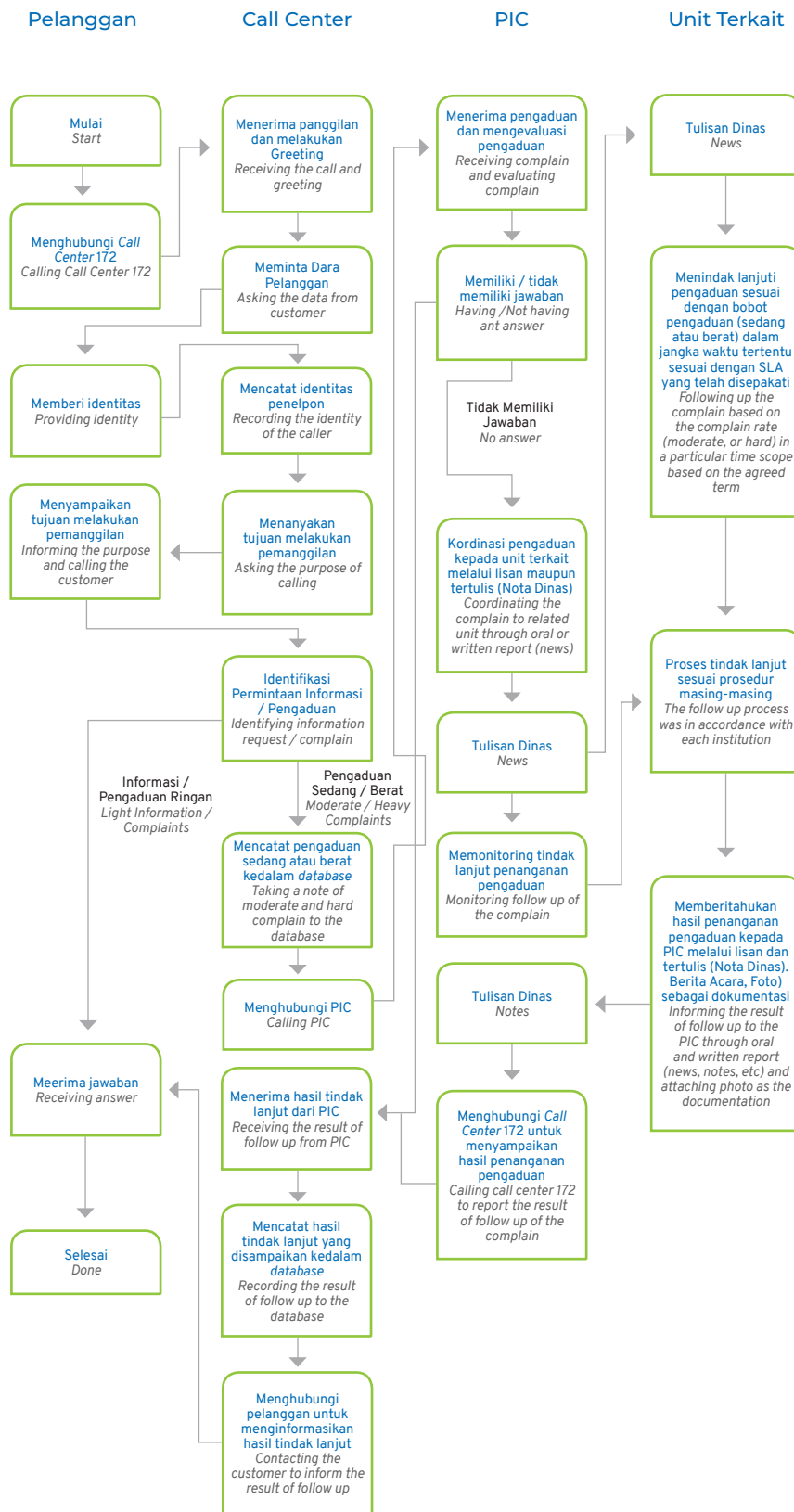


Diagram Alur Call Center 172



### Tingkat Penyelesaian Pengaduan yang Diterima

Sepanjang tahun 2019 Angkasa Pura I menerima 384.977 pengaduan yang diterima melalui berbagai jalur pengaduan, yaitu *e-mail*, akun Twitter, Facebook, *Customer Service*, media selain Contact Center 172, Humas, dan kotak saran. Selain dari media tersebut, Angkasa Pura I juga

menerima 11.737 pengaduan melalui telepon. Pengaduan yang masuk sepanjang tahun 2019 telah terselesaikan sebanyak 384.904 kasus atau sebesar 99,98% dari total kasus. Pengaduan yang belum terselesaikan diteruskan prosesnya pada tahun berikutnya.

Jumlah Pengaduan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Deskripsi	Jumlah Pengaduan Masuk	Jumlah Pengaduan Selesai	Presentase Penyelesaian
Telepon	11.737	11.714	99,80%
<i>E-mail</i>	6.379	6.358	99,67%
Twitter	2.026	2.018	99,61%
Facebook	316	314	99,37%
Kotak Saran	37	36	97,30%
<i>Customer Service</i>	360.075	360.075	100%
Media Selain 172	478	476	99,58%
Humas	3.929	3.913	99,59%

### PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN BAGI KONSUMEN

Selain menyediakan layanan sarana fasilitas bandara yang berbasis teknologi, Angkasa Pura I juga menekankan pada layanan yang lebih humanis bagi pengguna jasa. Upaya tersebut diwujudkan melalui layanan *welcoming value* yang dilakukan oleh tenaga profesional dan menitikberatkan pada kegiatan tegur sapa kepada pengguna jasa untuk menciptakan suasana keramahan di bandara. Selain *welcoming value*, tenaga-tenaga profesional tersebut juga bertugas untuk mempromosikan lokasi-lokasi pariwisata daerah serta memperkenalkan adat daerah melalui busana adat yang mereka gunakan selama bertugas.

### SURVEI NEEDS AND WANTS CUSTOMER

Selain bisnis aeronautika, Angkasa Pura I menjalankan lini bisnis nonaeronautika. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan pendapatan lini bisnis ini yaitu dengan menyediakan produk barang dan jasa yang sesuai dengan

kebutuhan dan keinginan pelanggan Angkasa Pura I.

Terkait hal tersebut, Angkasa Pura I melibatkan pengguna jasa dan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan analisis *market research* melalui Survei *Needs and Wants* di beberapa bandara yang sedang atau akan mengalami pengembangan. Tujuan pelaksanaan Survei *Needs and Wants* adalah untuk memperoleh informasi mengenai preferensi pelanggan agar Angkasa Pura I dapat menyediakan kegiatan usaha yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Hasil analisis survei tersebut digunakan menjadi pertimbangan untuk menentukan mitra usaha.

Sepanjang tahun 2019, Angkasa Pura I melaksanakan Survei *Needs and Wants* di tiga bandara dengan rincian sebagai berikut.

Lokasi *Survei Needs and Wants* PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Lokasi Bandara	Tanggal Pelaksanaan
Bandara Internasional Lombok	10 s.d 16 Juli 2019
Bandara Sam Ratulangi Manado	10 s.d 16 Juli 2019
Bandara Juanda Surabaya	10 s.d 16 Juli 2019

## INOVASI PELAYANAN

Dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan yang dinamis, Angkasa Pura I melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan. Pada tahun 2019, inisiatif inovasi pelayanan antara lain yaitu:

### 1. Ruang Multisensori (*Multy Sensory Room*)

Ruang multisensori merupakan fasilitas ruang tunggu yang disediakan bagi penumpang dengan spektrum autisme. Fasilitas ini disediakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang saat menunggu waktu *boarding*. Diresmikan pada 21 Oktober 2019 di terminal Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Fasilitas ini merupakan layanan *multisensory* pertama di bandara di Asia-Pasifik.

Fasilitas yang tersedia dirancang untuk merangsang berbagai indera melalui matras di lantai dan dinding, lantunan instrumen musik, bola *gymnastic*, dan lampu LED warna-warni. Ruangan ini didesain khusus untuk memberikan stimulan yang menenangkan, mengatasi ketegangan, dan mengurangi perilaku temper tantrum pada anak dengan spektrum autisme. Terdapat dua tipe ruangan dengan kegunaan berbeda, yaitu ruangan putih (*white room*) dan ruangan gelap (*black room*). *White room* berguna untuk menciptakan rasa aman, nyaman, dan santai sementara *black room* berguna untuk memfasilitasi pemahaman anak dengan spektrum autisme terhadap lingkungan sekitar dan pemahaman mengenai hubungan sebab-akibat.

### 2. Ruang Tunggu Penumpang Berkebutuhan Khusus (*Special Needs Services Holding*

### *Room*)

Ruang tunggu penumpang berkebutuhan khusus merupakan ruangan yang disediakan bagi Penumpang berkebutuhan khusus, di area *check in* terminal penumpang. Ruang tunggu penumpang berkebutuhan khusus (*special needs services holding room*) diresmikan pada 21 Oktober 2019 di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Ruang tunggu penumpang berkebutuhan khusus (*special needs services holding room*) telah tersedia di 6 (enam) bandara Angkasa Pura I, yakni:

- Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali
- Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo
- Bandara Adi Soemarmo Solo
- Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang
- Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan
- Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

Ruang tunggu penumpang berkebutuhan khusus (*special needs services holding room*) sama halnya dengan ruang multisensori, didesain khusus dengan harapan membuat rasa tenang dan nyaman saat menunggu proses *check in* dan/atau waktu *boarding*. Ruang tunggu penumpang berkebutuhan khusus (*special needs services holding room*) dilengkapi dengan fasilitas kursi, meja, *bean bag*, dan kasur.

Dengan tersedianya fasilitas ini, diharapkan meningkatkan kenyamanan pengguna jasa bandara berkebutuhan khusus serta menambah nilai pelayanan bagi mitra kerja, mitra usaha, dan pengelola bandara.

### 3. Buku Panduan

Menindaklanjuti telah tersedianya ruang multisensori dan ruang tunggu penumpang berkebutuhan khusus, unit kerja Airport Services & Hospitality menerbitkan beberapa panduan berbasis *e-book*, yaitu:

- a. Panduan Pelayanan Penumpang Berkebutuhan khusus Spektrum Autisme di Bandar Udara,
- b. Panduan Pelayanan Penumpang Berkebutuhan Khusus di Bandar Udara, dan
- c. Panduan Pengalaman Penumpang di Bandar Udara PT Angkasa Pura I (Persero).

Pengesahan buku panduan tersebut bersamaan dengan peresmian ruang multisensori dan *special needs services holding room* yang dilaksanakan di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang dengan peruntukan sebagai berikut:

- a. Buku panduan penumpang berkebutuhan khusus dan spektrum autisme ditujukan untuk petugas bandara, dan
- b. Panduan pengalaman penumpang di bandara Angkasa Pura I ditujukan untuk pengguna jasa bandara yang dapat diakses melalui *website* [www.ap1.co.id](http://www.ap1.co.id)

Sosialisasi dan bimbingan teknis atas buku panduan telah dilaksanakan secara daring dan secara langsung di Kantor Pusat kepada personil bandara di wilayah kerja Angkasa Pura I. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan kompetensi dan kemampuan personil dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, khususnya para pengguna jasa berkebutuhan khusus.

#### 4. *Live Chat*

*Live chat* merupakan layanan pesan secara daring dan langsung menggunakan fitur otomatis yang terkoneksi dengan petugas. Kini pengguna jasa dapat berinteraksi dengan penyedia layanan secara mudah. Tujuan penyelenggaraan *live chat* adalah sebagai berikut:

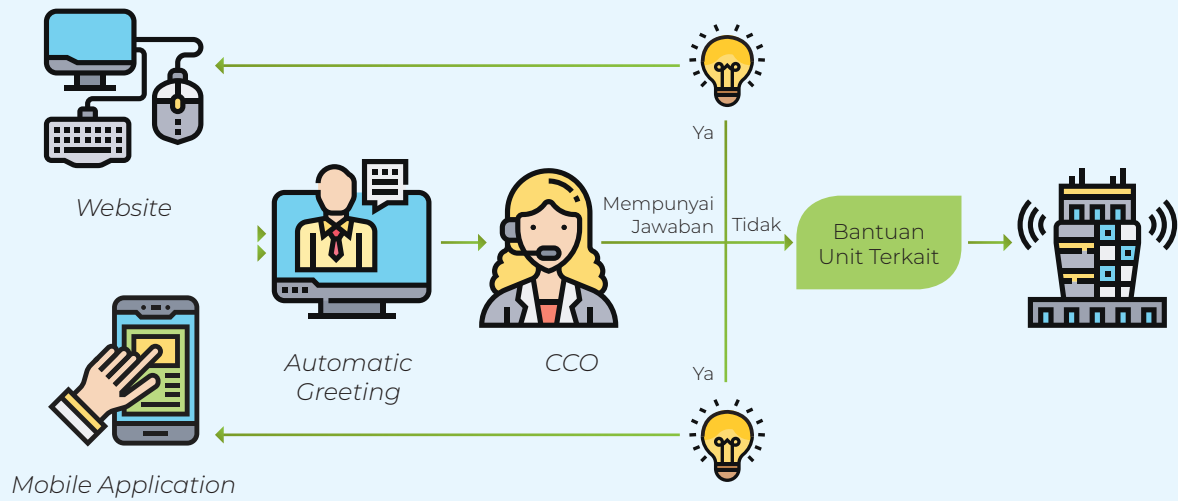
- a. Peningkatan layanan Suara Pelanggan (*Voice of Customer*);
- b. Peningkatan kepuasan pengguna jasa; dan
- c. Kemudahan pengguna jasa berkomunikasi dengan penyedia jasa secara *real time*.





Fasilitas *Live Chat* dapat diakses melalui website [www.ap1.co.id](http://www.ap1.co.id) dan website di wilayah kerja PT Angkasa Pura I (Persero).

### Alur grafis pelayanan *Live Chat*



## 5. *Lost and Found System*

*Lost and found system* merupakan layanan yang disediakan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kepuasan pengguna jasa bandara, dengan objektif sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemudahan bagi pengguna jasa dalam menyampaikan suara pelanggan terkait barang yang tertinggal dan/atau hilang di bandara;
- b. Meningkatkan kemudahan bagi pengguna jasa untuk mengetahui informasi barang-barang yang tertinggal dan/atau ditemukan di bandara;
- c. Meningkatkan kinerja dan integrasi pelaporan Suara Pelanggan khususnya pelaporan dan/atau temuan barang tertinggal dan/atau hilang di bandara.

Penyediaan layanan ini diselenggarakan melalui kolaborasi dengan unit kerja Airport Security dan Information Technology sebagai penyedia sistem/aplikasi.

### TOURIST INFORMATION CENTER

Pariwisata merupakan salah satu alasan pengguna jasa menuju ke suatu tempat atau daerah yang terkadang perlu ditempuh menggunakan pesawat udara karena faktor jarak dan waktu. Oleh karena itu, Angkasa Pura I bersama Kementerian Pariwisata melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung pariwisata di Indonesia dengan menghadirkan layanan Tourist Information Center (TIC). Layanan ini disediakan di terminal bandara dan digunakan sebagai tempat pengguna jasa untuk bertanya dan/atau mengetahui atraksi wisata, lokasi wisata, kuliner, akomodasi transportasi daerah setempat dan destinasi wisata lainnya.

Konter TIC ditempatkan di area Terminal Kedatangan di seluruh bandara Angkasa Pura I dan dilengkapi dengan fasilitas, antara lain *leaflet*, peta lokasi wisata serta layar monitor yang berisi tayangan informasi pariwisata. Para wisman setelah tiba di bandara, selain mengunjungi TIC, juga dapat berbincang-bincang dengan Duta Bandara PT Angkasa Pura I (Persero) dan Petugas

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang siap memberikan berbagai informasi terkait pariwisata sesuai kebutuhan.

### DUTA BANDARA

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, membina hubungan pelanggan yang baik dan berkesinambungan antara pengguna jasa dengan pengelola bandara, Angkasa Pura I telah melaksanakan program perekrutan Duta Bandara tahun 2019.

Program Duta Bandara diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih humanis kepada pengguna jasa (*Extra Life Facilities*), meningkatkan *welcoming value* melalui tegur sapa yang sesuai dengan profil penumpang dan memberikan kontribusi terhadap *atmosphere* atau *hospitality ambience* di Bandar Udara.

Duta Bandara terpilih, berjumlah 42 orang, merupakan putra/putri daerah, berdomisili tetap sesuai dengan daerah masing-masing, di wilayah kerja PT Angkasa Pura I (Persero), telah melalui berbagai tahapan seleksi yang dipersyaratkan, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pegawai dengan Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 30 April 2021 dan selama masa waktu yang telah ditentukan tersebut, tidak diperkenankan mengikuti ajang pemilihan sejenis dan/atau menjadi duta instansi/badan usaha selain dari Angkasa Pura I.

Duta Bandara bertugas untuk mempresentasikan dan mempromosikan pelayanan bandara, pariwisata serta kebudayaan di daerahnya masing-masing, mengedukasi dan mempublikasikan kebijakan dan/atau peraturan kebandarudaraan kepada masyarakat khususnya pengguna jasa bandara terkait *safety, security, services and compliance (3S+1C)* melalui Akun Media Sosial yang dimiliki. Selain itu, Duta Bandara berperan aktif dalam setiap *event* yang diselenggarakan PT Angkasa Pura I (Persero), menjadi representatif untuk peningkatan *Customer Satisfaction Index (CSI)* dan citra (*brand image*) perusahaan.

Tugas dan fungsi Duta Bandara Angkasa Pura I adalah sebagai berikut:

1. *Corporate branding*, menciptakan atau menyusun kegiatan atau publikasi atau kampanye atau promosi yang bertujuan meningkatkan citra positif perusahaan.
2. *Public relation*, menciptakan atau menyusun dan/atau mempublikasikan lokasi pariwisata dan/atau aktivitas (agenda) wisata dan/atau kuliner wisata setempat.
3. *Tourism promotion*, mewakili dan/atau mendampingi perusahaan dalam suatu kegiatan terkait promosi pariwisata.

## SERTIFIKASI

Hingga akhir tahun 2019, seluruh bandara Angkasa Pura I telah memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Sertifikasi tersebut, diberikan oleh United Registrar of Systems (URS), Lloyd's Register Indonesia, dan TUV Rheinland, mencakup aspek Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U), Pelayanan Jasa Pendaratan Pesawat Udara (PJP4U), serta Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U).

Di samping sertifikasi tersebut, sejak tahun 2016, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, Bandara Juanda Surabaya, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar telah mendapatkan sertifikat *Airport Excellence in Safety* dari Airports Council International (ACI).

## DAMPAK KUANTITATIF

Angkasa Pura I melakukan penilaian kepuasan pelanggan sebagai salah satu pendekatan untuk mengevaluasi dampak dari berbagai inisiatif pelayanan pelanggan yang telah dilakukan. Penilaian tersebut yaitu survei *Customer Satisfaction Index* (CSI) yang melibatkan berbagai pihak, seperti penumpang, kru pesawat, station manager maskapai, mitra usaha konsesional, dan mitra usaha kargo. Survei CSI tahun 2019 dilaksanakan oleh lembaga independen nasional, yakni Indonesia National Air Carrier Association (INACA) dengan menggunakan pengukuran skala likert 1 sampai 5. Hasil survei CSI tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan dibanding tahun 2018, yang ditunjukkan secara rinci sebagai berikut.





Hasil Survei CSI Bandara PT Angkasa Pura I (Persero)

Lokasi	Skor 2019	Skor 2018
Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan – Balikpapan	4,85	4,76
Bandara I Gusti Ngurah Rai – Denpasar	4,81	4,77
Bandara Sultan Hasanuddin – Makassar	4,58	4,42
Bandara Sam Ratulangi – Manado	4,63	4,58
Bandara Syamsudin Noor – Banjarmasin	4,52	4,44
Bandara El Tari – Kupang	4,50	4,38
Bandara Frans Kaisiepo - Biak	4,42	4,22
Bandara Jendral Ahmad Yani – Semarang	4,61	4,35
Bandara Lombok – Lombok Tengah	4,44	4,27
Bandara Pattimura – Ambon	4,21	4,22
Bandara Juanda – Surabaya	4,63	4,47
Bandara Adi Soemarmo – Surakarta	4,40	4,21
Bandara Adisutjipto – Yogyakarta	4,27	4,07

Selain survei CSI, dampak positif dari tanggung jawab kepada konsumen juga dinilai dari tingkat kualitas pelayanan bandara, yaitu melalui survei Airport Service Quality (ASQ). Survei ini dilaksanakan oleh lembaga independen internasional, yakni Airports Council International (ACI), terhadap 10 (sepuluh) bandara Angkasa Pura I, meliputi Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan,

Bandara Sam Ratulangi Manado, Bandara Internasional Lombok, Bandara Adi Soemarmo Solo, dan Bandara El Tari Kupang.

Terdapat 34 aspek yang dinilai dalam Survei ASQ, antara lain akses dari dan ke bandara, fasilitas bandara, suasana, layanan petugas, serta aspek-aspek lainnya yang terkait pelayanan kepada pengguna jasa. Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut menggunakan ukuran skala likert dengan nilai terendah 1 dan tertinggi 5.

Secara umum, hasil survei ASQ tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan bandara dibanding tahun sebelumnya.

Hasil Survei ASQ PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2018 dan 2019

Lokasi	Skor 2019	Skor 2018
Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang - Balikpapan	4,97	4,93
Bandara I Gusti Ngurah Rai - Denpasar	4,94	4,92
Bandara Sultan Hasanuddin - Makassar	4,80	4,62
Bandara Sam Ratulangi - Manado	4,75	4,69
Bandara El Tari - Kupang	3,98	3,93
Bandara Lombok - Lombok Tengah	4,42	4,17
Bandara Adi Soemarmo - Solo	4,29	4,26
Bandara Juanda - Surabaya	4,80	4,86
Bandara Ahmad Yani - Semarang	4,36	-
Bandara Pattimura - Ambon	3,50	-

Peningkatan hasil Survei ASQ tahun 2019 yang paling signifikan yaitu pada Bandara Lombok, dengan skor 4.42 naik dari skor 4.17 pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dipicu oleh adanya upaya yang dilakukan oleh Bandara Lombok dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pengguna jasa bandaranya sekaligus persiapan Lombok sebagai tuan rumah *event* internasional MotoGP tahun 2021. Lombok melakukan pengembangan sarana dan prasarana layanan di area sisi udara (*airside*): pembangunan *apron* dan *parallel taxiway* dengan penambahan 8 *parking stand* untuk pesawat *narrow body*, Bandara Internasional Lombok kini memiliki 18 *parking stand* setara *narrow body* sehingga bisa mengakomodir 22 pergerakan pesawat per jam. Sedangkan di area terminal: pembangunan perluasan terminal di

sisi barat yang akan dioperasikan menjadi terminal internasional dan sisi timur menjadi terminal domestik, penambahan ruang tunggu untuk penumpang dengan luasan 1.087 meter persegi di lantai 3 terminal *existing* yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung yakni toilet dan musholla. Upaya peningkatan fasilitas lainnya dilakukan di sisi darat (*landside*), yaitu: penataan lokasi usaha pedagang kaki lima dengan menyediakan tempat dagang dan disertai edukasi kepada para pedagang agar mereka menjadi tertib, bersih, dan rapih dalam menjalankan usahanya. Upaya lainnya yaitu melakukan penanganan taksi liar dengan bekerja sama dengan personil keamanan TNI dan Polri disertai larangan kepada para supir taksi liar atas kegiatan ilegalnya yang mengganggu kenyamanan pengguna jasa bandara.



## DAMPAK KESELAMATAN BIDANG *QUALITY MANAGEMENT*

Sepanjang tahun 2019, Angkasa Pura I mampu meningkatkan dampak keselamatan bagi pengguna jasa secara efektif. Hal tersebut berkat komitmen segenap insan Angkasa Pura I dan peran para pemangku kepentingan dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Di samping itu, sosialisasi dan pelatihan di bidang *quality management* juga mampu membuat kinerja pelayanan keselamatan bandara membaik.

Salah satu dampak keselamatan di bidang *quality management* yang berhasil dicapai yaitu hasil Audit Mutu Internal Ruang Lingkup Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U); Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U); dan Pelayanan Jasa Pos & Kargo Pesawat Udara (PJKP2U) yang semakin membaik dalam beberapa tahun terakhir.

Berikut ini tabel yang menampilkan jumlah temuan Audit Mutu Internal Angkasa Pura I untuk periode kinerja 2017, 2018, dan 2019.

Jumlah Temuan Audit Mutu Internal PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2017-2019

Cabang	DPS	UPG	SUB	BPN	JOG	BDJ	MDC	LOP	SRG	AMQ	KOE	BIK	SOC	Total
2019	13	13	12	6	23	8	10	13	11	10	14	10	15	160
2018	6	2	1	17	12	0	11	11	2	7	5	8	2	84
2017	2	6	2	20	19	5	8	13	1	50	5	16	11	158

Berdasarkan data hasil temuan Audit Mutu Internal dan Eksternal, masing-masing bandara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan:

1. Adanya penambahan ruang lingkup audit dari 2 ruang lingkup (PJP2U & PJP4U) menjadi 3 ruang lingkup (PJP2U, PJP4U dan PJKP2U) pada 2018 dan 2019.
2. Pada prinsipnya dalam Sistem Manajemen Mutu, dengan adanya suatu temuan audit maka hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau adanya peluang perbaikan. Ketidaksesuaian sendiri adalah penyimpangan melalui bukti obyektif atas kriteria audit yang telah ditetapkan dalam klausul ISO 9001:2015. Auditor harus menginvestigasi untuk menentukan secara tepat kriteria audit yang tidak sesuai dan menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan atas hasil temuan tersebut.
3. Semakin banyak temuan bukan berarti menunjukkan buruknya kinerja, melainkan semakin mendalamnya auditor menemukan temuan ketidaksesuaian dalam suatu proses kerja. Semakin sering melakukan audit, auditor semakin ahli dalam mengumpulkan informasi/bukti audit untuk dibandingkan dengan audit kriteria yang mana keseluruhan dari hasil tersebut disimpulkan untuk menilai keefektifan implementasi sistem manajemen mutu.
4. Audit mutu dilakukan secara *sampling*, semakin banyak proses yang diaudit memungkinkan semakin banyak ketidaksesuaian ditemukan. Hal ini bermanfaat untuk melakukan perbaikan proses kerja yang lebih baik dan paling terpenting dalam temuan ini adalah bukan penurunan jumlah temuannya, melainkan penyelesaian atau tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian yang ada, semakin banyak hasil tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian yang statusnya terselesaikan, maka semakin baik budaya mutu.

# Pengembangan Sosial Masyarakat



## KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Angkasa Pura I melihat masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang penting dan berpengaruh di dalam lingkup bisnis perusahaan. Oleh sebab itu, Angkasa Pura I berkomitmen untuk menciptakan hubungan harmonis dengan masyarakat serta mengelola dampak langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan operasi atau kebijakan perusahaan. Hal tersebut dilakukan melalui inisiatif sosial dan kemasyarakatan, khususnya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) lainnya secara terencana, tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.

Kegiatan pengembangan sosial dan kemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan beberapa kebijakan berikut:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
4. Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.103/KU.13/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero).
5. Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.239/KU.12/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.103/KU.13/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero).
6. Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.238/KU.13/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero).



## PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Pendekatan yang dilakukan oleh Angkasa Pura I dalam menjalankan tanggung jawab sosial di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan yaitu melalui mekanisme Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dalam hal ini, Angkasa Pura I melaksanakan PKBL sesuai dengan arahan program Kementerian BUMN dan kebutuhan masyarakat.

Pada praktiknya, Angkasa Pura I melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lain yang terkait dalam merumuskan program CSR di bidang sosial kemasyarakatan melalui berbagi aktivitas. Beberapa di antaranya yaitu melalui kegiatan survei yang melibatkan *stakeholder*

yang relevan seperti Dinas Pariwisata serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, evaluasi yang dilakukan oleh tim manajemen di kantor cabang wilayah program kerja, review serta pengajuan persetujuan Direksi, hingga pemilihan vendor yang memenuhi standar perusahaan.

Selanjutnya, dalam perumusan kegiatan PKBL, Angkasa Pura I telah mempertimbangkan berbagai dampak dan risiko serta peluang yang ada di masyarakat. Beberapa hal di antaranya yaitu risiko sosial pemberian pinjaman berupa pinjaman macet, yang dapat dimitigasi dengan sistem dan prosedur pemberian kredit.

## PERENCANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Angkasa Pura I telah menetapkan target pelaksanaan PKBL antara lain jumlah penerima manfaat pinjaman berikut pembinaan terhadapnya, serta daya serap program bantuan. Dalam menjalankan PKBL, beberapa program yang bertujuan untuk menurunkan dampak negatif terhadap masyarakat diantaranya melalui program pelatihan warga yang terdampak pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta. Lebih jauh lagi, terdapat beberapa program Angkasa Pura I yang direncanakan sepanjang tahun 2019 dengan tujuan membangun modal sosial dan kemandirian masyarakat. Program kegiatan tersebut yaitu melalui penyaluran program kemitraan untuk Desa Binaan Putat Patuk Gunung Kidul, terutama di sektor industri dan perdagangan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dari masyarakat setempat.

Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan kegiatan, Angkasa Pura I berupaya menciptakan manfaat bersama antara Perusahaan dan pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah setempat

seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta mitra pelaksana kegiatan yang memenuhi standar perusahaan.

Dalam situasi tertentu, Angkasa Pura I memiliki mekanisme keadaan darurat dan/ atau konflik terkait dengan hubungan masyarakat melalui *contact center* Angkasa Pura 172.

Sepanjang tahun 2019, Angkasa Pura I telah mengalokasikan dana PKBL sebesar Rp70.164.579.500. Program yang menjadi unggulan di tahun 2019 diantaranya:

### a. Pelayanan Kesehatan Keliling

Pelayanan Kesehatan Keliling merupakan program unggulan Angkasa Pura I sejak tahun 2012. Hingga tahun 2019, sebanyak 12 Kantor Cabang yang telah melaksanakan program tersebut. Program ini merupakan pemberian pelayanan kesehatan gratis bagi warga disekitar wilayah kerja, khususnya bagi desa-desa yang jauh dari fasilitas kesehatan setempat. Target penerima manfaat dari

program ini adalah ibu hamil, bayi dan balita, namun tidak menutup pasien umum dapat ikut memeriksakan kesehatannya di program ini. Angkasa Pura I bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat dimana saat pelaksanaannya akan dibantu oleh Puskesmas setempat. Program ini dilaksanakan di beberapa desa disekitar wilayah kerja secara bergantian sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Dalam program ini juga disiapkan 1 unit ambulans untuk memudahkan mobilisasi pasien yang membutuhkan penganganan khusus ke rumah sakit terdekat. Sepanjang tahun 2019, sebanyak sebanyak 1.395 ibu hamil, 10.868 bayi/balita, dan 12.675 pasien umum telah mendapatkan pelayanan dari program Pelayanan Kesehatan Keliling ini. Selain memberikan pengobatan gratis, program ini juga memberikan paket makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, pemberian edukasi tentang gizi, serta edukasi kepada kader posyandu antara lain untuk mencegah gizi buruk. Realisasi biaya kegiatan program Pelayanan Kesehatan Keliling selama tahun 2019 adalah sebesar Rp 3.180.181.009,-

#### a. Toilet Umum di Tempat Wisata

Program unggulan yang lainnya yaitu pembangunan toilet wisata di tempat wisata sekitar wilayah kerja Angkasa Pura I. Selama tahun 2019, Angkasa Pura I telah membangun toilet umum di 6 tempat wisata, yaitu:

- Pantai Lasiana Kupang
- Pantai Pulisan Minahasa utara
- Hutan Pinus Pengger Yogyakarta
- Taman Satwa Taru Jurug Surakarta
- Area Parkir Kawasan Pura Besakih Bali
- Taman Batimurung Maros

Melalui program ini, diharapkan jumlah kunjungan wisatawan ke tempat wisata meningkat, karena fasilitas toilet umum merupakan hal vital untuk menjamin kenyamanan wisatawan. Dalam pelaksanaannya, Angkasa Pura I berkoordinasi

dengan Dinas Pariwisata dalam pemilihan tempat wisata yang akan diberikan bantuan toilet umum, yaitu lokasi wisata yang memiliki jumlah kunjungan yang relatif tinggi namun belum memiliki fasilitas toilet umum yang memadai. Dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas ini, Angkasa Pura I bekerja sama dengan PT Angkasa Pura Properti Realisasi biaya yang dikeluarkan untuk program ini adalah sebesar Rp3.980.313.000.

#### b. Beasiswa Diploma III Prodi Kebandarudaraan

Program beasiswa ini merupakan program unggulan baru ditahun 2019. Angkasa Pura I memberikan beasiswa penuh kepada 30 siswa terpilih untuk menjalani pendidikan jenjang Diploma III dengan konsentrasi pendidikan kebandarudaraan. Dalam pelaksanaannya, PT Angkasa Pura I (Persero) bekerja sama dengan Universitas Mataram Lombok, lembaga kursus bahasa Inggris English First (EF). Selain memfasilitasi perkuliahan, Angkasa Pura I juga menggandeng TNI untuk membina para siswa dalam hal kedisiplinan. Diharapkan dengan diberikan beasiswa dan penunjang tersebut, akan meluluskan insan-insan muda yang tidak hanya berkemampuan tinggi tapi juga bertanggung jawab.

Untuk dapat mengikuti program ini para calon siswa yang mendaftar harus mengikuti 4 tahapan seleksi yaitu, seleksi administrasi, seleksi psikotes, seleksi kesehatan dan seleksi wawancara. Di tahun 2019, dari 66 calon siswa yang mendaftar program ini, sebanyak 29 siswa lulus tahapan seleksi dan berhak mengikuti program beasiswa. Para peserta merupakan siswa/siswi lulusan SMA dan SMK yang direkomendasikan oleh sekolah masing-masing melalui Dinas Pendidikan setempat. Selama melaksanakan program ini, para siswa juga menerima fasilitas akomodasi di *training center* Selaparang, Lombok. Realisasi biaya atas program ini adalah sebesar Rp1.692.024.877,-

### c. Perpustakaan Digital

Mengikuti perkembangan era digital saat ini, Angkasa Pura I berinisiatif untuk membentuk Program Perpustakaan Digital untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Program ini berupa akses gratis ke *website* berisi *e-book* bacaan umum, remaja, anak dan sastra klasik serta buku kurikulum untuk SD/MI, SMP dan SMA. Selain *e-book* tersedia pula buku audio dan film edukasi. Fasilitas dari perpustakaan digital ini direncanakan akan dipasang di fasilitas umum di daerah sekitar wilayah kerja secara bertahap. Di tahun 2019, fasilitas perpustakaan digital telah dipasang di tiga wilayah sekitar kantor cabang Angkasa Pura I yaitu :

- Kantor Cabang Bandara Adisutjipto: Taman Baca Cinarito, Desa Nologaten Ambarukmo
- Kantor Cabang Bandara Syamsudin Noor: Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Komplek Kuranji, Kota Banjarbaru
- Kantor Cabang Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan: Rumah Pintar Sepinggan Raya.

Masyarakat yang ingin membaca mengakses *e-book* dan buku audio hanya perlu mendatangi tempat-tempat yang telah dipasang fasilitas perpustakaan digital dan dapat menyambungkan *handphone/ tablet/ komputer*. Dalam program ini Angkasa Pura I bekerja sama dengan Balai Pustaka sebagai pihak penyedia fasilitas dan konten *e-book*. Realisasi biaya untuk program ini di tahun 2019 adalah sebesar Rp353.620.000,-

### d. BUMN Hadir Untuk Negeri

Program BUMN Hadir Untuk Negeri merupakan program rutin yang diprakasai oleh Kementerian BUMN. Untuk memastikan bahwa kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, maka Kementerian BUMN membagi wilayah Perayaan 74 tahun Indonesia Merdeka di 34 Provinsi dengan masing-masing dipimpin oleh BUMN penanggung jawab dengan dibantu dengan BUMN Wakil.

Pada program perayaan Kemerdekaan RI ke-74 di Provinsi Jawa Tengah, Angkasa Pura I ditunjuk menjadi penanggung jawab dengan dibantu wakil penanggung jawab, yaitu PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero), PT Perkebunan Nusantara IX, dan PT Perkebunan Nusantara X. Selain itu, pada tahun 2019 rangkaian program “BUMN Hadir Untuk Negeri” yang dilaksanakan Angkasa Pura I adalah sebagai berikut:

- Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia dan Pesta Rakyat;
- Jalan sehat 5 Kilometer;
- Siswa Mengenal Nusantara (SMN);
- Elektrifikasi rumah penduduk;
- Bantuan bedah rumah;
- Mudik bareng BUMN;
- Perayaan Natal dan Tahun Baru;
- Safari Ramadan.

Realisasi biaya untuk program BUMN Hadir Untuk Negeri di tahun 2019 adalah sebesar Rp4.893.218.922.

## URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

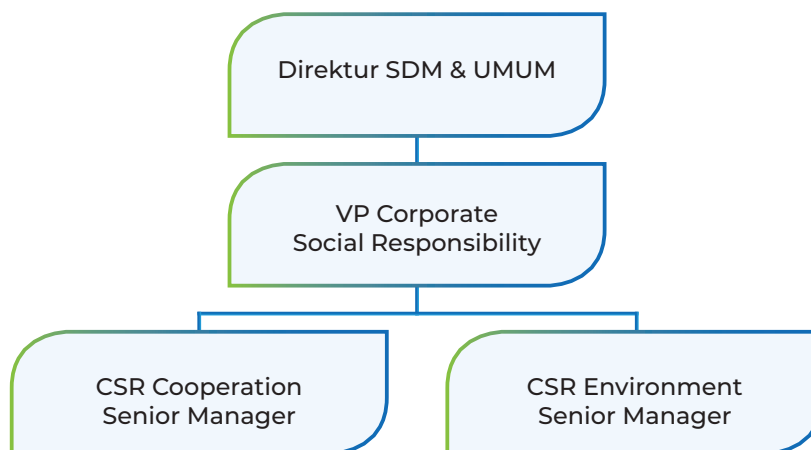
### Struktur Pengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Organisasi pengelola PKBL berada di Unit Corporate Social Responsibility sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) nomor KEP.101/OM.01.01/2018. Unit tersebut bertanggungjawab langsung kepada Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum.

Pelaksanaan dan pengelolaan dana PKBL di Kantor Pusat berada di bawah tanggung jawab

Vice President Corporate Social Responsibility yang dibantu langsung oleh Corporate Social Responsibility Cooperation Senior Manager dan Corporate Social Environment Senior Manager. Adapun pengelolaan dana PKBL di Kantor Cabang yang termasuk ke dalam kategori bandara besar dilaksanakan oleh CSR Manager yang bertanggung jawab kepada Shared Services Senior Manager. Pengelolaan dana PKBL di Kantor Cabang lainnya dilaksanakan oleh Manager yang membidangi Human Capital di bawah tanggung jawab Senior Manager yang membidangi Shared Services.

Struktur Organisasi Pengelola PKBL PT Angkasa Pura I (Persero)



### Keterlibatan Manajemen dan Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan, di Angkasa Pura I dijalankan secara strategis dan melibatkan para pemangku kepentingan utama. Di internal Angkasa Pura I, *top management*, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam mengevaluasi Laporan PKBL dan membahasnya di dalam Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris.

### Program Kemitraan

Program Kemitraan bertujuan untuk menyalurkan pinjaman kemitraan untuk modal kerja dan investasi bagi usaha kecil yang dijalankan oleh masyarakat. Melalui pinjaman kemitraan, roda

perekonomian masyarakat diharapkan dapat bergerak secara mandiri untuk menciptakan pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

#### a. Penyaluran Dana Program Kemitraan

Angkasa Pura I menyediakan dana untuk Program Kemitraan yang bersifat non-komersial bagi pelaku usaha kecil. Mekanisme penyaluran dana dilakukan berdasarkan evaluasi atas pemenuhan persyaratan, ketentuan angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan usaha, serta mempertimbangkan kebutuhan pembinaan bagi pelaku usaha. Realisasi penyaluran dana program kemitraan telah mencapai sasaran secara efektif, yakni sebagai berikut:

Total Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan Tahun 2017 - 2019

Tahun	Jumlah Mitra	Nilai (Rp)	Jumlah Mitra	Nilai (Rp)
2019	513	23.091.500	14.212	413.012.749
2018	435	26.517.500	13.699	389.921.250
2017	560	26.887.000	13.264	363.403.750

Berdasarkan penyebaran mitra binaan per sektor usaha, dana pinjaman yang disalurkan terbesar ke sektor perdagangan sebesar Rp185.601.696. Di sisi lain, penyaluran terendah yaitu ke

sektor perkebunan sebesar Rp3.508.250. Detail penyaluran dana per sektor usaha sampai dengan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Total Penyaluran Pinjaman Kemitraan berdasarkan Sektor Tahun 2019

Lokasi	Realisasi Akumulasi Sampai dengan Tahun 2018		Realisasi Tahun 2019		Realisasi Akumulasi Sampai dengan Tahun 2019	
	Jumlah Mitra Binaan	Nilai (Rp)	Jumlah Mitra Binaan	Nilai (Rp)	Jumlah Mitra Binaan	Nilai (Rp)
Industri	3.341	98.784.762	142	6.688.500	3.483	105.473.262
Perdagangan	6.551	174.946.696	227	10.655.000	6.778	185.601.696
Pertanian	155	14.060.866	5	335.000	160	14.395.866
Peternakan	350	8.548.342	20	750.000	370	9.298.342
Perkebunan	97	2.763.250	27	745.000	124	3.508.250
Perikanan	136	3.633.500	11	490.000	147	4.123.500
Jasa	2.894	83.195.833	80	3.420.000	2.974	86.615.833
Lainnya	175	3.988.000	1	8.000.000	176	3.996.000
Total	13.699	389.921.250	513	23.091.500	14.212	413.012.749

Selanjutnya, jika dilihat penyaluran dana Program Kemitraan berdasarkan wilayah, jumlah mitra binaan yang terbanyak yaitu sebesar Rp49.300.346 untuk 1.435 mitra berada di wilayah Jawa Timur. Kemudian, jumlah mitra binaan terbesar kedua berada di Bali, sebesar Rp47.820.750 serta Yogyakarta sebesar Rp40.594.950. Selain Jawa dan

Bali, jumlah penerima manfaat yang besar juga ada di Sulawesi Selatan sebanyak Rp36.746.250 untuk 1.420 mitra binaan dan di Kalimantan Timur sebanyak Rp35.971.500 untuk 1.027 mitra binaan. Jawa dan Bali masih menjadi sasaran terbesar karena jumlah populasi dan pelaku usaha yang paling banyak berada di kedua pulau tersebut.

Berdasarkan penyebaran mitra binaan per wilayah, dana pinjaman yang disalurkan sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Penyaluran Dana Pinjaman ke Mitra Binaan Berdasarkan Wilayah Hingga Desember 2019

Provinsi / Wilayah	Realisasi Akumulasi Sampai dengan Tahun 2018 (Rp)		Realisasi Tahun 2019 (Rp)		Realisasi Akumulasi Sampai dengan Tahun 2019 (Rp)	
DKI Jakarta	417	23.443.000	n/a	n/a	417	23,443,000
Bali	1.679	47.820.750	67	2.435.000	1,746	50,255,750
Jawa Timur	1.435	49.300.346	52	3,040,000	1,487	52,340,346
Sulawesi Selatan	1.420	36.746.250	38	1,395,000	1,458	38,141,250
Kalimantan Timur	1.027	35.971.500	45	2,340,000	1,072	38,311,500
Papua	569	9.221.500	5	230,000	574	9,451,500
Sulawesi Utara	830	22.115.750	40	1,795,000	870	23,910,750
Yogyakarta	1.110	40.594.950	52	2,360,000	1,162	42,954,950
Jawa Tengah (Solo)	747	21.687.250	31	1,660,000	778	23,347,250
Kalimantan Selatan	1.286	28.425.250	75	2,326,500	1,361	30,751,750
Jawa Tengah (Semarang)	830	23.838.512	31	1,805,000	861	25,643,512
Nusa Tenggara Barat	1.214	29.873.250	47	2,380,000	1,261	32,253,250
Maluku	211	3.553.000	12	405,000	223	3,958,000
Nusa Tenggara Timur	924	17.329.942	18	920,000	942	18,249,942
<b>Total</b>	<b>13.699</b>	<b>389.921.250</b>	<b>513</b>	<b>23,091,500</b>	<b>14,212</b>	<b>413,012,749</b>

#### a. Hibah Pembinaan

Pemberian hibah pembinaan merupakan salah satu turunan kegiatan Program Kemitraan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Angkasa Pura I menyalurkan hibah pembinaan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan produktivitas mitra binaan secara berkelanjutan. Program pelatihan mitra binaan dilaksanakan Angkasa Pura I bekerja sama dengan perguruan tinggi maupun

lembaga pendidikan yang berkompetensi dalam ilmu kewirausahaan.

Hingga tahun 2019, program pelatihan kepada mitra binaan yang telah dilaksanakan oleh Angkasa Pura I mencakup Pelatihan Kewirausahaan & Pemasaran Kreatif, Pelatihan Mitra Binaan, Pelatihan Pembuatan Bakso, Pelatihan Manajemen *Skill* Mitra Binaan, Pelatihan Dasar Pengembangan Usaha Mitra Binaan, Pelatihan Kewirausahaan, dan Pelatihan Mitra Binaan.

Di sisi lain, Angkasa Pura I setiap tahunnya juga memberi kesempatan kepada mitra binaan dari berbagai daerah untuk bertukar ilmu dan pengalaman bisnis dengan mitra binaan dari daerah lainnya melalui program pemagangan. Sepanjang tahun 2019, telah

dilaksanakan program pemagangan yang terdiri dari pertukaran pengalaman mitra binaan.

Selain memberikan pelatihan, pendidikan, dan kesempatan pemagangan kepada mitra binaan, Angkasa Pura I juga melakukan promosi terhadap produk barang dan jasa yang disediakan oleh mitra binaan melalui buku katalog dan pameran di dalam maupun luar negeri. Sepanjang tahun 2019, Angkasa Pura I telah mengikutsertakan mitra binaan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dalam Pesta Rakyat Nusantara, keikutsertaan mitra binaan Bandara Juanda Surabaya dalam Pameran Festival Merdeka Pertamina BHUN, Pameran Jatim Fair, dan Pameran Batik Fashion Fair.

Lalu, mitra binaan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ikut serta dalam Pameran Pekan Raya Sulsel, Pameran Makassar Expo, dan Pameran Hari Nusantara, keikutsertaan mitra binaan Bandara SAMS Sepinggang Balikpapan dalam Pameran Balikpapan Fair, Gebyar UKM, Pameran Mathilda Fest. Gebyar UKM Kaltim, Pameran Borneo Fair, dan Pameran 34th Trade

Expo, keikutsertaan mitra binaan Bandara Sam Ratulangi Manado di Pameran TIFF, dan Pameran Manado Fiesta, keikutsertaan mitra binaan Bandara Interasional Adi Soemarmo Surakarta dalam Pameran Mitra Binaan BHUN Solo, Pameran Gelar Kain Unggulan Nusantara, Pameran Yogya Inafact, dan Pameran Solo Craft Indo.

Selanjutnya keikutsertaan mitra binaan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin dalam Pameran Kalsel Expo, keikutsertaan mitra binaan Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang dalam Pameran Dekranasda Jateng Expo, serta keikutsertaan mitra binaan Bandara Internasional Lombok dalam Pameran NTB Expo.

Selain pameran tersebut, terdapat kegiatan pameran yang diikuti oleh beberapa kantor cabang yaitu Pameran Inacraft, dan Pameran Batam Inafact. Promosi pameran juga dilakukan sampai luar negeri dalam Pameran Festival Indonesia Daebak di Korea Selatan yang diikuti oleh mitra binaan Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

Penyaluran Hibah Pembinaan Mitra Binaan PT Angkasa Pura I (Persero)

Provinsi / Wilayah	Nilai (Rp)		
	2019	2018	2017
Pelatihan	474.091.866	749.062.600	868.685.000
Pameran	1.327.389.276	2.167.911.866	154.208.000
Pemagangan	130.828.000	134.804.132	1.740.377.000
Hibah kepada BUMN Khusus*	2.000.000.000	(-)	(-)
<b>Total</b>	<b>3.852.959.000</b>	<b>3.051.778.598</b>	<b>2.763.270.000</b>

\*Disalurkan sebagai pinjaman kemitraan melalui PT PNM kepada 856 usaha Mekar PNM di Bali, Surabaya, dan Balikpapan

### Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan merupakan wujud komitmen Angkasa Pura I untuk membantu meningkatkan kualitas hidup lingkungan sosial masyarakat. Sejak tahun 1992, pelaksanaan Program Bina Lingkungan mencakup kegiatan-kegiatan strategis dan responsif, yang terdiri dari:

a. Bantuan korban bencana alam;

b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;

c. Bantuan peningkatan kesehatan masyarakat;

d. Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum;

e. Bantuan sarana ibadah;

f. Bantuan pelestarian alam; dan

g. Bantuan sosial.



**a. Bantuan Korban Bencana Alam**

Dalam rangka meringankan beban masyarakat yang tertimpa bencana, Angkasa Pura I selalu siap siaga dalam memberikan bantuan tanggap darurat kepada korban bencana alam, seperti banjir, kebakaran, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung, dan sebagainya. Sampai dengan tahun 2019, Angkasa Pura I telah menyalurkan bantuan sebesar Rp8.157.300.324 kepada korban bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia, sedangkan pada tahun 2019 sendiri Angkasa Pura I telah menyalurkan dana sebesar Rp317.898.000, bantuan tersebut berupa bantuan untuk korban bencana gempa di Maluku Utara dan Ambon, bantuan bencana alam di Bantul, bantuan banjir di Manado, Maros, Sentani, dan Samarinda serta bantuan air bersih di Yogyakarta.

**b. Bantuan Bidang Pendidikan**

Program bantuan di bidang pendidikan oleh Angkasa Pura I mencakup fasilitas pendidikan formal bagi siswa dan siswi sekolah sekaligus pendidikan informal terkait keterampilan wirausaha untuk masyarakat yang lebih luas.

Bantuan pendidikan yang telah disalurkan oleh Angkasa Pura I hingga tahun 2019 mencapai Rp54.392.495.282 sedangkan pada tahun 2019 Angkasa Pura I telah menyalurkan dana sebesar Rp7.378.864.054 untuk sektor pendidikan. Bantuan tersebut diwujudkan melalui bantuan beasiswa, bantuan peralatan dan perlengkapan sekolah, bantuan sarana prasarana kegiatan belajar mengajar, bantuan pembangunan/renovasi sekolah, bantuan pelatihan kepada masyarakat, serta bantuan perpustakaan digital di Balikpapan, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Kupang.

**c. Bantuan Bidang Kesehatan**

Sejak tahun 2012, Angkasa Pura I fokus memberikan bantuan di bidang kesehatan untuk ibu dan balita dengan motto "Ibu & Anak Sehat, Bangsa Kuat". Demi menunjang program bantuan di bidang kesehatan, Angkasa Pura I memiliki fasilitas pelayanan

kesehatan keliling yang tidak hanya bisa dirasakan manfaatnya oleh ibu dan balita, tetapi juga masyarakat secara umum yang membutuhkan bantuan di sektor kesehatan.

Hingga tahun 2019, Angkasa Pura I telah menyalurkan bantuan kesehatan sebesar Rp30.517.932.999 sedangkan untuk tahun 2019 sendiri bantuan yang telah diberikan mencapai Rp4.899.194.549. Bantuan tersebut diwujudkan dalam bentuk beberapa kegiatan seperti pelayanan kesehatan keliling, khitanan massal, operasi katarak, pengobatan gratis, bakti sosial, bantuan sarana dan prasarana di instansi kesehatan, dan pembangunan sarana kesehatan di sekitar wilayah kerja PT Angkasa Pura I (Persero).

**d. Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum**

Angkasa Pura I mendukung program Kementerian BUMN untuk membangun desa melalui pengembangan sarana dan prasarana umum. Penyaluran bantuan pada sektor sarana dan prasarana umum rutin dilaksanakan oleh Angkasa Pura I. Hingga tahun 2019, total bantuan yang telah disalurkan Angkasa Pura I pada sektor ini mencapai Rp50.939.569.649 sedangkan biaya yang dikeluarkan secara khusus pada tahun 2019 adalah Rp10.463.197.368. Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana umum yang dilakukan Angkasa Pura I pada tahun 2019 berupa bantuan bedah rumah, bantuan kendaraan operasional di desa adat Bali, pengadaan sarana air bersih, bantuan sarana dan prasarana pengolahan sampah, pembangunan sarana pendukung, pembangunan / renovasi instansi sosial, pembangunan *public restroom* di area wisata sekitar bandara, serta bantuan pembangunan sarana pendukung wisata di sekitar wilayah kerja Angkasa Pura I.

**e. Bantuan Sarana Ibadah**

Kegiatan bantuan kemasyarakatan yang diberikan Angkasa Pura I turut mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah kebutuhan akan sarana ibadah yang memadai dan nyaman. Dalam rangka turut memperbaiki fasilitas umum, sampai dengan tahun 2019 total bantuan yang telah disalurkan PT Angkasa Pura I (Persero) pada sektor ini mencapai Rp45.336.405.910, sedangkan pada tahun 2019 Angkasa Pura I memberikan bantuan sebesar Rp6.522.727.042 untuk membantu pembangunan sarana ibadah, memperbaiki sarana ibadah, dan pengadaan perlengkapan maupun perlengkapan ibadah di sekitar wilayah kerja Perusahaan.

Melalui program bantuan ini, Angkasa Pura I berharap masyarakat dapat merasakan kehadiran Perusahaan secara lebih dekat, tidak hanya dari sektor hubungan bisnis semata.

**f. Bantuan Pelestarian Alam**

Angkasa Pura I menyadari bahwa kegiatan usaha pengelolaan kebandarudaraan memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan, mulai dari polusi udara, suara, hingga alih fungsi guna lahan secara luas. Oleh karena itu, Angkasa Pura I perlu berkontribusi kembali kepada pelestarian alam, terutama di daerah sekitar bandara dan di lingkungan masyarakat sekitar wilayah Perusahaan. Program bantuan pelestarian

alam di tahun 2019 telah terealisasi senilai Rp616.125.000 sedangkan total bantuan pelestarian alam hingga tahun 2019 yang disalurkan oleh Angkasa Pura I mencapai Rp6.787.199. Kegiatan pelestarian alam di tahun 2019 berupa penanaman mangrove, transplantasi terumbu karang, pengadaan pot dan pohon trembesi, pembangunan sarana wisata, dan bantuan pelestarian alam lainnya.

**g. Bantuan Sosial**

Bantuan sosial merupakan berbagai kegiatan yang dilaksanakan Angkasa Pura I dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat di wilayah usaha, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hingga tahun 2019, Angkasa Pura I telah menyalurkan dana sebesar Rp31.389.206.254 untuk bantuan sosial, sedangkan pada tahun 2019 saja, bantuan sosial yang telah diberikan adalah sebesar Rp9.458.177.560. Kegiatan bantuan sosial yang dilaksanakan PT Angkasa Pura I (Persero) pada tahun 2019 berupa bantuan sembako gratis, pembangunan sarana penunjang sosial, kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri di Boyolali, pengembangan daerah wisata, serta bantuan sarana prasarana dan pelatihan kepada pelaku UMKM di sekitar wilayah kerja Angkasa Pura I.

**h. Penyaluran Dana Bina Lingkungan**

Secara umum, dana yang telah disalurkan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) untuk Program Bina Lingkungan ditunjukkan pada tabel berikut:

Realisasi Dana Bina Lingkungan Angkasa Pura I Tahun 2019

Jenis Bantuan	Realisasi Akumulasi Hingga Tahun 2018 (ribu Rp)	Realisasi Tahun 2019 (ribu Rp)	Realisasi Akumulasi Hingga Tahun 2019 (ribu Rp)
Bencana Alam	7.839.402	317.898	8.157.300
Pendidikan dan Pelatihan	47.013.631	7.378.864	54.392.495
Peningkatan Kesehatan	25.618.738	4.899.194	30.517.932
Sarana Umum	40.476.372	10.463.197	50.939.569

## Realisasi Dana Bina Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Jenis Bantuan	Realisasi Akumulasi Hingga Tahun 2018 (ribu Rp)	Realisasi Tahun 2019 (ribu Rp)	Realisasi Akumulasi Hingga Tahun 2019 (ribu Rp)
Sarana Ibadah	38.813.678	6.522.727	45.336.405
Pelestarian Alam	6.171.074	616.125	6.787.199
Bantuan Sosial	21.931.028	9.458.178	31.389.206
Hibah Pembinaan	2.577.954	-	2.577.954
BUMN Peduli	10.428.992	-	10.428.992
<b>Total</b>	<b>200.870.872</b>	<b>39.656.183</b>	<b>240.527.056</b>

## i. Desa Binaan

Sejak tahun 2010 PT Angkasa Pura I (Persero) membina Dusun Bobung, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat setempat dan mengembangkan potensi yang dimiliki desa tersebut. Hingga tahun 2019, bantuan yang diberikan PT Angkasa Pura I (Persero) kepada Desa Bobung mencapai nilai Rp3.675.000.000, sedangkan untuk periode tahun 2019, dana kepada desa binaan yang telah disalurkan adalah senilai Rp210.000.000.

Sebagian besar dana bantuan yang diberikan pada tahun 2019 digunakan untuk membantu masyarakat Desa Bobung di sektor industri dan perdagangan. Bantuan dana untuk desa binaan ini disalurkan melalui program kemitraan untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat yang umumnya bermatapencaharian sebagai pengrajin batik kayu. Rincian dana yang diberikan untuk program kemitraan di Dusun Bobung pada masing-masing sektor sejak tahun 2010 hingga 2019 adalah sebagai berikut.

## Total Jumlah Penyaluran Dana Desa Binaan di Dusun Bobung Tahun 2010-2019

Sektor	Jumlah (Rp)	Mitra Binaan	Mitra Binaan Lanjutan
Industri	2.805.000.000	70	20
Jasa	130.000.000	4	1
Perdagangan	615.000.000	11	2
Perikanan	25.000.000	1	-
Peternakan	100.000.000	3	-
<b>Total</b>	<b>3.675.000.000</b>	<b>89</b>	<b>23</b>

## i. Program BUMN Hadir untuk Negeri

Setiap tahunnya, Angkasa Pura I aktif berpartisipasi untuk mendukung program BUMN Hadir untuk Negeri. Pada tahun 2019, program ini mencakup pelaksanaan program Siswa Mengenal Nusantara dan program Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Angkasa Pura I berkolaborasi dengan BUMN lain, yakni

PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero), PT Perkebunan Nusantara IX, dan PT Perkebunan Nusantara X dalam menjalankan program BUMN Hadir untuk Negeri di tahun 2019. Total realisasi dana BUMN Hadir untuk Negeri tahun 2019 adalah senilai Rp3.450.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

BUMN	Komposisi Kontribusi (Rp)
PT Angkasa Pura I (Persero)	2.950.000.000
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	250.000.000
PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	0
PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	250.000.000
Total	3.450.000.000



### SISWA MENGENAL NUSANTARA

Program Siswa Mengenal Nusantara merupakan kegiatan tetap dalam rangkaian program BUMN Hadir untuk Negeri yang dilaksanakan setiap tahun. Seleksi untuk kegiatan Siswa Mengenal Nusantara dilaksanakan pada bulan Juli 2019 di Semarang dan berhasil menjaring 20 siswa berprestasi dari SMA /SMK dan 3 siswa berkebutuhan khusus dari SLB di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini meliputi pelaksanaan program pertukaran pelajar ke Provinsi Sulawesi Utara untuk menerima pelatihan terkait jurnalistik, bela negara, hingga pengenalan budaya dan kesenian. Realisasi dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Siswa Mengenal Nusantara di tahun 2019 adalah senilai Rp952.541.473.

### PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT

Angkasa Pura I peduli akan kebutuhan dasar masyarakat yang sejalan dengan program BUMN Hadir untuk Negeri. Pada tahun 2019, Angkasa Pura I melaksanakan elektrifikasi dan pembangunan MCK, bantuan sarana air bersih, perbaikan rumah, beasiswa, dan lainnya. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan Angkasa Pura I sebagai bentuk kontribusi kembali kepada masyarakat dan upaya untuk memperbaiki lingkungan tempat tinggal masyarakat.

## Kegiatan Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Tahun 2019

BUMN	Komposisi Kontribusi (Rp)
Elektrifikasi dan MCK	894.351.000
Bantuan Sarana Air Bersih	223.000.000
Bantuan Perbaikan Rumah Karyawan dan Masyarakat	1.188.604.000
Beasiswa	250.000.000
Pasar Murah	795.722.450
Upacara HUT RI (Dana Seremonial)	865.778.550
Jalan Sehat 5 Km (Dana Seremonial)	950.818.000

## BANTUAN CSR KEMASYARAKATAN LAINNYA

Selain Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan di atas, Angkasa Pura I juga melaksanakan bantuan CSR lainnya yang menyesuaikan kondisi terkini dan kebutuhan masyarakat di tahun 2019. Pada RKAP 2019, Angkasa Pura I menganggarkan dana CSR

Kemasyarakatan Lainnya sebesar Rp20.269.106.556 dan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp12.640.703.852. Realisasi biaya kegiatan CSR Kemasyarakatan Lainnya yang dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi:

## Kegiatan Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Tahun 2019

Nama Kegiatan	Realisasi Dana (Rp)
Mudik Gratis	3.911.883.870
Pelatihan BTT, Kargo dan <i>Ticketing</i>	458.968.601
Pelatihan Paliatif	125.000.000
Elektrifikasi NTT	138.000.000
Yayasan BHUN	1.000.000.000
Pelatihan Budidaya Jamur dan Belut	139.518.600
Beasiswa untuk warga terdampak pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta - Kulon Progo	446.112.500
Bantuan korban bencana alam (Tsunami Banten & Gempa Sulut)	222.557.700
Program Tungku Sehat Hemat Energi	481.248.789
Pembangunan konter mitra binaan Dekranasda Bali	156.950.000
Bantuan Lainnya	5.560.463.792
<b>Total Bantuan CSR</b>	<b>12.640.703.852</b>

Angkasa Pura I mengalokasikan dana untuk kegiatan tanggung jawab Perusahaan di bidang sosial kemasyarakatan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni Beban Program Kemitraan, Beban Program Bina Lingkungan, dan Beban CSR. Dana untuk Beban Program Kemitraan diperoleh dari dana

*revolving* yang berkaitan dengan besarnya pengembalian kredit oleh para debitur, sedangkan dana untuk Beban Program Bina Lingkungan dan Beban CSR diperoleh dari anggaran yang dialokasikan Perusahaan.

Biaya Kegiatan PKBL dan CSR Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)
Beban Program Kemitraan	30.502.936.000
Beban Program Bina Lingkungan	39.661.643.500
Beban CSR	20.269.106.557
<b>Total</b>	<b>90.433.686.057</b>

#### URAIAN CAPAIAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

##### Manfaat bagi Pemangku Kepentingan dan Perusahaan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan telah mampu mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar wilayah kerja Angkasa Pura I melalui berbagai pendekatan. Program Kemitraan mampu mendorong kegiatan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, untuk mengembangkan usahanya sehingga memiliki tingkat kemampuan ekonomi lebih tinggi. Di sisi lain, Program Bina Lingkungan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik dari sisi kebutuhan sandang, pangan, papan maupun peningkatan kemampuan individu melalui berbagai program pendidikan dan pemberdayaan sosial lainnya. Program Tanggung Jawab Sosial yang dilaksanakan oleh Angkasa Pura I diharapkan dapat memberi manfaat kepada para *stakeholder* sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Bagi Masyarakat

- Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat dengan status ekonomi menengah ke bawah.
- Meningkatkan kompetensi masyarakat

terutama dalam bidang wirausaha dan profesi lainnya, misalnya pelatihan profesi Security di Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo, pelatihan bidang mekanik di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, dan sebagainya.

- Meningkatkan kualitas fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk masyarakat.

##### 2. Manfaat Bagi Pelajar & Mahasiswa

- Menciptakan insan-insan muda yang cerdas serta bertanggung jawab.

##### 3. Manfaat bagi Perusahaan

- Mengimplementasikan sinergi antar BUMN dalam kegiatan CSR sebagai tanggung jawab kepada Pemegang Saham
- Memperluas jejaring secara langsung dengan instansi lain yang terlibat antara lain Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PT Jasa Raharja (Persero), dan instansi lainnya.
- Membangun komunikasi yang positif dengan para pengguna jasa bandar udara serta para penerima bantuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.





### Manfaat bagi Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Angkasa Pura I berupaya agar penerapan kegiatan tanggung jawab sosial dapat bersinergi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang telah diadopsi Pemerintah Indonesia. Berdasarkan akumulasi realisasi biaya tanggung jawab sosial terbesar yang disalurkan Angkasa Pura I, yaitu di bidang pendidikan, maka perusahaan turut berkontribusi bagi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 4, yaitu Memastikan Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas.

### Penghargaan

Berkat pelaksanaan kegiatan tanggung jawab perusahaan di bidang pengembangan sosial masyarakat yang efektif dari tahun ke tahun, Angkasa Pura I berhasil memperoleh apresiasi penghargaan dari beberapa lembaga. Capaian ini merupakan motivasi bagi PT Angkasa Pura I (Persero) untuk terus memberikan kontribusi dan manfaat positif kepada masyarakat sekitar.

Sejumlah penghargaan yang diperoleh Angkasa Pura I pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Penghargaan	Penyelenggara
Penghargaan Program Denpasar CSR (DCSR) tahun 2018-2019	Walikota Denpasar
Pemberdayaan Masyarakat Terbaik (Balkondes Bigaran)	Manajemen CBT Nusantara
Penghargaan pada Ajang Galang UKM Indonesia atau ICSB Indonesia Presidential Award kategori Business Practitioner	International Council for Small Business (ICSB) Indonesia





I GUSTI NGURAH RAI

# Referensi Silang

## Surat Edaran OJK No.30/SEOJK,04/2016

Kriteria	Penjelasan	Halaman
<b>I Ikhtisar Data Keuangan Penting</b>		
1	Laporan tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik	✓
2	Laporan tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran a4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik	✓
3	Laporan tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan laporan tahunan yang dikonversi dalam format pdf	✓
<b>II Isi Laporan Tahunan</b>		
<b>1 Ketentuan Umum</b>		
a	Laporan tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:	
	1. Ikhtisar data keuangan penting	14
	2. Informasi saham (jika ada);	20 – 23
	3. Laporan direksi;	29 – 33
	4. Laporan dewan komisaris;	25 – 28
	5. Profil emiten atau perusahaan publik;	36 – 170
	6. Analisis dan pembahasan manajemen;	170 – 259
	7. Tata kelola emiten atau perusahaan publik;	260 – 403
	8. Tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten atau perusahaan publik;	216 - 227
	9. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	484
	10. Surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan.	482 - 483
b	Laporan tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.	✓
<b>2 Uraian isi laporan tahunan</b>		
a	Ikhtisar data keuangan penting	
	Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika emiten atau perusahaan publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	
	1. Pendapatan/penjualan;	16
	2. Laba bruto;	16
	3. Laba (rugi);	16
	4. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	17
	5. Total laba (rugi) komprehensif;	16
	6. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	17
	7. Laba (rugi) per saham;	17
	8. Jumlah aset;	14



Kriteria	Penjelasan	Halaman
	9. Jumlah liabilitas;	15
	10. Jumlah ekuitas;	15
	11. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	17
	12. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	17
	13. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;	17
	14. Rasio lancar;	17
	15. Rasio liabilitas terhadap ekuitas;	18
	16. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	18
	17. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan emiten atau perusahaan publik dan jenis industrinya.	18 - 19
b Informasi saham	Informasi saham (jika ada) paling sedikit memuat:	20
	1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	Tidak ada pencatatan saham
	a Jumlah saham yang beredar;	Tidak ada pencatatan saham
	b Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan;	Tidak ada pencatatan saham
	c Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan	Tidak ada pencatatan saham
	d Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	Tidak ada pencatatan saham
	2. Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	20
	a Tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	Tidak ada aksi korporasi
	b Rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham;	Tidak ada aksi korporasi
	c Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan	Tidak ada aksi korporasi
	d Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.	Tidak ada aksi korporasi
	3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension), dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, emiten atau perusahaan publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan	Tidak ada suspension/delisting
	4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode laporan tahunan, emiten atau perusahaan publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut.	Tidak ada suspension/delisting

Kriteria	Penjelasan	Halaman
c Laporan direksi	Laporan direksi paling sedikit memuat:	29-33
	1. Uraian singkat mengenai kinerja emiten atau perusahaan publik, paling sedikit meliputi:	
	a Strategi dan kebijakan strategis emiten atau perusahaan publik;	30 - 31
	b Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan	31
	c Kendala yang dihadapi emiten atau perusahaan publik;	31
	2. Gambaran tentang prospek usaha;	32
	3. Penerapan tata kelola emiten atau perusahaan publik; dan	32
	4. Perubahan komposisi anggota direksi dan alasan perubahannya (jika ada).	33
d Laporan direksi	Laporan dewan komisaris paling sedikit memuat:	25-28
	1. Penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan emiten atau perusahaan publik;	26
	2. Pengawasan terhadap implementasi strategi emiten atau perusahaan publik;	26
	3. Pandangan atas prospek usaha emiten atau perusahaan publik yang disusun oleh direksi;	27
	4. Pandangan atas penerapan tata kelola emiten atau perusahaan publik;	28
	5. Perubahan komposisi anggota dewan komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan	28
	6. Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota direksi.	27
e Profil emiten atau perusahaan publik	Profil emiten atau perusahaan publik paling sedikit memuat:	36 – 170
	1. Nama emiten atau perusahaan publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	36
	2. Akses terhadap emiten atau perusahaan publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai emiten atau perusahaan publik, meliputi;	
	a Alamat;	37 167 - 169
	b Nomor telepon;	37 167 - 169
	c Nomor faksimile;	37 167 - 169
	d Alamat surat elektronik; dan	37 167 - 169
	e Alamat situs web;	37 167 - 169
	3. Riwayat singkat emiten atau perusahaan publik;	39 - 41
	4. Visi dan misi emiten atau perusahaan publik;	49 - 50
	5. Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	51 - 52
	6. Struktur organisasi emiten atau perusahaan publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah direksi, disertai dengan nama dan jabatan;	66 - 67

Kriteria	Penjelasan	Halaman
7.	Akses terhadap emiten atau perusahaan publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai emiten atau perusahaan publik, meliputi;	
a	Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	74 - 81
b	Foto terbaru;	74 - 81
c	Usia;	74 - 81
d	Kewarganegaraan;	74 - 81
e	Riwayat pendidikan;	74 - 81
f	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	74 - 81
1.	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota direksi pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan;	74 - 81
2.	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	74 - 81
3.	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik;	74 - 81
g	Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota direksi dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada); dan	159
h	Hubungan afiliasi dengan anggota direksi lainnya, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi;	340
8.	Profil dewan komisaris, paling sedikit memuat;	
a	Nama;	68 – 73
b	Foto terbaru;	68 – 73
c	Usia;	68 – 73
d	Kewarganegaraan;	68 – 73
e	Riwayat pendidikan;	68 – 73
f	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	68 – 73
1.	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota dewan komisaris yang bukan merupakan komisaris independen pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan;	68 – 73
2.	Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota dewan komisaris yang merupakan komisaris independen pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan;	68 – 73
3.	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	68 – 73
4.	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik;	68 – 73
g.	Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota dewan komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada);	158

Kriteria	Penjelasan	Halaman
	h Hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi; dan	341
	i Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada); dan	300
9.	Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan, susunan yang dicantumkan dalam laporan tahunan adalah susunan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	√
10.	Jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia karyawan dalam tahun buku;	95 - 100
11.	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari:	
a	Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham emiten atau perusahaan publik;	101
b	Anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang memiliki saham emiten atau perusahaan publik; dan	101
c	Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham emiten atau perusahaan publik;	101
12.	Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	101
a	Kepemilikan institusi lokal;	Tidak relevan
b	Kepemilikan institusi asing;	Tidak relevan
c	Kepemilikan individu lokal; dan	Tidak relevan
d	Kepemilikan individu asing;	Tidak relevan
13.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali emiten atau perusahaan publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	101
14.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali emiten atau perusahaan publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	101
15.	Kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham emiten atau perusahaan publik dicatatkan (jika ada);	116 - 123
16.	Kronologi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 15), yang paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	124 - 125
17.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal;	126 - 127
18.	Dalam hal terdapat profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada emiten atau perusahaan publik, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (fee), dan periode penugasan; dan	388

Kriteria	Penjelasan	Halaman
	19. Penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima emiten atau perusahaan publik baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang memuat:	
	a Nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	129 – 146
	b Badan atau lembaga yang memberikan; dan	129 – 146
	c Masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (jika ada);	129 – 146
f Analisis dan pembahasan manajemen	Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	170 – 259
	1. Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri emiten atau perusahaan publik, paling sedikit mengenai:	
	a Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	188 - 197
	b Pendapatan/penjualan; dan	188 - 197
	c Profitabilitas;	188 - 197
	2. Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai;	198 - 230
	a Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	201 - 209
	b Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	209 - 216
	c Ekuitas;	217
	d Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	222 - 223
	e Arus kas;	228 - 230
	3. Kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	233
	4. Tingkat kolektibilitas piutang emiten atau perusahaan publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	234
	5. Struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	234
	6. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	
	a Tujuan dari ikatan tersebut;	235
	b Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	235
	c Mata uang yang menjadi denominasi; dan	235
	d Langkah yang direncanakan emiten atau perusahaan publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	235
	7. Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	
	a Jenis investasi barang modal;	236



Kriteria	Penjelasan	Halaman
	b Tujuan investasi barang modal; dan	236
	c Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	236
8.	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	236 - 237
9.	Prospek usaha dari emiten atau perusahaan publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	241
10.	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	
	a Pendapatan/penjualan;	240 - 241
	b Laba (rugi);	240 - 241
	c Struktur modal ( <i>capital structure</i> ); atau	240 - 241
	d Hal lainnya yang dianggap penting bagi emiten atau perusahaan publik;	238 - 241
11.	Target/proyeksi yang ingin dicapai emiten atau perusahaan publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	
	a Pendapatan/penjualan;	244 - 245
	b Laba (rugi);	244 - 245
	c Struktur modal ( <i>capital structure</i> );	245
	d Kebijakan dividen; atau	241
	e Hal lainnya yang dianggap penting bagi emiten atau perusahaan publik;	241 - 245
12.	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa emiten atau perusahaan publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	182 - 187
13.	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	
	a Kebijakan dividen;	247
	b Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;	248
	c Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	248
	d Jumlah dividen per tahun yang dibayar;	248
14.	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan:	
	a Dalam hal selama tahun buku, emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	248
	b Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka emiten menjelaskan perubahan tersebut;	Tidak terdapat perubahan penggunaan dana

Kriteria	Penjelasan	Halaman
	15. Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:	249
	a Tanggal, nilai, dan objek transaksi;	Tidak ada
	b Nama pihak yang melakukan transaksi;	Tidak ada
	c Sifat hubungan afiliasi (jika ada);	Tidak ada
	d Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan	Tidak ada
	e Pemenuhan ketentuan terkait;	Tidak ada
	16. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap emiten atau perusahaan publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	253
	17. Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	252
g Tata kelola emiten atau perusahaan publik	Tata kelola emiten atau perusahaan publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	262 – 405
	1. Direksi, mencakup antara lain:	
	a Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi;	313 – 323
	b Pernyataan bahwa direksi memiliki pedoman atau piagam ( <i>charter</i> ) direksi;	308
	c Prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja emiten atau perusahaan publik;	338 – 340
	d Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat direksi, termasuk rapat bersama dewan komisaris, dan tingkat kehadiran anggota direksi dalam rapat tersebut;	315 – 326
	e Informasi mengenai keputusan RUPS 1 (satu) tahun sebelumnya, meliputi:	
	1 Keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan	280 – 292
	2 Alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan;	280 – 292
	f Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku, meliputi:	
	1 Keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan	267 – 279
	2 Alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; dan	267 – 279
	g Penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas direksi;	307
	2. Dewan komisaris, mencakup antara lain:	
	a Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris;	264
	b Pernyataan bahwa dewan komisaris memiliki pedoman atau piagam ( <i>charter</i> ) dewan komisaris;	293
	c Prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota dewan komisaris;	336 - 337

Kriteria	Penjelasan	Halaman
d	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat dewan komisaris, termasuk rapat bersama direksi, dan tingkat kehadiran anggota dewan komisaris dalam rapat tersebut;	300 - 305
e	Kebijakan emiten atau perusahaan publik tentang penilaian terhadap kinerja anggota direksi dan anggota dewan komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit meliputi:	
1	Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	305 - 307, 328 - 329
2	Kriteria yang digunakan; dan	305 - 307, 328 - 329
3	Pihak yang melakukan penilaian;	306, 329
f	Penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas dewan komisaris; dan	307
g	Dalam hal dewan komisaris tidak membentuk komite nominasi dan remunerasi, dimuat informasi paling sedikit mengenai:	
1	Alasan tidak dibentuknya komite; dan	365
2	Prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku;	367
3.	Dewan pengawas syariah, bagi emiten atau perusahaan publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	343
a	Nama;	Tidak relevan
b	Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan	Tidak relevan
c	Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap emiten atau perusahaan publik;	Tidak relevan
4.	Komite audit, mencakup antara lain:	344 - 353
a	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	346 - 347
b	Usia;	346 - 347
c	Kewarganegaraan;	346 - 347
d	Riwayat pendidikan;	346 - 347
e	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
1	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	345
2	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, Anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	346 - 347
3	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik;	346 - 347
f	Periode dan masa jabatan anggota komite audit;	346 - 347
g	Pernyataan independensi komite audit;	348 - 349
h	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut;	349 - 352
i	Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	160

Kriteria	Penjelasan	Halaman
	j Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam ( <i>charter</i> ) komite audit;	352 - 353
5.	Komite lain yang dimiliki emiten atau perusahaan publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas direksi dan/atau dewan komisaris, seperti komite nominasi dan remunerasi, mencakup antara lain:	352 - 367
	a Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	357 - 358
	b Usia;	357 - 358
	c Kewarganegaraan;	357 - 358
	d Riwayat pendidikan;	357 - 358
	e Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	1. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	356
	2. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, Anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	357 - 358
	3. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik;	357 - 358
	f Periode dan masa jabatan anggota komite;	357 - 358
	g Uraian tugas dan tanggung jawab;	354 - 356
	h Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam ( <i>charter</i> ) komite;	354
	i Pernyataan independensi komite;	359
	j Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;	360 - 362
	k Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	160
	l Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	362 - 365
6.	Sekretaris perusahaan, mencakup antara lain:	
	a Nama;	369
	b Domisili;	369
	c Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	1 Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan	369
	2 Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik;	369
	d Riwayat pendidikan;	369
	e Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan	161, 369
	f Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku;	369
7.	Unit audit internal, mencakup antara lain:	
	a Nama kepala unit audit internal;	373

Kriteria	Penjelasan	Halaman
	b Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	1. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan	373
	2. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik;	373
	c Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	374 - 375
	d Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku;	162 - 163
	e Struktur dan kedudukan unit audit internal;	370
	f Uraian tugas dan tanggung jawab;	371
	g Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam ( <i>charter</i> ) unit audit internal; dan	371
	h Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku;	375 - 377
8.	Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan publik, paling sedikit mengenai:	
	a. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan	383 - 386
	b. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal;	387
9.	Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan publik, paling sedikit mengenai:	
	a. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko emiten atau perusahaan publik;	379
	b. Jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan	380 - 381
	c. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko emiten atau perusahaan publik;	382 - 383
10.	Perkara penting yang dihadapi oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, anggota direksi dan anggota dewan komisaris (jika ada), antara lain meliputi:	
	a. Pokok perkara/gugatan;	389 - 392
	b. Status penyelesaian perkara/gugatan; dan	389 - 392
	c. Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik;	389 - 392
11.	Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris dan direksi, oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	393
12.	Informasi mengenai kode etik emiten atau perusahaan publik meliputi:	
	a. Pokok-pokok kode etik;	393
	b. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	394
	c. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan karyawan emiten atau perusahaan publik;	394

Kriteria	Penjelasan	Halaman
	13. Informasi mengenai budaya perusahaan ( <i>corporate culture</i> ) atau nilai-nilai perusahaan (jika ada);	50
	14. Uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan emiten atau perusahaan publik (jika ada), antara lain mengenai:	248
	a Jumlah saham dan/atau opsi;	Tidak ada
	b Jangka waktu pelaksanaan;	Tidak ada
	c Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan;	Tidak ada
	d Harga pelaksanaan;	Tidak ada
	15. Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran ( <i>whistleblowing system</i> ) di emiten atau perusahaan publik (jika ada), antara lain meliputi:	
	a Cara penyampaian laporan pelanggaran;	396
	b Perlindungan bagi pelapor;	397
	c Penanganan pengaduan;	399
	d Pihak yang mengelola pengaduan; dan	398
	e Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:	
	1 Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	400
	2 Tindak lanjut pengaduan;	400
	16. Penerapan atas pedoman tata kelola perusahaan terbuka bagi emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik, meliputi:	
	a Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	401 - 405
	b Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada);	401 - 405
h Tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten atau perusahaan publik	1. Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten atau perusahaan publik meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:	
	a Lingkungan hidup, antara lain:	420 - 424
	1 Penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang;	422
	2 Sistem pengolahan limbah emiten atau perusahaan publik;	422
	3 Mekanisme pengaduan masalah lingkungan; dan	442
	4 Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki;	424
	b Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, antara lain:	425 - 431
	1 Kesetaraan gender dan kesempatan kerja;	427
	2 Sarana dan keselamatan kerja;	427
	3 Tingkat perpindahan ( <i>turnover</i> ) karyawan;	431
	4 Tingkat kecelakaan kerja;	427

Kriteria	Penjelasan	Halaman	
	5 Pendidikan dan/atau pelatihan;	427	
	6 Remunerasi; dan	428	
	7 Mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan;	429	
c	Pengembangan sosial dan kemasyarakatan, antara lain:	456-470	
	1 Penggunaan tenaga kerja lokal;	426	
	2 Pemberdayaan masyarakat sekitar emiten atau perusahaan publik antara lain melalui penggunaan bahan baku yang dihasilkan oleh masyarakat atau pemberian edukasi;	463 - 467	
	3 Perbaikan sarana dan prasarana sosial;	468	
	4 Bentuk donasi lainnya; dan	468	
	5 Komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di emiten atau perusahaan publik, serta pelatihan mengenai anti korupsi (jika ada);	394	
d	Tanggung jawab barang dan/atau jasa, antara lain;	218-219	
	1 Kesehatan dan keselamatan konsumen;	432 - 442	
	2 Informasi barang dan/atau jasa; dan	52	
	3 Sarana, jumlah, dan penanggulangan atas pengaduan konsumen.	442 - 447	
	2. Dalam hal emiten atau perusahaan publik menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan ( <i>sustainability report</i> ), emiten atau perusahaan publik dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan; dan	✓	
	3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada otoritas jasa keuangan bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan.	✓	
i	Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam laporan tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai tanggung jawab direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal emiten merupakan perusahaan efek; dan	500
j	Surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan	Surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan disusun sesuai dengan format surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran otoritas jasa keuangan ini.	498 - 499



# KRITERIA

## ANNUAL REPORT AWARD

Kriteria	Penjelasan	Halaman
<b>Umum</b>		
Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris		✓
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca		✓
Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas	Nama perusahaan dan tahun <i>annual report</i> ditampilkan di: <ol style="list-style-type: none"> <li>Sampul muka;</li> <li>Samping;</li> <li>Sampul belakang; dan</li> <li>Setiap halaman.</li> </ol>	✓
Laporan tahunan ditampilkan di <i>website</i> perusahaan	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	✓
<b>Ikhtisar Data Keuangan Penting</b>		
Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat antara lain:	
	1. Penjualan/pendapatan usaha;	16
	2. Laba (rugi): <ol style="list-style-type: none"> <li>Distribusikan kepada pemilik entitas induk; dan</li> <li>Distribusikan kepada kepentingan non pengendali;</li> </ol>	17
	3. Penghasilan komprehensif periode berjalan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Distribusikan kepada pemilik entitas induk; dan</li> <li>Distribusikan kepada kepentingan non pengendali; dan</li> </ol>	17
	4. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.	17
Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat antara lain:	
	1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi;	14
	2. Jumlah aset;	14
	3. Jumlah liabilitas; dan	15
	4. Jumlah ekuitas	15
Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan	17 - 18
Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik	1. Jumlah saham yang beredar;	20
	2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;</li> <li>Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan</li> <li>Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.</li> </ol>	20
	3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: <ol style="list-style-type: none"> <li>Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan</li> <li>Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.</li> </ol>	20
	Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.	

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir	Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar ( <i>outstanding</i> ); 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2018 dan 2019. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.	21 - 24, 124 - 125 21 - 24, 124 - 125 21 - 24, 124 - 125 21 - 24, 124 - 125
<b>Laporan Dewan Komisaris dan Direksi</b>		
Laporan Dewan Komisaris	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan <i>whistleblowing system</i> (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	26 27 28 28
Laporan Direksi	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: a. Kebijakan strategis; b. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan c. Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	30 31 31 32 32 33
Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	482 - 483 482 - 483 482 - 483 Tidak relevan
<b>Profil Perusahaan</b>		
Nama dan alamat lengkap perusahaan	Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, nomor telepon, nomor faksimili, <i>e-mail</i> , dan <i>website</i>	36 - 37
Riwayat singkat perusahaan	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	36
Bidang usaha	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	51 51 52

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Struktur Organisasi	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi.	66-67
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	Mencakup:	
	1. Visi perusahaan;	50
	2. Misi perusahaan;	50
	3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah di-review dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan	49
4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan ( <i>corporate culture</i> ) yang dimiliki Perusahaan.	50	
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris	Informasi memuat antara lain:	
	1. Nama;	68 - 73
	2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);	68 - 73
	3. Umur;	68 - 73
	4. Domisili;	68 - 73
	5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);	68 - 73
	6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan	68 - 73
7. Riwayat penunjukan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	68 - 73	
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi	Informasi memuat antara lain:	
	1. Nama;	74 - 81
	2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);	74 - 81
	3. Umur;	74 - 81
	4. Domisili;	74 - 81
	5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);	74 - 81
	6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan	74 - 81
7. Riwayat penunjukan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	74 - 81	
Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi	Informasi memuat antara lain:	
	1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi;	96
	2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan;	97
	3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian;	97
	4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan	146-157
5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	163	
Komposisi Pemegang saham	Mencakup antara lain:	
	1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya;	101
	2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi:	101
	a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan	
b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.		
3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung.	101	
Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan		

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi	Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	102 102 102 102
Struktur grup perusahaan	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, <i>joint venture</i> , dan <i>special purpose vehicle</i> (SPV).	128
Kronologis penerbitan efek (termasuk <i>private placement</i> ) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi ( <i>corporate action</i> ); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi ( <i>corporate action</i> ); dan 3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.	20 20 20
Kronologi penerbitan saham (termasuk <i>private placement</i> ) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya; 3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan 4. Peringkat efek. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan.	124 - 125 124 - 125 124 124 - 125
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.	126 - 127 126 126
Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	129 - 146 129 - 146 129 - 146 129 - 146
Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.	166 167 - 169
Informasi pada Website Perusahaan	Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan 6. Piagam/ <i>Charter</i> Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	165

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite- Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal	Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti) 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. Yang diikuti pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan.	158 159 160 160 160 - 161 161 162
<b>Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan</b>		
Tinjauan operasi per segmen usaha	Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas.	188 - 197  188-192 191, 195 195 - 197
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan 5. Arus kas.	201 - 209 209 - 216  217 - 221 222 - 228  228 - 230
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan	Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang.	233 234
Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy)	Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); dan 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.	234 234 234
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.	235 236 235  235 235
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.	236 236 236

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai(realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	238 - 241 241 - 245
Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan agar diungkapkan.	245
Uraian tentang prospek usaha perusahaan	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	172 - 176
Uraian tentang aspek pemasaran	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.	182 - 187
Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir	Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. Payout ratio; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. Untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	247 247 248 248 248
Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga exercise. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	248
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	248 249 249 249 249
Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	249 - 250 249 249 250 - 251 249 249
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir	Uraian memuat antara lain: 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	253 - 254 253 - 254

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir	Uraian memuat antara lain: 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	252 - 253 252 - 253 253
Informasi kelangsungan usaha	Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. <i>Assessment</i> manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan <i>assessment</i> . Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.	254 254 254
<b>Good Corporate Governance</b>		
Uraian Dewan Komisaris	Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan 3. Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	294 - 295 307 293
Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris)	Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	300 300
Uraian Direksi	Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).	313 - 314 330 308
Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2018 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi	Memuat uraian mengenai: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; 2. Pihak yang melakukan penilaian; 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; dan 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2019 agar diungkapkan.	332 333 333 334 - 335 334 - 335
Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi	Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	336 338 336 - 337 339 - 340 339 337, 339



Kriteria	Penjelasan	Halaman
Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan) Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan)	Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. Untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	301-305, 316-325
Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu	Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	101
Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali	Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	342 342 342 341 341
Komite Audit	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	346 - 347 346 - 347  348 344 352-353 352
Komite Nominasi dan/atau Remunerasi	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi direksi.	367 367 366 367  Tidak relevan 365 366
Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	357 - 358  359 354 - 356 362 - 365 362
Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	369 369 368 369

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Uraian mengenai unit audit internal	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.	373 373 373 370 375 - 377 373
Akuntan Publik	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya <i>fee</i> untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.	388 388 388 388
Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai hasil <i>review</i> yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	379 - 380 382 - 383 380 - 381 380 - 381
Uraian mengenai sistem pengendalian intern	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – <i>internal control framework</i> ); dan 3. Penjelasan mengenai hasil <i>review</i> yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.	383 - 385 386 387
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait tata kelola tanggung jawab sosial	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial 2. Informasi mengenai metode dan lingkup <i>due diligent</i> terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktifitas perusahaan 3. Informasi tentang <i>stakeholder</i> penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan 4. Informasi tentang isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan 5. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban 6. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya <i>stakeholders engagement</i> dan meningkatkan <i>value</i> untuk <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> 7. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijalankan 8. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial	408 409 409 - 412 412 413 - 414 408 - 414 413 - 414 469

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait <i>core subject</i> Hak Azasi Manusia	Mencakup antara lain informasi tentang:	
	1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Hak Azasi Manusia	417
	2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Hak Azasi Manusia	417 - 418
	3. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang Hak Azasi Manusia	417
	4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia	418 - 419
	5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia	419 - 420
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait <i>core subject</i> Operasi yang adil	Mencakup antara lain informasi tentang:	
	1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Operasi yang adil	414
	2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial <i>core subject</i> operasi yang adil	415 - 416
	3. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang operasi yang adil	416
	4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil	415 - 416
	5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil	416
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan lingkungan hidup	Mencakup antara lain informasi tentang:	
	1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan	420
	2. Informasi tentang dampak dan resiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan	420
	3. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2019 yang ditetapkan manajemen;	421
	4. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan	421 - 423
	5. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR terkait lingkungan hidup	465
	6. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain.	423
7. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	424	
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja	Mencakup antara lain informasi tentang:	
	1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan <i>core subject</i> ketenagakerjaan	425
	2. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan	425
	3. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2019 yang ditetapkan manajemen; dan	426
	4. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut	427
	5. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	427 - 432
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen	Mencakup antara lain:	
	1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2019 ditetapkan manajemen; dan	434
	2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	435 - 455

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan pengembangan sosial dan masyarakat	Mencakup antara lain informasi tentang:	
	1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan <i>core subject</i> pengembangan sosial dan masyarakat	456
	2. Informasi tentang isu-isu sosial yang relevan dengan perusahaan	412
	3. Informasi tentang resiko sosial yang dikelola perusahaan	457
	4. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan masyarakat	460 - 462
	5. Target/rencana kegiatan pada tahun 2019 yang ditetapkan manajemen;	457
	6. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan	460 - 470
7. Biaya yang dikeluarkan terkait pengembangan sosial dan masyarakat, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.	469	
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan	Mencakup antara lain:	
	1. Pokok perkara/gugatan;	389 - 392
	2. Status penyelesaian perkara/gugatan;	389 - 392
	3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan	389 - 392
4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi).	393	
	Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.	
Akses informasi dan data perusahaan	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui <i>website</i> (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, <i>mailing list</i> , buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	165
Bahasan mengenai kode etik	Memuat uraian antara lain:	
	1. Pokok-pokok kode etik;	393
	2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi;	394
	3. Penyebarluasan kode etik;	394
	4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan	394 - 395
5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir.	395	
	Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	
Pengungkapan mengenai <i>whistleblowing system</i>	Memuat uraian tentang mekanisme <i>whistleblowing system</i> antara lain:	
	1. Penyampaian laporan pelanggaran;	396
	2. Perlindungan bagi <i>whistleblower</i> ;	397
	3. Penanganan pengaduan;	399
	4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan	398
	5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan	400
6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku.	400	
	Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	330 - 332
<b>Informasi Keuangan</b>		
Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	Laporan Keuangan Halaman Laporan Auditor Independen
Opini auditor independen atas laporan keuangan		Laporan Keuangan Halaman Laporan Auditor Independen
Deskripsi Auditor Independen di Opini	Deskripsi memuat tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama dan tanda tangan;</li> <li>2. Tanggal Laporan Audit; dan</li> <li>3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.</li> </ol>	Laporan Keuangan Halaman Laporan Auditor Independen
Laporan keuangan yang lengkap	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan posisi keuangan;</li> <li>2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;</li> <li>3. Laporan perubahan ekuitas;</li> <li>4. Laporan arus kas;</li> <li>5. Catatan atas laporan keuangan;</li> <li>6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan</li> <li>7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitmenerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membupenyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).</li> </ol>	Laporan Keuangan Halaman 1-165
Perbandingan tingkat profitabilitas	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.	Laporan Keuangan Halaman 4 - 5
Laporan Arus Kas	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan;</li> <li>2. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi;</li> <li>3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kasselama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan</li> <li>4. Pengungkapan transaksi nonkas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.</li> </ol>	Laporan Keuangan Halaman 7
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	Meliputi sekurang-kurangnya: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK;</li> <li>2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan;</li> <li>3. Pajak penghasilan;</li> <li>4. Imbalan kerja; dan</li> <li>5. Instrumen Keuangan.</li> </ol>	Laporan Keuangan Halaman 18 - 53
Pengungkapan transaksi pihak berelasi	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi;</li> <li>2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan</li> <li>3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.</li> </ol>	Laporan Keuangan Halaman 129 - 130

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan	Hal-hal yang harus diungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini;</li> <li>2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi;</li> <li>3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2018;</li> <li>4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan</li> <li>5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.</li> </ol>	Laporan Keuangan Halaman 67 - 72
Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap	Hal-hal yang harus diungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode penyusutan yang digunakan;</li> <li>2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya;</li> <li>3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan</li> <li>4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.</li> </ol>	Laporan Keuangan Halaman 75 - 77
Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi	Hal-hal yang harus diungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan;</li> <li>2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan;</li> <li>3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan</li> <li>4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.</li> </ol>	Laporan Keuangan Halaman 130 - 135
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan	Hal-hal yang harus diungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya;</li> <li>2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan;</li> <li>3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;</li> <li>4. Kebijakan manajemen risiko; dan</li> <li>5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.</li> </ol>	Laporan Keuangan Halaman 25 - 35
Penerbitan laporan keuangan	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan</li> <li>2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan</li> </ol>	Laporan Keuangan Halaman Surat Pernyataan Direksi

# Tanggung Jawab Laporan

## Surat Pernyataan Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 23 April 2020

Dewan Komisaris




Djoko Sasono  
Komisaris Utama



Tri Budi Satriyo  
Komisaris Independen



Erwan Agus Purwanto  
Komisaris Independen



Irfan Wahid  
Komisaris Independen



Danang Parikesit  
Komisaris



Wihana Kirana Jaya  
Komisaris



Wempi Saputra  
Komisaris



## Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 23 April 2020

Direksi



Faik Fahmi

Direktur Utama



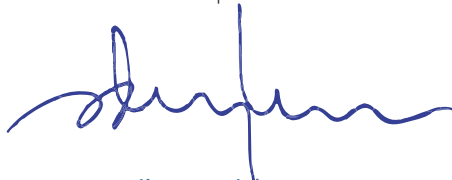
Wendo Asrul Rose

Direktur Operasi



Andy Saleh Bratamihardja

Direktur Keuangan



Adi Nugroho

Direktur SDM dan Umum



Devy Suradji

Direktur Pemasaran dan Pelayanan



Dendi Tegar Danianto

Direktur Pengembangan Usaha



Lukman F. Laisa

Direktur Teknik



Israwadi

Direktur Kepatuhan, Aset, dan  
Pengadaan





# Laporan Keuangan

PT Angkasa Pura I (Persero)  
dan entitas anaknya/and its subsidiaries

Laporan keuangan konsolidasian  
tanggal 31 Desember 2019  
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
beserta laporan auditor independen/  
Consolidated financial statements  
as of December 31, 2019 and  
for the year then ended  
with independent auditors' report

The original consolidated financial statements included herein  
are in Indonesian language.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2019  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT  
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2019  
AND FOR THE YEAR THEN ENDED  
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

**Daftar Isi**

**Table of Contents**

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1-3	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kprehensif Lain Konsolidasian.....	4-5	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian .....	6	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian .....	7	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	8-149	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**Informasi Keuangan Entitas Induk**

***Financial Information of the Parent Entity***

Laporan Posisi Keuangan.....	1-2	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kprehensif Lain .....	3-4	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas.....	5	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas .....	6	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan .....	7-9	<i>Notes to the Financial Statements</i>

\*\*\*\*\*



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN UNTUK  
TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL TERSEBUT  
PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER  
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON  
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2019 AND FOR  
THE YEAR THEN ENDED  
PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/We, the undersigned:

1. Nama/Name  
Alamat kantor/Office address  
  
Alamat domisili sesuai KTP/  
Address of domicile according to KTP  
Nomor Telepon/Phone Number  
Jabatan/Position

: Faik Fahmi  
: Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B. 12 Kav 2  
Jakarta 10610  
  
: Jl. Terusan I No 58 Ragunan, Kec. Pasar Minggu  
: +62 21 654-1961  
: Direktur Utama/President Director

2. Nama/Name  
Alamat kantor/Office address  
  
Alamat domisili sesuai KTP/  
Address of domicile according to KTP  
  
Nomor Telepon/Phone Number  
Jabatan/Position

: Novrihandri SE, Ak., QIA, MBA, CA, CPMA  
: Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B. 12 Kav 2  
Jakarta 10610  
  
: Jl. Pulo Asem Timur No.9A RT 004 RW 002  
Kec. Jati, Pulo Gadung  
: +62 21 489-2320  
: Direktur Keuangan/Finance Director

Menyatakan bahwa/state that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian PT Angkasa Pura I (Persero) dan Entitas Anaknya;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Angkasa Pura I (Persero) dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT Angkasa Pura I (Persero) dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Angkasa Pura I (Persero) dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Angkasa Pura I (Persero) dan Entitas Anaknya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements of PT Angkasa Pura I (Persero) and its Subsidiaries;
2. The Consolidated Financial Statements of PT Angkasa Pura I (Persero) and its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in the Consolidated Financial Statements of PT Angkasa Pura I (Persero) and its Subsidiaries has been fully disclosed in a complete and truthful manner;  
b. The Consolidated Financial Statements of PT Angkasa Pura I (Persero) and its Subsidiaries do not contain misleading material information or fact, and do not omit material information and facts;
4. We are responsible for the internal control system of PT Angkasa Pura I (Persero) and its Subsidiaries to permit preparation of financial statements are free from material misstatement, whether caused by fraud or error.


Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance.

This is our declaration which made in truth and can be legally accountable, and in order to meet the principles of good corporate governance.

Jakarta, 28 Februari 2020 /February 28, 2020  
Atas nama dan mewakili Direksi/On behalf and representing Directors

  
Faik Fahmi  
Direktur Utama/President Director



  
Novrihandri SE, Ak., QIA, MBA, CA, CPMA  
Direktur Keuangan/Finance Director

*The original report included herein is in the Indonesian language.*

## Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00148/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/II/2020

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi  
PT Angkasa Pura I (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Angkasa Pura I (Persero) ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Kelompok Usaha") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

## Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

## Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

## Independent Auditors' Report

Report No. 00148/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/II/2020

*The Shareholders, the Board of Commissioners and Directors  
PT Angkasa Pura I (Persero)*

*We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Angkasa Pura I (Persero) (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2019, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

## Management's responsibility for the financial statements

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

## Auditors' responsibility

*Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.*



### Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00148/2.1032/AU.1/06/0697-  
2/1/II/2020 (lanjutan)

### Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT. Angkasa Pura I (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00148/2.1032/AU.1/06/0697-  
2/1/II/2020 (continued)

### Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

### Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Angkasa Pura I (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

Laporan No. 00148/2.1032/AU.1/06/0697-  
2/1/II/2020 (lanjutan)

**Hal lain**

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Laporan keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai suatu informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi obyek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir sesuai Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

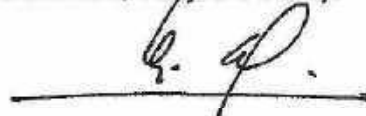
**Independent Auditors' Report (continued)**

Report No. 00148/2.1032/AU.1/06/0697-  
2/1/II/2020 (continued)

**Other matter**

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2019 and for the year then ended was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial statements of the Company (parent entity), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2019, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Financial Information of the Parent Entity"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Financial Information of the Parent Entity is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Financial Information of the Parent Entity has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Financial Information of the Parent Entity is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

Purwanto, Sungkoro & Surja



Moch. Dadang Syachruna

Registrasi Akuntan Publik No.AP.0697/Public Accountant Registration No. AP.0697

28 Februari 2020/February 28, 2020



**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 Desember 2019  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENT OF  
FINANCIAL POSITION  
December 31, 2019  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

31 Desember/December 31,				
	2019	Catatan/ Notes	2018	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>				<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	5.510.903.592	2e,2f, 2g 2h,4,40	3.149.113.800	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	665.862.312	2e,2f,2h,5,40	478.106.781	<i>Short-term investment</i>
Piutang usaha, neto		2f,2h,6		<i>Trade receivables, net</i>
Pihak berelasi	138.453.120	2e,40	90.334.042	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	389.314.007		419.575.180	<i>Third parties</i>
Piutang lain-lain, neto	80.344.191	2h,7	39.711.686	<i>Other receivables, net</i>
Persediaan	69.404.026	2i,8	84.807.820	<i>Inventories</i>
Uang muka dan beban dibayar di muka	139.959.625	2j,9	159.380.727	<i>Advances and prepaid expense</i>
Pendapatan yang masih harus diterima	291.022.438	2h,10	298.444.329	<i>Accrued revenues</i>
Pajak dibayar di muka	840.957.804	2t,11	367.865.228	<i>Prepaid taxes</i>
Aset lancar lainnya	64.277.125	12	28.266.819	<i>Other current assets</i>
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>	<b>8.190.498.240</b>		<b>5.115.606.412</b>	<b>TOTAL CURRENT ASSETS</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Estimasi tagihan pajak	112.711.091	11	-	<i>Estimated claims for refundable tax</i>
Aset pajak tangguhan	48.494.898	2t,11	41.157.712	<i>Deferred tax assets</i>
Uang muka dan biaya dibayar di muka jangka panjang	12.665.215	2j,9	34.321.854	<i>Non-current advances and prepaid expense</i>
Investasi jangka panjang	109.819.185	2h,2k,13	100.662.312	<i>Long-term investments</i>
Properti investasi, neto	128.888.175	2l, 14	127.872.733	<i>Investment properties, net</i>
Aset tetap, neto	34.127.910.920	2m, 2o,15	26.138.784.667	<i>Fixed assets, net</i>
Aset takberwujud, neto	43.466.476	2n,16	42.322.384	<i>Intangible assets, net</i>
Aset tidak lancar lainnya	12.096.899		8.187.547	<i>Other non-current assets</i>
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>34.596.052.859</b>		<b>26.493.309.209</b>	<b>TOTAL NON-CURRENT ASSETS</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>42.786.551.099</b>		<b>31.608.915.621</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
31 Desember 2019  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENT OF  
FINANCIAL POSITION (continued)  
December 31, 2019  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

		31 Desember/December 31,				
		2019	Catatan/ Notes	2018		
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>	
<b>LIABILITAS</b>					<b>LIABILITIES</b>	
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>					<b>CURRENT LIABILITIES</b>	
Utang usaha			2h,18		Trade payables	
Pihak berelasi	59.820.083		2e,40	101.718.709	Related parties	
Pihak ketiga	255.047.300			587.622.158	Third parties	
Utang lain-lain	3.292.812.136		2h,20	3.925.481.505	Other payables	
Pendapatan diterima di muka	128.332.276		2q,19	147.262.859	Unearned revenues	
Beban akrual	1.322.288.034		2p,17	1.412.039.543	Accrued expenses	
Utang pajak	425.502.215		2t,11	393.235.617	Tax payables	
Utang bank jangka pendek	158.010.670		2h,21	105.631.070	Short-term bank loans	
Bagian jangka pendek pinjaman jangka panjang	538.975.837		2o,2h,21	941.998.089	Current maturities of long-term loans	
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>6.180.788.551</b>			<b>7.614.989.550</b>	<b>TOTAL CURRENT LIABILITIES</b>	
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>	
Pinjaman jangka panjang					Long-term loans	
Utang bank jangka panjang	16.724.208.207		2o,2h,21	5.385.996.924	Long-term bank loans	
Utang obligasi dan sukuk ijarah	2.994.896.323		2o,2h,22	2.993.700.828	Bonds payable and sukuk ijarah	
Utang jangka panjang lainnya	388.971.461		23	170.528.854	Other long-term liabilities	
Liabilitas imbalan kerja karyawan	437.293.206		2r,24	302.394.975	Employee benefits liabilities	
Liabilitas pajak tangguhan	79.885.504		2t,11	89.079.821	Deferred tax liabilities	
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>20.625.254.701</b>			<b>8.941.701.402</b>	<b>TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES</b>	
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>26.806.043.252</b>			<b>16.556.690.952</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2019  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENT OF  
FINANCIAL POSITION (continued)  
As of December 31, 2019  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

		31 Desember/December 31,		
		2019	Catatan/ Notes	2018
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>				<b>Equity attributable to the owner of the parent entity</b>
Modal saham				Shares capital
Modal dasar 12.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham				Authorized capital 12,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share
Modal ditempatkan disetor penuh - 6.414.412 saham	6.414.412.000	25	6.414.412.000	Issued and fully paid- 6,414,412 shares
Tambahan modal disetor	8.588.878		-	Additional paid in capital
Penyertaan modal negara	22.963.207	26	22.963.207	Government capital investment
Nilai buku aset tetap kenavigasian dari penyertaan modal negara	(37.004.793)	27	(37.004.793)	Book value of fixed assets on navigation from government capital investment
Akumulasi penyusutan aset tetap kenavigasian dari BPYBDS	408.393.524	27	408.393.524	Accumulated depreciation of navigation fixed assets from BPYBDS
Saldo laba				Retained earnings
Dicadangkan	7.774.022.361	28	6.228.618.258	Appropriated
Belum dicadangkan	1.451.359.978	28	2.007.018.315	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	(67.725.696)		2.960.722	Other comprehensive income
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>15.975.009.459</b>		<b>15.047.361.233</b>	<b>Equity attributable to owner of the parent entity</b>
Kepentingan nonpengendali	5.498.388	29	4.863.436	Non-controlling interests
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>15.980.507.847</b>		<b>15.052.224.669</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>42.786.551.099</b>		<b>31.608.915.621</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal  
31 Desember 2019  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS  
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
Year Ended December 31, 2019  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	Catatan/ Notes	2018	
<b>PENDAPATAN USAHA</b>				<b>OPERATING REVENUES</b>
Pendapatan aeronautika	4.975.936.088	30	5.113.648.346	Aeronautical revenues
Pendapatan non-aeronautika	3.655.609.514	30	3.407.438.964	Non-aeronautical revenues
<b>TOTAL</b>	<b>8.631.545.602</b>		<b>8.521.087.310</b>	<b>TOTAL</b>
Beban operasional bandara	(3.280.187.024)	32	(3.152.001.063)	Airport operation expenses
Beban pegawai	(1.590.667.332)	31	(1.553.875.958)	Employee expenses
Beban umum dan administrasi	(1.030.352.218)	33	(1.020.434.219)	General and administrative expenses
Beban pemasaran	(29.640.873)		(36.335.286)	Marketing expenses
Beban lain-lain	(102.793.058)	35	(60.850.370)	Other expenses
Penghasilan lain-lain	127.257.058	34	219.204.309	Other income
<b>LABA USAHA</b>	<b>2.725.162.155</b>		<b>2.916.794.723</b>	<b>OPERATING PROFIT</b>
Penghasilan keuangan	198.326.544	36	168.849.128	Finance income
Beban keuangan	(860.269.934)	37	(265.134.161)	Finance costs
Bagian (rugi) laba entitas asosiasi	(8.952.137)	13	2.552.006	Equity (loss) income of associate entities
<b>LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>	<b>2.054.266.628</b>		<b>2.823.061.696</b>	<b>PROFIT BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX</b>
Beban pajak final	(109.731.383)		(128.127.639)	Final tax expense
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>	<b>1.944.535.245</b>		<b>2.694.934.057</b>	<b>PROFIT BEFORE CORPORATE INCOME TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN, NETO</b>	<b>(492.308.079)</b>	11d	<b>(689.015.898)</b>	<b>CORPORATE INCOME TAX EXPENSE, NET</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.452.227.166</b>		<b>2.005.918.159</b>	<b>PROFIT FOR THE YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN  
KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal  
31 Desember 2019  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS  
AND OTHER COMPREHENSIVE  
INCOME (continued)  
Year Ended December 31, 2019  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	Catatan/ Notes	2018	
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				<b>Item that will be reclassified to profit or loss</b>
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	12.293.462	5d	(2.769.906)	Changes in fair value of available- for-sale financial assets
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				<b>Items that will not be reclassified to profit or loss</b>
Laba (rugi) aktuarial imbalan kerja	(80.524.121)		(66.782.925)	Actuarial gain (loss) on employee benefits
Rugi komprehensif entitas asosiasi	(2.466.064)		(1.551.197)	Comprehensive loss of associate entities
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(70.696.723)</b>		<b>(71.104.028)</b>	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR AFTER TAX</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.381.530.443</b>		<b>1.934.814.131</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>
<b>Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>				<b>Profit for the year attributable to:</b>
Pemilik entitas induk	1.451.359.978		2.007.018.315	The owner of parent entity
Kepentingan nonpengendali	867.188		(1.100.156)	Non-controlling interest
<b>Total</b>	<b>1.452.227.166</b>		<b>2.005.918.159</b>	<b>Total</b>
<b>Total penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>				<b>Total comprehensive income (loss) for the year attributable to:</b>
Pemilik entitas induk	1.380.673.460		1.935.914.287	The owner of parent entity
Kepentingan nonpengendali	856.983		(1.100.156)	Non-controlling interest
<b>Total</b>	<b>1.381.530.443</b>		<b>1.934.814.131</b>	<b>Total</b>
<b>Laba per saham dasar (angka penuh)</b>	<b>226.265</b>	2x	<b>312.892</b>	<b>Basic earnings per share (full amount)</b>
<b>Laba per saham dilusian (angka penuh)</b>	<b>225.458</b>	2x	<b>303.655</b>	<b>Diluted earnings per share (full amount)</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.



**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY  
For the Year Ended December 31, 2019  
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)**

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/Equity Attributable to The Owner of Parent Entity

Catatan/ Notes	Modal Saham - Ditempatkan dan Ditetor Penuh/ Share Capital - Issued and Fully Paid	Tambahannya Modal Ditetor/ Additional Paid-in Capital	Penyertaan Modal Negara/ Government Capital Investment	Nilai Buku Aset Tetap Kenavigasian dari Penyertaan Modal Negara/ Book Value of Fixed Assets on Navigation from Government Capital Investment	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Kenavigasian dari BPYBDS/ Accumulated Depreciation of Fixed Assets on Navigation from BPYBDS	Saldo Laba/Retained Earnings			Penghasilan Komprehensif Lain/Other Comprehensive Income	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interests	Total Ekuitas/ Total Equity		
						Dicadangkan/ Appropriated	Belum Dicadangkan/ Unappropriated	Total/ Total					
<b>Saldo tanggal 31 Desember 2017</b>	<b>6.414.412.000</b>	-	<b>255.096.706</b>	<b>(269.138.292)</b>	<b>408.393.524</b>	<b>5.093.757.108</b>	<b>1.418.577.150</b>	<b>6.512.334.258</b>	<b>74.064.750</b>	<b>13.395.162.946</b>	<b>6.298.096</b>	<b>13.401.461.042</b>	<b>Balance as of December 31, 2017</b>
Pembagian dividen	28	-	-	-	-	-	-	(283.716.000)	-	(283.716.000)	-	(284.050.504)	Dividend declared
Cadangan	28	-	-	-	-	1.134.861.150	(1.134.861.150)	-	-	-	-	-	General reserve
Penyertaan modal negara	26	-	(232.133.499)	232.133.499	-	-	-	-	-	-	-	-	Government capital investment
Rugi komprehensif entitas asosiasi	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.551.197)	(1.551.197)	-	(1.551.197)	Comprehensive loss of associate entities
Rugi aktualisasi imbalan kerja karyawan	-	-	-	-	-	-	-	-	(66.782.925)	(66.782.925)	-	(66.782.925)	Actuarial loss on employee benefits
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.769.906)	(2.769.906)	-	(2.769.906)	Changes in fair value of available-for-sale financial assets
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	2.007.018.315	2.007.018.315	-	2.007.018.315	-	(1.100.156)	2.005.918.159	Profit for the year
<b>Saldo tanggal 31 Desember 2018</b>	<b>6.414.412.000</b>	-	<b>22.963.207</b>	<b>(37.004.793)</b>	<b>408.393.524</b>	<b>6.228.618.258</b>	<b>2.007.018.315</b>	<b>8.235.636.573</b>	<b>2.960.722</b>	<b>15.047.361.233</b>	<b>4.863.436</b>	<b>15.052.224.669</b>	<b>Balance as of December 31, 2018</b>
Pembagian dividen	28	-	-	-	-	-	-	(461.614.212)	-	(461.614.212)	-	(461.836.143)	Dividend declared
Cadangan	28	-	-	-	-	1.545.404.103	(1.545.404.103)	-	-	-	-	-	General reserve
Rugi komprehensif entitas asosiasi	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.466.064)	(2.466.064)	-	(2.466.064)	Comprehensive loss of associate entities
Rugi aktualisasi imbalan kerja karyawan	-	-	-	-	-	-	-	-	(80.513.816)	(80.513.816)	(10.305)	(80.524.121)	Actuarial loss on employee benefits
Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	-	8.588.878	-	-	-	-	-	-	-	8.588.878	-	8.588.878	Differences arising from business combination of entities under common control
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	-	-	-	-	-	-	12.293.462	12.293.462	-	12.293.462	Changes in fair value of available-for-sale financial assets
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	1.451.359.978	1.451.359.978	-	1.451.359.978	-	867.188	1.452.227.166	Profit for the year
<b>Saldo tanggal 31 Desember 2019</b>	<b>6.414.412.000</b>	<b>8.588.878</b>	<b>22.963.207</b>	<b>(37.004.793)</b>	<b>408.393.524</b>	<b>7.774.022.361</b>	<b>1.451.359.978</b>	<b>9.225.382.339</b>	<b>(67.725.696)</b>	<b>15.975.009.459</b>	<b>5.498.388</b>	<b>15.980.507.847</b>	<b>Balance as of December 31, 2019</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal  
31 Desember 2019  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENT  
OF CASH FLOWS  
For the Year Ended December 31, 2019  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
2019	Catatan/ Notes	2018	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari pelanggan		8.384.535.713	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok, pihak ketiga lainnya dan karyawan	(5.167.908.046)	(4.347.293.407)	Cash payment to suppliers, other third parties and employees
Pembayaran beban bunga	(873.352.965)	(262.568.530)	Payment of interest expense
Pendapatan bunga	198.326.544	168.849.132	Interest income
Pembayaran pajak	(1.100.241.064)	(915.062.085)	Tax payment
<b>Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>1.549.272.091</b>	<b>3.028.460.823</b>	<b>Net cash provided by operating activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Pengeluaran untuk investasi jangka pendek	(187.755.531)	(71.000.806)	Payment for short-term investments
Pengeluaran untuk investasi jangka panjang	(11.986.194)	(13.361.105)	Payment for long-term investments
Penambahan aset tetap	(9.596.046.769)	(5.767.905.062)	Increase of fixed assets
<b>Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(9.795.788.494)</b>	<b>(5.852.266.973)</b>	<b>Net cash used in investing activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan pinjaman jangka panjang	11.788.080.717	2.746.981.235	Proceed on long-term loan
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(744.659.425)	(690.198.279)	Payment on long-term loan
Pembayaran dividen	(461.614.212)	(283.716.000)	Dividend payment
<b>Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>	<b>10.581.807.080</b>	<b>1.773.066.956</b>	<b>Net cash provided by financing activities</b>
Dampak bersih perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas	26.499.115	53.767.028	Net effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
<b>PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>2.361.789.792</b>	<b>(996.972.166)</b>	<b>NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>3.149.113.800</b>	<b>4.146.085.966</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>5.510.903.592</b>	<b>3.149.113.800</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**1. UMUM**

**a. Pendirian Perusahaan**

PT Angkasa Pura I (Persero) ("Perusahaan") pertama kali didirikan dalam bentuk Perusahaan Negara dengan nama Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 33 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran. Berdasarkan PP No. 21 Tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambahan PP No. 33 Tahun 1962, PN Angkasa Pura Kemayoran berubah nama menjadi PN Angkasa Pura. Selanjutnya, berdasarkan PP No. 37 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Angkasa Pura, PN Angkasa Pura dilanjutkan berdirinya dan ditetapkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 1969, dengan nama Perusahaan Umum (Perum) "Angkasa Pura".

Dalam rangka pembagian wilayah pengelolaan bandar udara, Perum Angkasa Pura sebagaimana dimaksud dalam PP No. 3 Tahun 1985 diubah namanya menjadi Perum Angkasa Pura berdasarkan PP No. 25 Tahun 1986. Selanjutnya berdasarkan PP No. 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perum Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) ("PP No.5/1992"), bentuk badan hukum Perum Angkasa Pura I diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Dengan dialihkannya bentuk Perum Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Perum Angkasa Pura I dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai Perum Angkasa Pura I yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

Perusahaan mulai beroperasi sejak dialihkannya status hukum dari Perum menjadi bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT) tahun 1993.

**1. GENERAL**

**a. The Company's establishment**

*PT Angkasa Pura I (Persero) ("the Company") was first established as a State Company by the name of the State Enterprise (PN) Angkasa Pura Kemayoran by the Indonesian Government Regulation (PP) No. 33 Year 1962 on the Establishment of the State Enterprise (PN) Angkasa Pura Kemayoran. Based on the PP No. 21 Year 1965 on the Amendment and Supplement to Government Regulation No. 33 Year 1962, PN Angkasa Pura Kemayoran changed its name to PN Angkasa Pura. Furthermore, based on the PP No. 37 Year 1974 on Public Company Angkasa Pura, PN Angkasa Pura continues its establishment and set its business form into Public Corporation (Perum) as defined in Article 2 paragraph (2) of Law No. 9 Year 1969, under the name Public Corporation (Perum) "Angkasa Pura".*

*In the framework of the division of management of airports, Perum Angkasa Pura as stipulated in PP No. 3 Year 1985 was renamed to the Perum Angkasa Pura I based on the PP No. 25 Year 1986. Furthermore, based on PP No. 5 Year 1992 on the Conversion of Perum Angkasa Pura I into a Limited Company (Persero) ("PP No. 5/1992"), the legal entity of Perum Angkasa Pura I is converted into a Limited Company (PT). With the conversion of Perum Angkasa Pura I into a Limited Company (Persero), Perum Angkasa Pura I is liquidated at the time of the establishment of the Company (Persero) with the provision that all rights and obligations, property and employees of General Company (Perum) Angkasa Pura I, which existed at the time of its liquidation are transferred to the Company (Persero).*

*The Company started its operations since the transfer of legal status from the General Company into a Limited Company (PT) in 1993.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)**

Dalam rangka pelaksanaan PP No. 5/1992 ditandatangani Akta Pendirian Perseroan Terbatas Angkasa Pura I (Persero) No. 1 tanggal 2 Januari 1993, sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pembetulan No.95 tanggal 19 Maret 1993 keduanya dibuat di hadapan Muhani Salim S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman berdasarkan Keputusan No. C2-2470.HT.01.01. th.93 tanggal 24 April 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1370/1993 tanggal 19 Mei 1993 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 29 Juni 1993, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2914.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan utama Perusahaan adalah menyelenggarakan usaha jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara dan usaha-usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan usaha tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Perusahaan dapat pula mendirikan atau menjalankan perusahaan lainnya yang mempunyai hubungan dengan usaha tersebut di atas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan badan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan.

Berdasarkan PP No. 77 Tahun 2012 Tentang Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), jasa pelayanan penerbangan tidak dikelola oleh Perusahaan sejak tanggal 16 Januari 2013.

Induk Perusahaan, yang juga adalah induk terakhir Perusahaan, adalah Pemerintah Republik Indonesia.

**1. GENERAL (continued)**

**a. The Company's establishment (continued)**

*In the implementation of PP No. 5/1992 the Deed of Establishment of a Limited Liability Company Angkasa Pura I (Persero) No. 1 dated January 2, 1993 was signed, as corrected by Deed of Rectification No.95 dated March 19, 1993, both made by Muhani Salim S.H, Notary in Jakarta, which has been approved by the Ministry of Justice by Decree No. C2-2470.HT.01.01. th.93 dated April 24, 1993 and was registered at the Central Jakarta District Court No. 1370/1993 dated May 19, 1993 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.52 dated June 29, 1993, the Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 2914.*

*Based on article 3 of the Company's Articles of Association, its main activities are conducting airport service business and other related businesses in conformity with business principles of a Limited Company.*

*The Company may also establish other entities or undertake other ventures related to those business activities either individually or in partnership with other parties provided that those are permissible under the prevailing laws and regulations and the Company's articles of association.*

*Based on PP No. 77 Year 2012 Regarding Perum of Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), aviation services are not managed by the Company since January 16, 2013.*

*The Company's parent, which is also the Company's ultimate parent, is the Government of the Republic of Indonesia.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)**

Perusahaan berkantor pusat di Kemayoran, Jakarta. Pada tahun 2019, bandara yang dikelola oleh Perusahaan sebanyak 14 sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 122 Tahun 2019 tentang Perusahaan sebagai Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) yaitu:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1) Bandara/Airport  | I Gusti Ngurah Rai (DPS) - Bali                           |
| 2) Bandara/Airport  | Juanda Surabaya (SUB) - Surabaya                          |
| 3) Bandara/Airport  | Sultan Hasanuddin (UPG) - Makassar                        |
| 4) Bandara/Airport  | Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (BPN) - Balikpapan |
| 5) Bandara/Airport  | Frans Kaisiepo (BIK) - Biak                               |
| 6) Bandara/Airport  | Sam Ratulangi (MDC) - Manado                              |
| 7) Bandara/Airport  | Adisutjipto (JOG) - Yogyakarta                            |
| 8) Bandara/Airport  | Adi Soemarmo (SOC) - Surakarta                            |
| 9) Bandara/Airport  | Syamsuddin Noor (BDJ) - Banjarmasin                       |
| 10) Bandara/Airport | Pattimura (AMQ) - Ambon                                   |
| 11) Bandara/Airport | Jendral Ahmad Yani (SRG) - Semarang                       |
| 12) Bandara/Airport | Lombok (LOP) - Praya                                      |
| 13) Bandara/Airport | El Tari (KOE) - Kupang                                    |
| 14) Bandara/Airport | Yogyakarta (YIA) - Kulonprogo                             |

Selain itu, Perusahaan telah mendirikan Strategic Business Unit (SBU) Komersial Bali, yang merupakan unit khusus yang dibentuk oleh Direksi dengan fokus meningkatkan pendapatan non-aeronautika di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.

Selain itu, ekspansi usaha Perusahaan dilakukan dengan pembentukan entitas anak (Catatan 1c).

Dalam rangka pengembangan bandar udara, Direksi menerbitkan keputusan untuk membentuk organisasi dan tata kerja proyek sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.145/OM.01.01/2016 tanggal 23 September 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Bandar Udara Internasional Yogyakarta.

**1. GENERAL (continued)**

**a. The Company's establishment (continued)**

*The Company is headquartered in Kemayoran, Jakarta. In 2019, airports managed by the Company are as many as 14 according to Decree of the Minister of Communication No. KM 122 Year 2019 regarding the Company as Airport Business Entity (BUBU) is:*

*In addition, the Company has established Commercial Strategic Business Unit (SBU) Bali, which is a special unit established by the Directors to focus on increasing non-aeronautical revenues at I Gusti Ngurah Rai International Airport Bali.*

*In addition, the Company's business expansion is done by establishing subsidiaries (Note 1c).*

*In the development of airports, Directors issued a decree to establish the organization and project operating procedures as follows:*

- a. *In accordance with the Decision of the Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.145/OM.01.01/2016 dated September 23, 2016 about the Organization and Operating Procedure Development Project of International Airport Yogyakarta.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)**

Dalam rangka pengembangan bandar udara Direksi menerbitkan keputusan untuk membentuk organisasi dan tata kerja proyek sebagai berikut: (lanjutan)

- b. Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.24/OM.01.01/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang perubahan atas keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.107/OM.01.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Bandar Udara Ahmad Yani-Semarang.
- c. Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.176/OM.01.01/2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor - Banjarmasin.

**b. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit dan Karyawan**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2019/ December 31, 2019</b>
<b>Dewan Komisaris</b>	
Komisaris Utama	Djoko Sasono
Komisaris Independen*)	-
Komisaris	Suprasetyo
Komisaris	Ali Mochtar Ngabalin
Komisaris	Tri Budi Satriyo
Komisaris	Harry Z. Soeratin
<b>Direksi</b>	
Direktur Utama	Faik Fahmi
Direktur Teknik	Lukman F. Laisa
Direktur Operasi	Wendo Asrul Rose
Direktur Pemasaran dan Pelayanan	Devy W. Suradji
Direktur Keuangan	Novrihandri
Direktur SDM dan Umum	Adi Nugroho
Direktur Pengembangan Usaha	Sardjono Jhony Tjitrokusumo

**1. GENERAL (continued)**

**a. The Company's establishment (continued)**

In the development of airports, Directors issued a decree to establish the organization and project working procedures as follows: (continued)

- b. In accordance with the Decision of the Board of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.24/OM.01.01/2016 dated February 11, 2016 on amendments to the decision of the Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.107/OM.01.01/2014 about the Organization and Operating Procedure Development Project of Ahmad Yani International Airport-Semarang.
- c. In accordance with the Decision of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.176/OM.01.01/2014 dated December 15, 2014 about the Organization and Operating Procedure Development Project of Syamsudin Noor Airport in Banjarmasin.

**b. Board of Commissioners and Directors, Audit Committee and Employees**

The compositions of the Company's Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	<b>31 Desember 2018/ December 31, 2018</b>
<b>Board of Commissioners</b>	
	President Commissioner
	Independent Commissioner*)
	Commissioner
	Commissioner
	Commissioner
<b>Directors</b>	
	President Director
	Technical Director
	Operation Director
	Marketing and Service Director
	Finance Director
	Human Capital and
	General Affair Director
	Business Development
	Director

\*) Jabatan sebagai Komisaris telah berakhir pada tanggal 26 April 2019/Position as Commissioner has ended on April 26, 2019

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)**

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Ketua	Harry Z. Soeratin
Wakil Ketua I	Djoko Sasono
Wakil Ketua II	-
Anggota	Suka Edi Prasetyo
Anggota	Syaiful

Total manfaat yang dibayarkan oleh Kelompok Usaha untuk Dewan Komisaris dan Direksi sebesar Rp133.531.249 dan Rp116.429.651 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah karyawan tetap Kelompok Usaha masing-masing sebanyak 4.562 dan 4.389 orang (tidak diaudit).

Laporan keuangan konsolidasian PT Angkasa Pura I (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 28 Februari 2020. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut.

**c. Entitas anak**

Laporan keuangan konsolidasian mencakup akun-akun Perusahaan dan entitas anak (selanjutnya disebut "Kelompok Usaha") berikut ini, dimana Perusahaan mempunyai pengendalian:

Nama entitas anak/ Names of subsidiaries	Kegiatan Usaha/ Principal Activity	Domisili/ Domicile	Pendirian dan Beroperasi Komersial/Year of Establishment & Commercial Operation	Kepemilikan/ Percentages of Ownership	Total Aset sebelum Eliminasi/ Total Assets before Elimination	
					2019	2018
PT Angkasa Pura Logistik	Logistik	Jakarta	2012	98,00%	302.928.238	247.876.813
PT Angkasa Pura Hotel	Hotel	Jakarta	2012	99,99%	738.816.758	728.225.102
PT Angkasa Pura Properti	Properti	Jakarta	2012	99,96%	537.395.635	485.594.811
PT Angkasa Pura Suport	Jasa	Jakarta	2012	99,81%	1.393.988.229	1.018.677.301
PT Angkasa Pura Retail	Trading	Jakarta	2014	97,50%	90.226.172	81.063.880

**1. GENERAL (continued)**

**b. Board of Commissioners and Directors, Audit Committee and Employees (continued)**

The compositions of the Company's Audit Committee as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
Anandy Wati		Chairman
Harry Z. Soeratin		Vice Chairman I
Djoko Sasono		Vice Chairman II
Agus Waluyo		Member
Syaiful		Member

Total benefits paid by the Group for the Board of Commissioners and Directors amounted to Rp133,531,249 and Rp116,429,651 for the years ended December 31, 2019 and 2018, respectively (unaudited).

On December 31, 2019 and 2018, the number of permanent employees of the Group are 4,562 and 4,389, respectively (unaudited).

The consolidated financial statements of PT Angkasa Pura I (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2019 and for the year then ended are completed and authorized for issuance on February 28, 2020 by the Company's Directors. The Company's Directors who signed the Directors' Statement are responsible for the fair preparation and presentation of such consolidated financial statements.

**c. Subsidiaries**

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and its subsidiaries (collectively referred to hereafter as "the Group"), over which the Company has control:



**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**c. Entitas anak (lanjutan)**

**PT Angkasa Pura Logistik (“APL”)**

APL didirikan berdasarkan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn No. 01 tanggal 6 Januari 2012 dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta No. 20 tanggal 23 Mei 2014. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-03158.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012.

APL memiliki modal dasar sebesar Rp80.000.000 terbagi dalam 80.000 saham dengan nilai nominal per sahamnya sebesar Rp1.000.000 (angka penuh) modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp25.000.000.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir APL berdasarkan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No.05 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha PT Angkasa Pura Logistik, telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-0088543.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019.

Kegiatan utama APL berdasarkan Anggaran Dasarnya, meliputi bidang Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan, Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Aktivitas Pos dan Kurir, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa, Real Estate, Konstruksi Khusus, Angkutan Perairan, dan Angkutan Udara.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham APL pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Total Saham/ Total Shares (Lembar/Shares)</b>	<b>Saham Ditempatkan dan Disetor/ Shares Issued and Fully Paid</b>	<b>Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)</b>	<b>Shareholders</b>
PT Angkasa Pura I (Persero) Pusat Koperasi Karyawan Angkasa Pura I (Puskokapura)	24.500	24.500.000	98,00	PT Angkasa Pura I (Persero) Pusat Koperasi Karyawan Angkasa Pura I (Puskokapura)
	500	500.000	2,00	
<b>Total</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>Total</b>

**1. GENERAL (continued)**

**c. Subsidiaries (continued)**

**PT Angkasa Pura Logistik (“APL”)**

APL was established based on the Deed of Notary Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn No. 01 dated January 6, 2012 and has been amended several times the latest by Deed No. 20 dated May 23, 2014. The Deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-03158.AH.01.01. Year 2012 dated January 18, 2012.

APL has authorized capital of Rp80,000,000 divided into 80,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share issued and fully paid-up capital of Rp25,000,000.

The latest Amendment of APL's Article of Association based on Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn. No.05 dated October 28, 2019 regarding Amendment to the Articles of Association Regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of PT Angkasa Pura Logistik, has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Notification Receipt Letter No. AHU-0088543.AH.01.02. Year 2019 dated October 30, 2019.

The main business of APL based on its Articles of Association, comprises of Warehousing and Transportation Support Activities, Travel Agent Activities, Tour Operators and Other Reservation Services, Rental and Leasing Activities without Option Rights, Post and Courier Activities, Waste Management and Recycling, Land Transportation and Transportation through Pipelines, Real Estate, Special Construction, Water Transportation, and Air Transportation.

The details of the shareholders and their share ownerships of APL as of December 31, 2019 are as follows:

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**c. Entitas anak (lanjutan)**

**PT Angkasa Pura Hotel ("APH")**

APH didirikan berdasarkan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn No. 03 tanggal 6 Januari 2012 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-03688.AH.01.01.Tahun 2012 tertanggal 20 Februari 2012.

Anggaran Dasar APH telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn No. 03 tanggal 14 November 2017 tentang penambahan anggaran dasar perseroan terbatas PT Angkasa Pura Hotel, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0005993.AH.01.02 tanggal 10 Maret 2017.

Kegiatan utama APH berdasarkan Anggaran Dasarnya meliputi:

- a. Di bidang perhotelan meliputi penyediaan kamar menginap, airport hotel, lounge, food and beverage, travel agent, penyediaan makanan lainnya dan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan termasuk didalamnya penyediaan ruangan/tempat konvensi, kongres dan pameran, termasuk pelayanan makan dan minum, pelayanan pencucian pakaian, penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan.
- b. Di bidang jasa meliputi jasa konsultasi bidang perhotelan, jasa management hotel, villa, jasa pelayanan penumpang di Bandara, jasa pengelolaan hotel, jasa rumah makan/restoran, jasa boga makanan dan minuman termasuk penyediaan makanan dan minuman di dalam pesawat terbang.
- c. Di bidang perdagangan meliputi perdagangan makanan dan minuman.

APH memiliki modal dasar sebesar Rp2.000.000.000 terbagi dalam 2.000.000 saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp1.000.000 (angka penuh) modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp649.904.000.

**1. GENERAL (continued)**

**c. Subsidiaries (continued)**

**PT Angkasa Pura Hotel ("APH")**

APH was established based on Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn No. 03 dated January 6, 2012 and has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-03688.AH.01.01. Year 2012 dated February 20, 2012.

APH's Article of Association has been amended several times, recently through Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn, No. 03 dated November 14, 2017 regarding addition of articles of association for companies PT Angkasa Pura Hotel, and which has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision Letter No. AHU-0005993.AH.01.02 dated March 10, 2017.

The main business of APH based on its Articles of Association consist of:

- a. In the field of hospitality, it includes the provision of stay rooms, airport hotels, lounges, food and beverage, travel agents, provision of other food and tourism related business activities including the provision of convention rooms, conferences and exhibitions, including food and drink services, washing services clothing, providing accommodation facilities and other services needed.
- b. In the field of services include hospitality consulting services, hotel management services, villas, airport passenger services, hotel management services, restaurant/restaurant services, food and beverage services including the provision of food and beverages on airplanes.
- c. In the field of trade includes trade in food and beverages.

APH has authorized capital of Rp2,000,000,000 divided into 2,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share issued and fully paid-up capital of Rp649,904,000.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**c. Entitas anak (lanjutan)**

**PT Angkasa Pura Hotel ("APH") (lanjutan)**

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham APH pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Total Saham/ Total Shares (Lembar/Shares)	Saham Ditempatkan dan Disetor/ Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Shareholders
PT Angkasa Pura I (Persero)	649.864	649.864.000	99,99	PT Angkasa Pura I (Persero)
Pusat Koperasi Karyawan Angkasa Pura I (Puskokapura)	40	40.000	0,01	Pusat Koperasi Karyawan Angkasa Pura I (Puskokapura)
<b>Total</b>	<b>649.904</b>	<b>649.904.000</b>	<b>100,00</b>	<b>Total</b>

**PT Angkasa Pura Properti ("APP")**

APP didirikan berdasarkan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn., No. 02 tanggal 6 Januari 2012 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-03704.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012. Anggaran Dasar APP telah beberapa kali diubah terakhir berdasarkan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn No. 08 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha PT Angkasa Pura Properti, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0090336.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 5 November 2019.

Kegiatan utama APP berdasarkan Anggaran Dasarnya meliputi konstruksi gedung dan bangunan sipil, konstruksi khusus, perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor, real estate, pengelolaan air dan daur ulang sampah, aktivitas remediasi, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, aktivitas penyedia jasa untuk gedung, pertamanan dan olahraga.

APP memiliki modal dasar sebesar Rp168.000.000 terbagi dalam 168.000 saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp1.000.000 (angka penuh) dan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp168.000.000.

**1. GENERAL (continued)**

**c. Subsidiaries (continued)**

**PT Angkasa Pura Hotel ("APH") (continued)**

The details of the shareholders and their share ownerships of APH as of December 31, 2019 are as follows:

**PT Angkasa Pura Properti ("APP")**

APP was established based on Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn., No. 02 dated January 6, 2012 and has been approved by the Ministry of Law and Human Rights through its Decision Letter No. AHU- 03704.AH.01.01 Year 2012 dated February 20, 2012. APP's Article of Association has been amended several times, recently through Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn, No. 08 dated October 31, 2019 regarding Purpose and Objectives and Business Activities of PT Angkasa Pura Properti, and which have been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision Letter No. 0090336.AH.01.02. Year 2019 dated November 5, 2019.

The main business of APP based on its Articles of Association comprises civil construction and building construction, special construction, wholesale trade, non-car and motorbike, real estate, water management and waste recycling, remediation activities, warehousing and transportation support activities, service provider activities for buildings, parks and sports

APP has authorized capital of Rp168,000,000 divided into 168,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share issued and fully paid-up capital of Rp168,000,000.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**c. Entitas anak (lanjutan)**

**PT Angkasa Pura Properti (“APP”) (lanjutan)**

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham APP pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Total Saham/ Total Shares (Lembar/Shares)	Saham Ditempatkan dan Disetor/ Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Shareholders
PT Angkasa Pura I (Persero) Pusat Koperasi Karyawan Angkasa Pura I (Puskokapura)	167.940	167.940.000	99,96	PT Angkasa Pura I (Persero) Pusat Koperasi Karyawan Angkasa Pura I (Puskokapura)
	60	60.000	0,04	
<b>Total</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>Total</b>

**PT Angkasa Pura Suport (“APS”)**

APS didirikan berdasarkan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn., No. 03 tanggal 9 Februari 2012 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-08735.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 20 Februari 2012. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, terakhir berdasarkan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn., No. 10 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha PT Angkasa Pura Suport. Akta tersebut telah disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0090368.AHA.01.02.Tahun 2019 tanggal 5 November 2019.

Kegiatan utama APS berdasarkan Anggaran Dasarnya meliputi jasa pendukung kebandarudaraan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan barang/jasa yang bermutu tinggi.

APS memiliki modal dasar sebesar Rp1.000.000.000 terbagi dalam 1.000.000 saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp1.000.000 (angka penuh) dan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp250.480.000.

**1. GENERAL (continued)**

**c. Subsidiaries (continued)**

**PT Angkasa Pura Properti (“APP”) (continued)**

The details of the shareholders and their share ownerships of APP as of December 31, 2019 are as follows:

Pemegang Saham	Total Saham/ Total Shares (Lembar/Shares)	Saham Ditempatkan dan Disetor/ Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Shareholders
PT Angkasa Pura I (Persero) Pusat Koperasi Karyawan Angkasa Pura I (Puskokapura)	167.940	167.940.000	99,96	PT Angkasa Pura I (Persero) Pusat Koperasi Karyawan Angkasa Pura I (Puskokapura)
	60	60.000	0,04	
<b>Total</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>Total</b>

**PT Angkasa Pura Suport (“APS”)**

APS was established based on Notarial Deed of Notary Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn., No. 03 dated February 9, 2012 and has been approved by the Ministry of Law and Human Rights through its Decision Letter No. AHU-08735.AH.01.01 Year 2012 dated February 20, 2012. The Article of Association has been amended several times, recently based on Notarial Deed of Notary Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn., No. 10 dated October 31, 2019 regarding Purpose and Objectives and Business Activities of PT Angkasa Pura Suport. The Deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 0090368.AHA.01.02.Year 2019 dated November 5, 2019.

The main activities of the APS based on its Articles of Association include airport support services and optimizing the use of company resources to produce high-quality goods/services.

APS has authorized capital of Rp1,000,000,000 divided into 1,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share and issued and fully paid-up capital of Rp250,480,000.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**c. Entitas anak (lanjutan)**

**PT Angkasa Pura Suport ("APS") (lanjutan)**

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham APS pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Total Saham/ Total Shares (Lembar/Shares)	Saham Ditempatkan dan Disetor/ Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Shareholders
PT Angkasa Pura I (Persero) Pusat Koperasi Karyawan Angkasa Pura I (Puskokapura)	250.000 480	250.000.000 480.000	99,81 0,19	PT Angkasa Pura I (Persero) Pusat Koperasi Karyawan Angkasa Pura I (Puskokapura)
<b>Total</b>	<b>250.480</b>	<b>250.480.000</b>	<b>100,00</b>	<b>Total</b>

**PT Angkasa Pura Retail ("APR")**

APR didirikan berdasarkan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H, M.Kn., No. 11 tanggal 23 September 2014 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-26401.40.10.2014 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014.

Kegiatan utama APR berdasarkan Anggaran Dasarnya adalah menjalankan usaha dalam bidang pengelolaan Retail dan Food & Beverages yang ditujukan kepada para pengguna jasa bandar udara.

APR memiliki modal dasar sebesar Rp200.000.000 terbagi dalam 200.000 saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp1.000.000 (angka penuh) dan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp50.000.000.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham APR pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Total Saham/ Total Shares (Lembar/Shares)	Saham Ditempatkan dan Disetor/ Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Shareholders
PT Angkasa Pura I (Persero) PT Angkasa Pura Hotel	48.750 1.250	48.750.000 1.250.000	97,5 2,5	PT Angkasa Pura I (Persero) PT Angkasa Pura Hotel
<b>Total</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>Total</b>

**1. GENERAL (continued)**

**c. Subsidiaries (continued)**

**PT Angkasa Pura Suport ("APS")  
(continued)**

The details of the shareholders and their share ownerships of APS as of December 31, 2019 are as follows:

**PT Angkasa Pura Retail ("APR")**

APR was established based on Notarial Deed No. 11 Notary Nanda Fauz Iwan, S.H, M.Kn in South Jakarta, dated September 23, 2014 and was approved by of the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia through Decree No. AHU-26401.40.10.2014 Year 2014 dated September 24, 2014.

The main business of APR based on its Articles of Association is comprises of field of Retail and Food & Beverages management aimed at airport service users.

APR has authorized capital of Rp200,000,000 divided into 200,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share and issued and fully paid-up capital of Rp50,000,000.

The details of the shareholders and their share ownerships of APR as of December 31, 2019 are as follows:

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tertanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh periode yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

**a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep akrual dan biaya perolehan historis, kecuali beberapa akun tertentu yang diukur dengan cara sebagaimana yang diuraikan dalam kebijakan akuntansi di akun yang bersangkutan.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan menggunakan metode langsung yang mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan penyajian laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi lancar jangka pendek lainnya yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang, dikurangi dengan cerukan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah Indonesia (Rp) yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

*Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the Group's consolidated financial statements, which are in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which comprises the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding the Presentation and Disclosure of Financial Statements of an Issuer or a Public Company. These policies have been consistently applied to all periods presented, unless otherwise stated.*

**a. Basis of preparation of the consolidated financial statements**

*The consolidated financial statements, except for the consolidated statement of cash flows, are prepared using the accrual basis and based on historical costs, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies of those accounts.*

*The consolidated statement of cash flows is presented using the direct method by classifying the receipts and disbursements of cash and cash equivalents into operating, investing and financing activities. For the purpose of the consolidated statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand and in banks, deposits held at call with banks and other short-term highly liquid investments with original maturities of 3 (three) months or less, net of bank overdrafts.*

*All figures in the consolidated financial statements are rounded and expressed in thousands of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.*

*The currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is the functional currency of the Company and its subsidiaries.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**b. Penerapan standar akuntansi baru**

Efektif tanggal 1 Januari 2019, Kelompok Usaha menerapkan beberapa standar akuntansi baru yang relevan terhadap Kelompok Usaha berikut ini:

- ISAK 33 - Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka.
- ISAK 34 - Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan.
- Amandemen PSAK 24 (2018) - Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program.
- Penyesuaian 2018 PSAK 22 - Kombinasi Bisnis.
- Penyesuaian 2018 PSAK 26 - Biaya Pinjaman.
- Penyesuaian 2018 PSAK 46 - Pajak Penghasilan.
- Penyesuaian 2018 PSAK 66 - Pengaturan Bersama.

Penerapan ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

**c. Prinsip-prinsip konsolidasi**

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anaknya seperti yang diungkapkan dalam Catatan 1c. Entitas anak merupakan semua entitas dimana Perusahaan terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas tersebut dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Dengan demikian, suatu entitas dianggap sebagai entitas anak jika dan hanya jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas entitas tersebut, eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas tersebut dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas entitas tersebut untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Perusahaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**b. Adoption of new accounting standards**

Effective January 1, 2019, the Group adopted several new accounting standards which are relevant to the Group as follows:

- ISAK 33 - Foreign currency Transaction and Advance Consideration.
- ISAK 34 - Uncertainty in the Treatment of Income Tax.
- Amendments to PSAK 24 (2018) - Employee Benefits on the Plan Amendment, Curtailment or Settlement.
- 2018 Improvement to PSAK 22 – Business Combination.
- 2018 Improvement to PSAK 26 - Borrowing Costs.
- 2018 Improvement to PSAK 46 - Income Tax.
- 2018 Improvement to PSAK 66 - Joint Arrangements.

The adoption has no significant impact on the financial reporting and disclosures in the consolidated financial statements.

**c. Principles of consolidation**

The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its subsidiaries as disclosed in Note 1c. Subsidiaries are all entities over which the Company is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entities and has the ability to affect those returns through its power over the entities. Thus, an entity is considered a subsidiary if and only if the Company has power over the entity, exposure or rights to variable returns from its involvement with the entity and the ability to use its power over the investee to affect the amount of the Company's returns.



**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)**

**c. Principles of consolidation (continued)**

Semua saldo dan transaksi antar entitas yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Kelompok Usaha sebagai satu kesatuan usaha. Kebijakan akuntansi di entitas anak telah diubah seperlunya agar konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Kelompok Usaha.

All material intercompany accounts and transactions, including unrealized gains or losses, if any, are eliminated to reflect the financial position and the results of operations of the Group as a single business entity. Accounting policies of subsidiaries have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Entitas anak dikonsolidasikan mulai dari tanggal pengendalian beralih kepada Perusahaan dan tidak lagi dikonsolidasikan dari tanggal hilangnya pengendalian.

Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Company. They are deconsolidated from the date on which that control ceases.

Kepentingan nonpengendali ("KNP") mencerminkan bagian atas laba rugi, penghasilan komprehensif lain dan aset neto dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilik entitas induk, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan sebagai ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Non-controlling interest ("NCI") represents the portion of profit or loss, other comprehensive income and net assets of the subsidiary not attributable directly or indirectly to the owners of the parent entity, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owners of the parent entity.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan kepada KNP, bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Losses of a non-wholly owned subsidiary are attributed to NCI even if such losses result in a deficit balance for the NCI.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perusahaan:

In case of loss of control over a subsidiary, the Company:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian; dan
- mereklasifikasi bagian Kelompok Usaha atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

- derecognizes the assets (including *goodwill*) and liabilities of the subsidiary;
- derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests;
- derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;
- recognizes the fair value of the consideration received;
- recognizes the fair value of any investment retained;
- recognizes any surplus or deficit in consolidated statement of profit or loss; and other comprehensive income; and
- reclassifies its share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)**

Perubahan dalam bagian kepemilikan Kelompok Usaha pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas.

**d. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif**

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan diungkapkan dibawah ini. Kelompok Usaha bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan efektif sejak 1 Januari 2020.

- 1) PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

- 2) PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15.

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari *joint project* yang sukses antara *International Accounting Standards Board* dan *Financial Accounting Standards Board*, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**c. Principles of consolidation (continued)**

*A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction.*

**d. Accounting standards issued but not yet effective**

*The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current consolidated financial statements are disclosed below. The Group intends to adopt these standards, if applicable, when they effective since January 1, 2020.*

- 1) *PSAK 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9.*

*This PSAK provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that will result in a more timely info information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introducing a more general requirements based on management's judgment.*

- 2) *PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, adopted from IFRS 15.*

*This PSAK is a single standard from a joint project between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting Standards Board (FASB), provides revenue recognition from contracts with customers, where the entity is expected to analyze before recognizing the revenue.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**d. Standar akuntansi yang telah disahkan  
namun belum berlaku efektif (lanjutan)**

- 3) PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (*underlying assets*) bernilai-rendah.

- 4) Amandemen PSAK 15 - Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.

Amendemen ini mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

Kelompok Usaha sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**d. Accounting standards issued but not yet  
effective (continued)**

- 3) PSAK 73: Leases, adopted from IFRS 16.

This PSAK establishes the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease. There are 2 optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.

- 4) Amendments to PSAK 15 - Investments in Joint Associates and Joint Ventures: Long-Term Interests in Associates and Joint Ventures.

These Amendments provide that the entity also applies PSAK 71 on the financial instruments in associates or joint ventures where the equity method is not applied. This includes long-term interests that substantively form the entity's net investment in an associates or joint ventures.

The Group is presently evaluating and has not yet determined the effects of these accounting standards on its consolidated financial statements.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi**

Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan jika mereka:

- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
- (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
- (iii) merupakan personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk dari Perusahaan.

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:

- a. langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan, Perusahaan; (ii) memiliki kepentingan dalam Perusahaan yang memberikan pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Perusahaan;
- b. suatu pihak adalah entitas asosiasi Perusahaan;
- c. suatu pihak adalah ventura bersama dimana Perusahaan sebagai venturer;
- d. suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perusahaan atau induknya;
- e. suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);
- f. suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau di mana hak suara signifikan dimiliki oleh, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e);
- g. suatu pihak adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam Catatan 40.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**e. Transactions with related parties**

An individual or family member is related to the Company if it:

- (i) has control or joint control over the Company;
- (ii) has significant influence over the Company; or
- (iii) is a member of the key management personnel of the Company.

A party is considered to be related to the Company if:

- a. directly, or indirectly through one or more intermediaries, the party (i) controls, is controlled by, or is under common control with, the Company; (ii) has an interest in the Company that gives it significant influence over the Company; or (iii) has joint control over the Company;
- b. the party is an associate of the Company;
- c. the party is a joint venture in which the Company is a venturer;
- d. the party is a member of the key management personnel of the Company or its parent;
- e. the party is a close member of the family of any individual referred to in (a) or (d);
- f. the party is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or for which significant voting power in such entity resides with, directly or indirectly, any individual referred to in (d) or (e);
- g. the party is an employee benefit plan for the benefit of employees of the Company, or of any entity that is a related party of the Company.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 40.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**f. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing**

**f. Foreign Currency Transactions and  
Balances**

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian Kelompok Usaha. Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah berdasarkan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada tahun yang bersangkutan. Laba atau rugi selisih kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional currency and the Group's presentation currency. Transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the end of the reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average buying and selling rates of exchange quoted by Bank Indonesia at the closing of the last banking day of the year. The resulting gains or losses are credited or charged to current operations.

Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The exchange rates used as of December 31, 2019 and 2018 were as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Dolar AS	13.901	14.481	US Dollar
Dolar Singapura	10.324	10.603	Singapore Dollar

Keuntungan atau kerugian dari selisih kurs, yang sudah terealisasi maupun yang belum, baik yang berasal dari transaksi dalam mata uang asing maupun penjabaran aset dan liabilitas moneter dibebankan dalam laba rugi, kecuali jika ditangguhkan dalam penghasilan komprehensif lain sebagai lindung nilai arus kas dan lindung nilai investasi neto yang memenuhi syarat.

Realized or unrealized foreign exchange gains or losses arising from transactions in foreign currency and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognized in profit or loss, except when deferred in other comprehensive income as qualifying cash flow hedges and qualifying net investment hedges.

**g. Kas dan setara kas**

**g. Cash and cash equivalents**

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity periods of 3 (three) months or less at the time of placement and which are not used as collateral or not restricted.

Deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan tapi tidak melebihi 1 (satu) tahun dari tanggal penempatannya disajikan sebagai bagian dari "investasi jangka pendek".

Time deposits with maturities of more than 3 (three) months but not exceeding 1 (one) year at the time of placement are presented as part of "short-term investment".

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**h. Instrumen keuangan**

**h.1. Aset keuangan**

**Pengukuran awal**

Aset keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan diperlukan, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir periode keuangan.

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah (dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan pengiriman aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Kelompok Usaha berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut. Aset keuangan Kelompok Usaha meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan yang masih harus diterima di muka dan investasi jangka panjang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**h. Financial instruments**

**h.1. Financial assets**

**Initial measurements**

*Financial assets within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial assets at fair value through consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, loans and receivables, held-to-maturity investments, or available-for-sale financial assets, as appropriate. The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluate the classification of the asset at the end of each financial period.*

*Financial assets are initially recognized at fair value plus (in the case of investments not at fair value through consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income) transaction costs that are directly attributable. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e. the date the Group commits to purchase or sell the asset. The Group's financial assets include cash and cash equivalents, short-term investment, trade receivables, other receivables, accrued revenues and long-term investments.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**h. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**h.1. Aset keuangan (lanjutan)**

**Pengukuran setelah pengakuan awal**

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersebut selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*) dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba-rugi komprehensif pada saat pinjaman dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun melalui proses amortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**h. Financial instruments (continued)**

**h.1. Financial assets (continued)**

**Subsequent measurement**

*Subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:*

- *Financial assets at fair value through profit or loss.*

*Financial assets at fair value through profit or loss, including financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition as at fair value through consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.*

*Financial assets at fair value through consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income are presented in the consolidated statement of financial position at fair value with gains or loss from changes in fair value recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.*

- *Loans and receivables*

*Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. After initial measurement, such financial assets are subsequently measured at amortized cost using the Effective Interest Rate ("EIR") method, less impairment. Gains and loss are recognized in the statement of comprehensive income when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.*



**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**h. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**h.1. Aset keuangan (lanjutan)**

**Pengukuran setelah pengakuan awal  
(lanjutan)**

- Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

Aset keuangan Kelompok Usaha terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan yang masih harus diterima dan investasi jangka panjang Kelompok Usaha termasuk dalam kategori ini.

Kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo [*Held to-maturity ("HTM")*]

Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo ketika Perusahaan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengukuran awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE, setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Amortisasi biaya perolehan dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya perolehan atau biaya yang merupakan bagian integral dari SBE. Amortisasi SBE dicatat dalam laporan laba-rugi komprehensif. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kelompok Usaha tidak mempunyai investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**h. Financial instruments (continued)**

**h.1. Financial assets (continued)**

**Subsequent measurement (continued)**

- *Loans and receivables (continued)*

*The Group's financial assets include cash and cash equivalents, short-term investment, trade receivables, other receivables, accrued revenue and long-term investments are within this category.*

*Impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loans and receivables, and recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.*

- *Held-to-maturity ("HTM") investments*

*Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities are classified as HTM investments when the Company has the positive intention and ability to hold them to maturity.*

*After initial measurement, HTM investments are measured at amortized cost using the EIR method, less impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in the statement of comprehensive income. The loss arising from impairment are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.*

*The Group did not have any held-to-maturity investments as of December 31, 2019 and 2018.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**h. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**h.1. Aset keuangan (lanjutan)**

**Pengukuran setelah pengakuan awal  
(lanjutan)**

- Aset keuangan tersedia untuk dijual [*Available-for-sale* ("AFS")]

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai aset tersebut dihentikan pengakuannya, pada saat keuntungan atau kerugian kumulatif diakui, atau terjadi penurunan nilai, dan laba atau rugi kumulatif direklasifikasi dari ekuitas ke penghasilan komprehensif.

Investasi yang diklasifikasikan sebagai AFS adalah sebagai berikut:

- Investasi pada saham yang nilai wajarnya tidak tersedia dengan kepemilikan kurang dari 20% dan investasi jangka panjang lainnya dinyatakan sebesar biaya perolehan.
- Investasi pada instrumen utang yang tidak ditujukan untuk dimiliki sampai jatuh tempo diklasifikasikan sebagai AFS, dan dicatat pada nilai wajar.

**h.2. Liabilitas keuangan**

**Pengakuan awal**

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) dapat dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**h. Financial instruments (continued)**

**h.1. Financial assets (continued)**

**Subsequent measurement (continued)**

- *Available-for-sale* ("AFS") financial assets

*AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in any of the three preceding categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or loss recognized in equity until the assets are derecognized, at which time the cumulative gain or loss is recognized or determined to be impaired, and the cumulative gain or loss is reclassified from equity to comprehensive income.*

*The investments classified as AFS are as follows:*

- *Investments in shares of stock whose fair value is not available with equity interest of less than 20% and other long-term investments are stated at cost.*
- *Investments in debt instruments which are not intended to be held to maturity that have steadily determinable are classified as AFS, and recorded at fair value.*

**h.2. Financial liabilities**

**Initial recognition**

*Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are categorized as financial liabilities at fair value through profit or loss, financial liabilities measured at amortized cost, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**h. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**h.2. Liabilitas keuangan (lanjutan)**

**Pengakuan awal**

Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Kelompok Usaha meliputi utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, pinjaman bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, utang obligasi dan sukuk ijarah, dan utang jangka panjang lainnya.

**Pengukuran setelah pengakuan awal**

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan, jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok yang diperdagangkan, kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**h. Financial instruments (continued)**

**h.2. Financial liabilities (continued)**

**Initial recognition**

Financial liabilities are recognized initially at fair value, and in the case of financial liabilities measured at amortized cost, inclusive of directly attributable transaction costs.

The Group's financial liabilities include trade payables, other payables, accrued expenses, short-term bank loans, long-term bank loans, bonds payable and sukuk ijarah, and other long-term liabilities.

**Subsequent measurement**

Measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

- Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss, including financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through profit or loss. Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near future. Derivative liabilities are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Gains or loss on liabilities held for trading are recognized in the consolidated statement of comprehensive income.

Gains or loss on liabilities held for trading are recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**h. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**h. Financial instruments (continued)**

**h.2. Liabilitas keuangan (lanjutan)**

**h.2. Financial liabilities (continued)**

**Pengukuran setelah pengakuan awal  
(lanjutan)**

**Subsequent measurement (continued)**

• Pinjaman dan hutang

• Loans and borrowings

Liabilitas keuangan Kelompok Usaha meliputi utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, utang obligasi dan sukuk ijarah, dan utang jangka panjang lainnya termasuk dalam kategori ini.

The Group's financial liabilities include trade payables, other payables, accrued expenses, short-term bank loans, long-term bank loans, bonds payable and sukuk ijarah and other long-term liabilities are within this category.

Setelah pengakuan awal, pinjaman dan hutang yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba-rugi komprehensif konsolidasian pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

Measurement after initial recognition, loans and borrowings are subsequently measured interest at amortized cost using the effective interest method. Gains and losses are recognized in the consolidated statements of comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

**h.3. Saling hapus dari instrumen keuangan**

**h.3. Offsetting of financial instruments**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling-hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling-hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Financial assets and financial liabilities are netted off and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, currently has a legally enforceable right to set off the mutually-recognized amounts and there is an intention to settle net basis, or to realize asset and settle the liability simultaneously.

**h.4. Nilai wajar instrumen keuangan**

**h.4. Fair value of financial instruments**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan acuan pada kuotasi harga pasar atau kuotasi harga pedagang efek (harga penawaran untuk posisi beli dan harga permintaan untuk posisi jual), tidak termasuk pengurangan apapun untuk biaya transaksi.

The fair value of financial instruments that are traded in active markets at each reporting date is determined by reference to quoted market prices or dealer price quotations (bid price for long position and ask price for short position), without any deduction for transaction costs.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**h. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**h. Financial instruments (continued)**

**h.4. Nilai Wajar Instrumen Keuangan  
(lanjutan)**

**h.4. Fair Value of Financial Instruments  
(continued)**

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*), penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lain.

*For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.*

Penyesuaian risiko kredit

Credit risk adjustment

Kelompok Usaha menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak yang bertransaksi antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam penentuan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit Kelompok Usaha terkait dengan instrumen keuangan tersebut ikut diperhitungkan.

*The Group adjusts the price in the observable market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in the market and the ones being valued for financial asset positions. In determining the fair value of financial liability positions, the Group's own credit risk associated with the instrument is taken into account.*

**h.5. Biaya perolehan diamortisasi atas instrumen keuangan**

**h.5. Amortized cost on financial instruments**

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode SBE dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SBE.

*Amortized cost is calculated using the EIR less any allowance for impairment and principal repayment or value that can not be billed. The calculations consider the premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the EIR.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**h. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**h. Financial instruments (continued)**

**h.6. Penurunan nilai atas aset keuangan**

**h.6. Impairment of financial assets**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

*At the end of each reporting period the Group assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.*

- Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

- *Financial assets carried at amortized cost*

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Kelompok Usaha terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Kelompok Usaha menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan kelompok usaha menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

*For loans and receivables carried at amortized cost, the Group first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and the group is collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.*

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

*If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**h. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**h.6. Penurunan nilai atas aset keuangan  
(lanjutan)**

- Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Jika suatu aset keuangan yang dikelompokkan sebagai "Pinjaman yang diberikan dan Piutang" memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Kelompok Usaha. Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan penurunan nilai. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, jumlah pemulihan tersebut diakui di laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**h. Financial instruments (continued)**

**h.6. Impairment of financial assets  
(continued)**

- Financial assets carried at amortized cost (continued)

If a "Loans and Receivables" financial asset has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original effective interest rate of the financial asset. Loans and receivables, together with the associated allowance, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Group. If, in a subsequent year, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance for impairment account. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized in profit or loss.



**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**h. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**h.6. Penurunan nilai atas aset keuangan  
(lanjutan)**

- Aset keuangan AFS

Dalam hal investasi ekuitas diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual, bukti obyektif akan termasuk penurunan nilai wajar yang signifikan dan berkepanjangan di bawah nilai perolehan investasi tersebut.

Ketika terdapat bukti penurunan nilai, kerugian kumulatif - yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai investasi yang sebelumnya diakui dilaba rugi direklasifikasikan dari ekuitas ke laba rugi. Kerugian penurunan nilai atas investasi ekuitas tidak dihapuskan melalui laba rugi; sedangkan peningkatan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui dalam ekuitas.

Dalam hal instrumen utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual, penurunan nilai dievaluasi berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga di masa mendatang didasarkan pada nilai tercatat yang diturunkan nilainya dan diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Pendapatan bunga yang masih harus dibayar tersebut dicatat sebagai bagian dari akun "Pendapatan Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Jika pada periode/tahun berikutnya, nilai wajar atas instrumen utang meningkat dan peningkatan tersebut secara obyektif dapat dikaitkan dengan peristiwa yang timbul setelah pengakuan kerugian penurunan nilai diakui dilaba rugi, kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**h. Financial instruments (continued)**

**h.6. Impairment of financial assets  
(continued)**

- AFS financial assets

*In the case of equity investment classified as an AFS financial asset, objective evidence would include a significant or prolonged decline in the fair value of the investment below its cost.*

*Where there is evidence of impairment, the cumulative loss - measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that investment previously recognized in profit or loss, is reclassified from equity to profit or loss. Impairment losses on equity investments are not reversed through profit or loss; increases in their fair value after impairment are recognized in equity.*

*In the case of a debt instrument classified as an AFS financial asset, impairment is assessed based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost. Future interest income is based on the reduced carrying amount and is accrued based on the rate of interest used to discount future cash flows for the purpose of measuring impairment loss. Such accrual of interest income is recorded as part of the "Finance Income" account in the consolidated statement of comprehensive income.*

*If in a subsequent period/year, the fair value of a debt instrument increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in profit or loss, the impairment loss is reversed through consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**h. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**h.7. Penghentian pengakuan aset dan  
liabilitas keuangan**

**Aset keuangan**

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau apabila dapat diterapkan, untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila: (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau (2) Kelompok Usaha memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan salah satu diantara (a) Kelompok Usaha secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Kelompok Usaha secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset tersebut.

**Liabilitas keuangan**

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui di laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**h. Financial instruments (continued)**

**h.7. Derecognition of financial assets and  
liabilities**

**Financial assets**

*A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the contractual rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Group has transferred its rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement, and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.*

**Financial liabilities**

*A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.*

*When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**i. Persediaan**

Persediaan dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Pembebanan biaya pemakaiannya dilakukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang. Cadangan keusangan/kerugian persediaan ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi netonya.

Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi dengan taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

**j. Beban dibayar di muka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan metode garis lurus.

**k. Investasi pada entitas asosiasi**

Investasi Perusahaan pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai perolehan investasi ditambah atau dikurang dengan bagian Perusahaan atas laba atau rugi neto, dan penerimaan dividen dari entitas asosiasi sejak tanggal perolehan.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Perusahaan mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika dapat diterapkan, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Perusahaan dengan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan Perusahaan dalam entitas asosiasi.

Perusahaan menentukan apakah perlu untuk mengakui rugi penurunan nilai atas investasi Perusahaan dalam entitas asosiasi. Perusahaan menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**i. Inventories**

*Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. The inventory costing method is weighted average. Allowance for inventory obsolescence/losses is provided to reduce the carrying value of inventories to their net realizable value.*

*Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated cost of completion and estimated cost necessary to make the sale.*

**j. Prepaid expenses**

*Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.*

**k. Investments in associates**

*The Company's investments in associates are accounted for using the equity method. An associate is an entity in which the Company has significant influence. Under the equity method, the cost of investment is increased or decreased by the Company's share in net earnings or losses of, and dividends received from, the associates since the date of acquisition.*

*The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income reflects the share resulting from the operations of the associates. Where there has been a change recognized directly in the equity of the associates, the Company recognizes its share of any such changes and discloses this, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Company and the associates are eliminated to the extent of the Company's interest in the associates.*

*The Company determines whether it is necessary to recognize an impairment loss on its investments in associates. The Company determines at each reporting date whether there is objective evidence that any of its investments in associates is impaired.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**k. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)**

Dalam hal ini, Perusahaan menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakui penurunan nilai tersebut dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**l. Properti investasi**

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, kecuali tanah tidak disusutkan. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi.

Perusahaan telah memilih untuk menggunakan model biaya untuk pengukuran aset properti investasi.

Properti investasi terdiri dari tanah, bangunan dan prasarana yang dikuasai Perusahaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

**m. Aset tetap**

Aset tetap, kecuali hak atas tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan.

Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Apabila terdapat kewajiban untuk membongkar dan memindahkan aset tetap maka beban yang terkait akan ditambahkan ke biaya perolehan aset tetap yang bersangkutan dan kewajiban atas biaya terkait tersebut diakui.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**k. Investments in associates (continued)**

*In this the case, the Company calculates the amount of impairment based on the difference between the recoverable amount of the investment in the associates and its carrying value and recognizes the impairment in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.*

**l. Investment properties**

*Investment properties are stated at cost, including transaction costs, less accumulated depreciation and impairment, except for land which is not depreciated. The carrying amount includes the cost of replacing part of an existing investment property when the fee is occurred, if the recognition criteria are met and excludes the costs of the daily use of an investment property.*

*The Company has chosen to use the cost model for the measurement of investment property assets.*

*Investment properties consist of land, buildings and infrastructure controlled by the Company to earn rents or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or provision of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.*

**m. Fixed assets**

*Fixed assets, except landrights, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met.*

*Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are met. In the case of mandatory dismantling and asset removals, the related costs are added to the cost of the relevant assets and obligations related to the cost are recognized to cover the costs.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**m. Aset tetap (lanjutan)**

**m. Fixed assets (continued)**

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Aset tetap, kecuali hak atas tanah, disusutkan dengan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat masing-masing aset tetap sebagai berikut:

All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred. Depreciation of fixed assets, except for landrights, is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

Golongan Aset	Umur Ekonomi/ Useful Life (Tahun/Years)	Group of Assets
Bangunan (lapangan)	5 - 40	Structure (fields)
Gedung-gedung	20 - 40	Buildings
Alat perhubungan udara	10 - 15	Aviation equipment
Kendaraan	5 & 10	Vehicle
Instalasi	5 - 20	Installation
Peralatan	5 - 15	Equipment

Biaya pengurusan untuk memperpanjang atau memperbaharui hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

The legal cost of landrights to extend or renew the landrights are recognized as intangible assets and amortized over the shorter of the rights' legal life or the land's economic life.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset tetap dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan yang sesuai.

Maintenance and repair costs are recognized as an expense as incurred. Expenditures that extend the useful lives of fixed assets are capitalized and depreciated in accordance with the applicable depreciation rates.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan yang ditentukan berdasarkan basis akrual dan kemajuan fisik pekerjaan serta disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Biaya perolehan termasuk kapitalisasi beban bunga dan laba/rugi selisih kurs, jika ada, atas pinjaman dan biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pembiayaan aset dalam penyelesaian tersebut (Catatan 2o, "Kapitalisasi Biaya Pinjaman"). Akrual sehubungan dengan perolehan aset tetap disajikan sebagai bagian dari akun utang lain-lain.

Construction in progress is stated at cost based on accrual bases and progress on constructions and presented as part of fixed assets. Cost includes capitalized interest charges and gain/losses on foreign exchange, if any, incurred on borrowings and other costs incurred to finance the said asset construction (Note 2o, "Capitalization of Borrowing Costs"). Accrual of acquisition of fixed assets is presented as part of other payables account.

Akumulasi biayanya akan dipindahkan ke dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan ketika aset secara substansial selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan.

The accumulated cost will be reclassified to the relevant fixed assets account when the construction is substantially completed and the constructed asset is ready for its intended use.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**m. Aset tetap (lanjutan)**

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya; biaya perbaikan yang signifikan dikapitalisasi sebagai penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Nilai kini dari perkiraan biaya pembongkaran aset setelah aset digunakan termasuk dalam nilai perolehan aset tersebut jika kriteria pengakuan untuk penetapannya terpenuhi.

Ketika bagian-bagian penting dari aset tetap perlu untuk diganti, Kelompok Usaha mencatat bagian-bagian tersebut sebagai aset individual dengan masa manfaat dan penyusutan yang spesifik.

Aset tetap tidak diakui lagi pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat keekonomisan masa yang akan datang yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap, diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode penghentian pengakuan aset, yang merupakan selisih antara hasil pelepasan bersih dan jumlah tercatat aset.

Nilai sisa, masa manfaat dan metode penyusutan aset tetap ditelaah dan disesuaikan secara prospektif, jika perlu, pada setiap akhir tahun buku.

**n. Aset takberwujud**

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan umur terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi aset dan dievaluasi apabila terdapat indikator adanya penurunan nilai untuk aset takberwujud. Periode dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun tutup buku.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**m. Fixed assets (continued)**

*The cost of normal maintenance and repair work is charged to operations as incurred; the cost of significant improvements or betterments is capitalized as replacements if the recognition criteria are satisfied. The present value of the expected cost for the decommissioning of the asset after its use is included in the cost of the asset if the recognition criteria are met.*

*When significant parts of fixed assets are required to be replaced at intervals, the Group recognizes such parts as individual assets with specific useful lives and depreciation.*

*Fixed asset are derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss on derecognition of the asset is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the period the asset is derecognized, which represents the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset.*

*The residual values, useful lives and methods of depreciation of fixed assets are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of each financial year.*

**n. Intangible assets**

*An intangible asset is measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, the intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of the intangible asset is assessed to be either finite or indefinite. An intangible asset with finite life is amortized over the asset's useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at each financial year end.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**n. Aset takberwujud (lanjutan)**

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat:

- i. dijual; atau
- ii. ketika tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan dari penggunaan atau penjualan aset tersebut.

Aset takberwujud Perusahaan berupa perangkat lunak.

**o. Kapitalisasi biaya pinjaman**

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya pinjaman dapat meliputi beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan yang diakui sesuai dengan PSAK No. 26 (Revisi 2014) dan selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat dimulainya aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

**p. Beban akrual**

Beban akrual diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Beban akrual ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi maka provisi dibatalkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**n. Intangible assets (continued)**

An intangible asset is derecognized when:

- i. on disposed; or
- ii. when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

The Company's intangible assets are in form of software.

**o. Capitalization of borrowing costs**

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of the related asset. Other borrowing costs are recognized as expenses in the period in which they are incurred. Borrowing costs may include interest, finance charges in respect of finance leases recognized in accordance with PSAK No. 26 (Revised 2014) and foreign exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as adjustments to interest costs.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use have started and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use are substantially completed.

**p. Accrued expenses**

Accrued expense is recognized when the Group has a present obligation (legal and constructive), as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Accrued expense are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligations, the provisions are reversed.



**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**q. Pendapatan diterima di muka**

Pendapatan yang diterima di muka adalah penerimaan uang dari pihak lain sehubungan dengan jasa yang akan dilakukan oleh Kelompok Usaha di masa depan tetapi jasa tersebut belum diserahkan kepada pihak tersebut.

**r. Imbalan kerja dan imbalan pasca kerja**

**Imbalan kerja jangka pendek**

Kelompok Usaha mengakui liabilitas imbalan kerja jangka pendek ketika jasa diberikan oleh karyawan dan imbalan atas jasa tersebut akan dibayarkan dalam waktu dua belas bulan setelah jasa tersebut diberikan.

**Imbalan pasca kerja**

Biaya untuk penyediaan manfaat dibawah program pensiun imbalan pasti ditentukan dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti bersih, yang disebut sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari:

- i. Keuntungan atau kerugian aktuarial;
- ii. Imbalan hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga bersih atas liabilitas (aset);
- iii. Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga bersih atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti bersih, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amendemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya.

Kurtailmen terjadi apabila Kelompok Usaha mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program, terminasi atau penghentian program.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**q. Unearned revenues**

*Unearned revenues are cash received from other parties in connection with the services that will be performed by the Group in the future but the services not yet delivered to that parties.*

**r. Employee benefits and post-employment benefits**

**Short-term employee benefits**

*The Group recognizes short-term employee benefits liability when services are rendered and the compensation for such services are to be paid within twelve months after such services are rendered.*

**Post-employment benefits**

*The cost of providing benefits under the defined benefit plan is determined using the projected-unit-credit method.*

*Remeasurement on net deferred benefit liabilities (asset), which recognized as other comprehensive income, consist of:*

- i. Actuarial gain or losses;*
- ii. Return on program aset, is not consists of amount included in liabilitas (asset) net interest;*
- iii. Every changes in asset ceiling, is not consists of amount included in liabilities (asset) net interest.*

*Remeasurement on net defined benefit liabilities (asset) which is recognized as part of other comprehensive income will not be reclassified to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the next period.*

*Past service cost arising from amendment or curtailment programs are recognized as expense in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when incurred.*

*A curtailment occurs when the Group either significantly reduce the number of employees covered by a plan, termination or suspension of the program.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**r. Imbalan kerja dan imbalan pasca kerja  
(lanjutan)**

**Imbalan pasca kerja (lanjutan)**

Perusahaan memiliki program dana pensiun manfaat pasti dan program tunjangan hari tua. Selain itu, Perusahaan memberikan tunjangan kepada pegawai yang telah memenuhi persyaratan ketentuan yaitu tunjangan perumahan, penghargaan pengabdian dan jaminan kesehatan kepada pensiunan.

Pada tanggal 15 November 1999, Perusahaan memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan (No.KEP-39/KM.17/1999) untuk membentuk Lembaga terpisah yang mengelola dana pensiun dalam bentuk Program Dana Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) bernama Dana Pensiun Angkasa Pura I (DPAP I), untuk mengelola atas nama para anggota, semua kekayaan agar dapat memenuhi kewajiban pensiun dari Perusahaan.

Jumlah kontribusi PPMP terdiri dari kontribusi karyawan dan Perusahaan yang masing-masing dihitung sebesar 5% dan 27,64% dari penghasilan dasar pensiun, sedangkan jumlah kontribusi PIIP terdiri dari kontribusi karyawan dan Perusahaan yang masing-masing dihitung sebesar 5% dan maksimal 25% dari paket gaji peserta.

Pada tanggal 6 Mei 2003, penyelenggaraan program tunjangan hari tua dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I (YAKKAP I) berdasarkan Keputusan Bersama Direksi Perum Angkasa Pura I dan Perum Angkasa Pura II No. KEP.305/P.30.7.1/1988 dan KEP.165A/PAP.I/X/1988 tanggal 1 Oktober 1988 jo Perjanjian Kerja Bersama Periode 2003-2005 antara PT Angkasa Pura I dengan Serikat Pekerja Angkasa Pura I No.SP.06/HK.10/2003-DU, No.SP.AP.I.01/PKB/2003.

Program THT menyediakan manfaat pembayaran sekaligus dengan ketentuan nilai iuran adalah sebesar 5% (beban pegawai Perusahaan), 3% (beban pegawai diperbantukan), 1% (beban pegawai ditugaskan) dari nilai Penghasilan Dasar Tunjangan Hari Tua (PhDTHT) dan iuran Perusahaan yang telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibayarkan secara sekaligus pada awal tahun berjalan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**r. Employee benefits and post-employment  
benefits (continued)**

**Post-employment benefits (continued)**

The Company has pension defined benefit funds program and annuities program. Moreover, the Company provides benefits to employees who have fulfilled the requirements of the provisions, which are housing allowance, loyalty reward and health insurance to pensioners.

On November 15, 1999, the Company obtained approval from the Minister of Finance (No.KEP-39/KM.17/1999) to establish a separate Institution that manages pension funds in the form of a Defined Benefit Pension Plan (PPMP) and a Definite Contribution Pension Program (Rencana Pensiun Iuran Pasti PPIP) named Dana Angkasa Pura I (DPAP I), to manage on behalf of the members, all of the wealth in order to fulfill the obligation to retire from the Company.

The amount of contribution of PPMP consists of employees and the Company's contributions which are calculated as 5% and 27.64%, respectively, from the basic pension income, while the amount of contribution of PPIP consists of employees and the Company's contributions, which are calculated at 5% and a maximum of 25% of the participant's salary package.

On May 6, 2003, the provision of retirement benefit program is managed by Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I (YAKKAP I) based on Joint Decree of the Directors of Perum Angkasa Pura I and Perum Angkasa Pura II Number KEP.305/KP.30.7.1/1988 and KEP.165A/PAP.I/X/1988 dated October 1, 1988 jo Joint Working Agreement for the period 2003-2005 between PT Angkasa Pura I and Labor Union of PT Angkasa Pura I. SP.06/HK.10/2003-DU, No.SP.AP.I.01/PKB/2003.

The THT program provides payment benefits at the same time with the terms of the contribution fee of 5% (Company employee expense), 3% (employee assignment), 1% (assigned charges) of the Basic Income Retirement Fees (PhDTHT) and the Company's contributions that have been approved by the General Meeting of Shareholders (GMS) which is fully paid at the beginning of the current year.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**r. Imbalan kerja dan imbalan pasca kerja  
(lanjutan)**

**Imbalan pasca kerja (lanjutan)**

Perusahaan juga memberikan imbalan pasca kerja lainnya, seperti tanda penghargaan dan cuti jangka panjang. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun.

Kelompok Usaha harus menyediakan imbalan pensiun dengan jumlah minimal sesuai dengan Undang-Undang ("UU") Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), mana yang lebih tinggi. Karena UU Ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau PKB adalah program pensiun imbalan pasti.

Liabilitas imbalan pensiun merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*.

Nilai kini liabilitas manfaat pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah jangka panjang pada akhir periode pelaporan dalam mata uang rupiah sesuai dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan liabilitas manfaat pensiun yang bersangkutan.

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja lainnya, seperti tanda penghargaan dan cuti jangka panjang.

Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Santunan kematian diberikan bila pegawai dan anggota keluarga tertentu meninggal dunia. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada peraturan Perusahaan. Sedangkan imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**r. Employee benefits and post-employment  
benefits (continued)**

**Post-employment benefits (continued)**

The Company also provides other post-employment benefits, such as rewards and long-term leave. Rewards in the form of award money are given when employees work until they reach retirement age.

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with Labour Law No. 13/2003 and the Group's Collective Labour Agreement ("CLA"), whichever is higher. Since the Labour Law and the CLA set the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Labour Law or the CLA represent defined benefit plans.

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at end reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated by an independent actuary using the *projected-unit-credit* method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the yield at end of the reporting period of long-term government bonds denominated in rupiah in which the benefits will be paid and that have terms to maturity similar to the related pension obligation.

The Company also provides other post-employment benefits, such as long service reward and long service leave.

The long service reward is given when the employees reach their retirement age. Death allowance is paid when the employee or the qualified family members pass away. Benefit given is based on the Company's regulation. The separation reward benefit is paid to employees in the event of voluntary resignation, subject to a minimum number of years of service. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**r. Imbalan kerja dan imbalan pasca kerja  
(lanjutan)**

**Imbalan pasca kerja (lanjutan)**

Perusahaan menyediakan imbalan kesehatan pasca kerja untuk pensiunan. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja sampai usia pensiun dan memenuhi masa kerja minimum tertentu.

Prakiraan biaya imbalan ini diakru sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metode akuntansi yang sama, namun disederhanakan, dengan metode yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti. Kewajiban ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen yang memenuhi kualifikasi.

**s. Sewa**

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa, atau perjanjian yang mengandung sewa, didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Suatu sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan dasar garis lurus (*straight-line method*) selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**r. Employee benefits and post-employment  
benefits (continued)**

**Post-employment benefits (continued)**

*The Company provides post-employment medical benefits to their retirees. The entitlement to these benefits is given if employee has worked until retirement age and the completion of a minimum service period.*

*The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar but simplified to that for defined benefit pension plans. These obligations are valued annually by qualified independent actuaries.*

**s. Leases**

*The determination of whether an arrangement is, or contains a lease is based on the substance of the arrangement at inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset. Lease that transfers substantially to the lessee all the risks and rewards incidental to ownership of the leased item is classified as finance lease.*

*Leases which do not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line method over the lease term.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**t. Perpajakan**

Pajak final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK No. 46 yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46.

Perbedaan antara nilai tercatat dari aset revaluasi dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan temporer sehingga menimbulkan liabilitas atau aset pajak tangguhan, kecuali untuk aset tertentu seperti tanah yang pada saat realisasinya dikenakan pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi.

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kelompok Usaha juga menyajikan bunga atau denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini".

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**t. Taxation**

Final tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Referring to revised PSAK No. 46 as mentioned above, final tax is no longer governed by PSAK No. 46.

The difference between the carrying amount of a revalued asset and its tax base is a temporary difference and gives rise to a deferred tax liability or asset, except for certain asset such as land, which upon realization is taxed with final tax on gross value of transaction.

Current tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Tax Expense - Current" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. The Group also presented interest or penalty, if any, as part of "Current Tax Expense".

Amendments to tax liabilities are recorded when a tax assessment letter is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**t. Perpajakan (lanjutan)**

Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Kelompok Usaha mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**t. Taxation (continued)**

Deferred tax

*Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax basis at each reporting date.*

*Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.*

*The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Group reassesses unrecognized deferred tax assets. The Group recognizes previously unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.*

*Deferred tax is calculated using regulated tax rates or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.*

*Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statements of financial position, except if they are for different legal entities, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**u. Pendapatan dan beban**

Pendapatan diakui jika besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke Kelompok Usaha dan manfaat ini dapat diukur dengan andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar penerimaan diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan cadangan lain yang serupa. Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

- Pendapatan jasa aeronautika diakui pada saat jasa diserahkan kepada pelanggan.
- Pendapatan jasa non aeronautika atas sewa tanah dan bangunan diakui sesuai dengan periode konsesi yang sudah berjalan pada tahun yang bersangkutan.
- Pendapatan atas penggunaan fasilitas peralatan Kelompok Usaha oleh pelanggan dan pendapatan jasa non aeronautika lainnya diakui pada saat fasilitas tersebut digunakan dan pada saat jasa diserahkan.
- Pendapatan atas sewa tanah dan bangunan yang diterima di muka atas periode yang belum berjalan dicatat sebagai pendapatan yang diterima di muka.
- Pendapatan lainnya diakui atas dasar akrual.
- Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsional berdasarkan waktu, pokok dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban diakui pada saat terjadinya.

**v. Penurunan nilai aset non-keuangan**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka Kelompok Usaha menentukan nilai terpulihkan dari Unit Penghasil Kas (UPK) yang mana aset tercakup (aset dari UPK).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**u. Revenue and expense**

*Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and other similar allowances. The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:*

- *Aeronautical services revenues are recognized when services are rendered to customers.*
- *Non-aeronautical services revenues for land and buildings rental is recognized in accordance with the concession period which has been incurred during the year.*
- *Revenue for the use of the Group's facilities and equipment by customers and other non-aeronautical services revenues are recognized when the facility is used and services are rendered.*
- *Land and building rental income received in advance for a period that has not been incurred recorded as unearned revenue.*
- *Other income is recognized on an accrual basis.*
- *Interest income is recognized on a time proportion basis, the principal and the prevailing interest rate.*

*Expenses are recognized as incurred.*

**v. Impairment of non-financial assets**

*The Group assesses at the end of each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If such indication exists, recoverable amount is estimated for the individual asset. If it is not possible to estimate the recoverable amount of the individual asset, the Group determines the recoverable amount of the Cash-Generating Unit (CGU) to which the asset belongs (the asset's CGU).*



**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**v. Penurunan nilai aset non-keuangan  
(lanjutan)**

Jumlah terpulihkan dari suatu aset (baik aset individual maupun UPK) adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai "rugi penurunan nilai".

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga transaksi pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Kelompok Usaha menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk suatu aset mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi tersebut ada, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk suatu aset dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**v. Impairment of non-financial assets  
(continued)**

*An asset's (either individual asset or CGU) recoverable amount is the higher of the asset's fair value less costs to sell and its value in use. Where the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment loss are recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as "impairment loss".*

*In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.*

*In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the asset. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.*

*Impairment loss, if any, are recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.*

*An assessment is made at the end of each reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated.*

*A previously recognized impairment loss for an asset is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**v. Penurunan nilai aset non-keuangan  
(lanjutan)**

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, bersih setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut diakui sebagai laba rugi, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

**w. Pelaporan segmen**

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas: (1) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban; (2) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan (3) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Kelompok Usaha mengidentifikasi segmen operasi berdasarkan pelaporan internal yang direviu secara reguler oleh pengambil keputusan operasional dalam mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi Kelompok Usaha.

Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen terdapat dalam Catatan 41, termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen.

Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perusahaan dan Entitas Anak dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

**x. Laba per saham**

Laba per saham dihitung dengan membagi total laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa seri B yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**v. Impairment of non-financial assets  
(continued)**

*The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceeds the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods. Reversal of an impairment loss is recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. After such reversal is recognized in profit or loss, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.*

**w. Segment reporting**

*An operating segment is a component of an entity: (1) which engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses; (2) whose operating results are regularly reviewed by the entity's operating decision maker to decide about resources to be allocated to the segment and value its performance; and (3) for which discrete financial information is available.*

*The Group identifies its operating segments on the basis of internal reports that are regularly reviewed by the Group's chief operating decision-maker in order to allocate resources to the segment and assess its performance.*

*Additional disclosures on each of these segments are shown in Note 41, including the factors used to identify the reported segments and the measurement basis of segment information.*

*Segments are determined before intra-group balances and intra-group transactions are eliminated as part of consolidation process.*

**x. Earnings per share**

*Earnings per share is calculated by dividing the total profit for the year attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares seri B outstanding during the year.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**x. Laba per saham (lanjutan)**

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi total laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode pelaporan, yang disesuaikan untuk mengasumsikan konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif.

**y. Pengukuran nilai wajar**

Kelompok Usaha telah menerapkan PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar". PSAK ini, antara lain, memberikan panduan tentang bagaimana pengukuran nilai wajar ketika nilai wajar disyaratkan atau diizinkan. Penerapan PSAK ini tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian. Kelompok Usaha mengukur instrumen keuangan pada nilai wajar setiap tanggal pelaporan. Pengungkapan nilai wajar instrumen keuangan disajikan dalam Catatan 46.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar berdasarkan asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di:

- Pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Kelompok Usaha harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan oleh pelaku pasar pada saat melakukan penilaian aset atau liabilitas, dengan asumsi bahwa pelaku pasar akan bertindak atas kepentingan ekonomi terbaik mereka.

Kelompok Usaha menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan kondisi Perusahaan dan dimana terdapat ketersediaan data yang cukup untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan data masukan yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan data masukan yang tidak dapat diobservasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**x. Earnings per share (continued)**

*Diluted earning per share is calculated by dividing profit for the year attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the reporting period, adjusted to assume conversion of all potential dilutive ordinary shares.*

**y. Fair value measurement**

*The Group has adopted PSAK No. 68, "Fair Value Measurement". This PSAK, among others, provides guidance on how to measure fair value when fair value is required or permitted. The adoption of this PSAK has no significant impact on the consolidated financial statements. The Group measures financial instruments at fair value at each reporting date. Fair value disclosure for financial instruments are disclosed in Note 46.*

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurements date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction on selling assets or transfer the liabilities takes place whenever:*

- *In the principal market for the assets or liabilities, or*
- *In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the assets or liabilities.*

*The principal or the most advantageous market must be accessible by the Group.*

*The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liabilities, assuming that market participants act in their economic best interest.*

*The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**y. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)**

**y. Fair value measurement (continued)**

Semua aset dan liabilitas yang diukur dengan nilai wajar atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hirarki nilai wajar berdasarkan tingkat masukan paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Tingkat 1 - Harga kuotasian (tidak disesuaikan) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2 - Teknik-teknik lain atas semua input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang tercatat dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Tingkat 3 - Teknik yang menggunakan input yang memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai wajar yang tercatat yang tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

- Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan dalam basis yang berulang, Kelompok Usaha menentukan apakah transfer telah terjadi antara tingkat dalam hirarki dengan menilai ulang kategori (berdasarkan tingkat masukan paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada setiap akhir periode pelaporan.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

**z. Kombinasi bisnis**

**z. Business combinations**

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari suatu akuisisi diukur dari nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan dicatat dalam "Beban umum dan administrasi".

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Transaction costs incurred are directly expensed and included in "General and administrative expenses".

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**z. Kombinasi bisnis (lanjutan)**

Ketika Kelompok Usaha melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Kelompok Usaha mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pemisahan atas derivatif yang melekat pada kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepemilikan atas ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang terjadi dalam laba rugi.

Imbalan kontinjensi yang akan dibayarkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar atas imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laporan laba rugi atau sebagai pendapatan komprehensif lain sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2015). Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensinya tidak diukur kembali sampai penyelesaian terakhir dalam ekuitas.

Pada tanggal akuisisi, pertama kali *goodwill* diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dibayarkan dan jumlah yang diakui untuk KNP dibandingkan dengan jumlah dari aset teridentifikasi dan liabilitas yang diperoleh. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto Entitas Anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai, jika ada. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis dialokasikan sejak tanggal akuisisi kepada setiap unit penghasil kas ("UPK") dari Kelompok Usaha yang diharapkan akan memperoleh manfaat dari kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang mengakuisisi dialokasikan kepada UPK tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**z. Business combinations (continued)**

*When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date. This includes the separation of embedded derivatives in host contracts by the acquiree.*

*If the business combination is achieved in stages, the fair value acquisition date of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and any resulting gain or loss is recognized in profit or loss.*

*Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration which is deemed to be an asset or liability will be recognized in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2015) either in profit or loss or as other comprehensive income. If the contingent consideration is classified as equity, it should not be remeasured until it is finally settled within equity.*

*At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration result is lower than the fair value of the net assets of the Subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.*

*After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is allocated from the acquisition date to each of the Group's cash-generating units ("CGU") that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquirer are assigned to those CGUs.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**z. Kombinasi bisnis (lanjutan)**

**z. Business combinations (continued)**

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu dalam UPK tersebut dilepas, maka *goodwill* yang terasosiasi dengan operasi yang dilepas tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan operasi. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dilepas dan porsi UPK yang ditahan.

Where *goodwill* forms part of a CGU and part of the operation within that CGU is disposed of, the *goodwill* associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. *Goodwill* disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

Sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 22 (Revisi 2015), apabila proses akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan pada saat kombinasi terjadi, Kelompok Usaha melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangan konsolidasian. Selama periode pengukuran, Kelompok Usaha menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui telah berdampak pada pengukuran jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

In accordance with the provision of PSAK No. 22 (Revised 2015), if the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group shall report in its consolidated financial statements provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. During the measurement period, the Group shall retrospectively adjust the provisional amounts recognized at the acquisition date to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date and, if known, would have affected the measurement of the amounts recognized as of that date.

**aa. Peristiwa setelah periode pelaporan**

**aa. Events after the reporting period**

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan mengenai posisi keuangan Kelompok Usaha pada tanggal pelaporan ("peristiwa penyesuaian"), jika ada, dicerminkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian jika material.

Post period-end events that provide additional information about the Group's financial position at the reporting date ("adjusting events"), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post period-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI  
AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,  
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

The preparation of consolidated financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make judgments of estimations and assumptions that affect the amounts reported on income, expenses, assets and liabilities and disclosures of contingent liabilities at the reporting date. The uncertainty of assumption and estimation may cause adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next reporting period

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI  
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

**Pertimbangan**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, serta pengungkapan laporan keuangan konsolidasi, pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian asumsi dan estimasi ini dapat menyebabkan hasil yang memerlukan penyesuaian material atas nilai tercatat aset atau liabilitas yang berdampak pada masa mendatang.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari setiap entitas dalam Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan biaya masing-masing entitas. Penentuan mata uang fungsional bisa membutuhkan pertimbangan karena berbagai kompleksitas, antara lain, suatu entitas dapat bertransaksi dalam lebih dari satu mata uang dalam aktivitas usahanya sehari-hari.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti diungkapkan pada Catatan 2h.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,  
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Management believes that the following represent a summary of the significant judgments, estimates and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements.

**Judgments**

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures to the consolidate financial statements, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the assets or liabilities affected in future years.

Determination of functional currency

The functional currency of each entity in the Group is the currency of the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that influence the revenues and costs of each of the respective entities. The determination of functional currency may require judgment due to various complexity, among others, the entity may transact in more than one currency in its daily business activities.

Classification of financial assets and liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by complying the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2h.



**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI  
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha

Kelompok Usaha mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha.

Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha. Jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp135.147.712 dan Rp136.836.694 (Catatan 6).

**Estimasi dan asumsi**

Asumsi kunci mengenai masa depan dan sumber kunci lainnya untuk estimasi ketidakpastian pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya dijabarkan sebagai berikut:

Estimasi masa manfaat atas aset tetap

Kelompok Usaha mengestimasi masa manfaat dari aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dapat didukung dengan rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Kelompok Usaha secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara.

Estimasi masa manfaat direviu paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,  
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

**Judgments (continued)**

Allowance for impairment loss on trade receivables

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, The Group uses judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect.

Specific provisions are re-evaluated and adjusted if additional information received affects the amount of allowance for impairment losses on accounts receivable. The amount of impairment loss as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp135,147,712 and Rp136,836,694, respectively (Note 6).

**Estimates and assumptions**

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Estimated useful lives of fixed assets

The Group estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilization as anchored on business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behavior. The estimation of the useful lives of fixed asset is based on the Group's collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

The estimated useful lives are reviewed at least at each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI  
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Estimasi dan asumsi (lanjutan)**

Liabilitas imbalan kerja karyawan

Beban dari program pensiun manfaat pasti dan nilai kini dari kewajiban pensiun ditentukan oleh penilaian aktuaris dengan menggunakan beberapa asumsi diantaranya tingkat diskonto, tingkat pengembalian dana yang diharapkan, tingkat kenaikan kompensasi dan tingkat kematian, kewajiban manfaat pasti sangat sensitif terhadap perubahan asumsi. Nilai tercatat liabilitas telah diungkapkan dalam Catatan 24.

Ketidakpastian kewajiban perpajakan

Dalam situasi tertentu, Kelompok Usaha tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari pendapatan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Kelompok Usaha menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi". Pajak penghasilan telah diungkapkan dalam Catatan 11.

Realisasi dari aset pajak tangguhan

Kelompok Usaha melakukan revaluasi atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai sebesar kemungkinan aset tersebut tidak dapat direalisasikan, dimana penghasilan kena pajak yang tersedia memungkinkan untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

Penelaahan Kelompok Usaha atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya. Taksiran ini berdasarkan hasil pencapaian Kelompok Usaha di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan. Tetapi tidak terdapat kepastian bahwa Kelompok Usaha dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

Aset (liabilitas) pajak tangguhan diungkapkan dalam Catatan 11f.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,  
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

**Estimates and assumptions (continued)**

Employee benefits liabilities

The cost of defined benefit plan and present value of the pension obligation are determined based on actuarial valuation which makes use of various assumptions such as discount rates, expected rates of return on plan assets, rates of compensation increases and mortality rates. The defined benefit obligation is highly sensitive to changes in the assumptions. The carrying amount of the obligation is disclosed in Note 24.

Uncertain tax exposure

Income taxes In certain circumstances, the Group may not be able to determine the exact amount of its current or future tax liabilities due to ongoing investigations by, or negotiations with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Group applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset". Income tax is disclosed in Note 11.

Realizability of deferred tax assets

The Group reviews the carrying amounts of deferred tax assets at the end of each reporting period and reduces these to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

The Group's assessment on the recognition of deferred tax assets on deductible temporary differences is based on the level and timing of forecasted taxable income of the subsequent reporting periods. This forecast is based on the Group's past results and future expectations on revenues and expenses as well as future tax planning strategies. However, there is no assurance that the Group will generate sufficient taxable income to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Deferred tax assets (liabilities) are disclosed in Note 11f.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**4. KAS DAN SETARA KAS**

**4. CASH AND CASH EQUIVALENTS**

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Kas	1.598.780	1.885.406	Cash
Bank	987.863.812	879.996.194	Bank
Deposito	4.521.441.000	2.267.232.200	Time deposit
<b>Total</b>	<b>5.510.903.592</b>	<b>3.149.113.800</b>	<b>Total</b>
<b>Kas</b>			<b>Cash</b>
Rupiah	1.380.498	1.645.800	Rupiah
Dolar AS	218.224	239.549	US Dollar
Dolar Singapura	58	57	Singapore Dollar
<b>Total</b>	<b>1.598.780</b>	<b>1.885.406</b>	<b>Total</b>
<b>Bank</b>			<b>Bank</b>
<b>Rupiah</b>			<b>Rupiah</b>
<b>Pihak Berelasi</b>			<b>Related Parties</b>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	304.344.693	76.628.371	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	215.099.621	426.847.228	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	145.406.833	187.592.625	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	121.783.958	77.286.320	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri Tbk	49.366.213	23.584.667	PT Bank Syariah Mandiri Tbk
PT Bank BRI Syariah Tbk	2.183.409	1.518.123	PT Bank BRI Syariah Tbk
<b>Subtotal Pihak Berelasi</b>	<b>838.184.727</b>	<b>793.457.334</b>	<b>Subtotal Related Parties</b>
<b>Pihak Ketiga</b>			<b>Third Parties</b>
PT Bank Bukopin Tbk	49.610.485	29.528.978	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	21.042.288	21.273.251	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	6.181.996	1.222.216	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3.908.279	5.560.302	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	2.038.231	1.493.691	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	536.033	-	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
PT Bank Mega Tbk	444.874	115.823	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Permata Tbk	390.778	379.888	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk	368.613	112.249	PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	173.075	4.776	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
Bank Sinarmas Syariah	31.654	31.806	Bank Sinarmas Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	930	-	PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
PT Bank Syariah Victoria	404	1.140	PT Bank Syariah Victoria
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	-	521.551	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
<b>Subtotal Pihak Ketiga</b>	<b>84.727.640</b>	<b>60.245.671</b>	<b>Subtotal Third Parties</b>
<b>Total Bank Rupiah</b>	<b>922.912.367</b>	<b>853.703.005</b>	<b>Total Bank Rupiah</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)**

**4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)**

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
<b>Bank</b>			<b>Bank</b>
<b>Dolar AS</b>			<b>US Dollar</b>
<u>Pihak Berelasi</u>			<u>Related Parties</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	47.580.665	4.774.652	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.832.538	15.250.725	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	772.883	808.782	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
<b>Subtotal Pihak Berelasi</b>	<b>57.186.086</b>	<b>20.834.159</b>	<b>Subtotal Related Parties</b>
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	4.480.799	2.048.001	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Citibank N.A.	2.972.804	3.097.427	Citibank N.A.
PT Bank Central Asia Tbk	308.146	308.996	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk	3.610	4.606	PT Bank Permata Tbk
<b>Subtotal Pihak Ketiga</b>	<b>7.765.359</b>	<b>5.459.030</b>	<b>Subtotal Third Parties</b>
<b>Total Bank Dolar AS</b>	<b>64.951.445</b>	<b>26.293.189</b>	<b>Total Bank US Dollar</b>
<b>Total Bank</b>	<b>987.863.812</b>	<b>879.996.194</b>	<b>Total Bank</b>
<b>Deposito</b>			<b>Time Deposit</b>
<b>Rupiah</b>			<b>Rupiahs</b>
<u>Pihak Berelasi</u>			<u>Related Parties</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	684.000.000	99.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	305.600.000	18.600.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	75.000.000	75.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara Syariah	41.900.000	21.900.000	PT Bank Tabungan Negara Syariah
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (Persero) Tbk	15.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	12.500.000	184.500.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia Syariah (Persero) Tbk	-	110.000.000	PT Bank Negara Indonesia Syariah (Persero) Tbk
<b>Subtotal Pihak Berelasi</b>	<b>1.134.000.000</b>	<b>509.000.000</b>	<b>Subtotal Related Parties</b>
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
PT Bank Bukopin Tbk	1.912.100.000	735.100.000	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk	900.000.000	139.300.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk
PT Bank Mega Tbk	5.400.000	5.400.000	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	-	43.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	-	21.600.000	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
<b>Subtotal Pihak Ketiga</b>	<b>2.817.500.000</b>	<b>944.400.000</b>	<b>Subtotal Third Parties</b>
<b>Total Deposito Rupiah</b>	<b>3.951.500.000</b>	<b>1.453.400.000</b>	<b>Total Time Deposits Rupiah</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)**

**4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)**

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
<b>Dolar AS</b>			<b>US Dollar</b>
<b>Pihak Berelasi</b>			<b>Related Parties</b>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	208.515.000	115.848.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	111.208.000	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	90.356.500	176.668.200	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	43.443.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
<b>Subtotal Pihak Berelasi</b>	<b>410.079.500</b>	<b>335.959.200</b>	<b>Subtotal Related Parties</b>
<b>Dolar AS</b>			<b>US Dollar</b>
<b>Pihak Ketiga</b>			<b>Third Parties</b>
PT Bank Bukopin Tbk	159.861.500	152.050.500	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Mega Tbk	-	166.531.500	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	-	159.291.000	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
<b>Subtotal Pihak Ketiga</b>	<b>159.861.500</b>	<b>477.873.000</b>	<b>Subtotal Third Parties</b>
<b>Total Deposito Dolar AS</b>	<b>569.941.000</b>	<b>813.832.200</b>	<b>Total Time Deposits US Dollar</b>
<b>Total Deposito</b>	<b>4.521.441.000</b>	<b>2.267.232.200</b>	<b>Total Time Deposits</b>
<b>Total Kas dan Setara Kas</b>	<b>5.510.903.592</b>	<b>3.149.113.800</b>	<b>Total Cash and Cash Equivalents</b>
<b>Rupiah</b>			<b>Rupiah</b>
Deposito Berjangka	5,50% - 8,00%	7,40% - 9,00%	Time Deposit
Deposito <i>On Call</i>	7,25% - 7,60%	5,50% - 9,25%	Deposit On Call
<b>Dolar AS</b>			<b>US Dollar</b>
Deposito Berjangka	2,50% - 3,20%	2,60% - 3,75%	Time Deposit

**5. INVESTASI JANGKA PENDEK**

**5. SHORT-TERM INVESTMENTS**

**a. Investasi jangka pendek terdiri dari:**

**a. Short-term investments consist of:**

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Reksadana	378.232.220	458.950.737	Mutual fund
Deposito berjangka > 3 bulan	264.839.700	-	Time Deposit > 3 months
Obligasi - tersedia untuk dijual	22.790.392	19.156.044	Bonds - available for sale
<b>Total</b>	<b>665.862.312</b>	<b>478.106.781</b>	<b>Total</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**5. INVESTASI JANGKA PENDEK (lanjutan)**

**a. Investasi jangka pendek terdiri dari:  
(lanjutan)**

**1) Deposito berjangka lebih dari 3 bulan  
sampai dengan 1 tahun**

	31 Desember/December 31, 2019	
	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value
<b>Rupiah</b>		
<u>Pihak Ketiga</u>		
PT Bank Bukopin	105.000.000	105.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	25.000.000	25.000.000
<b>Sub-total Rupiah</b>	<b>130.000.000</b>	<b>130.000.000</b>
<b>Dolar AS</b>		
<u>Pihak Berelasi</u>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	134.839.700	134.839.700
<b>Sub-total Dolar AS</b>	<b>134.839.700</b>	<b>134.839.700</b>
<b>Total Deposito Berjangka</b>	<b>264.839.700</b>	<b>264.839.700</b>

**5. SHORT-TERM INVESTMENTS (continued)**

**a. Short-term investments consist of:  
(continued)**

**1) Time Deposits above 3 months up to 1  
year**

	31 Desember/December 31, 2018	
	Nilai Nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value
<b>Rupiah</b>		
<u>Third Parties</u>		
PT Bank Bukopin	-	-
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	-	-
<b>Subtotal Rupiah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>US Dollar</b>		
<u>Related Parties</u>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-
<b>Subtotal US Dollar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Time Deposits</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**2) Obligasi - tersedia untuk dijual**

	31 Desember/December 31, 2019	
	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value
<b>Rupiah</b>		
<u>Pihak Berelasi</u>		
ORI (IDR) 7%, 2030, AFS	5.000.000	4.925.000
TINS (IDR) 8,5%, 2022, AFS	4.000.000	3.990.400
<b>Sub-total Rupiah</b>	<b>9.000.000</b>	<b>8.915.400</b>
<b>Dolar AS</b>		
<u>Pihak Berelasi</u>		
PLN (USD) 5,5%, 2021, AFS	9.670.000	13.874.992
<b>Sub-total Dolar AS</b>	<b>9.670.000</b>	<b>13.874.992</b>
<b>Total Obligasi</b>	<b>18.670.000</b>	<b>22.790.392</b>

**2) Bonds - available for sale**

	31 Desember/December 31, 2018	
	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value
<b>Rupiah</b>		
<u>Related Parties</u>		
ORI (IDR) 7%, 2030, AFS	-	-
TINS (IDR) 8,5%, 2022, AFS	-	-
<b>Subtotal Rupiah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>US Dollar</b>		
<u>Related Parties</u>		
PLN (USD) 5,5%, 2021, AFS	9.670.000	19.156.044
<b>Subtotal US Dollar</b>	<b>9.670.000</b>	<b>19.156.044</b>
<b>Bonds total</b>	<b>9.670.000</b>	<b>19.156.044</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**5. INVESTASI JANGKA PENDEK (lanjutan)**

**a. Investasi jangka pendek terdiri dari:  
(lanjutan)**

**3) Reksadana - tersedia untuk dijual**

	31 Desember/December 31, 2019		31 Desember/December 31, 2018	
	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai tercatat/ Carrying Value	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai tercatat/ Carrying Value
<b>Rupiah</b>				
<b>Pihak Ketiga</b>				
Danamas Stabil	26.000.000	45.794.966	26.000.000	42.683.577
RDT Simas BUMN Fund	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
RDT Panin 7	20.000.000	30.000.000	20.000.000	30.000.000
Trim Kapital Plus	20.000.000	28.272.134	20.000.000	28.849.896
SAM Indonesian Equity Fund	30.000.000	28.058.839	30.000.000	27.143.809
Panin Dana Maksima	19.975.062	27.503.050	19.975.062	27.327.508
Panin Dana Bersama Plus	20.000.000	25.155.757	20.000.000	24.770.159
RDT Panin 2	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Simas Satu	10.005.130	15.425.655	10.005.130	14.999.734
Panin Dana Unggulan	10.000.000	15.200.859	10.000.000	14.688.685
Panin Dana Prima	10.000.000	14.968.060	10.000.000	15.342.709
Syailendra Equity	10.000.000	14.299.629	10.000.000	14.781.699
RDT Simas Cemerlang 8	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
RDT Panin 12	10.000.000	10.000.000	-	-
HPAM Flexi Plus	10.000.000	9.385.927	10.000.000	8.175.506
Panin Infrastruktur	10.000.000	9.327.455	10.000.000	9.637.032
RDT Simas Gemilang 11	-	-	30.000.000	30.000.000
RDT Simas Cemerlang 2	-	-	15.000.000	15.000.000
RDT Simas Gemilang 14	-	-	10.000.000	10.000.000
Lain-lain	-	-	-	138.851
<b>Sub-total Rupiah</b>	<b>275.980.192</b>	<b>343.392.331</b>	<b>320.980.192</b>	<b>383.539.165</b>
<b>Dalam mata uang asing:</b>				
<b>Pihak Berelasi</b>				
Danareksa Melati Premium	-	-	43.212.000	42.874.354
<b>Pihak Ketiga:</b>				
Panin Dana Infrastruktur	28.808.000	34.839.889	28.808.000	32.537.218
<b>Sub-total Dolar AS</b>	<b>28.808.000</b>	<b>34.839.889</b>	<b>72.020.000</b>	<b>75.411.572</b>
<b>Total Reksadana</b>	<b>304.788.192</b>	<b>378.232.220</b>	<b>393.000.192</b>	<b>458.950.737</b>

<b>Rupiah</b>
<b>Third Parties</b>
Danamas Stabil
RDT Simas BUMN Fund
RDT Panin 7
Trim Kapital Plus
SAM Indonesian Equity Fund
Panin Dana Maksima
Panin Dana Bersama Plus
RDT Panin 2
Simas Satu
Panin Dana Unggulan
Panin Dana Prima
Syailendra Equity
RDT Simas Cemerlang 8
RDT Panin 12
HPAM Flexi Plus
Panin Infrastruktur
RDT Simas Gemilang 11
RDT Simas Cemerlang 2
RDT Simas Gemilang 14
Others
<b>Subtotal Rupiah</b>
<b>In foreign currencies:</b>
<b>Related Parties</b>
Danareksa Melati Premium
<b>Third Parties:</b>
Panin Dana Infrastruktur
<b>Subtotal US Dollar</b>
<b>Total Mutual fund</b>

**b. Berdasarkan jatuh tempo**

**b. Based on maturity**

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Kurang dari 1 tahun	643.071.921	458.950.737	Less than 1 year
1 - 5 tahun	22.790.391	19.156.044	1 - 5 years
<b>Total</b>	<b>665.862.312</b>	<b>478.106.781</b>	<b>Total</b>

**c. Tingkat suku bunga**

**c. Interest rate**

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
<b>Rupiah:</b>			<b>Rupiah:</b>
Deposito	7,30% - 8,75%	7,20%-8,75%	Deposits
Obligasi	7,00% - 8,50%	-	Bonds
<b>Dollar AS:</b>			<b>US Dollar:</b>
Obligasi	2,60% - 3,60%	2,60%-3,60%	Bonds



**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**5. INVESTASI JANGKA PENDEK (lanjutan)**

**5. SHORT-TERM INVESTMENTS (continued)**

**d. Keuntungan yang belum direalisasi dari aset keuangan yang tersedia untuk dijual**

**d. Unrealised gains from financial assets available for sale**

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Nilai wajar pada awal tahun	478.106.781	377.777.808	Fair value at beginning
Penambahan nilai investasi	33.319.096	100.000.000	Additional investments
Pengurangan nilai investasi	(88.217.130)	(30.010.000)	Disposal investments
Tersedia untuk dijual	423.208.747	447.767.808	Available for sale
Nilai wajar pada akhir periode	401.022.612	478.106.781	Fair value at year end
Diakui sebagai laba (rugi) tahun berjalan	22.186.135	(11.182.929)	Recognized as profit (loss) for the year
<b>Keuntungan (kerugian) belum direalisasi yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain</b>	<b>12.293.462</b>	<b>(2.769.906)</b>	<b>Unrealized gain (loss) are recognized as other comprehensive income</b>

Nilai wajar seluruh aset keuangan tersedia untuk dijual berdasarkan harga penawaran yang berlaku dalam pasar yang aktif dan input selain harga pasar yang dapat diobservasi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai metode dan asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar pada Catatan 2y.

The fair value of all available-for-sale financial assets is based on the current bid price in active markets and observable inputs other than quoted prices. For further information about the methods used and assumptions applied in determining fair value in Note 2y.

**6. PIUTANG USAHA**

**6. TRADE RECEIVABLES**

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut:

The details of trade receivables are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
<b>Pihak Berelasi</b>			<b>Related Parties</b>
PT Merpati Nusantara Airlines	50.889.126	51.115.744	PT Merpati Nusantara Airlines
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	43.519.554	31.330.940	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Aerofood Indonesia	31.852.138	-	PT Aerofood Indonesia
PT Telekomunikasi Seluler	10.564.798	-	PT Telekomunikasi Seluler
PT Citilink Indonesia	8.882.683	-	PT Citilink Indonesia
PT Pertamina (Persero)	8.802.387	24.748.821	PT Pertamina (Persero)
PT Gapura Angkasa	8.271.374	6.926.812	PT Gapura Angkasa
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6.347.132	8.230.036	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.528.954	6.641.851	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.179.914	1.839.957	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Propernas Griya Utama Kokapura	2.035.474	-	PT Propernas Griya Utama Kokapura
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	1.616.000	-	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Instansi Pemerintah	1.498.456	2.345.135	Government Institution
PT Nindya Karya (Persero)	1.232.000	-	PT Nindya Karya (Persero)
Perum LPPNPI	999.634	901.910	Perum LPPNPI
Lain-lain	8.577.492	5.868.814	Others
<b>Sub-total pihak berelasi</b>	<b>191.573.715</b>	<b>143.299.046</b>	<b>Subtotal related parties</b>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(53.120.595)	(52.965.004)	Allowance for impairment loss
<b>Total pihak berelasi</b>	<b>138.453.120</b>	<b>90.334.042</b>	<b>Total related parties</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**6. PIUTANG USAHA (lanjutan)**

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut  
(lanjutan):

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
<u>Pihak Ketiga</u>		
Perusahaan swasta	328.390.837	375.977.010
Maskapai luar negeri	80.782.716	71.860.084
Maskapai dalam negeri	62.167.571	55.609.776
<b>Sub-total Pihak Ketiga</b>	<b>471.341.124</b>	<b>503.446.870</b>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(82.027.117)	(83.871.690)
<b>Total pihak ketiga</b>	<b>389.314.007</b>	<b>419.575.180</b>
<b>Total piutang usaha</b>	<b>662.914.839</b>	<b>646.745.916</b>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(135.147.712)	(136.836.694)
<b>Total piutang usaha neto</b>	<b>527.767.127</b>	<b>509.909.222</b>

**6. TRADE RECEIVABLES (continued)**

The details of trade receivables are as follows  
(continued):

	<u>Third Parties</u>
	Private companies
	Foreign airlines
	Domestic airlines
<b>Subtotal Third Parties</b>	
Allowance for impairment loss	
<b>Total third parties</b>	
<b>Total trade receivables</b>	
Allowance for impairment loss	
<b>Total trade receivables net</b>	

Rincian piutang usaha sesuai denominasi mata  
uangnya sebagai berikut :

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Rupiah	438.231.005	458.717.870
Dolar AS	89.536.122	51.191.352
<b>Total</b>	<b>527.767.127</b>	<b>509.909.222</b>

The details of trade receivables denominated in their  
currencies are as follows :

	<u>Rupiah</u>	<u>US Dollar</u>
<b>Total</b>		

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai adalah  
sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Saldo awal	136.836.694	139.602.882
Penyisihan tahun berjalan	24.471.421	41.337.087
Penghapusan periode berjalan	(4.578.131)	(295.560)
Pelunasan tahun berjalan	(21.582.272)	(43.807.715)
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>135.147.712</b>	<b>136.836.694</b>

The movements in the allowance for impairment  
loss are as follows:

	<u>Beginning balance</u>
	Allowance during current year
	Write-off during current year
	Repayments during the year
<b>Balance at the end of the year</b>	

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang:

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
0 - 90 hari	448.562.817	418.937.990
91 - 180 hari	18.207.430	21.416.272
181 - 360 hari	15.578.691	16.351.565
> 360 hari	180.565.901	190.040.089
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(135.147.712)	(136.836.694)
<b>Total</b>	<b>527.767.127</b>	<b>509.909.222</b>

The details of trade receivables based on aging  
schedule:

	<u>0 - 90 days</u>	<u>91 - 180 days</u>	<u>181 - 360 days</u>	<u>&gt; 360 days</u>
				Allowance for impairment loss
<b>Total</b>				

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**6. PIUTANG USAHA (lanjutan)**

Piutang kepada PT Merpati Nusantara Airlines sebesar Rp50.889.126 sudah dinyatakan macet dan atas semua saldo piutang tersebut telah dilakukan cadangan penurunan nilai. PT Merpati Nusantara Airline telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah disetujui oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 November 2018. Dalam keputusan tersebut, disebutkan bahwa saldo piutang Perusahaan kepada PT Merpati Nusantara Airline sebesar Rp50.796.430.126 (angka penuh). Saldo tersebut berdasarkan kurs tanggal 6 Februari 2018.

Berdasarkan hasil penelaahan kolektibilitas akun piutang usaha pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai piutang usaha di atas adalah cukup.

Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat piutang usaha yang dijaminan sehubungan dengan liabilitas apapun.

**6. TRADE RECEIVABLES (continued)**

Receivables from PT Merpati Nusantara Airlines amounting to Rp50,889,126 has been declared to be impaired and all outstanding balances of receivables have been impaired. PT Merpati Nusantara Airlines has filed Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) that has been agreed by Business Court on November 14, 2018. According to the sentence, the balance of the Company's receivables from PT Merpati Nusantara Airline amounting to Rp50,796,430,126 (full amount). The amount is based on exchange rate on February 6, 2018.

Based on the review of the collectibility of the trade receivables at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment in value of trade receivables is sufficient.

As of December 31, 2019, there are no trade receivables sold with recourse nor used as collateral for any obligations.

**7. PIUTANG LAIN-LAIN**

Piutang lain-lain terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Pihak ketiga	83.990.931	43.363.358
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(3.646.740)	(3.651.672)
<b>Total piutang lain-lain</b>	<b>80.344.191</b>	<b>39.711.686</b>

Mutasi penyisihan kerugian penurunan piutang adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Saldo awal	3.651.672	1.731.631
Penyisihan tahun berjalan	-	2.012.700
Pemulihan tahun berjalan	(4.932)	(92.659)
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>3.646.740</b>	<b>3.651.672</b>

**7. OTHER RECEIVABLES**

Other receivables consist of:

Third parties  
Allowance for Impairment loss  
**Total other receivables**

The movements in the allowance for impairment loss are as follows:

Beginning balance  
Allowance during the year  
Recovery during the year  
**Balance at the end of the year**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**7. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)**

Analisis umur piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Belum jatuh tempo	32.468.797	37.377.923	Not yet due
0 - 1 tahun	21.153.934	2.782.702	0 - 1 year
diatas 1 tahun	30.368.200	3.202.733	above 1 years
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>83.990.931</b>	<b>43.363.358</b>	<b>Balance at the end of the year</b>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(3.646.740)	(3.651.672)	Allowance for impairment loss
<b>Total</b>	<b>80.344.191</b>	<b>39.711.686</b>	<b>Total</b>

Berdasarkan hasil penelaahan kolektibilitas akun piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain di atas adalah cukup.

The aging analysis of other receivables is as follows:

Based on the review of the collectibility of the other receivables at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment loss of other receivables is sufficient.

**8. PERSEDIAAN**

Persediaan terdiri dari:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Persediaan alat kantor dan percetakan	30.264.587	33.832.717	Office supplies and equipment
Persediaan barang dagang	18.274.762	5.941.208	Merchandise inventory
Suku cadang pemeliharaan	17.195.257	42.264.931	Maintenance spare-part
Persediaan bahan bakar	2.446.291	2.472.880	Fuel supplies
Persediaan hotel dan lounge	1.260.045	1.861.512	Hotel and lounge supplies
<b>Total</b>	<b>69.440.942</b>	<b>86.373.248</b>	<b>Total</b>
Penyisihan penurunan nilai	(36.916)	(1.565.428)	Allowance for impairment loss
<b>Total</b>	<b>69.404.026</b>	<b>84.807.820</b>	<b>Total</b>

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, cadangan penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan dengan kondisi barang rusak masing-masing sebesar Rp36.916 dan Rp1.565.428.

Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan di atas adalah cukup.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat persediaan yang dijaminan sehubungan dengan liabilitas apapun dan tidak terdapat persediaan yang diasuransikan.

Inventories consist of:

As of December 31, 2019 and 2018, allowance for impairment loss of inventories with the condition of damaged goods amounting to Rp36,916 and Rp1,565,428, respectively.

Based on the review at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment loss of inventories is sufficient.

As of December 31, 2019 and 2018, there are no guaranteed inventory in respect of any liability and no insured inventory.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**9. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA**

Uang muka dan beban dibayar di muka terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Pembelian persediaan	56.846.547	63.986.012
Asuransi	29.619.998	20.884.665
Biaya karyawan dibayar di muka	26.919.139	54.295.987
Umum	12.585.665	40.641.635
Kontribusi tetap (Catatan 42)	10.296.694	-
Lain-lain	16.356.797	13.894.282
<b>Total</b>	<b>152.624.840</b>	<b>193.702.581</b>
Bagian jangka pendek	(139.959.625)	(159.380.727)
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>12.665.215</b>	<b>34.321.854</b>

Asuransi merupakan asuransi dibayar di muka atas aset tetap Perusahaan.

Biaya karyawan dibayar dimuka adalah pembayaran biaya bantuan uang sewa rumah kepada karyawan Perusahaan.

Uang muka dan beban dibayar di muka lain-lain terutama sehubungan dengan pemakaian persediaan, sewa dan beban umum.

**9. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES**

Advances and prepaid expenses consist of:

Inventories purchase
Insurance
Employees paid in advanced
General
Permanent contribution (Note 42)
Miscellaneous
<b>Total</b>
Current portion
<b>Non-current portion</b>

Insurance represents prepaid expenses insurance for fixed assets of the Company.

Employees paid in advanced are residential paid assistance to employees of the Company.

Miscellaneous advances and prepaid expenses are mainly consist of the use of supplies, rent and general expenses.

**10. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA**

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Non-aeronautika	152.838.505	101.384.284
Aeronautika	131.198.556	191.618.705
Lainnya	6.985.377	5.441.340
<b>Total</b>	<b>291.022.438</b>	<b>298.444.329</b>

Pendapatan yang masih harus diterima untuk aeronautika mencakup pendapatan-pendapatan atas Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U), Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U), Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (JKP2U), jasa *aviobridge* dan *extended fee*.

Pendapatan yang masih harus diterima untuk non-aeronautika mencakup pendapatan-pendapatan atas jasa sewa ruang, pemakaian jasa gudang, sewa tanah, konsesi, parkir, pemakaian listrik/telepon/air, pemakaian *premium lounge* dan jasa lainnya.

Pendapatan yang masih harus diterima lainnya merupakan akrual atas pendapatan bunga deposito.

**10. ACCRUED REVENUES**

Non-aeronautical
Aeronautical
Others
<b>Total</b>

Accrued revenues of aeronautical consist of Aircraft Landing, Placing and Storing Service (PJP4U), Aircraft Passenger Handling Service (PJP2U), Cargo and Post Services (JKP2U), *aviobridge* services and *extended fee*.

Accrued revenues of non-aeronautical consist of revenues for space rental services, use of warehouse, land rental, concessions, parking, electricity/telephone/water, the use of *premium lounges* and other services.

Other accrued revenues consist of the interest income on deposits.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**11. PERPAJAKAN**

**11. TAXATION**

**a. Pajak dibayar di muka**

**a. Prepaid taxes**

Pajak dibayar di muka

Prepaid taxes

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
PPN masukan	631.013.856	226.983.245	VAT in
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
PPN masukan	209.943.948	136.434.386	VAT in
PPh pasal 28	-	4.447.597	Income tax article 28
<b>Total</b>	<b>840.957.804</b>	<b>367.865.228</b>	<b>Total</b>

**b. Estimasi tagihan pajak**

**b. Estimated claims for refundable tax**

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
PPh pasal 28	99.018.495	-	Income tax article 28
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
PPh pasal 28	13.692.596	-	Income tax article 28
<b>Total</b>	<b>112.711.091</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>

**c. Utang pajak**

**c. Tax payables**

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
PPN masukan	149.507.016	146.625.340	VAT in
PPN keluaran	91.028.438	82.383.245	VAT out
PPh pasal 4 (2)	66.273.593	37.900.041	Income tax article 4 (2)
PPh pasal 25	16.558.482	15.356.191	Income tax article 25
PPh pasal 21	7.412.242	21.614.793	Income tax article 21
PPh pasal 23	3.688.088	3.442.568	Income tax article 23
PPh pasal 22	1.147.767	389.065	Income tax article 22
PPh pasal 29	-	363.867	Income tax article 29

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**11. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**11. TAXATION (continued)**

**c. Utang pajak (lanjutan)**

**c. Tax payables (continued)**

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
PPN keluaran	76.519.623	51.980.117	VAT out
PPH pasal 25	4.875.814	21.256.161	Income tax article 25
PPH pasal 23	4.220.704	1.155.068	Income tax article 23
PPH pasal 21	2.114.579	1.631.341	Income tax article 21
PPH pasal 4 (2)	1.016.195	1.427.679	Income tax article 4 (2)
PPH pasal 29	-	5.233.947	Income tax article 29
Pajak lainnya	1.139.674	2.476.194	Other taxes
<b>Total</b>	<b>425.502.215</b>	<b>393.235.617</b>	<b>Total</b>

**d. Beban pajak penghasilan badan**

**d. Corporate Income tax expense**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
<b>Pajak kini</b>			<b>Current tax</b>
Perusahaan			The Company
Tahun berjalan	386.268.737	436.526.257	Current year
Hasil ketetapan pajak	31.482.404	21.942.480	Tax assessment letter
Entitas anak	64.528.773	76.318.225	Subsidiaries
<b>Sub-total</b>	<b>482.279.914</b>	<b>534.786.962</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Pajak tangguhan</b>			<b>Deferred tax</b>
Perusahaan	11.625.602	159.890.059	The Company
Entitas anak	(1.597.437)	(5.661.123)	Subsidiaries
<b>Sub-total</b>	<b>10.028.165</b>	<b>154.228.936</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Total</b>	<b>492.308.079</b>	<b>689.015.898</b>	<b>Total</b>

**e. Taksiran pajak penghasilan**

**e. Provision for income tax**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan taksiran pendapatan kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before corporate income tax, as shown in the consolidated statement profit or loss and comprehensive income, and estimated taxable income of the Company is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.944.535.245	2.694.934.057	Profit before corporate income tax in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi:			Less:
Laba entitas anak sebelum beban pajak penghasilan badan dan efek eliminasi	(89.998.403)	(218.617.188)	Profit of subsidiaries before corporate income tax expense and elimination effect
Laba Perusahaan sebelum pajak penghasilan badan	1.854.536.842	2.476.316.869	Profit before corporate income tax attributable to the Company



**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**11. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**11. TAXATION (continued)**

**e. Taksiran pajak penghasilan (lanjutan)**

**e. Provision for income tax (continued)**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan taksiran pendapatan kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The reconciliation between profit before corporate income tax, as shown in the consolidated statement of profit or loss and comprehensive income, and estimated taxable income of the Company is as follows: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Labanya Perusahaan sebelum pajak penghasilan badan Penghasilan dikenakan pajak final	1.854.536.842 (613.070.376)	2.476.316.869 (478.814.962)	Profit before corporate income tax attributable to the Company Income subject to final tax
<b>Labanya Perusahaan sebelum pajak penghasilan badan setelah beban (penghasilan) yang pajaknya bersifat final</b>	<b>1.241.466.466</b>	<b>1.997.501.907</b>	<b>Profit before corporate income tax after expenses (revenues) subjected to final tax attributable to the Company</b>
<b>Ditambah (dikurangi):</b>			<b>Add (deduct):</b>
<u>Beda tetap:</u>			<u>Permanent difference:</u>
Beban tidak dapat dikurangkan	332.928.349	230.644.411	Non-deductible expenses
<u>Beda waktu:</u>			<u>Temporary difference:</u>
Penyisihan penurunan nilai	15.788.666	36.315.241	Allowance for impairment losses
Penyusutan	(57.382.532)	(175.301.589)	Depreciation
Imbalan kerja karyawan	12.273.999	(343.054.942)	Employee benefits
<b>Sub-total</b>	<b>303.608.482</b>	<b>(251.396.879)</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan</b>	<b>1.545.074.948</b>	<b>1.746.105.028</b>	<b>Estimated taxable income of the Company</b>
<b>Beban pajak penghasilan</b>	<b>386.268.737</b>	<b>436.526.257</b>	<b>Income tax expense</b>
Dikurangi:			Deducted:
Pajak dibayar di muka			Prepaid tax
PPh pasal 23	286.585.442	251.888.095	Income tax article 23
PPh pasal 25	198.701.790	184.274.295	Income tax article 25
<b>Total</b>	<b>485.287.232</b>	<b>436.162.390</b>	<b>Total</b>
<b>Taksiran (tagihan)/utang pajak penghasilan</b>	<b>(99.018.495)</b>	<b>363.867</b>	<b>Estimated income tax (claims)/payable</b>

Perhitungan taksiran pajak penghasilan kena pajak pada akhir tahun menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

The calculation of estimated taxable income at the end of the year is used as a basis in filling the annual corporate income tax return.

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas-entitas di dalam group menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Based on the taxation laws of Indonesia, entities within the group calculate and pay tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**11. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**e. Taksiran pajak penghasilan (lanjutan)**

Rekonsiliasi antara hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan badan dengan tarif pajak yang berlaku dan beban pajak penghasilan sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2019	2018
<b>Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian</b>	<b>1.944.535.245</b>	<b>2.694.934.057</b>
Beban pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku	486.133.811	673.733.514
Beban tidak dapat dikurangkan	167.480.449	168.924.584
Hasil ketetapan pajak	31.606.369	21.942.480
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(220.078.424)	(232.279.225)
Penyesuaian	27.165.874	56.694.545
<b>Beban pajak penghasilan</b>	<b>492.308.079</b>	<b>689.015.898</b>

**11. TAXATION (continued)**

**e. Provision for income tax (continued)**

The reconciliation between the result of the multiplication of accounting income before corporate income tax with the current tax rate and income tax expense is as follows:

<b>Profit before corporate income tax in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income</b>
Income tax expense based on applicable tax rate
Non-deductible expenses
Tax assessment letter
Adjustment
<b>Income tax expense</b>

**f. Aset/liabilitas pajak tangguhan**

**f. Deferred tax assets/liabilities**

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Aset pajak tangguhan: Entitas anak	48.494.898	41.157.712
<b>Total</b>	<b>48.494.898</b>	<b>41.157.712</b>
Liabilitas pajak tangguhan: Perusahaan Entitas anak	68.729.872 11.155.632	85.652.386 3.427.435
<b>Total</b>	<b>79.885.504</b>	<b>89.079.821</b>

Deferred tax assets: Subsidiaries
<b>Total</b>
Deferred tax liabilities: The Company Subsidiaries
<b>Total</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**11. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**11. TAXATION (continued)**

**f. Pajak tangguhan (lanjutan)**

**f. Deferred taxes (continued)**

Perhitungan beban (manfaat) dan aset pajak  
tangguhan sebagai berikut:

The calculation of deferred tax expense  
(benefit) and deferred tax assets is as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019/ Year ended December 31, 2019						
	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity	Penyesuaian/ Adjustment	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
<b>Aset pajak tangguhan</b>						<b>Deferred tax asset</b>
Entitas anak	41.157.712	7.500.013	202.705	(365.532)	48.494.898	Subsidiaries
<b>Aset (liabilitas) Pajak tangguhan Perusahaan:</b>						<b>Deferred tax asset (liabilities) The Company:</b>
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	32.341.659	3.947.166	-	(4.295.636)	31.993.189	Allowance for impairment value of trade receivable
Penyisihan penurunan nilai piutang non-usaha	911.685	-	-	-	911.685	Allowance for impairment value of other receivable
Akumulasi penyusutan dan amortisasi aset tetap, properti investasi dan aset tak berwujud	(190.462.264)	(14.345.633)	-	-	(204.807.897)	Accumulated depreciation and amortization of fixed assets, property investment & intangible assets
Imbalan kerja karyawan	71.556.534	3.068.500	28.548.116	-	103.173.150	Employee benefits
<b>Subtotal</b>	<b>(85.652.386)</b>	<b>(7.329.967)</b>	<b>28.548.116</b>	<b>(4.295.636)</b>	<b>(68.729.873)</b>	<b>Subtotal</b>
Entitas anak	(3.427.435)	(4.940.189)	7.471	(2.795.478)	(11.155.631)	Subsidiaries, net
<b>Total</b>	<b>(89.079.821)</b>	<b>(12.270.156)</b>	<b>28.555.587</b>	<b>(7.091.114)</b>	<b>(79.885.504)</b>	<b>Total</b>
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018/ Year ended December 31, 2018						
	1 Januari 2018/ January 1, 2018	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity	Penyesuaian/ Adjustment	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
<b>Aset pajak tangguhan</b>						<b>Deferred tax asset</b>
Entitas anak	50.673.919	16.835.635	211.439	(26.563.281)	41.157.712	Subsidiaries
<b>Aset (liabilitas) pajak tangguhan Perusahaan:</b>						<b>Deferred tax asset (liabilities) The Company:</b>
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	38.024.309	26.723.620	-	(32.406.270)	32.341.659	Allowance for impairment value of trade receivable
Penyisihan penurunan nilai piutang non-usaha	745.063	1.184.062	-	(1.017.440)	911.685	Allowance for impairment value of other receivable
Akumulasi penyusutan dan amortisasi aset tetap, properti investasi dan aset tak berwujud	(109.400.823)	(157.683.225)	-	76.621.784	(190.462.264)	Accumulated depreciation and amortization of fixed assets, property investment & intangible assets
Imbalan kerja karyawan	96.048.942	(30.114.516)	22.256.901	(16.634.793)	71.556.534	Employee benefits
<b>Subtotal</b>	<b>25.417.491</b>	<b>(159.890.059)</b>	<b>22.256.901</b>	<b>26.563.281</b>	<b>(85.652.386)</b>	<b>Subtotal</b>
Entitas anak	7.771.728	(11.174.512)	(24.651)	-	(3.427.435)	Subsidiaries, net
<b>Total</b>	<b>33.189.219</b>	<b>(171.064.570)</b>	<b>22.232.250</b>	<b>26.563.281</b>	<b>(89.079.821)</b>	<b>Total</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**11. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**g. Surat ketetapan pajak**

Pada tahun 2019, Perusahaan menerima beberapa surat ketetapan pajak kurang bayar atas beberapa jenis pajak untuk tahun pajak 2016. Atas ketetapan kurang bayar pajak tersebut, Perusahaan mengakui beban sebesar Rp60.434.397 dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2019.

**11. TAXATION (continued)**

**g. Tax assessment letters**

In 2019, the Company received tax assessment letters on underpayment of certain taxes for fiscal year 2016. In relation to assessment of underpayment, the Company recognized expenses amounted to Rp60,434,397 in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for 2019.

**12. ASET LANCAR LAINNYA**

Akun ini terutama merupakan uang muka proyek dan jaminan.

**12. OTHER CURRENT ASSETS**

This account mainly represents advance for projects and deposits.

**13. INVESTASI JANGKA PANJANG**

	31 Desember 2019/ December 31, 2019		31 Desember 2018/ December 31, 2018		
	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	
<b>Obligasi:</b>					<b>Bonds:</b>
RI0148	15.206.000	15.277.200	15.206.000	13.361.105	RI0148
BEXI04BCN7	10.000.000	10.070.100	-	-	BEXI04BCN7
<b>Penyertaan saham pada entitas asosiasi:</b>					<b>Investments in shares of associates:</b>
PT Gapura Angkasa	21.504.000	55.511.460	21.504.000	50.829.179	PT Gapura Angkasa
PT Jasa Marga Bali Tol	59.635.000	28.960.425	59.635.000	36.472.028	PT Jasa Marga Bali Tol
<b>Total</b>	<b>106.345.000</b>	<b>109.819.185</b>	<b>96.345.000</b>	<b>100.662.312</b>	<b>Total</b>

**a. Penyertaan saham pada entitas asosiasi**

**PT Gapura Angkasa ("Gapura")**

Gapura bergerak dalam bidang jasa penunjang pengangkutan udara (*ground handling*) dan pengangkutan barang. Perusahaan memiliki kepemilikan saham di Gapura sebanyak 215.040 saham atau sebesar 7,76% kepemilikan pada tahun 2019 dan 10,00% kepemilikan pada tahun 2018 dan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas karena adanya pengaruh signifikan di investee sesuai PSAK 15 Paragraf 6 dan 16. Rinciannya adalah sebagai berikut:

**a. Investment in shares of associates**

**PT Gapura Angkasa ("Gapura")**

Gapura is engaged in ground handling of air freight and freight transport services.

The Company has investment in shares of stock in Gapura amounted to 215,040 shares or 7.76% ownership in 2019 and 10.00% ownership in 2018 and are recorded using equity method due to investee significant influence in accordance with PSAK 15 Paragraphs 6 and 16. The details are as follows:

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**13. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Penyertaan saham pada entitas asosiasi (lanjutan)**

**PT Gapura Angkasa ("Gapura") (lanjutan)**

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Biaya perolehan	21.504.000	21.504.000
Akumulasi bagian laba	23.057.297	24.744.424
Penghasilan komprehensif lain	2.361.285	4.580.755
Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	8.588.878	-
<b>Total</b>	<b>55.511.460</b>	<b>50.829.179</b>

Pada tanggal 18 November 2019, Gapura menerbitkan saham baru yang berjumlah 619.000 lembar saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp61.900.000.000 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris Jimmy Tanal, S.H.,M.Kn., No. 105 tanggal 18 November 2019. Keseluruhan saham baru tersebut diambil seluruhnya oleh PT Angkasa Pura II (Persero), entitas sepengendali, sehingga membuat persentase kepemilikan Perusahaan di Gapura terdilusi dari 10,00% menjadi 7,76%.

**PT Jasa Marga Bali Tol ("JMBT")**

JMBT bergerak dalam bidang pengusahaan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa.

Investasi dalam saham pada JMBT merupakan konsorsium investasi pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa di daerah Bali oleh beberapa Perusahaan BUMN.

Perusahaan memiliki 59.635 saham atau sebesar Rp59.635.000 dan tambahan modal disetor lainnya sebesar Rp14.908.400 dengan jumlah kepemilikan sebesar 8%.

Investasi saham pada JMBT tersebut dicatat pada pembukuan Perusahaan dengan menggunakan metode ekuitas karena pengaruh signifikan di investee sesuai PSAK 15 paragraph 6 dan 16. Rinciannya adalah sebagai berikut :

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Biaya perolehan	59.635.000	59.635.000
Akumulasi bagian rugi	(30.683.192)	(23.212.627)
Penghasilan komprehensif lain	8.617	49.655
<b>Total</b>	<b>28.960.425</b>	<b>36.472.028</b>

**13. LONG-TERM INVESTMENTS (continued)**

**a. Investment in shares of associates (continued)**

**PT Gapura Angkasa ("Gapura") (continued)**

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Biaya perolehan	21.504.000	21.504.000	Carrying value
Akumulasi bagian laba	23.057.297	24.744.424	Cummulative share of profit
Penghasilan komprehensif lain	2.361.285	4.580.755	Other comprehensive income
Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	8.588.878	-	Difference in the value of business combination under common control
<b>Total</b>	<b>55.511.460</b>	<b>50.829.179</b>	<b>Total</b>

On November 18, 2019, Gapura issued new 619,000 shares with a par value of Rp61,900,000,000 as stated in the Notarial Deed No. 105 of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., dated November 18, 2019. The new shares issued was all acquired by PT Angkasa Pura II (Persero), entity under common control, which made the Company's ownership in Gapura diluted from 10.00% to 7.76%.

**PT Jasa Marga Bali Tol ("JMBT")**

JMBT is engaged in the operation of Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa toll road.

Investments in shares in JMBT is an investment consortium highway construction Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa in Bali by several state-owned companies.

The Company has 59,635 shares or Rp59,635,000 and additional paid-in capital amounting to Rp14,908,400 with ownership of 8%.

Investments in shares in JMBT the Company recorded by the equity method due to investee significant influence in accordance with PSAK 15, paragraphs 6 and 16. The details are as follows:

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**13. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)**

Informasi tambahan pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sehubungan dengan entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

	<b>Total Aset/ Total Assets</b>	<b>Total Liabilitas/ Total Liabilities</b>	<b>Total Pendapatan/ Total Revenues</b>	<b>Laba (Rugi) Bersih/ Net Income (Loss)</b>
PT Gapura Angkasa	1.361.170.659	652.704.836	1.841.656.160	(19.325.491)
PT Jasa Marga Bali Tol	1.890.157.490	1.510.288.801	145.765.993	(79.333.886)

Rincian bagian laba (rugi) entitas asosiasi adalah:

	<b>31 Desember/December 31,</b>		
	<b>2019</b>	<b>2018</b>	
PT Gapura Angkasa	(1.687.127)	6.747.571	PT Gapura Angkasa
PT Jasa Marga Bali Tol	(7.265.010)	(4.195.565)	PT Jasa Marga Bali Tol
<b>Total</b>	<b>(8.952.137)</b>	<b>2.552.006</b>	<b>Total</b>

**13. LONG TERM-INVESTMENTS (continued)**

Additional information as of December 31, 2019 and for the year then ended related to associate entities are as follows:

Details of the share in profit (loss) of the associate companies are:

**14. PROPERTI INVESTASI**

Properti investasi terdiri dari:

**14. INVESTMENT PROPERTIES**

Investment properties are consisted of:

<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019/ Year ended December 31, 2019</b>					
	<b>Saldo Awal / Beginning</b>	<b>Penambahan / Addition</b>	<b>Pengurangan / Deduction</b>	<b>Reklasifikasi / Reclassification</b>	<b>Saldo akhir / Ending balance</b>
<b>Biaya perolehan</b>					<b>Acquisitions cost</b>
Tanah	23.179.060	4.936.470	-	-	Lands
Bangunan/lapangan	143.044.788	-	-	-	Buildings/fields
<b>Total</b>	<b>166.223.848</b>	<b>4.936.470</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
<b>Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai</b>					<b>Accumulated depreciation and impairment value</b>
Bangunan/lapangan	38.351.115	3.921.028	-	-	Buildings/fields
<b>Total</b>	<b>38.351.115</b>	<b>3.921.028</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
<b>Nilai buku</b>	<b>127.872.733</b>				<b>Book value</b>
<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018/ Year ended December 31, 2018</b>					
	<b>Saldo Awal / Beginning</b>	<b>Penambahan / Addition</b>	<b>Pengurangan / Deduction</b>	<b>Reklasifikasi / Reclassification</b>	<b>Saldo akhir / Ending balance</b>
<b>Biaya perolehan</b>					<b>Acquisitions cost</b>
Tanah	13.994.221	-	-	9.184.839	Lands
Bangunan/lapangan	299.589.896	-	181.292	(156.363.816)	Buildings/fields
<b>Total</b>	<b>313.584.117</b>	<b>-</b>	<b>181.292</b>	<b>(147.178.977)</b>	<b>Total</b>
<b>Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai</b>					<b>Accumulated depreciation and impairment value</b>
Bangunan/lapangan	66.547.821	7.930.035	181.292	(35.945.449)	Buildings / fields
<b>Total</b>	<b>66.547.821</b>	<b>7.930.035</b>	<b>181.292</b>	<b>(35.945.449)</b>	<b>Total</b>
<b>Nilai buku</b>	<b>247.036.296</b>				<b>Book value</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**14. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)**

Pada tahun 2018, properti investasi atas hanggar dan gedung terminal kargo sebesar Rp156.363.816 direklasifikasi ke akun aset tetap (Catatan 15).

Nilai wajar dari properti investasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.269.939.431 dan Rp717.822.549, yang ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas properti investasi.

Manajemen berkeyakinan bahwa NJOP telah mendekati nilai wajarnya.

Properti investasi dicatat berdasarkan biaya perolehan. Properti investasi tanah tidak disusutkan. Beban penyusutan atas properti investasi selama tahun 2019 dan 2018 seluruhnya dibebankan kepada "Beban operasional bandara".

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat kejadian yang mengindikasikan adanya penurunan nilai properti investasi pada tahun 2019 dan 2018.

**14. INVESTMENT PROPERTIES (continued)**

In 2018, investment properties of hangar and cargo terminal buildings amounted to Rp156,363,816 are reclassified to fixed assets (Note 15).

The fair value of the investment properties as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp1,269,939,431 and Rp717,822,549, which were determined based on Sales Value of Tax Object (NJOP) of the investment properties.

Management believes that NJOP approximates its fair value.

Investments properties are stated at acquisition cost. Investment property of land is not depreciable. Depreciation expenses of investment properties during 2019 and 2018, were entirely charged to "Airport operation expenses".

Management believes that there is no event that indicates a decrease in the value of investment properties in the year 2019 and 2018.

**15. ASET TETAP**

Akun ini terdiri dari:

**15. FIXED ASSETS**

This account consists of the following:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019/  
Year ended December 31, 2019

	Saldo Awal/ Beginning	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
<b>Biaya perolehan/Cost of acquisitions</b>					
<i>Pemilikan langsung/Direct acquisitions :</i>					
Tanah/Lands	6.250.665.974	-	(6.810.215)	1.254.174	6.245.109.933
Bangunan (lapangan)/Structure (fields)	6.825.257.730	-	(8.356.521)	1.191.554.817	8.008.456.026
Gedung-gedung/Buildings	6.476.956.029	58.651.625	(53.440.068)	779.077.838	7.261.245.424
Alat perhubungan udara/Aviation equipment	28.418.419	-	(11.780.379)	-	16.638.040
Kendaraan/Vehicles	497.988.153	67.824.078	(2.877.309)	6.965.964	569.900.886
Instalasi/Installations	1.265.710.342	15.830.594	(19.544.008)	166.109.850	1.428.106.778
Peralatan/Equipments	5.472.474.876	329.380.115	(35.720.963)	582.802.705	6.348.936.733
Aset dalam konstruksi/Assets under construction	6.054.579.392	8.713.004.484	(5.807.693)	(2.742.793.931)	12.018.982.252
<b>Total</b>	<b>32.872.050.915</b>	<b>9.184.690.896</b>	<b>(144.337.156)</b>	<b>(15.028.583)</b>	<b>41.897.376.072</b>
<b>Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai/Accumulated depreciation and impairment value</b>					
<i>Pemilikan langsung/Direct acquisitions :</i>					
Bangunan (lapangan)/Structure (fields)	1.881.646.977	321.562.273	(413.453)	-	2.202.795.797
Gedung-gedung/buildings	1.116.324.259	187.127.431	(9.166.251)	-	1.294.285.439
Alat perhubungan udara/Aviation Equipment	27.977.374	97.880	(11.780.362)	-	16.294.892
Kendaraan/Vehicles	304.254.401	57.768.886	(2.243.682)	-	359.779.605
Instalasi/Installations	677.756.149	107.721.358	(18.547.237)	-	766.930.270
Peralatan/Equipments	2.725.307.088	435.480.304	(31.077.415)	(330.828)	3.129.379.149
<b>Total</b>	<b>6.733.266.248</b>	<b>1.109.758.132</b>	<b>(73.228.400)</b>	<b>(330.828)</b>	<b>7.769.465.152</b>
<b>Nilai buku/Book value</b>	<b>26.138.784.667</b>				<b>34.127.910.920</b>



**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**15. ASET TETAP (lanjutan)**

Akun ini terdiri dari:

**15. FIXED ASSETS (continued)**

This account consists of the following:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018/  
Year ended December 31, 2018

	Saldo Awal/ Beginning	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
<b>Biaya perolehan/Cost of acquisitions</b>					
<i>Pemilikan langsung/Direct acquisitions :</i>					
Tanah/Lands	795.978.770	11.754.949	-	5.442.932.255	6.250.665.974
Bangunan (lapangan)/Structure (fields)	5.324.562.457	885.211	369.798	1.500.179.860	6.825.257.730
Gedung-gedung/Buildings	5.456.264.612	79.223.797	3.318.159	944.785.780	6.476.956.030
Alat perhubungan udara/Aviation equipment	28.441.193	-	22.774	-	28.418.419
Kendaraan/Vehicles	482.998.121	47.214.124	22.819.467	(9.404.625)	497.988.153
Instalasi/Installations	1.089.651.001	118.114.412	901.503	58.846.431	1.265.710.341
Peralatan/Equipments	4.760.468.424	234.808.266	19.076.500	496.274.686	5.472.474.876
Aset dalam konstruksi/Assets under construction	6.425.749.706	8.005.083.786	-	(8.376.254.100)	6.054.579.392
<b>Total</b>	<b>24.364.114.284</b>	<b>8.497.084.545</b>	<b>46.508.201</b>	<b>57.360.287</b>	<b>32.872.050.915</b>
<b>Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai/Accumulated depreciation and impairment value</b>					
<i>Pemilikan langsung/Direct acquisitions :</i>					
Bangunan (lapangan)/Structure (fields)	1.578.726.542	303.290.233	(369.798)	-	1.881.646.977
Gedung-gedung/buildings	896.812.473	184.015.305	(448.968)	35.945.449	1.116.324.259
Alat perhubungan udara/Aviation Equipment	27.712.481	287.667	(22.774)	-	27.977.374
Kendaraan/Vehicles	273.428.994	51.627.052	(20.396.365)	(405.280)	304.254.401
Instalasi/Installations	576.353.748	102.657.164	(792.290)	(462.473)	677.756.149
Peralatan/Equipments	2.383.293.994	364.602.848	(22.589.754)	-	2.725.307.088
<b>Total</b>	<b>5.736.328.232</b>	<b>1.006.480.269</b>	<b>44.619.949</b>	<b>35.077.696</b>	<b>6.733.266.248</b>
<b>Nilai buku/Book value</b>	<b>18.627.786.052</b>				<b>26.138.784.667</b>

Pada tahun 2019, aset tetap berupa peralatan dan perlengkapan hotel sebesar Rp9.413.398 direklasifikasi ke aset tidak lancar lainnya. Pada tahun 2018, aset tetap berupa tanah di Manado direklasifikasi ke properti investasi sebesar Rp9.184.839 (Catatan 14).

In 2019, fixed asset in the form of hotel equipments amounting to Rp9,413,398 are reclassified as other non-current assets. In 2018, fixed asset in the form of land in Manado amounting to Rp9,184,839 is reclassified as property investment (Note 14).

Pada tahun 2019, aset tetap berupa gedung terminal penumpang, gedung operasional, fasilitas terminal penumpang dan gedung operasi dan aset lainnya diasuransikan pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan nilai pertanggungan *all risk*, gempa bumi, *machinery breakdown* dan *electronic equipment* masing-masing sebesar Rp8.734.622.048, Rp6.599.101.823, Rp392.621.912, dan Rp 1.256.923.975.

In 2019, fixed assets in the form of passenger terminal building, operational building, passenger terminal facility and operational building and other assets are insured to PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) with an all risk coverage, earthquake, machinery breakdown and electronic equipment amounting to Rp8,734,622,048, Rp6,599,101,823, Rp392,621,912, and Rp1,256,923,975, respectively.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**15. ASET TETAP (lanjutan)**

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut memadai untuk menutup kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Beban penyusutan atas aset tetap selama tahun 2019 dan 2018 seluruhnya dibebankan kepada "Beban operasional bandara".

Beberapa aset tetap milik entitas anak berupa tanah, gedung, peralatan dan kendaraan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (Catatan 21).

Aset dalam konstruksi merupakan proyek yang masih belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

31 Desember 2019	Perkiraan % penyelesaian/ Estimated % of completion	Nilai tercatat/ Carrying value	Tahun perkiraan penyelesaian/ Estimated years of completion	December 31, 2019
Landasan, apron	77%	533.383.142	2019-2020	Runways, apron
Lapangan, jalan dan pagar	62%	24.361.297	2019-2020	Field, roads, fences
Bangunan	98%	10.072.431.872	2019-2020	Buildings
Peralatan mekanik	96%	4.209.687	2019	Mechanical equipments
Tanah	74%	1.372.710.354	2019-2020	Land
Sistem pengolahan data berbantuan computer	88%	9.904.288	2019	Computer assisted data processing system
Aset tetap lain-lain	88%	1.981.612	2019	Other fixed assets
<b>Aset dalam konstruksi</b>		<b>12.018.982.252</b>		<b>Assets under construction</b>

31 Desember 2018	Perkiraan % penyelesaian/ Estimated % of completion	Nilai tercatat/ Carrying value	Tahun perkiraan penyelesaian/ Estimated years of completion	December 31, 2018
Landasan, apron	77%	1.203.893.746	2019-2020	Runways, apron
Lapangan, jalan dan pagar	61%	22.511.648	2019-2020	Field, roads, fences
Bangunan	63%	2.131.530.986	2019-2020	Buildings
Peralatan mekanik	71%	25.517.181	2019	Mechanical equipments
Tanah	51%	2.570.354.041	2019-2020	Land
Sistem pengolahan data berbantuan computer	81%	26.892.008	2019	Computer assisted data processing system
Aset tetap lain-lain	74%	73.879.782	2019	Other fixed assets
<b>Aset dalam konstruksi</b>		<b>6.054.579.392</b>		<b>Assets under construction</b>

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan mengkapitalisasi biaya bunga pinjaman sebagai bagian dari biaya perolehan aset dalam konstruksi masing-masing sebesar Rp286.653.622 dan Rp320.056.625. Perusahaan mengkapitalisasi biaya pinjaman sesuai dengan ketentuan di PSAK No. 26, "Kapitalisasi Biaya Pinjaman".

**15. FIXED ASSETS (continued)**

The management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the fixed assets insured.

Depreciation expenses of fixed assets during 2019 and 2018, were entirely charged to "Airport operation expenses".

Certain fixed assets owned a subsidiary such as lands, buildings, equipments and vehicles are used as collateral for loan obtained from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Mandiri and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (Note 21).

Assets under construction represents projects that have not been completed at the date of the consolidated statements of financial position with the details as follows:

For the years then ended December 31, 2019 and 2018, the Company capitalized borrowing costs as part of the acquisition cost of assets under construction amounting to Rp286,653,622 and Rp320,056,625, respectively. The Company capitalized borrowing costs, in accordance with PSAK No. 26, "Capitalization of Borrowing Costs".

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**16. ASET TAKBERWUJUD**

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
<b>Biaya perolehan</b>		
Perangkat lunak		
Perusahaan	86.581.756	80.327.704
Entitas anak	11.918.089	6.450.799
<b>Sub-total</b>	<b>98.499.845</b>	<b>86.778.503</b>
<b>Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai</b>		
Perangkat lunak		
Perusahaan	53.141.808	43.462.260
Entitas anak	1.891.561	993.859
<b>Sub-total</b>	<b>55.033.369</b>	<b>44.456.119</b>
<b>Total aset takberwujud, neto</b>	<b>43.466.476</b>	<b>42.322.384</b>

Aset takberwujud - perangkat lunak terutama merupakan biaya instalasi, implementasi dan jasa konsultasi pendukung perangkat lunak ERP.

Beban amortisasi atas aset takberwujud selama tahun 2019 dan 2018 seluruhnya dibebankan kepada "Beban operasional bandara".

**16. INTANGIBLE ASSETS**

This account consists of the following:

<b>Acquisition cost</b>
Software
The Company
Subsidiaries
<b>Subtotal</b>
<b>Accumulation of amortization and impairment value</b>
Software
The Company
Subsidiaries
<b>Subtotal</b>
<b>Total intangible assets, net</b>

Intangible assets - software mainly represents the cost of installation, implementation and consultation support service of ERP software.

Amortization expenses of intangible assets during 2019 and 2018, were entirely charged to "Airport operation expenses".

**17. BEBAN AKRUAL**

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Pegawai	432.869.194	475.027.902
Pelayanan bandara	352.327.734	445.297.485
Umum	233.257.539	274.799.531
Bunga	80.289.872	39.180.139
Persediaan	66.389.530	12.960.479
Pemeliharaan	46.576.249	45.358.322
Utilitas	35.726.758	27.201.707
Sewa	28.713.370	44.831.264
Pajak	20.480.106	20.094.551
Lain-lain	25.657.682	27.288.163
<b>Total</b>	<b>1.322.288.034</b>	<b>1.412.039.543</b>

Beban akrual - pegawai mencakup beban manfaat pegawai diantaranya beban bonus, beban cuti, beban kelebihan jam kerja, beban uang makan harian yang akan dibayarkan Perusahaan kepada pegawai.

**17. ACCRUED EXPENSES**

This account consists of the following:

Employees
Passenger services
General
Interest
Inventories
Maintenance
Utilities
Rental
Taxes
Others
<b>Total</b>

Accrued expenses - employees consist of employee benefits expenses including bonus expenses, leave expenses, overtime expenses, daily meal allowances which will be paid by the Company to employees.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**17. BEBAN AKRUAL (lanjutan)**

Beban akrual - pelayanan bandara terutama merupakan biaya konsesi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU). Pada tanggal 15 Desember 2015, Perusahaan mengadakan Perjanjian dengan DJPU mengenai pemberian konsesi untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian No. HK.201/2/8/DRJU.kum 2015 dan SP.333/HK.06.03/2015/DU. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan dikenakan biaya konsesi (Catatan 42a).

Beban akrual umum terutama merupakan *management fee* atas kerjasama pengelolaan tenant dengan PT GVK Services Indonesia (Catatan 42j), beban penyediaan x-ray, jaringan telekomunikasi dan jasa tenaga kerja.

**17. ACCRUED EXPENSES (continued)**

*Accrued expenses - airport services mainly represents of concession charge to the Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU). On December 15, 2015, the Company entered into Agreement with DJPU regarding the concession provided to the Company to conduct airport services as stated in agreement No. HK.201/2/8/DRJU.kum 2015 and SP.333/HK.06.03/2015/DU. Based on that agreement, the Company is charged with concession fees (Note 42a).*

*General accrued expenses consist of management fee on collaborative tenants management with PT GVK Services Indonesia (Note 42j), x-ray providing expense, telecommunication network and outsourcing services.*

**18. UTANG USAHA**

Rincian utang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

**18. TRADE PAYABLES**

*The details of trade payables based on vendors are as follows:*

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah	190.321.982	556.668.374	Rupiah
Dolar AS	64.725.318	30.953.784	US Dollar
Sub-total	255.047.300	587.622.158	Subtotal
Pihak berelasi			Related parties
Rupiah	59.820.083	101.718.709	Rupiah
<b>Total</b>	<b>314.867.383</b>	<b>689.340.867</b>	<b>Total</b>

Rincian utang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

*The details of trade payables based on aging are as follows:*

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
0 - 1 tahun	280.586.625	656.701.808	0 - 1 years
1 - 2 tahun	2.614.732	2.422.398	1 - 2 years
2 - 3 tahun	1.449.365	28.113.356	2 - 3 years
>3 tahun	30.216.661	2.103.305	>3 years
<b>Total</b>	<b>314.867.383</b>	<b>689.340.867</b>	<b>Total</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**19. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA**

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Pendapatan domestik	128.075.183	146.917.375
Pendapatan internasional	257.093	345.484
<b>Total</b>	<b>128.332.276</b>	<b>147.262.859</b>

Pendapatan diterima di muka terdiri dari penerimaan uang dari pelanggan sehubungan dengan sewa tanah, sewa ruang, tempat reklame dan lainnya, akan tetapi jasa tersebut belum diberikan ke pelanggan.

**19. UNEARNED REVENUES**

This account consists of the following:

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Pendapatan domestik	128.075.183	146.917.375
Pendapatan internasional	257.093	345.484
<b>Total</b>	<b>128.332.276</b>	<b>147.262.859</b>

Unearned revenues consist of cash received from customers in related to land rental income, space rental, billboards and others, but the services have not yet delivered to that customers.

**20. UTANG LAIN LAIN**

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Perolehan aset tetap	2.889.176.416	3.353.959.490
Jaminan pelanggan	243.728.335	370.562.781
Imbalan kerja tantiem	75.000.000	100.000.000
Jaminan vendor	22.364.293	30.488.095
Titipan debitur	20.032.940	31.186.620
Utang iuran	19.078.496	2.283.336
Titipan BMKG dan DJU	12.643.085	13.143.560
Titipan pengelola	7.181.591	23.549.240
Titipan/utang lain lain	3.606.980	308.383
<b>Total</b>	<b>3.292.812.136</b>	<b>3.925.481.505</b>

Utang perolehan aset tetap terutama merupakan utang kepada kontraktor untuk pembangunan aset tetap Perusahaan.

Jaminan pelanggan merupakan uang jaminan yang diberikan oleh pelanggan sehubungan dengan sewa ruangan, tanah, listrik, air dan telepon di awal perjanjian.

Titipan pengelola merupakan utang kepada pihak ketiga atas kerja sama pengelolaan lounge dan jasa terkait kargo.

**20. OTHER PAYABLES**

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Perolehan aset tetap	2.889.176.416	3.353.959.490
Jaminan pelanggan	243.728.335	370.562.781
Imbalan kerja tantiem	75.000.000	100.000.000
Jaminan vendor	22.364.293	30.488.095
Titipan debitur	20.032.940	31.186.620
Utang iuran	19.078.496	2.283.336
Titipan BMKG dan DJU	12.643.085	13.143.560
Titipan pengelola	7.181.591	23.549.240
Titipan/utang lain lain	3.606.980	308.383
<b>Total</b>	<b>3.292.812.136</b>	<b>3.925.481.505</b>

Acquisition of fixed asset payable mainly represent payable to contractors who build the Company fixed assets.

Customer deposit represent cash deposit given by customer that consists of deposits for space rental, land rental, electrical and water installation at the beginning of the contract.

Management deposit represent payables from third parties for cooperation of lounge management and cargo related services.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**21. UTANG BANK**

**a. Utang bank jangka pendek**

Utang bank jangka pendek terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
<u>Entitas Anak</u>		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	107.270.000	43.200.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	26.431.070	26.431.070
PT Bank Syariah Mandiri	24.309.600	36.000.000
<b>Total</b>	<b>158.010.670</b>	<b>105.631.070</b>

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk**

Pada tanggal 15 Agustus 2018, APP memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan fasilitas maksimum pinjaman sebesar Rp43.200.000 dengan suku bunga 9% per tahun. Fasilitas ini bersifat *revolving* dan dijamin dengan piutang usaha APP kepada Perusahaan sebesar pinjaman yang diterima. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk modal kerja untuk pengerjaan proyek pekerjaan konstruksi. Penarikan pinjaman ini dilakukan secara berkala pada tanggal 31 Agustus 2018, 4 Oktober 2018, dan 20 Desember 2018 dengan penarikan masing-masing sebesar Rp15.000.000, Rp15.000.000 dan Rp13.200.000. dan akan jatuh tempo dalam 6 bulan setelah dilakukan penarikan pinjaman. APP telah melunasi pinjaman ini.

APP diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis apabila membagikan dividen kepada pemegang saham.

**21. BANK LOAN**

**a. Short-term bank loans**

Short-term bank loans consist of:

<u>Subsidiaries</u>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri
<b>Total</b>

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk**

On August 15, 2018, APP obtained loan facility from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk with maximum loan facility amounted to Rp43,200,000 and bear interest 9% per annum. This credit is a revolving facility and secured by trade receivables APP to the Company with the same amount of loans received. The loan facility is used as working capital for construction project. The loan is withdrawn periodically on August 31, 2018, October 4, 2018, and December 20, 2018 with each withdrawal amounting to Rp15,000,000, Rp15,000,000 and Rp13,200,000, respectively, and will mature in 6 months after the loan is withdrawn. APP has repaid the outstanding loan on the due date.

APP is required to convey in writing once there is a dividend distribution to shareholders.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**21. UTANG BANK (lanjutan)**

**a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)**

Pada tanggal 19 Agustus 2019, APP memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan fasilitas maksimum sebesar Rp130.000.000 dengan suku bunga 9,25% per tahun. Fasilitas ini bersifat *revolving* dan dijamin dengan piutang usaha APP kepada Perusahaan sebesar pinjaman yang diterima. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk modal kerja pekerjaan proyek konstruksi. APP telah melakukan penarikan fasilitas pinjaman ini pada tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp9.200.000 dan Rp24.400.000 yang masing-masing jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2019 dan 23 Februari 2020. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2019, APP melakukan penarikan kembali fasilitas pinjaman sebesar Rp82.870.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 19 Agustus 2020. Pada tanggal 23 Desember 2019, APP telah melunasi pinjaman sebesar Rp9.200.000.

**PT Bank Syariah Mandiri**

Pada tanggal 15 Juli 2014, APS memperoleh fasilitas pembiayaan sebesar Rp42.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan. Fasilitas ini digunakan sebagai modal kerja dengan agunan berupa mesin/peralatan yang dimiliki oleh APS. Fasilitas tersebut telah beberapa kali diperpanjang, terakhir berdasarkan perjanjian tanggal 2 Oktober 2018 tentang addendum fasilitas akad pembiayaan *Musyarakah*, dimana APS menurunkan fasilitas pembiayaan menjadi Rp36.000.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2019. APS telah melunasi pinjaman ini pada tanggal 31 Juli 2019.

Pada tanggal 28 Juni 2019, APS memperoleh fasilitas pembiayaan modal kerja sebesar Rp11.357.000 dengan jangka waktu 7 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2020 termasuk masa tenggang (*grace period*) selama 6 bulan.

**21. BANK LOAN (continued)**

**a. Short-term bank loans (continued)**

On August 19, 2019, APP obtained loan facility from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk with maximum facility amounted to Rp130,000,000 and bear interest 9.25% per annum. This credit is a revolving facility and secured by trade receivables APP to the Company with the same amount of loans received. The loan facility is used as working capital for construction project. APP has withdrawn the loan facility on August 23, 2019 amounting to Rp9,200,000 and Rp24,400,000 which due on December 23, 2019 and February 23, 2020, respectively. Afterwards, APP has withdrawn the loan facility amounting to Rp82,870,000 which will due on August 19, 2020. On December 23, 2019, APP has repaid the outstanding loan amounting to Rp9,200,000.

**PT Bank Syariah Mandiri**

On July 15, 2014, APS obtained financing facility amounted Rp42,000,000 with 12 months term. This facility is used as working capital and secured by machinery/equipment owned by APS. This facility had been extended several times, last extension was based on an agreement dated October 2, 2018 regarding addendum of Akad facility financing *Musyarakah*, where APS deducted the financing facility to Rp36,000,000 and will mature on July 31, 2019. APS has repaid the outstanding loan on July 31, 2019.

On June 28, 2019, APS obtained financing working capital facility amounted Rp11,357,000 with 7 months term with due date on January 29, 2020 including 6 months grace period.



**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**21. UTANG BANK (lanjutan)**

**a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Juli 2019, APS memperoleh fasilitas pembiayaan modal kerja sebesar Rp9.619.000 dengan jangka waktu 7 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2020 termasuk masa tenggang (*grace period*) selama 6 bulan.

Pada tanggal 18 September 2019, APS memperoleh fasilitas pembiayaan modal kerja sebesar Rp3.333.600 dengan jangka waktu 7 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 April 2020 termasuk masa tenggang (*grace period*) selama 6 bulan.

Seluruh fasilitas pinjaman yang diperoleh pada tahun 2019 dijamin dengan piutang usaha senilai Rp50.000.000.

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

Pada tanggal 11 Desember 2014, APS memperoleh pinjaman jangka pendek sebesar Rp40.000.000 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan jangka waktu 12 bulan dengan tingkat bunga 11,5% per tahun. Fasilitas ini telah beberapa kali diperpanjang, terakhir berdasarkan surat dari BNI tanggal 4 Februari 2020, dimana pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2020 dengan tingkat suku bunga 10,00% per tahun.

APS diwajibkan untuk menjaga rasio keuangan berupa rasio lancar minimum sebesar 1 kali, *debt service coverage* rasio minimum sebesar 1 kali dan *debt to equity ratio* (DER) maksimal sebesar 2,50 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2019, APS telah memenuhi seluruh pembatasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman.

**21. BANK LOAN (continued)**

**a. Short-term bank loans (continued)**

On July 31, 2019, APS obtained financing working capital facility amounted Rp9,619,000 with 7 months term with due date on February 28, 2020 including 6 months grace period.

On September 18, 2019, APS obtained financing working capital facility amounted Rp3,333,600 with 7 months term with due date on April 20, 2020 including 6 months grace period.

All working capital facilities obtained in 2019 are secured by trade receivable amounting to Rp50,000,000.

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

On December 11, 2014, APS obtained short-term bank loan amounted to Rp40,000,000 from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) with 12 months term, bearing interest at 11.5%. This facility had been extended several times, last extension was based on letter from BNI dated February 4, 2020, where the loan will mature on December 10, 2020, bearing interest rate at 10.00%.

APS is required to maintain the debtor's financial ratios, minimum current ratio of 1 time, debt service coverage minimum 1 time, debt to equity ratio (DER) maximum 2.50 times.

As of December 31, 2019, APS has complied with all covenants as required in the loan agreements.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**21. UTANG BANK (lanjutan)**

**21. BANK LOAN (continued)**

**b. Utang bank jangka panjang**

**b. Long-term bank loans**

Utang bank jangka panjang terdiri dari:

Long-term bank loans consist of:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
<b>Perusahaan</b>			<b>The Company</b>
<b>Pihak berelasi</b>			<b>Related parties</b>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	5.197.324.424	1.638.960.332	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")	3.349.663.885	1.759.311.762	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN")	3.000.000.000	509.647.877	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN")
PT Bank BRI Syariah Tbk ("BRIS")	1.000.000.000	229.823.939	PT Bank BRI Syariah Tbk ("BRIS")
PT Bank Syariah Mandiri Tbk ("BSM")	1.000.000.000	-	PT Bank Syariah Mandiri Tbk ("BSM")
PT Indonesia Infrastructure Finance Tbk ("IIF")	499.875.513	499.875.513	PT Indonesia Infrastructure Finance Tbk ("IIF")
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	454.522.093	594.001.071	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	104.609.234	244.088.212	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")
Sub-total	14.605.995.149	5.475.708.706	Subtotal
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	1.723.427.373	799.800.821	PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ("Bank Jatim")	281.270.683	-	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ("Bank Jatim")
PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ("Bank DKI")	196.889.477	-	PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ("Bank DKI")
PT Bank Papua ("Bank Papua")	140.635.341	-	PT Bank Papua ("Bank Papua")
PT Bank Pembangunan Daerah DIY ("Bank DIY")	56.254.137	-	PT Bank Pembangunan Daerah DIY ("Bank DIY")
PT Bank Pembangunan Daerah Bali ("Bank Bali")	28.127.068	-	PT Bank Pembangunan Daerah Bali ("Bank Bali")
Sub-total	2.426.604.079	799.800.821	Subtotal
<b>Total</b>	<b>17.032.599.228</b>	<b>6.275.509.527</b>	<b>Total</b>
<b>Entitas anak</b>			<b>Subsidiaries</b>
<b>Pihak berelasi</b>			<b>Related parties</b>
PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")	207.932.303	7.650.520	PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	53.683.996	54.624.681	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")
Sub-total	261.616.299	62.275.201	Subtotal
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third party</b>
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Muamalat")	14.420.464	-	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Muamalat")
Sub-total	276.036.763	62.275.201	Subtotal
<b>Total</b>	<b>17.308.635.991</b>	<b>6.337.784.728</b>	<b>Total</b>
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(45.451.947)	(9.789.715)	Unamortized cost of loans
<b>Total</b>	<b>17.263.184.044</b>	<b>6.327.995.013</b>	<b>Total</b>
Dikurangi : bagian jangka pendek utang bank jangka panjang	(538.975.837)	(941.998.089)	Less : Current portion long-term bank loans
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>16.724.208.207</b>	<b>5.385.996.924</b>	<b>Long-term portion</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**21. UTANG BANK (lanjutan)**

**b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)**

**Perusahaan**

**Perjanjian kredit sindikasi 2016**

Pada tanggal 18 Agustus 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank dimana Mandiri sebagai agen sindikasi. Rincian utang jangka panjang atas perjanjian kredit sindikasi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	Plafond/Plafonds	Penarikan/ Drawdown	Jumlah sisa fasilitas pinjaman/ Remaining amount of loan facilities	Jumlah pinjaman jangka panjang/ Amount of drawdown	
SMI	1.350.000.000	1.349.663.885	336.115	1.349.663.885	SMI
Mandiri	1.000.000.000	999.751.026	248.974	999.751.026	Mandiri
BCA	800.000.000	799.800.821	199.179	799.800.821	BCA
IIF	500.000.000	499.875.513	124.487	499.875.513	IIF
BRI	350.000.000	349.912.859	87.141	349.912.859	BRI
<b>Total</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>3.999.004.104</b>	<b>995.896</b>	<b>3.999.004.104</b>	<b>Total</b>

Pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan dan atau pembiayaan kembali proyek pengembangan bandara dan/atau investasi.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 8,50% sampai dengan 9,25% pada tahun 2019 dan 8,00% sampai dengan 9,00% pada tahun 2018 dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam seluruh perjanjian utang jangka panjangnya.

Perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan rasio lancar minimum 1 kali pada tanggal 31 Desember 2018. Namun demikian kondisi ini tidak merupakan peristiwa cidera janji yang berkelanjutan yang menyebabkan pinjaman menjadi segera jatuh tempo. Disamping itu, Pada tanggal 31 Januari 2019, Perusahaan telah menerima surat persetujuan pengampunan atas tidak terpenuhinya rasio lancar minimum 1 kali dari agen sindikasi.

**21. BANK LOAN (continued)**

**b. Long-term bank loans (continued)**

**The Company**

**Syndicated credit agreement 2016**

On August 18, 2016, the Company signed Syndicated Credit Agreement with a Bank and a Non-Bank Financial Institution which Mandiri as a syndicated agent. The details of long-term bank loans of syndicated credit agreement as of December 31, 2019, are as follows:

Credit facilities is used for financing and/or refinancing airport and/or investment development projects.

This loan bears annual interest ranging from 8.50% to 9.25% in 2019 and ranging from 8.00% to 9.00% in 2018 and represent unsecured loans.

As of December 31, 2019, the Company has complied with all covenant in all of its long-term bank loan agreements.

The Company can not meet the current ratio requirement minimum 1 time as of December 31, 2018. However, this condition does not constitute an event of continuing breach of covenant which causes the loan to become due immediately. In addition, on January 31, 2019, the Company has received waiver approval latter of not fulfilled the current ratio of minimum 1 time from the syndicated agent.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**21. UTANG BANK (lanjutan)**

**b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

**Perjanjian kredit sindikasi (lanjutan)**

**Perjanjian kredit sindikasi BCA dan Mandiri  
2019**

Pada tanggal 23 Desember 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dimana BCA sebagai agen fasilitas. Rincian utang jangka panjang atas perjanjian kredit sindikasi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	Plafond/Plafonds	Penarikan/ Drawdown	Jumlah sisa fasilitas pinjaman/ Remaining amount of loan facilities	Jumlah pinjaman jangka panjang/ Amount of drawdown	
Mandiri	2.000.000.000	923.626.552	1.076.373.448	923.626.552	Mandiri
BCA	2.000.000.000	923.626.552	1.076.373.448	923.626.552	BCA
<b>Total</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>1.847.253.104</b>	<b>2.152.746.896</b>	<b>1.847.253.104</b>	<b>Total</b>

Fasilitas pinjaman pokok akan dibayar dalam 40 kali angsuran triwulanan mulai tanggal 23 Maret 2025, sedangkan bunga dibayar secara bulanan.

Pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan investasi dan belanja modal.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar LPS + margin dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

Jangka waktu perjanjian kredit sindikasi adalah 15 tahun terhitung sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2034 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 5 tahun.

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimum sebesar 1 kali
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 3 kali
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali untuk periode 2024 dan setelahnya.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam seluruh perjanjian utang bank jangka panjangnya.

**21. BANK LOAN (continued)**

**b. Long-term bank loans (continued)**

**The Company (continued)**

**Syndicated credit agreement (continued)**

**BCA and Mandiri syndicated credit  
agreement 2019**

On December 23, 2019, the Company signed Syndicated Credit Agreement which BCA as an facility agent. The details of long-term bank loans of syndicated credit agreement as of December 31, 2019, are as follows:

Loan facility is payable in 40 quarterly installments starting on March 23, 2025, while interest will be paid on monthly basis.

Credit facilities is used for investment financing and capital expenditure.

This loan bears annual interest LPS + margin and represent unsecured loan.

The Syndicated Loan Agreement is valid for 15 years from December 23, 2019 until December 23, 2034 including grace period of 5 years.

The Company is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- Minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1 time
- Maximum Debt Equity Ratio (DER) of 3 times
- Minimum Current Ratio of 1 time since 2024 and after.

As of December 31, 2019, the Company has complied with all covenant stated in all of its long-term bank loan agreements.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**21. UTANG BANK (lanjutan)**

**b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

**Perjanjian kredit sindikasi (lanjutan)**

**Perjanjian kredit sindikasi bank  
pembangunan daerah**

Pada tanggal 23 Desember 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi Bank Pembangunan Daerah dimana Bank DKI sebagai agen sindikasi. Rincian utang jangka panjang atas perjanjian kredit sindikasi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	Plafond/Plafonds	Penarikan/ Drawdown	Jumlah sisa fasilitas pinjaman/ Remaining amount of loan facilities	Jumlah pinjaman jangka panjang/ Amount of drawdown	
Bank Jatim	1.000.000.000	281.270.683	718.729.317	281.270.683	Bank Jatim
Bank DKI	700.000.000	196.889.478	503.110.522	196.889.478	Bank DKI
Bank Papua	500.000.000	140.635.341	359.364.659	140.635.341	Bank Papua
Bank DIY	200.000.000	56.254.137	143.745.863	56.254.137	Bank DIY
Bank Bali	100.000.000	28.127.068	71.872.932	28.127.068	Bank Bali
<b>Total</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>703.176.707</b>	<b>1.796.823.293</b>	<b>703.176.707</b>	<b>Total</b>

Fasilitas pinjaman pokok akan dibayar dalam 40 kali angsuran triwulanan mulai tanggal 23 Maret 2025, sedangkan bunga dibayar secara bulanan.

Pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan investasi rutin, pengembangan bandara *existing* maupun bandara baru yang dikelola Perusahaan tahun 2019 - 2022.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar LPS + margin dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

Jangka waktu perjanjian kredit sindikasi adalah 15 tahun dihitung sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2034 dengan masa *grace period* dan masa penarikan kredit masing-masing selama 5 tahun dan 3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kredit.

**21. BANK LOAN (continued)**

**b. Long-term bank loans (continued)**

**The Company (continued)**

**Syndicated credit agreement (continued)**

**Regional development banks syndicated  
credit agreement**

On December 23, 2019, the Company signed Regional Development Banks Syndicated Credit Agreement which Bank DKI as a syndicated agent. The details of long-term bank loans of syndicated credit agreement as of December 31, 2019, are as follows:

Loan facility is payable in 40 quarterly installments starting on March 23, 2025, while interest will be paid on monthly basis.

Credit facilities is used for routine investment financing, development of existing and new airport managed by the Company in 2019 - 2022.

This loan bears interest at annual rate of LPS + margin and represent unsecured loans.

The Syndicated Loan Agreement is valid for 15 years from December 23, 2019 until December 23, 2034 with grace period and drawdown period of 5 years and 3 years, respectively from the signing date of loan agreement.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**21. UTANG BANK (lanjutan)**

**b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

**Perjanjian kredit sindikasi (lanjutan)**

**Perjanjian kredit sindikasi bank  
pembangunan daerah**

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum sebesar 1 kali.
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 3 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam seluruh perjanjian utang bank jangka panjangnya.

**Pinjaman bilateral**

**Mandiri, BRI dan BNI**

Pada tanggal 26 Juli 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari Bank Mandiri sebesar Rp4.400.000.000.

	<b>Plafond/ Plafonds</b>	<b>Penarikan/ Drawdown</b>	<b>Jumlah sisa fasilitas pinjaman/ Remaining amount of loan facilities</b>	<b>Jumlah pinjaman jangka panjang/ Outstanding long-term loan</b>	
Mandiri	2.400.000.000	1.643.681.073	756.318.927	-	Mandiri
BRI	1.000.000.000	684.867.114	315.132.886	-	BRI
BNI	1.000.000.000	684.867.114	315.132.886	-	BNI
<b>Total</b>	<b>4.400.000.000</b>	<b>3.013.415.301</b>	<b>1.386.584.699</b>	-	<b>Total</b>

Pada tanggal 18 September 2013, Mandiri, BNI, BRI dan Perusahaan sepakat untuk mengalihkan sebagian porsi pembiayaan Mandiri kepada BNI dan BRI masing-masing senilai Rp1.000.000.000.

Pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali proyek pengembangan bandara dan/atau investasi.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 8,70% sampai dengan 9,45% pada tahun 2019 dan 8,20% sampai dengan 9,20% pada tahun 2018 dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

**21. BANK LOAN (continued)**

**b. Long-term bank loans (continued)**

**The Company (continued)**

**Syndicated credit agreement (continued)**

**Regional development banks syndicated  
credit agreement**

The Company is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* of 1 time.
- *Maximum Debt Equity Ratio (DER)* of 3 times.

As of December 31, 2019, the Company has complied with all covenant stated in all of its long-term bank loan agreements.

**Bilateral loan**

**Mandiri, BRI and BNI**

On July 26, 2013, the Company has obtained credit facilities from Bank Mandiri amounting to Rp4,400,000,000.

On September 18, 2013, Mandiri, BNI, BRI and the Company agreed to transfer Mandiri financing portion to BNI and BRI amounting to Rp1,000,000,000, respectively.

Credit facilities is used for financing and/or refinancing airport and/or investment development projects.

This loan bears annual interest ranging from 8.70% to 9.45% in 2019 and ranging from 8.20% to 9.20% in 2018 and represent unsecured loan.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**21. UTANG BANK (lanjutan)**

**b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

**Pinjaman bilateral (lanjutan)**

**Mandiri, BRI dan BNI (lanjutan)**

Jangka waktu perjanjian kredit adalah 7 tahun terhitung sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 dengan masa *grace period* dan masa penarikan kredit masing-masing selama 2 tahun dan 2 tahun 6 bulan.

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum sebesar 1 kali
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 3 kali
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 pembayaran pokok utang bank jangka panjang masing-masing sebesar Rp644.220.417 dan Rp644.220.417.

Berdasarkan perjanjian, jika Perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka pemberi pinjaman dapat sewaktu-waktu meminta pembayaran penuh atas seluruh saldo pinjaman. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam seluruh perjanjian utang bank jangka panjangnya.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan keuangan untuk menjaga *current ratio* minimum sebesar 1 kali. Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan menerima surat persetujuan untuk melepas persyaratan tersebut dari BNI dan BRI dan tidak memperoleh surat persetujuan dari Mandiri untuk melepaskan persyaratan tersebut pada tanggal tersebut. Sehubungan dengan tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan tersebut, pinjaman Mandiri sebesar Rp273.946.846 diklasifikasikan sebagai bagian jangka pendek pinjaman jangka panjang.

Pada tanggal 15 Januari 2019, Mandiri menyetujui untuk melepaskan persyaratan tersebut sehingga setelah periode laporan, pinjaman tersebut pada tahun 2019 diklasifikasikan kembali sebagai pinjaman jangka panjang.

**21. BANK LOAN (continued)**

**b. Long-term bank loans (continued)**

**The Company (continued)**

**Bilateral loan (continued)**

**Mandiri, BRI and BNI (continued)**

*The loan credit agreement is valid for 7 years from July 26, 2013 until July 25, 2020 with grace period and drawdown period of 2 years and 2 years 6 months, respectively.*

*The Company is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:*

- *Minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1 time*
- *Maximum Debt Equity Ratio (DER) of 3 times*
- *Minimum Current Ratio of 1 times*

*As of December 31, 2019 and 2018, principal payments of long-term bank loans amounted to Rp644,220,417 and Rp644,220,417, respectively.*

*Based on the credit agreement, if the Company cannot fulfill such covenants, lender may request the Company to repay all outstanding loan balances at any times. As of December 31, 2019, the Company has complied with all covenant stated in all of its long-term bank loan agreements.*

*As of December 31, 2018, the Company were unable to fulfill the financial covenant ratio to maintain current ratio minimum 1 time. As of December 31, 2018, the Company received approval letter from BNI and BRI to waive the related covenant, and did not receive an approval letter from Mandiri to waive such covenant on that date. In relation with the Company's inability to fulfill such covenants, Mandiri loan amounting to Rp273,946,846 are classified as current portion of long-term loans.*

*On January 15, 2019, Mandiri agreed to waive the related covenant and subsequently in 2019, the loan is classified as a long-term loan.*



**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**21. UTANG BANK (lanjutan)**

**b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

**Pinjaman bilateral (lanjutan)**

**SMI**

Pada tanggal 18 Desember 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari SMI dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp2.000.000.000.

	<b>Plafond/ Plafonds</b>	<b>Penarikan/ Drawdown</b>	<b>Jumlah sisa fasilitas pinjaman/ Remaining amount of loan facilities</b>	<b>Jumlah pinjaman jangka panjang/ Outstanding long-term loan</b>	
SMI	2.000.000.000	2.000.000.000	-	2.000.000.000	SMI
<b>Total</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>Total</b>

Hasil penerimaan dari pinjaman ini digunakan untuk membiayai pengembangan dan investasi rutin bandar udara yang dikelola oleh Perusahaan.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 8,25% sampai dengan 9,00% pada tahun 2019 dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

Jangka waktu kredit adalah 10 tahun sejak tanggal perjanjian kredit dengan opsi perpanjangan selama 5 tahun dengan masa *grace period* dan masa penarikan kredit masing-masing selama 5 tahun dan 3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kredit.

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum sebesar 1 kali
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 3 kali
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam seluruh perjanjian utang bank jangka panjangnya.

**21. BANK LOAN (continued)**

**b. Long-term bank loans (continued)**

**The Company (continued)**

**Bilateral loan (continued)**

**SMI**

On December 18, 2018, the Company obtained a term loan facility from SMI with maximum credit facility limit of Rp2,000,000,000.

The proceeds of the loan from this facility were used to finance development and routine investment of airports which are managed by the Company.

This loan bears annual interest ranging from 8.25% to 9.00% in 2019 and represent unsecured loan.

The loan period is 10 years started on the date of agreement with option to extend for 5 years with *grace period* and drawdown period of 5 years and 3 years, respectively from the signing date of loan agreement.

The Company is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Minimum Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of 1 time
- *Maximum Debt Equity Ratio* (DER) of 3 times
- *Minimum Current Ratio* of 1 times

As of December 31, 2019, the Company has complied with all covenant stated in all of its long-term bank loan agreements.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**21. UTANG BANK (lanjutan)**

**b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

**Pinjaman bilateral (lanjutan)**

**SMI (lanjutan)**

Perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan rasio lancar minimum 1 kali pada tanggal 31 Desember 2018. Namun demikian kondisi ini tidak merupakan peristiwa cidera janji yang berkelanjutan yang menyebabkan pinjaman menjadi segera jatuh tempo. Disamping itu, pada tanggal 24 Januari 2019, Perusahaan telah menerima surat persetujuan pembebasan atas tidak terpenuhinya rasio lancar minimum 1 kali dari SMI.

**BTN**

Pada tanggal 18 Desember 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari BTN jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp2.000.000.000.

	<b>Plafond/ Plafonds</b>	<b>Penarikan/ Drawdown</b>	<b>Jumlah sisa fasilitas pinjaman/ Remaining amount of loan facilities</b>	<b>Jumlah pinjaman jangka panjang/ Outstanding long-term loan</b>	
BTN	2.000.000.000	2.000.000.000	-	2.000.000.000	BTN
<b>Total</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>Total</b>

Pada tanggal 18 Desember 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari BTN jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp2.000.000.000. Hasil penerimaan dari pinjaman ini digunakan untuk membiayai aktivitas usaha, pengembangan bandara dan investasi rutin Perusahaan. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 8,25% sampai dengan 9,00% pada tahun 2019 dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

Jangka waktu perjanjian kredit adalah 15 tahun terhitung sejak 18 Desember 2018 sampai 17 Desember 2033 dengan masa *grace period* dan masa penarikan kredit masing-masing selama 5 tahun dan 3 tahun sejak ditandatangani perjanjian kredit.

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

**21. BANK LOAN (continued)**

**b. Long-term bank loans (continued)**

**The Company (continued)**

**Bilateral loan (continued)**

**SMI (continued)**

The Company were unable to meet the current ratio requirement minimum 1 time as of December 31, 2018. However, this condition does not constitute to a breach of continuing covenant which causes the loan to become due immediately. In addition, on January 24, 2019, the Company has received waiver approval letter of not fulfilled the current ratio of minimum 1 time from SMI.

**BTN**

Based on a loan agreement dated December 18, 2018, the Company obtained a term loan facility from BTN with maximum credit facility limit of Rp2,000,000,000.

Based on a loan agreement dated December 18, 2018, the Company obtained a term loan facility from BTN with maximum credit facility limit of Rp2,000,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to finance the Company's business operation, airport development and routine investment. This loan bears annual interest ranging from 8.25% to 9.00% in 2019 and represent unsecured loan.

The loan credit agreement is valid for 15 years from December 18, 2018 until December 17, 2033 with grace period and drawdown period of 5 years and 3 years, respectively from the signing date of loan agreement.

The Company is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**21. UTANG BANK (lanjutan)**

**b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

**Pinjaman bilateral (lanjutan)**

**BTN (lanjutan)**

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum sebesar 1 kali
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 3 kali
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam seluruh perjanjian utang bank jangka panjangnya.

Berdasarkan perjanjian, jika Perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka pemberi pinjaman dapat sewaktu-waktu meminta pembayaran penuh atas seluruh saldo pinjaman. Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan keuangan untuk menjaga *current ratio* minimum sebesar 1 kali. Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah mendapat persetujuan dari BTN untuk melepas persyaratan tersebut.

**BRIS**

Pada tanggal 18 Desember 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas plafon pembiayaan dari BRIS dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp1.000.000.000.

**21. BANK LOAN (continued)**

**b. Long-term bank loans (continued)**

**The Company (continued)**

**Bilateral loan (continued)**

**BTN (continued)**

- *Minimum Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of 1 time
- *Maximum Debt Equity Ratio* (DER) of 3 times
- *Minimum Current Ratio* of 1 time

As of December 31, 2019, the Company has complied with all covenant stated in all of its long-term bank loan agreements.

Based on credit agreement, if the Company cannot fulfill such covenants, lender may request the Company to repay all outstanding loan balances at any times. As of December 31, 2018, the Company was unable to fulfill the financial covenants ratio to maintain current ratio minimum 1 time. As of December 31, 2018, the Company receive approval from BTN to waive such covenant.

**BRIS**

On December 18, 2018, the Company obtained a term plafond loan facility from BRIS with maximum credit facility limit of Rp1,000,000,000.

	<b>Plafond/ Plafonds</b>	<b>Penarikan/ Drawdown</b>	<b>Jumlah sisa fasilitas pinjaman/ Remaining amount of loan facilities</b>	<b>Jumlah pinjaman jangka panjang/ Outstanding long-term loan</b>	
BRIS	1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	BRIS
<b>Total</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>Total</b>

Hasil penerimaan dari pinjaman ini digunakan untuk membiayai investasi rutin, pengembangan dan pembangunan bandar udara baru serta bandara lainnya sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang dikelola oleh Perusahaan.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 8,25% sampai dengan 9,00% pada tahun 2019 dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

The proceeds of the loan from this facility were used to finance routine investment, development and construction of new airports and other airport according to Work Plan and Company Budget (RKAP) which is managed by the Company.

This loan bears annual interest ranging from 8.25% to 9.00% in 2019 and represent unsecured loan.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**21. UTANG BANK (lanjutan)**

**b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

**Pinjaman bilateral (lanjutan)**

**BRIS (lanjutan)**

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum sebesar 1 kali
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 3 kali
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam seluruh perjanjian utang bank jangka panjangnya.

Berdasarkan perjanjian, jika Perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka pemberi pinjaman dapat sewaktu-waktu meminta pembayaran penuh atas seluruh saldo pinjaman. Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan keuangan untuk menjaga *current ratio* minimum sebesar 1 kali. Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah mendapat persetujuan dari BRIS untuk melepas persyaratan tersebut.

**BTN 2019**

Pada tanggal 26 Juli 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari BTN dengan maksimum fasilitas sebesar Rp1.000.000.000.

	<b>Plafond/ Plafonds</b>	<b>Penarikan/ Drawdown</b>	<b>Jumlah sisa fasilitas pinjaman/ Remaining amount of loan facilities</b>	<b>Jumlah pinjaman jangka panjang/ Outstanding long-term loan</b>	
BTN	1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	BTN
<b>Total</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>Total</b>

Fasilitas pinjaman pokok akan dibayar dalam 40 kali angsuran triwulanan mulai tanggal 7 September 2024, sedangkan bunga dibayar secara bulanan.

**21. BANK LOAN (continued)**

**b. Long-term bank loans (continued)**

**The Company (continued)**

**Bilateral loan (continued)**

**BRIS (continued)**

The Company is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1 time*
- *Maximum Debt Equity Ratio (DER) of 3 times*
- *Minimum Current Ratio of 1 time*

As of December 31, 2019, the Company has complied with all covenant stated in all of its long-term bank loan agreements.

Based on the credit agreement, if the Company cannot fulfill such covenants, lender may request the Company to repay all outstanding loan balances at any times. As of December 31, 2018, the Company was unable to fulfill the financial covenants ratio to maintain current ratio minimum 1 time. As of December 31, 2018, the Company receive approval from BRIS to waive such covenant.

**BTN 2019**

On July 26, 2019, the Company obtained a term loan facility from BTN with maximum credit facility limit of Rp1,000,000,000.

	<b>Plafond/ Plafonds</b>	<b>Penarikan/ Drawdown</b>	<b>Jumlah sisa fasilitas pinjaman/ Remaining amount of loan facilities</b>	<b>Jumlah pinjaman jangka panjang/ Outstanding long-term loan</b>	
BTN	1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	BTN
<b>Total</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>Total</b>

Loan facility is payable in 40 quarterly installments starting on September 7, 2024, while interest will be paid on monthly basis.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**21. UTANG BANK (lanjutan)**

**b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

**Pinjaman bilateral (lanjutan)**

**BTN 2019 (lanjutan)**

Hasil penerimaan dari pinjaman ini digunakan untuk membiayai aktivitas usaha, pengembangan bandara, *refinancing* dan investasi rutin Perusahaan. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 8,25% sampai dengan 8,75% pada tahun 2019 dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

Jangka waktu perjanjian kredit adalah 15 tahun dihitung sejak 26 Juli 2019 sampai 26 Juli 2034 dengan masa *grace period* dan masa penarikan kredit masing-masing selama 5 tahun dan 3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kredit.

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum sebesar 1 kali
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 3 kali
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali (jumlah kewajiban jangka pendek tidak termasuk akrual kewajiban kepada kontraktor yang belum diterbitkan tagihannya)

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam seluruh perjanjian utang bank jangka panjangnya.

**Mandiri**

Pada tanggal 26 September 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Mandiri dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp3.000.000.000.

**21. BANK LOAN (continued)**

**b. Long-term bank loans (continued)**

**The Company (continued)**

**Bilateral loan (continued)**

**BTN 2019 (continued)**

The proceeds of the loan from this facility were used to finance the Company's business operation, airport development, *refinancing* and routine investment. This loan bears annual interest ranging from 8.25% to 8.75% in 2019 and represent unsecured loan.

The loan credit agreement is valid for 15 years from July 26, 2019 until July 26, 2034 with *grace period* and *drawdown period* of 5 years and 3 years, respectively from the signing date of loan agreement.

The Company is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Minimum Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of 1 time
- *Maximum Debt Equity Ratio* (DER) of 3 times
- *Minimum Current Ratio* of 1 time (total current liabilities are not include accrual liabilities to contractors which not invoiced yet).

As of December 31, 2019, the Company has complied with all covenant stated in all of its long-term bank loan agreements.

**Mandiri**

Based on a loan agreement dated September 26, 2019, the Company obtained a term loan facility from Mandiri with maximum credit facility limit of Rp3,000,000,000.

	<b>Plafond/ Plafonds</b>	<b>Penarikan/ Drawdown</b>	<b>Jumlah sisa fasilitas pinjaman/ Remaining amount of loan facilities</b>	<b>Jumlah pinjaman jangka panjang/ Outstanding long-term loan</b>	
Mandiri	3.000.000.000	3.000.000.000	-	3.000.000.000	Mandiri
<b>Total</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>Total</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**21. UTANG BANK (lanjutan)**

**b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

**Pinjaman bilateral (lanjutan)**

**Mandiri (lanjutan)**

Fasilitas pinjaman pokok akan dibayar dalam 40 kali angsuran triwulanan mulai tanggal 23 Desember 2024, sedangkan bunga dibayar secara bulanan.

Hasil penerimaan dari pinjaman ini digunakan untuk membiayai belanja modal atas dasar Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2019 dan 2020. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 8,25% sampai dengan 8,50% pada tahun 2019 dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

Jangka waktu perjanjian kredit adalah 15 tahun terhitung sejak 26 September 2019 sampai 25 September 2034 dengan masa *grace period* dan masa penarikan kredit masing-masing selama 5 tahun dan 3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kredit.

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum sebesar 1 kali
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 3 kali
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali untuk periode 2024 dan setelahnya.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam seluruh perjanjian utang bank jangka panjangnya.

**BSM**

Pada tanggal 2 September 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan Musyarakah dari BSM dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp1.000.000.000.

**21. BANK LOAN (continued)**

**b. Long-term bank loans (continued)**

**The Company (continued)**

**Bilateral loan (continued)**

**Mandiri (continued)**

Loan facility is payable in 40 quarterly installments starting on December 23, 2024, while interest will be paid on monthly basis.

The proceeds of the loan from this facility were used to capital expenditure to 2019 and 2020 Work Plan and Company Budget (RKAP). This loan bears annual interest ranging from 8.25% to 8.50% in 2019 and represent unsecured loan.

The loan credit agreement is valid for 15 years from September 26, 2019 until September 25, 2034 with grace period and drawdown period of 5 years and 3 years, respectively from the signing date of loan agreement.

The Company is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* of 1 time
- *Maximum Debt Equity Ratio (DER)* of 3 times
- *Minimum Current Ratio* of 1 time for period 2024 and after.

As of December 31, 2019, the Company has complied with all covenant stated in all of its long-term bank loan agreements.

**BSM**

On September 2, 2019, the Company obtained a Musyarakah financing facility from BSM with maximum limit facility of Rp1,000,000,000.

	Plafond/ Plafonds	Penarikan/ Drawdown	Jumlah sisa fasilitas pinjaman/ Remaining amount of loan facilities	Jumlah pinjaman jangka panjang/ Outstanding long-term loan	
BSM	1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	BSM
<b>Total</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>Total</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**21. UTANG BANK (lanjutan)**

**b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

**BSM (lanjutan)**

Fasilitas pembiayaan pokok akan dibayar dalam 40 kali angsuran triwulanan mulai dari tanggal 23 Maret 2025, sedangkan bagi hasil dibayar secara bulanan.

Hasil penerimaan dari fasilitas ini digunakan untuk membiayai belanja modal atas dasar Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2019 dan 2020. Fasilitas ini merupakan fasilitas tanpa jaminan.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 8,25% sampai dengan 8,50% pada tahun 2019 dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

Jangka waktu perjanjian kredit adalah 15 tahun terhitung sejak 26 September 2019 sampai 25 September 2034 dengan masa grace period dan masa penarikan kredit masing-masing selama 5 tahun dan 3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kredit.

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian fasilitas pembiayaan sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum sebesar 1 kali
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 3 kali
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali untuk periode 2024 dan setelahnya.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam seluruh perjanjian fasilitas pembiayaan.

**Entitas Anak**

**BNI**

Pada tanggal 11 Desember 2014, APS memperoleh fasilitas *Kredit Term Loan* dengan pinjaman maksimum sebesar Rp100.000.000 yang digunakan sebagai pembiayaan kontrak penyewaan peralatan. Plafon fasilitas pinjaman ini mengalami kenaikan menjadi Rp185.000.000 pada tanggal 23 Oktober 2018 sesuai dengan surat persetujuan dari BNI No. BIN/2.1/263/R. Penarikan fasilitas pinjaman ini telah dilakukan beberapa kali oleh APS, antara lain sebagai berikut:

**21. BANK LOAN (continued)**

**b. Long-term bank loans (continued)**

**The Company (continued)**

**BSM (continued)**

*Financing facility is payable in 40 quarterly installments starting on March 23, 2025, while profit sharings will be paid on monthly basis.*

*The proceeds of the this facility were used for capital expenditure in 2019 and 2020 Work Plan and Company Budget (RKAP). This facility represents unsecured facility.*

*This loan bears annual interest ranging from 8.25% to 8.50% in 2019 and represent unsecured loan.*

*The loan credit agreement is valid for 15 years from September 26, 2019 until September 25, 2034 with grace period and drawdown period of 5 years and 3 years, respectively from the signing date of loan agreement.*

*The Company is also required to maintain certain financial ratios during the period of financing facility agreement as follows:*

- *Minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1 time*
- *Maximum Debt Equity Ratio (DER) of 3 times*
- *Minimum Current Ratio of 1 time for period 2024 and after.*

*As of December 31, 2019, the Company has complied with all covenant stated in the financing facility agreement.*

**Subsidiaries**

**BNI**

*On December 11, 2014, APS obtained Credit Term Loan's facility with maximum of Rp100,000,000 which used to financing rental equipments projects. The ceiling of the loan facility has increased to Rp185,000,000 on October 23, 2018 in accordance with the approval letter from BNI No.BIN/2.1/263/R. Withdrawal of this loan facility has been made several times by APS, which are as follows:*



**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**21. UTANG BANK (lanjutan)**

**b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)**

**Entitas Anak (lanjutan)**

**BNI (lanjutan)**

- Pada tanggal 4 Mei 2016, APS menarik pinjaman dari BNI sebesar Rp3.915.000. Pinjaman bersifat *aflopend* dan dijamin dengan beberapa aset kendaraan yang dimiliki oleh APS. Jangka waktu pinjaman ini adalah 33 bulan. Pinjaman jatuh tempo pada tanggal 16 Januari 2019 dengan suku bunga berkisar 9,75%-10,50% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp186.429 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 16 Januari 2019.
- Pada tanggal 26 Oktober 2016, APS memperoleh pinjaman dari BNI sebesar Rp40.785.000. Pinjaman bersifat *aflopend* dan dijamin dengan beberapa aset peralatan yang dimiliki oleh APS. Jangka waktu pinjaman ini adalah 58 bulan. Pinjaman jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2021 dengan suku bunga berkisar 9,75%-10,50% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman fasilitas ini masing-masing sebesar Rp17.732.826 dan Rp28.372.522.
- Pada tanggal 29 Desember 2016, APS memperoleh pinjaman dari BNI sebesar Rp5.026.000. Pinjaman bersifat *aflopend* dan dijamin dengan beberapa aset kendaraan yang dimiliki oleh APS. Jangka waktu pinjaman ini adalah 35 bulan. Pinjaman jatuh tempo pada tanggal 16 November 2019 dengan suku bunga berkisar 9,75%-10,50% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp1.626.059 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 16 November 2019.
- Pada tanggal 7 Februari 2017, APS memperoleh pinjaman dari BNI sebesar Rp6.284.000. Pinjaman bersifat *aflopend* dan dijamin dengan beberapa aset peralatan yang dimiliki oleh APS. Jangka waktu pinjaman ini adalah 32 bulan. Pinjaman jatuh tempo pada tanggal 16 September 2019 dengan suku bunga berkisar 9,75%-10,50% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp1.824.387 dan telah dilunasi seluruhnya pada 16 September 2019.

**21. BANK LOAN (continued)**

**b. Long-term bank loans (continued)**

**Subsidiaries (continued)**

**BNI (continued)**

- On May 4, 2016, APS withdraws loan from BNI with amount of Rp3,915,000. This loan is an *aflopend* and secured by some vehicles assets owned by APS. The term of this loan is 33 months and will be due on January 16, 2019 and bear interest at rates ranging 9.75%-10.50% per annum. As of December 31, 2018, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp186,429 and has fully repaid on January 16, 2019.
- On October 26, 2016, APS obtained loan from BNI with amount of Rp40,785,000. This loan is an *aflopend* and secured by some equipments assets owned by APS. The term of this loan is 58 months. This loan will be due on August 16, 2021 and bear interest at rates ranging 9.75%-10.50% per annum. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp17,732,826 and Rp28,372,522, respectively.
- On December 29, 2016, APS obtained loan from BNI with amount of Rp5,026,000. This loan is an *aflopend* and secured by some vehicles assets owned by APS. The term of this loan is 35 months. This loan will be due on November 16, 2019 and bear interest at rates ranging 9.75%-10.50% per annum. As of December 31, 2018, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp1,626,059 and has fully repaid on November 16, 2019.
- On February 7, 2017, APS obtained loan from BNI with amount of Rp6,284,000. This loan is an *aflopend* and secured by some equipments assets owned by APS. The term of this loan is 32 months. This loan will be due on September 16, 2019 and bear interest at rates ranging 9.75%-10.50% per annum. As of December 31, 2018, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp1,824,387 and has fully repaid on September 16, 2019.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**21. UTANG BANK (lanjutan)**

**b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)**

**Entitas Anak (lanjutan)**

**BNI (lanjutan)**

- Pada tanggal 4 Juni 2018, APS memperoleh pinjaman dari BNI sebesar Rp5.134.000. dengan suku bunga 9,75% per tahun. Pinjaman bersifat *aflopend* dan dijamin dengan beberapa aset kendaraan yang dimiliki oleh APS. Jangka waktu pinjaman ini adalah 30 bulan. Pinjaman jatuh akan tempo pada tanggal 16 November 2022. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp1.881.800 dan Rp3.936.200.
- Pada tanggal 4 Juni 2018, APS memperoleh pinjaman dari BNI sebesar Rp9.600.000 dengan suku bunga 9,75% per tahun. Pinjaman bersifat *aflopend* dan dijamin dengan beberapa aset peralatan yang dimiliki oleh APS. Jangka waktu pinjaman ini adalah 54 bulan. Pinjaman jatuh akan tempo pada tanggal 16 November 2022. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp6.222.222 dan Rp8.355.555.
- Pada tanggal 4 Juni 2018, APS memperoleh pinjaman dari BNI sebesar Rp13.000.000 dengan suku bunga 9,75% per tahun. Pinjaman bersifat *aflopend* dan dijamin dengan beberapa aset kendaraan yang dimiliki oleh APS. Jangka waktu pinjaman ini adalah 34 bulan. Pinjaman jatuh akan tempo pada tanggal 16 Maret 2021. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp5.735.294 dan Rp10.323.529.
- Pada 6 Desember 2019, APS memperoleh pinjaman dari BNI sebesar Rp29.431.000 dengan suku bunga 10% per tahun. Pinjaman bersifat *aflopend* dan dijamin dengan beberapa peralatan yang dimiliki oleh APS. Jangka waktu pinjaman ini adalah 57 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp22.111.923.

**21. BANK LOAN (continued)**

**b. Long-term bank loans (continued)**

**Subsidiaries (continued)**

**BNI (continued)**

- On June 4, 2018, APS obtained loan from BNI with amount of Rp5,134,000 with bear interest 9.75% per annum. This loan is an *aflopend* and secured by some vehicles assets owned by APS. The term of this loan is 30 months. This loan will be due on November 16, 2022. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp1,881,800 and Rp3,936,200, respectively.
- On June 4, 2018, APS obtained loan from BNI with amount of Rp9,600,000 with bear interest 9.75% per annum. This loan is an *aflopend* and secured by some equipments assets owned by APS. The term of this loan is 54 months. This loan will be due on November 16, 2022. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp6,222,222 and Rp8,355,555, respectively.
- On June 4, 2018, APS obtained loan from BNI with amount of Rp13,000,000 with bear interest 9.75% per annum. This loan is an *aflopend* and secured by some vehicles assets owned by APS. The term of this loan is 34 months. This loan will be due on March 16, 2021. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp5,735,294 and Rp10,323,529, respectively.
- On December 6, 2019, APS obtained loan from BNI with amount of Rp29,431,000 with bear interest 10% per annum. This loan is an *aflopend* and secured by some equipments assets owned by APS. The term of this loan is 57 months and will be due on August 31, 2023. As of December 31, 2019, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp22,111,923.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**21. UTANG BANK (lanjutan)**

**b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)**

**Entitas Anak (lanjutan)**

**BNI (lanjutan)**

APS diwajibkan oleh BNI untuk menjaga rasio keuangan yaitu rasio lancar minimum sebesar 1 kali, *debt service coverage* minimum sebesar 1 kali, *debt to equity ratio* (DER) maksimal 2,50 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2019, APS telah memenuhi semua persyaratan pinjaman di atas.

**BSM**

APS memperoleh beberapa fasilitas pembiayaan Murabahah dari BSM sebagai berikut:

- Pada 7 November 2014, APS memperoleh fasilitas pembiayaan dengan skema Murabahah sebesar Rp3.575.200 dengan margin sebesar 13% efektif *single price* per tahun dengan jangka waktu 10 tahun. Agunan atas pinjaman ini adalah 1 unit ruko di Denpasar. Fasilitas pembiayaan akan jatuh akan tempo pada tanggal 20 November 2024. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman fasilitas ini masing-masing sebesar Rp2.318.160 dan Rp2.634.652.
- Pada tanggal 28 Oktober 2015, APS memperoleh pembiayaan Murabahah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp3.650.000 dengan margin 12% efektif per tahun dengan jangka waktu 10 tahun. Agunan atas pinjaman ini adalah 2 unit ruko yang terdapat di Denpasar dan Makassar. Fasilitas pembiayaan akan jatuh akan tempo pada tanggal 16 dan 20 November 2025. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman fasilitas ini masing-masing sebesar Rp2.653.006 dan Rp2.943.802.
- Pada tanggal 22 Agustus 2016 dari BSM, APS memperoleh pembiayaan Murabahah sebesar Rp1.800.000 dengan margin sebesar 11,50% per tahun dengan jangka waktu 10 tahun. Agunan atas pinjaman ini adalah 1 unit ruko milik APS yang terdapat di Balikpapan. Fasilitas pembiayaan akan jatuh akan tempo pada tanggal 20 Agustus 2026. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.409.479 dan Rp1.542.636.

**21. BANK LOAN (continued)**

**b. Long-term bank loans (continued)**

**Subsidiaries (continued)**

**BNI (continued)**

APS is required by BNI to maintain the financial ratios, minimum current ratio of 1 time, debt service coverage at least 1 time, debt to equity ratio (DER) maximum 2.50 times.

As of December 31, 2019, APS has complied with all of the above loan covenants.

**BSM**

APS obtained several Murabahah financing facilities from BSM as follows:

- On November 7, 2014, APS obtained financing facility of the Murabahah scheme amounted to Rp3,575,200 with margin at 13% effective single price per annum and a period of 10 years. Loan's collateral is 1 unit shop house in Denpasar. Financing facility will be due on November 20, 2024. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balances of these loan facilities amounted to Rp2,318,160 and Rp2,634,652, respectively.
- On October 28, 2015, APS obtained financing facility of the Murabahah scheme totaling of Rp3,650,000 with margin 12% effective per annum and 10 year term. Loan's collateral of this loan are 2 unit shop houses in Denpasar and Makassar. Financing facility will be due on November 16 and 20, 2025. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balances of these loan facilities amounted to Rp2,653,006 and Rp2,943,802, respectively.
- On August 22, 2016, APS obtained Murabahah financing amounting to Rp1,800,000 with bear margin of 11.50% per annum and a period of 10 years. Loan's collateral of this loan are 1 unit shop house owned by APS in Balikpapan. Financing facility will be due on August 20, 2026. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balances of these loan facilities amounted to Rp1,409,079 and Rp1,542,636, respectively.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**21. UTANG BANK (lanjutan)**

**b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)**

**Entitas Anak (lanjutan)**

**BSM (lanjutan)**

- Pada tanggal 7 Agustus 2017, APS memperoleh fasilitas pembiayaan Murabahah sebesar Rp573.600 dengan margin sebesar 11,50% per tahun dengan jangka waktu 10 tahun. Agunan atas pinjaman ini berupa sebidang tanah yang dimiliki APS di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman fasilitas ini masing-masing sebesar Rp491.587 dan Rp529.430.

APS memperoleh beberapa fasilitas Pembiayaan Investasi dengan skim *Musyarakah Mutanaqishah* dari BSM sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Mei 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp112.512.000 dengan nisbah bagi hasil 11,14% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 60 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2024 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan.
- Pada tanggal 31 Mei 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp15.949.000 dengan nisbah bagi hasil 14,20% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 60 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2024 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan.
- Pada tanggal 28 Juni 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp7.762.000 dan Rp807.000 dengan nisbah bagi hasil 12,06% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 36 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2022 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan.
- Pada tanggal 31 Juli 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp2.109.000 dengan nisbah bagi hasil 10,93% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 58 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2024 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 7 bulan.

**21. BANK LOAN (continued)**

**b. Long-term bank loans (continued)**

**Subsidiaries (continued)**

**BSM (continued)**

- On August 7, 2017, APS obtained Murabahah financing facility amounting to Rp573,600 with margin at 11.50% per annum and a period of 10 years. Loan's collateral of this loan are land owned by APS in Banjarbaru, Kalimantan Selatan. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balances of these loan facilities amounted to Rp491,587 and Rp529,430, respectively.

APS obtained several *Musyarakah Mutanaqishah* financing investment facilities from BSM as follows:

- On May 31, 2019, APS obtained facility amounting to Rp112,512,000 with profit sharing ratio at 11.14% per annum. The term of this financing is 60 months with due date on May 20, 2024 including 9 months grace period.
- On May 31, 2019, APS obtained facility amounting to Rp15,949,000 with profit sharing ratio at 14.20%. The term of this financing is 60 months with due date on May 20, 2024 including 9 months grace period.
- On June 28, 2019, APS obtained facility amounting to Rp7,762,000 and Rp807,000 with profit sharing ratio at 12.06% per annum. The term of this financing is 36 months with due date on June 28, 2022 including 9 months grace period.
- On July 31, 2019, APS obtained facility amounting to Rp2,109,000 with profit sharing ratio at 10.93% per annum. The term of this financing is 58 months with due date on May 20, 2024 including 7 months grace period.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**21. UTANG BANK (lanjutan)**

**b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)**

**Entitas Anak (lanjutan)**

**BSM (lanjutan)**

- Pada tanggal 31 Juli 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp3.708.000 dengan nisbah bagi hasil 14,20% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 60 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2024 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan.
- Pada tanggal 31 Juli 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp1.572.000 dengan nisbah bagi hasil 12.16% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 34 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2022 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan.
- Pada tanggal 19 September 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp27.807.000 dengan nisbah bagi hasil 14,08% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 58 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2024 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 7 bulan.
- Pada tanggal 31 Oktober 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp23.551.000 dengan nisbah bagi hasil 14,22% per tahun. Jangka waktu 57 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2024 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan.
- Pada tanggal 31 Oktober 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp5.283.000 dengan nisbah bagi hasil 11,13% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 60 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2024 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan.

Seluruh fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan seluruh obyek investasi yang dibiayai bank dan piutang usaha APS kepada Bank sebesar Rp50.000.000.

APS diwajibkan oleh BSM untuk menjaga rasio keuangan yaitu rasio lancar minimum sebesar 1 kali, *debt service coverage* minimum sebesar 1 kali, *debt to equity ratio* (DER) maksimal 3 kali.

**21. BANK LOAN (continued)**

**b. Long-term bank loans (continued)**

**Subsidiaries (continued)**

**BSM (continued)**

- On July 31, 2019, APS obtained facility amounting to Rp3,708,000 with profit sharing ratio at 14.20% per annum. The term of this financing is 60 months with due date on July 20, 2024 including 9 months grace period.
- On July 31, 2019, APS obtained facility amounting to Rp1,572,000 with profit sharing ratio 12.16% per annum. The term of this financing is 34 months term with due date on May 20, 2022 including 9 months grace period.
- On September 19, 2019, APS obtained facility amounting to Rp27,807,000 with profit sharing ratio at 14.08% per annum. The term of this financing is 58 months with due date on July 20, 2024 including 7 months grace period.
- On October 31, 2019, APS obtained facility amounting to Rp23,551,000 with profit sharing ratio 14.22% per annum. The term of this financing is 57 months with due date on July 20, 2024 with grace period of 9 months.
- On October 31, 2019, APS obtained facility amounting to Rp5,283,000 with profit sharing ratio at 11.13% per annum. The term of this financing is 60 months with due date on October 20, 2024 with grace period of 9 months.

*This facility is secured by all objected financing investment and account receivables APS to the Bank amounted Rp50,000,000.*

*APS is required by BSM to maintain the financial ratios, minimum current ratio of 1 time, debt service coverage at least 1 time, debt to equity ratio (DER) maximum 3 times.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**21. UTANG BANK (lanjutan)**

**b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)**

**Entitas Anak (lanjutan)**

**BSM (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2019, APS telah memenuhi semua persyaratan pinjaman di atas.

**Muamalat**

Pada tanggal 1 Agustus 2019, APP memperoleh fasilitas Pembiayaan *Musyarakah* dari Muamalat sebesar Rp15.500.000 dengan suku bunga 9,50% per tahun. Pinjaman ini bersifat *revolving* dan dijamin dengan aset garbarata yang dimiliki oleh APP. Jangka waktu pembiayaan selama 48 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pinjaman fasilitas ini sebesar Rp14.420.000.

APP diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis apabila membagikan dividen kepada pemegang saham.

**21. BANK LOAN (continued)**

**b. Long-term bank loans (continued)**

**Subsidiaries (continued)**

**BSM (continued)**

As of December 31, 2019, APS has complied with all of the above loan covenants.

**Muamalat**

On August 1, 2019, APP obtained *Musyarakah* financing facility from Muamalat with amount of Rp15,500,000 with bear interest 9,50% per annum. This facility is a revolving and secured by assets (*Aviobridges*) owned by APP. The term of this facility is 48 months and will be due on August 1, 2023. As of December 31, 2019, the outstanding balances of these financing facility amounted to Rp14,420,000.

APP is required to made written-notice once there are any dividend distributed to shareholders.

**22. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH**

**22. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARAH**

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Utang obligasi	2.500.000.000	2.500.000.000	Bonds payable
Utang sukuk ijarah	500.000.000	500.000.000	Sukuk ijarah payable
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(5.103.677)	(6.299.172)	Unamortized cost of loans
<b>Total</b>	<b>2.994.896.323</b>	<b>2.993.700.828</b>	<b>Total</b>
Mutasi biaya pinjaman yang belum diamortisasi:			The movements in the unamortized:
Saldo awal	6.299.172	7.525.040	Beginning balance
Biaya amortisasi tahun berjalan			Current year amortized cost
Obligasi	(963.570)	(993.943)	Bonds
Sukuk ijarah	(231.925)	(231.925)	Sukuk ijarah
<b>Saldo akhir</b>	<b>5.103.677</b>	<b>6.299.172</b>	<b>Ending balance</b>

Pada tanggal 10 November 2016, Perusahaan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

On November 10, 2016, the Company has obtained an effective statement from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on the issuance of Bonds I Angkasa Pura I Year 2016 with detail as follows:

	Obligasi/Bonds			
	Nominal	Bunga per Tahun/ Interest per Annum	Jangka Waktu / Periods	
Seri A	622.000.000	8,10 %	5 tahun/years	Seri A
Seri B	389.000.000	8,40 %	7 tahun/years	Seri B
Seri C	1.489.000.000	8,55 %	10 tahun/years	Seri C
<b>Total</b>	<b>2.500.000.000</b>			<b>Total</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**22. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH  
(lanjutan)**

**22. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARAH  
(continued)**

	Sukuk Ijarah/Sukuk ijarah			
	Nominal	Imbalan per Tahun/ Benefit per Annum	Jangka Waktu/ Periods	
Seri A	268.000.000	21.708.000	5 tahun/years	Seri A
Seri B	55.000.000	4.620.000	7 tahun/years	Seri B
Seri C	177.000.000	15.133.500	10 tahun/years	Seri C
<b>Total</b>	<b>500.000.000</b>	<b>41.461.500</b>		<b>Total</b>

Berdasarkan perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat utang obligasi dan utang sukuk ijarah, 75% dana yang diperoleh akan digunakan untuk pengembangan 5 (lima) bandara yaitu bandara baru Yogyakarta, Ahmad Yani-Semarang, Syamsudin Noor Banjarmasin, Juanda Surabaya dan Sultan Hasanudin Makassar.

Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk as Trustee for bonds payable and sukuk ijarah, 75% of fund received will be used for the development of 5 (five) airports there are the new airport in Yogyakarta, Ahmad Yani-Semarang, Banjarmasin Syamsudin Noor, Juanda Surabaya and Makassar Sultan Hasanuddin.

Obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi baik langsung maupun tidak langsung dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Bonds and sukuk ijarah are not secured by specific collateral, but either directly or indirectly secured by all assets of the Company wealth, goods moveable or immovable, either existing or that will exist in the future.

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

The Company is also required to maintain certain financial ratios during the bonds payable ratio as follows:

- Perbandingan aset lancar terhadap kewajiban lancar tidak kurang dari 1 kali.
- Perbandingan total pinjaman terhadap total ekuitas tidak lebih dari 3 kali.
- Perbandingan penghasilan sebelum beban pajak penghasilan, penyusutan dan amortisasi terhadap beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1 kali.

- Ratio of current assets to current liabilities not less than 1 time.
- Ratio of total debt to total equity not more than 3 times.
- Ratio of earnings before income tax, depreciation and amortization to interest expenses not less than 1 time.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah memenuhi semua kewajiban dalam perjanjiannya dengan Wali Amanat dan tidak ada peristiwa gagal silang sehubungan dengan utang jangka panjang lainnya.

As of December 31, 2019, the Company has complied with all covenant required by its agreement with the Trustee and there is no cross default incurred in relation with other long-term loans.

Perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan aset lancar terhadap kewajiban lancar tidak kurang dari 1 kali pada tanggal 31 Desember 2018. Namun demikian kondisi ini tidak menyebabkan kewajiban menjadi segera jatuh tempo. Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perusahaan diberikan kesempatan untuk memperbaiki rasio lancar dalam kurun waktu paling lama 90 hari setelah diterima teguran tertulis dari Wali Amanat, dan Perusahaan memiliki keyakinan untuk dapat memperbaiki rasio lancar selama periode tersebut.

The Company were unable to meet the ratio of current assets to current liabilities not less than 1 time as of December 31, 2018. However, this condition does not constitute an event of continuing breach of covenant which causes the loan to become due immediately. Based on a trustee agreement, the Company is given the opportunity to improve the current ratio within a maximum period of 90 days after receipt of a written warning from the Trustee, and the Company is reasonably certain in improving the the current ratio during such period.



**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA**

**23. OTHER LONG-TERM LIABILITIES**

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Utang jangka panjang lainnya:			Other long-term liabilities:
Jaminan pelanggan	284.446.771	58.686.328	Customer deposit
Pendapatan diterima di muka	100.971.111	106.042.529	Unearned revenue
Jaminan usaha pemasok	2.571.343	3.746.528	Vendor deposit
Lainnya	982.236	2.053.469	Others
<b>Total</b>	<b>388.971.461</b>	<b>170.528.854</b>	<b>Total</b>

Utang jaminan pelanggan terutama merupakan jaminan yang diterima Perusahaan dari para penyewa atas fasilitas pendukung bandara. Utang jaminan tersebut akan dibayar kembali kepada penyewa apabila hubungan sewa menyewa dan pemakaian fasilitas berakhir.

*Customer deposit mainly represents deposit received from the tenant on the airport support facilities. Customer deposit will be paid back to the tenant when the lease relationship and the use of the facility expires.*

Utang jangka panjang lainnya - pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang diterima di muka Perusahaan dari PT Duta Paramindo Sejahtera (DPS) atas penyerahan penggunaan tanah dengan hak pengelolaan seluas 129.216 m<sup>2</sup> milik Perusahaan yang terletak di Jalan Pramukasari, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih - Jakarta Pusat. Tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dan DPS tanggal 21 Oktober 2009 dengan jangka waktu perjanjian 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 20 tahun. Atas penyerahan penggunaan tanah dengan hak pengelolaan tersebut, Perusahaan menerima uang penggantian dari DPS sebesar Rp173.407.872 (termasuk PPN).

*Other long-term liabilities - unearned revenue represent unearned revenue of the Company from PT Duta Paramindo Sejahtera (DPS) due to handover of land with use management rights of 129,216m<sup>2</sup> owned by the Company located on Jalan Pramukasari, Rawasari Village, Cempaka Putih District - Central Jakarta. The land will be used for the construction of simple flats belonging (rusunami) based on the agreement between the Company and DPS on October 21, 2009 with term of the agreement is 30 years and can be extended for an additional period of 20 years. For the handover of land with use management rights, the Company received compensation from DPS amounting to Rp173,407,872 (including VAT).*

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN**

**24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES**

Perusahaan menunjuk PT Milliman Indonesia dan PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuaria (KIS), semuanya aktuaris independen, untuk melakukan perhitungan aktuarial liabilitas imbalan kerja karyawan yang terdiri dari program tunjangan hari tua, tunjangan perumahan, penghargaan pengabdian, kesehatan pensiun dan dana pensiun masing-masing untuk tahun 2019 dan 2018.

*The Company has appointed PT Milliman Indonesia and Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuaria (KIS), independent actuaries, to conduct the actuarial calculation of employee benefits liabilities consist of retirement allowance, housing allowance, employee appreciation, retiree health and pension fund for period 2019 and 2018, respectively.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
(lanjutan)**

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dihitung dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* oleh aktuaris independen tersebut di atas, masing-masing berdasarkan laporannya pada tanggal 17 Januari 2020 dan 7 Januari 2019.

**24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

The employee benefits liabilities as of December 31, 2019 and 2018 were calculated using the *projected-unit-credit* method by the independent actuaries, based on its reports dated January 17, 2020 and January 7, 2019, respectively.

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Perusahaan			<i>The Company</i>
Tunjangan hari tua	79.846.505	-	<i>Retirement allowance</i>
Tunjangan perumahan	22.513.726	20.713.486	<i>Housing allowance</i>
Penghargaan pengabdian	22.482.051	12.667.287	<i>Employee appreciation</i>
Kesehatan pensiun	58.181.220	-	<i>Retirement health</i>
Dana pensiun	229.669.098	252.845.361	<i>Pension fund</i>
Sub-total	412.692.600	286.226.134	<i>Subtotal</i>
Entitas anak	24.600.606	16.168.841	<i>Subsidiaries</i>
<b>Total</b>	<b>437.293.206</b>	<b>302.394.975</b>	<b>Total</b>

**a. Tunjangan hari tua**

Tunjangan hari tua diberikan kepada karyawan yang diberhentikan dan janda/duda dari karyawan yang meninggal dunia. Program tunjangan hari tua ini dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I (YAKKAP I).

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas tunjangan hari tua adalah sebagai berikut:

**a. Retirement allowance**

Retirement allowance are given to employees who are dismissed and to widows/widowers of employees who die. Retirement allowance is managed by the Angkasa Pura I Employee Welfare Foundation (YAKKAP I).

The actuarial assumptions used to determine retirement allowance expenses and liabilities are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Tingkat diskonto	7,60%	8,60%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Tunjangan Hari Tua (PhdTHT)	3,00%	3,00%	<i>Basic Income Retirement Allowance (PhdTHT) increase</i>
Tingkat mortalitas	TMI III 2011	TMI III 2011	<i>Mortality rate</i>
Tingkat cacat	1%	1%	<i>Disability rate</i>
Umur pensiun	56 tahun/56 years	56 tahun/56 years	<i>Retirement age</i>
Tingkat mengundurkan diri	0,7% pada usia 20 tahun sampai dengan 45 tahun dan sebesar 0,1% pada usia 46 tahun sampai dengan 55 tahun/ 0,7% at 20 years until 45 years old and 0,1% at 46 years until 55 years		<i>Resignation rate</i>

Nilai kini liabilitas dan nilai wajar aset program pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah:

The present value of liabilities and fair value of plan assets as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas	566.958.296	463.299.359	<i>Present value of liabilities</i>
Nilai wajar aset program	(487.111.791)	(518.347.376)	<i>Fair value of plan assets</i>
Defisit (surplus)	79.846.505	(55.048.017)	<i>Deficit (surplus)</i>
Dampak batas aset	-	55.048.017	<i>Effect of asset ceiling</i>
<b>Liabilitas yang diakui</b>	<b>79.846.505</b>	<b>-</b>	<b>Recognized liabilities</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
(lanjutan)**

**24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

**a. Tunjangan hari tua (lanjutan)**

**a. Retirement allowance (continued)**

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini  
liabilitas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending  
balance of present value of liabilities is as  
follows:

		<b>31 Desember/December 31,</b>		
		<b>2019</b>	<b>2018</b>	
Nilai kini liabilitas awal tahun	463.299.359	523.984.744		<i>Present value of liabilities beginning of year</i>
Biaya jasa kini	36.089.958	35.946.947		<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	36.562.391	35.672.734		<i>Interest cost</i>
Iuran peserta program	6.205.562	6.076.574		<i>Plan participant's contributions</i>
Pembayaran imbalan	(76.310.534)	(57.060.202)		<i>Benefits paid</i>
Kerugian (keuntungan) aktuarial	101.111.560	(81.321.438)		<i>Actuarial loss (gain)</i>
<b>Nilai kini liabilitas akhir tahun</b>	<b>566.958.296</b>	<b>463.299.359</b>		<b><i>Present value of liabilities end of year</i></b>

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai  
wajar aset program adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending  
balance of fair value of plan assets is as follows:

		<b>31 Desember/December 31,</b>		
		<b>2019</b>	<b>2018</b>	
Nilai wajar aset program awal tahun	518.347.376	323.327.475		<i>Fair value of plan assets beginning of year</i>
Iuran peserta program	6.205.562	6.076.574		<i>Plan participant's contributions</i>
Iuran pemberi kerja	46.657.343	206.583.073		<i>Employer's contributions</i>
Imbal hasil aset program	43.569.626	32.090.176		<i>Return on plan assets</i>
Pembayaran imbalan	(76.310.534)	(57.060.202)		<i>Benefit paid</i>
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(51.357.580)	7.330.280		<i>Actuarial loss (gain)</i>
<b>Nilai wajar aset program akhir tahun</b>	<b>487.111.793</b>	<b>518.347.376</b>		<b><i>Fair value of plan assets end of year</i></b>

Rincian beban yang diakui dalam laporan laba  
rugi dan penghasilan komprehensif lain  
konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of expenses recognized in the  
consolidated statements of profit or loss and  
other comprehensive income are as follows:

		<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31</b>		
		<b>2019</b>	<b>2018</b>	
Biaya jasa kini	36.089.959	35.946.947		<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	36.562.391	35.672.734		<i>Interest cost</i>
Ekspektasi hasil program	(43.569.625)	(32.090.176)		<i>Expectations plan assets</i>
<b>Total</b>	<b>29.082.725</b>	<b>39.529.505</b>		<b><i>Total</i></b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
(lanjutan)**

**24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

**a. Tunjangan hari tua (lanjutan)**

**a. Retirement allowance (continued)**

Rekonsiliasi saldo pengukuran kembali pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation of re-measurement in the consolidated statements of financial position are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Jumlah pengukuran kembali awal tahun	(106.044.999)	(72.441.298)	Re-measurement amount beginning of year
Kerugian (keuntungan) aktuarial	101.111.560	(88.651.718)	Actuarial loss (gain)
Dampak batas aset	(55.048.017)	55.048.017	Effect of asset ceiling
<b>Akumulasi jumlah pengukuran kembali</b>	<b>(59.981.456)</b>	<b>(106.044.999)</b>	<b>Accumulated amount of re-measurements</b>

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of the liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Liabilitas awal tahun	-	200.657.269	Liabilities beginning of year
Beban yang diakui dalam laba rugi	29.082.725	39.529.505	Expense recognized in profit or loss
Beban (penghasilan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	152.469.141	(88.651.718)	Expense (income) recognized in the other comprehensive income
Dampak batas aset	(55.048.017)	55.048.017	Effect of asset ceiling
Pembayaran	(46.657.343)	(206.583.073)	Contribution
<b>Liabilitas akhir tahun</b>	<b>79.846.506</b>	<b>-</b>	<b>Liabilities end of year</b>

Nilai kini liabilitas akhir setelah efek analisa sensitivitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The present values of liabilities after the effect of sensitivity analysis on December 31, 2019 are as follows:

Analisis sensitivitas Nilai kini kewajiban imbalan pasti		Sensitivity analysis PV defined benefits obligations	
			Discount Rate Assumptions
Asumsi Tingkat Diskonto			
+ 1,00%	(42.169.145)		+ 1.00%
- 1,00%	49.076.978		- 1.00%
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji			Salary Increment Assumptions
+ 1,00%	56.915.588		+ 1.00%
- 1,00%	(49.383.653)		- 1.00%

Komposisi pengelolaan dana atas aset ditempatkan adalah pada deposito berjangka, piutang pinjaman, reksadana, obligasi dan aset lainnya.

The composition of management of planned asset are on time deposits, loan receivables, mutual funds, bonds and other assets.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
(lanjutan)**

**24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

**b. Tunjangan perumahan**

**b. Housing allowance**

Sesuai ketentuan Perusahaan, karyawan yang telah bekerja secara terus menerus di Perusahaan selama 20 tahun diberikan tunjangan perumahan.

Based on the Company's provisions, employees who have worked continuously for 20 years are given a housing allowance.

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas tunjangan perumahan adalah sebagai berikut:

The actuarial assumptions used to determine housing allowance expenses and liabilities are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Tingkat diskonto	7,3%	8,70%	Discount rate
Tingkat mortalita	TMI III 2011	TMI III 2011	Mortality rate
Tingkat cacat	1%	1%	Disability rate
Umur pensiun	56 tahun/56 years	56 tahun/56 years	Retirement age
Tingkat mengundurkan diri	0,7% pada usia 20 tahun sampai dengan 45 tahun dan sebesar 0,1% pada usia 46 tahun sampai dengan 55 tahun/ 0,7% at 20 years until 45 years old and 0,1% at 46 years until 55 years		Resignation rate

Nilai kini liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah:

The present value of liabilities as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas	22.513.726	20.713.486	Present value of liabilities
<b>Liabilitas yang diakui</b>	<b>22.513.726</b>	<b>20.713.486</b>	<b>Recognized liabilities</b>

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas awal tahun	20.713.486	13.079.459	Present value of liabilities beginning of year
Biaya jasa kini	2.269.951	2.570.209	Current service cost
Biaya bunga	1.796.335	644.114	Interest cost
Pembayaran imbalan	(131.904)	(8.266.850)	Benefits paid
Dampak perubahan manfaat	-	7.902.310	The impact of change of benefit
Kerugian aktuarial	(2.134.142)	4.784.244	Actuarial loss
<b>Nilai kini liabilitas akhir tahun</b>	<b>22.513.726</b>	<b>20.713.486</b>	<b>Present value of liabilities end of year</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
(lanjutan)**

**24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

**b. Tunjangan perumahan (lanjutan)**

**b. Housing allowance (continued)**

Rincian beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of expenses recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31		
	2019	2018	
Biaya jasa kini	2.269.951	2.570.209	Current service cost
Biaya bunga	1.796.335	644.114	Interest cost
Dampak perubahan manfaat	-	7.902.310	The impact of change of benefit
<b>Total</b>	<b>4.066.286</b>	<b>11.116.633</b>	<b>Total</b>

Rekonsiliasi saldo pengukuran kembali pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation of re-measurement in the consolidated statements of financial position are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Jumlah pengukuran kembali awal tahun	(2.261.180)	(7.045.424)	Re-measurement amount beginning of year
Kerugian aktuarial	(2.134.142)	4.784.244	Actuarial loss
<b>Akumulasi jumlah pengukuran kembali</b>	<b>(4.395.322)</b>	<b>(2.261.180)</b>	<b>Accumulated amount of re-measurements</b>

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of the liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Liabilitas awal tahun	20.713.486	13.079.459	Liabilities beginning of year
Beban yang diakui dalam laba rugi	4.066.286	11.116.633	Expense recognized in profit or loss
Beban yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(2.134.142)	4.784.244	Expense recognized in the other comprehensive income
Pembayaran	(131.904)	(8.266.850)	Contribution
<b>Liabilitas akhir tahun</b>	<b>22.513.726</b>	<b>20.713.486</b>	<b>Liabilities end of year</b>

Nilai kini liabilitas akhir setelah efek analisa sensitivitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The present values of liabilities after the effect of sensitivity analysis on December 31, 2019 are as follows:

<b>Analisis sensitivitas</b>		<b>Sensitivity analysis</b>	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti		PV defined benefits obligations	
Asumsi Tingkat Diskonto		Discount Rate Assumptions	
+ 1,00%	(689.465)	+ 1.00%	
- 1,00%	740.534	- 1.00%	

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
(lanjutan)**

**24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

**c. Penghargaan pengabdian**

**c. Employee appreciation**

Penghargaan pengabdian diberikan kepada pegawai yang mengabdikan terus menerus selama sekurang-kurangnya 25 tahun di Perusahaan termasuk masa kerja pada masa penugasan di luar Perusahaan yang diakui sebagai bagian dari pola karir serta pegawai yang mengakhiri masa tugas dan diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun normal atau meninggal dunia.

Employee appreciation are given to employees who serve continuously for at least 25 years in the Company including the service period during outside assignments that are recognized as part of the career pattern and employees who end their term of service and are honorably terminated because they reach the normal retirement age or die.

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas penghargaan pengabdian adalah sebagai berikut:

The actuarial assumptions used to determine employee appreciation expenses and liabilities are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Tingkat diskonto	7,60%	8,70%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	8,00%	8,00%	Salary increase rate
Tingkat mortalitas	TMI III 2011	TMI III 2011	Mortality rate
Tingkat cacat	1%	1%	Disability rate
Umur pensiun	56 tahun/56 years	56 tahun/56 years	Retirement age
Tingkat mengundurkan diri	0,7% pada usia 20 tahun sampai dengan 45 tahun/ dan sebesar 0,1% pada usia 46 tahun sampai dengan 55 tahun/ 0,7% at 20 years until 45 years old and 0,1% at 46 years until 55 years		Resignation rate

Nilai kini liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah:

The present value of liabilities as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas	22.482.051	12.667.287	Present value of liabilities
<b>Liabilitas yang diakui</b>	<b>22.482.051</b>	<b>12.667.287</b>	<b>Recognized liabilities</b>

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas awal tahun	12.667.287	13.004.383	Present value of liabilities beginning of year
Biaya jasa kini	1.696.740	987.418	Current service cost
Biaya bunga	1.022.488	902.001	Interest cost
Pembayaran imbalan	(1.829.096)	(953.187)	Benefits paid
Kerugian (keuntungan) aktuarial	8.924.632	(1.273.328)	Actuarial loss (gain)
<b>Nilai kini liabilitas akhir tahun</b>	<b>22.482.051</b>	<b>12.667.287</b>	<b>Present value of liabilities end of year</b>



**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
(lanjutan)**

**24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

**c. Penghargaan pengabdian (lanjutan)**

**c. Employee appreciation (continued)**

Rincian beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of expenses recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31		
	2019	2018	
Biaya jasa kini	1.696.740	987.418	Current service cost
Biaya bunga	1.022.488	902.001	Interest cost
<b>Total</b>	<b>2.719.228</b>	<b>1.889.419</b>	<b>Total</b>

Rekonsiliasi saldo pengukuran kembali pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation of re-measurement in the consolidated statements of financial position are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Jumlah pengukuran kembali awal tahun	(224.571)	1.048.757	Re-measurement amount beginning of year
Kerugian (keuntungan) aktuarial	8.924.632	(1.273.328)	Actuarial loss (gain)
<b>Akumulasi jumlah pengukuran kembali</b>	<b>8.700.061</b>	<b>(224.571)</b>	<b>Accumulated amount of re-measurements</b>

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of the liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Liabilitas awal tahun	12.667.287	13.004.383	Liabilities beginning of year
Beban yang diakui dalam laba rugi	2.719.228	1.889.419	Expense recognized in profit or loss
Beban (penghasilan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	8.924.632	(1.273.328)	Expense (income) recognized in the other comprehensive income
Pembayaran	(1.829.096)	(953.187)	Contribution
<b>Liabilitas akhir tahun</b>	<b>22.482.051</b>	<b>12.667.287</b>	<b>Liabilities end of year</b>

Nilai kini liabilitas akhir setelah efek analisa sensitivitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The present values of liabilities after the effect of sensitivity analysis on December 31, 2019 are as follows:

<b>Analisis sensitivitas</b>		<b>Sensitivity analysis</b>	
<b>Nilai kini kewajiban imbalan pasti</b>		<b>PV defined benefits obligations</b>	
Asumsi Tingkat Diskonto			Discount Rate Assumptions
+ 1,00%	(1.512.593)		+ 1.00%
- 1,00%	1.733.399		- 1.00%
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji			Salary Increment Assumptions
+ 1,00%	2.026.613		+ 1.00%
- 1,00%	(1.804.818)		-1.00%

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
(lanjutan)**

**24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

**c. Penghargaan pengabdian (lanjutan)**

Kesehatan pensiun diberikan kepada pegawai pada masa pensiun meliputi pegawai yang bersangkutan bersama istri/suami dan anak yang sah yang tercantum dalam Surat Keputusan Pensiun. Manfaat yang diterima peserta berupa premi BPJS dan bantuan penggantian rawat inap dalam jumlah tertentu. Program kesehatan pensiun ini dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan karyawan Angkasa Pura I (YAKKAP I).

**c. Employee appreciation (continued)**

Pension health is given to employees in retirement including the employee concerned with his/her wife/husband and legitimate children listed in the Pension Decree. The benefits received by participants were in the form of BPJS premiums and assistance in hospitalization reimbursement at certain amount. This pension health program is managed by the Angkasa Pura I Employee Welfare Foundation (YAKKAP I).

**d. Kesehatan pensiun**

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas kesehatan pensiun adalah sebagai berikut:

**d. Pension health**

The actuarial assumptions used to determine pension health expenses and liabilities are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Tingkat diskonto	8,00%	8,60%	Discount rate
Tingkat mortalitas	TMI III 2011	TMI III 2011	Mortality rate
Tingkat cacat	1%	1%	Disability rate
Umur pensiun	56 tahun/56 years	56 tahun/56 years	Retirement age
Tingkat mengundurkan diri	0,7% pada usia 20 tahun sampai dengan 45 tahun dan sebesar 0,1% pada usia 46 tahun sampai dengan 55 tahun/ 0,7% at 20 years until 45 years old and 0,1% at 46 years until 55 years		Resignation rate

Nilai kini liabilitas dan nilai wajar aset program pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah:

The present value of liabilities and fair value of plan assets as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas	437.164.699	343.788.633	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program	(378.983.479)	(364.643.470)	Fair value of plan assets
Defisit (surplus)	58.181.220	(20.854.837)	Deficit (surplus)
Dampak batas aset	-	20.854.837	Effect of asset ceiling
<b>Liabilitas yang diakui</b>	<b>58.181.220</b>	<b>-</b>	<b>Recognized liabilities</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
(lanjutan)**

**24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

**d. Kesehatan pensiun (lanjutan)**

**d. Pension health (continued)**

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini  
liabilitas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending  
balance of present value of liabilities is as  
follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas awal tahun	343.788.633	336.686.864	Present value of liabilities beginning of year
Biaya jasa kini	(107.026)	3.469.420	Current service cost
Biaya bunga	29.366.257	24.103.697	Interest cost
Iuran peserta program	3.535.200	3.344.700	Plan participant's contributions
Pembayaran imbalan	(4.641.049)	(3.826.600)	Benefits paid
Dampak perubahan manfaat	-	46.225.870	The impact of change of benefit
Kerugian (keuntungan) aktuarial	65.222.685	(66.215.318)	Actuarial loss (gain)
<b>Nilai kini liabilitas akhir tahun</b>	<b>437.164.700</b>	<b>343.788.633</b>	<b>Present value of liabilities end of year</b>

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai  
wajar aset program adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending  
balance of fair value of plan assets is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Nilai wajar aset program awal tahun	364.643.470	288.721.125	Fair value of plan assets beginning of year
Iuran peserta program	3.535.200	3.344.701	Plan participant's contributions
Iuran pemberi kerja	-	47.965.936	Employer's contributions
Imbal hasil aset program	31.311.786	24.997.051	Return on plan assets
Pembayaran imbalan	(4.641.049)	(3.826.601)	Benefit paid
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(15.865.928)	3.441.258	Actuarial loss (gain)
<b>Nilai wajar aset program akhir tahun</b>	<b>378.983.479</b>	<b>364.643.470</b>	<b>Fair value of plan assets end of year</b>

Rincian beban yang diakui dalam laporan laba  
rugi dan penghasilan komprehensif lain  
konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of expenses recognized in the  
consolidated statements of profit or loss and  
other comprehensive income are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31		
	2019	2018	
Biaya jasa kini	(107.026)	3.469.420	Current service cost
Biaya bunga	29.366.257	24.103.697	Interest cost
Dampak perubahan manfaat	-	46.225.870	The impact of change of benefit
Ekspektasi hasil program	(31.311.786)	(24.997.051)	Expectations plan assets
<b>Total</b>	<b>(2.052.555)</b>	<b>48.801.936</b>	<b>Total</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
(lanjutan)**

**24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

**d. Kesehatan pensiun (lanjutan)**

**d. Pension health (continued)**

Rekonsiliasi saldo pengukuran kembali pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation of re-measurement in the consolidated statements of financial position are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Jumlah pengukuran kembali awal tahun	(33.760.758)	15.040.981	Re-measurement amount beginning of year
Kerugian (keuntungan) aktuarial	65.222.685	(69.656.576)	Actuarial loss (gain)
Dampak batas aset	(20.854.837)	20.854.837	Effect of asset ceiling
<b>Akumulasi jumlah pengukuran kembali</b>	<b>10.607.090</b>	<b>(33.760.758)</b>	<b>Accumulated amount of re-measurements</b>

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of the liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Liabilitas awal tahun	-	47.965.739	Liabilities beginning of year
Beban yang diakui dalam laba rugi	(2.052.555)	48.801.936	Expense recognized in profit or loss
Beban (penghasilan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	81.088.612	(69.656.576)	Expense (income) recognized in the other comprehensive income
Dampak batas aset luran pemberi kerja	(20.854.837)	20.854.837	Effect of asset ceiling
		(47.965.936)	Employer's contributions
<b>Liabilitas akhir tahun</b>	<b>58.181.220</b>	<b>-</b>	<b>Liabilities end of year</b>

Nilai kini liabilitas akhir setelah efek analisa sensitivitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The present values of liabilities after the effect of sensitivity analysis on December 31, 2019 are as follows:

		<b>Sensitivity analysis PV defined benefits obligations</b>
<b>Analisis sensitivitas</b>		<b>Discount Rate Assumptions</b>
<b>Nilai kini kewajiban imbalan pasti</b>		
Asumsi Tingkat Diskonto		
+ 1,00%	(80.019.159)	+ 1.00%
- 1,00%	89.738.229	- 1.00%

Komposisi pengelolaan dana atas aset ditempatkan adalah pada deposito berjangka, piutang pinjaman, reksadana, obligasi, properti dan saham.

The composition of management of planned asset are on time deposits, receivable loans, mutual funds, bonds, property and stocks.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
(lanjutan)**

**24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

**e. Program dana pensiun**

**e. Pension fund program**

Program dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Angkasa Pura I.

The pension fund program is managed by Dana Pensiun Angkasa Pura I.

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas dana pensiun adalah sebagai berikut:

The actuarial assumptions used to determine pension fund expenses and liabilities are as follows:

		31 Desember/December 31,		
		2019	2018	
Tingkat diskonto		7,80%	8,20%	Discount rate
Tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)		6,00%	6,00%	Basic Income Pension Allowance (PhDP) increase
Tingkat mortalita	TMI III 2011	TMI III 2011	TMI III 2011	Mortality rate
Tingkat cacat		1%	1%	Disability rate
Umur pensiun		56 tahun/56 years	56 tahun/56 years	Retirement age
Tingkat mengundurkan diri		0,7% pada usia 20 tahun sampai dengan 45 tahun dan sebesar 0,1% pada usia 46 tahun sampai dengan 55 tahun/ 0,7% at 20 years until 45 years old and 0,1% at 46 years until 55 years		Resignation rate

Nilai kini liabilitas dan nilai wajar aset program pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah:

The present value of liabilities and fair value of plan assets as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

		31 Desember/December 31,		
		2019	2018	
Nilai kini liabilitas		1.265.543.259	1.307.819.972	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program		(1.035.874.161)	(1.054.974.611)	Fair value of plan assets
<b>Liabilitas yang diakui</b>		<b>229.669.098</b>	<b>252.845.361</b>	<b>Recognized liabilities</b>

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities is as follows:

		31 Desember/December 31,		
		2019	2018	
Nilai kini liabilitas awal tahun		1.307.819.972	1.242.689.703	Present value of liabilities beginning of year
Biaya jasa kini		12.426.056	10.058.451	Current service cost
Biaya bunga		103.160.815	85.369.830	Interest cost
Iuran peserta program		2.589.440	2.782.989	Plan participant's contributions
Pembayaran imbalan		(99.522.496)	(113.995.231)	Benefits paid
Dampak perubahan manfaat			-	The impact of change of benefit
Kerugian aktuarial		(60.930.528)	80.914.230	Actuarial loss
<b>Nilai kini liabilitas akhir tahun</b>		<b>1.265.543.259</b>	<b>1.307.819.972</b>	<b>Present value of liabilities end of year</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
(lanjutan)**

**24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

**e. Program dana pensiun (lanjutan)**

**e. Pension fund program (continued)**

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of fair value of plan assets is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Nilai wajar aset program awal tahun	1.054.974.611	977.143.078	Fair value of plan assets beginning of year
luran peserta program	2.589.440	2.782.989	Plan participant's contributions
luran pemberi kerja	14.314.294	184.797.458	Employer's contributions
Imbal hasil aset program	83.120.549	91.254.212	Return on plan assets
Pembayaran imbalan	(99.522.496)	(113.995.231)	Benefit paid
Kerugian aktuarial	(19.602.236)	(87.007.895)	Actuarial loss
<b>Nilai wajar aset program akhir tahun</b>	<b>1.035.874.162</b>	<b>1.054.974.611</b>	<b>Fair value of plan assets end of year</b>

Rincian beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of expenses recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31		
	2019	2018	
Biaya jasa kini	12.426.056	10.058.451	Current service cost
Biaya bunga	103.160.815	85.369.830	Interest cost
Ekspektasi hasil program	(83.120.549)	(91.254.212)	Expectations plan assets
<b>Total</b>	<b>32.466.322</b>	<b>4.174.069</b>	<b>Total</b>

Rekonsiliasi saldo pengukuran kembali pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation of re-measurement in the consolidated statements of financial position are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Jumlah pengukuran kembali awal tahun	392.982.007	225.059.882	Re-measurement amount beginning of year
(Keuntungan)/kerugian aktuarial	(60.930.528)	167.922.125	Actuarial (gain)/loss
<b>Akumulasi jumlah pengukuran kembali</b>	<b>332.051.479</b>	<b>392.982.007</b>	<b>Accumulated amount of re-measurements</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
(lanjutan)**

**24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

**e. Program dana pensiun (lanjutan)**

**e. Pension fund program (continued)**

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of the liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Liabilitas awal tahun	252.845.361	265.546.625	Liabilities beginning of year
Beban yang diakui dalam laba rugi	32.466.322	4.174.069	Expense recognized in profit or loss
Beban yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(41.328.292)	167.922.125	Expense recognized in the other comprehensive income
luran pemberi kerja	(14.314.293)	(184.797.458)	Employer's contributions
<b>Liabilitas akhir tahun</b>	<b>229.669.098</b>	<b>252.845.361</b>	<b>Liabilities end of year</b>

Nilai kini liabilitas akhir setelah efek analisa sensitivitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The present values of liabilities after the effect of sensitivity analysis on December 31, 2019 are as follows:

		Sensitivity analysis PV defined benefits obligations	
		Discount Rate Assumptions	
<b>Analisis sensitivitas</b>			
<b>Nilai kini kewajiban imbalan pasti</b>			
Asumsi Tingkat Diskonto			Discount Rate Assumptions
+ 1,00%	(112.665.117)		+ 1.00%
- 1,00%	134.819.500		- 1.00%
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji			Salary Increment Assumptions
+ 1,00%	25.332.048		+ 1.00%
- 1,00%	(21.964.785)		- 1.00%

Komposisi pengelolaan dana atas aset ditempatkan adalah pada surat berharga negara, deposito berjangka, saham, reksadana, obligasi dan aset lainnya.

The composition of management of planned asset are on Government bond, time deposits, stocks, mutual funds, bonds and other assets.

**25. MODAL SAHAM**

**25. SHARES CAPITAL**

Pemegang saham/ Shareholder	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh /Number of share issued and fully paid	% Pemilikan/ ownership	Total
Pemerintah Indonesia/ Government of The Republic of Indonesia	6.414.412	100%	6.414.412.000

Perubahan Anggaran dasar berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil Di luar Rapat PT Angkasa Pura I (Persero) No.5 dengan Notaris Utiék R. Abdulrachman, SH., MLI., MKn mengenai diantaranya peningkatan modal dasar dan penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.AHU-46777.AH.01.02 Tahun 2012 pada tanggal 3 September 2012, dengan rincian sebagai berikut:

The last amendment to the Articles of Association were based on the Deed of Meeting Resolution and Shareholders Meeting taken outside the meeting of PT Angkasa Pura I (Persero) No.5 on the date mentioned above by the notary of Utiék R. Abdulrachman, SH., MLI.,MKn., regarding the capital increases and additional capital of the Republic of Indonesia to the capital of the Company. The Deed of Amendment had been approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with his letter No.AHU-46777.AH.01.02 Tahun 2012 dated September 3, 2012, which details are as follows:



**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. MODAL SAHAM (lanjutan)**

- a. Modal Dasar Perusahaan adalah sebesar Rp12.000.000.000 yang terbagi atas 12.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham.
- b. Modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp3.188.245.000 atau sebanyak 3.188.245 saham, dengan cara penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia sebesar Rp1.388.244.029 sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.76 Tahun 2011 dan dari cadangan modal sebesar Rp971 .

Berdasarkan akta notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn No.02 tanggal 16 Januari 2013 yang telah disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-02672 tanggal 31 Januari 2013, Perusahaan menyetujui peningkatan modal disetor yang diambil dari kapitalisasi sebagian cadangan Perusahaan sampai dengan tahun buku 2011 sejumlah 300.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) sehingga seluruhnya seharga Rp300.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia. Sehingga Modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp3.488.245.000.

Pada tanggal 22 September 2015 terjadi perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang dinyatakan dalam Akta Notaris Julius Purnawan, SH, MSi No. 11 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Angkasa Pura I (Persero) tentang Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar PT Angkasa Pura I (Persero). Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.AHU.AH. 01.03-0972301 pada tanggal 15 Oktober 2015. Modal Dasar Perusahaan sebesar Rp12.000.000.000 yang terbagi atas 12.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per saham, Modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp6.414.412.000 atau sebanyak 6.414.412 saham, dengan cara penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia sebesar Rp2.926.166.060 sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.8 Tahun 2014 dan dari cadangan modal sebesar Rp940.

**25. SHARES CAPITAL (continued)**

- a. The authorized capital amounting to Rp12,000,000,000 consists of 12,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share.
- b. Issued and fully paid amounted to Rp3,188,245,000 or 3,188,245 shares, by additional paid in capital of to Rp1,388,244,029 based on the Government Regulation No.76 Year 2011 and from reserved capital of Rp971.

Based on Notarial Deed Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn No.02 dated January 16, 2013 which has been stored in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01. 10-02672 dated January 31, 2013, the Company approved the increase in paid-up capital of capitalization partially taken up by the Company reserves the fiscal year 2011 amounted to 300,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) so entirely for the whole Rp300,000,000 taken from the Republic of Indonesia. The issued and paid-up so to Rp3,488,245,000.

On September 22, 2015 the amendments to the Articles of Association of the Company stated in Notarial Deed Julius Purnawan, SH, MSi number 11 Statement of General Meeting of Shareholders of PT Angkasa Pura I (Persero) on Paid up Capital Additions and Amendments of PT Angkasa Pura I (Persero). This amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia with No.AHU-AH.01.03-0972301 on October 15, 2015. The authorized capital of Rp12,000,000,000 divided into 12,000,000 shares, with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share, issued and paid up capital to Rp6,414,412,000 or as much as 6,414,412 shares, by way of increase in capital of the Republic of Indonesia Rp2,926,166,060 as the Government Regulation (PP) No.8 Year 2014 and from capital reserves amounting to Rp940.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. MODAL SAHAM (lanjutan)**

Pada tanggal 27 Maret 2019 terjadi perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn No. 55 Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-AH.01.03-0175898 pada tanggal 28 Maret 2019. Saham perusahaan terbagi menjadi Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dimiliki Negara Republik Indonesia dan Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat. Modal Dasar Perusahaan sebesar Rp12.000.000.000 terbagi menjadi sebagai berikut:

- a. 1 Saham Seri A Dwiwarna dengan nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh).
- b. 11.999.999 Saham Seri B masing-masing dengan nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) atau seluruhnya dengan nilai saham Rp11.999.999.000.

Modal ditempatkan dan disetor yang diambil penuh oleh Negara Republik Indonesia sebesar Rp6.414.412.000 terbagi menjadi sebagai berikut :

- a. 1 Saham Seri A Dwiwarna dengan nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh)
- b. 6.414.411 Saham Seri B masing-masing dengan nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) atau seluruhnya dengan nilai saham Rp6.414.411.000.

**26. PENYERTAAN MODAL NEGARA**

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Saldo awal	22.963.207	255.096.706
Pengurangan	-	(232.133.499)
<b>Total</b>	<b>22.963.207</b>	<b>22.963.207</b>

**25. SHARES CAPITAL (continued)**

On March 27, 2019 the amendments to the Articles of Association of the Company stated in Notarial Deed Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn. No. 55 Statement of Ministry of Stated Own Company of General Meeting of Shareholders of PT Angkasa Pura I (Persero). This amendment has been acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia through Notification Receipt Letter No.AHU-AH.01.03-0175898 on March 28, 2019. The company shares divided into 2 series. Seri A Dwiwarna that specially owned by Government of Republic of Indonesia and Seri B that can be owned by Government of Republic of Indonesia and/or by public. The Company capital of Rp12,000,000,000 divided into:

- a. 1 Seri A Dwiwarna share with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount).
- b. 11,999,999 Seri B share with nominal value each Rp1,000,000 (full amount) or full value of share Rp11,999,999,000.

Issued and paid up capital that held by Government of Republic of Indonesia as Rp6,414,412,000 divide into :

- a. 1 Seri A Dwiwarna share with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount).
- a. 6,414,411 Seri B share with nominal value each Rp1,000,000 (full amount) or full value of share Rp6,414,411,000.

**26. GOVERNMENT CAPITAL INVESTMENT**

Beginning balance  
Deduction  
**Total**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**26. PENYERTAAN MODAL NEGARA (lanjutan)**

Penambahan penyertaan pada tahun 2016 sebesar Rp255.096.706 adalah Penambahan Penyertaan Modal Negara yang berasal dari Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) sesuai Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 46 Tahun 2018 tanggal 27 September 2018, Perusahaan menerima pengurangan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia dengan nilai buku sebesar Rp232.133.499 untuk dijadikan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia kedalam modal Perusahaan Umum LPPNPI (catatan 27).

**26. GOVERNMENT CAPITAL INVESTMENT (continued)**

Additional investment in 2016 amounted to Rp255,096,706 is the addition of the Government Capital Participation derived from Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) as the Government Regulation No.25 Tahun 2016 dated June 27, 2016.

Based on the Government Regulation ("PP") No. 46 Tahun 2018 dated September 27, 2018, the Company received deduction in capital investment from the Republic of Indonesia amounting to Rp232,133,499 to be made into addition of capital investment to LPPNPI (notes 27).

**27. PENGALIHAN ASET TETAP KENAVIGASIAN**

**27. THE TRANSFER OF NAVIGATION FIXED ASSETS**

	<b>31 Desember/December 31,</b>		
	<b>2019</b>	<b>2018</b>	
Nilai buku aset tetap kenavigasian	(37.004.793)	(269.138.292)	Book value of navigation fixed assets
Koreksi penyerahan aset	-	232.133.499	Corrections
	(37.004.793)	(37.004.793)	
<b>Akumulasi penyusutan aset tetap kenavigasian</b>	<b>408.393.524</b>	<b>408.393.524</b>	<b>Accumulated depreciations of navigation fixed assets</b>

Pengurangan modal Pemerintah melalui pengalihan aset kenavigasian ke LPPNPI berdasarkan surat dari Menteri BUMN No.S-46/MBU/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang persetujuan pengalihan aset tetap kenavigasian kepada Perum LPPNPI dengan nilai buku sebesar Rp270.831.524

Pengaruh atas pengalihan aset tetap kenavigasian kepada Perum LPPNPI, sebagai berikut:

- a. Aset tetap kenavigasian yang telah dijadikan PMN pada perusahaan diserahkan kembali sebesar nilai bukunya yaitu Rp270.831.524, sesuai dengan surat Perusahaan No.AP.1.6724/PL.07/2013/PD-B tanggal 28 November 2013 perihal revisi usulan pengalihan aset tetap kenavigasian kepada Perum LPPNPI, serta berdasarkan Berita Acara Perubahan Nilai Aset yang Diserahterimakan No.BA. 656/KU.21/2013/PDB tanggal 30 Desember 2013.

Deduction of Government capital by transfer of navigation fixed assets to LPPNPI based on a letter from the Minister of BUMN No.S-46/MBU/2014 dated January 30, 2014 regarding the approval of the transfer of navigation fixed assets to Perum LPPNPI with the book value of Rp270,831,524.

The effect of the transfer of fixed assets to the Perum LPPNPI as follows:

- a. Navigation fixed assets that have been used as PMN in the company handed back at book value of Rp270,831,524, in accordance with the Company's letter No.AP.1.6724/PL.07/2013/PD-B dated November 28, 2013 regarding the proposed revisions to the transfer of navigation fixed assets to Perum LPPNPI, and based on the Minutes of the Asset Value Change No.BA. 656/KU.21/2013/PD-B dated December 30, 2013.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**27. PENGALIHAN ASET TETAP KENAVIGASIAN  
(lanjutan)**

Pengaruh atas pengalihan aset tetap kenavigasian kepada Perum LPPNPI, sebagai berikut: (lanjutan)

- b. BPYBDS berupa aset tetap kenavigasian yang diserahkan kembali kepada pemerintah adalah sebesar nilai perolehan Rp731.281.272 yang terdiri dari Bandara Juanda Surabaya sebesar Rp69.306.329, Bandara Hasanuddin Makassar Rp26.009.312, Bandara Adi Sutjipto Yogya Rp17.826 dan MATSC Makassar Rp635.947.805 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp408.393.524.
- c. Penyesuaian atas aset kenavigasian yang diserahkan adalah hasil rapat klarifikasi terkait daftar aset hasil penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang diselenggarakan pada tanggal 17 Oktober 2014. Adapun aset yang dikoreksi dari daftar penyerahan adalah Tanah di Surabaya sebesar Rp93.955, tanah di Kupang Rp377.625 dan MATSC Makassar sebesar Rp1.221.652.

**27. THE TRANSFER OF NAVIGATION FIXED ASSETS (continued)**

The effect of the transfer of fixed assets to the Perum LPPNPI as follows: (continued)

- b. BPYBDS in the form of navigation fixed assets that are handed back to the government is at cost of Rp731,281,272 consisting of Juanda Airport in Surabaya Rp69,306,329, Hasanuddin Airport Makassar Rp26,009,312, Adi Sutjipto Airport Yogya Rp17,826 and MATSC Makassar Rp635,947,805 with accumulated depreciation of Rp408,393,524.
- c. Adjustments for transferred navigation assets is the result of a clarification meeting related assets assessment results list Directorate General of State Assets held on October 17, 2014. The assets of the list submission is corrected in Surabaya Land of Rp93,955, land in Kupang Rp377,625 and Makassar MATSC of Rp1,221,652.

**28. PENGGUNAAN SALDO LABA**

**28. USAGE OF RETAINED EARNINGS**

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
<b>Cadangan:</b>			<b>Reserve:</b>
Saldo awal	6.228.618.258	5.093.757.108	Beginning balance
Penambahan	1.545.404.103	1.134.861.150	Addition
<b>Saldo Akhir</b>	<b>7.774.022.361</b>	<b>6.228.618.258</b>	<b>End balance</b>
<b>Laba tahun berjalan</b>			<b>Current income</b>
Laba bersih tahun lalu, tanpa kepentingan non-pengendali	2.007.018.315	1.418.577.150	Net income of prior year exclude non-controlling interest
- Pembagian dividen	(461.614.212)	(283.716.000)	Dividend declared -
- Cadangan	(1.545.404.103)	(1.134.861.150)	Reserves -
<b>Laba bersih tahun berjalan</b>	<b>1.451.359.978</b>	<b>2.007.018.315</b>	<b>Net income - current year</b>
Total laba tahun berjalan	1.451.359.978	2.007.018.315	Total current income
<b>Total saldo laba</b>	<b>9.225.382.339</b>	<b>8.235.636.573</b>	<b>Total retained earning</b>

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pegang Saham No. AP.I.3972/KU.01.03/2019/DU-B tanggal 20 Mei 2019, pemegang saham Perusahaan setuju untuk membagikan dividen kas sebesar Rp461.614.212 dan menaikkan cadangan umum atas saldo laba sebesar Rp1.545.404.103. Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen tersebut pada pada tahun 2019.

Based on Minutes of General Meeting of Shareholders No. AP.I.3972/KU.01.03/2019/DU-B dated May 20, 2019, the Company's shareholders agreed to declare a cash dividend amounting Rp461,614,212 and raise general reserve for retained earning amounting Rp1,545,404,103. The Company has paid the dividend in 2019.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**28. PENGGUNAAN SALDO LABA (lanjutan)**

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham No. AP.I.2559/KU.01.03/2018/DU-B tanggal 24 April 2018, pemegang saham Perusahaan setuju untuk membagikan dividen kas sebesar Rp283.716.000 dan menaikkan cadangan umum atas saldo laba sebesar Rp1.134.861.150. Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen tersebut di atas pada tahun 2018.

**28. USAGE OF RETAINED EARNINGS (continued)**

Based on Minutes of General Meeting of shareholders No. AP.I.2559/KU.01.03/2018/DU-B dated April 24, 2018, the Company's shareholders agreed to declare a cash dividend amounting Rp283,716,000 and raise general reserve for retained earning amounting Rp1,134,861,150. The Company has paid the dividend as stated above in 2018.

**29. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI**

Rincian kepentingan non-pengendali atas ekuitas dan bagian atas hasil bersih entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

**29. NON-CONTROLLING INTEREST**

Details of non-controlling interests in the equity and net results of consolidated subsidiaries are as follows:

	Kepemilikan/ Ownership (%)	Nilai Tercatat/Carrying Amounts		
		2019	2018	
PT Angkasa Pura Logistik	2,00	3.840.523	3.485.904	PT Angkasa Pura Logistik
PT Angkasa Pura Suport	0,39	1.298.311	1.261.563	PT Angkasa Pura Suport
PT Angkasa Pura Properti	0,04	76.749	75.986	PT Angkasa Pura Properti
PT Angkasa Pura Hotel	0,03	282.805	39.983	PT Angkasa Pura Hotel
<b>Total</b>		<b>5.498.388</b>	<b>4.863.436</b>	<b>Total</b>

Pada tahun 2019 dan 2018 Perusahaan mempunyai 5 (lima) entitas anak yang dikonsolidasi. Seluruh entitas anak berkedudukan di Jakarta sebagai kantor pusatnya.

In 2019 and 2018, the Company has 5 (five) consolidated subsidiaries. All subsidiaries are domiciled in Jakarta as their head office.

**30. PENDAPATAN USAHA**

Rincian pendapatan usaha adalah sebagai berikut:

**30. OPERATING REVENUES**

The details of operating revenues are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
<b>Aeronautika PJP4U (Pelayanan Jasa Pendaratan Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara)</b>			<b>Aeronautical PJP4U (Aircraft Landing, Placing and Storing Services)</b>
Domestik	190.945.248	181.821.821	Domestic
Internasional	701.932.306	538.306.430	International
<b>Sub-total</b>	<b>892.877.554</b>	<b>720.128.251</b>	<b>Subtotal</b>
<b>PJP2U (Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara)</b>			<b>PJP2U (Aircraft Passenger Services)</b>
Domestik	1.799.521.581	2.240.972.821	Domestic
Internasional	1.735.438.021	1.608.774.099	International
<b>Sub-total</b>	<b>3.534.959.602</b>	<b>3.849.746.920</b>	<b>Subtotal</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**30. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)**

Rincian pendapatan usaha adalah sebagai berikut:  
(lanjutan)

**30. OPERATING REVENUES (continued)**

The details of operating revenues are as follows:  
(continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
<b>Aeronautika</b>			<b>Aeronautical</b>
<i>Aviobridge</i>			<i>Aviobridge</i>
Domestik	82.514.142	74.333.650	Domestic
Internasional	150.586.727	104.168.213	International
<b>Sub-total</b>	<b>233.100.869</b>	<b>178.501.863</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Pemakaian counter dan conveyor</b>			<b>Use of counters and conveyor</b>
Domestik	61.749.003	67.047.400	Domestic
Internasional	88.119.722	67.954.877	International
<b>Sub-total</b>	<b>149.868.725</b>	<b>135.002.277</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Pendapatan Baggage Handling System (BHS)</b>			<b>Baggage Handling System (BHS)</b>
Internasional	5.280	9.796.840	International
<b>Sub-total</b>	<b>5.280</b>	<b>9.796.840</b>	<b>Subtotal</b>
<b>PJKP2U (Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara)</b>			<b>PJKP2U (Cargo Services and Aircraft Postal Services)</b>
Domestik	109.422.799	154.747.909	Domestic
Internasional	55.701.259	65.724.286	International
<b>Sub-total</b>	<b>165.124.058</b>	<b>220.472.195</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Total pendapatan aeronautika</b>	<b>4.975.936.088</b>	<b>5.113.648.346</b>	<b>Total aeronautical revenue</b>
<b>Non-aeronautika</b>			<b>Non-aeronautical</b>
<b>Pemakaian sarana non-aeronautika</b>			<b>Use of non-aeronautical facilities</b>
Parkir kendaraan	302.473.601	321.706.201	Parkir lots
Listrik	70.256.092	76.644.660	Electricity
Reklame	23.739.572	23.312.833	Advertising
Air	6.750.327	7.262.393	Water
Telepon	5.808.171	6.833.294	Telephone
Layanan data	5.984.661	6.786.390	Data services
Pas bandara	5.480.032	4.890.876	Airport pass
<b>Sub-total</b>	<b>420.492.456</b>	<b>447.436.647</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Pendapatan sewa</b>			<b>Rentals revenues</b>
Sewa ruang	579.982.044	525.075.808	Rent rooms
Sewa peralatan	88.425.593	78.724.086	Rent equipments
Sewa tanah	68.338.321	62.816.234	Rent lands
Sewa kendaraan	13.089.279	17.076.131	Rent vehicles
Sewa penggunaan hak atas tanah	6.317.272	5.537.855	Rent use of land rights
Sewa antena	3.647.007	4.497.969	Rent antenna
Sewa tempat	464.609	1.709.988	Rent spaces
Lain-lain	1.271.205	1.035.360	Others
<b>Sub-total</b>	<b>761.535.330</b>	<b>696.473.431</b>	<b>Sub total</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**30. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)**

Rincian pendapatan usaha adalah sebagai berikut:  
(lanjutan)

**30. OPERATING REVENUES (continued)**

The details of operating revenues are as follows:  
(continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Pemakaian ruang tunggu	138.296.643	211.332.198	Use of lounge
Pendapatan konsesi	1.707.521.693	1.554.211.200	Concessions revenues
Event dan promosi	37.636.364	31.267.755	Event and promotion
Pergudangan & logistik			Warehousing & logistics
Domestik	188.479.330	147.512.297	Domestic
Internasional	70.771.313	33.810.826	International
Jasa Agen Regulasi	36.646.769	47.850.402	Regulatory Agent services
<b>Sub-total</b>	<b>295.897.412</b>	<b>229.173.525</b>	<b>Subtotal</b>
Jasa pemeliharaan dan perbaikan	88.756.461	82.402.681	Maintenance and services
Jasa lainnya	205.473.155	155.141.527	Other services
<b>Total pendapatan non-aeronautika</b>	<b>3.655.609.514</b>	<b>3.407.438.964</b>	<b>Total non-aeronautical revenues</b>
<b>Total</b>	<b>8.631.545.602</b>	<b>8.521.087.310</b>	<b>Total</b>

Jumlah pendapatan usaha yang berasal dari pihak  
berelasi dan pihak ketiga sebagai berikut:

The amounts of operating revenues with details  
above consists of related parties and third parties as  
follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31		
	2019	2018	
Pihak Berelasi	1.007.445.001	1.491.665.980	Related Parties
Pihak Ketiga	7.624.100.601	7.029.421.330	Third Parties
<b>Total</b>	<b>8.631.545.602</b>	<b>8.521.087.310</b>	<b>Total</b>

Kelompok Usaha memiliki pendapatan dari suatu  
pihak tertentu yang nilainya sama atau lebih besar  
dari 10% dari total pendapatan konsolidasiannya  
yaitu dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan  
PT Lion Mentari Airlines.

The Group has revenues from certain party with total  
amount equivalent with or exceeding 10% of its  
consolidated revenues from PT Garuda Indonesia  
(Persero) Tbk and PT Lion Mentari Airlines.



**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**31. BEBAN PEGAWAI**

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Tunjangan operasional	843.143.667	762.977.513	Operational allowance
Bonus	366.315.352	441.462.245	Bonus
Gaji dan upah	244.460.409	225.492.385	Wages & salaries
Pengobatan	87.941.966	66.739.038	Medicals and doctors
Lembur	20.430.604	20.929.867	Overtime
Pakaian seragam	13.985.833	21.858.615	Employee uniform
Lain-lain	14.389.501	14.416.295	Others
<b>Total</b>	<b>1.590.667.332</b>	<b>1.553.875.958</b>	<b>Total</b>

**31. EMPLOYEE EXPENSES**

This account consists of the following:

**32. BEBAN OPERASIONAL BANDARA**

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Penyusutan dan amortisasi	1.124.491.016	1.022.809.080	Depreciation and amortization
Jasa alih daya	584.364.124	587.375.721	Outsourcing
Utilitas	358.545.903	344.727.063	Utilities
Pemeliharaan	294.251.833	333.522.413	Maintenance
Sewa	208.619.330	175.728.560	Rent
Jasa pelayanan penumpang	214.980.552	178.763.577	Passenger services
Jasa kebersihan bandara	180.912.703	178.992.905	Airport cleaning services
Pembelian tiket dan hotel	72.973.396	66.001.496	Purchase of ticket and hotel
Pemakaian persediaan makanan dan minuman	56.439.294	36.977.541	Usage of inventories of food and beverages
Penerimaan Negara Bukan Pajak	47.555.983	137.243.397	Non-Tax State Revenue
Pembelian dan pemakaian persediaan	43.011.741	14.350.809	Purchase and usage of inventories
Konstruksi	16.944.313	8.937.570	Construction
Lainnya	77.096.836	66.570.931	Other
<b>Total</b>	<b>3.280.187.024</b>	<b>3.152.001.063</b>	<b>Total</b>

**32. AIRPORT OPERATION EXPENSES**

This account consists of the following:

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**33. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2019	2018
Pajak	223.031.421	239.474.716
Pejabat nonpegawai	213.387.884	210.529.264
Pemakaian persediaan	102.397.057	62.561.098
Imbalan kerja karyawan	93.073.582	112.461.106
Jasa profesional dan konsultan	77.805.414	65.246.130
Perjalanan dinas	66.561.132	69.895.284
Rapat dinas	49.338.477	53.215.444
Pendidikan dan pelatihan	43.834.835	42.557.434
Makanan dan minuman	27.109.529	32.417.153
Tenaga pendukung administrasi	24.565.105	2.525.687
Asuransi	23.394.980	12.756.070
Penurunan nilai piutang	20.054.530	44.893.804
Aset dibiayakan	19.135.335	23.739.935
Olahraga	6.797.315	5.371.739
Lainnya	39.865.622	42.789.355
<b>Total</b>	<b>1.030.352.218</b>	<b>1.020.434.219</b>

**33. GENERAL ADMINISTRATIVE EXPENSES**

This account consists of the following:

Taxes
Non-employee officer expense
Usage of inventories
Employee benefits
Professional service and consultant
Business travel
Meeting expense
Education and training
Food and beverage
Outsourcing administration
Insurance
Impairment of receivable
Low value asset
Sport
Others

**34. PENGHASILAN LAIN-LAIN**

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2019	2018
Penyesuaian pembayaran tantiem	52.000.000	-
Pembayaran piutang yang telah disisihkan	15.075.219	48.444.328
Denda	15.061.196	5.361.963
Pembatalan beban akrual atas gugatan hukum (Catatan 43)	6.551.559	85.334.939
Lelang	3.262.083	3.450.163
Keuntungan dari aset tetap	1.086.048	6.269.279
Klaim asuransi	-	11.402.624
Laba selisih kurs, neto	-	55.365.861
Lainnya	34.220.953	3.575.152
<b>Total</b>	<b>127.257.058</b>	<b>219.204.309</b>

**34. OTHER INCOME**

This account consists of the following:

Tantiem settlement adjustment
Recovery of allowance for impairment of receivables
Penalty
Reverse of accrued expense for civil suit (Note 43)
Auction
Gain on fixed asset
Insurance claim
Gain on foreign exchange, net
Others

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**35. BEBAN LAIN-LAIN**

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Beban PKBL	51.468.405	40.699.312	PKBL expenses
Rugi selisih kurs, neto	28.952.466	-	Loss on foreign exchange, net
Kerugian penghapusan aset tetap	5.099.102	4.690.083	Loss on retirement of fixed assets
Sumbangan	1.640.222	2.648.917	Donation
Lelang	1.653.895	2.351.273	Auction
Lain-lain	13.978.968	10.460.785	Other
<b>Total</b>	<b>102.793.058</b>	<b>60.850.370</b>	<b>Total</b>

**35. OTHER EXPENSE**

This account consists of the following:

**36. PENGHASILAN KEUANGAN**

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Bunga deposito	159.922.623	136.014.317	Deposit interest
Jasa giro	21.291.949	21.921.859	Current account
Bunga obligasi dan reksa dana	17.111.972	10.912.952	Bond & mutual fund interest
<b>Total</b>	<b>198.326.544</b>	<b>168.849.128</b>	<b>Total</b>

**36. FINANCE INCOME**

This account consists of the following:

**37. BEBAN KEUANGAN**

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Bunga pinjaman bank dan obligasi	857.007.177	262.568.530	Bank loans and bonds interest
Beban administrasi bank	3.262.757	2.565.631	Bank administration charges
<b>Total</b>	<b>860.269.934</b>	<b>265.134.161</b>	<b>Total</b>

**37. FINANCE COSTS**

This account consists of the following:

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**38. ASET KEUANGAN DALAM MATA UANG ASING**

**38. FINANCIAL ASSETS DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY**

	31 Desember/December 2019		31 Desember/December 2018		
	Mata uang asing/foreign currency USD	Setara dalam rupiah/In rupiah Rp	Mata uang asing/foreign currency USD	Setara dalam rupiah/In rupiah Rp	
<b>ASET</b>					<b>ASSETS</b>
Kas dan setara kas	45.688.128	635.110.669	58.032.245	840.364.938	Cash & cash equivalents
Piutang usaha	6.440.984	89.536.122	3.535.070	51.191.352	Trade Receivables
<b>Total</b>	<b>52.129.112</b>	<b>724.646.791</b>	<b>61.567.315</b>	<b>891.556.290</b>	<b>Total</b>
<b>LIABILITAS</b>					<b>LIABILITIES</b>
Utang usaha	4.656.163	64.725.318	2.137.545	30.953.784	Trade Payables
<b>Aset moneter bersih</b>	<b>4.656.163</b>	<b>64.725.318</b>	<b>2.137.545</b>	<b>30.953.784</b>	<b>Net monetary assets</b>

Aset dan liabilitas keuangan di atas dijabarkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Financial assets and liabilities mentioned above are translated using the Bank Indonesia middle rate as at 31 December 2019 and 2018.

**39. TRANSAKSI NON-KAS**

**39. NON-CASH TRANSACTIONS**

Informasi pendukung laporan arus kas konsolidasian sehubungan dengan aktivitas non-kas sebagai berikut:

Supplementary information to the consolidated statements of cash flow relating to non-cash activities is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Kapitalisasi biaya pinjaman ke aset tetap	286.653.622	320.056.625	Capitalization of borrowing costs

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut :

Movement of liabilities arising from financing activities in the consolidated statement of cash flows are as follows:

	Non-arus kas/Non-cash flow					
	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Arus kas/ Cash flow	Selisih kurs/ Foreign exchange difference	Lainnya/ Other	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Pinjaman bank jangka panjang	6.327.995.013	10.970.851.262	-	(35.662.231)	17.263.184.044	Long-term bank loans
Pinjaman bank jangka pendek	105.631.070	52.379.600	-	-	158.010.670	Short-term bank loans
Obligasi dan sukuk ijarah	2.993.700.828	-	-	1.195.495	2.994.896.323	Bonds payable and sukuk ijarah
<b>Total</b>	<b>9.427.326.911</b>	<b>11.023.230.862</b>	<b>-</b>	<b>(34.466.736)</b>	<b>20.416.091.037</b>	<b>Total</b>
	Non-arus kas/Non-cash flow					
	1 Januari 2018/ January 1, 2018	Arus kas/ Cash flow	Selisih kurs/ Foreign exchange difference	Lainnya/ Other	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
Pinjaman bank jangka panjang	4.308.921.739	2.056.782.957	-	(37.709.683)	6.327.995.013	Long-term bank loans
Pinjaman bank jangka pendek	77.711.102	27.919.968	-	-	105.631.070	Short-term bank loans
Obligasi dan sukuk ijarah	2.992.474.960	-	-	1.225.868	2.993.700.828	Bonds payable and sukuk ijarah
<b>Total</b>	<b>7.379.107.801</b>	<b>2.084.702.925</b>	<b>-</b>	<b>(36.483.815)</b>	<b>9.427.326.911</b>	<b>Total</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

Sifat hubungan dan jenis transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

**a. Sifat Hubungan Berelasi**

1. Pemegang Saham/Shareholder
2. Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/  
Government related entities
3. Entitas Anak/Subsidiaries
4. Entitas Asosiasi/Associated entities
5. Imbalan kerja/Employee benefits plan
6. Personil, manajemen kunci/Personnels,  
key management

**b. Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi.

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
<b>Aset</b>		
Kas dan setara kas	2.439.450.313	1.659.250.693
Investasi jangka pendek	157.630.092	62.030.398
Piutang usaha	138.453.120	90.334.042
Investasi jangka panjang	99.749.084	100.662.312
<b>Total</b>	<b>2.835.282.609</b>	<b>1.912.277.445</b>

**40. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES**

The nature of relationships and transactions with related parties are as follows:

**a. Nature of Relationship**

- Pemerintah Republik Indonesia/  
The Government of The Republic of Indonesia
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
  - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
  - PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk
  - PT Bank Tabungan Negara
  - PT Bank Syariah Mandiri
  - PT Bank BRI Syariah
  - PT Bank BNI Syariah
  - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
  - PT Pertamina (Persero)
  - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
  - PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
  - PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
  - Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI)
  - Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya/Other Stated Owners Enterprise (BUMN)
  - PT Angkasa Pura Suport (APS)
  - PT Angkasa Pura Hotel (APH)
  - PT Angkasa Pura Logistik (APL)
  - PT Angkasa Pura Properti (APP)
  - PT Angkasa Pura Retail (APR)
  - PT Gapura Angkasa - Penyertaan Saham/  
Investment in Shares
  - PT Jasa Marga Bali Tol - Penyertaan Saham/  
Investment in Shares
  - Dana Pensiun Angkasa Pura (Dapendra)
  - Direksi/Directors
  - Komisaris/Board of Commissioners

**b. Transaction with Related Parties**

In the normal course of business, the Company and its subsidiaries entered into transactions with related parties.

Details of significant accounts with related parties (government, owned entities unless otherwise stated) are as follows:

<b>Assets</b>
Cash and cash equivalents
Short-term investment
Trade receivables
Long term Investments
<b>Total</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI  
(lanjutan)**

**40. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES  
(continued)**

**b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)**

**b. Transaction with related parties (continued)**

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) sebagai berikut: (lanjutan)

Details of significant accounts with related parties (government, owned entities unless otherwise stated) are as follows: (continued)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
Persentase dari total aset	6,63%	6,04%	Percentage of total assets
Liabilitas			Liabilities
Utang usaha	59.820.083	101.718.709	Trade payable
Utang bank dan pinjaman sindikasi	14.918.352.118	5.600.414.977	Long term bank loans & syndicated loan
Utang lancar lain lain	99.967.076	1.371.998.743	Other current liabilities
	<b>15.078.139.277</b>	<b>7.074.132.429</b>	
Persentase dari total liabilitas	56%	43%	Percentage of total liabilities

**41. INFORMASI SEGMENT OPERASI**

**41. OPERATION SEGMENT INFORMATION**

Informasi segmen operasi sebagai berikut:

Operation segment information is as follows:

	31 Desember/December 31, 2019					
	Aeronautika/ Aeronautica	Non-aeronautika/ Non-aeronautica	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated	
<b>PENDAPATAN USAHA</b>						<b>OPERATING REVENUES</b>
Kantor Pusat	-	8.142.768	8.142.768	(1.445.223)	6.697.545	Head Office
Bandara Adi Sucipto	187.649.936	105.736.456	293.386.392	(52.071.829)	241.314.563	Adi Sucipto Airport
Bandara Adi Soemarmo	56.613.541	31.900.438	88.513.979	(15.709.948)	72.804.031	Adi Soemarmo Airport
Bandara Ahmad Yani	129.219.800	72.812.408	202.032.208	(35.857.786)	166.174.422	Ahmad Yani Airport
Bandara Juanda	825.980.125	465.420.946	1.291.401.071	(229.204.959)	1.062.196.112	Juanda Airport
Bandara Syamsudin Noor	89.659.877	50.521.294	140.181.171	(24.880.125)	115.301.046	Syamsuddin Noor Airport
Bandara Sultan Aji M. Sulaiman	243.785.296	137.367.450	381.152.746	(67.649.084)	313.503.662	Sultan Aji M. Sulaiman Airport
Bandara I Gusti Ngurah Rai	1.886.853.957	1.063.199.134	2.950.053.091	(523.591.635)	2.426.461.456	I Gusti Ngurah Rai Airport
Bandara Praya	94.473.600	53.233.717	147.707.317	(26.215.906)	121.491.411	Praya Airport
Bandara El Tari	37.130.847	20.922.385	58.053.232	(10.303.607)	47.749.625	El Tari Airport
Bandara Sultan Hassanudin	314.806.177	177.386.095	492.192.272	(87.356.989)	404.835.283	Sultan Hassanudin Airport
Bandara Sam Ratulangi	99.555.212	56.097.089	155.652.301	(27.626.026)	128.026.275	Sam Ratulangi Airport
Bandara Pattimura	29.113.234	16.404.643	45.517.877	(8.078.763)	37.439.114	Pattimura Airport
Bandara Frans Kaisiepo	8.743.795	4.926.929	13.670.724	(2.426.355)	11.244.369	Frans Kaisiepo Airport
Strategic Business Unit DPS	-	1.544.316.316	1.544.316.316	(274.093.747)	1.270.222.569	Strategic Business Unit DPS
Bandara Internasional Yogyakarta	9.448.261	5.323.879	14.772.140	(2.621.841)	12.150.299	Yogyakarta International Airport
<b>Anak Perusahaan</b>						<b>Subsidiaries</b>
Angkasa Pura Logistik	-	386.002.860	386.002.860	(68.509.909)	317.492.951	Angkasa Pura Logistik
Angkasa Pura Properti	-	243.204.092	243.204.092	(43.165.199)	200.038.893	Angkasa Pura Properti
Angkasa Pura Hotel	-	407.108.651	407.108.651	(72.255.881)	334.852.770	Angkasa Pura Hotel
Angkasa Pura Support	-	1.524.722.211	1.524.722.211	(270.616.077)	1.254.106.134	Angkasa Pura Support
Angkasa Pura Retail	-	106.311.891	106.311.891	(18.868.819)	87.443.072	Angkasa Pura Retail
<b>Total pendapatan usaha</b>	<b>4.013.033.658</b>	<b>6.481.061.652</b>	<b>10.494.095.310</b>	<b>1.862.549.708</b>	<b>8.631.545.602</b>	<b>Total operating revenue</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**41. INFORMASI SEGMENT OPERASI (lanjutan)**

**41. OPERATION SEGMENT INFORMATION (continued)**

Informasi segmen operasi sebagai berikut:  
(lanjutan)

Operation segment information is as follows:  
(continued)

31 Desember/December 31, 2019

	Aeronautika/ Aeronautica	Non-aeronautika/ Non-aeronautica	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated	
<b>BEBAN USAHA</b>						<b>OPERATING EXPENSES</b>
Kantor Pusat	-	1.191.457.093	1.191.457.093	(278.672.877)	912.784.216	Head Office
Bandara Adi Sucipto	120.509.093	67.904.123	188.413.216	(42.933.973)	145.479.243	Adi Sucipto Airport
Bandara Adi Soemarmo	77.890.271	43.889.390	121.779.661	(27.750.097)	94.029.564	Adi Soemarmo Airport
Bandara Ahmad Yani	199.237.459	112.265.760	311.503.219	(70.982.660)	240.520.559	Ahmad Yani Airport
Bandara Juanda	431.897.616	243.364.448	675.262.064	(153.872.880)	521.389.184	Juanda Airport
Bandara Syamsudin Noor	85.495.326	48.174.665	133.669.991	(30.459.562)	103.210.429	Syamsuddin Noor Airport
Bandara Sultan Aji M. Sulaiman	274.930.504	154.917.063	429.847.567	(97.949.945)	331.897.622	Sultan Aji M. Sulaiman Airport
Bandara I Gusti Ngurah Rai	681.048.526	383.755.298	1.064.803.824	(242.638.287)	822.165.537	I Gusti Ngurah Rai Airport
Bandara Praya	123.552.801	69.619.183	193.171.984	(44.018.361)	149.153.623	Praya Airport
Bandara El Tari	51.159.798	28.827.379	79.987.177	(18.226.786)	61.760.391	El Tari Airport
Bandara Sultan Hassanudin	252.991.032	142.554.672	395.545.704	(90.133.534)	305.412.170	Sultan Hassanudin Airport
Bandara Sam Ratulangi	100.207.642	56.464.719	156.672.361	(35.701.143)	120.971.218	Sam Ratulangi Airport
Bandara Pattimura	55.046.845	31.017.640	86.064.485	(19.611.631)	66.452.854	Pattimura Airport
Bandara Frans Kaisiepo	34.255.139	19.301.989	53.557.128	(12.204.136)	41.352.992	Frans Kaisiepo Airport
Strategic Business Unit DPS	58.624.137	33.033.363	91.657.500	(20.886.118)	70.771.382	Strategic Business Unit DPS
Bandara Internasional Yogyakarta	35.783.148	20.162.987	55.946.135	(12.748.522)	43.197.613	Yogyakarta International Airport
<b>Anak Perusahaan</b>						<b>Subsidiaries</b>
Angkasa Pura Logistik	-	348.988.389	348.988.389	(79.524.456)	269.463.933	Angkasa Pura Logistik
Angkasa Pura Properti	-	227.534.451	227.534.451	(51.848.583)	175.685.868	Angkasa Pura Properti
Angkasa Pura Hotel	-	395.163.377	395.163.377	(90.046.413)	305.116.964	Angkasa Pura Hotel
Angkasa Pura Suport	-	1.358.694.174	1.358.694.174	(309.607.478)	1.049.086.696	Angkasa Pura Suport
Angkasa Pura Retail	-	99.052.650	99.052.650	(22.571.261)	76.481.389	Angkasa Pura Retail
<b>Total beban usaha</b>	<b>2.582.629.337</b>	<b>5.076.142.813</b>	<b>7.658.772.150</b>	<b>(1.752.388.703)</b>	<b>5.906.383.447</b>	<b>Total operating expenses</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>1.430.404.321</b>	<b>1.404.918.839</b>	<b>2.835.323.160</b>	<b>(110.161.005)</b>	<b>2.725.162.155</b>	<b>OPERATING INCOME</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA</b>						<b>NON OPERATING REVENUE (EXPENSE)</b>
Kantor Pusat	-	(646.377.960)	(646.377.960)	-	(646.377.960)	Head Office
Bandara Adi Sucipto	24.147	13.605	37.752	-	37.752	Adi Sucipto Airport
Bandara Adi Soemarmo	19.159	10.796	29.955	-	29.955	Adi Soemarmo Airport
Bandara Ahmad Yani	23.471	13.225	36.696	-	36.696	Ahmad Yani Airport
Bandara Juanda	73.815	41.593	115.408	-	115.408	Juanda Airport
Bandara Syamsudin Noor	45.885	25.855	71.740	-	71.740	Syamsuddin Noor Airport
Bandara Sultan Aji M. Sulaiman	59.667	33.621	93.288	-	93.288	Sultan Aji M. Sulaiman Airport
Bandara I Gusti Ngurah Rai	568.224	320.181	888.405	-	888.405	I Gusti Ngurah Rai Airport
Bandara Praya	100.805	56.802	157.607	-	157.607	Praya Airport
Bandara El Tari	22.672	12.775	35.447	-	35.447	El Tari Airport
Bandara Sultan Hassanudin	177.304	99.906	277.210	-	277.210	Sultan Hassanudin Airport
Bandara Sam Ratulangi	68.939	38.845	107.784	-	107.784	Sam Ratulangi Airport
Bandara Pattimura	23.622	13.311	36.933	-	36.933	Pattimura Airport
Bandara Frans Kaisiepo	12.832	7.230	20.062	-	20.062	Frans Kaisiepo Airport
Strategic Business Unit DPS	86.343	48.652	134.995	-	134.995	Strategic Business Unit DPS
Bandara Internasional Yogyakarta	9.671	5.450	15.121	-	15.121	Yogyakarta International Airport
<b>Entitas anak</b>						<b>Subsidiaries</b>
Angkasa Pura Logistik	-	1.035.538	1.035.538	-	1.035.538	Angkasa Pura Logistik
Angkasa Pura Properti	-	(4.879.222)	(4.879.222)	-	(4.879.222)	Angkasa Pura Properti
Angkasa Pura Hotel	-	2.745.325	2.745.325	-	2.745.325	Angkasa Pura Hotel
Angkasa Pura Suport	-	(18.198.748)	(18.198.748)	-	(18.198.748)	Angkasa Pura Suport
Angkasa Pura Retail	-	1.673.274	1.673.274	-	1.673.274	Angkasa Pura Retail
<b>Total pendapatan (beban) non usaha</b>	<b>1.316.556</b>	<b>(663.259.946)</b>	<b>(661.943.390)</b>	<b>-</b>	<b>(661.943.390)</b>	<b>Total non operating revenue (expense)</b>
Laba rugi entitas asosiasi	-	(8.952.137)	(8.952.137)	-	(8.952.137)	Income (loss) associates
<b>Laba sebelum pajak</b>	<b>1.431.720.877</b>	<b>732.706.756</b>	<b>2.164.427.633</b>	<b>(110.161.005)</b>	<b>2.054.266.628</b>	<b>Income before tax</b>
Pajak final	-	-	(109.731.383)	-	(109.731.383)	Final tax expense
Pajak penghasilan badan	-	-	(492.308.079)	-	(492.308.079)	Corporate income taxes
<b>Laba tahun berjalan</b>	<b>1.431.720.877</b>	<b>701.224.352</b>	<b>1.562.388.171</b>	<b>(110.161.005)</b>	<b>1.452.227.166</b>	<b>Profit for the year</b>
<b>Laba diatribusikan kepada:</b>						
<b>Income attributable to:</b>						
Pemilik entitas induk	-	-	-	-	1.451.359.978	The owner of parent entity
Kepentingan non pengendali	-	-	-	-	867.188	Non controlling interest
<b>TOTAL LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.431.720.877</b>	<b>701.224.352</b>	<b>1.562.388.171</b>	<b>(110.161.007)</b>	<b>1.452.227.166</b>	<b>TOTAL PROFIT FOR THE YEAR</b>



**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**41. INFORMASI SEGMENT OPERASI (lanjutan)**

**41. OPERATION SEGMENT INFORMATION  
(continued)**

Informasi segmen operasi sebagai berikut:  
(lanjutan)

Operation segment information is as follows:  
(continued)

31 Desember/December 31, 2019

	Kebandaraan/ Airport	Non-bandara/ Non-airport	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated	
<b>ASET</b>						<b>ASSET</b>
Kantor Pusat	-	16.232.643.942	16.232.643.942	(732.449.752)	15.500.194.190	Head Office
Bandara Adi Sucipto	223.775.837	126.092.576	349.868.413	(15.786.771)	334.081.642	Adi Sucipto Airport
Bandara Adi Soemarmo	367.514.064	207.085.786	574.599.850	(25.927.108)	548.672.742	Adi Soemarmo Airport
Bandara Ahmad Yani	1.533.065.565	863.847.451	2.396.913.016	(108.153.566)	2.288.759.450	Ahmad Yani Airport
Bandara Juanda	1.652.506.990	931.149.967	2.583.656.957	(116.579.832)	2.467.077.125	Juanda Airport
Bandara Syamsudin Noor	447.437.120	252.120.604	699.557.724	(31.565.461)	667.992.263	Syamsuddin Noor Airport
Bandara Sultan Aji M. Sulaiman	1.248.623.456	703.570.815	1.952.194.271	(88.086.957)	1.864.107.314	Sultan Aji M. Sulaiman Airport
Bandara I Gusti Ngurah Rai	3.745.427.959	2.110.463.159	5.855.891.118	(264.229.660)	5.591.661.458	I Gusti Ngurah Rai Airport
Bandara Praya	771.282.396	434.600.024	1.205.882.420	(54.411.856)	1.151.470.564	Praya Airport
Bandara El Tari	267.817.992	150.909.325	418.727.317	(18.893.824)	399.833.493	El Tari Airport
Bandara Sultan Hassanudin	2.260.621.905	1.273.808.841	3.534.430.746	(159.480.669)	3.374.950.077	Sultan Hassanudin Airport
Bandara Sam Ratulangi	341.284.832	192.306.212	533.591.044	(24.076.708)	509.514.336	Sam Ratulangi Airport
Bandara Pattimura	231.153.024	130.249.452	361.402.476	(16.307.211)	345.095.265	Pattimura Airport
Bandara Frans Kaisiepo	146.922.617	82.787.541	229.710.158	(10.364.987)	219.345.171	Frans Kaisiepo Airport
Strategic Business Unit DPS	176.950.178	99.707.386	276.657.564	(12.483.348)	264.174.216	Strategic Business Unit DPS
Bandara Internasional Yogyakarta	2.903.345.621	1.635.968.984	4.539.314.605	(204.823.063)	4.334.491.542	International Yogyakarta Airport
<b>Entitas anak</b>						<b>Subsidiaries</b>
Angkasa Pura Logistik	302.928.238	-	302.928.238	(13.668.735)	289.259.503	Angkasa Pura Logistik
Angkasa Pura Properti	537.395.635	-	537.395.635	(24.248.379)	513.147.256	Angkasa Pura Properti
Angkasa Pura Hotel	738.816.758	-	738.816.758	(33.336.908)	705.479.850	Angkasa Pura Hotel
Angkasa Pura Support	1.393.988.229	-	1.393.988.229	(62.899.571)	1.331.088.658	Angkasa Pura Support
Angkasa Pura Retail	90.226.172	-	90.226.172	(4.071.188)	86.154.984	Angkasa Pura Retail
<b>Total aset</b>	<b>19.381.084.588</b>	<b>25.427.312.065</b>	<b>44.808.396.653</b>	<b>(2.021.845.554)</b>	<b>42.786.551.099</b>	<b>Total asset</b>
<b>LIABILITAS</b>						<b>LIABILITIES</b>
Kantor Pusat	-	23.774.362.062	23.774.362.062	(576.537.172)	23.197.824.890	Head Office
Bandara Adi Sucipto	29.896.978	16.846.265	46.743.243	(1.133.541)	45.609.702	Adi Sucipto Airport
Bandara Adi Soemarmo	30.660.235	17.276.342	47.936.577	(1.162.480)	46.774.097	Adi Soemarmo Airport
Bandara Ahmad Yani	47.236.091	26.616.459	73.852.550	(1.790.952)	72.061.598	Ahmad Yani Airport
Bandara Juanda	310.275.899	174.833.387	485.109.286	(11.764.082)	473.345.204	Juanda Airport
Bandara Syamsudin Noor	35.978.809	20.273.237	56.252.046	(1.364.133)	54.887.913	Syamsuddin Noor Airport
Bandara Sultan Aji M. Sulaiman	52.153.788	29.387.469	81.541.257	(1.977.406)	79.563.851	Sultan Aji M. Sulaiman Airport
Bandara I Gusti Ngurah Rai	334.173.710	188.299.257	522.472.967	(12.670.165)	509.802.802	I Gusti Ngurah Rai Airport
Bandara Praya	38.721.803	21.818.852	60.540.655	(1.468.134)	59.072.521	Praya Airport
Bandara El Tari	60.599.005	34.146.156	94.745.161	(2.297.606)	92.447.555	El Tari Airport
Bandara Sultan Hassanudin	88.519.493	49.878.714	138.398.207	(3.356.208)	135.041.999	Sultan Hassanudin Airport
Bandara Sam Ratulangi	36.909.552	20.797.690	57.707.242	(1.399.422)	56.307.820	Sam Ratulangi Airport
Bandara Pattimura	34.995.920	19.719.402	54.715.322	(1.326.867)	53.388.455	Pattimura Airport
Bandara Frans Kaisiepo	28.892.600	16.280.321	45.172.921	(1.095.460)	44.077.461	Frans Kaisiepo Airport
Strategic Business Unit DPS	410.545.069	231.332.775	641.877.844	(15.565.778)	626.312.066	Strategic Business Unit DPS
Bandara Internasional Yogyakarta	12.797.952	7.211.354	20.009.306	(485.233)	19.524.073	International Yogyakarta Airport
<b>Entitas anak</b>						<b>Subsidiaries</b>
Angkasa Pura Logistik	-	110.902.068	110.902.068	(2.689.417)	108.212.651	Angkasa Pura Logistik
Angkasa Pura Properti	-	333.024.240	333.024.240	(8.075.962)	324.948.278	Angkasa Pura Properti
Angkasa Pura Hotel	-	83.539.139	83.539.139	(2.025.855)	81.513.284	Angkasa Pura Hotel
Angkasa Pura Support	-	712.818.144	712.818.144	(17.286.107)	695.532.037	Angkasa Pura Support
Angkasa Pura Retail	-	30.535.492	30.535.492	(740.497)	29.794.995	Angkasa Pura Retail
<b>Total liabilitas</b>	<b>1.552.356.904</b>	<b>25.919.898.825</b>	<b>27.472.255.729</b>	<b>(666.212.477)</b>	<b>26.806.043.252</b>	<b>Total liabilities</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**41. INFORMASI SEGMENT OPERASI (lanjutan)**

**41. OPERATION SEGMENT INFORMATION (continued)**

Informasi segmen operasi sebagai berikut:  
(lanjutan)

Operation segment information is as follows:  
(continued)

31 Desember/December 31, 2018

	Aeronautika/ Aeronautica	Non-aeronautika/ Non-aeronautica	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated	
<b>PENDAPATAN USAHA</b>						<b>OPERATING REVENUES</b>
Kantor Pusat	-	8.264.380	8.264.380	-	8.264.380	Head Office
Bandara Adi Sucipto	241.731.642	93.274.730	335.006.372	(5.766.185)	329.240.187	Adi Sucipto Airport
Bandara Adi Soemarmo	81.597.302	23.802.610	105.399.912	(4.302.337)	101.097.575	Adi Soemarmo Airport
Bandara Ahmad Yani	156.454.765	54.947.864	211.402.629	(5.302.976)	206.099.653	Ahmad Yani Airport
Bandara Juanda	1.080.990.135	336.478.944	1.417.469.079	(17.861.366)	1.399.607.713	Juanda Airport
Bandara Syamsudin Noor	110.776.413	44.388.786	155.165.199	(2.386.668)	152.778.531	Syamsuddin Noor Airport
Bandara Sultan Aji M. Sulaiman	339.229.214	141.099.381	480.328.595	(7.645.528)	472.683.067	Sultan Aji M. Sulaiman Airport
Bandara I Gusti Ngurah Rai	2.406.878.208	254.344.709	2.661.222.917	(7.181.871)	2.654.041.046	I Gusti Ngurah Rai Airport
Bandara Praya	124.159.464	39.568.954	163.728.418	(3.379.979)	160.348.439	Praya Airport
Bandara El Tari	45.789.802	19.247.060	65.036.862	(500.902)	64.535.960	El Tari Airport
Bandara Sultan Hassanudin	365.012.368	181.299.923	546.312.291	(38.705.968)	507.606.323	Sultan Hassanudin Airport
Bandara Sam Ratulangi	113.428.444	50.652.750	164.081.194	(1.397.691)	162.683.503	Sam Ratulangi Airport
Bandara Pattimura	43.050.449	14.996.774	58.047.223	(1.160.673)	56.886.550	Pattimura Airport
Bandara Frans Kaisiepo	9.084.552	7.023.234	16.107.786	(592.811)	15.514.975	Frans Kaisiepo Airport
Strategic Business Unit DPS	-	1.296.731.782	1.296.731.782	(14.681.026)	1.282.050.756	Strategic Business Unit DPS
<b>Anak Perusahaan</b>						<b>Subsidiaries</b>
Angkasa Pura Logistik	-	359.093.907	359.093.907	(129.403.275)	229.690.632	Angkasa Pura Logistik
Angkasa Pura Properti	-	449.320.035	449.320.035	(432.977.024)	16.343.011	Angkasa Pura Properti
Angkasa Pura Hotel	-	395.495.122	395.495.122	(70.080.742)	325.414.380	Angkasa Pura Hotel
Angkasa Pura Support	-	1.239.285.471	1.239.285.471	(952.178.700)	287.106.771	Angkasa Pura Support
Angkasa Pura Retail	-	89.796.843	89.796.843	(702.985)	89.093.858	Angkasa Pura Retail
<b>Total pendapatan usaha</b>	<b>5.118.182.758</b>	<b>5.099.113.259</b>	<b>10.217.296.017</b>	<b>(1.696.208.707)</b>	<b>8.521.087.310</b>	<b>Total operating revenue</b>
<b>BEBAN USAHA</b>						<b>OPERATING EXPENSES</b>
Kantor Pusat	-	1.222.064.639	1.222.064.639	(45.098.428)	1.176.966.211	Head Office
Bandara Adi Sucipto	136.277.539	37.790.080	174.067.619	(64.164.524)	109.903.095	Adi Sucipto Airport
Bandara Adi Soemarmo	82.126.565	22.773.888	104.900.453	(38.668.235)	66.232.218	Adi Soemarmo Airport
Bandara Ahmad Yani	162.176.925	44.972.040	207.148.965	(76.358.916)	130.790.049	Ahmad Yani Airport
Bandara Juanda	541.766.456	150.233.104	691.999.560	(255.083.759)	436.915.801	Juanda Airport
Bandara Syamsudin Noor	98.448.837	27.300.093	125.748.930	(46.353.367)	79.395.563	Syamsuddin Noor Airport
Bandara Sultan Aji M. Sulaiman	343.282.726	95.193.102	438.475.828	(161.630.251)	276.845.577	Sultan Aji M. Sulaiman Airport
Bandara I Gusti Ngurah Rai	791.935.661	219.605.610	1.011.541.271	(372.872.708)	638.668.563	I Gusti Ngurah Rai Airport
Bandara Praya	128.264.817	35.568.134	163.832.951	(60.391.837)	103.441.114	Praya Airport
Bandara El Tari	59.596.225	16.526.173	76.122.398	(28.060.115)	48.062.283	El Tari Airport
Bandara Sultan Hassanudin	304.977.408	84.570.948	389.548.356	(143.594.685)	245.953.671	Sultan Hassanudin Airport
Bandara Sam Ratulangi	118.861.352	32.960.531	151.821.883	(55.964.337)	95.857.546	Sam Ratulangi Airport
Bandara Pattimura	72.873.303	20.207.937	93.081.240	(34.311.456)	58.769.784	Pattimura Airport
Bandara Frans Kaisiepo	39.315.398	10.902.252	50.217.650	(18.511.149)	31.706.501	Frans Kaisiepo Airport
Strategic Business Unit DPS	-	89.477.318	89.477.318	(7.023.271)	82.454.047	Strategic Business Unit DPS
<b>Anak Perusahaan</b>						<b>Subsidiaries</b>
Angkasa Pura Logistik	-	291.585.538	291.585.538	(22.887.189)	268.698.349	Angkasa Pura Logistik
Angkasa Pura Properti	-	407.072.057	407.072.057	(31.951.980)	375.120.077	Angkasa Pura Properti
Angkasa Pura Hotel	-	366.779.625	366.779.625	(28.789.338)	337.990.287	Angkasa Pura Hotel
Angkasa Pura Support	-	1.069.544.433	1.069.544.433	(83.950.891)	985.593.542	Angkasa Pura Support
Angkasa Pura Retail	-	59.606.988	59.606.988	(4.678.683)	54.928.305	Angkasa Pura Retail
<b>Total beban usaha</b>	<b>2.879.903.212</b>	<b>4.304.734.490</b>	<b>7.184.637.702</b>	<b>(1.580.345.119)</b>	<b>5.604.292.583</b>	<b>Total operating expenses</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>2.238.279.546</b>	<b>794.378.765</b>	<b>3.032.658.311</b>	<b>(115.863.588)</b>	<b>2.916.794.723</b>	<b>OPERATING INCOME</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**41. INFORMASI SEGMENT OPERASI (lanjutan)**

**41. OPERATION SEGMENT INFORMATION (continued)**

Informasi segmen operasi sebagai berikut:  
(lanjutan)

Operation segment Information is as follows:  
(continued)

31 Desember/December 31, 2018

	Kebandaraan/ Airport	Non-bandara/ Non-airport	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated	
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA</b>						<b>NON OPERATING REVENUE (EXPENSE)</b>
Kantor Pusat	-	(90.903.916)	(90.903.916)	-	(90.903.916)	Head Office
Bandara Adi Sucipto	-	23.401	23.401	-	23.401	Adi Sucipto Airport
Bandara Adi Soemarmo	-	128.102	128.102	-	128.102	Adi Soemarmo Airport
Bandara Ahmad Yani	-	34.423	34.423	-	34.423	Ahmad Yani Airport
Bandara Juanda	-	138.125	138.125	-	138.125	Juanda Airport
Bandara Syamsudin Noor	-	15.536	15.536	-	15.536	Syamsuddin Noor Airport
Bandara Sultan Aji M. Sulaiman	-	78.356	78.356	-	78.356	Sultan Aji M. Sulaiman Airport
Bandara I Gusti Ngurah Rai	-	202.634	202.634	-	202.634	I Gusti Ngurah Rai Airport
Bandara Praya	-	84.817	84.817	-	84.817	Praya Airport
Bandara El Tari	-	15.817	15.817	-	15.817	El Tari Airport
Bandara Sultan Hassanudin	-	239.391	239.391	-	239.391	Sultan Hassanudin Airport
Bandara Sam Ratulangi	-	38.302	38.302	-	38.302	Sam Ratulangi Airport
Bandara Pattimura	-	14.868	14.868	-	14.868	Pattimura Airport
Bandara Frans Kaisiepo	-	10.446	10.446	-	10.446	Frans Kaisiepo Airport
Strategic Business Unit DPS	-	48.337	48.337	-	48.337	Strategic Business Unit DPS
<b>Entitas anak</b>						<b>Subsidiaries</b>
Angkasa Pura Logistik	-	1.823.218	1.823.218	-	1.823.218	Angkasa Pura Logistik
Angkasa Pura Properti	-	426.244	426.244	-	426.244	Angkasa Pura Properti
Angkasa Pura Hotel	-	2.208.994	2.208.994	-	2.208.994	Angkasa Pura Hotel
Angkasa Pura Suport	-	(11.427.079)	(11.427.079)	-	(11.427.079)	Angkasa Pura Suport
Angkasa Pura Retail	-	514.951	514.951	-	514.951	Angkasa Pura Retail
<b>Total pendapatan (beban) non usaha</b>	<b>-</b>	<b>(96.285.033)</b>	<b>(96.285.033)</b>	<b>-</b>	<b>(96.285.033)</b>	<b>Total non operating revenue (expense)</b>
Laba rugi entitas asosiasi	-	2.552.006	2.552.006	-	2.552.006	Income (loss) associates
<b>Laba sebelum pajak</b>	<b>2.238.279.546</b>	<b>700.645.738</b>	<b>2.938.925.284</b>	<b>(115.863.588)</b>	<b>2.823.061.696</b>	<b>Income before tax</b>
Pajak final	-	-	128.127.639	-	128.127.639	Final tax expense
Pajak penghasilan badan	-	-	689.015.898	-	689.015.898	Corporate income taxes
<b>Laba tahun berjalan</b>	<b>2.343.454.753</b>	<b>700.645.738</b>	<b>2.121.781.747</b>	<b>(115.863.588)</b>	<b>2.005.918.159</b>	<b>Profit for the year</b>
<b>Laba diatribusikan kepada:</b>						<b>Income attributable to:</b>
Pemilik entitas induk	-	-	-	-	2.007.018.317	The owner of parent entity
Kepentingan non pengendali	-	-	-	-	(1.100.156)	Non controlling interest
<b>TOTAL LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>2.343.454.753</b>	<b>700.645.738</b>	<b>2.121.781.747</b>	<b>(115.863.588)</b>	<b>2.005.918.159</b>	<b>TOTAL PROFIT FOR THE YEAR</b>

31 Desember/December 31, 2018

	Kebandaraan/ Airport	Non-bandara/ Non-airport	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated	
<b>ASET</b>						<b>ASSET</b>
Kantor Pusat	-	4.768.562.078	4.768.562.078	(273.285.429)	4.495.276.649	Head Office
Bandara Adi Sucipto	6.968.262.778	502.802.707	7.471.065.485	(428.165.410)	7.042.900.075	Adi Sucipto Airport
Bandara Adi Soemarmo	371.082.377	31.349.439	402.431.816	(23.063.295)	379.368.521	Adi Soemarmo Airport
Bandara Ahmad Yani	2.431.219.083	18.618.768	2.449.837.851	(140.399.763)	2.309.438.088	Ahmad Yani Airport
Bandara Juanda	2.069.424.496	273.143.419	2.342.567.915	(134.252.143)	2.208.315.772	Juanda Airport
Bandara Syamsudin Noor	1.676.911.766	30.563.813	1.707.475.579	(97.855.116)	1.609.620.463	Syamsuddin Noor Airport
Bandara Sultan Aji M. Sulaiman	1.582.417.133	388.705.355	1.971.122.488	(112.964.673)	1.858.157.815	Sultan Aji M. Sulaiman Airport
Bandara I Gusti Ngurah Rai	4.964.600.716	640.051.255	5.604.651.971	(321.201.590)	5.283.450.381	I Gusti Ngurah Rai Airport
Bandara Praya	949.148.090	132.255.681	1.081.403.771	(61.975.054)	1.019.428.717	Praya Airport
Bandara El Tari	204.726.667	17.415.984	222.142.651	(12.730.955)	209.411.696	El Tari Airport
Bandara Sultan Hassanudin	1.975.105.703	18.943.467	1.994.049.170	(114.278.597)	1.879.770.573	Sultan Hassanudin Airport
Bandara Sam Ratulangi	397.056.973	16.630.225	413.687.198	(23.708.338)	389.978.860	Sam Ratulangi Airport
Bandara Pattimura	214.844.271	15.848.600	230.692.871	(13.220.967)	217.471.904	Pattimura Airport
Bandara Frans Kaisiepo	92.228.774	4.925.734	97.154.508	(5.567.907)	91.586.601	Frans Kaisiepo Airport
Strategic Business Unit DPS	18.360.648	193.901.181	212.261.829	(12.164.687)	200.097.142	Strategic Business Unit DPS
<b>Entitas anak</b>						<b>Subsidiaries</b>
Angkasa Pura Logistik	-	247.876.813	247.876.813	(14.205.775)	233.671.038	Angkasa Pura Logistik
Angkasa Pura Properti	-	485.594.811	485.594.811	(27.829.351)	457.765.460	Angkasa Pura Properti
Angkasa Pura Hotel	-	728.225.102	728.225.102	(41.734.449)	686.490.653	Angkasa Pura Hotel
Angkasa Pura Suport	-	1.018.677.301	1.018.677.301	(58.380.212)	960.297.089	Angkasa Pura Suport
Angkasa Pura Retail	-	81.063.880	81.063.880	(4.645.756)	76.418.124	Angkasa Pura Retail
<b>Total aset</b>	<b>23.915.389.475</b>	<b>9.615.155.613</b>	<b>33.530.545.088</b>	<b>(1.921.629.467)</b>	<b>31.608.915.621</b>	<b>Total asset</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**41. INFORMASI SEGMENT OPERASI (lanjutan)**

Informasi segmen operasi sebagai berikut:  
(lanjutan)

**41. OPERATION SEGMENT INFORMATION  
(continued)**

Operation segment Information is as follows:  
(continued)

31 Desember/December 31, 2018

	Kebandaraan/ Airport	Non-bandara/ Non-airport	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated	
<b>LIABILITAS</b>						<b>LIABILITIES</b>
Kantor Pusat	-	11.265.085.086	11.265.085.086	(416.824.767)	10.848.260.319	Head Office
Bandara Adi Sucipto	1.325.063.685	95.611.436	1.420.675.121	(52.567.077)	1.368.108.044	Adi Sucipto Airport
Bandara Adi Soemarmo	30.844.241	2.605.755	33.449.996	(1.237.699)	32.212.297	Adi Soemarmo Airport
Bandara Ahmad Yani	653.868.301	5.007.455	658.875.756	(24.379.375)	634.496.381	Ahmad Yani Airport
Bandara Juanda	251.157.117	33.150.238	284.307.355	(10.519.792)	273.787.563	Juanda Airport
Bandara Syamsudin Noor	630.363.396	11.489.161	641.852.557	(23.749.491)	618.103.066	Syamsudin Noor Airport
Bandara Sultan Aji M. Sulaiman	83.913.043	20.612.422	104.525.465	(3.867.596)	100.657.869	Sultan Aji M. Sulaiman Airport
Bandara I Gusti Ngurah Rai	703.169.794	90.654.834	793.824.628	(29.372.703)	764.451.925	I Gusti Ngurah Rai Airport
Bandara Praya	125.508.088	17.488.480	142.996.568	(5.291.084)	137.705.484	Praya Airport
Bandara El Tari	49.831.983	4.239.179	54.071.162	(2.000.713)	52.070.449	El Tari Airport
Bandara Sultan Hassanudin	159.711.036	1.531.807	161.242.843	(5.966.223)	155.276.620	Sultan Hassanudin Airport
Bandara Sam Ratulangi	57.522.858	2.409.272	59.932.130	(2.217.577)	57.714.553	Sam Ratulangi Airport
Bandara Pattimura	29.933.570	2.208.135	32.141.705	(1.189.290)	30.952.415	Pattimura Airport
Bandara Frans Kaisiepo	25.444.175	1.358.917	26.803.092	(991.754)	25.811.338	Frans Kaisiepo Airport
Strategic Business Unit DPS	55.824.598	589.546.474	645.371.072	(23.879.682)	621.491.390	Strategic Business Unit DPS
<b>Entitas anak</b>						<b>Subsidiaries</b>
Angkasa Pura Logistik	-	73.581.637	73.581.637	(2.722.629)	70.859.008	Angkasa Pura Logistik
Angkasa Pura Properti	-	277.630.431	277.630.431	(10.272.736)	267.357.695	Angkasa Pura Properti
Angkasa Pura Hotel	-	78.487.800	78.487.800	(2.904.164)	75.583.636	Angkasa Pura Hotel
Angkasa Pura Suport	-	411.053.156	411.053.156	(15.209.573)	395.843.583	Angkasa Pura Suport
Angkasa Pura Retail	-	26.944.296	26.944.296	(996.979)	25.947.317	Angkasa Pura Retail
<b>Total liabilitas</b>	<b>4.182.155.885</b>	<b>13.010.695.971</b>	<b>17.192.851.856</b>	<b>(636.160.904)</b>	<b>16.556.690.952</b>	<b>Total liabilities</b>

**42. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING**

- a) Perjanjian Konsesi - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Pada tanggal 15 Desember 2015, Perusahaan mengadakan Perjanjian dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) mengenai pemberian konsesi untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian No. HK.201/2/8/DRJU.kum-2015 dan No. SP.333/HK.06.03/2015/DU (Perjanjian Konsesi).

DJPU memberikan hak kepada Perusahaan melakukan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan termasuk meliputi pelayanan sehubungan dengan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos. Layanan tersebut mencakup penyediaan dan/atau pengembangan:

- Fasilitas kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara;
- Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos;
- Fasilitas elektronik, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan
- Lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang digunakan untuk mendukung transportasi udara.

**42. SIGNIFICANT AGREEMENTS**

- a) Concession Agreement - Directorate General of Civil Aviation

On December 15, 2015, the Company entered into an agreement with the Directorate General of Civil Aviation (DJPU) regarding the concession provided to the Company to conduct airport services as stated in agreement No. HK.201/2/8/DRJU.kum-2015 and No. SP.333/HK.06.03/2015/DU (Concession Agreement).

DJPU granted the right to the Company to conduct the airport service activities including aircraft, passenger, freight and postal related services. Such services encompass for the provision and/or development of:

- Facilities for service activities for landing, takeoff, maneuvering, parking and storage of aircraft;
- Terminal facilities for passenger transport services, cargo, and mail;
- Electronic facilities, electricity, water, and waste disposal installations; and
- Areas for the building, grounds, and industry as well as buildings provided to support air transportation.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**42. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

- a) Perjanjian Konsesi - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (lanjutan)

Ketentuan-ketentuan penting dalam Perjanjian Konsesi adalah sebagai berikut, antara lain:

- Perusahaan diwajibkan untuk membayar pendapatan konsesi dari pelayanan jasa kebandarudaraan sebesar 2,5% dari pendapatan pelayanan jasa kebandarudaraan per tahun, yang akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- Perjanjian Konsesi berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian, dan diperpanjang selama 30 tahun sesuai kesepakatan DJPU dan Perusahaan, setelah Perusahaan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

DJPU memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Konsesi berdasarkan Perjanjian Konsesi sesuai dengan kewenangannya yang diatur oleh Undang-Undang.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, perpanjangan perjanjian tersebut masih dalam proses.

Pada tanggal 28 Juni 2018, Perusahaan telah menerima tagihan pembayaran konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan tahun 2016 dari DJPU sebesar Rp91.505.658. Berdasarkan surat tagihan tersebut setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 2% setiap bulannya, setelah 30 hari sejak dikeluarkannya tagihan tersebut. Pada tanggal 31 Oktober 2019, Perusahaan telah melakukan pembayaran secara penuh atas tagihan tersebut di atas.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan mencatat akrual beban konsesi masing-masing sebesar Rp279.472.029 dan Rp339.808.404.

Sehubungan dengan keterlambatan pembayaran tagihan tersebut di atas, Perusahaan telah mencadangkan denda sebesar Rp27.451.797 dan Rp9.150.566 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Catatan 17).

**42. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

- a) *Concession Agreement - Directorate General of Civil Aviation (continued)*

*Important conditions in the Concession Agreement, among others, are as follows:*

- *The Company is required to pay concession revenue of airport service activities amounting to 2.5% from revenue of airport service activities per year, which will be evaluated every 5 (five) years.*
- *The Concession Agreement is valid for 2 (two) years, starting from date the Concession Agreement is signed, and extended for 30 years as agreed by DJPU and the Company, after the Company received approval from Shareholders General Meeting.*

*DJPU has the authority to supervise and control the implementation of the Concession based on Concession Agreement in accordance with its authority which is regulated by the Law.*

*Up until the date of completion of the consolidated financial statements, the extension of the agreement is still in process.*

*On June 28, 2018, the Company has received an invoice from DJPU for payment of aeronautical service concession for year 2016 amounting Rp91,505,658. Based on the information stated in the invoice, every late payment made 30 days after the date of invoice will be subjected to penalty of 2% each month. On October 31, 2019, the Company has been fully paid the invoice as stated above.*

*On December 31, 2019 and 2018, the Company has recorded accrued concession expense amounted to Rp279,472,029 and Rp339,808,404, respectively.*

*In relation with the late payment of the invoice as stated above, the Company has accrued the penalty amounting to Rp27,451,797 and Rp9,150,566 as of December 31, 2019 and 2018, respectively (Notes 17).*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**42. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

- b) Perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Bandara Internasional Ahmad Yani

Pada tanggal 17 Juni 2014, Perusahaan dan TNI AD menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagian tanah Milik TNI AD di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian. Perjanjian kerja sama ini mempunyai maksud dan tujuan melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang untuk penerbangan sipil dan penerbangan militer dengan prinsip prinsip korporasi.

Ruang lingkup kerjasama adalah :

- a. Pemanfaatan tanah milik TNI AD seluas 885.500 m<sup>2</sup> dimana tanah seluas 676.089 m<sup>2</sup> akan digunakan untuk areal pengembangan bandar udara dan tanah seluas 208.411 m<sup>2</sup> akan digunakan untuk areal resapan pada sisi utara areal pengembangan bandar udara.
  - b. Pembayaran kontribusi kepada negara oleh Perusahaan berupa kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan lahan.
  - c. Aset yang diperoleh dari kerja sama pemanfaatan ini akan diserahkan oleh Perusahaan kepada TNI AD setelah perjanjian berakhir yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
- c) Perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya

Pada tanggal 13 Februari 2014, Perusahaan dan TNI AL menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah dan fasilitas milik TNI AL di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan pengembangan Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya untuk kepentingan penerbangan sipil maupun penerbangan TNI AL.

**42. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

- b) *Cooperation agreements utilization of land owned by Indonesian Army (TNI AD) in Ahmad Yani International Airport*

*On June 17, 2014 the Company and TNI AD signed into cooperation agreement utilization of some of the land owned by TNI AD in Ahmad Yani International Airport for period of 30 (thirty) years from the signing of the agreement. This cooperation agreement has the sole purpose to enable the development of facilities and infrastructure Ahmad Yani International Airport in Semarang for civil aviation and military aviation with the principles of the corporation.*

*The scope of cooperation are :*

- a. *The utilization of land owned by TNI AD area of 885,500 m<sup>2</sup> where the land of 676,089 m<sup>2</sup> will be used for airport development area and the land of 208,411 m<sup>2</sup> will be used for recharge areas on the north side of the airport development area.*
  - b. *Payment of contributions to the country by the Company is in the form of fixed contributions and profit sharing on land use.*
  - c. *Assets obtained from this utilization cooperation will be handed over by the Company to TNI AD after the agreement ends which is stated in the minutes of handover.*
- c) *Cooperation agreements utilization of land owned by Indonesian Navy (TNI AL) Juanda International Airport in Surabaya*

*On February 13, 2014, the Company and TNI AL signed into cooperation agreement utilization of and facilities owned by TNI AL in International Airport Juanda Surabaya for period of 30 (thirty) years from the signing of the agreement. This cooperation agreement intended to carry out the development of Juanda International Airport for the benefit of civil aviation and aviation Indonesian Navy.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**42. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

- c) Perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya (lanjutan)

Objek perjanjian kerjasama ini adalah tanah seluas 3.143.352 m<sup>2</sup> beserta fasilitas di atasnya milik TNI AL yang akan dimanfaatkan oleh Perusahaan.

Sarana dan prasarana yang telah ada sebelumnya maupun dibangun oleh Perusahaan akan diserahkan kepada TNI AL. Perusahaan diwajibkan melaksanakan pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan tanah beserta fasilitasnya dari hasil pembangunan dan pengembangan Terminal 2 Bandara.

- d) Perjanjian jasa konstruksi bandara baru di Kulon Progo

Pada tanggal 21 Agustus 2018, Perusahaan dan PP KSO menandatangani perjanjian pengadaan jasa No. PJKP-18003169 untuk melakukan pembangunan infrastruktur bandara baru di Kulon Progo dengan nilai kontrak sebesar Rp6.138.506.000 (termasuk PPN). Jangka waktu perjanjian selama 730 hari terhitung sejak diterbitkannya 16 Juli 2018 sampai dengan 14 Juli 2020. PP KSO juga diwajibkan menyelesaikan minimum operasi pada tanggal 30 April 2019. Pada tanggal 31 Desember 2019, persentase penyelesaian atas pengerjaan konstruksi tersebut telah mencapai 88,43% dari keseluruhan pekerjaan.

- e) Perjanjian jasa konstruksi gedung terminal dan fasilitas penunjang Bandara Syamsudin Noor

Pada tanggal 7 Mei 2018, Perusahaan dan PP-WIKA Gedung KSO menandatangani perjanjian pengadaan jasa No. PJKP-18002942 untuk melakukan pembangunan gedung terminal dan fasilitas penunjangnya (Paket 1) Bandara Syamsudin Noor-Banjarmasin dengan nilai kontrak sebesar Rp1.173.113.700 (nilai termasuk PPN). Jangka waktu perjanjian selama 540 hari terhitung sejak diterbitkannya 7 Mei 2018 sampai dengan 28 Oktober 2019. Pada tanggal 31 Desember 2019, persentase penyelesaian atas pengerjaan konstruksi tersebut telah mencapai 100% dari keseluruhan pekerjaan.

**42. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

- c) *Cooperation agreements utilization of land owned by Indonesian Navy (TNI AL) Juanda International Airport in Surabaya (continued)*

*The object of this cooperation agreement is an area of 3,143,352 m<sup>2</sup> and the facilities on it owned by TNI AL which will be utilized by the Company.*

*Facilities and infrastructure that have been previously established or built by the Company will be handed over to TNI AL. The Company is required to pay fixed contribution and profit sharing from land use and its facilities from the results of the construction and development of Airport Terminal 2.*

- d) *Construction service agreements of new airport at Kulon Progo*

*On August 21, 2018, the Company and PP KSO signed service agreement No. PJKP-18003169 to construct infrastructure of new airport at Kulon Progo with contract value of Rp6,138,506,000 (include VAT). The term of the agreement is 730 days since July 16, 2018 until July 14, 2020. PP KSO also obliged to complete minimum operation on April 30, 2019. As of December 31, 2019, the percentage of completion of the construction has reached 88.43% from total construction.*

- e) *Construction service agreements of terminal building and supporting facilities at Syamsudin Noor Airport*

*On May 7, 2018, the Company and PP-WIKA Gedung KSO signed construction service agreement No. PJKP-18002942 to construct terminal building and supporting facilities (Package 1) Syamsudin Noor Airport-Banjarmasin with contract value of Rp1,173,113,700 (include VAT). The term of the agreement is 540 days started on May 7, 2018 until October 28, 2019. As of December 31, 2019, the percentage of completion of the construction has reached 100% from total construction.*



**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**42. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

- f) Perjanjian jasa konstruksi gedung terminal dan fasilitas penunjang Bandara Surabaya Internasional Juanda

Pada tanggal 4 Juli 2019, Perusahaan dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menandatangani perjanjian pengadaan jasa No. PJKP-19003930 untuk melakukan perluasan dan pembenahan interior gedung terminal 1 dan fasilitas penunjangnya di Bandara Internasional Juanda Surabaya dengan nilai kontrak sebesar Rp685.500.000 (nilai termasuk PPN). Jangka waktu perjanjian selama 420 hari terhitung sejak 4 Juli 2019 sampai dengan 26 Agustus 2020. Pada tanggal 31 Desember 2019, persentase penyelesaian atas pengerjaan konstruksi tersebut telah mencapai 49,78% dari keseluruhan pekerjaan.

- g) Perjanjian jasa konstruksi gedung terminal dan fasilitas penunjang Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar.

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan berbagai kontraktor untuk pekerjaan konstruksi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar dengan rincian sebagai berikut:

<b>Nama Kontraktor/ Contractor Name</b>	<b>Nilai Kontrak (termasuk PPN)/ Contract Amount (include VAT)</b>	<b>Jangka Waktu Pekerjaan/ Contract Term</b>	<b>Pekerjaan/ Works</b>
PT PP (Persero) Tbk	1.497.500.000.000	344 hari/days (14 Maret/March 2018 - 21 Februari/February 2019)	Desain dan pembangunan apron sisi barat
PT Virama Karya (Persero)	179.001.790.000	268 hari/days (24 Januari/January 2018 - 19 Oktober/October 2018)	Desain dan pembangunan apron sisi timur dan Sewage Treatment Plant (STP)
PT Amarta Karya (Persero)	49.674.979.200	269 hari/days (21 Februari/February 2018 - 17 November/November 2018)	Design & Build pekerjaan gedung VVIP, Base ops TNI dan Penggantian Line Maintenance Airlines di Bandara Udara
PT Angkasa Pura Properti	117.879.833.500	329 hari/days (5 Maret/March 2018 - 28 Januari/January 2019)	Perencanaan dan pembuatan perluasan lantai 2 counter check in penumpang di terminal internasional Bandar Udara Internasional Denpasar

**42. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

- f) Construction service agreements of terminal building and supporting facilities at Juanda International Airport Surabaya

On July 4, 2019, the Company and PT Waskita Karya (Persero) Tbk. signed construction service agreement No. PJKP-19003930 to expand and revamp terminal building and its supporting facilities of Juanda International Airport Surabaya with contract value of Rp685,500,000 (include VAT). The term of the agreement is 420 days started on July 4, 2019 until August 26, 2020. As of December 31, 2019, the percentage of completion of the construction has reached 49.78% from total construction.

- g) Construction service agreements of terminal building and supporting facilities at I Gusti Ngurah Rai International Airport Denpasar.

The Company entered into agreements with various contractors for construction work at I Gusti Ngurah Rai International Airport Denpasar with the following details:

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**42. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

- h) Perjanjian jasa konstruksi gedung terminal dan fasilitas penunjang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

Pada tanggal 19 Maret 2019, Perusahaan dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. menandatangani perjanjian pengadaan jasa No. PJKP-19003608 untuk melakukan konstruksi dan pengembangan gedung terminal dan fasilitas penunjangnya di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan nilai kontrak sebesar Rp2.666.418.700 (nilai termasuk PPN). Jangka waktu perjanjian terhitung sejak 27 Februari 2019 sampai dengan 11 Mei 2021. Pada tanggal 31 Desember 2019, persentase penyelesaian atas pengerjaan konstruksi tersebut telah mencapai 35,06% dari keseluruhan pekerjaan.

- i) Perjanjian dengan Pihak Berelasi

1. Perjanjian kerjasama tentang bangun guna serah (BOT) atas tanah seluas 12.000 m<sup>2</sup> di Sunset Road Bali antara Perusahaan dengan APP

Pada tanggal 19 September 2012, Perusahaan dan APP menandatangani perjanjian kerjasama No.SP/96.HK.06.03/2012/DU dan No. APP.001/PKS/2012/DU tentang bangun serah guna (BOT) atas tanah seluas 12.000 m<sup>2</sup> di Sunset Road Bali dimana tanah milik Perusahaan akan diserahkan kepada APP untuk dibangun kondotel dan fasilitas penunjang yang selanjutnya dikelola dan diusahakan oleh APP. Jangka waktu perjanjian kerjasama adalah 32 (tiga puluh dua) tahun dengan 6 (enam) bulan persiapan dengan kompensasi yang akan diterima Perusahaan adalah sebesar Rp39.168.000.

2. Perjanjian kerjasama tentang bangun guna serah (BOT) atas tanah seluas 16.386 m<sup>2</sup> di Sunset Road Bali antara Perusahaan dan APP.

Pada tanggal 4 Agustus 2014, Perusahaan dan APP menandatangani perjanjian kerjasama No. SP.187/KB.03.02/2014/PD dan No. APP. 001/PKS/2014/DU tentang bangun serah guna (BOT) atas tanah seluas 16.386 m<sup>2</sup> di Sunset Road Bali dimana tanah milik Perusahaan akan diserahkan kepada APP untuk dibangun kondotel, vilatel, area komersial dan fasilitas penunjang yang selanjutnya dikelola dan diusahakan oleh APP.

**42. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

- h) Construction service agreements of terminal building and supporting facilities at Sultan Hasanuddin International Airport Makassar.

On March 19, 2019, the Company and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. signed construction service agreement No. PJKP-19003608 to construct and develop terminal building and its supporting facilities of Sultan Hasanuddin Airport Makassar with contract value of Rp2,666,418,700 (include VAT). The term of the agreement is started on February 27, 2019 until May 11, 2021. As of December 31, 2019, the percentage of completion of the construction has reached 35,06% from total construction.

- i) Agreements with Related Parties

1. Cooperation agreement on build operation transfer (BOT) on land covering an area of 12,000 m<sup>2</sup> in Sunset Road Bali between the Company and APP

On September 19, 2012, the Company and APP signed into cooperation agreement No.SP/96.HK.06.03/2012/DU and No. APP.001/PKS/2012/DU regarding the use of building (BOT) on land of 12,000 m<sup>2</sup> on Sunset Road Bali where the Company's land will be handed over to APP to build condotels and supporting facilities which managed by APP. The period of the cooperation agreement is 32 (thirty two) years with 6 (six) months of preparation with the compensation to be received by the Company amounting to Rp39,168,000.

2. Cooperation agreement on build operation transfer (BOT) on land covering an area of 16,386 m<sup>2</sup> in Sunset Road Bali between the Company and APP.

On August 4, 2014, the Company and APP signed into cooperation agreement No. SP.187/KB.03.02/ 2014/PD and No. APP. 001/PKS/2014/DU regarding the use of building (BOT) on area of 16,386 m<sup>2</sup> on Sunset Road Bali where the Company's land will be handed over to APP to build condotel, vilatel, commercial areas and supporting facilities which are managed by APP.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**42. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

i) Perjanjian dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

2. Perjanjian kerjasama tentang bangun guna serah (BOT) atas tanah seluas 16.386 m<sup>2</sup> di Sunset Road Bali antara Perusahaan dan APP (lanjutan).

Jangka waktu perjanjian kerjasama adalah 32 (tiga puluh dua) tahun dengan 6 (enam) bulan persiapan sejak tanggal 4 Agustus 2014. Kompensasi yang akan diterima Perusahaan adalah sebesar Rp54.000.000.

j) Perjanjian jasa manajemen untuk pengembangan komersial dan operasional bandara dengan PT GVK Services Indonesia

Pada tanggal 1 November 2012, Perusahaan dan PT GVK Services Indonesia (GVK) menandatangani perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, GVK akan memberikan jasa manajemen untuk pengembangan komersial dan operasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Atas jasa yang diberikan GVK tersebut, GVK akan memperoleh imbalan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Perjanjian ini telah diamandemen sehingga berlaku selama 5 tahun dan telah berakhir pada tanggal 30 November 2017.

k) Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Bandara Sentani

Pada tanggal 13 Oktober 2019, Perusahaan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Dephub) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Pada Bandar Udara Kelas I Utama Sentani Jayapura No. HK.201/0027/KUM/BRJU/X/2019 dan SP.314/HK.09.01/2019/DU. Perjanjian ini berlaku selama 30 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.

Ruang lingkup kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengelola dan melakukan optimalisasi penyediaan dan pengembangan Bandar Udara Sentani Jayapura sehingga meningkatkan perannya dalam mendukung kegiatan perekonomian.
- Memberikan kontribusi tetap (Catatan 9) dan pembagian keuntungan atas pengelolaan Bandar Udara Sentani Jayapura sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Penyerahan hasil pengembangan, pembangunan dan penambahan fasilitas Bandar Udara Sentani Jayapura dari Perusahaan kepada Dephub.

**42. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

i) Agreements with Related Parties (continued)

2. Cooperation agreement on build operation transfer (BOT) on land covering an area of 16,368 m<sup>2</sup> in Sunset Road Bali between the Company and APP (continued).

The term of this agreement is 32 (thirty two) years with six (6) months from the date of preparation of August 4, 2014. Compensation for the Company amounted Rp54,000,000.

j) Management services agreement for commercial and operation development with PT GVK Services Indonesia

On November 1, 2012, the Company and PT GVK Services Indonesia (GVK) entered into agreement. Based on agreement, GVK will provide management services for commercial and operation development in I Gusti Ngurah Rai Bali International Airport. In relation with services given by GVK, GVK will receive certain compensation as stated in agreement. The agreement has been amended to be effective for 5 years and ended on November 30, 2017.

k) Cooperation Agreement of Utilization of Sentani Airport

On October 13, 2019, the Company and Directorate General of Civil Aviation Ministry of Transportation Republic Indonesia (Dephub) signed Cooperation Agreement of State Property Utilization of Main Class I Sentani Airport Jayapura No. HK.201/0027/KUM/BRJU/X/2019 and SP.314/HK.09.01/2019/DU. This agreement is effective for 30 years from signing date of the agreement.

Scopes of the cooperation are as follows:

- Manage and optimize provision and development of Sentani Airport Jayapura as the result increase its role in developing the economy activities.
- Provide permanent contribution (Note 9) and profit sharing for management of Sentani Airport Jayapura as non-tax state revenue (PNBP).
- Hand over of the result of the development, construction and addition facilities of Sentani Airport Jayapura from the Company to Dephub.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**43. KONTINGENSI**

- a) PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah)

Perusahaan menerima gugatan perdata dari BNI Syariah dengan nilai gugatan sebesar Rp85.334.939 terkait pembayaran kepada PT Slipi Raya Utama yang tidak melalui rekening BNI Syariah sehubungan dengan pekerjaan pembangunan terminal penumpang dan fasilitas penunjangnya di Bandara Internasional Lombok.

Berdasarkan Putusan No. 315/PDT/2015/PTDKI.jo.No.556/PDT.G/2013/PN. JKT.PST dan Putusan Nomor 315/PDT/2015/PT DKI, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan gugatan dari BNI Syariah dan menghukum Perusahaan untuk melaksanakan prestasinya sebesar Rp2.491.890. Atas putusan tersebut, Perusahaan mengajukan permohonan kasasi tanggal 26 Januari 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan telah membukukan pencadangan biaya sebesar Rp87.826.828 pada akun beban akrual.

Pada tahun 2018, Perusahaan menerima Putusan Mahkamah Agung Nomor 1461 K/Pdt/2017 tanggal 27 September 2017 dimana Perusahaan dihukum untuk melaksanakan prestasinya sebesar Rp2.491.890. Atas hal tersebut, pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah membukukan pendapatan sebesar Rp85.334.939 pada akun penghasilan lain-lain (Catatan 34).

- b) PT Sepinggan Sarana Utama (SSU)

PT Sepinggan Sarana Utama (SSU) mengajukan permohonan arbitrase kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dimana SSU menyatakan bahwa Perusahaan telah melakukan tindakan ingkar janji atas perjanjian kerjasama pembangunan dan pengusahaan hotel transit di Bandar Udara Sepinggan Balikpapan. Pada tanggal 5 Juli 2018, Perusahaan menerima Putusan Perkara No. 982/X/ARB-BANI/2017 dari BANI dimana Perusahaan diperintahkan untuk membayar ganti rugi atas investasi yang sudah dilakukan SSU dan mengembalikan uang jaminan kesungguhan kepada SSU masing-masing sebesar Rp104.793.567 dan Rp3.750.000.

**43. CONTINGENCIES**

- a) PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah)

The Company received civil suit from BNI Syariah with with a claim value of Rp85,334,939 regarding payment to PT Slipi Raya Utama which is not through BNI Syariah's account in connection with the construction of a passenger terminal and its supporting facilities at Lombok International Airport.

Based on Decision No. 315/PDT/2015/PTDKI.jo.No.556/PDT.G/2013/PN.JKT.PST and Decision No. 315/PDT/2015/PT DKI, the Central Jakarta District Court and the Jakarta High Court granted a lawsuit from BNI Syariah and sentenced the Company to impose a performance of Rp2,491,890. As a result of this decision, the Company requested cassation on January 26, 2016.

On December 2017, the Company has recorded accrued expense amounted to Rp87,826,828 on accrued expense.

In 2018, the Company received the Supreme Court's Decision No. 1461 K/Pdt/2017 dated September 27, 2017 where the Company supported its performance of Rp2,491,890. On December 31, 2018, the Company has recorded income amounted to Rp85,334,939 as other income (Note 34).

- b) PT Sepinggan Sarana Utama (SSU)

PT Sepinggan Sarana Utama (SSU) submitted an arbitration request to the Indonesian National Arbitration Board (BANI) where the SSU stated that the Company has defaulted the cooperation agreement for the construction and operation of transit hotel at Balikpapan Sepinggan Airport. On July 5, 2018, the Company received Case Verdict No. 982/X/ARB-BANI/2017 from BANI where the Company was ordered to pay compensation for investments made by SSU and return the guarantee deposit to the SSU amounting to Rp104,793,567 and Rp3,750,000, respectively.

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**43. KONTINGENSI (lanjutan)**

b) PT Sepinggan Sarana Utama (SSU) (lanjutan)

Perusahaan menyampaikan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Jakarta Pusat yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Oktober 2018 yang menyatakan antara lain:

1. Putusan arbitrase melanggar ketertiban umum karena mengabaikan laporan hasil audit investigatif Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
2. Berdasarkan risalah rapat tanggal 16 Agustus 2018 dengan SSU, SSU tidak keberatan apabila ganti rugi dihitung dengan kewajiban-kewajibannya.
3. SSU setuju nilai ganti rugi dikurangi dengan pembayaran atas koridor penghubung.
4. SSU masih memiliki kewajiban pembayaran sewa tanah dan konsesi kepada termohon eksekusi.
5. SSU berkewajiban menyerahkan tanah milik Perusahaan dan hotel transit menjadi milik Perusahaan.

Perusahaan menyampaikan surat permohonan kembali kepada Ketua Pengadilan Jakarta Pusat yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 November 2018 yang menyatakan antara lain:

1. SSU setuju nilai ganti rugi dikurangi dengan pembayaran atas bangunan koridor penghubung yang menjadi bagian dari hotel transit.
2. SSU masih memiliki kewajiban pembayaran sewa tanah dan konsesi kepada termohon eksekusi.
3. Perlu dilakukan penilaian ulang atas nilai aset hotel tersebut.

Pada tanggal 15 Mei 2019, Perusahaan dan SSU menandatangani surat perdamaian dimana SSU sepakat untuk menyerahkan tanah berikut bangunan hotel ke Perusahaan dan Perusahaan membayar sebesar Rp86,7 miliar. Pada tanggal 16 Mei 2019, Perusahaan telah melakukan pembayaran sejumlah tersebut kepada SSU.

**43. CONTINGENCIES (continued)**

b) *PT Sepinggan Sarana Utama (SSU)(continued)*

*The Company submitted an application letter to the Chairman of the Central Jakarta Court received by the Central Jakarta District Court on October 23, 2018 which stated, among others:*

- 1. The arbitration award violates public order because it ignores the report on the results of the investigative audit of the Financial and Development Supervisory Agency.*
- 2. Based on the minutes of the meeting dated August 16, 2018 with the SSU, SSU does not object if compensation is calculated with its obligations.*
- 3. SSU agrees to the compensation value reduced by payment for the connecting corridor.*
- 4. SSU still has the obligation to pay land leases and concessions to the defendant.*
- 5. SSU is obliged to hand over the land owned by the Company and the transit hotel to belong to the Company.*

*The Company submitted a letter of application back to the Chairman of the Central Jakarta Court received by the Central Jakarta District Court on November 6, 2018 stating, among others:*

- 1. SSU agrees the compensation value is reduced by paying for the connecting corridor building that is part of the transit hotel.*
- 2. SSU still has the obligation to pay land leases and concessions to the defendant.*
- 3. It is necessary to re-evaluate the value of the hotel assets.*

*On May 15, 2019, the Company and SSU signed an amicable letter where SSU agreed to hand over the land and hotel building to the Company and the Company will make payment of Rp86.7 billion. On May 16, 2019, the Company has paid the stated amount to the SSU.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**44. INFORMASI PENTING LAINNYA**

PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Juanda - Surabaya mencatat aset tanah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan No.: KEP- 23/X/1981; 661/KMK.011/1981; KM.217/AU.106/ Pbb. 81 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Pengalihan Pengelolaan Penerbangan Sipil di Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut (TNI AL) Juanda dari Departemen Pertahanan dan Keamanan kepada Departemen Perhubungan dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1984 tanggal 19 September 1984 dimana kekayaan negara pada Bandara Internasional Juanda telah dipisahkan dan menjadi tambahan modal pemerintah pada Perusahaan Umum Angkasa Pura I.

Tanah pada areal Bandara Internasional Juanda yang dikuasai oleh PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Juanda Surabaya tersebut juga diklaim oleh TNI AL RI sebagai tanah miliknya.

Upaya proses penyelesaian kepemilikan tanah tersebut di atas antara PT Angkasa Pura I (Persero) dan TNI AL telah beberapa kali dilakukan namun belum terdapat kesepakatan penyelesaian sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian.

**45. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN**

**MANAJEMEN RISIKO**

Liabilitas keuangan pokok Kelompok Usaha terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang bank, utang obligasi, utang jangka panjang lainnya dan utang jaminan pelanggan. Tujuan utama dari liabilitas keuangan tersebut adalah untuk mengumpulkan dana untuk operasi Kelompok Usaha. Kelompok Usaha juga memiliki berbagai aset keuangan seperti kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan yang masih harus diterima, aset keuangan tersedia untuk dijual dan aset tidak lancar lain-lain yang timbul secara langsung dari kegiatan usahanya.

Kegiatan Kelompok Usaha mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi Utama dari manajemen risiko Kelompok Usaha adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko. Kelompok Usaha secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar dan praktik pasar terbaik.

**44. OTHER IMPORTANT INFORMATION**

*PT Angkasa Pura I (Persero) International Airport Juanda - Surabaya recorded land assets in accordance with the Joint Decree (SKB) The Minister of Defence Security/Commander of the Armed Forces, Minister of Transportation and Minister of Finance No.KEP-23/X/1981; 661/KMK.011/1981; KM.217/AU.106/ Pbb.81 dated October 28, 1981 regarding the Transfer of Management of Civil Aviation in the Navy Air Base Juanda from the Department of Defense and Security to the Department of Transportation and Government Regulation No.30 of 1984 dated September 19, 1984 in which the wealth of the country in Juanda International Airport has been separated and become additional government capital in the Public Company Angkasa Pura I .*

*Land at the Juanda International Airport area controlled by PT Angkasa Pura I (Persero) Juanda Branch Surabaya also claimed by Indonesian National Army-Navy as their land.*

*The effort of settlement process of land ownership between PT Angkasa Pura I (Persero) and the Indonesian National Army - Navy was arranged several times, however there is no agreement to resolve until the date of completion of the consolidated financial statements.*

**45. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES**

**RISK MANAGEMENT**

*The principal financial liabilities of the Group consist of trade payables, other payables, accrued expenses, short-term employee benefit liabilities, bank loans, bonds payable, other non-current payables and customer deposits. The main purpose of these financial liabilities is to raise funds for the operations of the Group. The Group also has various financial assets such as cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, accrued revenues, available-for-sale financial assets and other non-current assets which arise directly from its operations.*

*The Group's activities involve taking on risks in a targeted manner and managing them professionally. The main functions of the Group's risk management are to identify all key risks for the Group, measure these risks and manage the risk positions. The Group regularly reviews its risk management policies and systems to reflect changes in markets and best practices.*

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**45. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN  
KEUANGAN (lanjutan)**

**MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

Tujuan Kelompok Usaha dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian dan meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Kelompok Usaha.

Kelompok Usaha mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang berpotensi negatif terhadap pencapaian tujuan Kelompok Usaha.

Direksi menyediakan kebijakan tertulis manajemen risiko secara keseluruhan termasuk kebijakan tertulis untuk area khusus seperti risiko mata uang asing, risiko tingkat bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas instrumen keuangan. Masing-masing unit usaha melaksanakan manajemen risiko berdasarkan kebijakan - kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Biro Manajemen Risiko dan Kepatuhan ("BMRK") memonitor pelaksanaan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Kelompok Usaha.

Risiko signifikan yang berasal dari instrumen keuangan Kelompok Usaha diantaranya adalah risiko tingkat suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas.

**a. Risiko suku bunga**

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko perubahan suku bunga pasar yang berkaitan dengan kas dan setara kas, investasi jangka pendek dan utang bank.

Saat ini, Perusahaan belum memiliki kebijakan formal untuk lindung nilai risiko tingkat suku bunga.

Pergerakan tingkat suku bunga diawasi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan Perusahaan. Pinjaman dalam berbagai tingkat suku bunga menyebabkan Perusahaan terekspos risiko tingkat bunga. Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Perusahaan melakukan analisis pada pergerakan marjin tingkat bunga dan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

**45. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE  
AND POLICIES (continued)**

**RISK MANAGEMENT (continued)**

The Group's aim in managing the financial risks is to achieve an appropriate balance between risk and return, and minimize potential adverse effects on the Group's financial performance.

The Group defines financial risk as the possibility of losses or profits foregone, which may be caused by internal or external factors which might have negative potential impact to the achievement of the Group's objectives.

The Directors provide written policies for overall risk management, as well as written policies covering specific areas, such as foreign currency risk, interest rate risk, credit risk and liquidity risk of financial instruments. Each business unit carries out the risk management based on the written policies approved by the Board of Directors. Risk Management and Compliance Bureau monitors the risk management carried out by the Group.

The significant risks arising from financial instruments to which the Group is exposed are interest rate risk, credit risk and liquidity risk.

**a. Interest rate risk**

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

The Company is exposed to the risk of changes in market interest rates related to cash and cash equivalents, short-term investment and bank loans.

Currently, the Company does not yet have a formal policy to hedge interest rate risk.

Interest rate movements are monitored to minimize any negative impact on the Company's financial position. Borrowings at different interest rates caused the Company exposed to interest rate risk. To measure the market risk of interest rate movements, the Company conducts analysis on interest margin and the maturity profile of financial assets and liabilities based on schedule of changes in interest rates.



**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**45. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN  
KEUANGAN (lanjutan)**

**MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**a. Risiko suku bunga (lanjutan)**

Perusahaan menghadapi risiko tingkat suku bunga atas penarikan pinjaman bank jangka panjang dan obligasi masing-masing sebesar Rp19.763.184.044 dan Rp6.327.995.013 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jika tingkat bunga atas pinjaman lebih tinggi/rendah 1% dan variabel lain dianggap tetap, laba setelah pajak untuk tahun berjalan akan lebih rendah/tinggi masing-masing sebesar Rp88.142.103 dan Rp23.841.609, terutama sebagai akibat tingginya/rendahnya beban bunga dari pinjaman dengan suku bunga mengambang.

**b. Risiko kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Kelompok Usaha akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau *counterparty* yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Risiko kredit terutama berasal dari piutang usaha dari para pelanggan sehubungan dengan pendapatan usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkaitnya.

Kelompok Usaha terekspos risiko kredit terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Risiko kredit dikendalikan dengan pengawasan terus menerus atas saldo dan penagihan piutang usaha dan piutang lain-lain.

Tabel di bawah ini menunjukkan risiko kredit maksimum untuk komponen-komponen dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

	31 Desember 2019/December 31, 2019				Total/ Total	
	< 1 tahun/ < 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	> 3 tahun/ > 3 years	Total/ Total		
Piutang usaha	482.468.952	42.918.765	2.379.410	527.767.127		Trade receivables
Piutang lain-lain	80.344.191	-	-	80.344.191		Other receivables
Pendapatan yang masih harus diterima	291.022.438	-	-	291.022.438		Accrued revenue
<b>Total</b>	<b>853.835.581</b>	<b>42.918.765</b>	<b>2.379.410</b>	<b>899.133.756</b>		<b>Total</b>
	31 Desember 2018/December 31, 2018					
	< 1 tahun/ < 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	> 3 tahun/ > 3 years	Total/ Total		
Piutang usaha	509.909.222	-	-	509.909.222		Trade receivables
Piutang lain-lain	39.711.686	-	-	39.711.686		Other receivables
Pendapatan yang masih harus diterima	298.444.329	-	-	298.444.329		Accrued revenue
<b>Total</b>	<b>848.065.237</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>848.065.237</b>		<b>Total</b>

**45. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE  
AND POLICIES (continued)**

**RISK MANAGEMENT (continued)**

**a. Interest rate risk (continued)**

The Company is exposed to the interest rate risk for the interest-bearing loans drawdowns from long-term bank loan and bonds totalling Rp19,763,184,044 and Rp6,327,995,013 as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

As of December 31, 2019 and 2018, if interest rates on Rupiah-denominated borrowings had been 1% higher/lower with all other variables held constant, profit after tax for the year would have been Rp88,142,103 and Rp23,841,609 lower/higher, respectively, mainly as a result of higher/lower interest expense on floating rate borrowings.

**b. Credit risk**

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from its customers' or counterparties' failure to fulfill their contractual obligations. Credit risk arises mainly from trade receivables from customers relating to operating revenues of airport services and its related services.

The Group is exposed to credit risk mainly from trade receivables and other receivables. Credit risk is controlled by the continuous monitoring and billing accounts receivable balances and other receivables.

The table below shows the maximum exposure to credit risk on the components of the consolidated statement of financial position as of December 31, 2019 and 2018:

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**45. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN  
KEUANGAN (lanjutan)**

**45. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE  
AND POLICIES (continued)**

**MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**RISK MANAGEMENT (continued)**

**c. Risiko likuiditas**

**c. Liquidity risk**

Risiko likuiditas adalah risiko dimana entitas akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmen jangka pendek terkait dengan instrumen keuangan.

Liquidity risk is the risk that the entity will have difficulty in obtaining funds to meet short-term commitments associated with financial instruments.

Mengingat bahwa Perusahaan pada saat ini sedang melakukan pengembangan bandara, peningkatan kapasitas dan pelayanan serta fasilitas kebandarudaraan kearah bandara bertaraf International. Kegiatan Perusahaan tersebut membutuhkan sumber dana arus kas masa depan yang cukup signifikan, maka dalam mengelola likuiditas Perusahaan selalu memantau arus kas dan setara kas agar memadai untuk membiayai operasional rutin.

Currently the Company conducting business development by establishing airport, increase the capacity of airport facilities and services as well as to the international standard airport . The Company's activities require funding of future cash flows are quite significant, then to manage the liquidity of the Company constantly monitors the flow of cash and cash equivalents to be sufficient to finance routine operations.

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi untuk memungkinkan Perusahaan memenuhi komitmen jangka pendek dan operasi normal. Selain itu Perusahaan juga melakukan pengawasan terhadap proyeksi arus kas secara aktual dengan melakukan evaluasi terhadap aset dan liabilitas keuangan yang telah jatuh tempo.

The Company manages liquidity risk by maintaining sufficient cash and cash equivalents to allow the Company fulfill short term commitments and normal operation. The Company is also supervise the cash flow projections actually to evaluate the assets and matured financial liabilities.

**46. NILAI WAJAR**

**46. FAIR VALUE**

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat, yang juga merefleksikan nilai wajarnya, dari instrumen keuangan Kelompok Usaha:

The following table sets out the carrying values, which also reflects the estimated fair values, of the Group's financial instruments:

	<b>31 Desember 2019/ December 31, 2019</b>	<b>31 Desember 2018/ December 31, 2018</b>	
Aset keuangan			Financial assets
Lancar			Current
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>			<u>Loans and receivables</u>
Kas dan setara kas	5.510.903.592	3.149.113.800	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	665.862.312	478.106.781	Short-term investment
Piutang usaha	527.767.127	509.909.222	Trade receivables
Piutang lain-lain	80.344.191	39.711.686	Other receivables
Pendapatan yang masih harus diterima	291.022.438	298.444.329	Accrued revenues
Tidak lancar			Non-current
Investasi jangka panjang	109.819.185	13.361.105	Long-term investment
<b>Total</b>	<b>7.185.718.845</b>	<b>4.488.646.923</b>	<b>Total</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**46. NILAI WAJAR (lanjutan)**

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat, yang juga merefleksikan nilai wajarnya, dari instrumen keuangan Kelompok Usaha: (lanjutan)

**46. FAIR VALUE (continued)**

The following table sets out the carrying values, which also reflects the estimated fair values, of the Group's financial instruments: (continued)

	<b>31 Desember 2019/ December 31, 2019</b>	<b>31 Desember 2018/ December 31, 2018</b>	
Liabilitas keuangan			<i>Financial liabilities</i>
Lancar			<i>Current</i>
<u>Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi</u>			<u><i>Financial liabilities measured at amortized cost</i></u>
Utang usaha	314.867.383	689.340.867	<i>Trade payables</i>
Utang lain-lain	3.292.812.136	3.797.799.960	<i>Other payables</i>
Beban akrual	1.322.288.034	1.539.721.088	<i>Accrued expenses</i>
Utang bank jangka pendek	158.010.670	105.631.070	<i>Short-term bank loans</i>
Bagian jangka pendek pinjaman jangka panjang	538.975.837	941.998.089	<i>Current maturities of long-term bank loans</i>
Tidak lancar			<i>Non-current</i>
Utang bank jangka panjang	16.724.208.207	5.385.996.924	<i>Long-term bank loans</i>
Utang obligasi dan sukuk ijarah	2.994.896.323	2.993.700.828	<i>Bonds payable and sukuk ijarah</i>
Utang jangka panjang lainnya	388.971.461	170.528.854	<i>Other long-term liabilities</i>
<b>Total</b>	<b>25.735.030.051</b>	<b>15.624.717.680</b>	<b>Total</b>

Detail dari liabilitas keuangan Kelompok Usaha dalam nilai tercatat dan nilai wajarnya adalah:

The details of the Group's financial liabilities in their carrying value and fair value are:

<b>31 Desember 2019/December 31, 2019</b>			
	<b>Nilai tercatat/ Carrying value</b>	<b>Nilai wajar/ Fair value</b>	
<b>Liabilitas keuangan</b>			<b>Financial liabilities</b>
<b>Tidak lancar</b>			<b>Non-current</b>
Utang bank jangka panjang	17.308.635.991	17.263.184.044	<i>Long-term bank loans</i>
Utang obligasi dan sukuk ijarah	3.000.000.000	2.994.896.323	<i>Bonds payables and sukuk ijarah</i>
<b>31 Desember 2018/December 31, 2018</b>			
	<b>Nilai tercatat/ Carrying value</b>	<b>Nilai wajar/ Fair value</b>	
<b>Liabilitas keuangan</b>			<b>Financial liabilities</b>
<b>Tidak lancar</b>			<b>Non-current</b>
Utang bank jangka panjang	6.337.784.728	6.327.995.013	<i>Long-term bank loans</i>
Utang obligasi dan sukuk ijarah	3.000.000.000	2.993.700.828	<i>Bonds payables and sukuk ijarah</i>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**46. NILAI WAJAR (lanjutan)**

Selain instrumen keuangan yang dijabarkan di atas, Kelompok Usaha tidak memiliki aset dan/atau kewajiban lain yang dicatat pada nilai wajarnya. Oleh karena itu, Kelompok Usaha tidak mengungkapkan hirarki nilai wajar sebagaimana disyaratkan dalam PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar".

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi terkini antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, bukan dalam penjualan yang dipaksakan atau penjualan likuidasi.

Metode-metode dan asumsi-asumsi di bawah ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk masing-masing kelas instrumen keuangan:

- a. Aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek

Nilai wajar aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang diasumsikan sama dengan nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.

- b. Aset keuangan tidak lancar dan liabilitas keuangan jangka panjang

Nilai wajar dari aset keuangan tidak lancar dan liabilitas keuangan jangka panjang selain aset keuangan tersedia untuk dijual dan utang bank, diasumsikan sama dengan nilai tunai yang akan diterima atau dibayarkan karena saat jatuh temponya tidak dinyatakan dalam kontrak-kontrak terkait, sehingga tidak memungkinkan untuk menentukan kapan aset keuangan dan liabilitas keuangan jangka panjang tersebut akan direalisasi dan dilunasi.

Investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang merupakan aset Perusahaan yang nilai wajarnya didasarkan atas kuotasi harga pasar terakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Pinjaman jangka panjang yang memiliki suku bunga variabel dan tetap disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif (SBE).

**46. FAIR VALUE (continued)**

Other than the financial instruments described above, the Group does not have any other assets or liabilities that are recorded at their fair values. Thus, the Group does not disclose the fair value hierarchy as required in PSAK No. 68, "Fair Value Measurement".

Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current arm's length transaction between knowledgeable willing parties, other than in a forced or liquidation sale.

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instruments:

- a. Current financial assets and liabilities

The fair values of current financial assets and liabilities with maturities of one year or less are assumed to be approximately the same as their carrying amounts due to their short-term nature.

- b. Non-current financial assets and liabilities

The fair values of non-current financial assets and liabilities other than available-for-sale financial assets and bank loans are assumed to be the same as the cash amount that will be received or paid due to the fact that their maturities are not stated in the related contracts, therefore it is not possible to determine when the financial assets and financial liabilities will be realized and settled, respectively.

Short-term investment and long-term investment represent the Company's assets which their fair value are stated with last quoted market prices as of December 31, 2019 and 2018.

Long-term loans with floating and fixed interest rates are carried at amortized costs using Effective Interest Rate (EIR).

**INFORMASI TAMBAHAN**  
**ADDITIONAL INFORMATION**  
**Laporan Keuangan Tersendiri (Entitas Induk)**  
***Individual Financial Statements (Parent Entity)***

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
ENTITAS INDUK SAJA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2019  
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
PARENT ENTITY ONLY  
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
As of December 31, 2019  
(Expressed in thousands Rupiah,  
unless otherwise stated)**

	<b>31 Desember 2019/ December 31, 2019</b>	<b>31 Desember 2018/ December 31, 2018</b>	
<b>ASET</b>			<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>			<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	5.158.432.529	2.708.714.005	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi efek	665.862.312	478.106.781	<i>Investment securities</i>
Piutang usaha, neto			<i>Trade receivables, net</i>
Pihak berelasi	118.316.189	87.760.430	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	299.853.024	349.076.399	<i>Third parties</i>
Piutang lain-lain, neto	18.585.004	2.771.678	<i>Other receivables, net</i>
Persediaan	7.909.551	8.696.313	<i>Inventories</i>
Uang muka dan biaya dibayar di muka	56.427.055	55.583.981	<i>Advances and prepaid expense</i>
Pendapatan akrual	211.165.362	248.048.906	<i>Accrued revenues</i>
Pajak dibayar di muka	631.013.856	226.983.245	<i>Prepaid taxes</i>
Aset lancar lainnya	76.240.275	46.761.356	<i>Other current assets</i>
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>	<b>7.243.805.157</b>	<b>4.212.503.094</b>	<b>TOTAL CURRENT ASSETS</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Estimasi tagihan pajak	99.018.495	-	<i>Estimated claims for refundable tax</i>
Aset pajak tangguhan		-	<i>Deferred tax assets</i>
Piutang jangka panjang	88.500	503.743	<i>Non-current receivables</i>
Uang muka dan biaya dibayar di muka jangka panjang		29.641.419	<i>Long-term advances and prepaid expense</i>
Investasi jangka panjang	1.250.873.973	1.241.717.102	<i>Long-term investments</i>
Properti investasi, neto	116.416.362	120.407.967	<i>Investment property, net</i>
Aset tetap, neto	33.004.194.559	25.316.858.820	<i>Fixed assets, net</i>
Aset tak berwujud, neto	33.312.879	36.865.444	<i>Intangible assets, net</i>
Aset tidak lancar lainnya	125.325	10.609.591	<i>Other non-current assets</i>
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>34.504.030.093</b>	<b>26.756.604.086</b>	<b>TOTAL NON-CURRENT ASSETS</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>41.747.835.250</b>	<b>30.969.107.180</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
ENTITAS INDUK SAJA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
(lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2019  
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
PARENT ENTITY ONLY  
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
(continued)  
As of December 31, 2019  
(Expressed in thousands Rupiah,  
unless otherwise stated)**

	<b>31 Desember 2019/ December 31, 2019</b>	<b>31 Desember 2018/ December 31, 2018</b>	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS</b>			<b>LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha			Trade payables
Pihak ketiga	111.465.352	436.426.271	Third parties
Pihak berelasi	82.950.136	166.921.834	Related Parties
Utang lain-lain	3.372.442.736	3.984.929.420	Other payables
Pendapatan diterima di muka	126.558.184	139.439.828	Unearned revenues
Beban akrual	1.318.148.150	1.488.219.609	Accrued expenses
Utang pajak	335.615.627	308.075.772	Tax payables
Bagian jangka pendek pinjaman jangka panjang	483.165.313	918.167.263	Current maturities of long-term loans
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>5.830.345.498</b>	<b>7.442.179.997</b>	<b>TOTAL CURRENT LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Utang bank jangka panjang	16.503.981.968	5.347.552.550	Long-term liabilities
Utang obligasi dan Sukuk Ijarah	2.994.896.323	2.993.700.828	Bonds loan and Sukuk Ijarah
Utang jangka panjang lainnya	390.791.045	169.843.201	Other non-current liabilities
Liabilitas imbalan kerja karyawan	412.692.601	286.226.135	Employee benefits liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	68.729.872	85.652.386	Deferred tax liabilities
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>20.371.091.809</b>	<b>8.882.975.100</b>	<b>TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>26.201.437.307</b>	<b>16.325.155.097</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>			<b>EQUITY</b>
Modal Saham	6.414.412.000	6.414.412.000	Shares Capital
Modal dasar 12.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham Modal ditempatkan dan disetor 6.414.412 saham tahun 2018 dan 2017			Authorized capital 12.000.000 shares with par value of Rp1,000,000 per share Issued and paid-up 6,414,412 shares in year 2018 and 2017
Penyertaan modal negara	22.963.207	22.963.207	Government capital investment
Tambahan modal disetor	8.588.878	-	Addition paid in capital
Nilai buku aset tetap kenavigasian	(37.004.793)	(37.004.793)	Book value of fixed assets navigation
Akumulasi penyusutan aset tetap kenavigasian	408.393.524	408.393.524	Accumulated depreciation of navigation fixed assets
Penghasilan komprehensif lain	(65.696.335)	3.992.569	Other comprehensive income
Saldo laba			Retained earnings
Dicadangkan	7.779.477.782	6.116.787.720	Appropriated
Tidak dicadangkan	1.015.263.680	1.714.407.856	Unappropriated
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>15.546.397.943</b>	<b>14.643.952.083</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>41.747.835.250</b>	<b>30.969.107.180</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>



**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)**  
**ENTITAS INDUK SAJA**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN**  
**KOMPREHENSIF LAIN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Desember 2019**  
**(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)**  
**PARENT ENTITY ONLY**  
**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS**  
**AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**  
**For the Year Ended December 31, 2019**  
**(Expressed in thousand Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

	<b>Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,</b>		
	<b>2019</b>	<b>2018</b>	
<b>PENDAPATAN USAHA</b>			<b>OPERATING REVENUES</b>
Pendapatan aeronautika	4.992.124.803	5.118.182.759	<i>Aeronautical revenues</i>
Pendapatan non-aeronautika	2.834.620.799	2.566.121.880	<i>Non-aeronautical revenues</i>
<b>Total</b>	<b>7.826.745.602</b>	<b>7.684.304.639</b>	<b>Total</b>
Beban operasional bandara	(3.015.000.697)	(2.926.811.279)	<i>Airport operation expenses</i>
Beban pegawai	(1.344.763.855)	(1.361.158.247)	<i>Employee expenses</i>
Beban umum dan administrasi	(883.798.576)	(897.827.572)	<i>General administrative expenses</i>
Beban pemasaran	(23.747.937)	(34.070.962)	<i>Marketing expenses</i>
Penghasilan lain-lain	145.553.748	261.813.143	<i>Other income</i>
Beban lain-lain	(98.628.995)	(54.433.049)	<i>Other expenses</i>
<b>Laba Usaha</b>	<b>2.606.359.390</b>	<b>2.671.816.673</b>	<b>Operating Profit</b>
Penghasilan keuangan	186.433.090	158.631.629	<i>Finance income</i>
Beban keuangan	(830.752.648)	(248.462.889)	<i>Finance costs</i>
Bagian laba entitas asosiasi	(8.952.137)	2.552.005	<i>Equity income of associate entities</i>
<b>LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>	<b>1.953.087.595</b>	<b>2.584.537.418</b>	<b>PROFIT BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX</b>
Beban pajak final	(98.550.753)	(108.220.549)	<i>Final tax expense</i>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>	<b>1.854.536.842</b>	<b>2.476.316.869</b>	<b>PROFIT BEFORE CORPORATE INCOME TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN, NETO</b>	<b>(429.376.743)</b>	<b>(618.358.796)</b>	<b>CORPORATE INCOME TAX EXPENSE, NET</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.425.160.099</b>	<b>1.857.958.073</b>	<b>PROFIT FOR THE YEAR</b>

PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
 ENTITAS INDUK SAJA  
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
 KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)  
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal  
 31 Desember 2019  
 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
 PARENT ENTITY ONLY  
 STATEMENT OF PROFIT OR LOSS  
 AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
 (continued)  
 For the Year Ended December 31, 2019  
 (Expressed in thousand Rupiah,  
 unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>			<b>Item that will not be reclassified to profit or loss:</b>
Laba (rugi) belum terealisasi investasi efek	12.293.462	(2.769.906)	Unrealized gain (loss) on securities investment
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi</b>			<b>Items that will not be reclassified to profit or loss</b>
Rugi komperhensif entitas asosiasi	(2.466.064)	(1.551.198)	Loss comprehensif income from associate
Laba (rugi) aktuarial imbalan kerja karyawan	(79.516.302)	(66.770.702)	Actuarial gain (loss) on employee benefits
<b>Penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak</b>	<b>(69.688.904)</b>	<b>(71.091.806)</b>	<b>Other comprehensive income (loss) for the year after tax</b>
<b>Total penghasilan komprehensif tahun berjalan</b>	<b>1.355.471.195</b>	<b>1.786.866.267</b>	<b>Total comprehensive income for the year</b>

PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
ENTITAS INDUK SAJA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019  
(Disajikan Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
PARENT ENTITY ONLY  
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY  
For the Year Ended December 31, 2019  
(Expressed In thousands Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal saham ditempatkan dan disetor/ issued and paid shares capital	Penyertaan modal pemerintah/ Government capital investment	Tambah Modal Disetor/ Additional Paid-In Capital	Nilai buku aset kenavigasian/ Book value of fixed assets navigation	Akumulasi penyusutan aset tetap kenavigasian/ Accumulated depreciation of navigation fixed assets	Laba (rugi) belum direalisasi atas pemilikan efek/ Unrealized gain (loss) on marketable securities	Keuntungan (kerugian) aktuarial imbalan kerja/ Actuarial post Retirement benefits	Keuntungan (kerugian) entitas asosiasi/ Gain (loss) of associated entities	Saldo laba/Retained Earnings		Total ekuitas/ Total equity	
									Dicadangkan/ Appropriated	Belum dicadangkan/ Unappropriated		
Saldo per 31 Desember 2017	6.414.412.000	255.096.706	-	(269.138.292)	408.393.524	58.521.114	18.824.346	(2.261.085)	4.981.926.570	1.275.026.933	13.140.801.816	Balance as of December 31, 2017
Pembagian dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(283.716.000)	(283.716.000)	Dividend declared
Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	1.134.861.150	(1.134.861.150)	-	General reserved
Penyerahan modal pemerintah	-	(232.133.499)	-	232.133.499	-	-	-	-	-	-	-	Government capital investment
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Net income for the year
Pendapatan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.857.958.073	1.857.958.073	Other comprehensive income
Rugi belum direalisasi atas pemilikan efek	-	-	-	-	-	(2.769.906)	-	-	-	-	(2.769.906)	Unrealized gain (loss) on securities investment
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	-	-	-	-	(66.770.702)	(1.659.983)	-	-	(68.430.685)	Re-measurement of employee benefits liabilities
Revaluasi aset tetap	-	-	-	-	-	-	-	108.785	-	-	108.785	Revaluation of fixed asset
Saldo per 31 Desember 2018	6.414.412.000	22.963.207	-	(37.004.793)	408.393.524	55.751.208	(47.946.356)	(3.812.283)	6.116.787.720	1.714.407.856	14.643.952.083	Balance as of December 31, 2018
Pembagian dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(461.614.213)	(461.614.213)	Dividend declared
Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	1.662.690.062	(1.662.690.062)	-	General reserved
Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sependundi	-	-	8.588.878	-	-	-	-	-	-	-	8.588.878	Difference arising from business combination of entities under common control
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.425.160.099	1.425.160.099	Net income for the year
Pendapatan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Other comprehensive income
Rugi belum direalisasi atas pemilikan efek	-	-	-	-	-	12.293.462	-	-	-	-	12.293.462	Unrealized gain (loss) on securities investment
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	-	-	-	-	(79.516.302)	(2.466.064)	-	-	(81.982.366)	Re-measurement of employee benefits liabilities
Saldo per 31 Desember 2019	6.414.412.000	22.963.207	8.588.878	(37.004.793)	408.393.524	68.044.670	(127.462.658)	(6.278.347)	7.779.477.782	1.015.263.680	15.546.397.943	Balance as of December 31, 2019

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
ENTITAS INDUK SAJA  
LAPORAN ARUS KAS  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada  
Tanggal 31 Desember 2019  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
PARENT ENTITY ONLY  
STATEMENT OF CASH FLOWS  
For The Year Ended  
December 31, 2019  
(Expressed in thousands Rupiah,  
unless otherwise stated)**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31		
	2019	2018	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari pelanggan	7.770.864.365	7.543.073.998	Receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(5.616.929.326)	(4.403.052.592)	Cash payment to suppliers and employees
Kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi	2.153.935.039	3.140.021.406	Net cash from receipt and payment
Pembayaran pajak	(915.867.200)	(733.849.286)	Tax payment
<b>Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>1.238.067.839</b>	<b>2.406.172.120</b>	<b>Net cash provided by operating activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari (pengeluaran untuk) investasi jangka pendek	(187.755.531)	(81.150.806)	Received from (payment for) short-term investment
Pengeluaran untuk investasi jangka panjang	(21.891.660)	(13.361.105)	Payment for long-term investment
Penambahan aset tetap	(9.106.876.809)	(5.392.889.435)	Addition in fixed assets
Penerimaan bunga deposito dan jasa giro	186.433.090	158.631.629	Interest from deposits and checking accounts
<b>Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(9.130.090.910)</b>	<b>(5.328.769.717)</b>	<b>Net cash used in investing activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITY</b>
Penerimaan (pembayaran) pinjaman jangka panjang	10.777.280.597	2.031.826.218	Proceed (payment) on long-term loans
Pembayaran dividen kas	(461.614.213)	(283.716.000)	Payments of cash dividends
<b>Kas bersih yang diperoleh (digunakan) untuk aktivitas pendanaan</b>	<b>10.315.666.384</b>	<b>1.748.110.218</b>	<b>Net cash provided (used) by financing activities</b>
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	26.075.206	53.767.027	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
<b>PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>2.449.718.519</b>	<b>(1.120.720.352)</b>	<b>DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>2.708.714.010</b>	<b>3.829.434.362</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>5.158.432.529</b>	<b>2.708.714.010</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR</b>

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)**  
**ENTITAS INDUK SAJA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk**  
**Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)**  
**PARENT ENTITY ONLY**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2019 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in thousand Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk**

Laporan keuangan tersendiri Entitas Induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri". PSAK No. 4 (Revisi 2009) mengatur dalam hal entitas memilih untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh Entitas Induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto investee. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak dan entitas asosiasi. Sesuai dengan PSAK No. 4 (Revisi 2009), Entitas Induk mencatat penyertaan pada entitas anak dan entitas asosiasi dengan menggunakan metode biaya. Entitas Induk juga mengakui dividen dari entitas anak dan entitas asosiasi pada laporan laba rugi dalam laporan keuangan tersendiri ketika hak menerima dividen ditetapkan.

**2. INVESTASI JANGKA PANJANG**

Investasi jangka panjang Entitas induk terdiri dari penyertaan saham dan obligasi dengan rincian sebagai berikut:

	<b>31 Desember/December 31,</b>	
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Penyertaan saham	1.225.526.674	1.228.355.997
Obligasi	25.347.299	13.361.105
<b>Total</b>	<b>1.250.873.973</b>	<b>1.241.717.102</b>

**1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

**a. Basis of preparation of the separate financial statements of the parent entity**

*The separate financial statements of the Parent Entity are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") No. 4 (Revised 2009), "Consolidated and Separate Financial Statements". PSAK No. (Revised 2009) regulates that when an entity elected to present the separate financial statements, such financial statements should be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by a Parent Entity, in which the investments are accounted for on the basis of the direct equity interest rather than on the basis of the reported results and net assets of the investees. Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity separate financial statements are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in subsidiaries and associates. In accordance with PSAK No. 4 (Revised 2009), the Parent Entity recorded the investments in subsidiaries and associates using cost method. The Parent Entity also recognizes dividends from subsidiaries and associate in profit or loss in its separate financial statements when its right to receive the dividends is established.*

**2. LONG-TERM INVESTMENTS**

*The Parent Entity's long term investments consist of investments in shares and bond with details are as follow:*

*Investment in shares  
Bond*

**Total**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
ENTITAS INDUK SAJA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)  
PARENT ENTITY ONLY  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2019 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)**

a. Penyertaan saham

Informasi mengenai entitas anak dan asosiasi yang dimiliki Kelompok Usaha diungkapkan dalam Catatan 1c dan 13 atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Entitas Induk memiliki penyertaan saham sebagai berikut:

	Persentase Kepemilikan/ Percentage of ownership	Biaya perolehan 31 Desember 2019/ Acquisition cost December 31, 2019	Persentase Kepemilikan/ Percentage of ownership	Biaya perolehan 31 Desember 2018/ Acquisition cost December 31, 2018
<u>Entitas Anak/Subsidiaries</u>				
PT Angkasa Pura Support	99,81%	250.000.000	99,81%	250.000.000
PT Angkasa Pura Properti	99,96%	167.940.000	99,96%	167.940.000
PT Angkasa Pura Hotel	99,99%	649.864.789	99,99%	649.864.789
PT Angkasa Pura Logistik	98,00%	24.500.000	98,00%	24.500.000
PT Angkasa Pura Retail	97,50%	48.750.000	97,50%	48.750.000
<u>Entitas Asosiasi/Associates</u>				
PT Gapura Angkasa	7,76%	55.511.460	10,00%	45.682.461
PT Jasa Marga Bali Tol	8,00%	28.960.425	8,00%	40.617.939
Total		1.225.526.674		1.227.355.189

b. Obligasi

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Entitas Induk memiliki obligasi sebagai berikut:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019		31 Desember 2018/ December 31, 2018		
	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	
RI0148	15.206.000	15.277.199	15.206.000	13.361.105	RI0148
BEXI04BCN7	10.000.000	10.070.100	-	-	BEXI04BCN7

**3. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN ENTITAS ANAK**

Entitas Induk mempunyai transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak entitas anak berikut:

Pihak berelasi/Related parties	Piutang usaha/Trade receivables	Utang usaha/Trade payables
PT Angkasa Pura Logistik	5.240.637	43.597
PT Angkasa Pura Properti	49.104	1.595.172
PT Angkasa Pura Hotel	30.104.683	950.053
PT Angkasa Pura Suport	995.149	10.472.747
PT Angkasa Pura Retail	18.770.603	576.182

**2. LONG-TERM INVESTMENTS (continued)**

a. Investment in shares

Information pertaining to subsidiaries and associates owned by the Group is disclosed in Notes 1c and 13 to the Consolidated Financial Statements.

As of December 31, 2019 and 2018, the Parent Entity has investment in shares as follow:

b. Bonds

As of December 31, 2019 and 2018, the Parent Entity has bond as follow :

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)**  
**ENTITAS INDUK SAJA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk**  
**Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)**  
**PARENT ENTITY ONLY**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2019 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**4. AKTIVITAS NON KAS**

Transaksi non-kas terdiri dari:

**4. NON-CASH TRANSACTIONS**

Non-cash transaction consists of:

	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	<u>31 Desember 2018/ December 31, 2018</u>	
Kapitalisasi biaya pinjaman ke aset tetap	286.653.622	320.056.625	<i>Capitalization of borrowing costs</i>

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut :

*Movement of liabilities arising from financing activities in the statement of cash flows are as follows:*

	<b>Non-arus kas/Non-cash flow</b>					
	<u>1 Januari 2019/ January 1, 2019</u>	<u>Arus kas/ Cash flow</u>	<u>Selisih kurs/ Foreign exchange difference</u>	<u>Lainnya/ Other</u>		<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>
Pinjaman bank jangka panjang	6.327.995.013	10.970.851.262	-	(35.662.231)	17.263.184.044	<i>Long-term bank loans</i>
Pinjaman bank jangka pendek	105.631.070	52.379.600	-	-	158.010.670	<i>Short-term bank loans</i>
Obligasi dan sukuk ijarah	2.993.700.828	-	-	1.195.495	2.994.896.323	<i>Bonds payable and sukuk ijarah</i>
<b>Total</b>	<b>9.427.326.911</b>	<b>11.023.230.862</b>	-	<b>(34.466.736)</b>	<b>20.416.091.037</b>	<b>Total</b>

	<b>Non-arus kas/Non-cash flow</b>					
	<u>1 Januari 2018/ January 1, 2018</u>	<u>Arus kas/ Cash flow</u>	<u>Selisih kurs/ Foreign exchange difference</u>	<u>Lainnya/ Other</u>		<u>31 Desember 2018/ December 31, 2018</u>
Pinjaman bank jangka panjang	4.308.921.739	2.056.782.957	-	(37.709.683)	6.327.995.013	<i>Long-term bank loans</i>
Pinjaman bank jangka pendek	77.711.102	27.919.968	-	-	105.631.070	<i>Short-term bank loans</i>
Obligasi dan sukuk ijarah	2.992.474.960	-	-	1.225.868	2.993.700.828	<i>Bonds payable and sukuk ijarah</i>
<b>Total</b>	<b>7.379.107.801</b>	<b>2.084.702.925</b>	-	<b>(36.483.815)</b>	<b>9.427.326.911</b>	<b>Total</b>





**AngkasaPura | AIRPORTS**

**PT Angkasa Pura I (Persero)**

Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B12 Kav.2  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta - Indonesia

Telp : 021 6541961

Faks : 021 6541514

E-mail : [humas@ap1.co.id](mailto:humas@ap1.co.id)

Website : [www.ap1.co.id](http://www.ap1.co.id)